

PEMERINTAH KABUPATEN
BANGKA TENGAH



RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN
BANGKA TENGAH
TAHUN 2021



PEMERINTAH
KABUPATEN
BANGKA TENGAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

BAPPELITBANGDA
2020



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 ..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 secara berkelanjutan selama 1 (satu) tahun, perlu dilaksanakan perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengacu pada arah kebijakan dan sasaran Tahun 2021 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan mempedomani pada Rencana Kerja Pemerintah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
16. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 626), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen rencana kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada 31 Desember 2021.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangda adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disebut KUA APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
17. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara berdasarkan KUA APBD dan PPAS.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan Daerah antarwilayah, antarsektor pembangunan, dan antartingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2021 berfungsi sebagai:
 - a. pedoman penyusunan Renja-PD; dan
 - b. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

- (2) Dalam rangka penyusunan Renja-PD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 untuk:
- a. menyusun rancangan akhir Renja-PD; dan
 - b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-PD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyusunan RKPD meliputi:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. program prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja; dan
- c. sumber pendanaan dan prakiraan maju.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 5

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbangda RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja-PD berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra-PD serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Daerah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2021.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMN, RPJMD, RKP Tahun 2021 dan program strategis nasional;
 - b. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMN, RPJMD, RKPD dan program strategis provinsi Tahun 2021;
 - c. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2021; dan
 - d. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2021.
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2021.
- (4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2021.
- (5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI BANGKA TENGAH,



IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,



SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 928

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ke enam belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan pedoman bagi PD untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2021.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok

- sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1(satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
 3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
 4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2021 merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Provinsi terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2021.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 sebagai rencana pembangunan daerah, disusun dengan mendasari hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020 ini telah berdampak pada semua sektor kehidupan khususnya sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian target pembangunan dengan merelokasi dan merefokusing anggaran belanja secara besar-besaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Sementara dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi sesuai dengan tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2021,

Pemerintah Daerah perlu menyajikan kebijakan terkait dengan prioritas dan upaya pemulihan pandemi Covid dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021.

Pandemi global COVID-19 telah mengakibatkan krisis multidimensi, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya termasuk keuangan negara. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan banyak hal yang dapat memberikan rasa nyaman, diayomi, dilindungi, dan perhatian kepada masyarakatnya. Masyarakat membutuhkan kepastian tentang bentuk pembatasan aktivitas, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan jaminan untuk bertahan hidup. Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak besar terhadap rencana pembangunan pemerintah. Efek Covid-19 akan ikut mempengaruhi proses pembangunan pada tahun 2021. Dampak terjadinya Pandemi Covid-19 terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2020 akan banyak mempengaruhi perekonomian masyarakat. Selain melemahkan pertumbuhan ekonomi, pandemic Covid 19 juga berimbas pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta berpotensi mendorong peningkatan angka pengangguran, kemiskinan dan mempengaruhi angka Indeks Pembangunan Manusia.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, *bottom-up* dan *top down*. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja, dan perencanaan pembiayaan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran yang berasal dari DPRD.

Selain itu, pendekatan politis bermakna bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan melalui program-program pembangunan yang merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah pada saat kampanye.

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Perencanaan dengan

pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, dengan maksud untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkan kebanggaan rasa memiliki. Pendekatan *bottom up* dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, sedangkan *top down* menekankan bahwa tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah mengacu pada tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2021 dan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 juga dilakukan melalui peningkatan kualitas kebijakan *Money Follows Programme* melalui pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial. Penguatan implementasi *Money Follows Programme* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dan penerapan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program serta sumber pendanaan. Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah. Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Gambar 1.1 Penjabaran Dokumen RKPD Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 270);

24. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 845).

1.3. Hubungan antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD digunakan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang memuat mengenai arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKPD merupakan dokumen terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD, dan (5) Renja-PD.

Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap PD.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja PD.

RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2021 merupakan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu (*e-planning* dan *e-budgeting*) sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penyusunan RKPD 2021 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari RPJPN 2005–2025 dengan demikian dokumen RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 dapat lebih integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses yang sistematis, RKPD diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA dan PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) tahun 2021. Kedua dokumen ini dijadikan dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2021. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021.

1. Hubungan RKPD dengan RKP Tahun 2021

Keterkaitan RKPD Tahun 2021 dengan RKP Tahun 2021 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Dalam menyusun dokumen RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2021.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2021, yaitu:

“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”,

maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2021, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi secara Nasional berkisar 4,5 - 5,5 persen.
2. Inflasi secara Nasional berkisar antara 3 persen.
3. Tingkat Kemiskinan berkisar 9,2 – 9,7 persen.
4. IPM menjadi 72,78 – 72,90.
5. Gini Rasio pada kisaran 0,377 – 0,379.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka 7,5 – 8,2 persen.
7. Strategi pembangunan Wilayah Sumatera akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

2. Hubungan RKPD dengan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun kedua dari periode keempat (Periode 2017-2022) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan Tahun 2025”**. Visi tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari
 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM
 3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah
 4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
 5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya Visi Misi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025, maka pembangunan daerah Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 tahap ke IV (2017-2022)

diarahkan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.

Pembangunan daerah Tahun 2021 adalah bagian dari tahap ke IV (2017–2022) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Tahun 2021 merupakan tahun keempat dari RPJMD Tahun 2017-2022.

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2021 adalah **“Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Dasar”**.

3. Hubungan RKPD dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya Visi Misi RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021, maka pembangunan daerah Tahun 2021 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 diarahkan pada upaya pemerintah diharapkan lebih memfokuskan perhatiannya pada kebijakan dan upaya konkrit untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya, seperti perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Strategi pembangunan yang dapat diterapkan adalah dengan memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Dalam proses pembangunan ekonomi ini, pemerintah hendaknya tetap menerapkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD ini dan penetapan tema RKP 2021 serta RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengintegrasikan tema RKPD 2021 menjadi: **“Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan Dasar”**.

4. Hubungan RKPD dengan RTRW Kabupaten Bangka Tengah

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang daerah di Kabupaten Bangka Tengah. Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.

5. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan KUA – PPAS Tahun 2021

RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahunan yang menggambarkan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2021, hasil penelaahan reses DPRD, Musrenbang, dan Forum Perangkat Daerah serta penelaahan usulan langsung dari masyarakat yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD Tahun 2021 menjadi acuan dalam proses penyusunan rancangan APBD Tahun 2021 yang juga terdiri dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) untuk dibahas dan disepakati antara Bupati dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka Tengah.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Bangka Tengah dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 berfungsi sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2021;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2021;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-PD Tahun 2021;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
5. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Adapun sistematika penyajian RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penyusunan dokumen RKPD yang menjelaskan pengertian ringkas RKPD dan proses penyusunan RKPD, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen yang menjelaskan keterkaitan RKPD dengan dokumen lain, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta kaitannya dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD serta sistematika penyusunan dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah yang menyajikan secara logis dasar-dasar analisis dan kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah yang berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan. Bab ini berisi uraian mengenai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang berisi tema pembangunan serta prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berisikan uraian tentang program-program yang memerlukan prioritas berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam dokumen RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Merupakan kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografis

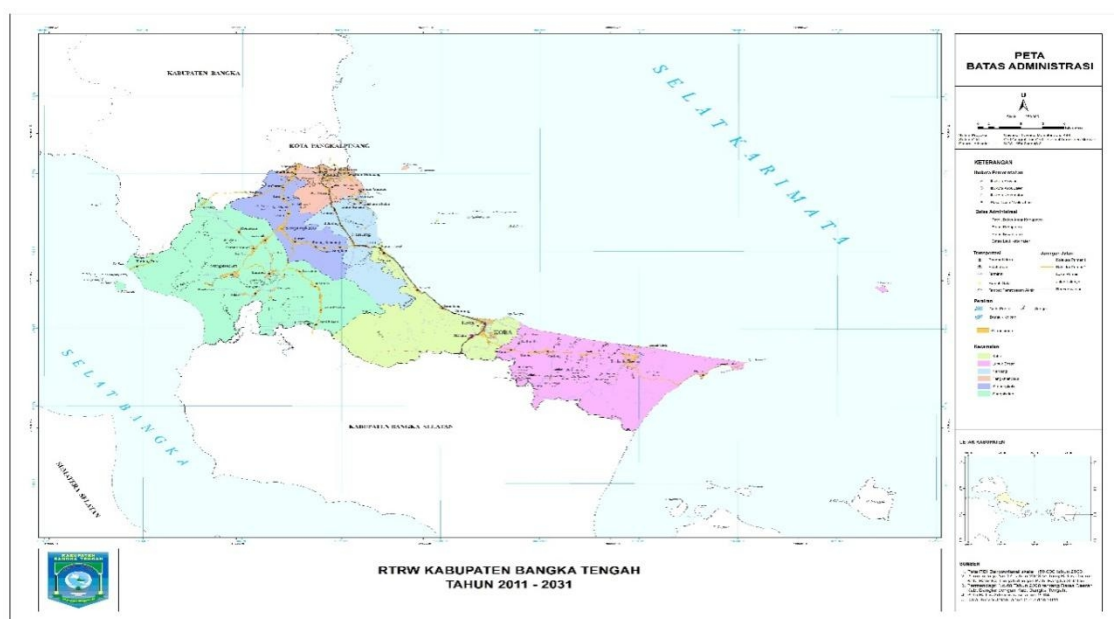
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak, Luas, dan Wilayah Administrasi

Wilayah Kabupaten Bangka Tengah terletak di Pulau Bangka dengan luas 226.902,94 Ha (dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua koma sembilan puluh empat) ditambah lautan seluas kurang lebih 197.464,62 (seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma enam puluh dua) hektar. Batas wilayah Kabupaten Bangka Tengah dinyatakan sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bangka.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bangka Selatan.

Gambar II.1.
Peta Wilayah Kabupaten Bangka Tengah



Sumber: DPUTRP Kabupaten Bangka Tengah, 2020

2.1.1.2 Letak dan kondisi geografis

Kabupaten Bangka Tengah terletak antara 105° 48' BT - 106° 51' BT dan 2° 11' LS - 2° 46' LS, dengan Ibukota Koba yang berjarak 58 km dari Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.1.1.3 Topografi

Wilayah Kabupaten Bangka Tengah memiliki kemiringan lereng yang bervariasi yaitu antara < 2% sampai dengan > 40%. Kemiringan lereng > 16-25%, 14-40%, dan > 45% sebagian besar terdapat di bagian Utara Wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan di sebagian kecil di bagian selatan. Kemiringan lereng < 2% sampai dengan 15% sebagian besar terdapat di bagian tengah, barat dan selatan wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Ditinjau letak ketinggian dari permukaan air laut, topografi Kabupaten Bangka Tengah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu:

1. Ketinggian antara 0-100 m.
2. Ketinggian antara 100-500 m.

2.1.1.4 Hidrologi

Pada umumnya sungai-sungai di daerah Kabupaten Bangka Tengah berhulu di daerah perbukitan dan pegunungan dan bermuara di pantai laut. Sungai-sungai yang terdapat di daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah: Sungai Mesu, Sungai Selan, Sungai Kurau dan lain-lain. Sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai sarana transportasi dan belum bermanfaat untuk pertanian dan perikanan karena para nelayan lebih cenderung mencari ikan ke laut. Pada dasarnya di daerah Kabupaten Bangka Tengah tidak ada danau alam, hanya ada bekas penambangan bijih timah yang luas dan hingga menjadikannya seperti danau buatan yang disebut *kolong*.

Tabel II.1.
Data Sungai di Kabupaten Bangka Tengah

Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (Km)
(1)	(2)	(3)
Pangkalan Baru	S. Mesu	10,173
	S. Pedindang	12,679
Sungaiselan	S. Sembulan	10,645
	S. Pelabur	8,330
	S. Selan	33,663
	S. Kambuk	9,391
	S. Kepoh	7,683
	S. Jirak	15,058
	S. Bangka Kota	26,563
	S. Buak	24,598
	S. Celau	11,554
	S. Seruk	18,895
	S. Gelang	1,253
Koba	S. Sinar Bulan	2,105
	S. Cauyan	1,298
	S. Berok	2,882
	S. Risi	12,357
	S. Guntung	6,261
	S. Kurau	44,577
	S. Bemban	12,297
	S. Kabung	5,549
	S. Nibung	6,010
	S. Sisil	8,404
	S. Bedengung	4,525
Lubuk Besar	S. Lingkuk	7,510
	S. Kulur	9,538
	S. Kayuara	8,407
	S. Trubus	3,642
	S. Bakas	4,721
	S. Ketiak	11,918
	S. Perlang	3,437
Simpang Katis	S. Puput	15,813
Namang	S. Munjang	7,684
	S. Benuang	7,310
	S. Pelawan	12,509

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

2.1.1.5 Klimatologi;

Klimatologi di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 – 2019 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.2.

Jumlah Curah Hujan di Kabupaten Bangka Tengah

Tahun	Rata-rata Curah Hujan	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kecepatan Angin (knots)	Arah Angin	Rata-rata Penyinaran Matahari	Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (mb)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2015	176,58	27,16	4,30	4,30	57,75	79,42	1013,17
2016	281,78	27,04	3,33	3,33	37,50	84,33	1012,16
2017	189,17	26,52	3,33	3,33	42,25	84,33	1012,78
2018	183,00	26,52	2,60	2,60	51,19	86,33	1012,21
2019	197,97	26,68	7,45	7,45	43,67	87,08	1010,32

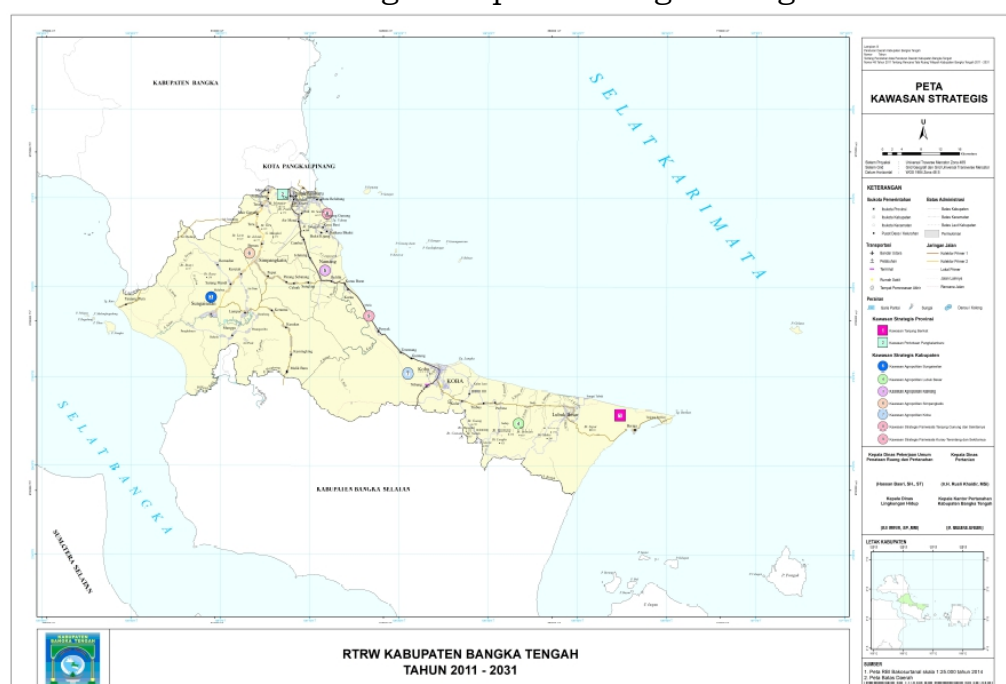
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Di bawah ini adalah Peta Pola Ruang Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011-2031.

Gambar II.2.

Peta Pola Ruang Kabupaten Bangka Tengah



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Berdasarkan kebijakan dan arahan pemanfaatan pola ruang dari RTRW Kabupaten Bangka Tengah yaitu diarahkan pada:

a) Kawasan Peruntukkan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian sumber daya alam dari kegiatan budidaya sehingga membentuk fungsi lindung dari ekosistem suatu wilayah. Penetapan kawasan lindung bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kawasan-kawasan sekitar dalam memasok air, mencegah longsor, meminimalisasi dampak gempa bumi, dan menjaga fungsi hidrologi ekosistem danau dan sekitarnya.

Masing-masing kelompok kawasan tersebut dikembangkan berdasarkan permasalahan kondisi eksisting dan potensi-potensi yang ada, baik potensi eksisting kawasan maupun kawasan baru yang berpotensi dikembangkan menjadi kawasan non budidaya. Pertimbangan penambangan kawasan baru sebagai kawasan non budidaya didasarkan atas kondisi topografi, kelerengan, kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

Di bawah ini adalah tabel rencana kawasan lindung di Kabupaten Bangka Tengah sesuai Perda RTRW Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.3.
Rencana Kawasan Lindung

No.	Rencana Kawasan Lindung	Luas (Ha)
I	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	
	• Kawasan Hutan Lindung	32.348,99
	• Kawasan Resapan air	10,96
II	Kawasan Perlindungan Setempat	
	• Sempadan Pantai	532,90

	• Sempadan Sungai	833,38
	• Kawasan sekitar danau atau waduk atau kolong	108,29
	• Kawasan lindung kearifan lokal	47,05
III	Kawasan Konservasi	
	• Kawasan Suaka Alam	50,83
	• Kawasan Pelestarian Alam	6.009,51
IV	Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan	
	• Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	337,33
Total		40.210,28

Keterangan :

*) Sempadan Sungai hanya pada sungai besar yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang dibuffer 100 m dari tepi sungai atau menyesuaikan dengan kondisi dilapangan dari garis Zona Inti Sempadan dan berada di luar kawasan hutan

**) Luas area tergantung hasil perencanaan teknis

***)Untuk luas RTH konkretnya mengikuti RDTR

Berikut penjelasan dari tabel di atas.

I. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya terdiri atas:

a) Kawasan Hutan Lindung

Tabel II.4.

Persebaran Pola Ruang Kawasan Hutan Lindung

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Lubuk Besar	23.352,48
2.	Namang	1.276,13
3.	Koba	278,66
4.	Sungai Selan	7.441,73
TOTAL		32.348,99

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031

Didasari atas hasil analisa Hutan Lindung di Kabupaten Bangka Tengah, maka rencana pengembangan kawasan lindung secara umum adalah sebagai berikut:

(1) Hutan Lindung perlu dipertahankan keberadaannya dan keutuhannya untuk menjaga daya dukung serta keseimbangan ekosistem yang selain berfungsi sebagai *catchment area* (daerah

tangkapan air) juga diharapkan sebagai sumber air baku untuk kebutuhan masyarakat dan PDAM.

- (2) Kerusakan Hutan Lindung sebagian besar disebabkan oleh faktor manusia karena adanya pertambahan penduduk yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan usaha dan permukiman serta adanya penebangan liar, untuk itu segala penebangan liar atau perambah hutan segera dihentikan dan ditindak agar tidak terulang lagi pelanggaran lingkungan oleh masyarakat maupun instansi/ perusahaan.
- (3) Dengan perencanaan dan pengelolaan yang ketat terhadap keseimbangan lingkungan fungsi kawasan hutan (lindung, kota dan magrove) ditingkatkan, selain berfungsi sebagai kawasan hijau penyangga lingkungan juga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata dan daya tarik Kabupaten Bangka Tengah, dengan konsep “*Natural Conservation And Tourism*”.
- (4) Pembuatan Buffer Zone kawasan lindung.
- (5) Pemanfaatan kawasan hutan untuk dapat diakses oleh umum/masyarakat sehingga dapat menjadi bagian dari sistem kota, dengan pengelolaan dan pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi perambahan.
- (6) Reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis dengan metode kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat (pemberdayaan) dengan memanfaatkan lahan tidur.
- (7) Peningkatan pengawasan dengan melibatkan masyarakat sebagai alat kontrol.
- (8) Pengawasan dan pengendalian kuantitas sumberdaya air.
- (9) Pengelolaan sumberdaya hutan secara ADAPTIF.
- (10) Penempatan pos jaga pada tempat yang strategis.
- (11) Penambahan lokasi persemaian bibit.

b) Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan yang berguna sebagai sumber air. Tujuan perlindungan kawasan resapan air pada kawasan

hutan/rawa sungai dan *city ponds* adalah untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya, maupun kawasan yang bersangkutan. Kawasan resapan air di Kabupaten Bangka Tengah seluas 10,96 Ha yang berada di Desa Penyak Kecamatan Koba. Pengaturan terkait kawasan resapan air adalah sebagai berikut:

- Hutan lindung yang telah ada berdasarkan peraturan/perundangan yang berlaku tetap dipertahankan.
- Penggunaan lahan yang telah ada (permukiman, sawah, tegalan, tanaman tahunan/perkebunan, dan lain-lain) di dalam kawasan ini secara bertahap dialihkan ke arah usaha konservatif dan/atau dibatasi secara ketat, sehingga fungsi lindung yang diemban dapat dilaksanakan.
- Penggunaan lahan yang akan mengurangi fungsi konservasi secara bertahap dialihkan fungsinya sebagai lindung sesuai kemampuan dana yang ada.
- Penggunaan lahan baru tidak diperkenankan bila tidak menjamin fungsi lindung terhadap hidrologis, kecuali jenis penggunaan yang sifatnya tidak bisa dialihkan (menara TVRI, jaringan listrik, telepon, air minum dan lain-lain), hal tersebut tetap memperhatikan azas konservasi.
- Kolong-kolong bekas penambangan yang dianggap berpotensi besar sebagai resapan air di kawasan tersebut.

II. Kawasan perlindungan setempat meliputi:

- a. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum. Tujuan perlindungan sempadan pantai adalah untuk melindungi laut dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air laut dan kekayaan hayati di dalamnya, serta mencegah terjadinya abrasi pantai. Untuk melindungi

sempadan pantai dari aktifitas manusia, maka sempadan pantai harus ditanami dengan pohon bakau/mangrove sehingga fungsi perlindungan dapat tercapai. Sebagaimana kriteria penetapan sempadan sungai, maka kriteria penetapan sempadan pantai juga didasarkan kepada Keppres No.32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut maka harus disediakan buffer selebar 100 meter di sepanjang garis pantai, terutama pada garis pantai yang menerima arus gelombang laut lebih besar. Namun, di Kabupaten Bangka Tengah telah ada Jalan Kolektor sebelum adanya rencana tata ruang dibatasi pada jalan kolektor tersebut, dengan tetap melakukan pengamananan. Pengaturan lain ditanami dengan mangrove, pemisahan sempadan pantai dengan aktifitas manusia juga dapat dilakukan dengan membangun jalan sebagai pemisah antara pantai dan permukiman. Luas kawasan lindung sempadan pantai di Kabupaten Bangka Tengah adalah 532,90 Ha.

- b. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Tujuan perlindungan sempadan sungai adalah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya erosi sedimen pinggiran sungai. Sempadan sungai yang dilindungi ini ditanami berbagai tanaman keras sehingga fungsi perlindungan kawasan dapat tercapai, sekaligus sebagai jalur hijau. Adapun tanaman keras yang dapat dikembangkan di sempadan sungai antara lain tanaman buah-buahan seperti rambutan, mangga, nangka, durian, dan tanaman perkebunan seperti kopi.

Kriteria penetapan sempadan sungai dilakukan berdasarkan Keppres No.32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung dan Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 tentang Sempadan Sungai. Sesuai dengan kondisi dan karakteristik sungai-sungai yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki batas

pasang surut yang sangat besar dan juga wilayah DAS yang cukup datar, maka didalam RTRW ini ditetapkan garis sempadan untuk sungai-sungai besar sebesar $\pm >100$ meter dan untuk sungai-sungai kecil sebesar 50 meter. Dengan dasar pertimbangan Peraturan Menteri PU No. 63/PRT/1993 disusunlah suatu konsep sempadan sungai yang terdiri dari 2 (dua) zona, Zona Inti Sempadan dan Zona Pendukung Sempadan. Zona Inti Sempadan adalah 100 m dari tepi sungai dan zona pendukungnya adalah 400 m dari garis Zona Inti Sempadan. Dikarenakan tujuan sempadan sungai ini adalah untuk mencegah kerusakan sungai maka kegiatan manusia harus dijauhkan dari sempadan sungai tersebut.

Pencegahan terhadap munculnya aktifitas manusia di sempadan sungai dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya antara lain dengan memisahkan permukiman dari bantaran sungai dengan pagar, ruang terbuka hijau, dan jalan sebagai pemisah.

Kawasan sempadan sungai terdapat pada sebagian besar wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Tengah memiliki sungai besar, yaitu Sungai Kurau dan Sungai Selan. Dari perhitungan analisis GIS, luasan buffer sempadan sungai yang ada di Kabupaten Bangka Tengah di luar kawasan hutan adalah sebesar 833,38 Ha.

c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong

Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk. Penentuan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong dalam Kawasan Perkotaan ditetapkan paling sedikit selebar 50 m (lima puluh meter) dari garis tepi terluar Kolong/danau/waduk;
- Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong dalam kawasan di luar Kawasan Perkotaan ditetapkan paling sedikit

selebar 100 m (seratus meter) dari garis tepi terluar Kolong/danau/waduk; dan

- Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong tersebar di seluruh kecamatan seluas 108,29 Ha.

d. Kawasan Lindung Kearifan Lokal

Kawasan lindung kearifan lokal berupa taman keanekaragaman hayati dengan luas 47,05 Ha berada di Kecamatan Namang.

III. Kawasan Konservasi

Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Kawasan Konservasi di Kabupaten Bangka Tengah terdiri atas:

- a) Kawasan Suaka Alam yaitu Cagar Alam dan Cagar Alam Laut yang terdapat pada sebagian Pulau Gelasa seluas 50,83 Ha.
- b) Kawasan pelestarian alam yaitu Taman Hutan Raya Bukit Mangkol yang terdapat pada Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Namang dan Kecamatan Pangkalanbaru seluas 6.009,51 Ha.

IV. Kawasan Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam. Di Kabupaten Bangka Tengah terdapat kawasan ruang terbuka hijau perkotaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Persebaran RTH Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

Tabel II.5

Persebaran Sub Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Koba	190,59
2.	Pangkalanbaru	146,74
TOTAL		337,33

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031

b) Kawasan Peruntukkan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berdasarkan Perda RTRW, di Kabupaten Bangka Tengah dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) macam.

Tabel II.6
Rencana Kawasan Budidaya

No.	Rencana Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
I	Kawasan Hutan Produksi <ul style="list-style-type: none"> • Peruntukkan Hutan Produksi 	89.812,27
II	Kawasan Peruntukkan Industri <ul style="list-style-type: none"> • Industri Menengah 	287,57
III	Kawasan Pariwisata	1.621,37
IV	Kawasan Permukiman <ul style="list-style-type: none"> • Permukiman Perdesaan • Permukiman Perkotaan 	9.813,13 6.497,23
V	Kawasan Pertambangan <ul style="list-style-type: none"> • Mineral 	23.379,81
VI	Kawasan Pertanian <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Pertanian Tanaman Pangan • Kawasan Perkebunan 	197,80 53.194,50
VII	Kawasan Pertahanan dan Keamanan <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Pertahanan dan Keamanan 	46,74
VIII	Kawasan Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkantoran 	267,91
IX	Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 	33,61
Jumlah		185.151,94

Sumber : RTRW Kab.Bangka Tengah Tahun 2011-2031

Berikut penjelasan dari tabel di atas.

a) Kawasan hutan produksi

Beberapa areal kawasan hutan produksi saat ini merupakan areal pemukiman penduduk, perkampungan dan kebun penduduk. Hal ini seperti yang terlihat di Kecamatan Lubuk Besar. Penduduk menyatakan bahwa mereka sudah bermukim lama di Lubuk Besar sebelum kehutanan menetapkan daerah ini menjadi kawasan hutan.

Pemanfaatan kawasan hutan produksi yang selama ini telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah adalah penanaman kayu gaharu. Kawasan hutan produksi yang berupa semak belukar atau berupa hutan jarang dapat ditanami dengan tanaman cepat tumbuh dari jenis tanaman industri seperti sengon, eucalyptus, gmelina dan akasia. Beberapa lokasi yang berupa hutan produksi juga dikonversi menjadi perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawit.

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031, luas hutan produksi 89.812,27 Ha yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah, yaitu Kecamatan Koba, Kecamatan Sungaiselan, Kecamatan Simpangkatis, Kecamatan Namang, dan Kecamatan Lubuk Besar.

b) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri sedang di Kabupaten Bangka Tengah direncanakan berada di Kecamatan Namang dan Pangkalan baru seluas kurang lebih 287.57 Ha (dua ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh tujuh) yang disertai dengan kawasan pergudangan di Pangkalan Baru sebagai penunjang kegiatan tersebut. Untuk industri menengah terdapat di Kecamatan Namang seluas 140,57 Ha dan di Kecamatan Pangkalanbaru seluas 147 Ha.

c) Kawasan Pariwisata

Rencana Pengembangan Pariwisata mengikuti Konsep pengembangan 3A (*Access, Accomodation, Attraction*). Rencana pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Bangka Tengah dilakukan melalui pemanfaatan pantai berpasir putih yang indah sebagai daya tarik bagi wisatawan lokal maupun asing, penyediaan akses transportasi yang menghubungkan wilayah Bangka Tengah dengan destinasi wisata lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri, kekayaan kuliner Kabupaten Bangka Tengah dapat menjadi factor yang menarik bagi para wisatawan.

Kabupaten Bangka Tengah memiliki wisata yang menarik. Hampir seluruh bagian Pulau Bangka Belitung mempunyai banyak pantai yang

landai dan indah dengan pasir putihnya yang halus. Kondisi kepariwisataan di Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari wisata alam pantai dan sungai, alam/perbukitan dan hutan dan pariwisata buatan. Pariwisata buatan berada di Desa Batu Belubang, Kecamatan Pangkalanbaru seluas 156.97 Ha.

d) Kawasan Pertanian

Kawasan pengembangan pertanian lahan basah di Kabupaten Bangka Tengah diarahkan pada kawasan-kawasan yang memiliki kesesuaian lahan. Kawasan pengembangan pertanian lahan basah di Kabupaten Bangka Tengah digunakan untuk pertanian lahan basah yang berada di daerah dataran rendah, seperti pantai dan/atau daerah hilir. Daerah aliran sungai serta memiliki potensi untuk dapat dilalui jaringan irigasi alam dan buatan. Kemudian setelah kriteria teknis tersebut dipenuhi, aspek berikutnya yang dipertimbangkan adalah ketersediaan lahannya. Lahan-lahan yang diutamakan adalah lahan-lahan yang sudah tidak berhutan atau bukan merupakan kawasan hutan. Khusus untuk lahan-lahan potensial yang berada di kawasan lindung, tidak dijadikan salah satu kawasan pengembangan. Kawasan peruntukkan pertanian direncanakan seluas 53.794,38 Ha yang akan diarahkan pada areal kawasan pertanian tanaman pangan seluas 599,88 Ha, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan seluas 53.194,50 Ha. Jenis komoditas perkebunan yang dapat dikembangkan dan tersebar di seluruh Kecamatan antara lain, yaitu karet, kelapa sawit, dan lada.

Tabel II.7

Persebaran Sub Kawasan Perkebunan di Kabupaten Bangka Tengah

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Koba	8.889,08
2.	Lubuk Besar	1.055,85
3.	Namang	8.379,15
4.	Pangkalanbaru	1.022,28
5.	Simpangkatis	11.937,72
6.	Sungaiselan	21.910,42

TOTAL	53.194,50
--------------	------------------

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011-2031

e) Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Bangka Tengah terbagi menjadi kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Rencana pengembangan permukiman dan perumahan bertujuan untuk:

- a. Mendistribusikan perkembangan fisik, kependudukan, dan keramaian ke Kabupaten Bangka Tengah bagian Utara, Selatan dan Barat.
- b. Menyediakan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah dan proyeksinya di masa mendatang.
- c. Mengembangkan kawasan pemukiman yang baru di Kabupaten Bangka Tengah bagian Utara dan Barat.
- d. Pengelolaan kawasan permukiman dilakukan untuk menyediakan tempat bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan rencana struktur ruang, maka kawasan permukiman perkotaan yang direncanakan di Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari:

1. Kawasan Permukiman Perkotaan
 - a) Kawasan perkotaan di Kecamatan Pangkalan Baru yang berfungsi sebagai kesatuan wilayah perkotaan Pangkal Pinang.
 - b) Kawasan perkotaan di Kecamatan Koba yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan (ibukota Kabupaten Bangka Tengah) dan jasa perdagangan.
 - c) Kawasan perkotaan di setiap ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah.

2. Kawasan Permukiman Perdesaan

Permukiman perdesaan di Kabupaten Bangka Tengah umumnya permukiman ini dihuni oleh para pemukim yang bermata pencaharian sebagai petani dan sudah lama menetap di desa tersebut. Permukiman perdesaan ini umumnya sederhana namun sudah cukup layak untuk dihuni.

f) Kawasan Pertambangan dan Energi

Kawasan pertambangan mineral tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 23.379,81 Ha (dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma delapan puluh satu hektar) dan usulan penetapan wilayah pertambangan untuk mineral logam dan bukan logam serta batuan disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Kawasan Perikanan

Rencana Kawasan Perikanan di Kabupaten Bangka Tengah terdiri atas:

1. Pengembangan Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap diarahkan pada Kawasan potensial perikanan di perairan pantai laut Kabupaten meliputi perairan Selat Bangka, Selat Gaspar, Laut Jawa dan Selat Karimata.

2. Pengembangan Perikanan Budidaya

Pengembangan perikanan budidaya terdiri atas:

- Budidaya perikanan laut, seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) meliputi perairan Pulau Panjang-Pulau Semujur, Pulau Ketawai-Pulau Bebuar, Perairan Tanjung Beriga, dan perairan Pulau Nangka.
- Budidaya perikanan air payau, seluas 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar) tersebar di Kecamatan Sungaiselan, Kecamatan Pangkalanbaru, Kecamatan Lubuk Besar dan Kecamatan Koba.
- Budidaya perikanan air tawar, pada kolong seluas 200 Ha (dua ratus hektar) dan pada kolam seluas 500 Ha (lima ratus hektar).

3. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan perikanan

Pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Perikanan meliputi:

- Pembangunan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kawasan Perkotaan Sungaiselan, Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalanbaru dan Desa Kurau Kecamatan Koba.
- Pengembangan sarana penunjang kawasan peruntukan Perikanan dilakukan dengan menyediakan pangkalan pendaratan Perikanan di Kecamatan Pangkalanbaru, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Koba, Kecamatan Sungaiselan dan Kecamatan Koba.

Pengembangan wawasan minapolitan di Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan 3 kecamatan, yaitu:

- Kecamatan Pangkalanbaru (Desa Air Mesu, Tanjung Gunung dan Batu Beluban
- Kecamatan Koba (Desa Kurau Barat dan Kurau Timur.
- Kecamatan Namang (Desa Jelutung, Baskara Bhakti, dan Namang).

h) Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Berdasarkan Perda RTRW, Kawasan Pertahanan dan Keamanan

1. Kawasan pertahanan TNI AD seluas 33,28 Ha (tiga puluh tiga koma dua puluh delapan hektar) di Kecamatan Namang.
2. Markas Komando Brigadir Mobil POLDA Bangka Belitung seluas 13,46 Ha (tiga belas koma empat puluh enam hektar) di Kecamatan Pangkalanbaru.

i) Kawasan Perkantoran di Kabupaten Bangka Tengah terdiri atas:

Berdasarkan Perda RTRW, Kawasan Perkantoran di Kabupaten Bangka Tengah terdiri atas:

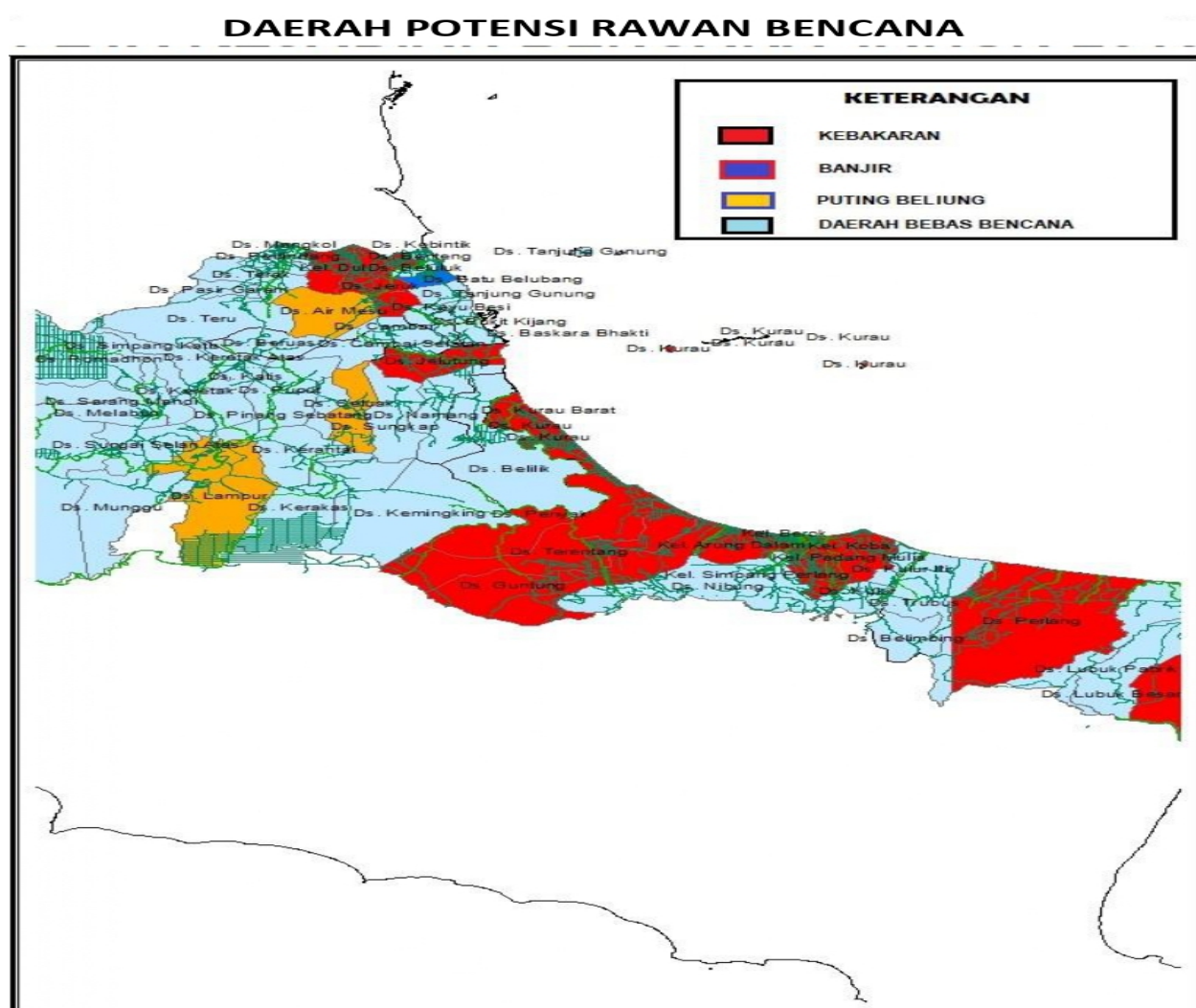
1. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah propinsi seluas 121,34 Ha (seratus dua puluh satu koma tiga puluh empat hektar).
 2. Kawasan peruntukan perkantoran kabupaten seluas 146,57 Ha (seratus empat puluh enam koma lima puluh tujuh hektar).
- j) Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
- Kawasan TPA di Kabupaten Bangka Tengah seluas 33,61 Ha (tiga puluh tiga koma enam puluh satu hektar) di Kecamatan Koba.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bangka Tengah meliputi:

- Kawasan Rawan Banjir
Kabupaten Bangka Tengah mempunyai potensi kerawanan banjir. Untuk mengantisipasi datangnya banjir, maka tindakan pencegahan banjir perlu dilakukan dengan membangun infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan. Selain menyediakan infrastruktur pencegah banjir, untuk daerah genangan yang diperkirakan akan menjadi daerah genangan banjir perlu diminimalkan aktifitasnya untuk mencegah kerugian yang terlampau besar.
- Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Aktifitas atau permukiman pada kawasan rawan gelombang pasang seyogyanya dipindahkan menjauhi batas pasang laut untuk menghindari kerugian. Daerah yang berpotensi rawan banjir dan rawan gelombang pasang meliputi wilayah pesisir pantai timur yakni Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Koba, Kecamatan Namang dan Kecamatan Sungai Selan.

Gambar II.3
Daerah Potensi Rawan Bencana Kabupaten Bangka Tengah
Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan



Peta daerah rawan bencana ini dibuat berdasarkan kejadian bencana yang terjadi pada Tahun 2019. Kejadian yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah tersebut yaitu kebakaran hutan dan lahan, banjir dan puting beliung. Kejadian Kebakaran lahan dan hutan merupakan kejadian yang sudah kerap kali terjadi setiap tahun. Kebakaran Lahan di Kabupaten Bangka Tengah biasanya sering terjadi diakibatkan pembukaan lahan dan pembersihan perkebunan. Berdasarkan kejadian yang terjadi, kejadian kebakaran lahan dan hutan ini terjadi pada masa – masa memasuki musim kemarau. Pada tahun 2019 kejadian kebakaran lahan yang terjadi dengan jumlah 85 dengan luasan keseluruhan ± 130 Ha, lokasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan di beberapa tempat/lokasi yaitu di Desa Terentang, Kelurahan Arung Dalam,

Kelurahan Simpang Perlang, Kelurahan Padang Mulia, Desa Penyak, Desa Kurau, Kelurahan Padang Baru, Desa Guntung.

Bencana Banjir yang terjadi pada Tahun 2019 yaitu :

1. Desa Batu Belubang diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi dan daerahnya merupakan cekungan dalam permukiman, kejadian banjir terjadi selama 7 jam.
2. Dusun Sadap Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar hal ini terjadi akibat curah hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dan merupakan lahan tambang timah rakyat, mengakibatkan plat duiker dan jalan desa tidak dapat dilalui.
3. Desa Kurau Timur diakibatkan oleh hujan yang cukup tinggi dan drainase yang tidak baik serta drainase yang ada tertutup oleh pasir kajadain banjir ini terjadi selama 7 jam dengan ketinggian air 15 – 30 cm.
4. Kelurahan Dul Kec Pangkalan Baru dengan lama kejadian 5 jam diakibatkan oleh hujan dan lokasi pembuangan serta tempat tampungan air yang sudah mengalami sedimentasi. Kejadian banjir ini terjadi selama 7 jam mengakibatkan beberapa rumah warga terendam air dengan ketinggian 30 cm s.d 70 cm.

Sedangkan angin Puting Beliung terjadi di Daerah Desa lampur, Desa Air Mesu, Desa Celuak. Kejadian angin puting beliung ini pada umumnya mengakibatkan beberapa rusaknya sebagian atap rumah warga.

2.1.4 Demografi

Kependudukan merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan terutama mengenai permasalahan jumlah, persebaran dan komposisi/strukturnya. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan perkembangan kependudukan pada hakekatnya harus dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahan, mobilitas penduduk dan laju pertumbuhan penduduk agar tercapai kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Data kependudukan skala nasional diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua 31 Desember pada tahun berkenaan. Data jumlah penduduk bersumber dari data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang telah diintegrasikan dengan database KTP Elektronik (KTP el) dan telah diolah untuk disajikan sebagai informasi dengan tetap mengacu pada prinsip keunggulan data. Data yang masuk dalam database penduduk nasional adalah data penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el di daerah tempat penduduk yang bersangkutan melakukan perekaman KTP-el.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/735/SJ Tanggal 13 Februari 2013 Hal Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan yang menyatakan bahwa "data kependudukan yang dapat disajikan untuk kepentingan apapun adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri".

Tabel II.8

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, Luas Daerah (Km²)

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk					Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		2015	2016	2017	2018	2019	Total
Koba	390,54	35.984	37.846	38.631	40.069	41.251	105,62
Lubuk Besar	546,10	25.229	26.599	27.399	28.748	29.757	54,49
Pangkalan Baru	109,45	36.608	38.374	38.964	39.735	40.616	371,09
Namang	204,04	14.828	15.356	15.654	16.002	16.351	80,14
Sungai Selan	789,83	31.152	32.337	32.600	33.277	33.923	42,95
Simpang Katis	229,07	22.923	23.866	24.087	24.455	24.885	108,64
Jumlah	2.269,02	166.724	174.378	177.335	182.286	186.783	747,53

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Data hasil registrasi penduduk Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2019 adalah 186.783 jiwa yang tersebar di 6 (enam) kecamatan. Berdasarkan tabel di atas, kecamatan yang memiliki kepadatan terendah pada Tahun 2019 ialah Kecamatan Sungaiselan dengan kepadatan 42,95 jiwa/Km² dengan luas wilayah 789.83 Km², sedangkan Lubuk Besar dengan jumlah kepadatan

54,49 jiwa/Km² dari luas wilayah 546,10 Km². Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Pangkalan Baru dimana rata-rata setiap km² dihuni oleh 371.09 jiwa dan Kecamatan Koba dengan kepadatan yaitu 105.62 jiwa/Km² dan Kecamatan Simpang Katis dengan kepadatan 108.64 jiwa/Km² serta Kecamatan Namang dengan kepadatan 80.14 jiwa/Km².

Tabel II.9
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

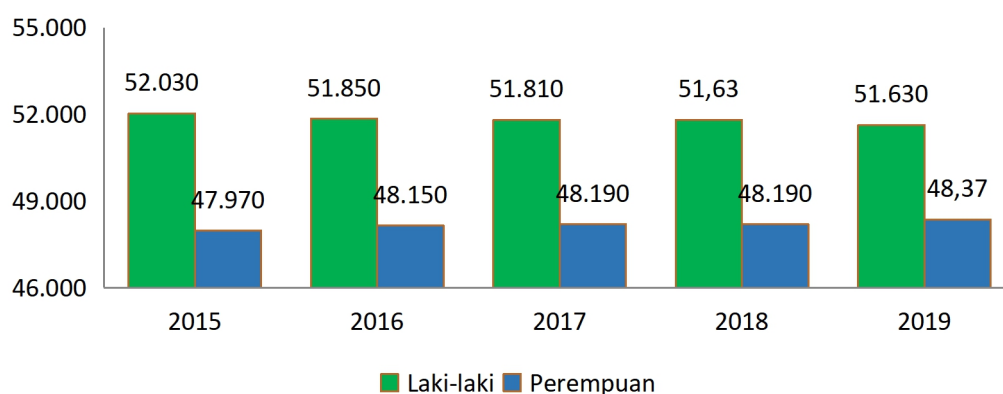
Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Koba	18.714	17.270	19.629	18.217	19.984	18.647	20.661	19.408	21.267	19.984
Pangkalan Baru	18.734	17.874	19.604	18.770	19.927	19.037	20.242	19.493	20.705	19.911
Sungai Selan	16.374	14.778	17.009	15.328	17.098	15.502	17.323	15.954	17.685	16.238
Simpang Katis	11.926	10.997	12.318	11.548	12.436	11.651	12.563	11.892	12.789	12.096
Namang	7.750	7.078	7.969	7.387	8.143	7.511	8.350	7.652	8.507	7.844
Lubuk Besar	13.249	11.980	13.885	12.714	14.290	13.109	14.969	13.779	15.490	14.267
Jumlah	86.747	79.977	90.414	83.964	91.878	85.457	94.108	88.178	96.443	90.340
Total	166.724		174.378		177.335		182.286		186.783	
%	52,03	47,97	51,85	48,15	51,81	48,19	51,63	48,37	51,63	48,36
selisih (%)	4,06		3,70		3,62		3,25		3,26	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki sebanyak 96.443 jiwa atau sekitar 51,63% dari seluruh penduduk dan penduduk perempuan sebanyak 90.340 jiwa atau 48,36% dari seluruh penduduk atau berbeda hanya sebanyak 6.103 jiwa atau 3,26%. Jumlah penduduk terbanyak pada Tahun 2019 berada di Kecamatan Koba sebanyak 41.251 jiwa.

Presentase jumlah penduduk menurut jenis kelamin disajikan pada grafik di bawah ini.

Grafik II.1.
Persentase Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka Tengah, 2020

Untuk keperluan perencanaan, rasio jenis kelamin merupakan informasi yang cukup penting. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat menghasilkan ukuran demografi Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*). *Sex ratio* menggambarkan berapa jumlah penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Di bawah ini adalah tabel *sex ratio* di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.10
Sex Ratio di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
Koba	108,36	107,75	107,17	106,46	106,42
Pangkalan Baru	104,81	104,44	104,68	103,84	103,99
Sungai Selan	110,80	110,97	110,30	108,58	108,91
Simpang Katis	108,45	106,67	106,74	105,64	105,73
Namang	109,49	107,88	108,41	109,12	108,45
Lubuk Besar	110,59	109,21	109,01	108,64	108,57
Total	108,36	107,68	107,51	106,73	106,76

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2019 *sex ratio* Kabupaten Bangka Tengah sebesar 106,76%. *Sex ratio* tertinggi adalah di Kecamatan Sungaiselan sebesar 108,91% disusul Kecamatan Lubuk Besar sebesar 108,57% dan Kecamatan Namang sebesar 108,45%. Sedangkan *sex ratio* paling rendah adalah Kecamatan Pangkalan Baru sebesar 103,98% disusul

Kecamatan Simpangkatis sebesar 105,73% dan Kecamatan Koba sebesar 106,42%.

Tabel II.11
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2015-2019

USIA	TAHUN									
	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
0 – 4	14.133	8.48	15.451	8.86	13.370	7.54	11.673	6.40	14.725	8,02
5 – 9	16.867	10.12	17.476	10.02	18.059	10.18	18.838	10.33	20.006	10,89
10 – 14	16.244	9.74	17.047	9.78	17.501	9.87	17.586	9.64	18.409	10,02
15 – 19	14.651	8.79	14.157	8.12	15.128	8.53	14.789	8.11	12.950	7,05
20 – 24	13.886	8.33	14.114	8.09	14.084	7.94	14.396	7.89	14.845	8,08
25 – 29	17.179	10.30	17.051	9.78	16.663	9.40	14.857	8.15	14.845	8,08
30 – 34	16.221	9.73	17.594	10.09	17.808	10.04	18.153	9.95	18.508	10,07
35 – 39	13.733	8.24	14.776	8.47	15.979	9.01	17.237	9.45	14.522	7,91
40 – 44	10.814	6.49	11.806	6.77	12.372	6.98	13.753	7.54	13.984	7,61
45 – 49	9.010	5.40	9.412	5.40	10.042	5.66	10.883	5.97	10.964	5.97
50 – 54	7.639	4.58	7.940	4.55	8.051	4.54	8.986	4.92	9.007	4,90
55 – 59	6.680	4.01	6.994	4.01	7.125	4.02	7.443	4.08	7.393	4,02
60 – 64	4.211	2.53	4.638	2.66	4.859	2.74	5.866	3.21	5.759	3,13
65 – 69	5.456	3.27	5.922	3.40	6.294	3.55	3.727	2.04	3.650	1,99
70 – 74	-	-	-	-	-	-	1.848	1.02	1.980	1,08
>74	-	-	-	-	-	-	2.251	1.23	2.157	1,17
TOTAL	166.724	100.00	174.378	100.00	177.335	100.00	182.286	100.00	186.783	100.00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka Tengah, 2020

Tabel II.12
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2015-2019

PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK									
	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Tidak/belum pernah sekolah	56.021	33.60	58.568	33.59	60.156	33.92	39.540	21.69	37.195	19,92
Tidak/blm tamat SD	-	-	-	-	-	-	23.272	12.76	27.519	14,73
SD	63.156	37.88	64.905	37.22	65.392	36.87	65.702	36.04	66.854	35,80
SLTP	18.846	11.30	19.692	11.29	20.300	11.45	20.693	11.35	21.208	11,36
SLTA	23.665	14.19	25.488	14.62	25.475	14.37	26.524	14.55	27.167	14,55
D I - D 3	1.995	1.20	2.146	1.23	2.182	1.23	2.221	1.21	2.257	1,21
D4 - S1	2.957	1.77	3.472	1.99	3.706	2.09	4.192	2.29	4.427	2,37
S2	81	0.05	103	0.06	117	0.07	134	0.07	149	0,08
S3	3	0.00	4	0.00	7	0.00	8	0.00	7	0.00
TOTAL	166.724	100	174.378	100	177.335	100	182.286	100	186.763	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka Tengah, 2020

Partisipasi dan kesadaran penduduk untuk melakukan update data keluarga juga masih rendah. Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), masyarakat yang berpendidikan tamat SD ke bawah sangat tinggi yaitu berjumlah 131.568

jiwa dari jumlah penduduk 186.763 Jiwa (70,45%) sehingga hal tersebut menjadi salah satu kendala dan berpengaruh dalam melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah.

Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi (Migrasi Internal) atau batas politik/negara (Migrasi International) atau dengan cara lain migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah ke daerah lain yang terjadi karena adanya perbedaan kondisi kedua daerah tersebut. Perbedaan terbesar yang mendorong terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan non ekonomi. Migrasi juga dipengaruhi oleh daya dorong suatu daerah dan daya tarik daerah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke daerah lain, seperti perkembangan industri, perdagangan, pendidikan, perumahan, dan transportasi. Dengan kata lain suatu daerah mempunyai daya tarik jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik bagi penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk disekitarnya dan daerah-daerah lain. Kondisi ini diminati oleh penduduk daerah lain yang berharap dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya untuk memberikan jaminan kehidupan.

Pada sisi lain, setiap daerah mempunyai faktor pendorong yang dapat menyebabkan sejumlah penduduknya migrasi keluar daerah. Faktor pendorong itu antara lain kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan, dan kondisi lingkungan yang kurang baik.

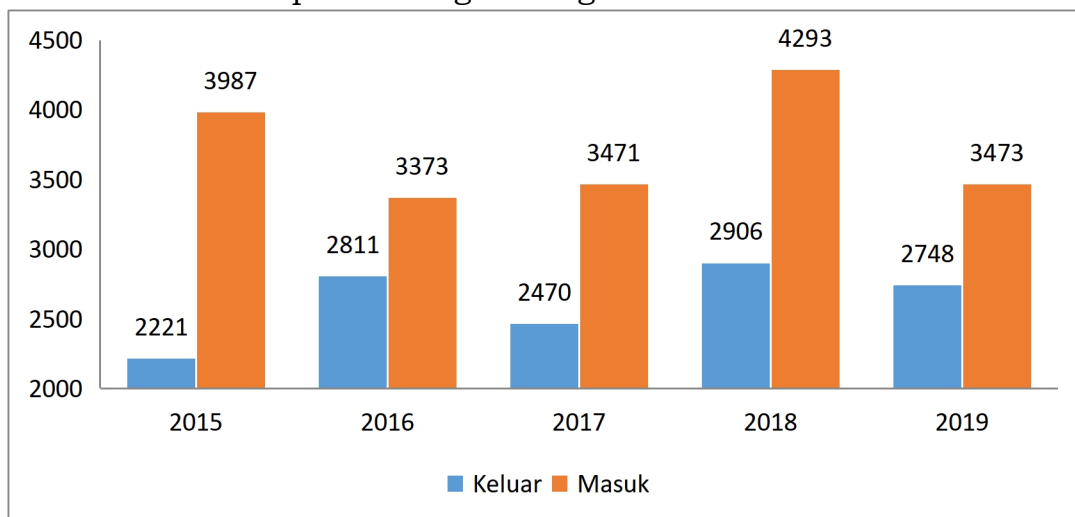
Adapun beberapa faktor non ekonomis yang mempengaruhi keinginan seseorang melakukan migrasi adalah:

1. Faktor-faktor sosial, termasuk keinginan para migran untuk melepaskan dari kendala-kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi-organisasi sosial yang sebelumnya mengekang mereka.
2. Faktor-faktor fisik, termasuk pengaruh iklim dan bencana meteorologis. seperti banjir dan kekeringan.
3. Faktor-faktor demografi, termasuk penurunan tingkat kematian yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan penduduk suatu tempat.

4. Faktor-faktor kultural, termasuk pembinaan kelestarian hubungan keluarga besar yang berada pada tempat tujuan migrasi.
5. Faktor-faktor komunikasi, termasuk kualitas seluruh sarana transportasi. sistem pendidikan yang cenderung berorientasi pada kehidupan kota dan dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau media elektronik.

Yang menjadi tujuan perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah atau yang disebut migrasi keluar adalah kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota besar lainnya. Kota-kota tersebut dianggap dapat menyediakan lapangan pekerjaan baik sektor formal maupun non formal lebih banyak dan beragam. perpindahan penduduk ke dalam dari suatu daerah atau migrasi masuk ke Kabupaten Bangka Tengah umumnya dikarenakan faktor non ekonomis diantaranya keluarga besar berada di tempat tujuan migrasi dan pernikahan. Untuk faktor ekonomis sangat kecil sekali migrasi masuk ke Kabupaten Bangka Tengah karena Kabupaten Bangka Tengah bukan merupakan daerah perdagangan dan industri.

Grafik II.2.
Perpindahan Penduduk Antar Kabupaten/Provinsi
di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan grafik di atas, Tahun 2018 merupakan tahun dengan jumlah penduduk tertinggi yang keluar dari Kabupaten Bangka Tengah dan yang masuk ke Kabupaten Bangka Tengah. Pada Tahun 2019, jumlah penduduk yang keluar dari Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 2.748 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 158 orang

dibandingkan Tahun 2018. Sedangkan jumlah penduduk yang masuk ke Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2019 sebanyak 3473 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 820 orang dibandingkan Tahun 2018.

Berikut beberapa dampak positif dan negatif dari Migrasi :

a) Dampak Positif Migrasi

1. Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama transmigran.
2. Dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan transmigrasi.
3. Dapat mengurangi pengangguran bagi daerah yang padat penduduknya.
4. Dapat meningkatkan produksi pertanian seperti perluasan perkebunan kelapa sawit, karet, coklat, dan lain-lain.
5. Dapat mempercepat pemerataan persebaran penduduk.

b) Dampak Negatif Migrasi

1. Berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di desa.
2. Produktivitas pertanian di desa menurun.
3. Meningkatnya tindak kriminalitas di kota.
4. Meningkatnya pengangguran di kota.
5. Timbulnya pemukiman kumuh akibat sulitnya mencari perumahan.
6. Lalu lintas di kota sangat padat. sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang

bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Meskipun demikian, perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional, bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya. Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan nilai tambah bruto/nilai output akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi daerah Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini terlihat dari perkembangan selama 5 tahun terakhir. Perubahan struktural yang dilakukan pemerintah dengan mendorong perkembangan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri jasa akan memberikan efek pengganda bagi perekonomian.

Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi global yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu segera direspon secara komprehensif.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli konsumen, karena berakibat terhadap ketidakseimbangan antara permintaan dan pendapatan. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam periode waktu yang sama.

Laju inflasi dicerminkan oleh indeks harga yang diturunkan dari penghitungan PDRB yang disebut sebagai PDRB deflator atau dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan. Berbeda dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menggambarkan tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen, indeks implisit PDRB menggambarkan perkembangan perubahan harga produsen. Untuk kepentingan analisis, indeks implisit lebih sesuai jika disajikan dalam bentuk indeks perkembangan karena menggambarkan perkembangan harga dari waktu ke waktu. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan. Nilai Inflasi rata-rata Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.13
Nilai Inflasi rata-rata Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi	5,15	2,71	3,18	2,79	1,99	3,16

Sumber: data diolah, 2020

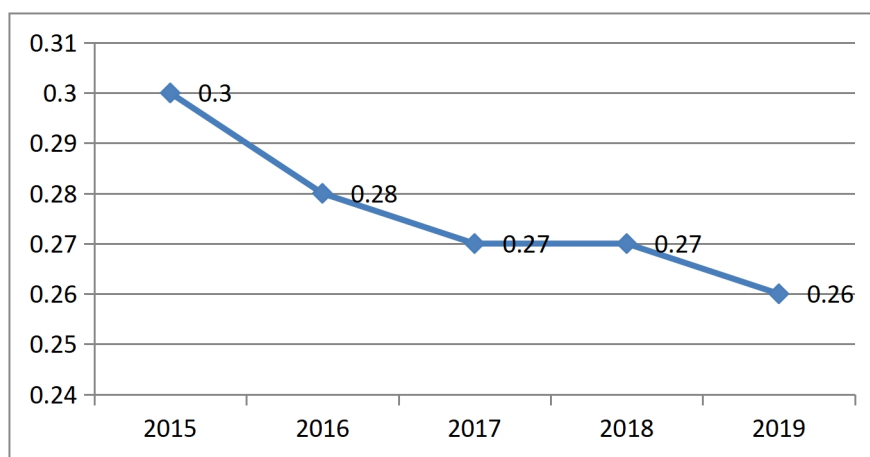
2.2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan kemakmuran suatu wilayah. Angka Indeks Gini yang diperoleh dengan menggunakan data pengeluaran cenderung “under estimate” karena pengeluaran konsumsi bagi penduduk kaya biasanya lebih rendah dari pada pendapatannya (ada tabungan). Sebaliknya bagi penduduk miskin pengeluarannya bisa sama atau lebih besar dari pendapatannya, karena ada pinjaman, mengambil tabungan, menjual aset atau menerima kiriman dari pihak lain. Masalah yang perlu diperhatikan pada penghitungan Indeks Gini adalah berapa angka Indeks Gini yang dapat diterima dari dan berapa yang sudah menunjukkan tingkat ketimpangan yang serius.

Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria kesenjangan/ ketimpangan adalah $G < 0,40$ berarti ketimpangan rendah,

$0,40 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang, dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Grafik di bawah ini merupakan grafik perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019.

Grafik II.3
Nilai Indeks Gini Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019



Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan grafik di atas, angka Indeks Gini Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019 adalah sebesar 0.26. Dengan nilai gini seperti itu dapat dikatakan bahwa sebenarnya tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019 tidak begitu tinggi bahkan seperti penjelasan pada bagian sebelumnya bahwa dengan besarnya Indeks Gini kurang dari 0.4 dapat dikatakan bahwa pendapatan penduduk di Kabupaten Bangka Tengah cukup merata. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kabupaten Bangka Tengah keadaannya relatif sudah menunjukkan peningkatan pemerataan.

2.2.1.4 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Pemerataan atau distribusi pendapatan merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pendapatan masyarakat terbagi semerata mungkin. Cara lain yang juga bisa digunakan untuk menunjukkan tingkat pembagian pendapatan diantara berbagai golongan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia yang berpatokkan pada persentase pendapatan yang diterima oleh 40%

penduduk termiskin. Menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu:

- a. Ketimpangan pembagian pendapatan disebut serius jika 40% penduduk termiskin menerima kurang dari 12% pendapatan.
- b. Ketimpangan pembagian pendapatan disebut menengah jika 40% penduduk termiskin menerima 12%-17% pendapatan.
- c. Ketimpangan pembagian pendapatan disebut rendah jika 40% penduduk termiskin menerima lebih dari 17% pendapatan.

Tabel II.14
Nilai Kriteria Bank Dunia Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

Tahun	40% Berpengeluaran Rendah	40% Berpengeluaran Sedang	20% Berpengeluaran Tinggi	Indeks Gini
2015	22,53	40,14	37,33	0,2989
2016	24,34	37,99	37,67	0,2799
2017	24,86	38,8	36,34	0,274
2018	24,43	38,57	37,00	0,2893
2019	24,68	38,75	36,57	0,2639

Sumber: data diolah, 2020

Salah satu kelemahan dari ukuran ini adalah bahwa ukuran ini bukan merupakan suatu ukuran distribusi pendapatan yang bersifat menyeluruh, karena hanya memperhatikan perkembangan pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk termiskin yang diperoleh dari kelas pendapatan (Decile) ke 4.

Hasil Susenas dalam tabel di atas menunjukkan bahwa menurut ukuran Bank Dunia, kesenjangan pendapatan di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu tahun 2015-2019 termasuk kategori rendah. Hal ini sesuai kriteria Bank Dunia bahwa kesenjangan pembagian pendapatan disebut jika 40% penduduk termiskin menerima lebih dari 17% pendapatan. Di Kabupaten Bangka Tengah pendapatan 40% penduduk termiskin menerima pendapatan diatas 20%. Tingkat kesenjangan yang rendah dan terus menunjukkan perbaikan di Kabupaten Bangka Tengah baik menurut Indeks Gini maupun kriteria bank dunia antara lain mungkin karena semakin banyak penduduk Kabupaten

Bangka Tengah yang berpendapatan menengah ke atas baik itu penduduk asli maupun penduduk pendatang.

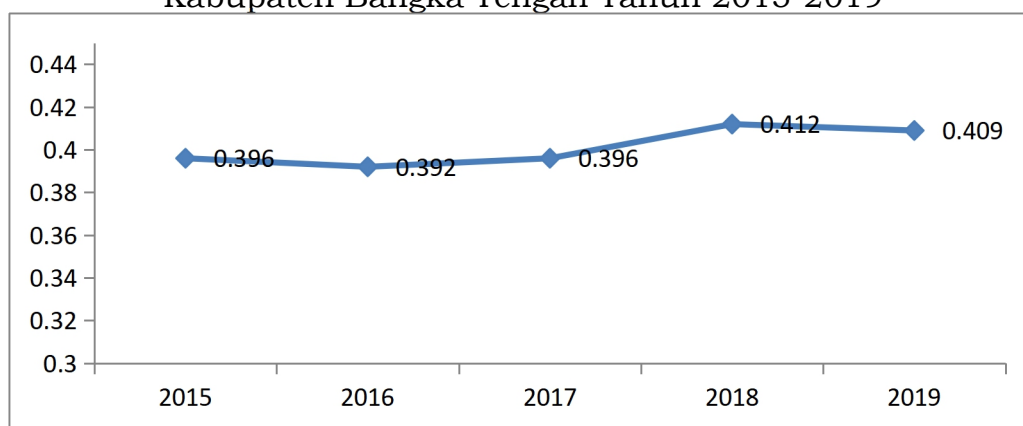
2.2.1.5 Indeks Williamson

Tidak kalah pentingnya dalam kajian ketimpangan distribusi pendapatan adalah indikator ketimpangan regional yang diukur dengan Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Dasar perhitungan Indeks Williamson menggunakan PDRB perkapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah.

Pada dasarnya Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran (coefficient to variation) dari rata-rata nilai sebaran dihitung berdasarkan estimasi dari nilai-nilai PDRB dan penduduk di daerah-daerah yang berada pada ruang lingkup wilayah yang dikaji dan dianalisis. Dalam hal ini adalah wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah. Rumus Indeks Williamson akan menghasilkan angka indeks sama dengan nol, yang menandakan tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan, sedangkan angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukkan adanya kesenjangan antar kecamatan. Semakin besar indeksnya berarti semakin besar pula tingkat kesenjangan ekonomi antar kecamatan.

Untuk mengukur ketimpangan ekonomi (pendapatan) antar wilayah Indeks Williamson berkisar antara 0-1. Bila $IW < 0,30$ berarti ketimpangan ekonomi wilayah rendah, $IW > 0,30-0,50$ berarti ketimpangan ekonomi wilayah sedang, dan $IW > 0,50$ berarti ketimpangan ekonomi wilayah tinggi. Di bawah ini ialah grafik Nilai Indeks Williamson Kabupaten Bangka Tengah.

Grafik II.4
 Nilai Indeks Williamson
 Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019



Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa angka Indeks Williamson dari tahun 2015-2019 selalu fluktuatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah masih belum merata. Indeks Williamson pada Tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, yaitu sebesar 0,396 pada tahun 2015 dan 0,392 pada tahun 2016. Pada tahun 2017-2018 Indeks Williamson kembali mengalami peningkatan menjadi 0,396, dan tahun 2018 sebesar 0,412 yang berarti bahwa gap kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah cenderung semakin besar, atau dengan kata lain diindikasikan terdapat kesenjangan regional di Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2019 kembali turun menjadi 0,409. Namun secara keseluruhan dalam kurun lima tahun 2015-2019, indeks Williamson cenderung meningkat, dengan kriteria ketimpangan ekonomi wilayah sedang

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berikut ialah indikator penyusun IPM di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019.

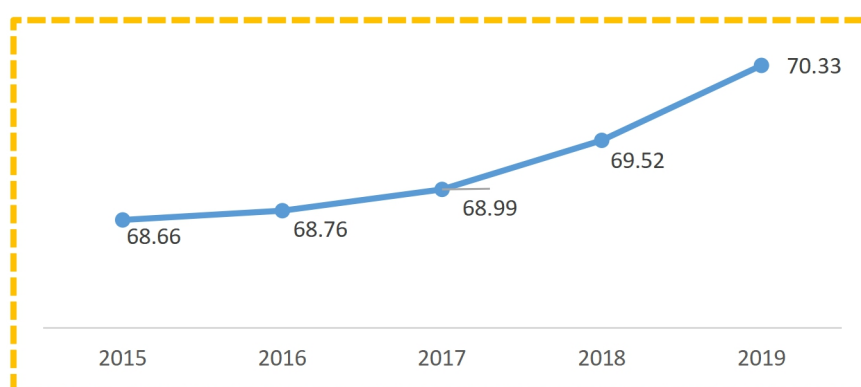
Tabel II.15
Indikator Penyusun IPM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,28	70,38	70,49	70,78	71,16
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,72	11,73	11,74	11,75	11,76
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,70	6,71	6,79	6,80	7,13
Pengeluaran Perkapita Riil	12.210	12.248	12.330	12.836	13.070

Sumber: data diolah, 2020

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Di bawah ini ialah grafik IPM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019.

Grafik II.5
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2019

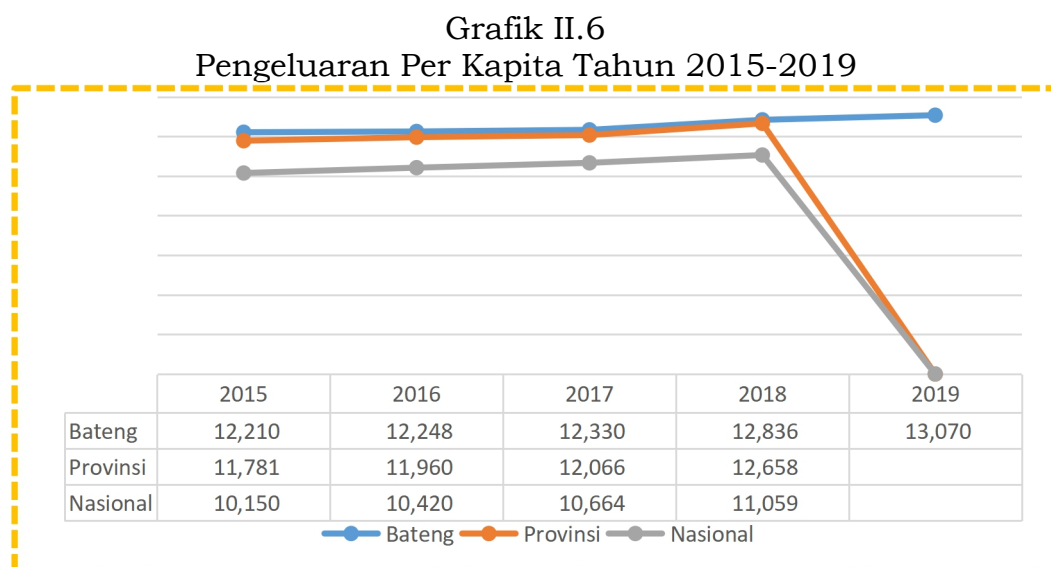


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 nilai IPM Kabupaten Bangka Tengah terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Nilai IPM Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019 sebesar 70,33, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,81 dibandingkan dengan IPM Tahun 2018 yang sebesar 69,52. Angka tersebut menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 masuk dalam kategori tinggi.

2.2.1.7 Pengeluaran Per Kapita

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antara wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antara satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah masih belum terbanding untuk itu perlu dibuat adanya standarisasi. Misalnya satu rupiah disuatu wilayah memiliki daya beli sama dengan satu rupiah di Jakarta. Dengan adanya standarisasi ini maka perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah dapat dibandingkan. Di bawah ini adalah grafik pengeluaran per kapita di Kabupaten Bangka Tengah.



Sumber: data diolah, 2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bangka Tengah dari tahun ke tahun pada periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah berada diatas kemampuan daya beli rata-rata masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tingginya kemampuan daya beli masyarakat Bangka Tengah didorong oleh perkembangan pendapatan masyarakat Bangka Tengah yang juga meningkat setiap tahunnya. Terjadinya peningkatan pendapatan ini di sebabkan oleh perkembangan perekonomian yang cukup baik setiap tahunnya.

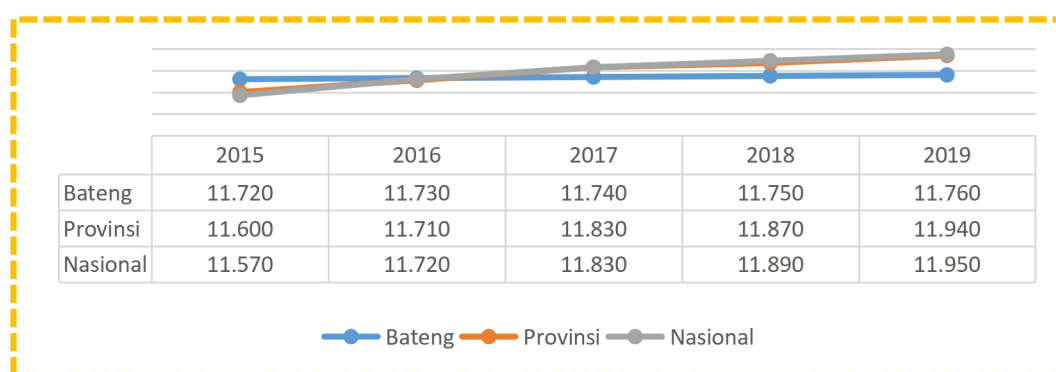
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Kualitas Pendidikan

1. Harapan Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang mempresentasikan dimensi pengetahuan dalam IPM salah satunya adalah harapan lama sekolah. Dengan melihat besaran harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tersebut dapat dimaknai sebagai suatu ukuran kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Angka Harapan Lama Sekolah menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung pada penduduk berusia 7 tahun keatas. Tingkat atau ukuran angka harapan lama sekolah yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah, akan mampu memberikan gambaran kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Bisa dikatakan bahwa apabila angka harapan lama sekolah di suatu wilayah rendah berarti di wilayah tersebut dapat dikatakan memiliki kualitas pembangunan pendidikan yang kurang dibandingkan dengan wilayah yang memiliki angka harapan lama sekolah lebih tinggi. Di bawah ini adalah grafik harapan lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah.

Grafik II.7
Harapan Lama Sekolah Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

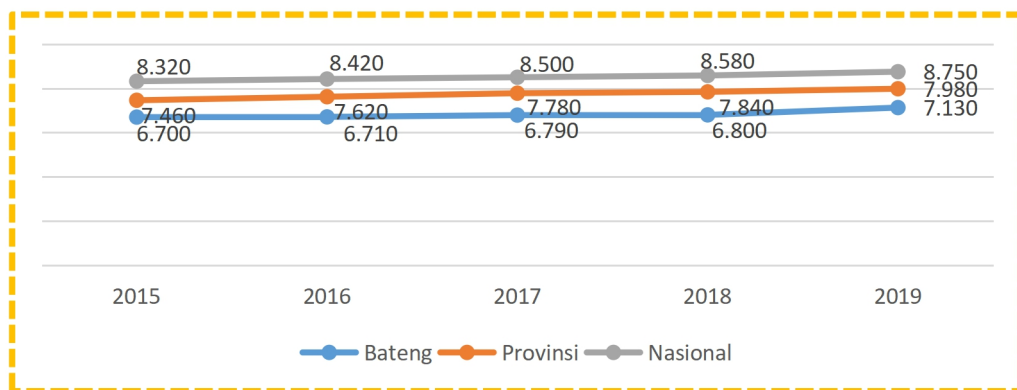
Berdasarkan grafik di atas, perkembangan angka harapan lama sekolah di Bangka Tengah selama periode tahun 2015–2019 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 angka harapan lama sekolah Kabupaten Bangka Tengah sebesar 11,72 tahun menjadi 11,76 tahun pada tahun 2019. Selama kurun waktu tersebut angka harapan lama sekolah Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan sekitar 0,04 poin.

Besaran nilai harapan lama sekolah yang dimiliki Kabupaten Bangka Tengah masih jauh dari nilai maksimalnya yaitu 18 tahun. Kondisi ini tentunya dapat dijadikan sebagai masukan dalam usaha untuk memajukan pembangunan pendidikan karena angka harapan lama sekolah merupakan indikator proses sedangkan angka rata-rata lama sekolah merupakan output dari pembangunan pendidikan. Pencapaian angka harapan lama sekolah belum sampai 18 tahun menunjukkan bahwa di Kabupaten Bangka Tengah kualitas pembangunan pendidikan masih belum maksimal. Kemungkinan bisa disebabkan oleh masih ada penduduk berusia diatas 7 tahun yang sudah tidak berniat bersekolah. Terdapat anggapan pada masyarakat awam bahwa kebutuhan untuk sekolah berkaitan dengan kepentingan bekerja, sehingga apabila mereka sudah bekerja tidak perlu untuk bersekolah lagi atau pekerjaannya tidak memerlukan keahlian.

2. Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Di bawah ini adalah grafik perbandingan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung dan Nasional.

Grafik II.8
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015 s.d 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan grafik di atas, rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bangka Tengah selama 2015-2019 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 6,70 di tahun 2015 menjadi 7,13 di tahun 2019. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah tersebut dapat dimaknai bahwa penduduk Bangka Tengah semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.2.2.2 Kualitas Kesehatan

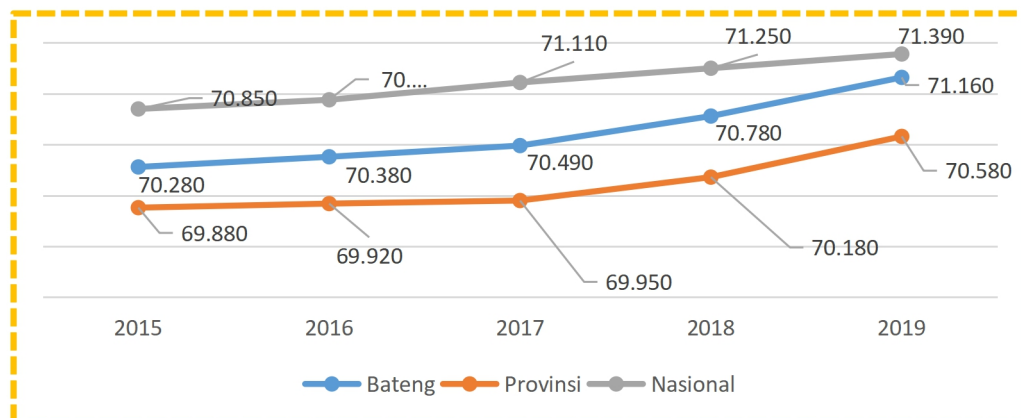
1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Angka harapan hidup

merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan yang baik. Berikut grafik angka harapan hidup di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung dan Nasional.

Grafik II.9
Angka Harapan Hidup (AHH)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Perkembangan AHH di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 2015-2019 menunjukkan tren peningkatan. AHH di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2017 tercatat sebesar 70,49 tahun, dan mengalami kenaikan di tahun 2018 yaitu menjadi 70,78 tahun dan tahun 2019 sebesar 71,16. Peningkatan AHH merupakan gambaran umum terjadinya peningkatan kualitas kesehatan setiap individu dan diperlukan upaya untuk mempertahankan angka yang tetap tinggi.

2. Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan z-score <-3 SD (sangat kurus) dan atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor). Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel II.16
Jumlah Balita Gizi Buruk

No.	Balita Gizi Buruk	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Balita	15.962	15.449	13.370	14.385	10.484
2	Jumlah Balita Gizi Buruk	6	14	8	12	5
3	Persentase Balita Gizi Buruk	0,03	0,09	0,06	0,08	0,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Perkembangan persentase balita gizi buruk dalam kurun waktu 2015-2019 berfluktuatif. Pada tahun 2019 persentase balita gizi buruk Kabupaten Bangka Tengah adalah 0,05%. Dari segi pelayanan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100% atau dengan kata lain seluruh balita yang mengalami gizi buruk mendapatkan perawatan. Kasus balita gizi buruk pada tahun 2019 turun sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan tahun 2018 dimana ditemukan 12 kasus. Adanya penurunan persentase balita dengan gizi buruk tersebut mengindikasikan bahwa usaha Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menurunkan angka balita gizi buruk menunjukkan hasil yang positif. Tindak lanjut dalam penanganan balita gizi buruk telah dilakukan pada tahun 2019 berupa pemberian makanan tambahan dan penanggulangan gizi bermasalah.

3. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri. Desa siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga lahir sebagai respon pemerintah terhadap masalah kesehatan di Indonesia yang tak kunjung selesai. Tingginya angka kematian ibu dan bayi munculnya kembali berbagai penyakit lama seperti tuberkulosis paru merebaknya berbagai penyakit baru yang bersifat pandemik seperti SARS. HIV/AIDS dan flu burung serta belum hilangnya penyakit endemis seperti diare dan demam berdarah merupakan masalah utama kesehatan di Indonesia.

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/SK/VI II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa siaga desa siaga merupakan desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Di bawah ini adalah tabel cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.17
Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa siaga	63	63	63	63	63
2	Jumlah desa siaga aktif	0	0	2	2	2
3	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	0	0	4,76	4,76	4,76

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, dari 63 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, yang sudah menjadi desa siaga aktif hanya 2 desa saja, yaitu Desa Terentang di Kecamatan Koba, dan Desa Padang Baru di Kecamatan Pangkalan Baru.

Tidak bertambahnya jumlah desa siaga aktif di wilayah Kabupaten Bangka Tengah disebabkan karena mulai Tahun 2018 tidak diadakan lagi program desa siaga aktif, karena salah satu kriteria desa siaga aktif harus ada forum desanya.

2.2.2.3 Tingkat Pengangguran

Secara umum, tujuan pembangunan berujung pada meningkatnya kualitas hidup manusia yang lazim kita sebut dengan “kesejahteraan”. Seperti tujuan dari SDG’s ke delapan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya data terkait ketenagakerjaan agar membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang nantinya akan berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran. Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja. Di Indonesia disebutkan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Keadaan ketenagakerjaan tidak terlepas dari kondisi penduduk di suatu wilayah. Jumlah penduduk khususnya komposisi penduduk sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan. Pertumbuhan penduduk terutama penduduk yang masuk dalam usia kerja menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan yang ada. Kenaikan jumlah penduduk terutama yang termasuk penduduk usia kerja akan menghasilkan angkatan kerja yang banyak pula.

Tabel II.18
Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Utama
di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

Kegiatan Utama	2015	2016	2017	2018	2019
Angkatan Kerja	85.602	n/a	93.626	98.297	97.778
Bekerja	79.971	n/a	90.465	94.437	93.483
Pengangguran	5.631	n/a	3.161	3.860	4.295

Bukan Angkatan Kerja	43.162	n/a	41.545	40.178	42.610
Sekolah	9.145	n/a	8.935	10.942	10.757
Mengurus Rumah Tangga	30.864	n/a	28.929	24.878	28.318
Lainnya	3.153	n/a	3.681	4.358	3.535
Total	128.764	n/a	135.171	138.475	140.388

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Ket : n/a : tidak dilakukan SUSENAS untuk seluruh Kab/Kota se Indonesia

Di Indonesia yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Namun, tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerima pendapatan (pensiunan).

Menurut aktifitas yang dilakukannya, penduduk usia kerja dapat digolongkan menjadi dua kategori yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang kegiatan utama seminggu yang lalu adalah sekolah, ibu rumah tangga, serta lainnya. Sedangkan angkatan kerja adalah yang bekerja dan pengangguran. Diantara penduduk usia kerja di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019, sebanyak 97.778 penduduk atau sebesar 69,65 persen merupakan angkatan kerja, sedangkan 42.610 penduduk atau 30,35 persen sisanya termasuk kategori bukan angkatan kerja.

Tabel II.19
TPT dan TPAK di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,48	n/a	69,26	70,99	69,65
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,58	n/a	3,38	3,93	4,39

Sumber: Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Ket : n/a : tidak dilakukan SUSENAS untuk seluruh Kab/Kota se Indonesia

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Secara umum, apabila tingginya TPAK disebabkan oleh tingginya penduduk yang bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Indikator ini merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang seringkali digunakan sebagai tolak ukur potensi tenaga kerja suatu daerah. Namun bila tingginya TPAK diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja (persentase penduduk yang bekerja), hal ini cukup mengkhawatirkan, karena berarti penduduk yang mencari pekerjaan meningkat yang selanjutnya dapat memicu tingginya angka pengangguran.

Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2019, diperoleh informasi bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 69,65 persen. Salah satu penyebab turunnya angka TPAK ini dikarenakan banyaknya penduduk yang kegiatan utamanya beralih hanya mengurus rumah tangga saja. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan sosial yang dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah berperan penting dalam menekan angka pengangguran. Pengangguran sering kali berhubungan dengan perekonomian dan kemiskinan. Dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga menyebabkan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Secara umum, penyebab adanya pengangguran adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk, khususnya yang tergolong ke dalam angkatan kerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Sadono

Sukirno (1997), yaitu jumlah penduduk yang besar akan mengakibatkan banyaknya pengangguran dan menurunnya produktivitas.

Angka TPT dapat mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, selain pengangguran terbuka juga banyak terdapat pengangguran terselubung. Angkatan kerja yang tergolong dalam pengangguran terselubung melakukan pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, tetapi dilakukan oleh lebih banyak orang.

TPT merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan pemerintah dari tahun ke tahun. Selain itu, angka ini dapat dijadikan acuan bagi kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan adalah membuat program pembukaan lapangan usaha baru yang sesuai dengan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka Tengah. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Tingginya angka TPT dapat menyebabkan tingkat perekonomian di masyarakat melemah. Secara tidak langsung, dampak yang bisa ditimbulkan adalah meningkatnya potensi permasalahan sosial, seperti kriminalitas dan kemiskinan.

Dengan tidak adanya pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjangnya adalah menurunnya GNP (Gross National Product) dan pendapatan per kapita suatu negara.

Pertambahan jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang tidak didukung oleh ketersediaan lapangan kerja baru. Keterbatasan lapangan kerja bisa dikarenakan masyarakat hanya mengandalkan pemerintah sehingga enggan untuk

menciptakan lapangan kerja, minimal untuk dirinya sendiri. Padahal, kalau seseorang menciptakan lapangan kerja, minimal untuk diri sendiri, akan berdampak positif untuk orang lain. Misalnya, lapangan pekerjaan yang dibuat dapat memberikan kesempatan terbukanya lapangan pekerjaan yang lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran atau pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019 adalah 4,93 persen. Maksudnya adalah dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, ada sekitar 4-5 orang yang merupakan pengangguran.

Tabel II.20
Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk yang bekerja	79.971	n/a	90.465	94.437	93.483
2	Angkatan kerja	85.602	n/a	93.626	98.297	97.778
3	Rasio penduduk yang bekerja	93,42	n/a	96,62	96,07	95,60

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Ket : n/a : tidak dilakukan SUSENAS untuk seluruh Kab/Kota se Indonesia

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 penduduk yang bekerja mencapai 93.483 penduduk atau 95,60 persen dari seluruh angkatan kerja.

Tabel II.21
Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	PDRB (Rp. Juta)	5.271.866	5.432.844	5.620.615	5.812.197	5.884.996
2	Jumlah penduduk yang	79.971	n/a	90.465	94.437	93.483

	bekerja (Jiwa)					
3	PDRB per kapita tenaga kerja (Rp. Juta)	65,92	n/a	62,13	61,54	62,95
4	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	-7,05	n/a	-5,75*	-0,94	2,28

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Ket : n/a : tidak dilakukan SUSENAS untuk seluruh Kab/Kota se Indonesia

*) : perbandingan antara tahun 2017 dengan 2015

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja.

Selama periode 2015 - 2017, pertumbuhan PDRB per tenaga kerja terus mengalami peningkatan ke arah yang semakin baik. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja sebesar negatif 7,05 persen meningkat menjadi 2,28 persen pada tahun 2019. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan pertumbuhan sebesar 9,33 persen. Menciptakan lapangan kerja tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Hal ini merupakan hal yang positif bagi perekonomian maupun bagi masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) / Pembangunan Berkelanjutan ke 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

2.2.2.4 Kemiskinan

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2015 hingga 2019 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Periode tahun 2015-2017

jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dan pada periode tahun 2018 dan tahun 2019 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Berikut ini adalah tabel persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019:

Tabel II.22
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (ribu org)	10.19	10.36	11.39	11.12	9,81
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,67	5,64	6,07	5,81	5,03
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,84	0,59	0,57	0,42	0,52
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,20	0,10	0,10	0,06	0,10
Garis Kemiskinan(Rp/Bln/Perkapita)	528.720	586.445	653.308	680.907	721.729

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

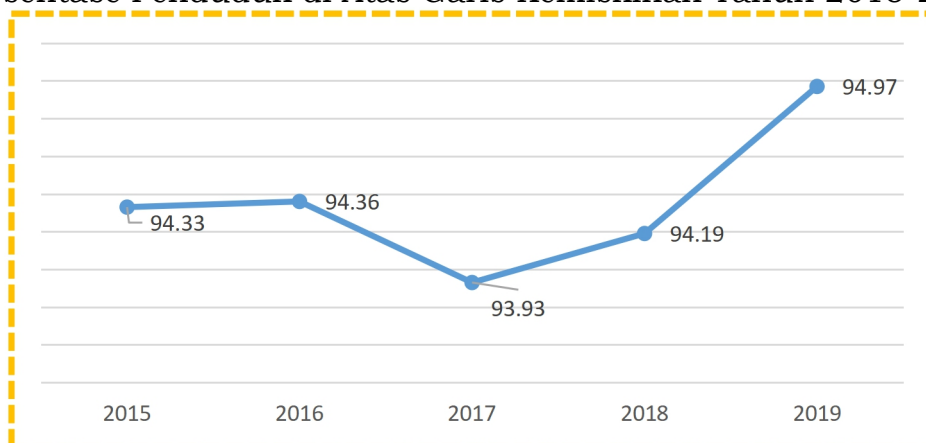
Pada periode tahun 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2016 adalah 0,59 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 0,57. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2015 sebesar 0,20 menjadi 0,10 pada tahun 2016. Pada tahun 2018, P1 juga mengalami penurunan sebesar 0,04 dibandingkan tahun 2017 yaitu dari 0,10 pada tahun 2017 menjadi 0,06 di tahun 2018, pada tahun 2019 ada kenaikan 0,10 dibandingkan tahun 2018 pada P1 dan kenaikan pada P2 dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 0,04.

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk

miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode 2015-2019 Garis Kemiskinan tidak signifikan, karena mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 garis kemiskinan (Rp/bln/Perkapita) mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yaitu menjadi 721.729.

Batas garis kemiskinan, dapat naik dan turun setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain oleh angka inflasi dan harga kebutuhan dasar. Tingginya inflasi sangat berpengaruh kepada angka kemiskinan, karena inflasi akan menggerus penghasilan penduduk akibat kenaikan harga kebutuhan dasar. Di bawah ini disajikan grafik penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019.

Grafik II.10
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Tahun 2015-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Tingkat kesejahteraan keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a) Keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal seperti pengajaran, agama, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b) Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologinya seperti pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan.

- c) Keluarga sejahtera II yaitu keluarga disamping telah memenuhi kebutuhan dasarnya juga telah memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologinya akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.
- d) Keluarga sejahtera tahap III yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangan, namun belum dapat memberikan sumbangan maksimal terhadap masyarakat.
- e) Keluarga sejahtera tahap III+ yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan, meliputi kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan pengembangan, serta dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Tabel II.23.
Jumlah Keluarga Menurut Klasifikasi
di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Tahun	Keluarga Prasejahtera	Keluarga Sejahtera				Jumlah
			I	II	III	III+	
1	2015	2.527	4.432	17.240	18.660	5.380	48.239
2	2016	3.041	27.752	21.649	18.660*	5.380*	52.442
3	2017	3.116	27.818	21.715	18.660*	5.380*	52.649
4	2018	3.265	29.185	22.772	18.660*	5.380*	55.222
5	2019	2.459	11.124				13.583

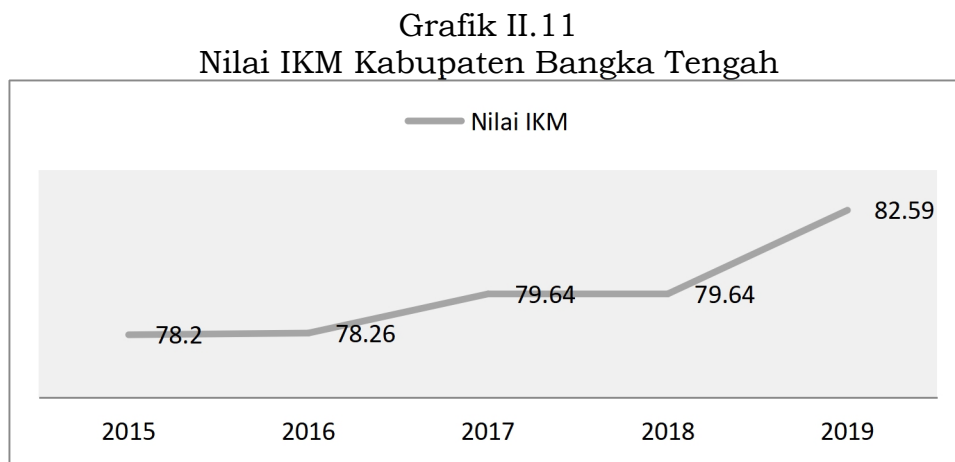
Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah keluarga prasejahtera di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sedangkan Pada tahun 2019 jumlah keluarga prasejahtera sebanyak 2.459 keluarga, angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2018.

2.2.2.5 Pelayanan Publik

2.2.2.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 dan mekanisme survei dilakukan dengan menetapkan 24 unit pelayanan publik, yaitu RSUD, Puskesmas, KPPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan sebagai sampling serta jumlah responden masing-masing jenis pelayanan sebanyak 150 orang dengan sistem acak. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Berikut nilai rata-rata survei kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015-2019.



Sumber: Sekretariat Daerah kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2019, rata-rata survei kepuasan masyarakat sebesar 82,59% dan hasil nilai IKM ini berkategori “Baik”. Tren nilai survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah selalu mengalami kenaikan. Faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut adalah komitmen unit pelayanan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik. Selain itu dukungan Kementerian PAN dan RB dalam melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukkan melalui terpilihnya Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu dari 56 Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB. Selain itu, dukungan Ombudsman RI dalam melaksanakan penilaian kualitas

pelayanan ditunjukkan melalui hasil survei independen kepatuhan standar pelayanan publik yang menyatakan Kabupaten Bangka Tengah masuk kategori Zona Hijau.

2.2.2.5.2 Persentase PAD terhadap pendapatan

Indikator Persentase PAD terhadap pendapatan digunakan untuk menggambarkan kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pengoptimalan peningkatan penerimaan daerah terus dilakukan oleh Kabupaten Bangka Tengah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Di bawah ialah tabel perbandingan PAD dan pendapatan di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.24.
Perbandingan PAD dan Pendapatan Kabupaten Bangka Tengah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)
2015	66.341.267.135,93	763.704.200.019,41	8,69
2016	73.459.526.744,49	797.822.644.608,43	9,21
2017	97.375.136.679,82	774.568.409.930,59	12,57
2018	75.995.335.730,86	890.396.701.514,78	8,53
2019	89.551.737.000,00	949.457.646.110,00	9,1

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Tengah Tahun, 2020

2.2.2.5.3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada (4) empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada tahun 2019, Kabupaten Bangka Tengah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Predikat ini telah dipertahankan sejak 4 (empat) tahun terakhir berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah telah berjalan sangat baik. Di bawah ini adalah opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.25.

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemkab Bangka Tengah

Tahun	Opini BPK RI
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2020

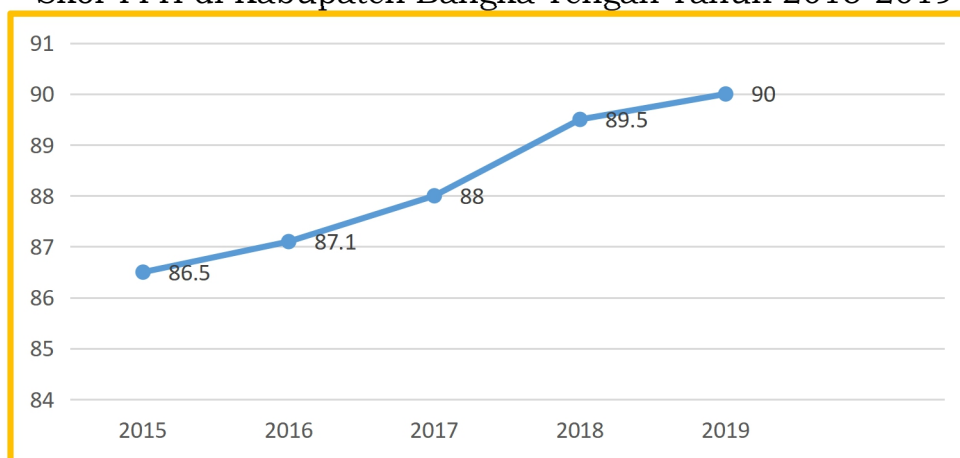
2.2.2.5.4 Predikat SAKIP

Dari tahun 2017, predikat SAKIP di Kabupaten Bangka Tengah adalah B, yang artinya masih terdapat indikator manajemen kinerja yang harus diperbaiki di Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2019, predikat SAKIP di Kabupaten Bangka Tengah mengalami peningkatan yaitu menjadi nilai BB. Pencapaian tersebut perlu disertai dengan upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja dalam manajemen pemerintahan.

2.2.2.6 Ketahanan Pangan

2.2.2.6.1 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Grafik II.12
Skor PPH di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan grafik di atas, Skor PPH Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2015-2019 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 Skor PPH meningkat dari tahun 2017 yaitu dari 88% di tahun 2017 menjadi 89,5% di tahun 2018 dan meningkat di 2019 menjadi sebesar 90%.

2.2.2.6.2 Ketersediaan Energi dan Protein

Di bawah ini adalah tabel ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019.

Tabel II.26.
Ketersediaan Energi dan Protein

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2019
1	Energi (kkal/kap/hari)	2.237.5	2.300	2.310	2.325	2.350
2	Protein (gr/kap/hari)	74.03	75.52	75.50	76.09	76.5

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Ketersediaan Energi per Kapita pada tahun 2019 sebesar 2.350 Kkal/Kap/Hari. Hal tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan energi konsumsi terbesar terdapat pada kelompok bahan makanan padi-padian yaitu sebesar 1.069 kkal/kapita/hari atau sekitar 46.3% dari total

ketersediaan energi. Sedangkan ketersediaan Protein per Kapita sebesar 76.5 Gram/Kap/Hari. Hal ini dipengaruhi oleh kelompok pangan yang memberikan kontribusi protein tertinggi dalam penyediaan pangan yang berasal dari pangan hewani.

2.2.2.6.3 Ketersediaan Pangan

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, serta meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Di bawah ini adalah tabel ketersediaan pangan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015-2019.

Tabel II.27
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Bangka Tengah

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kilo)	16.883.000	17.671.000	19.689.000	20.915.000	43.197.000
2	Jumlah penduduk	166.724	174.378	177.335	182.286	186.783
3	Ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk	101,263	101,337	111,027	114,737	231,268

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah, 2020

2.2.2.7 Kontribusi Sektor PDRB

2.2.2.7.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah digambarkan melalui agregat PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Di bawah ini adalah tabel PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019.

Tabel II.28
PDRB ADHB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019 (miliar rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	1.076,12	1.171,82	1.206,30	1.170,82	1.244,71
B.	Pertambangan dan Penggalan	1.432,44	1.360,20	1.377,65	1.255,91	1.241,91
C.	Industri Pengolahan	635,09	652,64	713,90	734,06	482,62
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,17	3,98	4,76	5,20	6,39
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	501	545	613	637	0,68
F.	Konstruksi	707,61	773,63	835,98	908,24	1.043,35
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.027,80	1.146,12	1.286,95	1.400,12	1.504,68
H.	Transportasi dan Pergudangan	747,59	792,93	857,14	930,04	1.026,24
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	211,32	231,17	253,68	281,17	325,75
J.	Informasi dan Komunikasi	120,00	129,30	141,40	149,50	171,02
K.	Jasa Keuangan dan	43,25	47,05	50,37	55,00	61,00

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
	Asuransi					
L.	Real Estate	211,39	222,58	238,80	250,99	268,90
M,N.	Jasa Perusahaan	18,00	18,64	20,12	22,05	24,00
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	497,91	543,28	586,47	626,40	699,25
P.	Jasa Pendidikan	201,54	231,78	250,47	268,43	300,61
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95,21	103,98	113,76	120,54	135,98
R, S,T, U.	Jasa lainnya	27,22	30,36	33,85	37,16	42,24
PDRB TOTAL		7.056,17	7.469,01	7.972,21	8.216,27	8.579,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

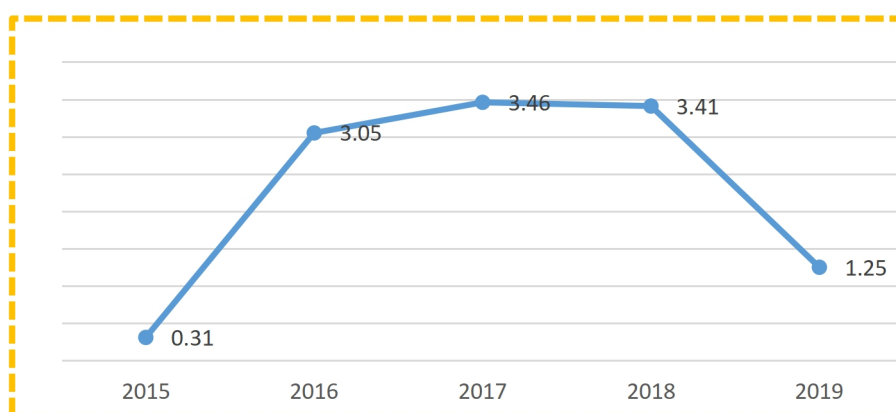
Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2015-2017, kategori pertambangan dan penggalian menjadi sumber pertumbuhan terbesar bagi perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah. Sedangkan, yang memberikan kontribusi terendah adalah dari kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 dan 2019, penyumbang terbesar dari kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Kontribusi terendah diberikan oleh kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Tabel di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Laju pertumbuhan PDRB terendah yaitu pada Tahun 2015, dan tertinggi di Tahun 2017. Pada Tahun 2016, Laju pertumbuhan PDRB sebesar 3,05, angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2015 yang hanya sebesar 0,31. Pada Tahun 2019,

laju pertumbuhan PDRB mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan Tahun 2018 yaitu dari 3,41 menjadi sebesar 1,25. Hal tersebut disebabkan karena nilai kategori industri pengolahan pada Tahun 2019 adalah -45,2, dan kategori transportasi dan pergudangan mengalami penurunan dari 8,03 di Tahun 2018 menjadi 1,28 di Tahun 2019. Grafik laju pertumbuhan PRDB di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II.13
Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK)
Kabupaten Bangka Tengah (%)



Sumber: data diolah, 2020

Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian nasional dan provinsi yang juga mengalami peningkatan. Nilai PDRB Kabupaten Bangka Tengah atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai 8,57 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4,42 persen dibanding tahun 2018 yang mencapai 8,21 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Tabel II.29
PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tengah 2015-2019 (Rp. Juta)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	750.236	786.742	791.936	839.683	892,59
B.	Pertambangan dan Penggalian	1.125.122	1.078.951	1.052.794	1.012.427	1.069,22
C.	Industri Pengolahan	556.009	570.467	608.068	590,89	323,79

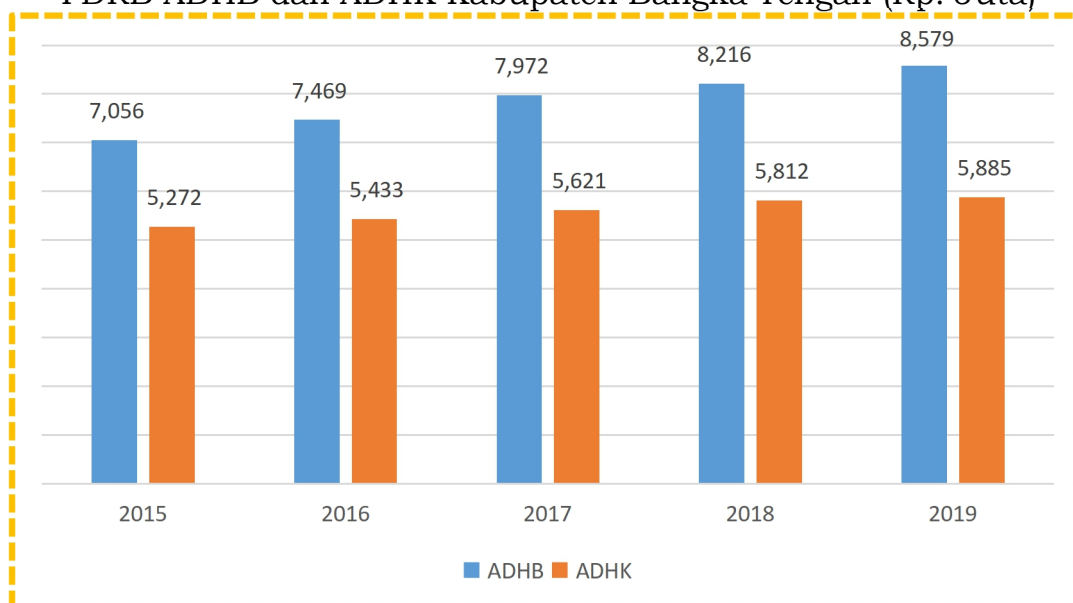
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.305	2.554	2.699	2.882	3,46
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,35	0,37	0,40	0,39	0,41
F.	Konstruksi	506.601	542.382	563.240	588.982	653,65
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	819.918	863.730	928.356	977,42	1.015,59
H.	Transportasi dan Pergudangan	490.062	511.700	546.400	590,25	653,65
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	143.582	149.499	156.938	168.461	183,58
J.	Informasi dan Komunikasi	107.028	113.668	122.211	130.117	154,23
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	31.162	33.032	33.719	34.051	37,32
L.	Real Estat	147.597	150.711	156.203	157.965	170,46
M,N.	Jasa Perusahaan	13.607	13.637	14.088	14.818	15,41
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	356.709	378.159	392.662	427.146	473,92
P.	Jasa Pendidikan	132.363	142.556	149.907	160.785	176,78
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68.883	73.305	78.345	79.583	90,36
R, S,T, U.	Jasa lainnya	20.334	21.385	22.653	24.219	26,39
PDRB TOTAL		5.271.867	5.432.844	5.620.615	5.812.097	5.884,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Sementara itu, nilai tambah yang mampu diciptakan oleh seluruh lapangan usaha di Kabupaten Bangka Tengah yang dihitung dengan harga konstan (PDRB ADHK) tahun 2019 mencapai 5,88 triliun rupiah atau meningkat sebesar 1,25 persen dibanding tahun 2018. Di bawah ini ialah grafik jumlah PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Tengah.

Grafik II.14
PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Tengah (Rp. Juta)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Bangka Tengah didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil; pertambangan dan penggalian; pertanian, kehutanan dan perikanan; transportasi dan pergudangan serta konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah. Berikut adalah tabel Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019.

Tabel II.30
Laju Pertumbuhan PDRB

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	9,55	4,87	0,66	6,03	6,3
B.	Pertambangan dan	0,78	-4,10	-2,42	-3,86	5,64

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
	Penggalian					
C.	Industri Pengolahan	-31,02	2,60	6,59	-2,83	-45,2
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9,73	10,76	5,67	6,80	20,05
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,56	4,81	8,23	-2,69	5,73
F.	Konstruksi	8,56	7,06	3,85	4,57	10,98
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,34	5,34	7,48	5,28	3,91
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,92	4,42	6,78	8,03	1,28
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,88	4,12	4,98	7,34	8,89
J.	Informasi dan Komunikasi	7,60	6,20	7,52	10,75	13,95
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,06	6,00	2,08	1,40	9,16
L.	Real Estate	6,19	2,11	3,64	3,95	4,98
M,N.	Jasa Perusahaan	6,97	0,22	3,31	5,19	3,98
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,98	6,01	3,84	8,78	10,95
P.	Jasa Pendidikan	9,06	7,70	5,16	7,26	9,95
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,79	6,42	6,88	4,98	9,87
R,S,T, U.	Jasa lainnya	5,84	5,17	5,93	6,91	8,97
PDRB TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bangka Tengah Dalam Angka Tahun 2020

Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan PDRB ADHK biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan kenaikan produksi riil tanpa dipengaruhi inflasi Kabupaten Bangka Tengah (dalam hal ini dibandingkan dengan kota terdekat yaitu Kota Pangkalpinang). Selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2016, 2017 dan 2018, perekonomian Kabupaten Bangka Tengah kembali mengalami perbaikan setelah pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah mengalami perlambatan.

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2015-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama kurun waktu tersebut, perkembangan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 1,25% yang mana tidak sebesar pada tahun 2018 yaitu 3,41%. Hal ini dikarenakan pertama, kategori industri pengolahan mengalami penurunan, karena satu-satunya smelter di Kabupaten Bangka Tengah yaitu Bangka Prima Tin tidak beroperasi selama tahun 2019; kedua, tiket pesawat yang mahal menyebabkan penumpang angkutan udara mengalami penurunan. Kedua sektor inilah yang memang mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Bangka Tengahjadi menimbulkan efek yang lumayan besar.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus berusaha untuk melakukan upaya yang komprehensif dalam menjaga stabilitas ekonomi seperti meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan, meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana,

meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif, mendorong usaha pertanian, perkebunan dan perikanan, memberi kemudahan investasi, serta memberi pelayanan yang prima dalam melayani masyarakat.

2.2.2.7.2 PDRB Menurut Pengeluaran

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Bangka Tengah akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2015 hingga 2019, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan kegiatan perdagangan.

Setiap komponen pengeluaran yang mencakup konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Data yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang dihasilkan Kabupaten Bangka Tengah digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

PDRB menurut pengeluaran menjelaskan bagaimana pendapatan yang diciptakan dalam proses ekonomi dari berbagai sektor produksi digunakan masyarakat untuk konsumsi akhirnya. Dengan kata lain, PDRB menurut pengeluaran menjelaskan mengenai penggunaan sebagian besar produk domestik untuk keperluan konsumsi akhir atau output final (final output). Pengguna konsumsi akhir ini adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga-lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi di wilayah domestik. Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah digambarkan melalui agregat PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang positif selama

kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan jika perekonomian Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008 dan perekonomian Kabupaten Bangka Tengah mampu bertahan dari perlemahan ekonomi nasional di tahun 2015-2019. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif.

Peningkatan ekonomi dapat dilihat dari terjadinya pembangunan ekonomi, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melebihi tingkat pertumbuhan penduduk atau suatu proses meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dalam angka panjang.

Tabel II.31
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi Rumah Tangga	4.330	4.943	5.505	5.988	6.550
Konsumsi LNPRT	49	56	63	68	77
Konsumsi Pemerintah	847	959	1.037	1.093	1.156
PMTB	1697	1.971	2.192	2.443	2.772
Perubahan Inventori	75	40	28	30	33
Net Ekspor Barang dan Jasa	58	-500	-853	-1.406	-2.010
PDRB	7.056	7.469	7.972	8.216	8.578

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Pada tabel di atas dapat diketahui jika pada periode 2015-2019 PDRB Atas Dasar Harga Brlaku memiliki tren meningkat. Pada tahun 2015 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bangka Tengah sebesar 7.056 miliar rupiah dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 8.578 miliar rupiah. Jika dilihat per komponen maka konsumsi rumah tangga memiliki sumbangsih terbesar terhadap PDRB ADHB. Pada tahun 2015 konsumsi rumah tangga menyumbang 4.330 miliar rupiah terhadap PDRB ADHB

Kabupaten Bangka Tengah dan meningkat menjadi 6.550 miliar rupiah pada tahun 2019.

Tabel II.32
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Rp. Juta)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi Rumah Tangga	3.213	3.463	3.645	3.833	4.013
Konsumsi LNPRT	35	39	41	44	50
Konsumsi Pemerintah	593	617	651	668	683
PMTB	1.179	1.275	1.335	1.431	1.555
Perubahan Inventori	75	40	27	31	36
Net Ekspor Barang dan Jasa	177	-1	-78	-195	-452
PDRB	5.272	5.433	5.621	5.812	5.885

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 (ADHK 2010). Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB ADHK menurut pengeluaran menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama tahun 2015-2019, hampir seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2015 adalah sebesar 5,272 miliar rupiah, meningkat menjadi 5.885 miliar rupiah pada tahun 2019.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Semakin lama perbedaannya semakin besar. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan

dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Semakin besarnya perbedaan PDRB ADHB dan PDRB ADHK mengindikasikan bahwa kenaikan harga yang terjadi lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB tersebut.

Tabel II.33
Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Persen)

Komponen Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Konsumsi Rumah Tangga	5,53	7,79	5,25	5,16	4,71
Konsumsi LNPRT	7,83	9,96	6,39	7,42	11,79
Konsumsi Pemerintah	4,68	4,13	5,43	2,66	2,24
PMTB	5,93	8,10	4,73	7,15	8,71
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	0,31	3,05	3,46	3,41	1,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Agregat makro lainnya yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (economic growth), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan kinerja simultan seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah, rumah tangga, pengusaha, dan pihak luar negeri yang terkait dari sisi ekspor dan impor. Selama tahun 2015-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah cenderung menunjukkan penurunan hingga tahun 2015 dan kembali meningkat dari tahun 2016 hingga 2017, dengan rata-rata pertumbuhan 2,35 persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,46 persen. Hal ini merupakan bukti jika kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah, dimana pemerintah berhasil membalik pertumbuhan ekonomi terus mengalami perlambatan hingga hanya mencapai 0,31 persen pada tahun 2015 menjadi 1,25 persen di 2019. Meskipun ada sedikit perlambatan di tahun 2018 tetapi perlambatannya tidak signifikan. Melambatnya pertumbuhan pada periode 2018-2019 tidak terlepas dari menurunnya kondisi ekspor dan perubahan inventori di Kabupaten Bangka Tengah. Tutupnya perusahaan

pertambangan dan industri pengolahan timah di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2013 menyebabkan menurunnya produksi timah, sehingga persediaan dan ekspor komoditi timah yang merupakan andalan Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan yang cukup dalam. Ditambah juga lesunya perekonomian global di tahun 2015 yang ikut memperburuk kondisi yang ada. Namun pada tahun 2016, kondisi perekonomian mulai menunjukkan perbaikan, ditandai dengan mulai meningkatnya laju pertumbuhan yaitu sebesar 3,05 persen dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 3,46 persen.

2.2.2.7.3 PDRB per kapita

Tabel II.34
PDRB Perkapita Tahun 2015 s.d 2019
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB (Rp. Milliar)					
- ADHB	7.056	7.469	7.972	8.216	8.579
- ADHK	5.272	5.433	5.621	5.812	5.884
PDRB Perkapita (Rp. Ribu)					
- ADHB	39.005	40.434	42.270	42.736	43.727
- ADHK	29.142	29.411	29.801	30.204	29.995
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK (%)	-1,74	0,92	1,32	1,35	1,25
Jumlah Penduduk (000 orang)	181	185	189	192	196
Pertumbuhan (%)	2,08	2,11	2.16	2,03	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

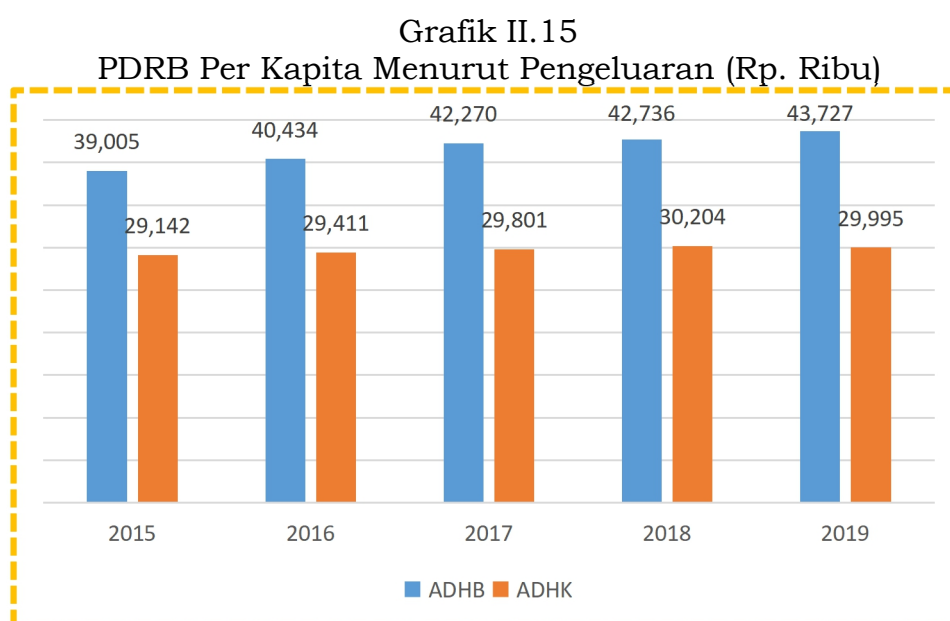
Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan suatu nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan di suatu wilayah yang dapat dibandingkan dengan wilayah lain. Adanya kenaikan PDRB per kapita mengindikasikan bahwa perekonomian berkembang ke arah yang lebih baik. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2015-2019, nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 PDRB Per Kapita sebesar 39.005 juta rupiah, di tahun 2019 mencapai 43.727 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK selama kurun waktu 2015 -2019 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari 29.142 juta rupiah menjadi 29.995 juta rupiah di tahun 2019. Selama tahun 2015-2019 pertumbuhan terendah tahun 2015 sebesar 29.142 juta rupiah dan yang tertinggi di tahun 2018 sebesar 30.16 juta rupiah. Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.35
PDRB Perkapita Tahun 2015 s.d 2019
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai PDRB (Rp juta)	5.271.866	5.432.805	5.620.435	5.812.197	5.884.996
Jumlah Penduduk (jiwa)	180.903	184.720	188.603	192.428	196.198
PDRB perkapita (Rp Juta/jiwa)	29,14	29,41	29,80	30,20	29,99

Sumber : data diolah, 2020



Sumber: data diolah, 2020

Perkembangan penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kondisi tersebut berdampak terhadap perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bangka Tengah. PDRB perkapita selama periode tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Secara nominal, PDRB perkapita pada tahun 2015 sebesar 39.005 juta rupiah dan di tahun 2018 meningkat menjadi 42.734 juta rupiah dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 43.727 juta. Sementara itu, perkembangan PDRB perkapita secara riil menunjukkan penurunan selama kurun waktu 2015 dan kembali meningkat di tahun 2016 hingga 2019. Namun, laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 menyebabkan nilai PDRB perkapita pada kurun waktu tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 2,08 persen, sementara laju pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,31 persen. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Bangka Tengah mengalami kontraksi sebesar -1,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh resesi ekonomi dan tutupnya perusahaan besar di sektor pertambangan sehingga berdampak pada perekonomian Kabupaten Bangka Tengah. Namun, pada tahun 2016 hingga 2018, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, laju pertumbuhan PDRB perkapita naik sebesar 0,92 persen hingga 1,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan kemudian terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,70 persen karena kenaikan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kenaikan nilai PDRB. Nilai PDRB naik sebesar 1,25 persen sedangkan jumlah penduduk naik sebesar 1,95 persen.

Besarnya kontribusi berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Bangka Tengah didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil; pertambangan dan penggalan; pertanian, kehutanan dan perikanan;

transportasi dan pergudangan dan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah.

Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencapai 17,54 persen. Selanjutnya, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 14,51 persen, disusul oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 14,48 persen. Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 12,16 persen dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 11,96 persen.

Selama periode 2015-2019, kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada Tahun 2015 kontribusinya mencapai 20,30 persen, dan terus turun hingga pada Tahun 2019 kontribusinya hanya sebesar 14,48 persen. Penurunan lapangan usaha ini disebabkan melemahnya harga komoditas timah dan tutupnya perusahaan yang memberikan kontribusi cukup besar bagi PDRB lapangan usaha. Kondisi ini terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan dalam dua tahun terakhir. Penurunan cukup signifikan pada kontribusinya terhadap PDRB. Tahun 2018, lapangan usaha ini memiliki peranan sebesar 8,93 persen menjadi 5,93 persen di Tahun 2019.

Sementara itu, kondisi yang sebaliknya terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dimana selama Tahun 2015 hingga 2019, kontribusinya setiap tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015, kontribusi lapangan usaha Perdagangan Besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap total PDRB Kabupaten Bangka Tengah sebesar 14,57 persen, kemudian meningkat terus hingga Tahun 2019 menjadi sebesar 17,54 persen. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui jika lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki pertumbuhan yang cukup besar.

Sektor Perdagangan Besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor naik cukup tinggi disokong sebagian besar oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan motor. Perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan motor naik cukup tinggi dalam 3 tahun disebabkan terjadi perbaikan pola pendapatan masyarakat sehingga pola konsumsi masyarakat secara umum meningkat. Sehingga tahun ini, sektor ini menjadi salah satu penggerak utama di perekonomian Kabupaten Bangka Tengah.

Struktur ekonomi Kabupaten Bangka Tengah dari Tahun 2015 hingga 2019 untuk semua lapangan usaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.36.
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	15,25	15,69	15,13	14,25	14,51
B.	Pertambangan dan Penggalian	20,30	18,33	17,28	15,29	14,48
C.	Industri Pengolahan	9,00	8,74	8,96	8,93	5,63
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F.	Konstruksi	10,03	10,36	10,49	11,05	12,16
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,57	15,34	16,14	17,04	17,54
H.	Transportasi dan Pergudangan	10,59	10,62	10,75	11,32	11,96
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,99	3,10	3,18	3,42	3,80
J.	Informasi dan Komunikasi	1,70	1,73	1,77	1,82	1,99
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,61	0,63	0,63	0,67	0,71

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*	2019**
L.	Real Estate	3,00	2,98	3,00	3,06	3,13
M,N.	Jasa Perusahaan	0,26	0,25	0,25	0,27	0,28
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,06	7,27	7,36	7,62	8,15
P.	Jasa Pendidikan	2,86	3,10	3,14	3,27	3,50
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,35	1,39	1,43	1,47	1,59
R, S,T, U.	Jasa lainnya	0,38	0,41	0,42	0,45	0,45
PDRB TOTAL		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Catatan: * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pembahasan pada aspek pelayanan umum didasarkan pada urusan seperti yang tercerminkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan konkuren yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, di mana dalam urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar serta urusan pilihan dan urusan penunjang pemerintahan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1 Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1.1 Urusan Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki nilai strategis bagi penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter baik. Pembangunan pendidikan secara menyeluruh pada semua jenjang pendidikan. Di dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pendidikan mengambil peran penting dengan target

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan harus juga memberhatikan kualitas pendidik atau guru. Target SDGs lain dalam bidang pendidikan pada tahun 2030, adalah secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar. (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan (8) Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator Harapan lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain indikator tersebut keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, sasaran dan program. Penyajian capaian indikator pendidikan disajikan menurut sub urusan kewenangan. Gambaran capaian indikator pendidikan sebagai berikut:

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan. Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Pendidikan Anak Usia Dini
- b) Pendidikan Dasar
- c) Pendidikan Kesetaraan

Tabel II. 37

Tabel Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2015-2018

No	Indikator	Target (%)				Realisasi (%)				Ket
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota		60	70	80		100	100	100	
	Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Kabupaten/Kota		60	70	80		47,73	53	52	
	Tersedia satuan Pendidikan dalam jarak yang sudah terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil		60	70	80		18	54	63	
	Untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.		60	70	80		16,12	33	48	
	Disetiap SMP/MTs tersedia ruang Lab.IPA yang dilengkapi dengan meja kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA utk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.		60	70	80		100	100	100	
	Di setiap SD.MI dan SMP/Mts tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya, dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.		60	70	80		-	54	60	
	Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru utk setiap 32 peserta didik dan 6		60	70	80		70	85	99	

No	Indikator	Target (%)				Realisasi (%)				Ket
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
	(enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.									
	Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (orang) guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.		60	70	80		70	85	80	
	Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memenuhi sertifikat pendidik		60	70	80		5	18	17	
	Disetiap SMP/MTs tersedia 2 (dua) orang guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) tlah memenuhi sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.		60	70	80		70	70	91	
	Disetiap SMP/MTs tersedia 2 (dua) orang guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing satu orang untuk mata pelajaran bahasa indonesia, matematika, IPA dan Bahasa Inggris.		60	70	80		100	100	100	
	Disetiap kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		60	70	80		100	100	100	
	Disetiap kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		60	70	80		100	100	100	
	Disetiap Kabupaten/Kota semua Pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		60	70	80		100	100	100	
	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan		60	70	80					

No	Indikator	Target (%)				Realisasi (%)				Ket
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
	pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.									
	Kunjungan Pengawas ke satuan Pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.		60	70	80		80	85	81	
	Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Satuan Pendidikan						75	85	87	
	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran bahasa indonesia, matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.		60	70	80		56,38	85	90	
	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.		60	70	80		67,56	85	87	
	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan Bahasa yang terdiri dari model kerangka manusia,model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/carta IPA.		60	70	80		75	85	87	
	Setiap SD/MI memiliki 100									

No	Indikator	Target (%)				Realisasi (%)				Ket
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
	judul buku pengayaan dan 10 buku referensi dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.		60	70	80		75	85	87	
	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam perminggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.		60	70	80					
	Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan tatap muka sbb :		60	70	80					
	kelas I-II : 18 jam perminggu									
	kelas III : 24 jam perminggu									
	kelas IV-VI : 27 jam perminggu						100	100	100	
	kelas VII-IX: 27 jam perminggu						100	100	100	
	Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		60	70	80		100	100	100	
	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.		60	70	80		100	100	100	

No	Indikator	Target (%)				Realisasi (%)				Ket
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
	Setiap Guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.		60	70	80		100	100	100	
	Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester		60	70	80		100	100	100	
	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik		60	70	80		100	100	100	
	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan Kota atau kantor kemenag Kab/Kota pada setiap akhir semesterrekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kab		60	70	80		100	100	100	
	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)		60	70	80		47,73	53	52	

Sumber: Dinas Pendidikan, 2010

Table II. 38
Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target (orang)	Realiasi (orang)	Persentase (%)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	7.748	7.573	97,74
2.	Pendidikan Dasar	33.895	32.649	96,32
3.	Pendidikan Kesetaraan	5.325	715	13,43

Sumber: Laporan SPM Kab. Bangka Tengah 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk SPM Jenis Pelayanan Dasar pada Pendidikan Anak Usia Dini dari target penduduk pada usia 5-6 tahun berjumlah 7.748 orang telah terealisasi sebanyak 7.573 orang. Hal ini dimaksud bahwa sudah banyak penduduk bangka tengah yang menyekolahkan anak mereka di PAUD, sehingga kesadaran masyarakat bangka tengah untuk menyekolahkan anak mereka di PAUD sudah sangat tinggi sekali. Untuk SPM Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar dari target penduduk yang berusia 7-13 tahun berjumlah 33.895 orang dan telah terealisasi sebanyak 32.649 orang, sehingga disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka sudah cukup lumayan terutama pada usia jenjang SD dan SMP. Untuk sisanya mungkin penduduk yg sudah ada di jenjang SMA/MA dan SMK. SPM Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan dari target penduduk berjumlah 5.325 orang yang tidak sekolah, hanya ada 715 orang yang terealisasi atau hanya sebanyak 715 orang yang ikut sekolah Paket baik A, B dan C sedangkan sisanya tidak ikut sekolah paket, putus sekolah atau sekolah diluar Kabupaten Bangka Tengah. Dinas Pendidikan akan terus berupaya agar penduduk yang tidak sekolah tersebut agar dapat bisa mengikuti sekolah Paket baik A, B dan C karena di Kabupaten Bangka Tengah di setiap kecamatan telah ada Lembaga-lembaga PKBM baik untuk sekolah paket A, B dan C. Dan di setiap Lembaga PKBM tersebut juga tersedia bantuan operasional langsung dari pusat (DAK Non Fisik) yaitu BOP Kesetaraan A, B dan C.

Capaian Indikator Kinerja Pendidikan

a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka yang dimaksud dengan PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Satuan layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Untuk TK disebut sebagai PAUD Formal sedangkan di luar TK disebut sebagai PAUD Non Formal. Di bawah ini adalah tabel jumlah siswa PAUD dan TK di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.39.
Jumlah Siswa PAUD Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Koba	959	1.009	1075	1058	1779
2	Pangkalan Baru	685	583	645	610	1329
3	Sungai Selan	369	298	287	333	997
4	Simpang Katis	406	284	313	330	807
5	Namang	526	417	721	298	731
6	Lubuk Besar	523	573	611	726	960
Total		3.530	3.468	3.652	3.355	6.603

Sumber : SIPD Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Dapat dilihat pada tabel di atas, pada tahun 2015-2019 jumlah siswa PAUD di setiap Kecamatan dengan jumlah siswa PAUD tertinggi ialah Kecamatan Koba. Sedangkan kecamatan dengan jumlah siswa PAUD terendah pada tahun 2019 ialah Kecamatan Namang. Hal ini disebabkan dari jumlah PAUD yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 168

lembaga. Untuk jumlah PAUD di Kecamatan Koba lebih banyak yaitu 45 lembaga sehingga jumlah siswa akan lebih banyak, di banding jumlah PAUD di Kecamatan lainnya. Dan juga untuk jumlah PAUD di Kecamatan Namang lebih sedikit yaitu 21 lembaga sehingga jumlah siswanya juga sedikit, dibanding jumlah PAUD di Kecamatan lainnya.

Tabel II.40.
Jumlah Siswa TK Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Koba	497	759	751	749	861
2	Pangkalan Baru	516	482	696	744	786
3	Sungai Selan	480	338	568	640	732
4	Simpang Katis	357	338	389	463	502
5	Namang	254	275	291	406	435
6	Lubuk Besar	212	230	280	309	283
Total		2.316	2.422	2.975	3.311	3.599

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2019 kecamatan dengan jumlah siswa TK tertinggi ialah Kecamatan Koba, sedangkan kecamatan dengan jumlah siswa TK terendah ialah Kecamatan Lubuk Besar. Hal ini disebabkan untuk jumlah TK baik negeri dan swasta di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 68 lembaga. Untuk jumlah TK baik negeri maupun swasta di Kecamatan Koba sebanyak 13 lembaga sehingga jumlah siswanya akan lebih banyak sebanyak 861 orang. Untuk Kecamatan Lubuk Besar jumlah lembaganya lebih sedikit sebanyak 5 lembaga baik TK negeri dan TK swasta sehingga jumlah siswanya juga sedikit sebanyak 283 orang dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

b) Angka pendidikan yang ditamatkan (APT)

Gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan akan semakin baik kualitas penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah. Angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Di bawah ini adalah tabel Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.41.
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
	SD/MI					
1	Jumlah penduduk yang menamatkan sekolah di jenjang pendidikan SD/MI	63.156	64.905	65.392	65.702	66.854
2	Jumlah Penduduk	166.724	174.378	177.335	182.286	186.783
3	APT SD/MI	37,88	37,22	36,87	36,04	35,79
	SMP/MTs					
1	Jumlah penduduk yang menamatkan sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	18.846	19.692	20.300	20.693	21.208
2	Jumlah Penduduk	166.724	174.378	177.335	182.286	186.783
3	APT SMP/MTs	11,30	11,29	11,45	11,35	11,35
	SMA/MA/SMK					
1	Jumlah penduduk yang menamatkan sekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	23.665	25.488	25.475	26.524	27.167
2	Jumlah Penduduk	166.724	174.378	177.335	182.286	186.783
3	APT SMA/MA/SMK	14,19	14,62	14,37	14,55	14,54
	Perguruan Tinggi					
1	Jumlah penduduk yang menamatkan sekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	5.036	5.725	6.012	6.555	6.840
2	Jumlah Penduduk	166.724	174.378	177.335	182.286	186.783
3	APT SMA/MA/SMK	3,02	3,28	3,39	3,60	3,66

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020

Pada tabel di atas dapat di lihat bahwa perkembangan APT menunjukkan tren adanya peningkatan di setiap tahunnya, yang artinya semakin tahun kemajuan pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah

semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin besar.

c) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Di bawah ini tabel perkembangan APK Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.42.
Perkembangan APK Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
PAUD						
1	Jumlah murid pada jenjang TK/RA/penitipan anak	6.173	6.336	6.666	6.578	8.067
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 4-6 tahun	10.075	9890	6.278	10.998	11.855
3	APK PAUD	61,27	64,06	67,02	68,01	68,05
SD/MI						
1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	23.122	22.965	23.092	23.831	24.111
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	20.500	19.957	21.161	20.495	23.524
3	APK SD/MI	112,79	115,07	109,13	116,28	102,50
SMP/MTs						
1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang Pendidikan SMP/MTs	8.729	9.473	9.322	9.810	9.756
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	9.523	9.374	10.215	9.690	9.609
3	APK SMP/MTs	91.66	101,05	91.26	101,24	101,53
SMA/MA/SMK						
1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	6.000	6.409	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.531	8.862	n/a	n/a	n/a

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
3	APK SMA/MA/SMK	70,33	72,32	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai APK SD/MI telah memiliki angka di atas 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua anak usia SD/MI di Kabupaten Bangka Tengah sudah bersekolah bahkan terdapat anak yang belum berusia 7 tahun sudah bersekolah di SD/MI. APK untuk jenjang SD/MI pada tahun 2015 mencapai 112,79%. Pada tahun 2016 APK SD/MI mengalami kenaikan menjadi 115,07%. Sedangkan pada tahun 2017 APK SD/MI Kabupaten Bangka Tengah menurun lagi menjadi 109,13% dan mencapai 116,28% di tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 102,50% namun masih di atas target yaitu 100%. Hal ini disebabkan masih adanya penduduk yang bersekolah di luar Kabupaten Bangka Tengah seperti di Kecamatan Pangkalanbaru.

Untuk APK SMP/MTs mengalami angka yang fluktuatif dari tahun 2015 sebesar 91,66% menjadi 101,24% pada tahun 2018. Pada tahun 2018 jumlah siswa SMP/MTs yaitu sebanyak 9.810 siswa dan turun menjadi 9.322 siswa di tahun 2017. Pada tahun 2019 APK SMP/MTs mengalami peningkatan sebesar 101,53% dari jumlah siswa sebanyak 9.756 orang terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 9.609 orang.

APK SMA/MA/SMK mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu dari 70,33% naik menjadi 72,32%. Dilihat dari jumlah siswa untuk SMA/MA/SMK terus mengalami peningkatan yaitu sebanyak 8.531 siswa di tahun 2015 naik menjadi 8.862 siswa pada tahun 2016. Untuk tahun 2017, wewenang untuk jenjang sekolah SMA/SMK/MA sederajat sudah ditangani oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

d) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Di bawah ini tabel perkembangan APM di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.43.

Perkembangan APM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
	SD/MI					
1	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	16.798	18.729	19.659	19.101	20.073
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	20.500	19.957	21.161	20.495	23.524
3	APM SD/MI	81,94	93,85	92,90	93,20	85,33
	SMP/MTs					
1	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	5.594	5.746	6.642	6.353	6.691
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	9.523	9.374	10.215	9.690	9.609
3	APM SMP/MTs	58,74	61,30	64,99	65,56	69,63
	SMA/MA/SMK					
1	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	3.684	4.136	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.531	8.862	n/a	n/a	n/a
3	APM SMA/MA/SMK	43.18	46.66	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada jenjang SD/MI, APM pada tahun 2015 sebesar 81,94%. Sementara APM SD/MI pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 93,85% dan di tahun 2017 menurun menjadi sebesar 92,90%. Angka kembali naik pada tahun 2018 menjadi sebesar 93,20%, dan di tahun 2019 menjadi 85,33%. Tahun 2019 siswa APM SD/MI menurun, disebabkan untuk Angka Partisipasi Murni SD/MI diambil dari data siswa yang sekolah dimulai dari usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun, sedangkan di Kabupaten Bangka Tengah banyak para orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di SD/MI pada usia 6 tahun dan ada juga dibawah usia 6 tahun. Data yang diambil dari usia 7 tahun sedangkan usia dibawah 7 tahun tidak diambil. Sehingga angkanya kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk APM tingkat SMP/MTs pada tahun 2015 tercatat sebesar 58,74%. Sedangkan pada tahun 2016 APM SMP/MTs mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu menjadi sebesar 61,30% dan di tahun 2017

mengalami peningkatan menjadi sebesar 64,99% serta naik lagi menjadi 65,56% di tahun 2018. Angka kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 69,63%.

e) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Tabel perkembangan APS di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.44.

Perkembangan APS Tahun 2015 s.d 2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
	SD/MI					
1	Jumlah siswa usia 7-12 tahun	20.531	21.045	19.652	19.098	20.051
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	20.500	19.957	21.161	20.495	23.524
3	APS SD/MI	1.001	1.054	929	932	852
	SMP/MTs					
1	Jumlah siswa usia 13-15 tahun	4.984	5.107	6.622	6.340	6.691
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	9.523	9.374	10.215	9.690	9.609
3	APS SMP/MTs	523	545	648	654	696
	SMA/MA/SMK					
1	Jmlh siswa usia >15 + Jmlh siswa 16-18	4.207	5.220	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.531	8.862	n/a	n/a	n/a
3	APS SMA/MA/SMK	493	589	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020

Perkembangan APS pada jenjang SD/MI di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2015-2019 trennya naik turun. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada jenjang SD/MI, APS pada tahun 2015 sebesar 1.001. Sementara APS SD/MI pada tahun 2016 naik menjadi sebesar 1.054 dan di tahun 2017 menurun menjadi sebesar 929. Angka kembali naik pada tahun 2018 menjadi sebesar 932, dan di tahun 2019 menjadi

852%. Tahun 2019 siswa APM SD/MI menurun, disebabkan untuk Angka Partisipasi Murni SD/MI diambil dari data siswa yang sekolah dimulai dari usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun, sedangkan di Kabupaten Bangka Tengah banyak para orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di SD/MI pada usia 6 tahun dan ada juga dibawah usia 6 tahun. Data yang diambil dari usia 7 tahun sedangkan usia dibawah 7 tahun tidak diambil. Sehingga angkanya kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perkembangan APS pada jenjang SMP/MTs di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2015-2019 trennya mengalami kenaikan. Untuk APS tingkat SMP/MTs pada tahun 2015 tercatat sebesar 523. Sedangkan pada tahun 2016 APS SMP/MTs mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 545 dan di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 648% serta naik lagi menjadi 654 di tahun 2018. Angka kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 696.

f) Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun dan 16–18 tahun. Angka ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anak putus sekolah. Perkembangan APtS di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.45.

Perkembangan APtS Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 s.d 2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
	SD/MI					
1	Jumlah siswa SD/MI yang putus sekolah	91	84	76	86	69
2	Jumlah seluruh siswa SD/MI	21.252	22.791	22.930	23.741	23.950
3	APtS SD/MI	0,43	0,37	0,33	0,36	0,29
	SMP/ MTs					
1	Jumlah siswa SMP/ MTs yang putus sekolah	17	96	55	56	97
2	Jumlah seluruh siswa SMP/ MTs	6.607	8.119	9.122	9.568	9.756

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
3	APtS SMP/ MTs	0,26	1,18	0,60	0,59	0,99
	SMA/SMK/MA					
1	Jumlah siswa SMA/SMK/MA yang putus sekolah	106	101	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah seluruh siswa SMA/SMK/MA	4.222	5.387	n/a	n/a	n/a
3	APtS SMA/SMK/MA	2,51	1,87	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Perkembangan APtS pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2015-2019 mengalami angka yang berfluktuatif. Pada jenjang SD/MI, jumlah siswa putus sekolah tertinggi yaitu pada tahun 2015 sebanyak 91 siswa. Kemudian jumlah tersebut menurun di tahun 2017, yaitu menjadi 76 siswa, di tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah siswa yang putus sekolah yaitu menjadi 86 siswa. Dan tahun 2019 jumlah siswa putus sekolah SD/MI menurun menjadi 69 siswa. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs, rentang tahun 2015-2019 jumlah siswa yang putus sekolah juga berfluktuatif. Jumlah siswa yang putus terbanyak terjadi di tahun 2019 yaitu sebanyak 97 siswa, dan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu hanya 17 siswa. Persoalan anak putus sekolah tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, karena diharapkan semua anak di Kabupaten Bangka Tengah terpenuhi kebutuhan akan pendidikan sesuai standar minimal pendidikan serta mencapai wajib belajar 12 tahun.

g) Angka Kelulusan (AL)

Angka Kelulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah lulusan (L) dengan jumlah siswa tingkat tertinggi (ST) pada jenjang tertentu, dinyatakan dalam persentase. Perkembangan AL di Kabupaten Bangka Tengah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.46.
Perkembangan Angka Kelulusan Tahun 2015 s.d 2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI						
1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	3.380	3.531	3.548	3.444	3.604
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	3.386	3.557	3.558	3.454	3.616
3	AL SD/MI	99,82	99,27	99,72	99,71	99,67
SMP/ MTs						
1	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/ MTs	1.954	2.428	2.504	2.745	2.861
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/ MTs pada tahun sebelumnya	1.956	2.443	2.519	2.754	2.873
3	AL SMP/ MTs	99,90	99,38	99,40	99,67	99,58
SMU/SMK/MA						
1	Jumlah lulusan pada jenjang SMU/SMK/MA	1.330	1.430	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMU/SMK/MA pada tahun sebelumnya	1.334	1.473	n/a	n/a	n/a
3	AL SMU/SMK/MA	99,70	97,08	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Angka kelulusan yang tinggi dan merata menunjukkan bahwa kinerja pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah sudah baik. Hanya saja angka lulusan ini tidak serta merta menggambarkan angka melanjutkan di jenjang yang lebih lanjut.

h) Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 atau 10 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 atau 9, dinyatakan dalam persentase. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.47.

Perkembangan AM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 s.d 2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
	SD/MI ke SMP/MTs					
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	2.587	3.269	3.354	3.315	3.451
2	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	3.281	3.531	3.548	3.444	3.604
3	AM SD/MI ke SMP/MTs	78,85	92,58	94,53	96,25	95,75
	SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA					
1	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA	2.076	2.349	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/ MTs tahun ajaran sebelumnya	2.094	2.428	2.504	2.745	2.861
3	AM SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA	93,89	91,82	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020

Berdasar tabel di atas dapat kita lihat bahwa AM di masing-masing jenjang pendidikan sebagian besar telah berada pada angka di atas 90%. Hal ini dimungkinkan juga karena banyak siswa baru yang merupakan siswa dari luar daerah, dari daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang, tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa penduduk Bangka Tengah melanjutkan sekolah keluar daerah.

i) Fasilitas Pendidikan

Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan. Pasalnya, keberadaan sarana dan prasarana ini akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah ialah kondisi bangunan yang baik. Data kondisi bangunan sekolah di Kabupaten Bangka Tengah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.48.

Perkembangan Sekolah Kondisi Bangunan Baik Tahun 2015 s.d 2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
	SD/MI					
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	658	671	690	710	743
2	Jumlah seluruh bangunan sekolah pendidikan SD/MI	790	794	807	819	845
3	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	83,29	84,51	85,50	86,69	87,93
	SMP/MTs					
1	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	242	266	275	291	305
2	Jumlah seluruh bangunan sekolah pendidikan SMP/MTs	272	285	289	302	314
3	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	88,97	93,33	95,16	96,36	97,13
	SMA/ MA /SMK					
1	Jumlah sekolah pendidikan SMA/ MA /SMK kondisi bangunan baik	209	224	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah seluruh bangunan sekolah pendidikan SMA/ MA /SMK	244	256	n/a	n/a	n/a
3	Sekolah pendidikan SMA/ MA /SMK kondisi bangunan baik	85,66	87,50	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

j) Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Ketersediaan sekolah sangat terkait dengan partisipasi sekolah. Dengan tersedianya infrastruktur yang mendukung serta merata diharapkan tingkat partisipasi sekolah dapat meningkat yang nantinya juga akan mendukung pencapaian wajar pendidikan dasar 12 tahun.

Ketersediaan sekolah di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.49.
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2015 s.d 2019 Kabupaten Bangka Tengah

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI						
1	Jumlah Gedung Sekolah	99	100	101	101	101
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	20.304	20.836	21.176	21.498	23.613
3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	49	48	48	47	43
SMP/MTs						
1	Jumlah Gedung Sekolah	27	29	29	30	30
2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	9.410	9.737	10.213	10.125	10.282
3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	29	30	28	30	29
SMA/MA/SMK						
1	Jumlah Gedung Sekolah	15	15	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah Penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.556	8.218	8.650	8.099	6.506
3	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK	17,53	18,25	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa untuk jenjang Sekolah Dasar, setiap 10.000 penduduk usia sekolah tahun 2019 tersedia 43 sekolah. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama pada tahun 2019 tersedia 30 sekolah untuk setiap 10000 anak usia sekolah. Untuk itu perlu dipertimbangkan terkait peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana yang menunjang agar rasio ketersediaan sekolah dapat ditingkatkan.

k) Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar

Rasio guru siswa perpendidikan dasar adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa pada jenjang tertentu dikali 10.000. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah guru siswa disetiap satu sekolah baik jenjang SD dan SMP. Tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pendidikan. Di dalam penghitungan rasio ini yang dilihat adalah jumlah guru dan jumlah siswa usia sekolah (7 – 12 tahun, 13 – 15 tahun, atau 16 – 18 tahun). Rasio guru siswa perpendidikan dasar dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel II.50.

Rasio Guru Siswa per Pendidikan Dasar Tahun 2015 s.d 2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
	SD/MI					
1	Jumlah Guru	975	1.236	1.117	1.197	1.302
2	Jumah Murid	22.972	21.927	22.930	23.741	23.950
3	Rasio Guru / Murid sekolah SD/MI	428	564	487	504	544
	SMP/MTs					
1	Jumlah Guru	417	395	431	530	445
2	Jumlah Murid	9.018	6.347	9.122	9.568	9.756
3	Rasio Guru / Murid sekolah SMP/MTs	462	622	472	554	456
	SMA/MA/SMK					
1	Jumlah Guru	403	342	n/a	n/a	n/a
2	Jumah Murid	5.943	4.171	n/a	n/a	n/a
3	Rasio Guru / Murid sekolah SMU/MA/SMK	678	820	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020

l) Rasio guru siswa per kelas

Rasio guru siswa perpendidikan dasar adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah siswa pada jenjang tertentu dikali 1.000. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah guru siswa disetiap satu sekolah baik jenjang SD dan SMP. Tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pendidikan. Di dalam penghitungan rasio ini yang dilihat adalah jumlah guru dan jumlah siswa usia sekolah (7–12 tahun, 13–15 tahun,

atau 16–18 tahun). Rasio guru siswa pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.51.
Jumlah Guru Siswa per Kelas Tahun 2015 s.d 2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI						
1	Jumlah Guru	975	1.236	1.117	1.197	1.302
2	Jumlah Murid	22.972	21.927	22.930	23.741	23.950
3	Rasio Guru / Murid sekolah SD/MI	43	56	48	50	54
SMP/MTs						
1	Jumlah Guru	417	395	431	530	445
2	Jumlah Murid	9.018	6.347	9.122	9.568	9.756
3	Rasio Guru / Murid sekolah SMP/MTs	46	62	47	55	46
SMA/MA/SMK						
1	Jumlah Guru	403	342	n/a	n/a	n/a
2	Jumlah Murid	5.943	4.171	n/a	n/a	n/a
3	Rasio Guru / Murid sekolah SMA/MA/SMK	68	82	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

m) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV merupakan jumlah guru berijazah kualifikasi terhadap jumlah guru seluruh di Kabupaten Bangka Tengah secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.52.
Guru yang Memenuhi kualifikasi S1/D-IV Tahun 2015 s.d 2019
Kabupaten Bangka Tengah

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah guru berijazah kualifikasi	1.680	1.802	1.352	1.523	1.506
2	Jumlah guru seluruh	2.071	2.089	1.548	1.727	1.832
3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	81,12	85,93	87,34	88,19	82,21

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV baru sebesar 82,21%. Masih ada sebesar

17,19% guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV, tetapi ada beberapa guru yang sedang melanjutkan pendidikannya ke tingkat S1/D-IV.

n) Guru yang bersertifikasi

Guru yang bersertifikasi merupakan jumlah guru bersertifikasi terhadap jumlah guru seluruh di Kabupaten Bangka Tengah secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.53.

Guru yang bersertifikasi Tahun 2015 s.d 2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Guru yang Bersertifikat SD/MI	55,64	57,07	62,76	62,32	61,21
2	Persentase Guru yang Bersertifikat SMP/MTs	15,50	22,39	36,43	33,21	35,66
3	Persentase Guru yang Bersertifikat SMA/MTs	22,47	25,17	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020

2.3.1.1.2 Urusan Kesehatan

Terwujudnya pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu tujuan pembangunan bidang kesehatan. Oleh karena itu, beberapa indikator digunakan dalam analisis guna melihat perkembangan kondisi kesehatan. Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota yang meliputi 12 Jenis Layanan Dasar.

Standar Pelayanan Minimal

Di bawah ini ialah Tabel SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019.

Tabel II.54**Tabel Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.764	3.672	97,60
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.594	3.559	99,00
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir	3.581	3.567	99,60
4	Pelayanan Kesehatan Balita	10.484	10.107	96,40
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	32.153	32.153	99,80
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	97.738	120.289	81,25
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	13.354	11.615	86,97
8	Pelayanan Pada Penderita Hipertensi	41.734	27.879	66,13
9	Pelayanan Pada Penderita Diabetes Melitus	3.561	3.502	98,34
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	307	296	96,41
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.615	1.360	84,20
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	4.139	3.823	92,37

Sumber: Laporan SPM Tahun 2019

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian SPM, telah dilakukan upaya dalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat secara optimal, diantaranya ketersediaan SDM Kesehatan yang kompeten, ketersediaan sarana dan prasarana berupa unit pelayanan kesehatan sudah cukup baik dan terakreditasi, Sarana prasarana yang memadai. Indikator-indikator yang tidak tercapai diantaranya disebabkan oleh belum maksimalnya inovasi

yang telah dijalankan, masih kurang nya kesadaran masyarakat baik usia produktif maupun lansia untuk secara aktif memeriksakan kesehatannya.

Capaian Indikator Kinerja Kesehatan

a) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBt)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2015 – 2019), capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Bangka Tengah memperlihatkan tren yang berfluktuasi. Angka kematian bayi pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 2 per 1000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI, AKB per 1000 kelahiran bayi dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.55.
Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita Tahun 2015-2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kelahiran Bayi	3584	3430	3344	3500	3572
2	Jumlah Bayi Lahir Hidup	3561	3408	3327	3479	3564
3	Jumlah Kematian Bayi	23	22	17	21	8
4	Angka Kematian Bayi	23/3561 KH	22/3408 KH	17/3327 KH	21/3479 KH	8/3564 KH
5	Angka Kelangsungan hidup bayi	-5	-5	-4	-5	-1
6	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	28/3561	22/3408	20/3327	27/3479	9/3564
7	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		17/3561	7/3408	12/3479	3/3564
8	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	2/3561	2/3408	0,00	6/3479	6/3564

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020

Permasalahan yang dihadapi dalam penurunan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Anak Balita adalah:

1. Masih banyaknya bidan di poskesdes yang belum dilatih manajemen asfiksia, manajemen Bayi dengan Berat Lahir Rendah/BBLR, dan Pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri Neonatal/PPGDON.
2. Masih minimnya prasarana alat kesehatan yang esensial di poskesdes (seperti oksigen, ambu bag, ANC Kit).
3. Terlambatnya penanganan bayi baru lahir yang akhirnya terlambat mendapat pertolongan di tempat rujukan (Rumah Sakit).
4. Perlunya dilakukan SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang) pada masa balita untuk mendeteksi penyimpangan perkembangan dan pertumbuhan.

Di Kabupaten Bangka Tengah, kebijakan terkait kesehatan anak difokuskan pada intervensi layanan kesehatan meliputi: peningkatan pelayanan neonatal dan ibu, peningkatan cakupan imunisasi, peningkatan upaya perubahan perilaku, dan penanganan permasalahan gizi anak. Kematian anak balita adalah kematian yang terjadi pada anak usia 12–59 bulan. Jumlah kematian bayi pada tahun 2019 adalah 8 bayi. Kematian bayi dapat disebabkan beberapa hal, antara lain : asfiksia dan Bayi dengan Berat Lahir Rendah/BBLR, Kelainan kongenital dan kelainan bawaan.

Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh.

b) Fasilitas Kesehatan

Selain layanan Kesehatan yang harus selalu baik, keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin

berkurang pula tingkat kesakitannya. Upaya kesehatan dasar masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah diharapkan semakin meningkat dengan didaptkannya sertifikat ISO dan akreditasi di beberapa puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah Posyandu di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019 sebanyak 136 buah dan jumlah balita sebanyak 10484 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita mencapai 10:1000. Hal ini berarti bahwa dari 10 posyandu di Kabupaten Bangka Tengah melayani 1000 balita. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.56.
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah posyandu	136	136	138	138	139
2	Jumlah balita	12.593	13.675	11.770	14.385	10.484
3	Rasio	9	9	9	9	10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020

Tabel II.57.
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Puskesmas	8	8	8	9	9
2	Jumlah Poliklinik	2	2	0	0	0
3	Jumlah Pustu	18	18	20	20	20

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu tidak mengalami banyak perubahan dari tahun 2015-2019. Pada tahun 2018, jumlah puskesmas mengalami penambahan menjadi 9 puskesmas, sampai dengan tahun 2019, jumlah Puskesmas masih tetap 9 Puskesmas.

Tabel II.58.
Cakupan Puskesmas Tahun 2015 s.d 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah puskesmas	8	8	8	9	9
2	Jumlah seluruh kecamatan	6	6	6	6	6
3	Cakupan Puskesmas (%)	133	133	133	150	150

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, cakupan puskesmas tahun 2015-2017 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 133, sedangkan tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 150 persen. Kenaikan tersebut disebabkan karena pada tahun 2018-2019 jumlah puskesmas di Kabupaten Bangka Tengah bertambah 1 yang semula 8 puskesmas menjadi 9 puskesmas.

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu keberadaan fasilitas kesehatan juga sangat memegang peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya. Upaya kesehatan dasar masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah diharapkan semakin meningkat dengan didapatkannya sertifikat ISO dan akreditasi di beberapa puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II. 59.
Jumlah Rumah Sakit
di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	-	-	-	-	-
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	-	-	-	-	-
4	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
5	Jumlah Rumah Sakit Swasta	-	1	1	1	1
	Jumlah Rumah Sakit	1	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020

Jumlah rumah sakit di wilayah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2016 bertambah satu Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit Siloam yang dibangun di wilayah Kecamatan Pangkalan Baru. Pada tahun 2020 dibangun Rumah Sakit Pratama melalui APBN Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kecamatan Simpangkatis.

c) Tenaga Kesehatan

Tabel. II.60.
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dokter Umum	31	29	27	54	56
2	Dokter Spesialis	6	7	7	7	7
3	Dokter Gigi	5	8	8	11	12

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
4	Bidan	248	264	249	566	566*
5	Perawat	113	121	112	314	330
6	Apoteker	5	5	8	21	24
7	Teknis Kefarmasian	0	0	31	36	45
8	Epidemiologi Kesehatan	6	6	6	9	9
9	Sanitasi Lingkungan	0	0	14	13	22
10	Nutrisisionis	0	0	18	12	25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah dokter umum yang ada di Kabupaten Bangka Tengah mengalami fluktuatif cenderung meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 54 orang di tahun 2018, dan menjadi 56 orang di tahun 2019. Dokter gigi jumlahnya mengalami peningkatan, dari tahun 2015 dari 5 orang menjadi 12 orang di tahun 2019. Jumlah perawat mengalami kenaikan dari tahun tahun ke tahun, yaitu 113 orang di tahun 2015, sedangkan di akhir tahun 2019 bertambah menjadi 330 orang. Selain itu, jumlah tenaga apoteker juga mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebanyak 5 orang sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 24 orang. Jumlah sarjana teknis kefarmasian mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebanyak 31 orang sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 45 orang. Untuk jumlah tenaga epidemiologi kesehatan juga mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebanyak 6 orang sampai 2019 yaitu sebanyak 9 orang. Jumlah tenaga sanitasi lingkungan pada tahun 2019 sebanyak 22 orang. Jumlah tenaga nutrisisionis pada tahun 2019 sebanyak 25 orang.

d) Cakupan Pelayanan Kesehatan

Tabel II.61.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2015 s.d 2019
Kabupaten Bangka Tengah

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan	771	647	648	619	727
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	771	779	750	750	753
3	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100	83,01	86,42	82,50	96,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2015-2019 persentase cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani fluktuatif dari tahun 2017 yaitu sebesar 86,42 persen menjadi 82,50 persen di tahun 2018, namun meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 96,60%.

Tabel II.62.

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2015 s.d 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	3511	3398	3245	3485	3559
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	3545	3742	3578	3584	3594
3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	99,04	88,6	90,7	97,24	99

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 angkanya berfluktuatif. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 88,6 % tahun 2016 menjadi 99 % persen di tahun 2019.

Tabel II.63.
Cakupan desa/kelurahan UCI
Tahun 2015 s. d 2019 Kabupaten Bangka Tengah

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa/kelurahan UCI	61	61	62	63	61
2	Jumlah seluruh desa/kelurahan	63	63	63	63	63
3	Cakupan desa/kelurahan UCI (%)	96,83	96,83	98,41	100	96,83

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah desa/kelurahan dimana >80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase desa yang mencapai UCI pada tahun 2019 sebesar 96,83% (63 desa dari 63 desa) artinya >80% dari jumlah bayi yang ada di seluruh desa/kelurahan sudah mendapat imunisasi dasar lengkap.

Tabel II.64.
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
Tahun 2015 s.d 2019 Kabupaten Bangka Tengah

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan	6	14	8	12	5
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	6	14	8	12	5
3	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
4	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	98,75	88,95	94,28	89,96	91,51
5	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	2	1	1	3	0
6	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	59	87,20	56,87	31	34,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Tabel II.65.

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Menular
Tahun 2015 s.d 2019 Kabupaten Bangka Tengah

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	112	117	107	238	100
2	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	n/a	0,0007	0,00123	0,00132	0,00105
3	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3	4	3	2	0
4	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	n/a	101	85	104	142
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	86	65	87	101	57
6	Penderita diare yang ditangani	4145	3183	2633	2131	2313
7	Angka kejadian Malaria	35	15	0	29	5
8	Tingkat kematian akibat malaria	0	0	0	0	0
9	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	34	15	11	12	9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular tahun 2015 s.d 2019 di Kabupaten Bangka Tengah nilai rata-rata persentasenya mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS, walaupun tertangani namun kasus yang terjadi cenderung meningkat.

Tabel II.66.

**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Tahun 2015 s.d 2019 Kabupaten Bangka Tengah**

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kunjungan pasien miskin	21.297	28.520	13.819	27.991	51.288
2	Jumlah seluruh penduduk miskin	37.587	38.393	35.972	37.548	39.327
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujuk Pasien Masyarakat Miskin (%)	56,6	74,2	38,4	74,5	130

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2015-2019 di Kabupaten Bangka Tengah angkanya berfluktuatif di tiap tahun. Di tahun 2015-2016 angka cakupan sebesar 56,6 persen, sedangkan di tahun berikutnya turun hanya menjadi 38,4 persen di tahun 2017, dan di tahun 2018 sebesar 74,5 persen. Pada Tahun 2019 meningkat lagi sebesar 130 persen Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk miskin secara drastis dalam kurun waktu 2 tahun.

Tabel II.67.

**Cakupan Pelayanan Kesehatan lainnya
Tahun 2015 s.d 2019 Kabupaten Bangka Tengah**

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan kunjungan bayi	100,3%	96,45%	95%	93,34%	106,4%
2	Cakupan puskesmas	8	8	9	9	9
3	Cakupan pembantu puskesmas	n/a	20	0	0	0
4	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	92,7%	88,50%	93,77%	95,90%	97,58%
5	Cakupan pelayanan nifas	96,0%	85,09%	89,43%	91,23%	94,55%
6	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	90%	88,36%	99,8%	117,7%	100,80%
7	Cakupan pelayanan anak balita	59%	82%	85,7%	71,7%	96,4%
8	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (Balita Kurus)	n/a	n/a	503	394	374

9	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%	100%	99,2%	99,8%
10	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	n/a	57040	119760	119054	97,58%
11	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan capaian pelayanan kesehatan dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Cakupan kunjungan bayi tahun 2015-2019 di Kabupaten Bangka Tengah angkanya berfluktuatif. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 93,34 persen menjadi 106,4 persen di tahun 2019.
2. Cakupan puskesmas tahun 2015-2016 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 133, sedangkan tahun 2018-2019 mengalami kenaikan sebesar 150. Kenaikan tersebut disebabkan karena pada tahun 2018 jumlah puskesmas di Kabupaten Bangka Tengah bertambah 1 yang semula 8 puskesmas menjadi 9 puskesmas, dan sampai tahun 2019 kinerja masih tetap sama dengan tahun sebelumnya.
3. Cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2016 sebanyak 20 Pustu, sedangkan tahu-tahun selanjutnya tidak ada lagi.
4. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 mengalami fluktuatif dari tahun 2015-2019, pada tahun 2019 capaian cakupan sebesar 97,58 persen.
5. Cakupan pelayanan nifas 94,55 persen pada tahun 2019.
6. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 100,80 persen pada tahun 2019.
7. Cakupan pelayanan anak balita 96,4 persen pada tahun 2019.

8. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin sebanyak 374 anak pada tahun 2019.
9. Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat 99,8 persen pada tahun 2019.
10. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 97,58 persen pada tahun 2019.
11. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) sebesar 100 persen dari tahun 2015-2019.
12. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam sebesar 100 persen dari tahun 2015-2019.

2.3.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Urusan Pekerjaan Umum

Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bangka Tengah yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah. Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tabel II.68.
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari (%)	64,78	64,78	74,20	76,55	82,08
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik (%)	80,00	79,85	86,18	90,80	92,33

Sumber: data diolah, 2020

Tabel II.69.
Capaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang jalan (km)	292,38	345,71	346,72	346,72	346,75
Kondisi baik (km)	224,63	213,89	227,88	244,52	255,55
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik (%)	76,83	61,87	65,72	70,52	73,70
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	50,76	60,91	65,99	67	70,05
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (%)	n/a	39,86	86,14	90,85	93,70
Persentase tersedianya air baku untuk pertanian pada sistem irigasi teknis (%)	n/a	61,54	66,14	69,57	72,25
Persentase berkurangnya luasan kawasan rawan banjir (%)	n/a	42,05	28,34	18,94	9,09
Persentase penduduk yang terlayani drainase perkotaan (%)	66,85	70,89	72,62	76,39	79,24
Persentase Luasan RTH publik dari luas wilayah ber HPL/HGB (%)	7,6	7,63	17,81	n/a	30,95

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 ke tahun 2016 panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 224.63 km menjadi 213.89 km. Hal ini disebabkan karena adanya banjir di beberapa lokasi yang mengakibatkan kerusakan akses jalan. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016-2019 mengalami kenaikan dari 213,89 di tahun 2015 menjadi 255,55 persen di tahun 2019. Kabupaten Bangka Tengah juga memiliki sejumlah areal persawahan yang telah dilengkapi dengan jaringan irigasi. Berdasarkan data tersebut di atas, luas daerah irigasi dalam kondisi baik terhitung pada tahun 2015 seluas 85 Ha dengan persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik sebesar 50.76 persen. Pada tahun 2019, luasan daerah irigasi dalam kondisi baik seluas 132 Ha sehingga capaian sasaran sebesar 70,05 persen.

Selanjutnya, Pada tahun 2016-2017, Indikator sasaran Persentase RTH Publik yang dihitung adalah luas RTH disbanding dengan luas perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru, hingga sampai dengan tahun 2016 belum ada penambahan untuk luasan RTH Publik pada perkotaan. Kabupaten Bangka Tengah saat ini memiliki luasan RTH seluas 414,31 ha atau 7,6% dari luasan wilayah perkotaan di Kota Koba dan Pangkalanbaru, dengan luasan kawasan Kota Koba seluas 2.298,56 Ha dan Kota Pangkalan Baru seluas 3.150,65 Ha. Kemudian pada tahun 2019 ruang terbuka hijau yang tersedia di Kabupaten bertambah menjadi seluas 70.539,826 atau sebesar 30,95% dari jumlah luas wilayah ber HPL/HGB yaitu sebesar 227.911,63 Ha

2.3.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Standar Pelayanan Minimal

Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah indikator rumah layak huni, dihitung berdasarkan jumlah rumah layak huni pada tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan bidang urusan Perumahan Rakyat pada Kabupaten yaitu Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel. II.70

Realisasi SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Target	Persentase
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a

Ket.: Pada tahun 2019 untuk kedua Jenis Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah belum memiliki target sesuai perencanaan OPD.

Capaian Indikator Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel II.71

Capaian Indikator Bidang Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Sasaran	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	96,80	97,15	97,16	97,22	97,28
2	Persentase luasan permukiman kumuh (%)	0,34	0,32	0,31	0,30	0,25

3	Persentase sarana dan prasarana di bidang perhubungan yang terpenuhi (%)	58,65	66,08	67,69	76,49	83,72
4	Jumlah uji KIR angkutan umum	n/a	n/a	76 Unit	136 Unit	110 Unit
5	Persentase layanan angkutan darat (%)	n/a	n/a	3,38	3,38	3,38

Sumber: Diperkimhub, 2020

Pengentasan rumah tidak layak huni yang dihuni menjadi rumah layak huni/memadai bagi masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019 berhasil tercapai menjadi sebesar 97,28%. Sedangkan luasan permukiman pada tahun 2015 hingga tahun 2019 menurun dari sebesar 0,34 persen turun dari tahun ke tahun menjadi 0,25 persen untuk luasan permukiman kumuh pada tahun 2019.

2.3.1.1.5 Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan terkait urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas sesuai Permendagri No. 101/2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri No. 114/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri No. 121/2018 Tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Tabel II.72

Realisasi SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (%)	n/a	75,76	90,16	84,21	90,90
	a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	n/a	3 x / hari	3 x / hari	3 x / hari	3 x / hari
	b. Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kabupaten / Kota	n/a	0,61 / RT	0,61 / RT	0,61 / RT	0,61 / RT
	c. Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (%)	n/a	-	27,89	27,88	23,70
2	Cakupan Rasio petugas Perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten/ Kota (%)	n/a	-	79,07	53,52	43,52
	a. Cakupan Pelayanan Kebakaran (%)	n/a	-	83,33	83,33	81,48
	b. Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK (%)	n/a	-	33,33	33,33	33,33
	c. Persentase aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi (%)	n/a	75,76	90,16	84,21	90,90
	d. Jumlah mobil pemadam kebarakan di atas 3000 – 5000 Liter pada WMK		3 x / hari	3 x / hari	3 x / hari	3 x / hari
3	Pelayanan informasi rawan bencana					
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	n/a	n/a	n/a	n/a	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	2015	2016	2017	2018	2019
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	n/a	n/a	n/a	n/a	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	n/a	n/a	n/a	n/a	100%

Sumber: Data diolah, 2020

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tabel II.73.
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2015 s.d 2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Linnmas	420	420	420	421	422
2	Jumlah penduduk	166.724	174.378	177.335	182.286	186.783
3	Rasio jumlah Linmas per 10000 penduduk	25,19	24,09	23,68	23,10	22,59
4	Persentase penurunan gangguan ketertiban dan ketentraman umum (%)	3	6,87	6,56	5,26	7
5	Persentase Penegakan PERDA (%)	5	6,67	7,57	6,55	7,3

Sumber: Satpolpp, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio jumlah Linmas per 10000 penduduk mengalami fluktuatif cenderung turun, walaupun angka pembandingnya mengalami kenaikan yang tidak signifikan. Persentase penurunan gangguan trantibum dan Persentase Penegakan PERDA, juga mengalami naik turun namun di akhir periode meningkat dari 3-5 % menjadi 7-7,3%.

2.3.1.1.6 Urusan Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial.

Standar Pelayanan Minimal

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pelayanan dasar yang dilaksanakan adalah:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Tabel II.74
Capaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti	10	15	150%
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di Luar Panti	2	2	100%
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	1	1	100%

4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	3	5	166%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	16	21	131%

Untuk mencapai SPM dilaksanakan dengan dana dari APBN Kementerian Sosial dan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk tahun selanjutnya perlu adanya anggaran APBD Kabupaten Bangka Tengah yang lebih diutamakan lagi dan Mengusulkan tambahan anggaran. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mengupayakan agar kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam SPM untuk lebih diperhatikan lagi. Salah satu permasalahan lainnya adalah sarana dan prasarana kegiatan yang masih kurang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Capaian Indikator Bidang Urusan Sosial

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Namun pemerintah daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Secara prinsip, bantuan diberikan untuk meringankan beban terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar, namun seringkali kurang bersifat produktif. Karena itu, besaran sebagian bantuan dialihkan pada kegiatan lain seperti kegiatan padat karya yang hasil akhirnya dapat meningkatkan kemampuan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Tabel II.75.

PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2015 sd 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	8149	8731	8073	8174	8995
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	9590	10731	10731	10365	9385
3	PMKS yang memperoleh bantuan (%)	84,97	81,36	75,23	78,86	95,84

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, persentase PMKS yang memperoleh bantuan mengalami fluktuatif dari kurun waktu tahun 2015-2019, namun cenderung meningkat jika dibandingkan dari awal periode sampai ke akhir tahun 2019 yaitu dari 84,97 persen menjadi 95,84 persen. Hal ini didorong beberapa factor yang mempengaruhi diantaranya adanya koordinasi yang kuat dalam penanganan masalah sosial dengan Dinas Sosial terkait, Dinas Sosial Provinsi serta Kementerian Sosial

2.3.1.2 Urusan Wajib Non Dasar

2.3.1.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha-usaha baru kreatif diharapkan dapat mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja.

Tabel II.76.

Pencari kerja yang ditempatkan Tahun 2015 s.d. 2019
Kabupaten Bangka Tengah

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	124	88	227	225	105
2	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	350	760	490	394	318
3	Pencari kerja yang ditempatkan (%)	35,43	11,58	46,32	57,10	33,33

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami fluktuatif dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Persentase tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 57,1 persen, namun jumlah pencari kerja yang mendaftar tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 760 orang, dengan persentase pencari kerja yang ditempatkan paling sedikit sebesar 11,58 persen.

Tabel II.77.

Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan
di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Lapangan Pekerjaan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	31.548	33.453	33.818	34.631	26.326
2	Pertambangan dan Penggalian	13.883	12.986	14.739	15.065	25.477
3	Industri Pengolahan	4.326	4.502	5.740	5.123	
4	Listrik, Gas dan Air	304	332	295	311	
5	Bangunan	2.966	3.576	4.202	3.837	
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Tangga dan Hotel	14.881	17.259	16.586	19.456	24.847
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	2.071	2.158	2.545	2.325	
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan	1.223	1.330	1.818	2.042	13.185

No	Lapangan Pekerjaan	2015	2016	2017	2018	2019
	Jasa Perusahaan					
9	Jasa Kemasyarakatan	8.769	9.106	10.722	11.647	
10	Jasa Tenaga Kerja Bidang Lainnya					22.395
Total		74.271	79.971	84.702	94.437	93.483

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab Bangka Tengah Tahun 2019

Jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015-2018 paling tinggi di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan yaitu sebesar 34.631 orang. Sedangkan jumlah paling kecil berasal dari sektor listrik, gas, dan air. Pada tahun 2019 data yang diperoleh untuk sector pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan menurun menjadi 26.326, sedangkan tenaga kerja yang paling banyak di sektor jasa di jasa kemasyarakatan dan bidang lainnya sebanyak 41.680 orang

Tabel II.78.

Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka Tengah

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	8	6	3	7	8
2	Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	9	6	3	7	8
3	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (%)	66,67	100	100	100	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah pada tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017, yaitu dari 3 kejadian menjadi 7 kejadian. Dari 7 kejadian tersebut semuanya diselesaikan.

2.3.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada hakekatnya manusia diciptakan menjadi perempuan dan laki-laki agar bisa saling melengkapi guna membangun sinergi dan untuk keberlangsungan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya terjadi dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Secara statistik, pada umumnya kaum perempuan mendapatkan posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan. Disisi lain, rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak menimbulkan tindak kekerasan, banyaknya anak yang dipekerjakan atau dilacurkan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) rendah, Angka Kematian Bayi (AKB) tinggi, gizi kurang, gizi anak kurang yodium, dan 60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini merupakan hasil akumulasi dari nilai kultur-kultural dari suatu masyarakat.

Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan atau RPJM sebagai Landasan Hukum menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan keluhuran harkat dan martabatnya dan sebagai warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban, tanggungjawab, peranan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan. Program/kegiatan unggulan *three end* yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- Informasi hak perempuan dan anak menjangkau seluruh masyarakat Indonesia.
- Berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak.
- Berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah.
- Dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga, Pemda, dan Lembaga Masyarakat).

2. Akhiri Perdagangan Manusia

- Terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak).
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia.
- Terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui Gugus Tugas TPPO.
- Memastikan setiap calon TKW mendapatkan pelatihan yang memadai.

3. Akhiri Kesenjangan Ekonomi

- Memastikan K/L terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha.
- Memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan.
- Menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro.
- Mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi perempuan inovator.

a) Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Tabel di bawah ini adalah tabel Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019.

Tabel II.79.
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2015 s.d 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pekerja perempuan di pemerintah	2275	2252	3133	2114	2302
2	Jumlah pekerja perempuan	7363	n/a	11.477	12.093	13.231
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah (%)	30,90	n/a	27,30	17,48	17,40

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan data di atas dari tahun 2015-2019, jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah secara umum mengalami fluktuatif, namun persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah cenderung menurun,

meskipun jumlah pekerja perempuan yang bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan sebagai pekerjaan utama cenderung meningkat. Diantara tahun 2015 s.d 2019 persentase terkecil berada di akhir tahun 2019 yaitu hanya sebesar 17,40 persen, sedangkan persentase tertinggi tahun 2015 sebesar 30,90 persen. Menurunnya persentase jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah mengindikasikan bahwa lebih banyak perempuan yang bekerja di luar sektor pemerintah yang semakin meningkat.

b) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tabel II.80.
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	26.786	n/a	30.192	36.996	33.816
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	60.826	n/a	63.684	65.189	66.217
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	44,04	n/a	47,41	56,75	51,07

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase partisipasi angkatan kerja perempuan dalam kurun waktu tahun 2015-2018 mengalami peningkatan namun pada tahun 2019 mengalami penurunan, walaupun jika dibandingkan antara tahun 2015 dan 2019 partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung meningkat. Hal ini berarti bahwa pada Tahun 2019 terdapat 51,07 persen jumlah angkatan kerja perempuan di Kabupaten Bangka Tengah berpartisipasi dalam mencari pekerjaan.

c) Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Tabel II.81.

Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Yang Diselesaikan
2015	16 kasus	17 kasus
2016	17 kasus	17 kasus
2017	15 Kasus	15 kasus
2018	24 kasus	24 kasus
2019	17 kasus	17 kasus

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Tabel di atas menyajikan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah mulai tahun 2015 s.d. 2019. Dari tahun 2015-2017 kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2018, kasus kekerasan mengalami kenaikan dari 15 kasus menjadi 24 kasus. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kasus menjadi sebanyak 17 kasus. Seluruh kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

2.3.1.2.3 Urusan Pangan

a) Ketersediaan Pangan Utama

Tabel II.82.

Ketersediaan Pangan
di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kilo)	16.883.000	17.671.000	19.689.000	20.915.000	43.197.000
2	Jumlah penduduk	166.724	174.378	177.335	182.286	186.783
3	Ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk	101,263	101,337	111,027	114,737	231,268

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk selama kurun waktu 2015-2019 mengalami peningkatan.

b) Konsumsi Kebutuhan Penduduk

Tabel II.83.

Jumlah Konsumsi Kebutuhan Penduduk
di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A.	Padi-padian					
1	Beras (Kg/Kap/Th)	94,4	95,9	97,0	97,6	98
2	Jagung (Kg/Kap/Th)	1,1	1,4	1,5	1,5	2,9
3	Terigu (Kg/Kap/Th)	12,6	12,6	12,5	12,6	11,7
B.	Umbi-umbian					
1	Singkong (Kg/Kap/Th)	5.9	6.0	6,0	6,1	5,3
2	Ubi Jalar (Kg/Kap/Th)	2.6	2.8	2,8	2,9	4,8
3	Kentang (Kg/Kap/Th)	0.9	1.0	1,0	1,0	0,9
4	Sagu (Kg/Kap/Th)	0.6	0.7	0,7	0,7	0,3
5	Umbi Lainnya (Kg/Kap/Th)	3.0	3.1	3,2	3,2	4,3
C	Pangan Hewani					
1	Daging Ruminansia (Kg/Kap/Th)	2.3	2.7	2,7	2,7	2
2	Daging Unggas (Kg/Kap/Th)	9.5	10.1	10,1	10,2	10,5
3	Telur (Kg/Kap/Th)	10.3	10.2	10,2	10,3	8,2
4	Susu (liter/Kap/Th)	15.1	15.0	15,4	15,8	17,9
5	Ikan (Kg/Kap/Th)	64.2	68.9	69,4	70,3	67,2
D	Minyak dan lemak					

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Minyak Kelapa (Liter/Kap/Th)	0.5	0.5	0,5	0,5	0,5
2	Minyak Sawit (Liter/Kap/Th)	8.7	8.7	8,7	8,7	9,3
E	Buah/ Biji Berminyak					
1	Kelapa (Kg/Kap/Th)	6.3	6.6	6,6	7,3	5,2
2	Kemiri (Kg/Kap/Th)	0.2	0.2	0,2	0,2	0,2
F	Kacang-kacangan					
1	Kedelai (Kg/Kap/Th)	3.3	3.4	3,5	3,5	3,1
2	Kacang Tanah (Kg/Kap/Th)	0.1	0.2	0,3	0,2	0,5
3	Kacang Hijau (Kg/Kap/Th)	0.0	0.0	0,0	0,0	0.0
4	Kacang Lainnya (Kg/Kap/Th)	0.1	0.1	0,1	0,1	0,2
G	Gula					
1	Gula Pasir (gr/Kap/Th)	5.2	5.2	5,2	14,3	5,2
2	Gula Merah (gr/Kap/Th)	0.1	0.1	0,6	0,2	0,1
H	Sayuran dan Buah					
1	Sayur (Kg/Kap/Th)	64.2	68.9	69,9	73,2	73,4
2	Buah (Kg/Kap/Th)	30.4	34.3	35,7	37,7	38,3
I	Lain - lain					
1	Bumbu-Bumbuan (gr/Kap/Th)	0.9	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, konsumsi beras di Kabupaten Bangka Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2015-2019 yaitu 94,4 Kg/Kap/Th di Tahun 2015 menjadi 98 Kg/Kap/Th di Tahun 2019. Jumlah konsumsi jagung dari tahun 2015 ke 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1,1 Kg/Kap/Th pada tahun 2015 menjadi 2,9 Kg/Kap/Th pada tahun 2019, sedangkan jumlah konsumsi

terigu dari tahun 2015 ke 2019 mengalami penurunan menjadi 12,6 Kg/Kap/Th pada tahun 2015 menjadi 11,7 Kg/Kap/Th pada tahun 2019. Konsumsi penduduk terhadap umbi-umbian Tahun 2019 secara umum mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 pada konsumsi ubi jalar dan umbi lainnya. Untuk konsumsi pangan hewani paling tinggi adalah konsumsi ikan yaitu sebesar 67,2 Kg/Kap/Th di Tahun 2019. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan besaran konsumsi di Tahun 2015. Untuk besaran konsumsi minyak dan lemak konsumsi minyak sawit mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 8,7 Liter/Kap/Th menjadi 9,3 Liter/Kap/Th pada tahun 2019. Konsumsi kelapa mengalami penurunan dari tahun 2015 yaitu sebesar 6,3 Kg/Kap/Th di Tahun 2015 menjadi 5,2 Kg/Kap/Th pada tahun 2019. Sedangkan untuk jumlah konsumsi kemiri tidak mengalami perubahan dari tahun 2015 ke 2019 yaitu tetap sebesar 0,2 Kg/Kap/Th.

Konsumsi kacang-kacangan di Kabupaten Bangka Tengah terutama kedelai dari tahun 2015 s.d 2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Konsumsi kedelai pada tahun 2015 sebesar 3,5 Kg/Kap/Th dan meningkat menjadi 3,8 Kg/Kap/Th pada tahun 2019. Konsumsi gula pasir di Kabupaten Bangka Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke 2018 yaitu dari 5,2 gr/Kap/Th menjadi 14,3 gr/Kap/Th namun tahun 2019 turun lagi menjadi sebesar 5,2 gr/Kap/th. Sedangkan konsumsi gula merah mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018 yaitu 0,6 gr/Kap/Th menjadi 0,2 gr/Kap/Th di Tahun 2018 dan pada tahun 2019 turun lagi menjadi sebesar 0,1 gr/Kap/th . Konsumsi penduduk terhadap sayuran dan buah di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015 s.d 2019 secara umum mengalami kenaikan. Jumlah konsumsi sayuran di tahun 2019 sebesar 73,4 Kg/Kap/Th, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 sebesar 64,2 Kg/Kap/Th. Untuk konsumsi buah, Tahun 2015 sebesar 30,4 Kg/Kap/Th dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 38,3 Kg/Kap/Th. Untuk konsumsi bumbu-bumbuan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015 s.d 2019 angkanya cenderung tetap sebesar 1 gr/Kap/Th.

2.3.1.2.4 Urusan Pertanahan

Tabel II.84.

Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2015 sd 2019
Kabupaten Bangka Tengah (M²)

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas wilayah daratan (m ²)	2.269.029.400	2.269.029.400	2.269.029.400	2.269.029.400	2.279.116.300
2	Luas tanah bersertifikat HGB (m ²)	309.759	347.173	836.583	1.146.158	4.265.191
3	Luas tanah bersertifikat HGU (m ²)	-	-	2.468.491	8.318.500	2.170.030
4	Luas tanah bersertifikat HM (m ²)	3.590.369	3.169.831	11.109.249	10.096.000	
5	Luas tanah bersertifikat HPL (m ²)	-	-	-	7.837	
	Total luas tanah bersertifikat (m ²)	3.900.128	3.517.004	14.414.323	19.568.495	
1	Persentase HGB dibanding luas daratan (%)	0,0137	0,0153	0,0369	0,0505	
2	Persentase HGU dibanding luas daratan (%)	0,0000	0,0000	0,1088	0,3666	
4	Persentase HM dibanding luas	0,1582	0,1397	0,4896	0,4449	

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	daratan (%)					
5	Persentase HGPL dibanding luas daratan (%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	
	Persentase total luas lahan bersertifikat (%)	0,1719	0,1550	0,6353	0,8624	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, luas wilayah daratan dari Tahun 2015 s.d 2018 tidak mengalami perubahan yaitu 2.269.029.400 m², luas wilayah daratan tahun 2019 mengalami perubahan yaitu seluas 2.279.116.300 m². Total luas tanah bersertifikat HGB pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 1.146.158 m² menjadi 4.265.191 m².

2.3.1.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah salah satu indek yang diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang dikembangkan oleh *Virginia Commonwealth University (VCU)* dan Badan Pusat Statistika (BPS). Dalam penghitungannya, IKLH menggunakan indikator Indeks Pencemaran Air Sungai (IPA), Indeks Pencemaran Udara (IPU), dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). Dari

hasil perhitungan pada tahun 2017, diketahui bahwa IPA sebesar 55, IPU sebesar 80, dan ITH sebesar 36.096, serta IKLH Kabupaten Bangka Tengah sebesar 54.94. Masih rendahnya IKLH Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2017 tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya ITH yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Rendahnya ITH disebabkan oleh berkurangnya hutan kategori primer di Bangka Tengah dan maraknya pembukaan lahan hutan yang menyebabkan kecilnya ITH di Kabupaten Bangka Tengah.

Sampah di TPA yang dikelola secara *controlled landfill* baru dilaksanakan pada tahun 2014 dengan adanya peralatan alat berat yaitu excavator mini yang berasal dari APBD Kabupaten Bangka Tengah dan bulldozer yang berasal dari Kementerian PU. Pengelolaan sampah dengan cara *controlled landfill* yaitu tanah yang telah dipetakan untuk penimbunan sampah di buat lubang dengan muatan satu lubang adalah sebanyak 600m³ sampah, kemudian sampah ditimbun kedalam lubang yang telah tersedia secara bergantian antara sampah dengan tanah sehingga terjadi lapisan antara sampah dan lapisan tanah dan seterusnya sampai sampah yang ditimbun rata dengan dataran sehingga tidak ada sampah yang terbuka. Berikut rincian sampah yang dikelola secara *controlled landfill* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, yaitu :

Tabel II.85.
Sampah Controlled Landfill Tahun 2015-2019

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Pengelolaan sampah secara controlled landfill yang masuk ke TPA Nibung (m ³)	5.290	11.385,50	12.887,50	11.970	13.584,50
Sampah yang masuk ke TPA Nibung	10.450,50	12.800,00	12.887,50	12.539	13.339,60
Persentase Sampah yang Dikelola secara Controlled Landfill (%)	50,62	88,95	100	95,46	98,20
Target Indikator Sampah yang Dikelola secara Controlled Landfill	75	68	70	75	85
Realisasi Sampah yang Dikelola secara Controlled Landfill (%)	67,49	130,81	133,33	127,28	115,5

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Rasio jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) persatuan penduduk untuk tahun 2019 rasio ini mencapai 10,32 m³/ 1.000 jiwa. Berikut rincian mengenai rasio jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) persatuan penduduk dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019:

Tabel II.86.
Rasio Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah TPS	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio
1	2014	1.434,90 m ³	165.136	8,69 m ³ / 1000 jiwa
2	2015	1.450,55 m ³	166.724	8,70 m ³ / 1000 jiwa
3	2016	1.646,90 m ³	171.724	9,60 m ³ / 1000 jiwa
4	2017	1.726,84 m ³	177.335	9,74 m ³ / 1000 jiwa
5	2018	1.880,41m ³	182.286	10,32 m ³ /1.000 jiwa
6	2019	1.890,24 m ³	186.783	10,12 m ³ /1.000 jiwa

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Jumlah penduduk pada data di atas menggunakan data semester II yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Rasio jumlah tempat pembuangan sementara (TPS) persatuan penduduk setiap tahun semakin meningkat ini dikarenakan adanya penambahan tong sampah pada setiap desa yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dan juga adanya penambahan TPS 3R yang dibangun dari dana APBN.

2.3.1.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah telah sepenuhnya menggunakan sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dalam penerbitan dan pengelolaan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara elektronik, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. Pada tabel di bawah, dapat dilihat jumlah wajib KTP pada Tahun 2018 sebanyak 124.748 wajib KTP. Adapun Penduduk Bangka Tengah yang telah memiliki KTP elektronik sebanyak 122.226 orang.

Tabel II.87.
Kepemilikan KTP di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Wajib KTP	Kepemilikan KTP-el
1.	2015	113.302	98.516
2.	2016	118.304	115.241
3.	2017	122.032	116.394
4.	2018	124.748	122.226
5.	2019	128.392	127.440

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Tabel II.88.
Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Penduduk	Sudah Memiliki		Belum Memiliki	
1.	2015	166.724	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	2016	174.378	70.036	40,16%	104.342	59,84%
3.	2017	177.335	76.984	43,41%	100.351	56,59%
4.	2018	182.286	99.533	54.60%	82.753	45.40%
5.	2019	186.783	104.476	55,93%	82.307	44,07%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Pada Tahun 2019, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran tercatat sebanyak 104.476 orang atau sebesar 55,93 persen, sedangkan yang belum memiliki sebanyak 82.307 orang atau sebesar 44,07 persen.

2.3.1.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah perlu mengarahkan dan mendampingi agar dana yang diterima desa dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Perkembangan indikator pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.89.
Perkembangan Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100
2	Jumlah Desa dan Kelurahan	63	63	63	63	63
3	Jumlah Lembaga Karang Taruna	63	63	63	63	63

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan indikator pemberdayaan masyarakat desa pada Tahun 2014-2019 tidak mengalami perubahan.

2.3.1.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumber daya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana.

Pemerintah menggalakkan lagi program Keluarga Berencana (KB) dengan harapan tidak hanya menurunkan angka kelahiran, tetapi juga mewujudkan bonus demografi berkualitas. Motto dua anak cukup yang digunakan untuk mewujudkan keluarga berencana masih berlaku. Pasangan suami istri dinilai dapat memberikan kualitas hidup yang baik melalui program keluarga berencana. Bonus demografi yang terjadi di tahun 2020-2030 adalah jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15-64 tahun mencapai 70 persen. Sedangkan, 30 persen penduduknya adalah berusia tidak produktif yaitu usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun. Bonus demografi bisa jadi anugerah tapi juga bisa musibah. Syaratnya harus berkualitas, jika tidak akan menimbulkan bencana gunung es. Bencana gunung es adalah ketika kekerasan dalam rumah tangga meningkat akibat belum sejahtera, pengangguran bertambah dan pendidikan tidak terpenuhi. Sedangkan generasi yang berkualitas dapat diukur dari kompetensi dan karakter. Terwujudnya karakter itu harus dilakukan oleh ayah dan ibu serta dimulai sejak anak masih berada dalam kandungan. Kualitas tersebut dapat membantu seseorang memiliki revolusi mental dalam pembangunan.

Tabel II.90.

Perkembangan Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2
2	Rasio Akseptor KB	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
3	Cakupan peserta KB aktif (%)	77,84	78,68	83,25	83,88	81,56
4	Jumlah Faskes KB	9	10	10	10	10
5	Jumlah Petugas KB	22	22	22	22	22

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2015-2019 sebanyak 2 anak per keluarga, rasio akseptor KB tetap tiap tahunnya, yaitu 1:2. Antara Tahun 2015-2019. Indikator persentase cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2015-2019 nilainya cenderung mengalami kenaikan. Persentase cakupan peserta KB aktif terendah yaitu Tahun 2015 sebesar 77,84 persen dan persentase tertinggi dicapai pada Tahun 2018 sebesar 83,88 persen. Jumlah petugas KB pada tahun 2015-2019 tidak mengalami perubahan, dikarenakan tidak ada penambahan jumlah petugas pelayanan KB.

2.3.1.2.9 Urusan Perhubungan

Tabel II.91.

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2014 s.d 2018
Kabupaten Bangka Tengah

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang Jalan (Km)	292,48	346,72	346,72	346,72	346,75
2	Jumlah Kendaraan	33.692	35.452	81.810	190.367	278.802
3	Rasio	0,00868	0,00978	0,00424	0,00182	0,00124

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada Tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 0,00868 di Tahun 2015 turun menjadi 0,00124 di Tahun 2019.

Di bawah ini adalah tabel jumlah Angkutan Udara dan Barang menggunakan Angkutan Udara Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 s.d 2019.

Tabel II.92.

Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Barang menggunakan Angkutan Udara

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penumpang					
	- Datang dan Berangkat	1.622.379	1.956.856	1.988.128	2.090.803	1.645.440
2	Jumlah Barang (Kg)					
	- Menggunakan Angkutan Udara	6.604.370	7.210.335	9.146.022	10.877.501	8.511.085

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Sampai saat ini, Kabupaten Bangka Tengah memiliki 1 unit Bandara yaitu Bandar Udara Depati Amir. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandara Depati Amir pada Tahun 2015-2019 jumlahnya selalu mengalami kenaikan di tiap tahunnya sampai tahun 2018, namun Tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2019, jumlah penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandara Depati Amir sebanyak 1.645.440 orang. Hal ini terjadi dikarenakan harga tiket mulai terjadi kenaikan tarif. Untuk jumlah barang yang menggunakan angkutan udara dari tahun ke tahun cenderung meningkat hanya pada tahun 2019 menurun jumlahnya menurun dibandingkan Tahun 2018, yaitu 10.877.501 kg di Tahun 2018 menjadi 8.511.085 kg di Tahun 2019.

2.3.1.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak hanya terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat bisa menjadi salah satu wahana penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mendorong pengembangan dan

pemberdayaan pada kelompok informasi ini, salah satunya yaitu dengan menyediakan BTS (Base Transceiver Station). BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Piranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon, telepon seluler, jaringan nirkabel sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA, atau platform TDMA. BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data.

Tabel II.93.
Jumlah BTS (Base Transceiver Station) di Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Koba	11	13	15	18	18
2	Pangkalan Baru	25	27	29	31	36
3	Sungai Selan	7	8	9	10	10
4	Simpang Katis	11	13	15	17	19
5	Namang	8	9	10	12	13
6	Lubuk Besar	7	9	11	13	13
Total		69	79	89	101	109

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah BTS di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah BTS Tahun 2015 yaitu sebanyak 69 unit menjadi sebanyak 109 unit di Tahun 2019. Apabila dilihat berdasarkan kecamatan, Kecamatan Pangkalan Baru adalah kecamatan dengan jumlah BTS paling banyak dibandingkan dengan 5 (lima) kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.

2.3.1.2.11 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel II.94.

Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Koperasi					
1	Jumlah Koperasi aktif	87	78	79	82	85
2	Jumlah Seluruh Koperasi	155	159	138	141	143
3	Persentase koperasi aktif	56,13	49,06	57,25	58,16	59,44
	Usaha Mikro Kecil					
1	Jumlah usaha mikro	19.938	20.192	20.464	20.648	21.670
2	Jumlah seluruh UKM	20.843	21.163	21.501	21.692	22.730
3	Usaha Mikro dan Kecil (%)	95,66	95,41	95,18	95,19	95,34

Sumber : Disperindagkop-UKM, Tahun 2020

Saat ini, koperasi masih menjadi soko guru perekonomian dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meskipun demikian, pada Tahun 2015-2019 terdapat trend yang menurun atas jumlah koperasi di Kabupaten Bangka Tengah. Jumlah koperasi pada Tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2015, yaitu dari 155 unit di Tahun 2015 menjadi sebanyak 143 unit di Tahun 2019. Untuk persentase koperasi aktif di Kabupaten Bangka Tengah angkanya berfluktuatif tiap tahunnya. Pada Tahun 2019 persentase koperasi aktif mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah di Tahun 2015. Persentase koperasi aktif pada Tahun 2019 sebesar 59,44 persen, naik dari Tahun 2015 yaitu yang hanya sebesar 56,13 persen.

Sebagaimana koperasi, usaha mikro dan usaha kecil juga mempunyai peran dalam perekonomian daerah baik dalam produksi dan distribusi barang dan jasa maupun dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan penduduk. Jumlah usaha mikro pada Tahun 2019 tercatat sebanyak 22.730 unit, meningkat dibandingkan Tahun 2015 sebanyak 20.843 unit. Sementara untuk persentase Usaha Mikro dan Kecil pada Tahun 2019 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2015. Persentase Usaha Mikro dan Kecil pada Tahun 2015 sebesar 95,66 persen, turun menjadi 95,34 persen di Tahun 2019.

2.3.1.2.12 Urusan Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Sampai dengan Tahun 2019, di Kabupaten Bangka Tengah terdapat 214 investor dan semuanya telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal. Jumlah nilai investasi dari tahun 2015 s.d 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 64,5 milyar menjadi sebesar 904,3 milyar pada tahun 2019.

Tabel II.95.
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penanaman Modal
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	n/a	n/a	94	102	214
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	64,5 milyar	286,5 milyar	315,5 milyar	393,6 milyar	904,3 milyar
4	Persentase kenaikan nilai realisasi PMDN	5%	77,5%	10,29%	24,75%	129,74%
5	Survey kepuasan pelayanan perizinan	n/a	84,03	85,6	85,8	83,91

Sumber : DPMPTK 2020

2.3.1.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kabupaten Bangka Tengah dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif. Jumlah organisasi pemuda yang ada di Bangka Tengah pada Tahun 2018 yaitu sebanyak 87 organisasi. Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Jumlah sarana olahraga di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 adalah sebanyak 363 dengan rincian per kecamatan sebagai berikut.

Tabel II.96.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	89	90	87	87	87
2	Persentase wirausaha muda	0,22%	0,55%	0,58%	0,32%	0,45%
3	Persentase pemuda berprestasi	0,11%	0,19%	0,69%	0,16%	0,20%
4	Jumlah prestasi olahraga	43	88	77	216	83
5	Jumlah Sarana Olahraga	328	330	331	341	341
6	Jumlah Klub Olahraga	321	321	322	363	369

Sumber : Dinbudparpora 2020

2.3.1.2.14 Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain untuk usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Tabel II.97.
Indikator Urusan Statistik Kabupaten Bangka Tengah

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Buku "Kabupaten Bangka Tengah Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Persentase integrasi data pembangunan Daerah lintas sektor yang berkualitas	n/a	n/a	39,45%	62,52%	81,50%

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Buku Bangka Tengah Dalam Angka dan Buku Produk Domestik Regional Bruto merupakan produk yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah. Mulai Tahun 2014 ada 2 (dua) buku PDRB yang dikeluarkan oleh BPS yaitu PDRB berdasarkan lapangan usaha dan PDRB menurut pengeluaran. Dinas yang menangani statistik sendiri melakukan fasilitasi dan harmonisasi data yang akan ditampilkan dalam publikasi buku tersebut.

2.3.1.2. 15 Urusan Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten. Era keterbukaan serta saling terkoneksi sistem jaringan di Kabupaten Bangka Tengah, karena itu menjadi rentan terhadap potensi serangan siber ini dan perlu meningkatkan upaya pengamanan melalui pengelolaan dan pengembangan persandian daerah.

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi, pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi, pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik, dan serta penyediaan layanan Keamanan Informasi. sesuai dengan kewenangannya, Bupati berperan sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi di Pemerintah Daerah.

2.3.1.2.16 Urusan Kebudayaan

Seberapa penting arti dan peran kebudayaan di suatu daerah terhadap kehidupan manusia, dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Tabel II.98.

Capaian Indikator Urusan Kebudayaan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	19	16	16	8	8

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
2	Jumlah sanggar kesenian yang aktif	n/a	25	26	26	26
3	Jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	n/a	17	18	23	23
4	Jumlah prestasi seni dan budaya tingkat provinsi dan nasional	n/a	9	11	11	9

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan sejak Tahun 2015-2019, yaitu dari 16 cagar budaya yang ada menjadi hanya tinggal 8 cagar budaya. Sanggar kesenian yang aktif dari tahun 2015-2019 ada 26 sanggar. Seni budaya local yang dilestarikan ada 23 jenis kesenian. Jumlah prestasi seni dan budaya tingkat provinsi dan nasional yang pernah ditorehkan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 ada 40 prestasi seni dan budaya.

2.3.1.2.17 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Tabel II.99.

Capaian Indikator Bidang Perpustakaan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

Jenis Perpustakaan	Tahun Kunjungan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kunjungan Perpustakaan (orang/tahun)	235.442	237.701	240.459	224.001	294.166
Jumlah Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	1
Jumlah Perpustakaan Desa	24	24	24	33	33
Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	1.200	17.060	17.060	17.060	24.944

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah cenderung mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan, yaitu dari 240.459 pengunjung/tahun di tahun 2017 menjadi 224.001 pengunjung/tahun. Hal tersebut disebabkan di perpustakaan sekolah belum maksimalnya penerapan pojok baca di setiap ruang kelas serta kunjungan pada kegiatan bulan kunjungan perpustakaan ke Perpustakaan Daerah belum tercapai dari target 5 kali kunjungan sehingga kunjungan perpustakaan per tahun berkurang. Data jumlah perpustakaan di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2015-2019 terdapat penambahan jumlah perpustakaan. Dari 25 unit di Tahun 2015-2017 menjadi 34 unit di Tahun 2018-2019.

2.3.1.2.18 Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan adanya upaya bersama dari para pejabat administratif untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting.

Tabel II.100.

Capaian Indikator Bidang Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengelolaan arsip statis	312	312	317	474	474
2	Pengelolaan arsip dinamis	100.083	182.583	191.833	308.354	544.454
3	Persentase arsip inaktif dan statis yang terpelihara (%)	0,99	0,99	0,99	0,99	1,01
4	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	84,85	87,88	88,50	95,33	100
5	Jumlah Arsiparis	42	42	40	35	34
6	Persentase arsip daerah yang di lestarikan dan diselamatkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Beberapa aspek yang menjadi tolok ukur untuk menetapkan apakah perangkat daerah tersebut telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku melalui beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Telah melakukan pengklasifikasian dan penyusunan daftar arsip pada unit organisasinya.
2. Telah menetapkan jabatan fungsional sebagai tenaga pengelola kearsipan pada unit organisasinya.
3. Telah memiliki sarana dan prasarana penyimpanan arsip yang sesuai standar.

Hambatan utama pelaksanaan program kegiatan ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran dalam pengelolaan kearsipan. Dengan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kearsipan, penataan arsip, bimbingan teknis kearsipan, sosialisasi kearsipan serta pengawasan kearsipan dapat meningkatkan sumber daya manusia tentang pengelolaan arsip.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Urusan Pariwisata

Tabel II.101.

Capaian Indikator Bidang Pariwisata
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

URAIAN	TAHUN									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
Jumlah Kunjungan Wisnus dan Wisman	74.900	981	80.407	1.201	83.059	1.739	94.299	1.944	94.526	2.080
Jumlah Total Kunjungan Wisatawan	75.881		81.608		84.798		96.243		96.606	
Pesentase Jumlah Kunjungan Wisatawan (%)	98,71	1,29	98,53	1,47	97,95	2,05	97,98	2,01	97,85	2,15
Kontribusi pariwisata terhadap PDRB (%)	2,99		3,10		3,18		3,42		3,80	
Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD (%)	2,53		2,72		2,75		2,79		2,79*	

URAIAN	TAHUN									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
Jumlah Obyek wisata yang dibangun/ dikembangkan / dikelola	3		8		6		2		10	

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019 trendnya cenderung mengalami kenaikan. Jumlah kunjungan wisatawan Tahun 2015 tercatat sebesar 75.881 orang dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 96.848 orang yang terdiri dari wisatawan domestik sebanyak 94.768 orang atau 97,85% dan wisatawan mancanegara sebanyak 2.080 orang atau 2,08%. Untuk persentase kontribusi pariwisata terhadap PDRB pada Tahun 2019 sebesar 3,80 persen. Angka tersebut naik bila dibandingkan persentase Tahun 2015 yang hanya sebesar 2,72 persen. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2015-2019 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2019 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan Tahun 2015, yaitu dari 2,53 persen menjadi 2,79 persen.

Tabel II.102.

Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Bangka Tengah

No.	Obyek Wisata	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Wisata alam	22	22	25	28	29
2.	Wisata bahari	7	7	7	8	9
3.	Wisata Cagar Alam	-	-	-	-	-
4.	Wisata Pertanian	2	2	2	3	3
5.	Wisata Sejarah	7	7	7	8	10
6.	Wisata Budaya	8	9	10	10	11
7.	Wisata Religi	5	5	5	5	5
8.	Wisata Kuliner	2	2	2	2	3
	Total	53	54	58	64	70

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, potensi kepariwisataan di Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan tahun 2019 terdiri dari wisata alam sebanyak 29 wisata, wisata bahari sebanyak 9 wisata, wisata pertanian sebanyak 3 wisata, wisata sejarah sebanyak 10 wisata, wisata budaya sebanyak 11 wisata, wisata religi sebanyak 5 wisata, wisata kuliner sebanyak 3 wisata. Kabupaten Bangka Tengah memiliki banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi terutama wisata pantainya. Hampir setiap kecamatan memiliki pantai yang indah. Satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki pantai adalah Kecamatan Simpang Katis. Akan tetapi, kecamatan ini memiliki objek wisata lain seperti air panas dan hutan lindung. Selain pantai, ada juga objek wisata berupa pulau kecil di sekitar Kabupaten Bangka Tengah seperti Pulau Ketawai dan Pulau Nangka.

2.3.2.2 Urusan Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan perikanan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari. Di bawah ini perkembangan indikator urusan pilihan pertanian Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014-2018.

Tabel II.103.
Capaian Indikator Bidang Urusan Pertanian
Kabupaten Bangka Tengah

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	PERTANIAN					
	Produktivitas Sektor Pertanian (Ton/Ha/Th)					
	Jagung	5,11	5,19	3,23	3,22	5,32
	Kacang Tanah	3,00	2,50	1,90	2,40	2,68
	Ubi Kayu	22,10	15,47	11,23	16,35	24,93
	Ubi Jalar	8,00	6,51	11,55	10,84	14,78

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Bawang Merah	2,47	4,04	5,36	7,50	8,05
	Cabai Besar	4,30	4,97	5,12	6,04	7,10
	Petsai	5,92	5,43	3,34	3,68	7,94
	Cabai Rawit	3,48	3,41	3,81	4,01	4,50
	Padi	2,10	2,15	2,20	2,33	2,84
	Palawija	12,00	10,50	7,55	12,06	17,09
	Sayuran dan Buah Semusim	4,60	4,62	4,91	5,89	7,91
	Buah-buahan Tahunan	9,04	6,32	8,60	9,42	9,01
	Jumlah Produksi Sektor Pertanian (ton)					
	Jagung	347,70	396,20	415,30	278,30	1.042,35
	Kacang Tanah	42,30	54,10	31,90	16,31	10,85
	Ubi Kayu	2.474,70	2.982,00	2.030,00	3.724,00	7.878,80
	Ubi Jalar	304,10	200,60	203,30	79,10	96,10
	Bawang Merah	7,40	39,66	26,59	71,63	99,22
	Cabai Besar	193,60	155,55	298,62	315,59	325,54
	Petsai	272,20	70,35	92,70	59,92	148,55
	Cabai Rawit	156,40	133,40	115,20	87,26	84,38
	Padi	386,70	850,72	885,40	1.029,80	1.198,84
	Palawija	3.254,80	3.706,27	2.765,40	4.122,06	9.075,41
	Sayuran dan Buah Semusim	1.902,80	1.196,24	1.364,69	1.351,08	1.792,25
	Buah-buahan Tahunan	6.757,23	3.312,14	2.666,20	4.559,94	5.425,83
	Luas Areal Tanaman Pertanian (Ha)					
	Jagung	68,00	76,40	128,50	86,35	195,95
	Kacang Tanah	14,00	21,40	16,70	6,80	4,05
	Ubi Kayu	112,00	192,80	180,80	227,80	316,00

No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Ubi Jalar	38,00	30,80	17,60	7,30	6,50
	Bawang Merah	3,00	9,81	4,96	9,55	12,33
	Cabai Besar	45,00	31,30	58,34	52,25	45,85
	Petsai	46,00	12,95	27,77	16,30	18,70
	Cabai Rawit	45,00	39,10	30,25	21,76	18,75
	Padi	182,00	395,00	403,00	442,00	421,80
	Palawija	272,00	352,81	366,27	341,75	531,00
	Sayuran dan Buah Semusim	413,00	258,96	277,92	229,44	226,64
	Buah-buahan Tahunan	747,24	524,15	310,17	484,30	601,93
2.	PERKEBUNAN					
	Produktivitas Sektor Perkebunan (Ton/Ha/Th)					
	Kelapa Sawit	3,26	3,29	3,42	3,51	3,61
	Karet	1,35	1,37	1,35	1,46	1,48
	Kelapa	0,97	0,62	0,52	0,72	0,84
	Kopi	0,42	0,59	0,62	0,66	0,67
	Lada	1,41	1,42	1,42	1,47	1,48
	Kakao	0,86	0,75	0,71	0,42	0,55
	Jumlah Produksi Sektor Perkebunan (kg)					
	Kelapa Sawit	15.373,76	17.249,00	20.858,18	23.102,25	24.472,54
	Karet	7.667,76	8.004,41	7.494,59	8.288,49	8.463,15
	Kelapa	533,17	313,41	239,10	332,39	372,07
	Kopi	2,45	3,06	2,46	7,06	9,60
	Lada	1.900,37	2.115,10	2.947,18	3.447,83	3.466,75
	Kakao	59,58	46,12	38,54	23,15	30,44
	Luas Areal					

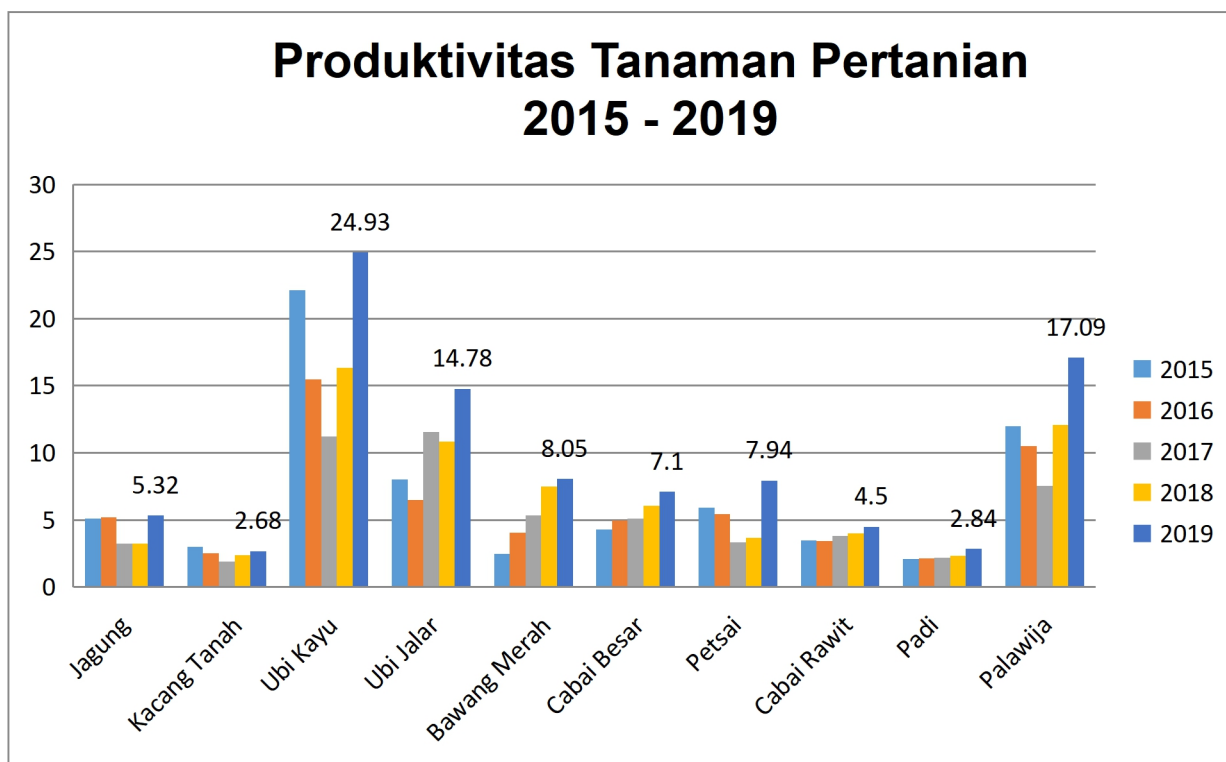
No.	Indikator	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Tanaman Perkebunan (Ha)					
	Kelapa Sawit	7.745,83	7.954,81	8.735,93	8.949,58	9.140,08
	Karet	8.486,43	8.319,89	8.177,89	7.650,82	7.393,32
	Kelapa	757,90	711,03	710,08	537,71	533,32
	Kopi	8,75	9,55	29,35	30,67	32,47
	Lada	2.962,95	3.210,81	3.802,52	4.036,17	4.169,56
	Kakao	105,83	97,70	86,90	79,65	76,78
3.	PETERNAKAN					
	Jumlah Produksi Peternakan					
	Telur Itik (Kg)	239.370,48	242.261,056	250.755,33	264.393,632	454.521,696
	Telur Ayam (Kg)	5.615.181,6	5.969.080,6	5.882.781,8	5.960.430	6.095.131,36
	Daging Sapi (Ton)	270,402	212,7312	323,8092	428,1552	513,4272
	Daging Itik (Ton)	8,27805	9,85215	12,0054	12,0714	11,78925
	Daging Kambing (Ton)	7,1599	6,0973	7,62795	9,6899	11,39765
	Daging Ayam Buras (ton)	7,94521	13,34472	18,1971	18,4473	14,78045

Sumber : Dinas Pertanian, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk sektor pertanian yang mengalami peningkatan produktivitas yang secara garis besar dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II.16.

Produktivitas Tanaman Pertanian Kabupaten Bangka Tengah



Berdasarkan data grafik diatas menunjukkan bahwa produktivitas tertinggi di sektor pertanian yaitu pada subsektor tanaman palawija yaitu komoditas ubi kayu di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 sebesar 24,93 Ton/Ha/Th, disusul diurutan kedua yaitu komoditas palawija dengan tingkat produktivitas sebesar sebesar 17,09 Ton/Ha/Th, kemudian disusul oleh komoditas ubi jalar sebesar 14,78Ton/Ha/Th. Komoditas dengan produktivitas terendah di sektor pertanian di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2019 yaitu komoditas padi sebesar 2,84 Ton/Ha/Th.

Kontribusi jumlah produksi tertinggi dari sektor pertanian berasal dari subsektor komoditas tanaman palawija yaitu sebesar 9.075,41 Ton, kemudian komoditas ubi kayu sebesar 7.878,80 Ton, dan setelah itu sub sektor tanaman buah – buahan tahunan sebesar buah 5.425,83 Ton, sedangkan luas areal terbesar untuk sektor pertanian yaitu subsektor komoditas tanaman buah – buahan tahunan seluas 601,93 Ha, kemudian diikuti subsektor komoditas tanaman palawija seluas 531,00 Ha, dan komoditas tanaman padi seluas 421,80 Ha.

Secara spesifik, untuk subsektor tanaman palawija, komoditas ubi kayu merupakan salah satu komoditas subsektor palawija yang memiliki luas tanam,

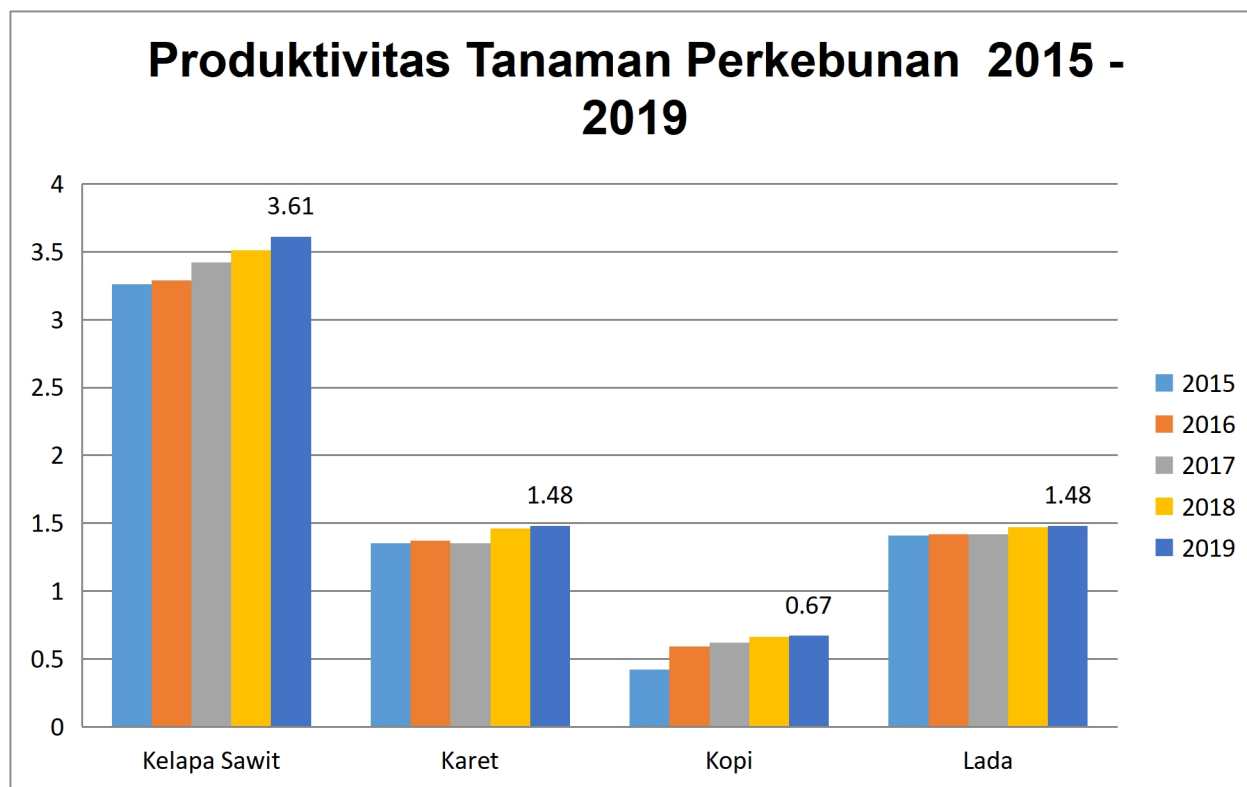
produksi dan produktivitas tertinggi berdasarkan data luasan, produksi dan produktivitas pada Tahun 2019. Berdasarkan demografi data per kecamatan Tahun 2019, luas tanam terluas dan produksi tertinggi untuk komoditas ubi kayu berada di Kecamatan Simpang Katis dengan luas tanam 207,00 Ha dan produksinya 3.350,00 Ton dengan produktivitas 24,00 Ton/Ha/Th. Kemudian diikuti oleh komoditas jagung dengan luas tanam dan produksi tertinggi berada di Kecamatan Sungai Selan seluas 83,95 Ha dan produksi sebesar 416,00 Ton dengan dengan produktivitas 5,00 Ton/Ha/Th, meskipun produktivitas tertinggi untuk komoditas jagung berada di Kecamatan Pangkalan Baru yaitu sebesar 5,11 Ton/Ha/Th. Sedangkan, komoditas kacang tanah merupakan komoditas subsektor tanaman palawija dengan luas tanam dan produksi paling rendah, meskipun memiliki produktivitas sedikit lebih besar dibandingkan dengan komoditas padi. Kecamatan Sungai Selan memiliki luas tanam dan produksi komoditas kacang tanah tertinggi dengan luas tanam seluas 2,40 Ha dan produksi sebesar 4,25 Ton dengan produktivitas sebesar 2,50 Ton/Ha/Th.

Komoditas cabai merah menjadi komoditas dengan luas tanam, produksi dan produktivitas tertinggi dibandingkan dengan komoditas lainnya pada subsektor hortikultura. Luas tanam komoditas cabai merah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 seluas 52,25 Ha dan produksi sebesar 315,59 Ton dengan produktivitas sebesar 6,04 Ton/Ha/Th. Kemudian diikuti oleh komoditas petsai/sawi dengan luas tanam seluas 18,70 Ha dan produksi sebesar 148,55 Ton dengan produktivitas sebesar 7,94 Ton/Ha/Th. Kemudian diikuti oleh komoditas bawang merah sebagai salah satu komoditas hortikultura unggulan di Kabupaten Bangka Tengah. Luas tanam komoditas cabai merah di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 seluas 12,33 Ha dan produksi sebesar 99,22 Ton dengan produktivitas sebesar 8,05 Ton/Ha/Th. Berdasarkan Data Statistik Pertanian Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019, Kecamatan Lubuk Besar memiliki luas tanam, produksi dan produktivitas komoditas cabai merah dan bawang merah tertinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. Luas tanam komoditas cabai merah di Kecamatan Lubuk Besar Tahun 2019 seluas 31,10 Ha dan produksi sebesar 115,60 Ton dengan produktivitas sebesar 12,97 Ton/Ha/Th. Kecamatan Koba memiliki luas tanam, produksi dan produktivitas terendah dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yaitu dengan luas tanam seluas 2,65 Ha dan produksi sebesar 15,76 Ton dengan produktivitas sebesar

5,96 Ton/Ha/Th. Sedangkan, Luas tanam komoditas bawang merah di Kecamatan Lubuk Besar Tahun 2019 seluas 4,50 Ha dan produksi sebesar 58,17 Ton dengan produktivitas sebesar 12,93 Ton/Ha/Th.

Grafik II.17.

Produktivitas Tanaman Perkebunan Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2015-2019



Untuk komoditas sektor perkebunan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019, Produktivitas tertinggi sektor perkebunan yaitu kelapa sawit, sebesar 3,61 Ton/Ha/Th, yang kedua yaitu perkebunan karet, dengan tingkat produktivitas sebesar 1,48 Ton/Ha/Th, di susul kemudian dengan perkebunan lada yaitu sebesar 1,48 Ton/Ha/Th.

Jumlah produksi dari sektor perkebunan yang terbanyak berasal dari perkebunan kelapa sawit yaitu sebesar 24.472,54 Ton, kemudian karet sebesar 8.463,15 Ton, dan setelah itu perkebunan lada sebesar 3,466,75 ton, sedangkan luas areal untuk tanaman perkebunan yaitu kelapa sawit seluas 9.140,08 Ha, karet seluas 7.393,32 Ha, dan untuk Lada seluas 4.169,56 Ha.

Berdasarkan data luasan, produksi dan produktifitas pada tahun 2019. Untuk data per kecamatan luasan perkebunan terluas dan produksi tertinggi untuk komoditi kelapa sawit berada di Kecamatan Sungaiselan dengan luas

lahan 2.474,85 Ha dan produksinya 6.759,55 Ton dengan produktifitas 3,63 Ton/Ha/Th. Komoditi kedua tanaman karet untuk data per kecamatan kebun karet terluas dan produksi tertinggi untuk komoditi karet berada di Kecamatan Simpang Katis dengan luas lahan 1.893,70 Ha dan produksinya 2.620,00 Ton dengan produktifitas 1,47 Ton/Ha/Th. Produktifitas tertinggi untuk tanaman karet berada di Kecamatan Pangkalan Baru yaitu 1,485 Ton/Ha/Th, tetapi untuk luasan lahan dan produksinya Kecamatan Pangkalan Baru merupakan wilayah dengan luas (299,47 Ha) dan produksi (202,70 Ton) terkecil. Komoditi ketiga yaitu tanaman lada, wilayah terluas berada di Kecamatan Simpang Katis dengan luas 944,51 Ha dengan jumlah Produksi 829,92 Ha. Untuk produksi tertinggi berada di Kecamatan Koba dengan total produksi sebanyak 880,50 Ton dengan luas kebun seluas 915,00 Ha. Sedangkan untuk produktifitas tertinggi yaitu di Kecamatan Pangkalan Baru (1,485 Ton/Ha/TH) dengan luas lahan seluas 172,60 Ha.

Sedangkan untuk jumlah produksi hasil peternakan di Kabupaten Bangka Tengah untuk produksi telur ayam pada tahun 2019 sebanyak 6.095.131,36 Kg, jumlah tersebut naik bila dibandingkan produksi Tahun 2018 yang hanya 5.960.430 Kg atau 120,26 %. Untuk telur itik, jumlah produksi Tahun 2019 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan jumlah produksi di Tahun 2018, yaitu dari 454.521,697 Kg menjadi 264.393,632 Kg. Jumlah produksi daging sapi Tahun 2019 sebanyak 513,4272 Ton, daging itik sebanyak 11,78925 Ton, dan daging kambing sebanyak 11,39765 Ton.

2.3.2.3 Urusan Kehutanan

Sektor kehutanan masih potensial untuk dikembangkan silvikultur antara tanaman hutan dan tanaman perkebunan sekaligus sebagai usaha pelestarian hutan dan usaha alternatif ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan hasil hutan non kayu, terutama Gaharu yang merupakan komoditi unggulan dari sector kehutanan. Data pohon gaharu di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 1.298.296 batang yang terdiri dari tanaman gaharu budidaya sebanyak 1.295.803 batang dan tanaman gaharu alam sebanyak 2.493 batang. Tanaman gaharu yang telah teregistrasi dan telah dipetakan sebanyak 377.758 batang, sedangkan jumlah gaharu yang dipasang plat register berjumlah 40.000 batang.

Jumlah batang gaharu yang telah dilakukan inokulasi sebanyak 617 batang (sampai dengan 31 Desember 2018) dan melalui Inovasi Baru Nyuntik Gaharu (IBNU) pada tahun 2019 dapat menginokulasi sebanyak 506 batang, jadi sampai akhir Desember 2019 total batang gaharu yang terinokulasi sebanyak 1.123 batang.

Pada akhir tahun 2020 batang gaharu yang telah diinokulasi sudah dapat dipanen dan tahun 2021 sudah dapat diekspor ke negara-negara timur tengah khususnya Arab Saudi. Selain itu, Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan Kluster Gaharu Nasional berdasarkan SK Dirjen RLPS Nomor: SK.22/V-BPS/2010 telah berhasil mendapatkan 27 calon Klon Unggul Gaharu pada tahun 2019 (Hasil kerjasama Penelitian antara Bappelitbangda dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Pemuliaan Tanaman Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2017). Klonklon ini pada tahun 2020 akan dilakukan perbanyakan dan Uji Multilokasi Klon di 6 kecamatan guna mendapatkan Klon yang benar-benar unggul untuk seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Keunggulan dari klon-klon unggul gaharu ini adalah respon batang gaharu yang lebih cepat dalam membentuk gubal gaharu ketika diinokulasi, dengan demikian produktivitas dan kontinuitas gubal gaharu Bangka Tengah dapat ditingkatkan.

Pada tahun 2016 dihasilkan produk teh gaharu dan pada tahun 2019 telah mendapatkan paten dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Nomor Paten: IDP000060107. Produk tersebut diproduksi secara komersial oleh Gapoktan Alam Jaya Lestari, Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. Latar belakang dibuatnya the gaharu bermula dari testimoni masyarakat Desa Lubuk Pabrik yang menyatakan bahwa the daun gaharu memberikan efek positif bagi tubuh dan mengingat banyaknya bahan baku yang tersedia, maka pada tahun 2012 Pemkab Bangka Tengah mulai melakukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya dengan hasil bahwa teh gaharu dinyatakan aman untuk dikonsumsi dan mengandung antioksidan yang baik bagi tubuh. Kabupaten Bangka Tengah akan terus berinovasi dalam menciptakan produk turunan dari gaharu seperti dupa, sabun dan tasbih. Pada tahun 2020 akan dilakukan kerjasama kembali antara Pemkab Bangka Tengah dengan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya untuk membuat produk turunan gaharu yaitu Briket Gaharu. Dengan demikian

semakin bervariasinya produk turunan dari gaharu, maka akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sector UMKM dan juga dapat mendukung sektor wisata di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.104.

Luas Kawasan Hutan (Ha) di Kabupaten Bangka Tengah

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Hutan Lindung	32.349,78	32.349,78	32.349,78	32.349,78	32.349,78
2.	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	6.009,40	6.009,40	6.009,40	6.009,40	6.009,40
3.	Hutan Produksi	90.847,62	90.847,62	90.847,62	90.847,62	90.847,62
TOTAL		129.206,80	129.206,80	129.206,80	129.206,80	129.206,80

Sumber : Data diolah, 2020

Berdasarkan data di atas, luas kawasan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2018 tidak mengalami perubahan luas. Total luas kawasan hutan yaitu 129.206,80 Ha, yang terdiri dari hutan lindung seluas 32.349,78 Ha, Suaka Alam dan Pelestarian Alam seluas 6.009,40 Ha, dan Hutan Produksi 90.847,62 Ha.

Pemanfaatan kawasan hutan lindung seluas 32.349,78 Ha serta kawasan suaka alam dan pelestarian alam seluas 6.009,40 Ha ialah sebagai berikut:

- Kawasan perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan berada di Pulau Gelasa Kecamatan Lubuk Besar.
- Kawasan Hutan Konservasi berada di Gunung Mangkol yang masuk kedalam wilayah administrasi Kecamatan Pangkalanbaru, Kecamatan Simpang Katis, dan Kecamatan Namang.
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau yang memiliki fungsi untuk perlindungan pantai berada di Kecamatan Lubuk Besar.

Beberapa areal kawasan hutan produksi saat ini merupakan areal pemukiman penduduk, perkampungan, dan kebun penduduk. Hal ini seperti yang terlihat di Kecamatan Lubuk Besar, penduduk menyatakan bahwa mereka sudah bermukim lama di kawasan hutan produksi Lubuk Besar sebelum kehutanan menetapkan daerah tersebut menjadi kawasan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan produksi yang selama ini telah dilaksanakan di Kabupaten

Bangka Tengah adalah penanaman kayu gaharu. Kawasan hutan produksi yang berupa semak belukar atau berupa hutan, jarang dapat ditanami dengan tanaman cepat tumbuh dari jenis tanaman industri seperti sengon, eucalyptus, gmelina, dan akasia. Beberapa lokasi yang berupa hutan produksi juga dikonversi menjadi perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawit.

2.3.2.4 Urusan Perdagangan

Tabel II.105.
Jumlah Pasar di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No.	Pasar	2015	2016	2017	2018	2019
	Pasar Tradisional					
1.	Dikelola Pemerintah	9	13	12	15	19
2.	Dikelola Swasta	1	1	1	1	1
3.	Dikelola Masyarakat	-	-	-	-	-
	Jumlah Pasar Tradisional	10	14	13	16	20
	Pasar Modern					
1.	Swalayan/Supermarket/Toserba	2	2	2	1	1
2.	Minimarket	5	5	5	5	6
3.	Pasar Perkulakan Grosir	-	-	-	-	-
	Jumlah Pasar Modern	7	7	7	6	7

Sumber : DISPERINDAGKOP – UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pasar tradisional di Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 20 pasar, 19 pasar yang dikelola pemerintah dan yang dikelola swasta sebanyak 1 pasar. Pasar modern pada Tahun 2019 sebanyak 7 pasar, terdiri dari swalayan/ supermarket/ toserba sebanyak 1 buah, minimarket sebanyak 6 buah.

Tabel II.106.

Capaian Indikator Bidang Urusan Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB (%)	14,57	15,34	16,14	17,04	17,54
2	Persentase pertumbuhan nilai transaksi perdagangan pasar tradisional (yoy)	n/a	1,20%	2,34%	1,31%	1,19%
3	Nilai transaksi perdagangan pasar tradisional (juta)	114.205	115.575	118.285	119.838	121.266
4	Persentase UTTP yang ditera	n/a	n/a	n/a	8,4%	13,4%

Sumber : DISPERINDAGKOP – UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data tabel di atas, persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 mengalami peningkatan bila dibandingkan kontribusi dari tahun – tahun sebelumnya, yaitu dari 14,57 persen pada tahun 2015 menjadi 17,54 persen pada tahun 2019. Kontribusi sektor yang dihitung antara lain kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sesuai dengan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik.

Persentase pertumbuhan nilai transaksi perdagangan pasar tradisional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, persentase peningkatan terbesar pada tahun 2017 yaitu sebesar 2,34 persen, meningkat dari nilai transaksi pada tahun 2016 sebesar 115.575 juta menjadi 119.838 juta pada tahun 2017. Pada tahun 2019 nilai transaksi perdagangan pasar tradisional sebesar 121.266 juta atau meningkat dari tahun 2018 sebelumnya sebesar 119.838 juta. Persentase UTTP yang ditera pada tahun 2018 sebesar 8,4 persen meningkat di tahun 2019 sebesar 13,4 persen.

2.3.2.5 Urusan Perindustrian

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal.

Tabel II.107.

Capaian Indikator Bidang Perindustrian di Kabupaten Bangka Tengah

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	PDRB ADHK dalam sektor industri pengolahan (Rp Juta)	556.009	570.467	608.068	590,89	323,79
3	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	9,00	8,74	8,96	8,93	5,63
4	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah (%)	n/a	15,94	9,01	7,82	6,87
5	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT (%)	4,21	13,30	20,79	20,04	22,19
6	Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui sertifikasi Halal (%)	2,41	4,39	4,89	5,03	6,69

Sumber : DISPERINDAGKOP – UKM Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, nilai PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan bila dibandingkan Tahun 2018 sebesar 590,89 juta menjadi 323,79 juta pada tahun 2019. Nilai PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 608.068 juta. Kontribusi PDRB Sektor industri pengolahan tertinggi terjadi pada Tahun 2015 dengan memberikan kontribusi sebesar 9 persen. Kontribusi sector industri pengolahan pada tahun 2019 sebesar 5,63 persen menurun jika dibandingkan tahun 2018 sebesar 8,93 persen. Selain itu, persentase pertumbuhan Industri kecil menengah tahun 2019 sebesar 6,87 persen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 7,82 persen.

2.3.2.6 Urusan Kelautan dan Perikanan

Tabel II.108.
 Urusan Kelautan dan Perikanan
 di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No.	Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	n/a	39,02	39.48	49,85	55,18
	Perikanan Tangkap					
2	Persentase Peningkatan Produksi Ikan (%)	n/a	12,27	7,71	4,37	8,73
3	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap	4.137	4.289	3.824	1.784	1.807
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	19.672,57	23.606,50	23.969,66	25.068,94	27.327,56
5	Cakupan bina kelompok nelayan	n/a	30	34	33	25
	Perikanan Budidaya					
6	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya	212	220	283	291	313
7	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	1.353,30	1.428.00	1.456,56	1.467,31	1.526,43
8	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	n/a	n/a	60	73	104

Sumber : Dinas Perikanan Kab Bangka Tengah Tahun 2020

Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Bangka Tengah telah memenuhi standard FAO (*Food and Agriculture Organization*) dan Pola Pangan Harapan (PPH) yaitu 31,40 kg/kapita/tahun. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat konsumsi ikan sebesar 55,18 kg/kapita/tahun.

Tercapainya tingkat konsumsi ikan orang-orang Indonesia bisa dihubungkan dengan beragam aspek, antara lain:

- Pengetahuan tentang gizi serta teknik pemrosesan ikan sudah meningkat.
- Metode perolehan ikan yang beragam.

- c. Harga ikan yang cukup terjangkau.
- d. Tingkat preferensi/kegemaran mengonsumsi ikan sudah berkembang.
- e. Citra/*image*/gengsi ikan sebagai makanan acara spesial sudah berkembang.
- f. Promosi mengonsumsi ikan yang semakin gencar.

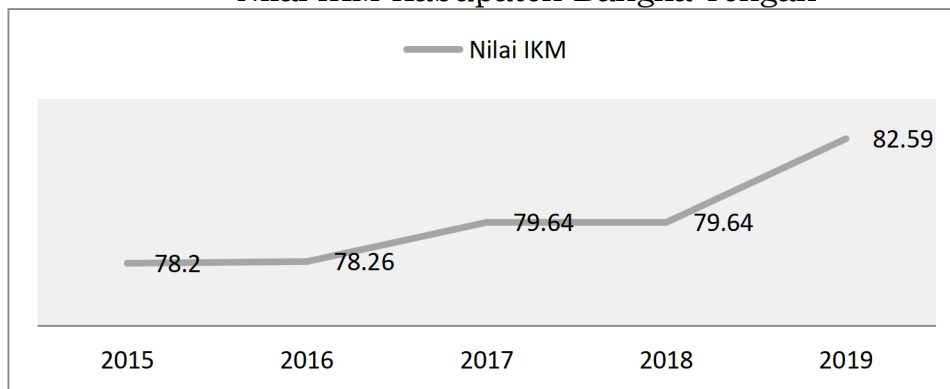
Berdasarkan data tabel di atas, produksi perikanan tangkap (ton) di Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebanyak 27.327,56 ton meningkat dari tahun 2015 sebanyak 19.672,57 ton atau meningkat sebesar 38,91 persen. Untuk perikanan budidaya pada tahun 2019 sebanyak 1.526,43 ton meningkat dari tahun 2015 sebanyak 1.353,30 ton atau meningkat sebesar 12,79 persen.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pendukung Pemerintahan

2.3.3.1 Sekretariat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator atas kondisi pelayanan publik. Angka diperoleh dari penilaian oleh masyarakat atas tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang diterima. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 dan mekanisme survei dilakukan dengan menetapkan 24 unit pelayanan publik, yaitu RSUD, Puskesmas, KPPTSP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan sebagai sampling serta jumlah responden masing-masing jenis pelayanan sebanyak 150 orang dengan sistem acak. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Berikut nilai rata-rata survei kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015-2019.

Grafik II.18.
 Nilai IKM Kabupaten Bangka Tengah



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2019, rata-rata survei kepuasan masyarakat sebesar 82,59% dan hasil nilai IKM ini berkategori “Baik”. Tren nilai survei kepuasan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah selalu mengalami kenaikan. Faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut adalah komitmen unit pelayanan publik dan adanya harapan masyarakat terhadap meningkatnya kinerja pelayanan publik. Selain itu dukungan Kementerian PAN dan RB dalam melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukkan melalui terpilihnya Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu dari 56 Kabupaten/Kota yang menjadi *pilot project* pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB. Selain itu, dukungan Ombudsman RI dalam melaksanakan penilaian kualitas pelayanan ditunjukkan melalui hasil survei independen kepatuhan standar pelayanan publik yang menyatakan Kabupaten Bangka Tengah masuk kategori Zona Hijau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pelaksanaan evaluasi SAKIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Tabel II.109.
Nilai SAKIP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Komponen Yang Dinilai	Nilai				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	18,87	23,53	23,44	24,21	24,57
2	Pengukuran Kinerja	13,52	15,76	15,99	17,60	17,81
3	Pelaporan Kinerja	10,69	10,52	11,01	11,41	11,97
4	Evaluasi Internal	6,00	6,16	6,34	6,45	6,74
5	Capaian Kinerja	10,97	9,05	10,41	10,43	9,11
	Nilai Hasil Evaluasi	60,05	65,02	67,19	70,10	70,20
	Tingkat Kuntabilitas Kinerja	B	B	B	BB	BB

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2015 samai 2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015-2016 mendapat nilai SAKIP dengan predikat B, yang nilainya meningkat dari tahun 2015 sebesar 60,05 menjadi 65,02 pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 sampai tahun 2019, predikat SAKIP di Kabupaten Bangka Tengah meningkat nilainya mejnadi BB, namun angkanya menunjukkan peningkatan dari sebesar 67,19 pada tahun 2017 meningkat menjadi 70,20 pada tahun 2019. Capaian nilai SAKIP tersebut di nilai BB sebenarnya masih terdapat indikator manajemen kinerja yang harus terus diperbaiki. Peningkatan pencapaian tersebut perlu disertai dengan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam manajemen pemerintahan.

2.3.3.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPJM dan RKPD. Selain itu, program-program

DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD.

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pada orientasi proses, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pada orientasi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan pedoman perencanaan tahunan adalah:

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239).

Perencanaan pembangunan harus konsisten antara perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Tabel II.110.

Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (Persen)	98,28	100,00	98,84	94,35	93,82
2	Penjabaran konsistensi	95,91	97,69	95,88	98,80	98,20

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2015	2016	2017	2018	2019
	program RKPD kedalam APBD (Persen)					
3	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	n/a	57,65	64,47	64,47	72,06

Sumber: Bappelitbangda, 2020

2.3.4.2 Keuangan

Indikator Persentase PAD terhadap pendapatan digunakan untuk menggambarkan kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pengoptimalan peningkatan penerimaan daerah terus dilakukan oleh Kabupaten Bangka Tengah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Di bawah ialah tabel perbandingan PAD dan pendapatan di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.111.

Perbandingan PAD dan Pendapatan Kabupaten Bangka Tengah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase PAD terhadap Pendapatan (%)
2015	66.341.267.135,93	763.704.200.019,41	8,69
2016	73.459.526.744,49	797.822.644.608,43	9,21
2017	97.375.136.679,82	774.568.409.930,59	12,57
2018	75.995.335.730,86	890.396.701.514,78	8,53
2019	89.551.737.000,00	949.457.646.110,00	9,1

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Tengah Tahun, 2020

Indikator kinerja sasaran bidang ekuangan yang kedua yaitu Opini BPK. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada (4) empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pada tahun 2019, Kabupaten Bangka Tengah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Predikat ini telah dipertahankan sejak 4 (empat) tahun terakhir berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah telah berjalan sangat baik. Di bawah ini adalah opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.112.
Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Tahun	Opini BPK RI
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak 4(empat) tahun berturut-turut yaitu mulai Tahun 2016-2019. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten Bangka Tengah dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara.

2.3.4.3 Kepegawaian

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah mengadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin.

Tabel II.113.
Capaian Kinerja Indikator Kepegawaian
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.	30	27	28	28	30
2.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah.	957	796	834	839	1095
3.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.	2.934	2.263	1.880	1.782	1.724
4	Persentase aparatur yang mengisi formasi jabatan struktural sesuai kompetensi	n/a	85,63	89,18	89,24	89,67
5	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	n/a	0,55	0,15	0,08	0,25
6	Persentase pelayanan kepegawaian yang tepat waktu	n/a	22,65	36,44	47,91	66,20

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah pada Tahun sampai dengan tahun 2019 sebanyak 30 jabatan, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2016-2018 menjadi sebanyak 28 jabatan. Untuk jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah dari tahun 2015-2019 mengalami fluktuatif, yaitu sebanyak 957 jabatan di Tahun 2015 turun menjadi 796 jabatan di Tahun 2016, namun kemudian meningkat menjadi sebanyak 1095 jabatan pada tahun 2019. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah mengalami penurunan dari sebanyak 2.943 jabatan pada Tahun 2015 turun terus sampai tahun 2019 yaitu menjadi sebanyak 1.724 jabatan.

Persentase aparatur yang mengisi formasi jabatan struktural sesuai kompetensi dari tahun 2016 mengalami peningkatan dari 85,63 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 89,67 persen pada tahun 2019. Persentase

penurunan pelanggaran disiplin pegawai mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,55 persen menjadi sebesar 0,25 persen pada tahun 2019. Persentase pelayanan kepegawaian yang tepat waktu juga menunjukkan peningkatan dari 22,65 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 66,20 persen pada tahun 2019.

2.3.4.4 Pendidikan dan Pelatihan

Tabel II.123.
Capaian Kinerja Indikator Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rata-rata lama pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan (JP)	60	81	70	72	74
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%).	15,63	12,96	27,28	39,80	48,79
3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%).	35,45	33,77	36,57	39,70	38,38

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari tahun ketahun mengalami fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi jumlah Jam Pelajaran (JP) terjadi pada tahun 2016 sebanyak 81 JP, kemudian tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 70 JP. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan dari 70 JP pada tahun 2017, kemudian 72 JP pada tahun 2018 dan 74 JP pada tahun 2019. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan struktural mengalami fluktuatif dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada Tahun 2015 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 15,63 persen, dan pada akhir tahun 2019 naik menjadi sebesar 48,79 persen, walaupun pada tahun 2016 terjadi penurunan menjadi sebesar 12,96 persen. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2015 sebesar 35,45 persen dan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 38,38 persen.

2.3.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, inovasi kerap diperlukan oleh suatu daerah termasuk Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penelitian dan pengembangan terhadap berbagai isu persoalan sebagai upaya pemecahan persoalan-persoalan serta tantangan yang terjadi. Terkait hal ini, Kabupaten Bangka Tengah mendorong berbagai pihak untuk mencurahkan daya upaya hasil pikir dengan memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.114.

Indikator Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	n/a	n/a	140	142,5	133,34
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	n/a	n/a	109,68	108	125
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan SIDA	n/a	n/a	109,7	113,3	119,1
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah penerapan SIDA	n/a	n/a	100,0	100	100

Sumber: Bappelitbangda, 2020

2.3.5 Fokus Layanan Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.5.1 Inspektorat

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.115.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengawasan

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	n/a	2	2	3	3

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
2.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal (APIP) dan eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti	n/a	99,82	98,6	77,31	91,79
3.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK	n/a	0	0	0	0
4.	Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBBM	n/a	0	0	0	0
5.	Persentase nilai SAKIP OPD dengan kategori "A"	n/a	24,2	21,9	64,5	43,01
6.	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	n/a	2	2	2	3

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian indikator kinerja urusan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah berada pada level 3 dengan nilai 3.038. Pada tahun 2018 dan 2019 BPKP tidak melakukan evaluasi terhadap Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah. Sehingga sampai dengan tahun 2019 tingkat level maturitas SPIP masih berada pada level 3.
2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal (APIP) dan eksternal (BPK) yang selesai ditindaklanjuti sampai tahun 2019 sebesar 91,79 persen, dengan perhitungan 190 rekomendasi BPK dan APIP yang selesai ditindaklanjuti berbanding dengan jumlah rekomendasi BPK dan APIP sebesar 207 rekomendasi X 100%. Rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti sampai dengan 2019 berjumlah 500 rekomendasi dari 624 rekomendasi atau sebesar 80,13%.
3. Pada tahun 2019 Inspektorat Daerah mempunyai target 2 (dua) unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM dan unit kerja atau OPD yang diajukan ke Kementerian PAN dan RB untuk di lakukan evaluasi adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja serta Rumah Sakit Umum Daerah. Dari hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB ke tiga unit kerja/OPD tersebut tidak ada yang mendapatkan predikat WBK/WBBM. Fator penghambat pencapaian tersebut dikarenakan implementasi WBK/WBM tersebut masih hanya sebatas kelengkapan dokumen saja dan belum diterapkan sepenuhnya. Walaupun capaiannya rendah sekali, akan tetapi

perangkat daerah atau unit kerja terkait pada dasarnya sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat WBK karena sudah tidak ada lagi yang namanya pungutan liar dan didukung juga dengan ASN berintegritas yang merupakan faktor pendorong kedepannya supaya bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM.

4. Pada Persentase nilai SAKIP OPD dengan kategori “A” dari tahun 2015 sampai 2018, Inspektorat melakukan penilaian terhadap OPD dengan hasil jumlah OPD yang memperoleh nilai A terus meningkat, dari 2016 sebesar 24,2 persen menjadi sebesar 64,5 persen pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 evaluator lebih objektif dalam memberikan penilaian, sehingga rata-rata nilai SAKIP OPD mengalami penurunan. Hal ini dilakukan untuk menambah point penilaian komponen evaluasi internal. Pencapaian yang sangat rendah tersebut disebabkan oleh evaluator baru mendapatkan bimbingan teknis dari Kementerian PAN dan RB terkait tata cara evaluasi SAKIP OPD yang baik dan benar di awal tahun 2020. Pada kesempatan tersebut pihak Kementerian PAN dan RB menjelaskan bahwa penilaian SAKIP OPD tahun 2018 oleh Inspektorat Daerah adalah *over statement* atau dengan kata lain nilai yang di berikan tidak objektif, hal ini dikarenakan sebagian besar OPD masih terdapat kekurangan dalam SAKIP.
5. Pada tahun 2019 Inspektorat Daerah mendapat Level Internal Audit Capability Model (IACM) pada level 3, hasil penilaian dari *Quality Assurance* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Faktor pendukung dalam pencapaian IACM level 3 tersebut salah satunya adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan audit kinerja. Kedepannya Inspektorat Daerah akan lebih mengimplementasikan IACM level 3 tersebut, salah satunya lebih intens dalam memberikan jasa advise.

Tabel II.116.
Persentase Tindak Lanjut Temuan

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Temuan APIP					
1.	Jumlah Total temuan APIP	21	12	13	10	
2.	Jumlah total temuan yang ditindaklanjuti	21	12	13	10	
3.	Persentase tindak lanjut temuan APIP (%)	100	100	100	100	
	Temuan BPK					
1.	Jumlah Total temuan BPK	21	18	23	21	23
2.	Jumlah total temuan yang ditindaklanjuti	21	18	23	21	23
3.	Persentase tindak lanjut temuan BPK (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase tindak lanjut temuan APIP/ Inspektorat dan temuan BPK di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 100%, yang artinya semua temuan baik temuan dari APIP maupun BPK semuanya ditindaklanjuti. Jumlah temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel di atas. Temuan BPK tersebut terdiri dari temuan mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan mengenai kepatuhan.

2.3.6 Fokus Layanan Urusan Kewilayahan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari kecamatan yaitu Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian wewenang Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel II.117.

Indikator Kinerja Kecamatan
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2015	2016	2017	2018	2019
Kecamatan Koba						
1	Persentase pelayanan publik yang telah dibeikan sesuai dengan SOP	n/a	80%	75%	75%	100%
2	Tingkat survey kepuasan masyarakat	n/a	0%	80%	80%	87%
3	Presentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan	n/a	0%	90%	75%	64%
4	Presentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKPDesa	n/a	0%	90%	90%	91%
Kecamatan Pangkalanbaru						
1	Persentase pelayanan publik yang telah dibeikan sesuai dengan SOP	n/a	99%	77%	98%	100%
2	Tingkat survey kepuasan masyarakat	n/a	n/a	80%	81%	100%
3	Presentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan	n/a	86%	79%	90%	68%
4	Presentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKPDesa	n/a	n/a	95%	85%	85%
Kecamatan Sungaiselan						
1	Persentase pelayanan publik yang telah dibeikan sesuai dengan SOP	n/a	92%	94%	100%	100%
2	Tingkat survey kepuasan masyarakat	n/a		80%	80%	80%
3	Presentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan	n/a	66%	71%	76%	80%
4	Presentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKPDesa	n/a	n/a	81%	97%	100%
Kecamatan Simpangkatis						

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase pelayanan publik yang telah dibeikan sesuai dengan SOP	n/a	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat survey kepuasan masyarakat	n/a	65%	76%	76%	84%
3	Presentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan	n/a	66%	70%	76%	53%
4	Presentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKPDesa	n/a	N/A	70%	75%	100%
Kecamatan Namang						
1	Persentase pelayanan publik yang telah dibeikan sesuai dengan SOP	n/a	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat survey kepuasan masyarakat	n/a	N/A	N/A	98%	87%
3	Presentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan	n/a	66%	90%	74%	73%
4	Presentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKPDesa	n/a	N/A	90%	89%	84%
Kecamatan Lubuk Besar						
1	Persentase pelayanan publik yang telah dibeikan sesuai dengan SOP	n/a	69%	84%	100%	100%
2	Tingkat survey kepuasan masyarakat	n/a	N/A	89%	84%	85%
3	Presentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan	n/a	N/A	71%	55%	53%
4	Presentase realisasi fisik pelaksanaan kegiatan APBDes yang sesuai dengan RKPDesa	n/a	80%	89%	97%	72%

Sumber : data diolah Tahun 2020

2.3.7 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Umum

2.3.7.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun kedepan, pendidikan politik akan merupakan alat transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeri serta saling berinteraksi antara negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam mewujudkan negara yang demokratis. Tantangan lain untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan pemerintahan daerah secara profesional.

Dalam rangka upaya penciptaan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat

Tabel II.118.

Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja Utama	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase forum kemitraan yang aktif	100%	75%	75%	100%	100%
2	Persentase ormas yang aktif	75%	75%	70%	80%	60%

No	Indikator Kinerja Utama	2015	2016	2017	2018	2019
3	Persentase konflik vertikal dan horizontal yang tertangani	100%	55%	60%	65%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1 PDRB Per Kapita

Tabel II.119.

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB (Rp. Milliar)					
a. ADHB	7.056	7.469	7.972	8.216	8.579
b. ADHK	5.272	5.433	5.621	5.812	5.884
PDRB Perkapita (Rp. Ribu)					
a. ADHB	39.005	40.434	42.270	42.736	43.727
b. ADHK	29.142	29.411	29.801	30.204	29.995
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK (%)	-1,74	0,92	1,32	1,35	1,25
Jumlah Penduduk (000 orang)	181	185	189	192	196
Pertumbuhan (%)	2,08	2,11	2.16	2,03	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut, maka akan dihasilkan suatu nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan di suatu wilayah yang dapat dibandingkan dengan wilayah lain. Adanya kenaikan PDRB per kapita mengindikasikan bahwa perekonomian berkembang ke arah yang lebih baik. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 2015-2019, nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 PDRB Per Kapita sebesar 39.005 juta rupiah, di tahun 2019 mencapai 43.727 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK selama kurun waktu 2015 -2019 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya

mengalami kenaikan dari 29.142 juta rupiah menjadi 29.995 juta rupiah di tahun 2019. Selama tahun 2015-2019 pertumbuhan terendah tahun 2015 sebesar 29.142 juta rupiah dan yang tertinggi di tahun 2018 sebesar 30.16 juta rupiah. Hal tersebut seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.120.

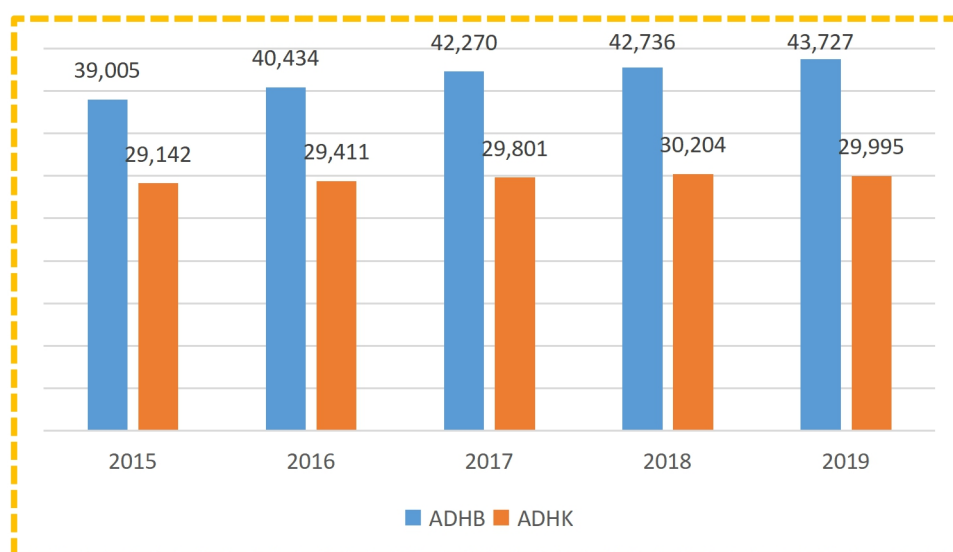
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai PDRB (Rp juta)	5.271.866	5.432.805	5.620.435	5.812.197	5.884.996
Jumlah Penduduk (jiwa)	180.903	184.720	188.603	192.428	196.198
PDRB perkapita (Rp Juta/jiwa)	29,14	29,41	29,80	30,20	29,99

Sumber : data diolah, 2020

Grafik II.19.

PDRB Per Kapita Menurut Pengeluaran (Rp. Ribu)



Sumber : data diolah, 2020

Perkembangan penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kondisi tersebut berdampak terhadap perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bangka Tengah. PDRB perkapita selama periode tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Secara nominal, PDRB perkapita pada tahun 2015 sebesar 39.005 juta rupiah dan di tahun 2018 meningkat menjadi 42.734 juta rupiah dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 43.727 juta. Sementara itu, perkembangan PDRB perkapita secara riil menunjukkan penurunan selama kurun waktu 2015 dan kembali meningkat di tahun 2016

hingga 2019. Namun, laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 menyebabkan nilai PDRB perkapita pada kurun waktu tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 2,08 persen, sementara laju pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,31 persen. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Bangka Tengah mengalami kontraksi sebesar -1,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh resesi ekonomi dan tutupnya perusahaan besar di sektor pertambangan sehingga berdampak pada perekonomian Kabupaten Bangka Tengah. Namun, pada tahun 2016 hingga 2018, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, laju pertumbuhan PDRB perkapita naik sebesar 0,92 persen hingga 1,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan kemudian terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar 0,70 persen karena kenaikan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kenaikan nilai PDRB. Nilai PDRB naik sebesar 1,25 persen sedangkan jumlah penduduk naik sebesar 1,95 persen.

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari luar daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring dengan adanya perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang. Peran perdagangan antar wilayah cukup penting dalam perekonomian suatu daerah. Jenis produksi barang dan jasa yang saling melengkapi dan disparitas harga menjadi faktor utama munculnya kegiatan transaksi ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara penuh akan berusaha mendatangkan barang dan jasa dari daerah/negara lain. Pada sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa yang melebihi kebutuhan domestik juga

terdorong untuk memperluas pemasarannya ke luar daerah, bahkan hingga ke luar negeri. Seiring perkembangan zaman, maka produksi dan permintaan masyarakat akan barang dan jasa juga semakin meningkat, kemajuan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi juga semakin memungkinkan distribusi barang dan jasa di kabupaten/kota semakin berkembang.

Tabel II.121.
Perkembangan Net Ekspor-Impor Barang dan Jasa

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Net Ekspor Barang dan Jasa					
a. ADHB (Rp. Miliar)	58	-500	-853	-1.406	-2.010
b. ADHK (Rp. Miliar)	177	-1	-78	-195	-452
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,82	-6,70	-10,70	-17,11	-23,42

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Perkembangan net ekspor barang dan jasa selama 2015-2019 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2015, net ekspor barang dan jasa baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan bernilai positif yang berarti lebih banyak nilai ekspor dibandingkan impor. Akan tetapi tahun 2016-2019 bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak impor dibandingkan ekspor. Nilai positif dan negatif ini berpengaruh sama dengan terhadap proporsi dalam PDRB terhadap ADHB.

2.4.1.2 Nilai Tukar Petani

NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin tinggi pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Dengan demikian, secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk

menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani. Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas/ breakeven. Kenaikan/ penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/ penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan hargabarang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan disbanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana komponen Ib hanya terdiri dari Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Dengan dikeluarkannya konsumsi dari komponen indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTUP dapat lebih mencerminkan kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksinya. Di bawah ini adalah tabel NTP di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015-2019.

Tabel II.122.
Nilai Tukar Petani Kabupaten Bangka Tengah

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Tukar Petani (NTP)	98,42	97,25	98,00	91,16	87,73
Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	102,83	105,56	108,15	106,36	103,72
Indeks Harga yang Diterima Petani (Ib)	104,52	108,56	110,37	114,89	118,22
Indeks Konsumsi Rumah Tangga	104,81	109,29	111,38	116,53	119,89
Indeks BPPBM	103,43	105,42	105,76	109,08	110,93

Sumber : data diolah, 2020

Berdasarkan data di atas, selama kurun waktu tahun 2015-2019, NTP Kabupaten Bangka Tengah mengalami angka yang fluktuatif. Kenaikan dan penurunan tersebut disebabkan oleh nilai tukar yang dibayarkan oleh petani dengan nilai yang diterima. Penyebab menurunnya NTP diantaranya karena paket kebijakan kenaikan harga BBM, musim kemarau berkepanjangan yang berdampak pada menurunnya hasil panen atau bahkan ada yang mengalami gagal panen. Secara keseluruhan NTP merupakan gabungan 3 (tiga) subsektor (hortikultura, perkebunan, dan peternakan).

2.4.1.3 Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Pada kurun waktu tahun 2015-2019 Nilai Tukar Nelayan (NTN) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2015 di angka 100, kemudian meningkat tahun 2016 menjadi 101,37 hingga pada tahun 2019 menjadi 116. Hasil evaluasi didapatkan beberapa faktor yang mendukung tercapainya target yang ditetapkan diantaranya adalah:

1. Dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk pengembangan produktivitas perikanan tangkap, menyediakan sarana dan prasarana seperti jumlah armada perikanan tangkap, serta pembinaan dan pelatihan dari dinas dan pemerintah daerah untuk masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sehingga diharapkan meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat nelayan.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menerapkan sistem penangkapan ikan yang baik dan benar. menerapkan sistem rantai dingin sehingga diperoleh hasil tangkapan ikan yang optimal dengan kualitas ikan baik.
3. Semakin membaiknya pendataan statistik perikanan tangkap oleh petugas statistik di lapangan.
4. Jumlah produksi dan harga jual ikan produksi tangkapan di tingkat nelayan relatif stabil.

5. Meningkatnya metode penangkapan dan alat tangkap yang digunakan oleh nelayan serta pengembangan inovasi teknologi perikanan tangkap melalui penerapan aplikasi SIDOLPIN (Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan)

Adapun Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahunan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015-2019 secara rinci diuraikan pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel II.123.

Jumlah Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2015-2019

2015	2016	2017	2018	2019
100	101,37	104	105,31	116

Sumber : data diolah Tahun 2020

2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)

Perkembangan angka realisasi NTPi dalam kurun waktu tahun 2015-2019 juga cenderung mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya target yang ditetapkan, diantaranya:

1. Dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Gerakan Pakan Mandiri (GERPARI) dan penyediaan sarana excavator
2. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui Dinas Perikanan, diantaranya berupa pengadaan sarana dan prasarana budidaya ikan untuk kelompok pembudidaya ikan dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat pembudidaya ikan untuk menerapkan sistem Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), GERPARI (Gerakan Pakan Ikan Mandiri) yang memproduksi pakan sendiri dengan bahan baku lokal sehingga mampu menekan biaya produksi.
4. Efisiensi biaya produksi melalui produksi pakan ikan sendiri oleh pelaku utama dan pelaku usaha dengan bahan baku lokal sehingga mengurangi ketergantungan dengan pakan ikan produksi pabrik sehingga Jumlah produksi dan harga jual ikan produksi budidaya relatif stabil.

5. Bertambahnya jumlah pembudidaya ikan untuk melakukan aktivitas budidaya ikan khususnya ikan air tawar dengan adanya bantuan benih ikan dan pembinaan metode dan teknologi budidaya ikan yang benar bagi pembudidaya ikan dari Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.

Adapun NTPi tahunan di Kabupaten Bangka Tengah tahun 2015-2019 secara rinci diuraikan pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel II.124.

Jumlah Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Tahun 2015-2019

2015	2016	2017	2018	2019
100	100,14	102,5	102,5	106

Sumber : data diolah Tahun 2020

Seperti halnya NTN, NTPi dapat menjadi alat ukur kemampuan tukar barang-barang yang dihasilkan pembudidaya ikan terhadap barang/ jasa yang diperlukan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan produksinya. NTPi merupakan rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib) yang dinyatakan dalam persentase.

NTPi lebih dari 100 artinya pembudidaya ikan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya atau mengalami surplus. NTPi kurang dari 100 berarti bahwa pengeluaran pembudidaya ikan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi daripada pendapatan hasil usahanya. Sedangkan NTPi sama dengan 100 artinya bahwa pendapatan hasil usaha sama dengan pengeluaran untuk biaya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Panjang Jalan

Tabel II.125.

Panjang Jalan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang jalan (Km)	292.48	346.72	346.72	346.72	346,72
Kondisi baik (Km)	223.79	214.89	227.88	244.56	184,69
Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik (%)	76.51	61.98	65.72	70.53	53,26

Sumber : Data diolah Tahun 2020

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan dan jembatan. Berdasarkan data diatas sampai dengan tahun 2019 panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 184,69 Km atau sebesar 53,25% dari panjang jalan 346,72 Km.

2.4.2.2 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 jumlah bank umum pemerintah lebih banyak dari bank umum swasta. Jumlah bank umum pemerintah dari tahun 2015-2019 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 11 bank, sedangkan bank umum swasta dari tahun 2015-2019 sebanyak 10 bank.

2.4.2.3 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Jumlah rumah makan/restoran/warung makan di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 menunjukkan peningkatan jumlahnya yaitu sebanyak 63 restoran pada tahun 2015 dan meningkat tahun 2019 menjadi sebanyak 75 restoran. Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah restoran di Kabupaten Bangka

Tengah adalah daya beli masyarakat yang tinggi, kunjungan wisatawan yang meningkat di suatu daerah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

2.4.2.4 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 menunjukkan jumlah yang meningkat walaupun tidak besar. Pada tahun 2019 sebanyak 1 hotel bintang empat, 3 hotel bintang tiga, 1 hotel kelas melati dan 3 penginapan.

2.4.2.5 Pelayanan Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut karena indikator ini menjadi salah satu indikator kunci pembangunan. Tahun 2015 persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 64,78 %, kemudian pada tahun 2019 pencapaiannya sudah sampai pada angka 82,08 %.

2.4.2.6 Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah rumah tangga yang telah mendapat layanan kelistrikan dengan jumlah total rumah tangga di suatu wilayah. Berdasarkan data yang ada, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2018 sebesar 97,22 % dan meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 97,28 %.

2.4.2.7 Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon.

Dalam lima tahun terakhir, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) semakin berkembang pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah memperlihatkan bahwa perkembangan penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan HP/Telepon semakin meningkat selama kurun waktu 2015-2019.

Penggunaan HP/Telepon pada tahun 2015 sebesar 59,32 persen meningkat menjadi 81,09 persen pada tahun 2019.

2.3.8 Fokus Iklim Berinvestasi

2.3.8.1 Angka kriminalitas yang tertangani

Angka kriminalitas menjadi ukuran yang menggambarkan suatu ketimpangan sosial yang harus ditekan sekecil-kecilnya. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan maupun kekerasan dan kejahatan susila masih sering terjadi. Banyaknya jumlah kejahatan yang terjadi membuat resah masyarakat. Oleh sebab itu, upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat dapat menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. Di bawah ini adalah data angka kriminalitas di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel II.126.
Angka Kriminalitas Tahun 2015-2019

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Tindak Pidana	168	156	108	107	106
Jumlah Tindak Pidana yang diselesaikan	87	88	67	83	78
Presentase penyelesaian tindak pidana (%)	52	56	62	78	74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah, 2020

Jumlah tindak pidana pada tahun 2019 sebanyak 106 kasus turun dibandingkan tahun 2018, jumlah tindak pidana yang dapat diselesaikan sebanyak 78 kasus atau sebesar 74 persen. Tindak pidana yang terjadi pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan tindak pidana tahun 2017. Meningkatnya jumlah tindak pidana ini menjadi salah satu bukti bahwa

kondisi di Kabupaten Bangka Tengah kurang aman. Dalam rangka penurunan sejumlah kasus tindak pidana tersebut membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama penanganan kasus narkoba yang mengancam keberlangsungan generasi muda sebagai korbannya. Guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, perlu dilakukan upaya-upaya baik berupa upaya preventif maupun kuratif terhadap kejadian kriminalitas.

2.3.8.2 Kemudahan Perizinan

Pelayanan perizinan di Kabupaten Bangka Tengah saat ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan metode satu pintu ini diharapkan akan lebih mempermudah pelayanan dan meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan investasi. Upaya untuk meningkatkan pelayanan melalui Online Single Submission (OSS).

2.3.8.3 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel II.127.

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak	11	11	11	11	11
Retribusi Daerah	1	1	1	1	1

Berdasarkan tabel jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah dari tahun 2015 – 2019 Kabupaten Bangka Tengah memiliki sebanyak 11 macam pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajakn sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk retribusi daerah hanya 1 jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum.

2.3.9 Fokus Sumber Daya Manusia

2.3.9.1 Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif terampil kreatif disiplin profesional dan mampu memanfaatkan mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan daerah

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas SDM. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1/S2/S3.

Hasil analisis rasio lulusan S1/S2/S3 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.128.
Rasio lulusan S1/S2/S3 Tahun 2015 s.d 2018
Kabupaten Bangka Tengah

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah lulusan S1	1.596	1.688	1.228	1.381	1.364
2	Jumlah lulusan S2	81	103	117	134	134
3	Jumlah lulusan S3	3	4	7	8	8
	Jumlah lulusan S1/S2/S3	1.680	1.795	1.352	1.523	1.506
4	Jumlah penduduk	166.724	174.378	177.335	182.286	196.196
5	Rasio lulusan S1/S2/S3	99	97	131	120	130

Sumber : Data diolah, 2020

Dilihat dari data tabel di atas, jumlah penduduk dengan lulusan berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2015-2019 terjadi fluktuatif. Pada tahun 2019, setiap 10000 jiwa penduduk Kabupaten Bangka Tengah hanya

ada 130 orang yang lulusan S1/S2/S3. Rendahnya kualitas dan kuantitas pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah apabila dilihat dari angka lulusan S1/S2/S3 karena masih banyaknya anak putus sekolah dan tidak melanjutkan ke sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi disebabkan pengaruh lingkungan masalah ekonomi dan ikut membantu orang tua bekerja mencari timah (ngelimbang timah).

2.3.9.2 Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi jika dilihat dari kategori angka ketergantungan sebagai berikut :

- 1) Angka Beban Tanggungan Tinggi: ≥ 70
- 2) Angka Beban Tanggungan Sedang: 51 – 69
- 3) Angka Beban Tanggungan Rendah: ≤ 50

Hasil analisis rasio ketergantungan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.129.

Rasio Ketergantungan Tahun 2015 s.d 2019
Kabupaten Bangka Tengah

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	47.244	49.974	48.930	51.424	53.140
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	5.456	5.922	6.294	6.915	7.595
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	52.700	55.896	55.224	58.339	60.735
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	114.024	118.482	122.111	123.947	126.048
5	Rasio ketergantungan (%)	46.22	47.17	45.22	47,06	48,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang.

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada tahun 2019 sebagian besar penduduk Kabupaten Bangka Tengah adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun), yang mencapai 126.048 jiwa, kemudian kelompok usia non produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) mencapai 60.735 jiwa, sehingga Angka rasio ketergantungan adalah 48,18%, artinya setiap 100 orang berusia produktif di Kabupaten Bangka Tengah menanggung 48 orang yang non produktif.

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.5.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di berbagai sektor selama beberapa tahun terakhir ini telah memberikan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Bangka Tengah. Namun demikian, permasalahan yang timbul dalam proses pembangunan menyebabkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang memadai belum terealisasi sesuai dengan harapan. Pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan kelembagaan publik, termasuk alokasi sumber daya yang efisien. Manfaat pembangunan yang diharapkan belum merata dan kerawanan sosial masih sering terjadi, sehingga kehidupan masyarakat belum sepenuhnya membaik. Keadaan ini timbul sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang terjadi baik masa lalu maupun sekarang yang belum teratasi secara maksimal. Permasalahan-permasalahan yang ada antara lain:

1. Partisipasi dan kesadaran penduduk dalam berpartisipasi maupun peduli terhadap pembangunan masih menjadi kendala dan berpengaruh dalam melakukan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah.
2. Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional, bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya. Kondisi ekonomi daerah

secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan nilai tambah bruto/nilai *output* akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini terlihat dari perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir. Perubahan struktural yang dilakukan pemerintah dengan mendorong perkembangan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri jasa akan memberikan efek pengganda bagi perekonomian. Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi global yang terjadi pada beberapa tahun terakhir, perkembangan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu segera direspon secara komprehensif.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah selama dua tahun terakhir yakni tahun 2017 dan 2018, mengalami perbaikan setelah pada tahun 2014 hingga 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah mengalami perlambatan. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi kecuali pada lapangan usaha pertambangan yang justru mengalami penurunan produksi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2018 mencapai 5,81 triliun rupiah, naik dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 5,62 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,41 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 3,46 persen. Pada tahun 2018, dari 17 kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Bangka Tengah, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif, kecuali pertambangan dan penggalan, Industri Pengolahan, dan

pengadaan air, pengelolaan sampah, Limbah Daur Ulang yang mengalami kontraksi berturut-turut sebesar 3,38 persen, 1,18 persen, dan 2,69 persen. Sementara itu ada sebanyak 5 kategori lapangan usaha yang mengalami perlambatan dibanding tahun 2016, sedangkan 9 kategori lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial sebesar 8,78 persen. Adapun 3 kategori lapangan usaha yang pertumbuhannya paling tinggi berturut-turut adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial; Transportasi dan Pergudangan; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini merupakan bukti jika kebijakan yang diambil oleh pemerintah sudah mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah, dimana pemerintah berhasil membalik pertumbuhan ekonomi terus mengalami perlambatan hingga hanya mencapai 0,31 persen pada tahun 2015 menjadi 3,41 persen di 2018. Meskipun ada sedikit perlambatan di tahun 2018 tetapi perlambatannya tidak signifikan. Melambatnya pertumbuhan pada periode 2014-2015 tidak terlepas dari menurunnya kondisi ekspor dan perubahan inventori di Kabupaten Bangka Tengah. Tutupnya perusahaan pertambangan dan industri pengolahan timah di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2013 menyebabkan menurunnya produksi timah, sehingga persediaan dan ekspor komoditi timah yang merupakan andalan Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan yang cukup dalam. Ditambah juga lesunya perekonomian global di tahun 2015 yang ikut memperburuk kondisi yang ada. Namun pada tahun 2016, kondisi perekonomian mulai menunjukkan perbaikan, ditandai dengan mulai meningkatnya laju pertumbuhan yaitu sebesar 3,05 persen dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 3,46 persen.

4. Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli konsumen, karena berakibat terhadap ketidakseimbangan antara permintaan dan

pendapatan. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam periode waktu yang sama. Laju inflasi dicerminkan oleh indeks harga yang diturunkan dari penghitungan PDRB yang disebut sebagai PDRB deflator atau dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan. Berbeda dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menggambarkan tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen, indeks implisit PDRB menggambarkan perkembangan perubahan harga produsen. Untuk kepentingan analisis, indeks implisit lebih sesuai jika disajikan dalam bentuk indeks perkembangan karena menggambarkan perkembangan harga dari waktu ke waktu. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan dari tahun 2015 tetapi terjadi kenaikan pada periode tahun 2017-2019. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2018 sebesar 70,99%. Data realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3.93% bersumber dari hasil data BPS pada tahun 2018. Realisasi ini menunjukkan hasil yang sangat baik karena semakin kecil persentase pengangguran terbuka maka kinerja capaian akan semakin baik. Tingkat Pengangguran Terbuka dapat terealisasi sesuai dengan target. Hal ini dikarenakan adanya perubahan definisi bekerja dari BPS saat ini yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut maka setiap angkatan kerja di kabupaten Bangka tengah mayoritas dianggap telah bekerja walaupun dengan pekerjaan yang tidak tetap sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka Tengah menurun

menjadi 3.93% dan dapat mencapai target. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Terdapat 4 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Bangka Tengah. Jumlah angkatan kerja meningkat memberikan indikasi potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang meningkat. Pengangguran terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Pada Usia 15-19 tahun merupakan kelompok umur yang paling banyak tidak pernah bekerja, hal ini disebabkan sebagian besar berpendidikan rendah tidak sesuai kompetensi dan SMK (fresh graduate) ada yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada Kelompok umur 20-24 Tahun kelompok yang pernah bekerja, hal ini disebabkan adanya penutupan pengolahan industri logam dan pusat perbelanjaan.

6. Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 2014 hingga 2018 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Periode tahun 2014, 2016, 2018 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan, tetapi pada periode tahun 2015 dan tahun 2017 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2014-2018 garis kemiskinan tidak signifikan karena mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 garis kemiskinan (Rp/bln/Perkapita) mengalami kenaikan sebesar 680.907, tetapi persentase penduduk miskin dalam persentase mengalami penurunan menjadi 5,81 persen dari tahun sebelumnya. Batas garis kemiskinan. dapat naik dan turun setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain oleh angka inflasi dan harga kebutuhan dasar. Tingginya inflasi sangat berpengaruh kepada angka kemiskinan, karena inflasi akan menggerus penghasilan penduduk akibat kenaikan harga kebutuhan dasar.
7. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan

formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Bangka Tengah selama 2014-2018 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 6,68 di tahun 2014 menjadi 7,94 di tahun 2018. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangka Tengah ini dapat dimaknai bahwa penduduk Bangka Tengah semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

8. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum pembangunan manusia Kabupaten Bangka Tengah terus mengalami kemajuan selama periode 2014 hingga 2018. IPM Kabupaten Bangka Tengah meningkat dari 68,09 pada tahun 2014 menjadi 69,52 pada tahun 2018.
9. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 2014-2018 menunjukkan tren peningkatan. Dari 69,98 di tahun 2014 meningkat menjadi 70,49 di tahun 2018.
10. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2014 – 2018), capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Bangka Tengah memperlihatkan tren yang berfluktuasi. Angka kematian bayi pada tahun 2018 tetap menjadi 6 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah Kematian bayi yang di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2018 adalah 21 kasus.
11. Infrastruktur penting untuk menjadi kekuatan Kabupaten Bangka Tengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun kondisi infrastruktur daerah masih minim. Kabupaten Bangka Tengah mempunyai potensi kerawanan banjir. Mengantisipasi datangnya

banjir, maka tindakan pencegahan banjir perlu dilakukan dengan membangun infrastruktur - infrastruktur yang diperlukan. Selain itu, infrastruktur bidang pertanian lahan basah, pertambangan, pemukiman, perkebunan, pariwisata, industri sedang, dan pada hutan produksi.

2.5.2 Identifikasi Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.5.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.5.2.1.1 Pendidikan

Belum optimalnya pelaksanaan program PAUD, pendidikan dasar (SD dan SMP), tenaga pendidik dan kependidikan, pendidikan non formal dan manajemen pendidikan disebabkan:

- a. Belum tersebarnya dan meratanya tenaga pendidik dan kependidikan terutama di daerah terpencil.
- b. Belum terpenuhinya pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang berstandar.
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan disekeliling sekolah sehingga menghambat pelaksanaan proses belajar mengajar.
- d. Terbatasnya jumlah SDM/ pegawai yang memiliki kompetensi dibidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan administrasi ketatausahaan disekolah (terutama SD).

Atas permasalahan tersebut, untuk meningkatkan pencapaian kinerja urusan pendidikan perlu diupayakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan redistribusi guru dan tenaga kependidikan dilingkungan Dinas Pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan.
- b. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis lainnya.
- c. Melaksanakan pembangunan sarana pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan skala prioritas.

- d. Mengefektifkan peran dan fungsi SDM Dinas Pendidikan.
- e. Memberikan bantuan berupa beasiswa kepada pelajar dan tenaga pelajar untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan pelajar.

2.5.2.1.2 Kesehatan

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan meliputi:

- a. Perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, misalnya kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah, dan pendirian rumah hunian yang kurang layak hal ini terlihat masih terdapat di beberapa kawasan dan belum menurunnya secara signifikan kawasan kumuh.
- b. Kualitas tenaga kesehatan yang harus ditingkatkan.
- c. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang ada di puskesmas ditandai dengan masih ada beberapa puskesmas yang masih kekurangan tenaga perawat dan bidan.

Atas permasalahan tersebut, untuk meningkatkan pencapaian kinerja urusan pendidikan perlu diupayakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Lebih banyak dilakukan sosialisasi terutama tenaga medis yang langsung berhadapan dengan masyarakat sekitar.
- b. Pembekalan tenaga medis dalam meningkatkan kualitas tenaga medis.
- c. Pemetaan tenaga kesehatan dalam menanggulangi kurangnya tenaga kesehatan.
- d. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang sehat dan perilaku hidup bersih serta sehat.

2.5.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang antara lain:

- a. Untuk sarana dan prasarana transportasi menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi kondisi jalan yang kurang mendukung, khususnya untuk jalan kabupaten dan masih perlunya tambahan jumlah jaringan jalan yang cukup untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b. Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah, sehingga menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi terganggu.
- c. Banyaknya kerusakan jalan yang menyebabkan terputusnya jaringan distribusi.
- d. Lemahnya jaringan jalan yang berakibat timbulnya ketidakmerataan distribusi barang dan orang, berpotensi munculnya konflik sosial antar penduduk dan antar kabupaten yang ada.
- e. Masih adanya ketidaksesuaian antara tata ruang dengan pembangunan yang dilakukan sehingga akan menimbulkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang dalam pembangunan.

Atas permasalahan tersebut, untuk meningkatkan pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan tata ruang perlu diupayakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Perlunya membuka jalan alternatif baru untuk memudahkan.
- b. Membuat pos pelayanan cepat tanggap untuk menanggulangi kerusakan-kerusakan jalan.
- c. Pengkajian kembali tata ruang untuk mempercepat pembangunan yang merata.
- d. Perlu dukungan dan perhatian khusus dari pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat.

2.5.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permasalahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan antara lain:

- a. Masih rendahnya kepemilikan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin.
- b. Belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan.

Atas permasalahan tersebut, untuk meningkatkan pencapaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan perlu diupayakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Bantuan rumah layak huni di setiap Kecamatan ditingkatkan melalui dana daerah, provinsi, pusat maupun kerjasama dengan swasta (CSR).
- b. Perlunya sumber-sumber air bersih yang sesuai dengan jumlah penduduk dan sosialisasi kesadaran pentingnya menjaga lingkungan dan hidup bersih.

2.5.2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di Bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

- a. Masih tingginya tingkat kriminalitas dalam peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan, serta pemeliharaan kantrantibnas.
- b. Masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang konsep wawasan kebangsaan sebagai respon terhadap beragamnya latar belakang sosial, agama dan budaya masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Belum optimalnya Penguatan kelembagaan politik yang dapat menyerasikan penyaluran aspirasi berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat.

Atas permasalahan tersebut, untuk meningkatkan pencapaian kinerja urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat perlu diupayakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Kerjasama antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, aparat desa dalam meningkatkan keamanan dengan melakukan patroli ataupun menggalakkan kembali Siskamling dan melakukan penertiban terhadap pendatang.

- b. Melakukan sosialisasi pentingnya wawasan kebangsaan dimulai dari lapisan masyarakat.
- c. Kerjasama antara pemerintah daerah dan partai politik melakukan sosialisasi politik yang sehat dan cara-cara penyaluran aspirasi yang benar.
- d. Melakukan pelatihan dasar dalam berpolitik, wawasan kebangsaan dan keamanan.

2.5.2.1.6 Sosial

Permasalahan di bidang Sosial antara lain:

- a. Masih belum optimalnya Pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas sehingga pemberdayaan sosial yang belum tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Masih lemahnya sistem perlindungan dan jaminan sosial yang disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
- c. Masih tingginya angka kemiskinan dibandingkan dengan Kabupaten lain. Hal ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Pemetaan kembali sehingga data benar-benar valid sehingga permasalahan sosial bisa diatasi berdasarkan kebutuhan yang mendesak.
- b. Perlunya inovasi dimulai dari tingkat Desa dengan arahan dan konsep Pemerintah Daerah untuk mengatasi terpenuhinya pelayanan dasar masyarakat.
- c. Penguatan kembali Tim Pengentasan Kemiskinan dan inovasi menciptakan program atau kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.

2.5.2.2 Urusan Wajin Non Pelayanan Dasar

2.5.2.2.1 Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang Tenaga Kerja antara lain:

- a. Masih kurangnya kualitas tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
- b. Persaingan pencari kerja yang semakin banyak.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Pembekalan dan pelatihan untuk mengatasi daya saing yang semakin tinggi.
- b. Penguatan lembaga ketenagakerjaan.
- c. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan atau ketrampilan dalam meningkatkan potensi diri.

2.5.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- a. Masih belum optimalnya Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender.
- b. Masih adanya kesenjangan atau ketimpangan di dalam menjamin hak anak dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan.
- c. Masih tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu:

- a. Perlu dibuat payung hukum atau peraturan daerah dalam mendukung program pusat untuk kesetaraan gender.
- b. Perlunya sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini dimulai dari rumah dan sekolah.
- c.

2.5.2.2.3 Pangan

Permasalahan di bidang Pangan antara lain:

- a. Pembangunan prasarana fisik pendukung pertanian padi sawah yang dilakukan selama ini kurang memberi manfaat nyata dalam mendorong peningkatan produksi padi sawah.
- b. Masih lemahnya kemampuan produksi pangan lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata, dan terjangkau.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain:

- a. Perlunya pencetakan sawah di setiap Kecamatan untuk swasembada pangan.
- b. Pembangunan resi gudang.
- c. Meningkatkan produksi pangan lokal.

2.5.2.2.4 Pertanian

Permasalahan di bidang Pertanian antara lain:

- a. Masih lemahnya jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah bagi masyarakat.
- b. Ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan masyarakat.
- c. Masih kurangnya ketersediaan tanah bagi kepentingan pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu:

- a. Fasilitasi sertifikasi tanah gratis, untuk mendapatkan kepastian sertifikat tanah.
- b. Memunculkan kembali kesadaran masyarakat untuk lebih mementingkan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.5.2.2.5 Lingkungan Hidup

Permasalahan di bidang Lingkungan Hidup antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yang ditunjukkan dengan masih maraknya kegiatan penambangan liar/TI dan penebangan liar (*illegal logging*).
- b. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam menangani masalah-masalah kerusakan alam yang lintas sektoral dan lintas wilayah. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya program atau kegiatan kerjasama dengan kabupaten atau provinsi lain.
- c. Pengelolaan SDA seperti sumberdaya tambang, yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA.

Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan di atas, yaitu:

- a. Sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan.
- b. Penegakan peraturan melalui kerjasama antara Desa, Pemerintah Daerah dan Aparat kepolisian.
- c. Perlunya dimunculkan peraturan daerah dalam menambang.

2.5.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:

- a. Masalah Struktur penduduk didominasi oleh usia produktif, yaitu pada umur 15–64 tahun atau sekitar 66,25% dari total penduduk. Ini memberikan implikasi bahwa pada masa 20 tahun ke depan akan terjadi peningkatan beban penduduk usia tua, yaitu umur 60 tahun atau lebih.
- b. Banyaknya data penduduk ganda.
- c. Belum tertibnya dokumen kepemilikan dokumen kependudukan.
- d. Belum optimalnya sistem administrasi kependudukan akan dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu:

- a. Sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan kepada masyarakat.
- b. Pelayanan administrasi kependudukan sampai pelosok desa dan melibatkan aparatur desa dalam menertibkan dokumen kependudukan.
- c. Membangun sistem kependudukan yang mudah dan dapat diakses langsung oleh masyarakat.

2.5.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

- a. Masih lemahnya kualitas dan kapasitas aparatur desa di dalam menjalankan pembangunan desa.
- b. Belum optimalnya pengembangan ekonomi dan sumber daya alam desa dengan basis komoditas lokalnya masing-masing.
- c. Belum maksimalnya pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas:

- a. Pelatihan dan pendampingan untuk aparatur desa.
- b. Pendampingan dalam merencanakan untuk membangun desa yang berintegrasi dengan pembangunan pemerintah daerah.
- c. Membangun desa dengan meningkatkan potensi desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

2.5.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- a. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk sehingga perlu lakukan Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

yang diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.

- b. Masih rendahnya penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- c. Permasalahan berkaitan dengan migrasi seperti yang terjadi di daerah lain selalu berkaitan dengan kesempatan kerja. Peluang pekerjaan merupakan magnet atau daya tarik terhadap terjadinya migrasi masuk ke suatu daerah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang keluarga berencana dan keluarga kecil berkualitas.
- b. Pemetaan persebaran penduduk.
- c. Pengendalian terhadap pendatang sebagai antisipasi melonjaknya jumlah penduduk.

2.5.2.2.9 Perhubungan

Permasalahan di bidang Perhubungan antara lain :

- a. Belum optimalnya Pengembangan transportasi laut dan udara dalam mendukung pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena karakteristik daerah yang tidak berbatasan darat secara langsung dengan daerah lain.
- b. Belum optimalnya penataan transportasi darat termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan.
- c. Masih sempitnya ruas jalan yang menghubungkan antar kabupaten-kota untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi jangka panjang. Lalu lintas antar kabupaten diprediksikan akan

meningkat seiring dengan lancarnya arus barang dan jasa dari pelabuhan ke daerah yang jauh dari pelabuhan.

- d. Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu:

- a. Kerjasama dengan pemerintah daerah, pusat dan swasta untuk mengendalikan inflasi.
- b. Kajian sebagai pemetaan wilayah sesuai dengan struktur potensi yang ada dan yang akan dikembangkan.
- c. Alternatif jalan baru sebagai antisipasi melonjaknya kepadatan arus kendaraan.

2.5.2.2.10 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan di bidang Komunikasi dan Informatika yaitu:

- a. Kurangnya pertimbangan ekonomis untuk pengembangan jaringan komunikasi dengan melihat situasi lapangan di mana penduduknya tidak banyak dan sangat tersebar.
- b. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi didalam memfasilitasi dan menjalankan pembangunan baik dari sisi pemerintahan maupun dunia usaha.
- c. Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan pembangunan dengan basis sistem informasi.
- d. Masih belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu:

- a. Pengenalan informatika kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas SDM untuk menuju pemerintahan yang berbasis digital.
- c. Inovasi melalui teknologi informasi dalam pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.
- d. Membuka jaringan baru di masyarakat pelosok.

2.5.2.2.11 Koperasi Usaha Kecil dan menengah

Permasalahan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

- a. Masih lemahnya Koperasi dan UKM pada upaya untuk menjadikan Koperasi dan UKM menjadi pelaku ekonomi yang berbasis TI (Teknologi Informasi) dan kuat secara kelembagaan serta jaringan kerja yang luas dalam upaya mendukung visi agri-bahari.
- b. Masih kurangnya stimulus-stimulus bantuan modal dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan, dan pelatihan manajemen dalam pengembangan koperasi dan UMKM.
- c. Masih sedikitnya koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.
- d. Masih adanya koperasi yang tidak aktif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Upaya yang dilakukan:

- a. Pengenalan informatika kepada UMKM dan sebagai dasar dalam memasarkan produk daerah.
- b. Pendampingan, penguatan kepada koperasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
- c. Pengenalan bidang-bidang usaha baru untuk mendukung potensi daerah.
- d. Komitmen pemerintah untuk selalu menggerakkan koperasi dengan bantuan-bantuan modal, pelatihan manajemen.

2.5.2.2.12 Penanaman Modal

Permasalahan di bidang Penanaman Modal antara lain:

- a. Masih rendahnya tingkat investasi yang dilakukan oleh para investor dalam mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- b. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mutlak diciptakan.

- c. Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Upaya yang dilakukan:

- a. Pemasaran melalui informatika, pameran-pameran nasional maupun internasional.
- b. Memberikan kemudahan-kemudahan dalam perizinan.
- c. Komitmen pemerintah memberikan insentif kepada pengusaha yang berinvestasi di Bangka Tengah.

2.5.2.2.12 Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan di bidang Kepemudaan dan Olah Raga antara lain:

- a. Masih kurangnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik.
- b. Masih belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan di dalam mendukung pembangunan daerah.
- c. Masih lambatnya peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat guna mendukung citra dan jati diri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu:

- a. Menciptakan organisasi pemuda yang berkualitas.
- b. Kerjasama dengan aparaturnya desa, sektoral dalam membina pemuda sehingga berkontribusi dalam pembangunan daerah.
- c. Komitmen pemerintah daerah dalam membina atlet, memberikan insentif untuk pemuda dan atlet yang berprestasi.

2.5.2.2.13 Statistik

Permasalahan di bidang Statistik antara lain:

- a. Masih belum tersedianya data yang valid dan tepat waktu dalam melihat hasil pembangunan dan merencanakan pembangunan daerah.

- b. Masih lemahnya kesadaran dan kualitas sumber daya manusia di dalam menyiapkan kebutuhan data untuk pembangunan daerah.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu:

- a. Pembinaan, sosialisasi tentang pentingnya data dalam membangun sebuah daerah.
- b. Membuat sistem aplikasi dalam menyediakan data yang lengkap dan terbaru.

2.5.2.2.14 Persandian

Permasalahan di bidang Persandian antara lain:

- a. Belum optimalnya pengelolaan tata kelola persandian dalam mendukung kinerja pemerintah daerah.
- b. Belum teroprasionalnya secara maksimal koordinasi persandian antar pemerintah daerah dan pusat didalam menjalankan tugas pemerintahan daerah.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu:

- a. Perlunya program dan kegiatan persandian dalam mendukung pemerintah daerah.

2.5.2.2.15 Kebudayaan

Permasalahan di bidang Kebudayaan antara lain:

- a. Masih belum optimalnya pengembangan budaya lokal yang diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. Serta masih lemahnya Nilai luhur yang berkembang di masyarakat seperti religius, kebersamaan, persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata ke pemerintahan yang baik.
- b. Masih lemahnya Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi IPTEK dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya leluhur serta kurangnya minat

masyarakat terhadap IPTEK melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi IPTEK.

- c. Masih belum optimanya Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional, Pengembangan IPTEK serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu:

- a. Penataan kelompok budaya, memberikan bantuan, pengenalan kebudayaan sejak dimulai dari Sekolah Dasar (SD).
- b. Menyediakan fasilitas, menyelenggarakan event untuk pengenalan kebudayaan lokal kepada masyarakat dan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong atau menciptakan kreativitas.

2.5.2.2.16 Perpustakaan

Permasalahan di bidang Perpustakaan antara lain:

- a. Belum optimalnya sistem tata kelola perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, perpustakaan sekolah serta perpustakaan desa dalam mendukung pengentasan buta huruf, membudayakan gemar membaca serta peningkatan pengetahuan masyarakat.
- b. Masih kurangnya tenaga pustakawan dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dalam mendukung pengembangan pembangunan perpustakaan.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk gemar membaca dengan perpustakaan keliling, kunjungan ke sekolah-sekolah.
- b. Pelatihan SDM sbagai penunjang kemajuan perpustakaan.

2.5.2.2.17 Kearsipan

Permasalahan di bidang Kearsipan antara lain:

- a. Belum optimalnya sistem tata kelola kearsipan daerah dalam mendukung penataan kearsipan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mendukung pembangunan daerah.
- b. Masih kurangnya tenaga arsiparis dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan dalam mendukung pengembangan pembangunan perpustakaan.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu:

- a. Penataan dan pendampingan arsip di setiap organisasi.
- b. Perlunya sistem untuk meningkatkan kualitas arsip.
- c. Peningkatan kualitas SDM arsip (Arsiparis).

2.5.2.3 Urusan Pilihan

2.5.2.3.1 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan di bidang Kelautan dan Perikanan antara lain:

- a. Masih rendahnya pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, kemampuan, dan kapasitas petani ikan dan nelayan dalam memenuhi kebutuhan mutu dan gizi pangan mereka.
- b. Masih rendahnya produksi perikanan untuk diekspor dalam meningkatkan penerimaan daerah. Belum optimalnya produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak, dan air tawar (jika memungkinkan di lahan-lahan bekas pertambangan), serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas yaitu:

- a. Penyaluran bantuan tunai maupun bantuan alat-alat perikanan.
- b. Peningkatan SDM dalam membudidayakan ikan.
- c. Pembuatan bagan, inovasi berbasis teknologi dalam perikanan tangkap.

2.5.2.3.2 Pertanian

Permasalahan di bidang Pertanian antara lain:

- a. Pada sub sektor perkebunan, di luar perkebunan sawit, tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, bahkan beberapa di antaranya menunjukkan penurunan. Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan potensi besar yang perlu digarap secara lebih intensif. Untuk maksud tersebut maka keberadaan perkebunan besar sangat dibutuhkan sehingga efisiensi pemanfaatan hasil perkebunan dan akses dapat diperoleh.
- b. Belum optimalnya populasi dan produksi ternak di semua kabupaten/kota yang ada. Di sisi lain produksi ternak secara komersil masih belum memadai. Kebanyakan masyarakat masih menempatkan peternakan sebagai aktivitas sampingan. Kondisi ini dapat menimbulkan kerawanan pangan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Belum optimalnya Pembangunan bidang pertanian yang diarahkan pada upaya untuk menjadikan sektor pertanian dalam tahap awal sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat menggantikan sektor pertambangan.
- d. Masih rendahnya produktivitas usaha perkebunan, serta penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi hasil perkebunan.
- e. Masih rendahnya kesejahteraan petani yang terlihat dari nilai tukar petani serta masih rendahnya Peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian dan perkebunan.
- f. Masih lemahnya pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain:

- a. Bantuan alat maupun bibit pertanian.
- b. Pendampingan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
- c. Memberikan kepastian harga hasil pertanian kepada petani.

- d. Bantuan teknologi pertanian, peternakan dalam meningkatkan produksi pertanian dan peternakan.

2.5.2.3.3 Pariwisata

Permasalahan di bidang Pariwisata antara lain:

- a. Rendahnya fasilitas kredit yang disediakan perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk menunjang kegiatan sektor pariwisata.
- b. Peran pemerintah daerah dalam upaya mengembangkan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari belum tersedianya fasilitas dan sarana yang mendukung pengembangan kepariwisataan seperti fasilitas pusat informasi pariwisata daerah, fasilitas dan jasa transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan untuk menuju ke obyek-obyek wisata dan sarana infrastruktur seperti jaringan listrik dan telekomunikasi.
- c. Peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan masih minim, di mana seharusnya masyarakat lokal diberikan kesempatan seluas-luasnya dan menjadi prioritas utama untuk berusaha dan terlibat langsung di dalamnya.
- d. Sebagian obyek wisata belum dikelola secara baik, dan belum memiliki fasilitas penunjang yang memadai. Serta aksesibilitas menuju ke obyek-obyek wisata masih terbatas dan Jarak tempuh perjalanan yang jauh antara obyek wisata yang satu ke obyek yang lain membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.
- e. Sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan belum dapat berperan secara maksimal baik dari segi jumlah maupun kualitas serta Belum optimalnya pembangunan citra daerah wisata yang akan memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
- f. Masih belum optimalnya pengembangan kepariwisataan dilakukan secara arif dan berkelanjutan terutama

memanfaatkan pesona keindahan alam dan potensi daerah sebagai wilayah bahari yang dikelilingi oleh pantai nan indah. Serta masih belum optimalnya pengembangan Potensi wisata yang difokuskan kepada pengembangan wisata sejarah dan wisata budaya.

Solusi yang dilakukan:

- a. Perbaikan akses, infrastruktur dan fasilitas sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan.
- b. Mempermudah perizinan bidang pariwisata sebagai daya tarik bagi investor.
- c. Pelatihan SDM.
- d. Pemanfaatan akses internet sebagai promosi tercepat disamping promosi melalui pameran juga dilakukan.

2.5.2.3.4 Kehutanan

Permasalahan di bidang Kehutanan antara lain:

- a. Masih rendahnya pendapatan daerah yang di sumbang dari sektor kehutanan.
- b. Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan dan kawasan hutan dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas:

- a. Pemetaan potensi hasil hutan berdasarkan potensi lokal yang sudah ada.
- b. Pendampingan dalam pengelolaan hasil hutan dan pemasaran.

2.5.2.3.5 Perdagangan

Permasalahan di bidang Perdagangan antara lain:

- a. Masih belum optimalnya perdagangan yang dilakukan dalam mendukung pemasaran produk-produk lokal keluar daerah maupun keluar negeri.
- b. Masih rendahnya kualitas produk daerah yang akan di pasarkan keluar daerah sehingga mempengaruhi daya saing produk lokal di luar.

- c. Masih lemahnya sistem tata kelola perdagangan dalam daerah untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan di daerah untuk dipasarkan ke dalam daerah sendiri.
- d. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap produk-produk yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik komoditas pangan maupun komoditas non pangan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain:

- a. Perlunya dibuat aturan untuk memakai atau mengkonsumsi hasil olahan lokal.
- b. Pendampingan penguatan lembaga/koperasi dalam mengelola perdagangan.
- c. Mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk yang berasal dari luar daerah.

2.5.2.3.6 Perindustrian

Permasalahan di Bidang Perindustrian antara lain:

- a. Sebagian besar masyarakat masih menganggap penjualan langsung bahan baku yang berasal dari sektor pertanian dan kehutanan lebih menguntungkan dan kurang beresiko dibanding mendirikan industri pengolahan.
- b. Masih lemahnya hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya.
- c. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menunjang keberadaan industri pengolahan yang berskala besar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas:

- a. Kemudahan investasi, untuk menarik investor bidang industri.
- b. Penguatan, pendampingan terhadap lembaga-lembaga industrial, SDM.

- c. Kerjasama dengan pemerintah daerah, provinsi untuk membuat industri skala besar.

2.5.2.4 Urusan Pendukung Pemerintahan

2.5.2.4.1 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPJM dan RKPD. Selain itu, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD.

2.5.2.5 Urusan Penunjang Pemerintahan

2.5.2.5.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pada orientasi proses, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pada orientasi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan pedoman perencanaan tahunan adalah:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 14);

- b) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239).

Perencanaan pembangunan harus konsisten antar perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

2.5.2.5.2 Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak 3 tahun berturut - turut yaitu mulai Tahun 2016-2018. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan di Kabupaten Bangka Tengah dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara.

2.5.2.5.3 Kepegawaian dan Diklat

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah mengadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin.

2.5.2.5.4 Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan, inovasi kerap diperlukan oleh suatu daerah termasuk Kabupaten Bangka Tengah. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penelitian dan pengembangan terhadap berbagai isu persoalan sebagai upaya pemecahan persoalan-persoalan serta tantangan yang terjadi. Terkait hal ini, Kabupaten Bangka Tengah mendorong berbagai pihak untuk mencurahkan daya upaya hasil pikir dengan memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Bangka Tengah.

2.5.2.6 Urusan Pengawasan

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel II.130.
Persentase tindak lanjut temuan

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Temuan APIP						
1.	Jumlah Total temuan APIP	27	21	12	13	10
2.	Jumlah total temuan yang ditindaklanjuti	27	21	12	13	10
3.	Persentase tindak lanjut temuan APIP (%)	100	100	100	100	100
Temuan BPK						
1.	Jumlah Total temuan BPK	27	21	12	13	10
2.	Jumlah total temuan yang ditindaklanjuti	27	21	12	13	10
3.	Persentase tindak lanjut temuan BPK (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, persentase tindak lanjut temuan APIP/ Inspektorat dan temuan BPK di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 100%, yang artinya semua temuan baik temuan dari APIP maupun BPK semuanya ditindaklanjuti. Jumlah temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel di atas. Temuan BPK tersebut terdiri dari temuan mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan mengenai kepatuhan, yaitu:

1. Tahun 2015 temuan BPK sebanyak 27 item, yang terdiri dari temuan SPI sebanyak 17 item dan temuan kepatuhan sebanyak 10 item.
2. Tahun 2016 temuan BPK sebanyak 21 item, yang terdiri dari temuan SPI sebanyak 8 item, dan temuan kepatuhan sebanyak 13 item.

3. Tahun 2017 temuan BPK sebanyak 12 item, yang terdiri dari temuan SPI sebanyak 5 item, dan temuan kpatuhan sebanyak 7 item.
4. Tahun 2018 temuan BPK sebanyak 13 item, yang terdiri dari temuan SPI sebanyak 7 item, dan temuan kpatuhan sebanyak 6 item.
5. Tahun 2019 temuan BPK sebanyak 10 item, yang terdiri dari temuan SPI sebanyak 6 item, dan temuan kpatuhan sebanyak 4 item.

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	CAPAIAN KINERJA		REALISASI ANGGARAN		KET
		PERSENTASE (%)	KATEGORI	PERSENTASE (%)	KATEGORI	
I	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	99,69	ST	80,63	T	
1	Pendidikan	94,11	ST	86,90	T	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	94,23	ST	87,91	T	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98,95	ST	92,44	ST	DPU TRP
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	96,92	ST	51,79	R	Diperkimhub
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan	97,89	ST	80,75	T	Kesbangpol dan Satpol PP
6	Sosial	116,02	ST	84,02	T	Dinsos PMD
II	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	95,31	ST	86,75	T	
7	tenaga kerja	100,00	ST	98,17	ST	DPMPTK
8	pemberdayaan perempuan dan pelindungan	100,00	ST	88,04	T	DPPKBPPPA
9	pangan	100,00	ST	96,00	ST	Dipangan
10	pertanahan	74,15	S	52,04	R	DPUTRP dan Dinbudparpora
11	lingkungan hidup	85,76	T	81,52	T	DLH
12	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	100,54	ST	84,24	T	Dundikcapil
13	pemberdayaan masyarakat dan Desa	113,74	ST	86,84	T	Dinsos PMD
14	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	100,00	ST	91,52	ST	DPPKBPPPA
15	perhubungan	66,55	S	53,33	R	Diperkimhub
16	komunikasi dan informatika	97,64	ST	90,58	T	Diskominfo
17	koperasi, usaha kecil, dan menengah	100,00	ST	93,41	ST	Disperindagkop UKM
18	penanaman modal	100,00	ST	97,30	ST	DPMPTK
19	kepemudaan dan olah raga	98,46	ST	91,49	ST	Dinbudparpora
20	statistik	95,83	ST	90,40	T	Diskominfo
21	persandian	-	ST	-		
22	kebudayaan	87,72	T	85,71	T	Dinbudparpora
23	perpustakaan	99,97	ST	96,51	ST	DKP
24	kearsipan	100,00	ST	97,70	ST	DKP
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	94,08	ST	85,78	T	
25	kelautan dan perikanan	100,47	ST	93,87	ST	Diperkan
26	pariwisata	88,82	T	83,68	T	Dinbudparpora
27	pertanian	81,16	T	76,23	T	Dipertan dan Pangan
28	kehutanan	100,00	ST	97,31	ST	DLH
29	energi dan sumber daya mineral	-		-		
30	perdagangan	94,00	ST	76,29	T	Disperindagkop UKM
31	perindustrian	100,00	ST	87,28	T	Disperindagkop UKM
32	transmigrasi	-		-		
IV	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	99,71	ST	89,18	T	
33	perencanaan	102,04	ST	95,42	ST	Bappelitbangda
34	penelitian dan pengembangan	100,00	ST	86,22	T	Bappelitbangda
35	keuangan	107,57	ST	88,55	T	BPKAD dan BPPRD
36	kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	94,93	ST	86,76	T	BKPSDM
37	Pengawasan	100,00	ST	93,94	ST	ITDA
38	Pemerintahan Umum	93,72	ST	84,20	T	SETDA, SETWAN, KECAMATAN DAN DPMPTK
V	Urusan Rutin	100,59	ST	89,03	T	
39	Kegiatan Rutin Seluruh OPD	100,59	ST	89,03	T	Seluruh OPD
	TOTAL	97,88	ST	86,28	T	

	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TRIWULAN IV TAHUN 2019

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Un it O P D P e n a n	Ket.	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)	
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
A.	PENDIDIKAN																				
I	1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APK PAUD			55.183.121.000		3.982.180.000		6.551.037.000		5.924.333.649	84,59	90,43		8.934.812.200	103,04	16,19			
	1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI - Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs			137.611.872.816		32.892.517.391		51.177.519.110		46.494.907.731	101,69	90,85		79.387.425.122	35,03	57,69			
III	1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Buta Aksara			1.118.629.000		258.490.200		457.077.000		335.403.900	86,97	73,38		593.894.100	61,27	53,09			
IV	1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Persentase Kualifikasi - Persentase Sertifikasi			1.554.504.000		341.177.800		11.108.816.000		10.130.152.752	99,80	91,19		10.471.330.552	24,58	673,61			
VI	1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A - Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B			2.813.911.000		472.143.000		2.126.478.000		1.885.064.597	97,50	88,65		2.357.207.597	93,01	83,77			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											71.420.927.110		64.769.862.629								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													94,11	86,90			63,39	176,87			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi			
B.	KESEHATAN																				
I.	1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat generik	100%		34.498.440.589		5.777.345.590	4	2.012.640.500		1.925.246.799	85,71	79,72		7.955.503.089	120,48	47,64			
II.	1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin			50.558.402.569		48.375.301.781	100	27.247.300.850		24.885.820.857	82,30	73,50		73.854.334.783	44,49	60,31			
III.	1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	100%		1.340.241.860		582.813.672	100	140.828.000		127.848.400	100,00	94,39		710.662.072	31,75	61,50			
IV.	1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan			1.893.742.500		850.848.950	1	360.225.000		334.130.600	100,00	86,95		1.184.979.550	40,00	66,64			
V.	1.02.1.02.01.21	Program pengembangan lingkungan sehat	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM			1.023.815.691		161.119.600	3	173.930.000		162.341.100	94,25	91,36		504.620.100	46,56	42,46			
VI.	1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan desa /kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam	100%		3.322.361.857		1.244.567.424		735.705.874		320.443.208	80,18	92,06		1.565.010.632	35,58	46,14			
VII.	1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi			2.500.285.558		1.250.590.240	4	1.232.509.950		1.089.203.850	100,00	90,78		2.097.928.885	142,00	56,64			
VIII.	1.02.1.02.01.25	Program Pengadaan , Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya	Rasio poskesdes terhadap jumlah penduduk (1:2000 penduduk)	100%		48.850.000		798.489.238	11	1.617.500.000		161.440.238	80,00	76,08		959.929.476	85,00	69,34			
IX.	1.02.01.02.01.26	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Kelas Rumah Sakit	100%		19.630.513.700		5.360.933.487	11	12.393.943.000		11.605.724.348	99,28	87,30		16.966.657.835	73,99	81,70			
X.	1.02.01.02.01.27	Program Pemeliharaan Saran dan Prasaran Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit PARU-PARU/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Kelas Rumah Sakit			4.590.000.000		1.354.475.431		652.000.000		611.176.700	100,00	81,11		1.965.652.131	121,11	40,27			
XI.	1.02.01.02.01.28	Program Kemitraan Peningkatam Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan dokter spesialis dasar	100%		57.260.242.227		26.298.144.703	8	11.341.163.850		10.089.766.436	100,09	88,93		36.387.911.139	40,00	62,62			

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)			Un it O P D e n a n	Ket.
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)			
XII.	1.02.01.02.01.29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak balita	Angka kematian anak balita per 1000 Kelahiran hidup	100%		541.355.000		188.788.000	2		68.660.000		67.630.000	100,00	98,46			256.418.000	45,00	48,28					
XIII.	1.02.01.02.01.30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada lansia			255.000.000		117.354.500			26.350.000		25.255.000	100,00	95,84	1		142.609.500	5,71	55,93					
XIV.	1.02.01.02.01.31	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	2		331.537.875		140.858.000	2		60.155.000		57.987.000	97,14	96,40			198.845.000	24,92	62,21					
XV.	1.02.01.02.01.32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian ibu melahirkan per 100.000 KeH			619.644.288		1.057.188.300	3		1.573.939.900	1.880	730.374.700	88,70	87,99	0		1.787.563.000	47,28	33,83					
XVI.		Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Persentase peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan RS			113.400.000.000		37.630.456.039			16.325.000.000		13.978.102.296	100,00	85,62	9,1		51.608.558.335	40,00	45,51					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											75.961.851.924		66.172.491.532												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														94,23	87,91				58,99	55,06					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Tinggi	Tinggi				Rendah	Rendah					
C. PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAN RUANG																									
I	1.03.1.03.01.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Meningkatnya Kualitas Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik - meningkatnya kualitas jembatan	28		24.724.053.000	0	-	27,8		24.724.053.000	27,8	24.386.784.554	100,00	98,12			24.386.784.554	100,00	98,12	BI N A AA				
II	1.03.1.03.01.16	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	panjang saluran/drainase dalam kondisi baik			5.312.550.000	0	-	9.604		5.297.541.900	9.604	5.205.956.550	100,00	97,84	9.604		5.205.956.550	96,52	97,75	SU M BE				
III	1.03.1.03.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik	23		7.323.000.000	0	-	19,4		7.323.000.000	19,4	7.130.256.550	100,00	94,56	19,4		7.130.256.550	90,29	94,56	BI N A				
IV	1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Tersedianya Sarana Kebinamargaan	55	unit	2.650.000.000	11	81.344.600	11		100.000.000	11	98.587.779	100,00	98,59	22		179.932.379	40,00	6,79	BI N A				
V	1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tersedianya air baku Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Teknis	62	bulan	1.805.000.000	0	0	14		1.805.000.000	14	1.748.743.411	100,00	94,12	14		1.748.743.411	73,33	94,12	SU M BE				
VI	1.03.1.03.01.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Tercapainya Ketersediaan Air Baku	63	bulan	1.480.000.000	0	-	14		849.000.000	14	790.056.360	100,00	96,57	14		790.056.360	55,00	71,42	SU M BE				
VII	1.03.1.03.01.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	tersedianya akses air bersih yang aman melalui SPAM - tersedianya sistempengolahan air limbah yang memadai	2119	SR	12.810.007.000	0	-	1974		12.226.606.500	1.974	11.703.633.290	100,00	97,49	1.974		11.703.633.290	90,56	89,61	CI PT A KA RY A				
VIII.	1.03.1.03.01.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR	tertanggulangnya penanganan masalah banjir di daerah rawan banjir	305	meter	7.167.915.000	0	-	271		7.167.835.000	214	5.362.756.442	87,39	86,61	214		5.362.756.442	82,50	86,61	SU M BE				
IX	1.03.1.03.01.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Meningkatnya Jalan Desa Dalam Kondisi Baik - Meningkatkan Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik			27.284.597.000			2213		27.284.507.000	2213	26.542.467.119	100,00	98,56	2.213		26.542.467.119	94,95	98,55	BI N A M AR				
X	1.03.1.03.01.32	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian Dokumen Rencana Tata Ruang kabupaten	654		1.158.000.000	0	-	152		348.000.000	152	247.081.983	100,00	82,78	152		247.081.983	30,77	45,49	TA TA RU				
XII	1.03.1.03.01.33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Peruntukannya	50		489.015.000	0	-	14		489.535.000	14	460.237.686	100,00	93,48	14		460.237.686	75,00	93,67	TA TA RU				
XIII.	1.03.1.03.01.34	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Terlaksananya Program Arahon Pemanfaatan Ruang	500		405.000.000	0	-	125		405.000.000	125	298.808.176	100,00	70,55	125		298.808.176	25,00	70,55	TA TA RU				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											88.020.078.400		83.975.369.900												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														98,95	92,44				71,16	78,94					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sedang	Tinggi					
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN																									

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Un it O P D Pe na na n	Ket.
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)
I		Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1		15.870.000.000		2.207.743.126	97,23%	2.698.750.000		2.167.770.722	93,85	65,47		4.375.513.848	42,98	25,64	KIMHUB	
II		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase Luasan Permukiman Kumuh	0		2.050.000.000		586.459.350	0,28%	1.100.000.000		405.914.900	100,00	38,11		405.914.900	100,00	22,48	KIMHUB	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.798.750.000		2.573.685.622								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													96,92	51,79			71,49	24,06		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Rendah			Sedang	Sangat Rendah		
E. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																				
BPB - KESBANGPOL																				
I		Program Program pengembangan wawasan kebangsaan	Cakupan agama,suku,armas dan sekolah yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan	70	%	Rp 6.537.000.000	1	Rp 1.393.667.129	100%	500.000.000	30%	Rp 440.856.200	30,0%	88,17%	50%	Rp 1.834.523.329	0,71	28%		
II		Program kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase forum kemitraan yang aktif	1	%	Rp 1.655.000.000	1	Rp 386.087.350	100%	215.000.000	44%	Rp 67.997.800	44,17%	31,63%	70%	Rp 454.085.150	70%	27%		
III		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase LSM,Ormas dan OKP yang aktif	1		Rp 1.658.000.000		Rp 194.214.200	75%	565.000.000	90%	Rp 254.303.400	120,00%	45,01%	90%	Rp 448.517.600	120%	27,05%		
IV		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan daerah rawan bencana yang terpantau dan terinformasi	1	%	Rp 4.975.000.000		Rp 262.973.585	75%	1.414.774.000	30%	Rp 1.293.125.627	40,00%	91,40%	30%	Rp 1.556.099.212	40%	31,28%		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.694.774.000		2.056.283.027								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													81,50	65,09			116,16	24,56		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
POL PP																				
I		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan penyelesaian gangguan K3 (Ketertiban, ketentraman dan Keindahan)	99	%	1.512.525.000	1	946.519.850	99%	302.505.000	0	292.710.996	100,00	96,17		1.239.230.846	100,30	88,22	POL	0,1
II		Program Pemeliharaan Kantranlibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Patroli Petugas SATPOL PP	3	Kali/hari	22.069.500.000	3	4.075.805.000	3	4.888.985.000	3	4.853.556.598	157,14	97,35	3	8.929.361.598	66,10	58,99	POL	0,1
			Persentase penyelesaian terhadap pelanggaran perda/Perkada	1	%		1	90%												
III		Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio petugas Linmas Per Rukun Tetangga dalam menjaga ketertiban dan keamanan	1	Rasio	6.296.140.000	1	1.595.809.150	0,75	608.348.000	0,61	606.589.400	100,00	92,89		2.202.398.550	65,96	38,30	POL	0,1
IV		Program Peningkatan Kesiagaan dan pemeliharaan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	33	%	1.928.250.000	28	411.679.106.070	33	897.200.000	33	877.068.632	100,00	99,23	60,89	412.556.174.702	25,00	35,77		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.697.038.000		6.629.925.626								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													114,29	96,41			64,34	55,32		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
F. SOSIAL																				

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Un it O P D P e n a n a	Ket.
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)
I		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang cacat dan eks trauma, lansia, tuna sosial, eks narkoba, dan narapidana yang menerima bantuan sosial	7		6.669.000.000	6	582.239.409	5,75	647.875.000		586.556.060	112,86	86,15		1.168.795.469	649,20	18,77		
II		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Persentase jenis PMKS yang menerima bantuan	89		3.767.689.000	85	510.404.580	85	769.845.000	-	678.576.705	85,71	77,38		1.188.981.285	41,03	22,39		
III		Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase penerima rastra dan KUBE	86		21.356.000.000	85	1.813.770.143	84,50	2.254.309.000	-	2.166.321.534	100,00	92,62		3.980.091.677	71,84	55,18		
IV		Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase bencana yang ditangani	100	%	1.200.000.000	100	95.396.186	100	172.350.000	-	164.579.970	181,54	82,93		259.976.156	4448,56	30,92		
			Persentase peningkatan bantuan keluarga sangat miskin	6	%	925.000.000	2	136.901.209	2	386.757.000	2,741	234.812.016				371.713.225				
V		Program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga		4093		5.428.000.000		522.121.200		765.737.300		568.590.153	100,00	81,00	0	1.090.711.353	30,60	22,72		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.996.873.300		4.399.436.438								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													116,02	84,02			1048,24	30,00		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
A. TENAGA KERJA																				
I	1.14.1.20.15.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang terampil	0		5.359.972.000	0	600.579.715	18%	234.438.000	36	232.586.600	100,00	99,26	67	833.166.315	50,50	15,56	D P M a	01
	1.14.1.20.15.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah AK 1 yang dikeluarkan	1500		291.400.000	0	323.332.355	500	45.530.000	-	45.238.812	100,00	99,36	-	106.544.916	100,00	36,56	D P M a	01
III	1.14.1.20.15.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Kasus PHK yang diselesaikan	50		2.078.800.000	0	262.026.251	10	298.510.000	-	284.102.844	100,00	95,88	-	546.129.095	40,73	38,33	D P M a	01
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										578.478.000		561.928.256								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	98,17			63,74	30,15		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
I		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender			2.537.750.000		669.651.988		790.986.000		715.386.060	100,00	89,96		1.385.038.048	62,14	52,34		
II		Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam Pembangunan	Meningkatnya peranan perempuan di berbagai bidang pembangunan			1.839.400.000		466.360.700		341.550.000		308.025.650	100,00	86,12		774.386.350	58,57	50,85		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.132.536.000		1.023.411.710								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	88,04			60,35	51,60		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah		
C. PANGAN																				
I	1.21.1.21.01.15	Program Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Ketersediaan energi dan protein per kapita	100	%	1.247.533.000,00	1	331.978.800,00	91,0%	249.506.600	27	240.053.220	100,00	94,62	46,00	572.032.020,00	96,67	58,92		
II	1.21.1.21.01.16	Program Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan energi dan protein per kapita	1		194.350.000,00	102,57%	116.610.000,00	91,0%	38.870.000	12	36.912.903	100,00	94,97	27,00	153.522.903	108,00	78,99		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Un it O P D P e n a n	Ket.			
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)			
III	1.21.1.21.01.17	Program Pengankaragaman dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	89	%	2.710.694.000,00	87,10%	1.626.416.400,00	88,0%	542.138.800	102	535.859.900	100,00	98,12	317	2.162.276.300	107,43	79,62					
IV	1.21.1.21.01.18	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	90	%	173.650.000,00	75,19%	104.190.000,00	70%	34.730.000	100,00%	33.451.000	100,00	96,32	5	137.641.000							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										865.245.400		846.277.023											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														100,00				90,52		74,20			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				Tinggi	Sedang		
D. PERTANAHAN																							
I	1.09.1.03.01.16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	10350		310.020.000	0	-	3170	310.020.000	3170	210.603.020	100,00	64,04	3.170	210.603.020	30,63	67,93	TA RU A				
II		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			90.326.960.000		875.556.000		2.500.000.000		1.000.996.957	48,31	40,04		1.876.552.957	83,60	29,13					
E. LINGKUNGAN HIDUP																							
I	1.08.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penyediaan Sistem Pengangkutan Sampah di Perkotaan	90	%	12.303.300.000	138,17	2.954.902.997	90	2.720.056.000	138,17	2.445.617.826	82,50	89,91		5.702.870.073	71,29	1890,72					
			Persentase cakupan area pelayanan persampahan	64	%		30		62		30												
			Persentase Penyediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	3	%		1,72		2,5		1,72												
			Jumlah Pembinaan Terhadap Bank Sampah	63	Desa & Kelurahan		63		63		0												
II	1.08.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan RKL-RPL	80	%	5.802.950.000	52	1.066.384.367	62	1.038.965.000	60	817.417.427	96,00	78,68		1.883.801.794	76,97	32,46					
			Persentase rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	100	%		82,1		100		100,00												
			Hasil pengujian kualitas pencemaran air, udara, dan tanah	Cemaran	indek		cemaran ringan		cemaran ringan		cemaran ringan												
			Jumlah penghargaan dibidang lingkungan hidup	2	penghargaan		5		2		0												
III	1.08.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Jumlah lokasi keanekaragaman hayati	2	lokasi	1.054.550.000	2	228.412.050	2	107.400.000	2	84.265.000	41,67	78,46		312.677.050	31,25	29,65					
IV	1.08.01.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil penilaian laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Bangka Tengah oleh Provinsi Kep. Bangka Belitung	lengkap		413.000.000	lengkap	131.948.900	lengkap	63.330.000	lengkap	43.466.000	100,00	68,63		175.414.900	66,67	42,47	Penilaian tidak dalam bentuk angka, tapi kelengkapan				
V	1.08.01.20	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Jumlah parameter yang sesuai standar baku mutu	24	Parameter	679.980.000	7	200.295.178	50	149.414.000	50	119.707.824	100,00	80,12		320.003.002	98,50	47,06					
VI	1.08.01.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Jumlah taman RTH yang dipelihara	14	Taman	19.740.200.000	11	7.421.175.883	12	3.538.251.000	12	3.302.886.843	94,38	93,35	11	10.724.062.726	57,56	54,33					
			Jumlah pembangunan RTH publik	6	Unit		3		4		3								6				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.617.416.000		6.813.360.920											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														85,76		81,52				67,04	42,05		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)			Un it O PD Pe na na n	Ket.
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(12=8+9+10+11)			(13=12/7x100%)	(14 = 6+12)	(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah					
F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																									
I		PROGRAM PENATAAN ADMIINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Akurasi Data Kependudukan			3.088.859.000		1.097.586.709		564.235.000		549.290.158	100,00	90,54		1.646.876.867	84,33	49,12							
II		PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)			836.865.000		121.324.378		203.190.000		194.913.919	100,00	94,04		316.238.297	79,86	40,65							
III		PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	presentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak			1.095.835.000		493.630.500		164.665.000		148.831.677	111,33	90,08		642.462.177	44,96	48,89							
IV		PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			3.927.672.000		517.033.850		597.903.000		506.875.750	94,13	78,11		1.023.909.600	32,52	33,37							
V		PROGRAM PENGELOLAAN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Akurasi Data Kependudukan			5.905.777.600		2.044.900.648		1.125.200.000		1.015.920.536	97,22	68,44		3.060.821.184	53,17	48,91							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.655.193.000		2.415.832.040													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,54	84,24			58,97	44,19							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah							
G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																									
I		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan aparatur dan organisasi masyarakat yang aktif di desa dan terkoordinasi dengan baik			740.000.000		52.139.700		50.350.000		48.505.400	100,00	74,47		100.645.100	58,33	12,21							
II		Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Persentase Pasar Desa Aktif			480.000.000		77.644.500		186.813.000		125.728.000	100,00	82,96		203.372.500	87,67	40,88							
III		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase jumlah masyarakat yang ikut dalam kegiatan pembangunan desa - Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan desa			5.537.813.000		482.188.603		514.935.700		463.134.997	154,95	90,93		945.323.600	43,04	17,69							
IV		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan			2.610.000.000	0	172.466.662	0	549.762.300	-	199.170.213	100,00	99,00		371.636.875	41,67	40,91							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.301.861.000		836.538.610			113,74	86,84		57,68	27,92						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah							
H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																									
I		Program Keluarga Berencana	Meningkatnya capaian PUS ber KB			1.556.695.000		502.197.389		503.190.000		440.425.111	100,00	81,77		942.622.500	69,93	60,03							
II		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Menurunkan angka usia perkawinan di bawah 20 tahun			195.850.200		80.501.800		58.800.000		58.117.000	100,00	98,84		138.618.800	56,55	70,78							
III		Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatkan CPR (Contraceptive Prevalence Rate)			696.900.000		-		354.414.000		336.865.742	100,00	95,05		336.865.742	50,00	48,34							
IV		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Menurunkan unmetneed			212.000.000		-		106.600.000		106.210.000	100,00	99,63		106.210.000	50,00	50,10							

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)			Un it O P D Pe na na n	Ket.
				K	Satuan	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(12=8+9+10+11)			(13=12/7x100%)			(14 = 6+12)			(15 = 14/5 x 100%)			(16)	(17)
V		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Meningkatnya pelaksanaan program KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga			1.097.945.000			365.065.600			113.800.000			107.841.899	100,00	99,73			472.907.499	26,67	40,46				
VI		Program Meningkatkan Dukungan Sarana Pelayanan KB				1.000.000.000			597.568.700			546.600.000			470.606.190	100,00	86,10			1.068.174.890	105,33	106,82				
VII		Program Meningkatkan Dukungan Sarana Penyuluhan KB				2.543.145.000			1.508.733.500			657.200.000			582.054.200	100,00	89,92			2.090.787.700	80,18	82,19				
VIII		Program Meningkatkan Dukungan Operasional Program KKBPK Lini Lapangan				3.704.116.000			-			1.804.853.000			1.419.457.306	100,00	81,13			1.419.457.306	60,00	39,03				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												4.145.457.000			3.521.577.448											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																100,00	91,52					62,33	62,22			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					Rendah	Rendah			
I. PERHUBUNGAN																										
I		Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana di Bidang Perhubungan yang Terpenuhi	1		330.000.000			0	82,49%		15.720.000			14.983.702	0,00	95,32			14.983.702	0,00	4,54			RKIMHUB	
II		Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Persentase Sarana dan Prasarana di Bidang Perhubungan yang Terpenuhi	1		6.730.000.000			1.887.923.016	82,49%		1.309.830.000			293.260.608	100,00	29,18			2.181.183.624	60,00	31,76			RKIMHUB	
III		Program Peningkatan pelayanan angkutan	Persentase Layanan Angkutan Darat	0		25.888.000.000			6.325.945.502	3,51%		4.041.740.000			3.648.791.987	96,06	85,86			9.974.737.489	61,05	37,49			RKIMHUB	
IV		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Persentase Sarana dan Prasarana di Bidang Perhubungan yang Terpenuhi	1		3.320.000.000			139.742.000	82,49%		2.599.000.000	82%		1.621.001.150	100,00	65,60			1.621.001.150	100,00	64,55			RKIMHUB	
V		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase Sarana dan Prasarana di Bidang Perhubungan yang Terpenuhi	1		13.520.000.000			2.336.622.846	82,49%		1.234.670.000			205.861.447	25,00	26,97			2.542.484.293	23,69	22,10			RKIMHUB	
VI		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	111 Unit		835.000.000			148.070.055	91 Unit		187.240.000	0%		176.965.582	78,25	47,26			325.035.637	43,04	19,46			RKIMHUB	
J. KOMUNIKASI DAN INFORMASI																										
I	1.25.1.25.01.15	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah layanan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa			1.196.000.000,00			1.076.937.790,00			1.204.471.800			1.041.880.644,00	100,00	92,30			2.118.818.434,00	311,20	153,44				
II	1.25.1.25.01.16	Program Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	Dokumen Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan komunikasi			100.000.000,00			85.128.716,00			-			-	0,00	0,00			85.128.716,00	100,00	85,13				
III	1.25.1.25.01.17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM bidang komunikasi dan informasi yang berkualitas			163.000.000			57.865.022			79.040.000			73.922.660	95,40	88,70	157,00			106,39	97,35				
IV	1.25.1.25.01.18	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase kerjasama informasi dengan mass media			758.850.000,00			473.965.526,00			176.950.000			167.594.600,00	98,00	91,61			641.560.126,00	132,00	132,82				
V	1.25.1.25.01.19	Program Penyempurnaan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	Prosentase Pengembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang optimal			1.248.214.800,00			75.892.665,00			1.170.834.800,00			1.075.964.624,00	97,14	89,70	126,00		1.151.857.289,00	140,00	75,14				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												4.147.728.237			2.631.296.600			2.359.362.528								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																97,64	90,58					172,40	114,69			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Tinggi					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
K. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																										
I	1.15.2.07.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1. Persentase pertumbuhan wirausaha baru (non pertanian) 2. Persentase pertumbuhan penjualan produk UKM binaan (yoy)	2	%	5.676.000.000,00			2.528.883.113,00	1,70		1.471.520.000			1.402.536.072,00	100,00	86,01			3.931.419.185,00	68,90	63,50				
II	1.15.2.07.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase penyaluran dana bergulir Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah per tahun.	88	%	320.000.000,00			143.317.000,00	85,00		79.700.000			76.260.000,00	100,00	95,69			219.577.000,00	75,00	72,29				

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Un it O PD Pe na na	Ket.	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)	
III	1.15.2.07.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi aktif	3	%	733.915.000,00		118.385.600,00	2,75	216.665.000		213.201.765,00	100,00	98,54		331.587.365,00	90,67	65,31			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.790.585.713		1.691.997.837									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	93,41			78,19	67,04			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sedang			
L. PENANAMAN MODAL																					
		Penanaman Modal																			
I	1.16.1.20.15.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMDN	188		2.379.010.000	0	439.937.615	130	380.350.000	-	369.753.105	100,00	98,45	-	809.690.720	88,64	42,49	D P M PT	01	
II	1.16.1.20.15.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi	282 Milyar		235.340.000	0	77.496.700	72 Milyar	43.950.000	-	42.993.600	100,00	97,82	-	120.490.300	80,00	51,20	D P M PT	01	
III	1.16.1.20.15.17	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah		0		250.000.000	0	-	-	248.560.000	-	237.721.035	100,00	95,64	-	237.721.035	100,00	95,09	D P M PT	01	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											672.860.000		650.467.740								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	97,30			89,55	62,93			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah			
M. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																					
I		Program Peningkatan Peran Serta kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda			6.585.396.500		2.586.459.300		875.000.000		837.255.419	100,00	87,18		3.423.714.719	0,00	0,00			
II		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah pelatihan			504.100.000		102.686.460		65.000.000		62.397.300	100,00	96,00		165.083.760	25,00	32,75			
III		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah kegiatan dan organisasi olahraga			214.153.000		84.109.800		15.000.000		14.000.000	100,00	93,33		98.109.800	0,00	0,00			
IV		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah kegiatan dan organisasi olahraga			11.250.457.000		5.152.253.486		1.686.270.000		1.539.531.287	92,31	85,00		6.691.784.773	28,74	57,92			
V		Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta), lapangan olahraga, jumlah gedung olahraga			19.625.710.000		1.053.703.987		16.486.950.000		16.154.542.848	100,00	95,94		17.208.246.835	69,49	67,56			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											19.128.220.000		18.607.726.854								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													98,46	91,49			24,65	31,65			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
N. STATISTIK																					
I	1.25.1.25.01.15	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah ketersediaan data/informasi/statistik daerah			987.314.000,00		275.946.502,00		452.765.000,00		411.842.319,00	95,83	90,40		687.788.821,00	109,89	80,20			
P. KEBUDAYAAN																					
I		Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah insan seni dan budaya yang diberikan penghargaan			450.750.000		82.050.000		32.600.000		27.425.000	100,00	84,13		109.475.000	28,30	24,29			
II		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan			2.821.400.000		835.599.061		296.520.000		186.880.900	65,00	77,64		1.022.479.961	73,28	60,25			
III		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan fasilitas seni, cakupan gelar seni, cakupan SDM Bidang Kesenian, Cakupan tempat kesenian, Cakupan organisasi kesenian			8.777.879.650		2.457.134.020		870.800.000		832.411.800	98,15	95,35		3.289.545.820	49,51	35,53			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.199.920.000		1.046.717.700								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													87,72 Tinggi	85,71 Tinggi			50,36 Rendah	40,02 Rendah			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					
Q. PERPUSTAKAAN																					

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Un it O P D Pe na na n	Ket.				
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)			(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)				
I		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan			4.811.920.000		514.818.778		1.160.227.000		1.106.977.365	99,97	96,51		1.621.796.143	42,82	37,25							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.160.227.000		1.106.977.365													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													99,97	96,51				42,82	37,25						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
R. ARSIP																									
I		Program Pembinaan SKPD Sadar Arsip	Persentase Penyelenggaraan Arsip secara Baku			1.434.260.000		58.582.100		256.518.000		251.192.061	100,00	97,70		309.774.161	34,87	20,61							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										256.518.000		251.192.061													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	97,70				34,87	20,61						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
III URUSAN PEMERINTAH PILIHAN																									
A. KELAUATAN DAN PERIKANAN																									
I	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	8310		22.741.215.000,00	4352		7.535.107.520,00	1.391,00		2.786.867.500	1.486,64		2.548.792.686,00	106,88		5.838,51		10.083.900.206,00	70,26		44,34	ERK	Data Sementara
			Jumlah Produksi Benih (ekor)	#####			31512301		6.500.000			10.396.000			159,94		#####			111,76			ERK		
II	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	127750		101.491.583.000,00	72645		14.294.313.683,00	21.626,31		4.071.063.000	25.316,15		3.940.274.004,00	117,06	96,79	97.961,25	18.234.587.687,00	76,68	17,97	ERK	Data Sementara		
III	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn)	Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah konsumsi ikan segar (kg/kap/thn)	40		8.119.600.000,00	46		1.897.109.072,00	37,74		973.615.000	41,98		771.415.702,66	111,23		88,24		2.668.524.774,66	223,05		32,87	ERKAN	
			Jumlah konsumsi olahan hasil perikanan (kg/kap/thn)	3			4		3,28			13,20			402,44		16,79			488,08			ERKAN		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										8.204.345.500		7.627.677.756													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,47	93,87				70,39	61,72						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sedang	Rendah						
B. PARIWISATA																									
I		Program pengembangan pemasaran wisata	Capaian promosi di tingkat nasional menuju intenasional, cakupan destinasi/objek wisata, Cakupan SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi			9.334.014.000		2.586.876.686		1.090.776.000		808.791.491	88,89	80,62		3.395.668.177	66,48	56,95							
II		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rasio sarana dan prasarana			3.025.000.000		25.000.000		1.040.000.000		896.060.750	88,75	86,74		921.060.750	78,78	70,62							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.130.776.000		1.704.852.241													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													88,82	83,68				72,63	63,78						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Tinggi	Tinggi				Sedang	Rendah						
C. PERTANIAN																									
DINAS PERTANIAN																									
I		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pertanian			19.032.390.000		3.520.398.488		3.723.070.000		3.179.603.846				6.700.002.334									
			- Tanaman Padi	3	Ton/Ha		3,08		2,97		4,53		152,53			4,53		133,24							
			- Tanaman Palawija	11	Ton/Ha		12		10,26		21,13		205,95			21,13		198,40							
			- Tanaman Sayuran dan Buah Semusim	6	Ton/Ha		6		5,75		9,49		165,04			9,49		148,28							
			* Cabe	7	Ton/Ha		6		6,5		8,26		127,08			8,26		118,00							
			* Bawang Merah	8	Ton/Ha		8		7,5		11		146,67			11		137,50							
			- Tanaman Buah Tahunan	8	Ton/Ha		9,29		6,9		9,84		142,61			9,84		124,56							
			* Jeruk	10	Ton/Ha		9,36		9,6		-		-			9,36		93,60							

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)			Un it O P D P e n a n a	Ket.
				K	Satuan	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)			(12=8+9+10+11)			(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)			(15 = 14/5 x 100%)			(16)	(17)
			Meningkatkan Produktivitas Tanaman Perkebunan																						
			- Karet	2	Ton/Ha		1			1,47			1,12		76,19			1,46			96,69				
			- Kelapa Sawit	4	Ton/Ha		3			3,59			2,83		78,83			3,47			91,32				
			- Lada	2	Ton/Ha		1,47			1,48			1,25		84,46			1,47			98,00				
II		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Meningkatnya Populasi Ternak			2.538.700.000			1.193.808.671			515.255.000			505.136.260					1.698.944.931					
			- Sapi (Ekor)	5510	Ekor		4753			4.208			5073		120,56	95,07		5073			92,07	15,30			
			- Kambing/domba (Ekor)	790	Ekor		608			606			736		121,45			736			93,16				
			- Bebek/Itik (Ekor)	5025	Ekor		4210			4.400			6749		153,39			6749			134,31				
III		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Meningkatnya Populasi Ternak			3.589.545.000			1.047.219.926			1.240.300.000			1.210.064.424		97,56			2.257.284.350			62,88		
			- Sapi (Ekor)	5510	Ekor		4753			4.208			5073		120,56	90,96		5073			92,07	45,35			
			- Kambing/domba (Ekor)	790	Ekor		608			606			736		121,45			736			93,16				
			- Bebek/Itik (Ekor)	5025	Ekor		4210			4.400			6749		153,39			6749			134,31				
IV		PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Meningkatnya Populasi Ternak			2.222.470.000			535.677.300			466.690.000			419.459.550					955.136.850					
			- Sapi (Ekor)	5510	Ekor		4753			4.208			5073		120,56	90,96		5073			92,07	45,35			
			- Kambing/domba (Ekor)	790	Ekor		608			606			736		121,45			736			93,16				
			- Bebek/Itik (Ekor)	5025	Ekor		4210			4.400			6749		153,39			6749			134,31				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												5.945.315.000			5.314.264.080										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																95,94	89,87				51,59	38,48			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Tinggi				Rendah	Sangat Rendah			
DINAS PANGAN																									
	2.01	URUSAN PILIHAN																							
	2.01.1.21.01	BIDANG URUSAN PERTANIAN																							
I	2.01.1.21.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani	100	%	4.871.050.000,00	57,36%		2.583.630.000,00	60%		661.210.000	64		616.341.689	52,78	47,75	163		3.199.971.689	59,50	54,92			
II	2.01.1.21.01.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Cakupan bina penyelenggaraan penyuluhan pertanian	100	%	13.575.717.500,00	81,25%		8.165.430.500,00	71%		2.705.143.500	185		2.636.645.390	80,00	77,44	375		10.802.075.890	97,10	83,49			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												3.366.353.500			3.252.987.079										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																66,39	62,60				78,30	69,21			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sedang	Rendah				Tinggi	Sedang			
D. KEHUTANAN																									
I	2.02.01.15	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	Tersusunnya rencana pola dan struktur ruang TAHURA	4	Blok	950.000.000	1		235.322.247	1		121.295.000	1		114.239.445	100,01	94,18			349.561.692	1188,10	36,80			
II	2.02.01.16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Rehabilitasi Tahura yang kritis	35	%	2.220.000.000	0		-	10		86.791.000	10		85.484.000	100,00	98,49			85.484.000	8,33	3,85			
III	2.02.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	Jumlah desa disekitar TAHURA yang dilakukan pengamanan	11	Desa	1.250.000.000	11		365.935.873	12		181.580.000	12		180.211.284	100,00	99,25			546.147.157	60,56	0,44			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												389.666.000			379.934.729										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																100,00	97,31				419,00	13,69			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
F. PERDAGANGAN																									
	2.06.2.07.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase alat UTTP yang diterima/tera ulang	88	%	690.000.000,00			68.746.000,00	85,00		300.590.000			246.862.411,00	100,00	77,25			315.608.411,00	70,00	48,86			
I	2.06.2.07.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase pertumbuhan nilai transaksi perdagangan pasar tradisional (voy)	4	%	16.625.000.000,00			6.558.495.424,00	3,25		2.939.755.000			2.339.504.216,00	88,00	75,34			8.897.999.640,00	72,74	54,38			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												3.240.345.000			2.586.366.627										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																94,00	76,29				71,37	51,62			

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Un it O P D P e n a n a	Ket.		
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Rendah				
G. PERINDUSTRIAN																						
I	2.07.2.07.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase IKM (pangan) yang menerapkan good manufacturing process	6	%	2.524.000.000,00		672.691.550,00	5,50	1.224.038.000		1.063.341.652,00	100,00	87,28		1.736.033.202,00	92,78	70,44				
IV URASAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																						
A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																						
I		Program kerjasama pembangunan	Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya			350.000.000		392.817.249		107.640.000		106.250.880	100,00	98,71		499.068.129	89,47	142,59				
II		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya			360.000.000		222.713.603		142.849.400		131.696.230	100,00	92,19		354.409.833	125,00	98,45				
III		Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam,	Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya			86.350.000		-	100	90.500.000		88.099.834	100,00	97,35		88.099.834	100,00	102,03				
IV		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			520.000.000		32.253.701	100	80.000.000		74.992.300	114,29	93,74		107.246.001	27,50	20,62				
V		Program perencanaan pembangunan daerah	Kesesuaian prioritas pembangunan			5.925.653.000		2.862.476.203		1.343.591.200		1.287.882.901	100,00	95,77		4.150.359.104	85,21	74,32				
VI		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya			250.000.000		98.723.813		170.000.000		161.482.356	100,00	95,29		260.206.169	100,00	106,54				
VII		Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya			1.143.750.000		278.013.650		446.699.500		425.664.129	100,00	94,87		703.677.779	51,67	58,46				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.381.280.100		2.276.068.630										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													102,04	95,42			82,69	86,14				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Tinggi				
B. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																						
I		Program pengembangan data/informasi	Persentase penerapan teknologi tepat guna			659.000.000		878.454.769		261.999.750		217.992.272	100,00	87,60		1.096.447.041	102,63	168,28				
II		Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	presentase penerapan teknologi tepat guna			87.450.000		-		83.174.000		80.111.101	100,00	96,32		80.111.101	100,00	91,61				
III		Program Penguatan Inovasi	Presentase inovasi daerah yang diterapkan			1.325.750.000		987.674.942		894.057.950		775.349.163	100,00	88,87		1.763.024.105	100,00	134,83				
IV		Program Pendayagunaan IPTEK				107.100.000		14.369.278		24.990.000		18.578.800	100,00	72,08		32.948.078	200,00	34,64				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.264.221.700		1.092.031.336										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	86,22			125,66	107,34				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
C. KEPEGAWAIAN																						
I	1.20.1.20.14.42	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya Pendidikan Kedinasan Pegawai	1		17.392.862.800	7	2.743.228.607	100%	902.525.000	89%	805.083.288	100,00	89,20		3.548.311.895	31,92	20,40	BK PS			
II	1.20.1.20.14.43	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1		6.655.360.000	0	1.015.204.428	118%	2.486.948.000	87%	2.152.933.666	98,96	89,10		3.168.138.094	64,69	55,52	BK PS			
III	1.20.1.20.14.44	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1		26.465.517.000	1	6.893.036.901	99%	3.919.349.600	68%	2.654.528.061	81,03	74,97		8.984.278.506	53,31	37,23	BK PS D			
IV	1.20.1.20.14.46	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	2		4.370.000.000	14990	1.646.743.117	100%	702.764.700	94%	657.153.092	99,75	93,77		2.303.896.209	94,60	50,73	BK PS D M D			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										8.011.587.300		6.269.698.107										

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Un it O P D Pe na na n	Ket.
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													94,93	86,76			61,13	40,97		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
D. KEUANGAN																				
BPKAD																				
I		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya ketertiban dan ketaatan pengelolaan keuangan daerah	100	%	16.335.000.000	100	3.365.928.893	100	2.459.500.000	100	2.209.252.721	100,00	89,83	25	5.575.181.614	25,00	34,13		
II		PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN ASET DAN BARANG DAERAH	meningkatnya tertib administrasi pendataan, pengelolaan dan pengowasan aset daerah	100	%	6.775.000.000	100	1.239.774.580	100	960.720.000	100	803.865.058	100,00	83,67	25	2.043.639.638	25,00	30,16		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.420.220.000		3.013.117.779								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													108,29	87,36			77,28	30,91		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
BPRD																				
I		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah			17.815.000.000				2.199.511.500		2.049.122.525	106,84	89,73		5.592.817.326	65,19	30,30		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.199.511.500		2.049.122.525								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													106,84	89,73			65,19	30,30		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
E. PENGAWASAN																				
I	1.20.1.20.07.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Jumlah OPD yang mencapai Maturitas SPIP pada level 3 di wilayah IRBAN	100	Persen	-	100	-	100,0	-	-	100	-	-	100	100,0%	-			TDA
			Persentase Jumlah OPD yang mempunyai temuan pengelolaan keuangan dan aset yang tidak material di wilayah IRBAN	100	Persen	-	100	-	100,0	-	-	100	-	-	100	100,0%	-			TDA
			Persentase rekomendasi hasil pemeriksaaan internal (APIP) dan eksternal (BPK) yang selesai difindaklanjuti di wilayah IRBAN	100	Persen	-	100	-	100,0	-	-	-	-	-	100	-	100,0%	-		TDA
			Persentase Meningkatnya nilai SAKIP OPD dengan kategori A di wilayah IRBAN	100	Persen	-	15	-	75,0	-	-	-	-	-	15	-	15,2%	-		TDA
													0,00%				78,79%			
													Sangat Rendah				Tinggi			
						13.050.000.000		1.774.127.850		1.819.575.000	-	1.682.785.590	100%	93,84%		3.456.913.440	42,77%	32,69%		TDA
II	1.20.1.20.07.21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang bersertifikasi auditor	1	persen	1.015.000.000	1	369.651.330	70,0%	138.000.000	70,0%	129.764.637	100,0%	94,03%	70%	499.415.967	72,64%	49,20%		TDA
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.957.575.000		1.812.550.227								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	93,94			57,70	40,95		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
F. PEMERINTAHAN UMUM																				
SETDA																				
I		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan				29.323.452.533		14.402.098.690		6.554.830.000	25	6.094.246.386	98,46	78,89	25,00	20.496.345.076,00	64,65	42,71		
II		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	25		12.448.571.109		4.991.595.544		2.986.644.381		3.564.967.829	100,00	26,18	-	3.044.961.950	66,67	47,48		
III		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tertaklaksananya Pemanfaatan Teknologi Informasi	25		8.391.770.000		4.175.311.180		1.910.857.800	25,00	1.622.338.562	85,00	83,43	25,00	5.591.847.127	50,00	48,22		
IV.		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Program Menaintesikan Penanganan	25		94.400.000,00		30.538.623,00		6.200.000,00	-	2.774.386,00	100,00	44,75	-	33.313.009,00	66,67	35,29		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Un it O P D P e n a n a n	Ket.
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)
V.		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Meningkatnya kerjasama antar pemerintah Daerah	25		1.313.843.000,00		575.131.673,00		217.010.000,00	-	188.808.691,00	100,00	88,76	-	763.940.364,00	42,59	45,76		
VI.		Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan	Terselenggaranya Penataan Peraturan Perundang-undangan	25		7.316.915.000		2.810.069.633		1.209.514.286,00		1.015.473.234,00	80,00	65,57		3.825.542.867,00	48,99	45,00		
VII		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terselenggaranya Penataan Peraturan Perundang-undangan			489.432.500,00		97.886.500		100.000.000,00	-	92.866.195,00	100,00	92,87	-	190.752.695,00	40,00	38,97	n. Purn	
VIII		Program Analisis Kebijakan Pembangunan	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan			2.741.250.000,00		836.947.948,00		600.000.000,00	-	572.420.850,00	100,00	94,21	-	1.978.722.048,00	56,25	115,44	RTALA	
IX		Program Pengembangan Kehidupan Beragama	Terlaksananya Program Penataan Sistem Manajemen SDM	25		13.174.225.000		2.860.041.680,00		6.987.270.000,00	-	4.962.475.500,00	80,00	74,00		7.341.917.180,00	43,41	53,77		
X		Program Pelayanan Masyarakat Terpadu	Terwujudnya Pelayanan Masyarakat Terpadu			1.619.250.000		288.017.407		100.000.000,00	-	81.770.900,00	100,00	81,77	-	369.788.307,00	66,67	22,84		
XI		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Peningkatana Pelayanan Publik			752.457.000		349.469.726		195.850.000	-	149.284.421	100,00	78,90	-	498.754.147,00	63,53	64,47		
XII		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terwujudnya Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	25		2.210.340.500		313.707.220		308.940.000	-	277.050.544	100,00	71,82	-	590.757.764,00	36,67	29,51		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													95,29	73,43			53,84	49,12		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sedang			Rendah	Sangat Rendah		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				
SETWAN																				
I		Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase hasil reses yang ditindaklanjuti			91.106.124.000		19.650.364.950		23.073.290.000		21.407.280.856	78,28	71,02		41.057.645.806	0,00	40,14		
II		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				515.508.000		132.331.800		102.240.000		53.135.700	78,87	73,55		185.467.500	0,00	47,14		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										23.175.530.000		21.460.416.556								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													78,58	72,28			0,00	43,64		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
KECAMATAN KOBA																				
I		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penyediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan - Persentase cakupan area pelayanan persampahan			2.483.100.000		2.474.446.000		692.750.000		595.351.400	50,00	48,40		3.069.797.400	33,33	82,79		
II		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Persentase Jumlah Laporan/Kejadian Masalah Ketentraman dan Ketertiban			580.000.000		226.940.800		107.324.500		104.154.000	100,00	96,37		331.094.800	57,77	60,86		
III		PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah Desa/Kelurahan yang partisipasi dalam pengembangan wawasan			497.800.000		521.438.300		94.700.000		92.045.000	100,00	97,20		613.483.300	66,67	123,24		
IV.		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Persentase jumlah masyarakat yang ikut dalam kegiatan pembangunan desa			4.286.200.000		1.612.973.801		908.017.500		586.191.300	92,47	58,14		2.199.165.101	66,84	39,26		
V.		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	Persentase jumlah aparaturnya kelurahan, lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan			20.938.550.500		296.801.100		4.072.989.500		3.451.631.483	100,00	78,79		3.748.432.583	43,59	31,20		
VI		PROGRAM PELAYANAN TERPADU MASYARAKAT	Persentase pelayanan publik yang telah diberikan sesuai dengan SOP			499.000.000		182.140.000		130.000.000		78.201.700	100,00	66,67		260.341.700	50,00	42,07		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.005.781.500		4.907.574.883								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													90,41	74,26			53,03	63,24		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Tinggi	Sedang			Rendah	Rendah		
KECAMATAN PANGKALAN BARU																				
I.		Pogram Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penyediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan - Persentase cakupan area pelayanan persampahan			2.350.000.000		1.307.549.000		614.000.000		602.200.000	100,00	98,03		1.909.749.000	40,00	83,51		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Un it O P D P e n a n a	Ket.
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)
II.		Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Jumlah Laporan/Kejadian Masalah Ketentraman dan Ketertiban umum yang telah di tindak lanjuti			692.000.000		287.050.000		180.000.000		155.510.700	100,00	84,63		442.560.700	38,21	58,47		
III.		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Desa/Kelurahan yang partisipasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan			350.000.000		144.444.750		80.000.000		76.815.000	100,00	96,02		221.259.750	200,00	63,22		
IV.		Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Meningkatnya Aparatur, Organisasi Masyarakat yang aktif di Desa (Pembantu penghulu, RT, LPM, Karang Taruna)			250.000.000		44.640.000		100.000.000		92.938.500	100,00	93,88			40,00	52,10		
V.		Program Peningkatan Partisipasi dalam Membangun Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dan Aparatur Desa/kelurahan yang aktif dalam kegiatan Perlombaan, Pembangunan dan Keatletan rayanangan			3.187.000.000		1.158.944.600		861.000.000		806.812.250	100,00	89,74		1.965.756.850	100,22	65,85		
VI		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Meningkatnya Aparatur Kelurahan dan masyarakat Kelurahan yang terkoordinasi dengan baik			3.816.359.000		971.929.900		1.492.235.000		1.177.151.248	100,00	72,70		2.149.081.148	26,86	56,82		
VII		Program Pelayanan Masyarakat Terpadu	Persentase pelayanan publik yang telah diberikan sesuai dengan SOP			283.000.000		130.663.900		92.000.000		84.400.000	100,00	92,00		215.063.900	40,00	79,43		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.419.235.000		2.995.827.698								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	89,57			69,33	65,63		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Rendah		
KECAMATAN SUNGAISELAN																				
I		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase terangkutnya timbunan sampah ke TPA			2.049.410.000		945.616.895		363.800.000		356.542.344	75,00	98,01		1.302.159.239	75,00	63,54		
II		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase Jumlah Laporan/Kejadian Masalah Ketentraman dan Ketertiban umum yang telah di tindak lanjuti			465.000.000		188.320.000		121.865.000		120.406.000	100,00	98,80		308.726.000	58,80	66,39		
III		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Desa/Kelurahan yang partisipasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan			461.550.000		181.930.000		93.500.000		93.480.000	100,00	99,98		275.410.000	80,00	59,67		
IV.		Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase Meningkatnya Aparatur, Organisasi Masyarakat yang aktif di Desa (Pembantu penghulu, RT, LPM, Karang Taruna)			171.000.000		65.350.000		37.450.000		31.220.900	100,00	83,37		96.570.900	80,00	56,47		
V.		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dan Aparatur Desa/kelurahan yang aktif dalam kegiatan Perlombaan, Pembangunan dan Keatletan rayanangan			3.762.000.000		980.935.350		593.450.000		531.999.000	93,75	82,96		1.412.964.350	58,47	28,41		
VI		Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase Meningkatnya Aparatur Kelurahan dan masyarakat Kelurahan yang terkoordinasi dengan baik			5.601.900.000		1.312.879.000		1.462.873.000		1.332.481.057	82,61	88,70		2.645.360.057	123,08	64,11		
VII		Program Pelayanan Masyarakat Terpadu	Persentase pelayanan publik yang telah diberikan sesuai dengan SOP			448.000.000		112.740.890		72.650.000		66.369.200	96,67	91,35		179.110.090	89,20	37,28		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.745.588.000		2.532.498.501								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													92,58	91,88			80,65	53,70		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah		
KECAMATAN SIMPANG KATIS																				
I		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penyediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan - Persentase cakupan	72	Bln	800.000.000	36	494.226.000		190.000.000	12	189.900.000	100,00	99,95		684.126.000	66,67	85,52		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Un it O P D P e n a n	Ket.
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)
II		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase Jumlah Laporan/Kejadian Masalah Ketertarikan dan Keterlibatan umum yang telah di tindak lanjuti	1900	0	685.000.000		116.820.000		93.840.000	400	93.250.000	100,00	99,37		210.070.000	100,00	44,27		
III		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Desa/Kelurahan yang partisipasi dalam	6	Kegiatan	452.650.000		147.197.000		82.300.000	1	80.390.000	100,00	97,68		227.587.000	66,67	50,28		
IX		Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase Meningkatnya Aparatur, Organisasi Masyarakat yang aktif di Desa (Pembantu penghulu, RT, LPM, Karang Taruna)	60	Aparatur	903.000.000		120.000.000	30	141.525.000	30	133.281.500	50,00	47,09		245.313.047	20,00	13,29		
X		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dan Aparatur Desa/kelurahan yang aktif dalam kegiatan Perlombaan, Pembangunan dan Keatotaan rovananan	943	0	4.717.450.000		750.828.198		699.233.000		678.685.900	69,57	84,30	-	1.429.514.098	58,13	44,71		
XIII		Program Pelayanan Masyarakat Terpadu	Persentase pelayanan publik yang telah diberikan sesuai dengan SOP	29	0	915.000.000		241.039.137		188.000.000		186.984.189	100,00	73,62	-	428.023.326	118,75	35,47		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.394.898.000		1.362.491.589								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													86,59	83,67			71,70	45,59		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
KECAMATAN NAMANG																				
I	1.08.1.20.12.15	Pogram Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan	Persentase penyediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan - Persentase cakupan	60	Bln	650.000.000	36	341.439.800	12	128.000.000	12	127.960.000	100,00	99,97	48	469.399.800	80,00	72,22		
II	1.19.1.20.12.15	Program Peningkatan keamanan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Jumlah Laporan/Kejadian Masalah Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang telah diindaklanjuti	60	Bln	428.800.000	24	158.193.500	12	90.378.000	42	87.125.200	100,00	96,90		245.318.700				
IV	1.19.1.20.12.07	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah Desa/Kelurahan yang pasrtisipasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan	5	Kegiatan	285.000.000	2	119.070.500		50.000.000	1	45.364.200	100,00	90,73		164.434.700				
X	1.22.1.20.12.15	Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat pedesaan	Persentase Meningkatnya Aparatur, Organisasi Masyarakat yang aktif di Desa (Pembantu penghulu, RT, LPM, Karang Taruna)			145.000.000		44.182.100		88.021.000	4	85.684.800	100,00	97,35		129.866.900				
XI	1.22.1.20.12.17	Program peningkatan partisipasi dalam membangun desa	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Kecamatan			3.408.296.000		1.073.697.100		790.193.500	677	747.947.891	100,00	94,65		1.821.644.991				
XI	1.22.1.20.12.23	Program Pelayanan Masyarakat Terpadu	Persentase Jumlah Masyarakat yang diberikan Pelayanan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur			345.000.000		150.504.001	12	119.768.000	16	113.791.300	100,00	95,01		264.295.301				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.266.360.500		1.207.873.391								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	95,11			85,54	62,92		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah		
KECAMATAN LUBUK BESAR																				
I		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah paket pemeliharaan kebersihan yang dilayani			939.040.000	24	410.834.500	12	150.000.000	12	148.045.000	100	98,70	36	558.879.500	50,00	59,52		
III		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase tingkat Rasio K3			690.800.000	2410	355.093.700	1009	126.500.000	1009	125.704.000	100,00	99,37	3.419	480.797.700				
IV		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meingkatnya wawasan kebangsaan			350.500.000		127.558.600		69.400.000	1	69.224.500	100	99,75	4	196.783.100	66,67	56,14		
X		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya peran dan partisipasi perangkat desa dalam membangun desa			547.650.000		17.171.500		189.360.000	2,00	162.677.000		85,91		179.848.500		32,66		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Un O P D Pe na na	Ket.	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		(16)	(17)	
XI		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat			4.093.809.000		1.022.278.400		793.467.500	610,00	748.725.000		94,36		1.771.003.400		43,26			
XII		Program Pelayanan Masyarakat Terpadu	Menigkatnya Partisipasi Masyarakat			400.100.000		132.608.200		71.100.000	14	67.018.400		94,26		199.626.600		49,89			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.399.827.500		1.321.393.900								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														100,00	94,22			51,66	48,45		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (PEMERINTAHAN UMUM)														93,72	84,20			60,64	54,31		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PEMERINTAHAN UMUM)														Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)	
IV. URUSAN RUTIN																		
A. DINAS PENDIDIKAN																		
I	1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran			9.776.964.000		1.372.316.000		1.480.088.000		1.404.937.083	100,00	94,92		2.777.253.083	28,90	28,41
II	1.01.1.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			2.283.041.000		196.516.000		736.470.000		676.079.950	92,86	91,80		333.264.250	17,33	14,60
III	1.01.1.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			333.520.000		51.400.000		1.049.020.000		322.285.700	50,00	30,72		373.685.700,00	56,17	112,04
IV	1.01.1.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			740.000.000		110.000.000		150.000.000		145.996.550	100,00	97,33		255.996.550	237,29	34,59
V	1.01.1.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan			180.000.000		23.317.800		30.000.000		29.419.100	100,00	98,06		52.736.900	133,33	29,30
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.445.578.000		2.578.718.383						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													88,57	82,57			94,60	43,79
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah
B. DINAS KESEHATAN																		
I.	1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran			13.141.090.768		7.226.870.081	11	3.101.190.476		2.457.560.241	88,96	60,95		9.684.430.322	70,42	45,86
II.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%		3.118.820.300		1.293.582.540	9	969.500.000		587.643.091	85,68	92,00		1.881.225.631	56,48	61,31
III.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	2675		300.137.280		125.880.950	535	279.670.000	535	279.570.000	100,00	99,67	535	405.450.950	60,91	106,79
IV.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%		312.242.410	29%	161.834.707	1	221.873.000		214.031.969	100,00	96,61		539.255.076	72,79	57,50
V.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	100%		165.754.860	20%	72.280.800	3	30.000.000		16.400.382	100,00	80,17		88.681.182	53,33	51,71
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.602.233.476		3.555.205.683						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													94,93	85,88			62,79	64,63
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah
C. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN																		
I	1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	780	Bln	6.420.000.000	312	1.427.343.934	156	1.759.818.000	156	1.416.227.915	100,00	72,58	468	2.843.571.849	60,00	39,38
II	1.03.1.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	193		3.935.000.000	76	723.069.233	41	888.997.000	41	683.204.391	100,00	88,19	117	1.406.273.624	75,00	61,67
III	1.03.1.03.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	10	Paket	300.000.000	4	69.650.000	2	63.120.000	2	57.940.000	100,00	95,12	6	127.590.000	60,00	49,52
IV	1.03.1.03.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	75	kali	550.000.000	30	50.712.289	15	170.000.000	15	119.503.876	100,00	66,48	45	170.216.165	60,00	30,12
V	1.03.1.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan	160		1.165.000.000	64	225.328.850	32	255.000.000	32	225.407.200	100,00	93,16	96	450.736.050	60,00	34,52
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										3.136.935.000		2.502.283.382						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	83,11			63,00	43,04
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah
D. DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN																		
I		Program Pelayanan Administrasi Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		3.802.800.000		1.163.882.674	100%	828.240.000		674.531.897	80,00	45,09		1.838.414.571	60,67	47,41
II		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas dan perlengkapan penunjang disiplin	100%		350.000.000		51.300.000	100%	45.650.000		45.650.000	97,86	100,00		96.950.000	46,67	28,33

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)	
III		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%		325.000.000		111.350.178	100%	100.000.000		98.359.460	112,50	98,36		209.709.638	57,78	64,53
IV		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%		150.000.000		57.960.000	100%	29.290.000		26.650.000	100,00	70,32		84.610.000	60,00	52,75
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											-	-	98,80	78,89			57,03	55,93
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		
E. BPB KESBANGPOL																		
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan administrasi Perkantoran	72	Bln	2.788.500.000	12	1.292.191.329	12	573.685.000	9	521.605.440	98,61%	85,41%	21	1.813.796.769	53,62%	58,56%
II		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	90%		1.386.610.000,00	60%	320.319.118	60%	435.450.000	1	355.922.250	100,00%	79,66%	1	676.241.368	88,78%	45,99%
III		Program Peningkatan Disiplin dan Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	325		170.000.000,00	78	41.920.000,00	45	26.700.000	45	21.650.000	100,00%	80,17%	123	63.570.000	24,00%	39,12%
IV		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	60		270.000.000,00	8	107.796.801,00	8	83.250.000	4	82.064.748	100,00%	98,58%	12	189.861.549	26,67%	70,32%
V		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terciptanya Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan benar	40		100.000.000,00	2	70.103.150	8	30.000.000	6	21.958.309	100,00%	74,77%	8	92.061.459	60,00%	84,45%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.149.085.000	1.003.200.747						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													99,72	83,72			50,61	59,69
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah
F. KASAT POL PP																		
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	Bln	3.248.635.000	36	1.296.658.929	12	649.727.000	12	625.995.013	100	96	48	1.922.653.942	80,00	59,18
II		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	60	Bln	2.937.550.000	24	825.322.186	12	750.510.000	12	740.134.560	100	99	36	1.565.456.746	60,00	53,29
III		Program peningkatan disiplin aparatur	Terwujudnya keseragaman dan kerapian aparatur dalam berpakaian Dinas	100	%	1.110.000.000	100	448.328.539	100	374.310.000	40	331.318.700	40	89	100	779.647.239	100,00	70,24
IV		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	%	1.343.000.000	100	304.999.800	100	373.240.000	100	331.779.501	100	89	100	521.634.000	100,00	38,84
V		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	150.000.000	100	89.105.500	100	30.000.000	100	29.965.550	167	100	100	119.071.050	100,00	79,38
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.177.787.000	2.059.193.324						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													113,33	95,43			85,95	69,48
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sedang
G. DINAS SOSIAL - PMD																		
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	72	Bulan	3.190.000.000		809.501.616		1.011.557.000		921.050.461	101,11	86,14		1.730.552.077	36,81	50,63
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah item sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	5		912.000.000		191.590.713		379.437.200		213.848.288	99,92	89,18		405.439.001	99,97	83,12
III		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase jumlah aparatur yang disiplin	100	%	210.000.000		33.100.000		49.970.000		49.970.000	100,00	100,00		83.070.000	44,53	37,69
IV		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan	32	%	280.000.000		35.658.600		100.000.000		91.452.636	100,00	91,45		127.111.236	56,25	45,40
V		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah item laporan yang dibuat dengan baik dan benar	3		180.000.000		24.952.500		29.904.000		21.287.150	100,00	70,41		46.239.650	42,22	26,05
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.570.868.200	1.297.608.535						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,21	87,44			55,96	48,58
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)	
H.																		
I. DINDUKCAPIL																		
I		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran			4.980.552.800		2.164.402.027		914.514.000		858.295.351	100,00	88,23		3.022.697.378	65,88	58,01
II		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			5.072.496.600		1.647.685.545		1.352.416.000		1.223.737.451	102,38	87,17		2.871.422.996	81,46	62,13
III		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			267.772.000		94.306.000		37.050.000		36.950.000	100,00	99,50		131.256.000	46,32	45,13
IV		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			480.000.000		170.711.500		100.000.000		94.646.800	100,00	94,65		265.358.300	108,33	55,28
V		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan			150.000.000		89.430.000		30.000.000		29.900.000	100,00	99,83		119.330.000	66,67	69,72
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.433.980.000								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,48	93,88			73,73	58,06
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Rendah
J. DINAS PANGAN																		
I	1.21.1.21.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	60	bln	3.940.924.500,00	100	2.364.554.700,00	100	788.184.900,00	228	752.750.711	100,00	95,50	813,00	3.117.305.411,00	79,49	78,21
II	1.21.1.21.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	85	%	7.632.838.500,00	100	2.681.668.000,00		2.026.662.600,00	1.274	1.943.391.020	986	95,89	6.245	4.625.059.020		
III	1.21.1.21.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas dan perlengkapan penunlana disiplin lainnya	90	%	257.000.000,00	100	154.200.000,00	100	51.400.000,00	130	51.400.000	102,88	100,00	440	205.600.000		
IV	1.21.1.21.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	90	%	500.000.000,00	60	300.000.000,00		100.000.000,00	6	93.996.301	100,00	94,00	24	393.996.301		
V	1.21.1.21.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	%	146.475.000,00	100	87.885.000,00		29.295.000,00	6	28.979.950	300	98,92	24	116.864.950		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.995.542.500								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													94,66	92,87			84,19	74,07
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sedang
K. DINAS LINGKUNGAN HIDUP																		
I	1.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	3.839.715.000	100	1.403.859.387	100	659.726.000	100	572.195.493	99,69	86,73	100	1.976.054.880		
II	1.08.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.461.470.000	100	318.961.963	100	266.340.000	100	155.675.622	75,00	58,45	100	411.489.585		
III	1.08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100	%	280.900.000	100	63.500.000	100	27.650.000	100	27.270.000	101,43	98,63	100	90.770.000		
IV	1.08.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	80	%	600.000.000	80	173.712.979	80	100.000.000	80	99.109.209	120,00	99,11		272.822.188		
V	1.08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan	100	%	180.000.000	100	87.784.100	100	30.000.000	100	22.610.000	100,00	75,37		110.394.100		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.083.716.000		876.860.324						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,89	82,46			91,37	44,47
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
L. DISPERINDAGKOP -UMKM																		
	2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran			2.610.000.000,00		1.609.067.879,00		590.612.000,00		549.010.855,00	100,00	85,49		2.158.078.734,00	72,67	72,98
	2.07.2.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			1.275.000.000,00		389.395.510,00		569.150.000,00		519.127.611,00	99,31	84,43		908.523.121,00	132,64	77,55
	2.07.2.07.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			125.000.000,00		64.260.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	100,00	100,00		99.260.000,00	80,00	82,84

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		
	2.07.2.07.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			300.000.000,00		148.839.407,00		100.000.000,00		94.972.177,00	100,00	94,97		243.811.584,00	120,00	81,27	
	2.07.2.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan			150.000.000,00		45.275.000,00		30.000.000,00		25.134.000,00	99,86	90,38		70.409.000,00	154,39	75,10	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.324.762.000		1.223.244.643							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													99,86	90,38				154,39	75,10
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi				Sangat Tinggi	Sedang
M. DISKOMINFOSTA																			
I	1.25.1.25.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.373.699.000,00		967.743.878,00		888.300.000,00		756.731.296,00	101,39	86,01		1.724.475.174,00	59,00	74,66	
II	1.25.1.25.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			1.884.776.200,00		576.267.450,00		685.175.400,00		640.790.405,00	97,46	93,73		1.217.057.855,00	65,75	68,19	
III	1.25.1.25.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur			29.250.000		26.400.000		29.500.000,00		29.500.000,00	100,00	100,00		55.900.000,00	190,00	193,25	
IV	1.25.1.25.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60.000.000		54.980.400		100.000.000,00		95.836.132,00	100,00	95,84		150.816.532,00	200,00	251,36	
V	1.25.1.25.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000		28.160.000		28.400.000,00		27.905.000,00	100,00	99,14		56.065.000,00	40,00	191,22	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.731.375.400		1.550.762.833							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													99,77	94,94				110,95	155,74
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
N. DINBUDPARPORA																			
I		Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat penyelesaian pelaksanaan kegiatan			2.984.190.000		1.427.776.730		623.753.000		576.982.368	100,00	89,86		2.004.759.098	65,33	62,79	
II		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			1.110.170.000		485.409.099		157.332.000		140.575.662	100,00	92,68		625.984.761	82,76	52,77	
III		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur			242.100.000		59.200.000		33.715.000		32.800.000	100,00	97,78		92.000.000	53,51	41,97	
IV		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Sumber Daya Aparatur			360.000.000		173.945.082		100.000.000		98.479.828	185,71	98,48		272.424.910	80,95	75,67	
V		Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Ketepatan waktu penyampaian laporan			165.000.000		58.545.150		30.000.000		27.224.100	100,00	66,29		85.769.250	66,67	56,61	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										944.800.000		876.061.958							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													117,14	89,02				69,84	57,96
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi				Sedang	Rendah
O. DPMPTK																			
IX	1.20.1.20.15.01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	72	bln	3.982.982.000	432	1.406.733.070	12	644.320.000	12	613.381.315	100,00	91,91	48	2.020.114.385	66,67%	56,17	
X	1.20.1.20.15.02	Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	98%		1.680.150.000	-	403.459.170	90%	349.605.000	75%	313.515.735	100,00	90%	12 bln	716.974.905	3333,33%	42,67%	
XI	1.20.1.20.15.03	Program : peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	97%		258.750.000	20	61.049.000	100%	29.550.000	-	26.670.000	100,00	99,20	-	87.719.000	55,00	32,96	
XII	1.20.1.20.15.05	Program : peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	95%		420.000.000	24	157.986.580	85%	100.000.000	8	95.618.869	100,00	95,62	100%	253.605.449	61,54	60,38	
XIII	1.20.1.20.15.06	Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Ketepatan waktu pelaporan	100%		180.000.000	18	68.260.200	100%	30.000.000	100,00%	26.583.800	100,00	91,31	100,00%	94.844.000	66,67	60,85	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.173.725.000		2.035.404.226	-	-			-	-	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	93,44			56,64	49,69	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah	
P. DINAS PERTANIAN																			
I		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	60	Bln	3.143.852.600	36	1.493.009.470	12	718.430.000	12	594.343.516	100,00	86,72	48	2.087.352.986	78,89	61,14	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)	
II		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya / Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur			948.823.500		282.834.742		200.253.500		134.814.200	75,00	53,07		417.648.942	70,00	42,74
III		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur Dalam berpakaian dinas dan perlengkapan penunjang disiplin lainnya			216.900.000		89.080.000		38.300.000		35.282.000	100,00	94,61		124.362.000	75,58	72,26
IV		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Persentase)			375.000.000		202.738.200		100.000.000		99.738.060	100,00	99,74		302.476.260	95,24	80,66
V		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Persentase)			150.000.000		82.770.000		29.600.000		24.999.700	100,00	87,62		107.769.700	80,00	73,44
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.086.583.500		889.177.476						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													95,00	84,35			79,94	66,05
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sedang
Q. BAPPELITBANGDA																		
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	5.242.374.000		2.176.545.764		866.195.000		802.078.210	113,00	90,34		2.978.623.974	68,48	53,36
II		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%	2.284.439.000		1.467.730.534		643.872.800		615.620.602	100,00	83,85		2.083.351.136	64,29	40,55
III		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100	%	237.170.000		69.300.000		36.800.000		35.150.000	97,00	96,92		104.450.000	56,33	44,98
IV		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Meningkatnya nya kapasitas sumber daya aparatur	100	%	470.000.000		54.361.000		100.000.000		95.393.489	142,86	95,39		149.754.489	57,78	31,86
V		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan	100	%	153.400.000		25.938.750		27.345.500		27.167.000	100,00	99,67		53.105.750	66,67	33,49
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.674.213.300		1.575.409.301						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													110,57	93,23			62,71	40,85
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah
R. BKPSDMD																		
I	1.20.1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan administrasi Perkantoran	100%		5.833.540.000,00	100%	2.691.139.374,00	106%	1.107.538.000	95%	1.056.582.308	99,29	95,04		3.747.721.682	61,39	58,67
II	1.20.1.20.14.02	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		2.475.289.000,00	100%	864.505.935,00	105%	376.185.000	80%	300.977.102	91,36	77,36		1.165.483.037	108,86	46,92
III	1.20.1.20.14.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	183%		291.650.000,00	100%	81.050.000,00	100%	37.400.000	91%	33.900.000	93,64	93,61		114.950.000	48,92	49,51
IV	1.20.1.20.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		432.000.000,00	733%	186.224.865,00	256%	100.000.000	97%	97.003.300	82,61	97,00		283.228.165	139,34	65,56
V	1.20.1.20.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Terciptanya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik dan Benar	104%		180.000.000,00	100%	76.343.850,00	100%	29.400.000	88%	25.928.400	100,00	89,29		102.272.250	62,78	60,15
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.650.523.000		1.514.391.110						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													93,38	90,46			84,26	56,16
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Rendah
S. BPKAD																		
I		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	6.071.400.000	100	1.878.244.117	100	1.165.780.000	100	1.007.488.252	104,22	81,45	25	2.864.382.369,00	60,36	44,36
II		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100	%	1.534.000.000	100	395.748.250	100	504.930.000	100	462.972.750	100,00	81,71	25	987.276.000	68,15	52,87
III		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	487	stel	257.000.000	91	48.100.000	71	41.690.000	69	40.590.000	98,04	98,26	187,04	88.690.000	33,90	35,19
IV		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	80	org	600.000.000	33	225.993.900	25	160.000.000	46	154.777.600	175,00	97,07	79	380.771.500	98,75	63,46
V		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan	35	Lap	137.500.000	14	52.677.400	7	30.000.000	7	25.182.200	100,00	80,87	107	77.859.600	60,00	60,34

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.902.400.000		1.691.010.802		115,45	87,87			64,23	51,24
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			
T.	BPRD																		
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	60	bin	3.649.570.000	24	1.220.235.889		666.910.000		613.275.722	103,33	82,83		1.833.511.611	60,35	48,30	
II		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan aparatur	100%		3.357.940.000		1.331.822.004		434.111.200		386.722.150	100,00	88,53		1.718.544.154	68,90	57,38	
III		Program peningkatan disiplin aparatur	Tercapainya disiplin aparatur	280	stell	174.000.000	118	48.000.000	76	40.650.000		35.600.000	99,11	91,76		83.600.000	70,75	51,61	
IV		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur	50	org	500.000.000	17	150.919.930	14	160.000.000		137.046.610	157,14	94,28		287.966.540	80,00	68,83	
V		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Terpenuhinya sistem pelaporan kinerja dan keuangan	31	lap	142.500.000	10	48.867.000	8	29.780.000		26.075.000	100,00	83,06		74.942.000	54,85	50,02	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										752.541.200		670.857.610		111,92	88,09			66,97	55,23
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Rendah
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			
U.	DPPKBPPPA																		
I		Program Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi			3.750.710.760		1.894.925.228		722.780.000		676.328.233	100,00	92,39		2.571.253.461	82,17	64,36	
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			1.568.581.040		669.183.297		342.521.000		283.111.898	100,00	89,50		952.295.195	72,14	62,62	
III		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			177.720.000		112.750.000		33.650.000		33.150.000	100,00	98,94		145.900.000	83,61	80,00	
IV		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			300.000.000		175.376.250		100.000.000		98.820.000	100,00	98,82		274.196.250	80,00	91,40	
V		Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan			150.000.000		88.658.800		28.300.000		26.397.500	100,00	86,95		115.056.300	80,00	73,70	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.227.251.000		1.117.807.631		100,00	93,32			79,58	74,42
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sedang
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			
V.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																		
II		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran			3.080.803.000		457.175.714		594.492.000		571.853.488	99,19	95,99		1.029.029.202	42,36	30,88	
III		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			1.779.196.000		238.366.350		516.841.000		237.032.500	101,67	94,70		475.398.850	92,33	23,70	
IV		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			139.200.000		22.406.500		25.000.000		25.000.000	100,00	100,00		47.406.500	29,69	33,93	
V		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			383.750.000		58.021.700		100.000.000		95.196.704	110,00	95,20		153.218.404	26,39	39,93	
VI		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan			202.869.000		24.557.300		24.500.000		24.127.400	100,00	98,31		48.684.700	27,78	25,18	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.260.833.000				102,17	96,84			43,71	30,72
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			
W.	INSPEKTORAT DAERAH																		
I	1.20.1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah waktu terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran vana	72	Bln	3.508.000.000	36	1.361.842.179	12	567.262.000	12	515.327.112	100,00%	88,73%	48	1.877.169.291	89,77%	46,25%	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)	
II	1.20.1.20.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	persen	1.509.000.000	100%	375.616.239	100%	302.610.000	100%	225.701.222	100,00%	81,34%	123	601.317.461	70,59%	33,93%
III	1.20.1.20.14.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin dalam berpakaian	100	%	255.000.000	100%	69.870.000	100%	35.040.000	100%	34.292.000	100,00%	98,51%	100%	104.162.000	45,62%	41,31%
IV	1.20.1.20.07.05	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan	41,7%	persen	300.000.000	8	57.988.599	41,7%	80.000.000	16,7%	79.249.703	100,00%	99,06%	817%	137.238.302	62,50%	45,75%
V	1.20.1.20.14.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan yang dibuat dengan baik dan benar	100	persen	180.000.000	100	33.957.000	100	11.700.000	85,7%	10.650.000	100,00%	94,57%	100,0%	44.607.000	66,67%	32,15%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										996.612.000		865.220.037						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	92,44			67,03	39,88
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah
X. SETDA																		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	%	26.805.623.750	100	14.564.631.054	100	6.115.889.000	50	5.755.776.567,00	100,00	94,97	100,00	20.320.407.621,00	67,62	75,46
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	%	23.741.847.500	100	10.291.917.481	100	4.623.150.000	100,00	4.198.400.976,00	71,02	62,87		14.490.318.457,00	53,98	49,18
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	25		810.010.000		233.488.000		148.500.000	25	148.217.000,00	100,00	99,87	25,00	381.705.000,00	39,86	48,15
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.600.000.000,00		516.549.975,00		230.000.000,00	25	225.259.488,00	100	97,9		741.809.463,00	49	46
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Ketepatan Waktu Pelaporan			1.999.704.000,00		1.022.308.325,00		352.280.000,00	25,00	344.653.553,00	100,00	97,49		1.366.961.878,00	76,83	69,55
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.112.280.000		947.394.474						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													94,20	90,65			56,42	58,24
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah
Y. SETWAN																		
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran			10.998.481.000		1.571.949.656		1.971.269.000		1.572.742.606	87,93	81,10		3.144.692.262	37,59	33,37
II		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			9.772.552.000		2.197.443.746		2.960.696.000		2.730.571.800	74,36	90,65		4.928.015.546	109,37	47,12
III		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			1.238.587.000		220.675.000		344.580.000		175.880.000	73,33	78,71		396.555.000	34,67	34,71
IV		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			516.500.000		83.381.200		100.000.000		97.853.409	100,00	97,85		181.234.609	0,00	35,09
V		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan			262.500.000		25.355.000		30.000.000		27.936.000	100,00	91,98		53.291.000	0,00	24,67
													Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.406.545.000		4.604.983.815						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													87,12	88,06			36,32	34,99
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Z. KECAMATAN KOBA																		
I		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran			9.044.194.000		3.525.373.621		954.425.000		811.876.767	100,00	80,61		4.337.250.388	63,91	51,23
II		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			2.825.904.000		1.118.937.950		510.800.000		421.643.450	146,67	69,28		1.540.581.400	73,33	53,55
III		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			488.500.284		190.800.206		83.800.103		190.800.885	100,00	100,00		148.900.201	47,49	52,81

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)	
IV		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			576.000.000		200.689.574		90.000.000		79.520.201	100,00	88,36		280.209.775	45,83	48,65
V		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan			180.000.000		89.814.600		30.000.000		29.049.800	100,00	98,42		118.864.400	66,67	66,12
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.669.025.103		1.532.891.103						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													109,33	87,33			59,45	54,47
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah
AA PANGKALAN BARU																		
IV.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran			5.570.025.000		3.061.817.444		1.198.210.000		1.113.884.970	100,00	95,52		4.175.702.414	40,00	69,71
V.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			3.552.000.000		1.312.494.500		933.200.000		649.523.274	80,00	80,36		1.962.017.774	112,00	76,17
VI.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			180.460.000		546.201.310		33.690.000		31.720.000	100,00	94,69		577.921.310	44,57	260,09
VII.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			415.000.000		163.486.390		100.000.000		83.230.668	87,50	83,23		246.717.058	31,25	59,45
VIII.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan			163.500.000		90.000.000		30.000.000		29.950.000	100,00	99,33		119.950.000	166,67	69,52
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.295.100.000		1.908.308.912						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													93,50	90,63			78,90	106,99
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi
AB KECAMATAN SUNGAISELAN																		
IV		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan Pelayanan melalui Administrasi Perkantoran			4.672.690.000		1.850.258.435		747.130.000		712.708.547	100,00	90,12		2.562.966.982	80,00	47,57
V		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			2.979.880.000,00		303.208.650,00		1.128.658.000,00		1.041.779.097	83,33	89,53		1.344.987.747,00	39,31	60,06
VI		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Meningkatnya disiplin Aparatur			210.500.000		47.700.000		35.400.000		33.750.000	100,00	96,75		81.450.000	66,67	35,80
VII		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			494.800.000		158.240.523		100.000.000		91.474.645	100,00	91,47		249.715.168	94,74	50,47
VIII		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			194.000.000		72.369.800		30.000.000		23.645.000	100,00	74,66		96.014.800	66,67	44,51
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.041.188.000		1.903.357.289						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													96,67	88,51			69,48	47,68
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah
AC KECAMATAN SIMPANGKATIS																		
I		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran			4.206.518.000		1.358.930.973		711.949.000	12	698.487.126	102,42	95,34		1.069.992.218	79,27	40,97
II		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	5	0	181.182.000		0		35.000.000,00		35.000.000	100,00	0,00		0,00	160,00	0,00
III		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		406	0	2.500.780.000		650.666.843		309.491.000,00		297.581.650,00	100,00	86,34		948.248.493,00	80,00	56,84
IV		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	10	0	213.500.000		30.000.000		25.900.000		25.900.000	100,00	100,00		55.900.000	80,00	28,12
V		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	57	OK	494.800.000		88.480.800		100.000.000	30	99.200.000	100,00	99,20	30	187.680.800	157,89	37,93

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (%)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		(12=8+9+10+11)		(13=12/7x100%)		(14 = 6+12)		(15 = 14/5 x 100%)	
VI		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan	35	0	195.000.000		56.419.000		30.000.000	7	28.890.000	100,00	93,32		85.309.000	107,67	40,08
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										349.700.000		345.801.896						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	75,77			117,11	32,59
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah
AD KECAMATAN NAMANG																		
V	1.20.1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	60	Bin	3.453.258.000	24	1.714.703.095		804.576.500	140	789.844.594	100,00	97,99	554	2.504.547.689	79,66	70,92
VI	1.20.1.20.12.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			3.353.180.000		900.633.774		495.676.000	1.003	449.192.750	100,00	94,92		1.334.076.524	92,52	55,35
VII	1.20.1.20.12.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas			170.000.000		62.450.000		31.750.000	48	28.450.000	100,00	92,41	91,50	90.900.000	78,15	61,21
VIII	1.20.1.20.12.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			500.000.000		204.476.800		100.000.000	18	94.824.600	100,00	94,82	48,00	299.301.400	100,00	59,86
IX	1.20.1.20.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan			197.500.000		87.970.800		30.000.000	7	29.998.600	100,00	99,99		117.969.400	76,67	58,51
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.462.002.500		1.392.310.544						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	96,03			85,40	61,17
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah
AE KECAMATAN LUBUK BESAR																		
V		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			3.879.106.000		1.542.959.882		728.660.000		681.292.206	100,00	90,97		2.224.252.088	69,81	51,82
VI		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			2.266.000.000		772.645.382		283.090.000		255.224.260	100,00	86,81		1.027.869.642	65,00	45,11
VII		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas dan perlengkapan penunjang disiplin			227.100.000		82.200.000		40.200.000		40.200.000	100,00	100,00		122.400.000	66,67	56,76
VIII		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			493.000.000		178.397.888		100.000.000		95.973.300	100,00	95,97		274.371.188	83,93	55,65
IX		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketepatan waktu pelaporan			207.000.000		68.541.600		30.000.000	7,00	29.042.000	100,00	93,46		97.583.600	66,67	41,87
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.181.950.000		1.101.731.766						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													100,00	93,44			70,41	50,24
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedang	Sangat Rendah
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN RUTIN OPD KAB. BANGKA TENGAH													100,59	89,03			74,43	58,71
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM KEGIATAN RUTIN OPD KAB. BANGKA TENGAH													Sangat Tinggi	Tinggi			Sedang	Rendah

Disusun
Koba, Januari 2020
KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

drg. MUHAMMAD ANAS MA'RUF
NIP. 19670308 199903 1 002

Disetujui
Koba, Januari 2020
BUPATI BANGKA TENGAH,

Dr. Ir. H. IBNU SALEH, MM

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian Tahun 2021 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Bab ini juga membahas kinerja perekonomian daerah Kabupaten Bangka Tengah berikut dinamika faktor eksternal dan internal.

Berdasarkan gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun prioritas pembangunan, dan pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2021 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

Kerangka Ekonomi Makro pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 memberikan gambaran kondisi ekonomi makro Kabupaten Bangka Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir dengan berbagai indikatornya, untuk selanjutnya menjadi peralatan analisis untuk dijadikan dasar dalam membuat proyeksi perkembangan perekonomian daerah, membandingkan peran masing-masing sektor-sektor ekonomi, dan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. Berbagai indikator tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Laju Inflasi. Sasaran Perekonomian tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan Tahun 2021.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan

pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2021. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2021 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Bangka Tengah.

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bangka Tengah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Tahun 2020

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Meskipun demikian, perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional, bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya. Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan nilai tambah bruto/nilai *output* akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang

merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini terlihat dari perkembangan selama 3 tahun terakhir. Perubahan struktural yang dilakukan pemerintah dengan mendorong perkembangan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri jasa akan memberikan efek pengganda bagi perekonomian.

Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi global yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu segera direspon secara komprehensif.

Tabel III.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (%)

Kategori		2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,18	9,55	4,87	0,66	6,03	6,30
B	Pertambangan dan Penggalian	1,27	0,78	-4,10	-2,42	-3,83	5,64
C	Industri Pengolahan	-16,80	-31,02	2,60	6,59	-1,18	-45,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,99	9,73	11,76	5,67	6,80	20,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,78	8,56	4,81	8,23	-2,69	5,73
F	Konstruksi	4,53	8,56	7,06	3,85	4,57	10,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,38	6,34	5,34	7,48	5,28	3,91
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,07	4,92	4,42	6,78	8,03	1,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,86	7,88	4,12	4,98	7,34	8,98
J	Informasi dan Komunikasi	8,26	7,60	6,20	7,52	10,75	13,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,89	8,06	6,00	2,08	1,40	9,16
L	Real Estate	8,98	6,19	2,11	3,64	3,95	4,98
M,N	Jasa Perusahaan	8,21	6,97	0,22	3,31	5,19	3,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	9,93	9,98	6,01	3,84	8,78	10,95
P	Jasa Pendidikan	9,42	9,06	7,70	5,16	7,26	9,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,24	8,79	6,42	6,88	4,98	9,87
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,95	5,84	5,17	5,93	6,91	8,97
TOTAL		1,50	0,31	3,05	3,46	3,41	1,25

Catatan: *) Angka Sementara

**) Angka Sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020

Selama kurun waktu 2014-2019, pertumbuhan PDRB terendah terjadi di tahun 2015, hal ini disebabkan aktivitas di lapangan usaha industri pengolahan yang mengalami penurunan cukup dalam produksinya. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2014-2015 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sumber pertumbuhan terbesar bagi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah. Akan tetapi, pada tahun 2016-2019, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan bergeser menjadi peringkat kedua dan digantikan oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Pada tahun 2019 sebesar 1,37 persen pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah berasal dari pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor.

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah selama kurun waktu 2014-2019 menunjukkan perlambatan setiap tahunnya dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2016. Pada Tahun 2016 pertumbuhan PDRB naik sebesar 2,74 persen dari beberapa tahun sebelumnya yang mengalami penurunan dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 3,45 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Informasi dan Komunikasi (7,52 persen), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (7,48). Pada Tahun 2019 pertumbuhan PDRB mengalami penurunan menjadi 1,25 persen. Penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan.

Tabel. III.2
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2015 s.d 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi	5,15	2,71	3,18	2,79	1,99	3,16

Sumber : data diolah, 2020

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli konsumen, karena berakibat terhadap ketidakseimbangan antara permintaan dan pendapatan. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam periode waktu yang sama.

Laju inflasi dicerminkan oleh indeks harga yang diturunkan dari penghitungan PDRB yang disebut sebagai PDRB deflator atau dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan. Berbeda dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang menggambarkan tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen, indeks implisit PDRB menggambarkan perkembangan perubahan harga produsen. Untuk kepentingan analisis, indeks implisit lebih sesuai jika disajikan dalam bentuk indeks perkembangan karena menggambarkan perkembangan harga dari waktu ke waktu. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan. Kegiatan koordinasi secara periodik dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menentukan solusi dalam pengendalian inflasi.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2021

Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang saat ini dan yang akan datang, baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Dengan memperhatikan perkembangan internal dan dinamika ekonomi global yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini, perkembangan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu segera direspon secara komprehensif.

Sektor Ekonomi Bangka Tengah tahun 2019 masih di dominasi oleh sektor pertanian, pertambangan, perdagangan dan konstruksi. Berdasarkan hasil kajian KPJU yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2019, kegiatan pariwisata pantai dan pulau menjadi usaha unggulan dengan prospek dan potensi yang tinggi. Selain perikanan, usaha perdagangan eceran/ritel juga masih menjadi usaha yang memiliki prospek yang baik. Bangka Tengah juga memiliki potensi tinggi dalam pengembangan komoditas pertanian terutama pohon aren, lada, bawang merah, cabe besar dan cabe rawit. Sedangkan perkembangan investasi swasta di Bangka Tengah masih di dominasi oleh investasi yang berasal dari dalam negeri (PMDN) dengan pangsa mencapai 92,56% (kumulatif 2015-2019), sedangkan PMA hanya 7,44%. Sektor lapangan usaha tujuan utama investasi PMDN antara lain untuk sektor tanaman pangan

dan perkebunan (kelapa sawit), hotel dan restoran dan industri logam dasar (smelter).

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Bangka Tengah di tahun 2020 dan 2021 tentunya tidak terlepas dari perkembangan lingkungan eksternal Bangka Tengah dan kebijakan perekonomian internasional (global) dan nasional. Sejumlah permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi diantaranya adalah:

- a) Pasca Pandemi COVID-19 telah menciptakan pengangguran secara global dan sektor yang paling berdampak adalah industri makanan, akomodasi, retail, jasa, dan manufaktur bahkan melampaui dampak dari krisis finansial global 2008-2009 (ILO PBB, 2020). Laporan awal IMF April 2020 menyebutkan COVID-19 menghadirkan tantangan ekonomi yang belum pernah dihadapi sebelumnya yang ditandai dengan turunya pertumbuhan ekonomi secara global sebesar 3%. Sektor yang paling berdampak adalah penerbangan, transportasi, hotel dan restoran. Situasi yang serba tidak menentu akan semakin memperparah stabilitas keuangan negara apalagi daerah.
- b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2019 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Terdapat 4 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Bangka Tengah. Jumlah angkatan kerja meningkat memberikan indikasi potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang meningkat. Pengangguran terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Pada Usia 15-19 tahun merupakan kelompok umur yang paling banyak tidak pernah bekerja, hal ini disebabkan sebagian besar berpendidikan rendah tidak sesuai kompetensi dan SMK (fresh graduate) ada yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada Kelompok umur 20-24 Tahun kelompok yang pernah bekerja, hal ini disebabkan adanya penutupan pengolahan industri logam dan pusat perbelanjaan.
- c) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah mengalami perlambatan lebih dalam dari perlambatan Bangka Belitung. Pangsa PDRB Kabupaten Bangka Tengah terhadap PDRB Bangka Belitung rata-rata mencapai sebesar 11% selama tahun 2015-2019. Dimana sektor yang menunjukkan adanya perlambatan di sektor perdagangan dan penurunan nilai di sektor industri

- pengolahan. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah yang masih sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tantangan perekonomian.
- d) Pandemi Covid-19 telah melahirkan dampak sosial-ekonomi yang sangat masif secara global, bukan hanya dari aspek penyakitnya tetapi juga kebijakan yang semestinya ditargetkan untuk mencegah penyebarannya. Misalnya kebijakan pembatasan sosial (*social distancing* dan *physical distancing*) telah membawa implikasi melemahnya sektor informal yang aktivitas ekonominya tidak dimungkinkan untuk segera beradaptasi dengan kebijakan penanganan COVID-19 tersebut.
 - e) Partisipasi swasta dalam pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah masih rendah sehingga perlu peningkatan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas sehingga *public-private partnership* merupakan faktor yang cukup dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tahun 2021 sasaran utama yang harus dicapai Kabupaten Bangka Tengah adalah pemulihan sosial-ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator makro pembangunan. Terdapat 6 (enam) aspek penunjang pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 diantaranya adalah:

- a. Pengendalian Covid-19 secara massif.
- b. Pembukaan akses ekonomi potensial.
- c. Percepatan realisasi APBD/APBN.
- d. Peningkatan digitalisasi UMKM (Uang Digital).
- e. Dukungan dari tingkat likuiditas suku bunga sampai dengan 4%,.
- f. Mendorong daya saing ekspor produk unggulan (CPO Sawit, perikanan, hilirisasi timah), penambahan komoditi unggulan per sector yang menjadi prioritas pembangunan.

Target Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditunjukkan dalam tabel indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel. III.3
Target Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Pembangunan	Target 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,78%
2	PDRB Per Kapita	34.737.355
3	Inflasi	5,97%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,50%
5	Tingkat Kemiskinan	4 %
6	Rata-Rata Lama Sekolah	7 tahun
7	Angka Harapan Hidup	71 tahun
8	Indeks Pembangunan Manusia	71,44

Sumber: RPJMD Kab. Bangka Tengah Tahun 2016-2021

Tabel. III.4
Target Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Pembangunan	Target 2020	Target 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	0,857%	0,856%
2	PDRB Per Kapita (ADHB)	48.368.487	50.562.923
3	PDRB Per Kapita (ADHK)	29.674.661	29.341.963
4	Inflasi	2,09%	2,17%
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,27%	3,88%
6	Tingkat Kemiskinan	6,09	5,82
7	Rata-Rata Lama Sekolah	7,22	7,39
8	Angka Harapan Hidup	71,39	71,54
9	Indeks Pembangunan Manusia	70,89	71,28

Sumber: Data diolah, Tahun 2020

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Penentuan Proyeksi pendapatan di Kabupaten Bangka Tengah berkaitan erat dengan beberapa asumsi, diantaranya :

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2021 diperkirakan sebesar 0,865 %.
2. Tingkat inflasi daerah pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 2,17%;

Tabel. III.5

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bangka Tengah

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Proyeksi/Target pada Tahun 2020	Proyeksi/Target pada Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	Pendapatan asli daerah	97.375.136.679,82	75.995.335.730,86	88.848.500.111,92	96.945.789.000,00	96.945.789.000,00
1.1.1	Pajak daerah	37.355.092.034,70	44.759.932.383,07	48.654.079.807,52	55.718.000.000,00	55.718.000.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	6.206.825.767,00	5.404.147.412,00	6.754.715.564,00	5.810.000.000,00	6.827.000.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.596.392.783,02	4.286.928.630,80	4.389.344.222,36	4.875.000.000,00	4.875.000.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	49.216.826.095,10	21.544.327.304,99	29.050.360.518,04	30.542.789.000,00	29.525.789.000,00
1.2	Dana perimbangan	573.265.595.148,00	638.457.033.565,00	686.141.367.426,00	702.133.749.000,00	674.946.365.000,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	35.725.978.885,00	71.334.514.306,00	98.072.280.463,00	50.633.157.000,00	
1.2.2	Dana alokasi umum	433.037.787.000,00	439.128.449.000,00	463.219.200.000,00	472.902.520.000,00	
1.2.3	Dana alokasi khusus	104.501.829.263,00	127.994.070.259,00	124.849.886.963,00	178.598.072.000,00	
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	103.927.678.102,77	175.944.332.218,92	160.120.086.980,33	201.140.330.000,00	25.561.400.000,00
1.3.1	Hibah	837.000.000,00	24.632.620.000,00	26.409.740.000,00	25.561.400.000,00	
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	46.138.132.102,77	31.192.721.418,92	59.348.897.380,33	60.474.439.000,00	
1.3.4	Dana penyesuaian dan Otonomi khusus	0,00	8.000.000.000,00	10.284.342.000,00	59.911.705.000,00	
1.3.5	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya	10.119.337.000,00	64.970.108.800,00	9.190.962.000,00	0,00	
1.3.6	Dana Desa	46.833.209.000,00	47.148.882.000,00	54.886.145.600,00	55.192.786.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	774.568.409.930,59	890.396.701.514,78	935.109.954.518,25	1.000.219.868.000,00	797.453.554.000,00

Sumber :

*2017-2019 Realisasi Keuangan APBD

*2020 Target APBD

*2021 Proyeksi

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Tabel III.6

Struktur Pendapatan Daerah

PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Pendapatan Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum

(1) DBH; dan

(2) DAU.

b) Dana Transfer Khusus

(1) DAK Fisik; dan

(2) DAK Non Fisik.

2) Dana Insentif Daerah;

3) Dana Otonomi Khusus;

4) Dana Keistimewaan;

5) Dana Desa.

- b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
- b. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan sumber pendapatan daerah yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, seperti Dana Transfer (DAU, DAK, Dana Desa) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati dan bijaksana dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat terlebih lagi dalam

rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi, dengan melihat kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak. Sejalan dengan hal tersebut, upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bangka Tengah akan lebih difokuskan pada upaya:

- 1) Perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi, seperti Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan Pengembangan Teknologi Informasi (TI), terutama peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pemanfaatan sistem informasi yang lebih relevan.
- 3) Pelaksanaan tindak lanjut terhadap pemetaan potensi pajak daerah, sehingga jumlah subjek pajak dan wajib pajak meningkat.
- 4) Penataan dan pengelolaan aset-aset daerah, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan.
- 5) Peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- 6) Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dengan melakukan *reward* terhadap wajib pajak yang taat pajak.
- 7) Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
- 8) Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi.

- 9) Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD.
 - 10) Peningkatan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- e. Meningkatkan peluang investasi dengan adanya pertumbuhan industri-industri dan kenaikan permintaan yang bersifat eksternal di luar wilayahnya sendiri. Maka pertumbuhan industri menggunakan sumber daya lokal dalam rangka ekspor akan menghasilkan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Dalam jangka panjang beberapa faktor yang mendukung dapat meningkatnya peluang investasi, yaitu sumber daya alam, faktor akumulasi modal, faktor sumber daya manusia, organisasi, kemajuan teknologi, pembagian kerja dan skala produksi, pendidikan dan lembaga sosial, kesadaran dan kebiasaan menabung dan berinvestasi, politik dan administratif.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19. Kebijakan belanja daerah tahun 2021,

pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur.

Tabel III.7
Struktur Belanja Daerah

BELANJA DAERAH
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;
d. Belanja Subsidi;
e. Belanja Hibah; dan
f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah;
b. Belanja Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Jalan;
e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
a. Belanja Bagi Hasil;
b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Melihat pertumbuhan belanja lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan sehingga Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SILPA) cenderung tiap tahunnya menurun, maka kebijakan umum pengelolaan belanja daerah pada tahun 2021 ini akan tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya dengan tetap memperhitungkan kemampuan keuangan daerah tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2) Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2021 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19. Disamping itu pengalokasian anggaran tahun 2021 tetap mendanai kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas agenda pembangunan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan RPJMD tahun 2016-2021.

3) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

4) Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi

pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta. Selanjutnya pada tahun 2021 ini alokasi anggaran belanja untuk bidang pendidikan akan tetap dipertahankan minimal sebesar 20% dari total belanja dan alokasi anggaran belanja untuk bidang kesehatan akan dipertahankan minimal sebesar 10% dari total belanja.

5) Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

6) Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

7) Optimalisasi Dana Transfer

Dengan terbatasnya sumber-sumber pendanaan APBD Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, maka pada tahun 2021 akan diupayakan kegiatan-kegiatan yang telah dibiayai dari dana transfer atau melakukan pembiayaan dengan pola *cost sharing* antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini dimaksudkan agar dana yang semula dialokasikan untuk kegiatan yang sama dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan lain yang masih prioritas disamping itu juga untuk mengurangi defisit anggaran tahun 2021.

8) Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Setiap pengalokasian anggaran belanja dalam APBD tahun 202 tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga seluruh alokasi anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran.

9) Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan propinsi

Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Tabel. III.8
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Proyeksi/ Target pada Tahun 2020	Proyeksi/ Target pada Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.1	BELANJA DAERAH					
2.1.1	Belanja Operasi					
2.1.1.1	Belanja pegawai	335.961.710.029,00	343.965.103.280,00	381.924.680.855,00	434.218.085.000	362.100.239.000,00
2.1.1.2	Belanja barang	183.464.765.610,00	182.845.096.339,40	215.587.794.238,48	233.880.473.500,00	413.116.076.000,00
2.1.1.3	Belanja bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	Belanja subsidi	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
2.1.1.5	Belanja hibah	21.283.834.050,00	49.509.136.000,00	31.291.737.841,00	49.678.534.500,00	
2.1.1.6	Belanja bantuan sosial	1.736.674.349,00	1.966.907.159,00	2.235.509.975,00	3.000.000.000,00	
2.1.1.7	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	1.815.507.000,00	5.304.700.000,00	6.152.800.000,00	6.152.800.000,00
2.1.1.8	Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	95.836.448.827,00	97.734.403.650,00	111.085.248.387,00	109.357.307.000,00	109.357.307.000,00
2.1.2	Belanja Modal	133.785.470.433,38	191.736.832.391,42	158.207.344.738,92	195.131.370.000,00	

2.1.3	Belanja tidak terduga	185.820.000,00	2.000.000,00	244.808.375,00	2.050.000.000,00	10.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	772.254.723.298,98	867.759.478.819,82	901.077.124.410,40	1.033.968.570.000,00	900.726.422.000,00

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu di bayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu dan dari hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan penyertaan modal oleh pemerintah, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Sumber penerimaan pembiayaan tahun 2021 berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Pada tahun anggaran 2021 arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bangka Tengah akan melakukan pengeluaran penyertaan modal (investasi) pada BUMD yaitu Bank Sumsel Babel dalam rangka dukungan pengembangan kepada Bank Pemerintah Daerah.

Tabel III.9
Struktur Pembiayaan Daerah

PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel. III.10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2017 s.d Tahun 2021

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Proyeksi/ Target pada Tahun Rencana 2020	Proyeksi/ Target pada Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	5.771.065.462,22	8.084.752.093,83	27.906.467.788,79	33.748.702.000,00	27.910.874.000,00
3.1.2	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.771.065.462,22	8.084.752.093,83	27.906.467.788,79	33.748.702.000,00	27.910.874.000,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		5.771.065.462,22	7.084.752.093,83	26.906.467.788,79	33.748.702.000,00	25.910.874.000,00

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN”. Selanjutnya, pada ayat (4) dinyatakan bahwa, “RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, maka untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021, mengacu dan berpedoman pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021;
- b. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021;
- c. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;
- d. Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, dan Isu-isu strategis yang ada.
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021.
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap Dinamika dan Realita kondisi umum daerah Kabupaten Bangka Tengah.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang menjadi dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025. Pembangunan Daerah Tahun 2021 adalah bagian dari tahap IV (2017-2022) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan pada tahap IV ini adalah **“Meningkatnya Ekonomi Daerah dan Terpenuhinya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).”**
2. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2014-2034 Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, tujuan penataan ruang provinsi yaitu **“Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agri-Bahari untuk Menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk Menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan”**, maka pembangunan Daerah tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Pemantapan Sistem Perkotaan
 - b. Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah
 - c. Rencana Pola Ruang
 - d. Perwujudan Kawasan Strategis
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Tahun 2021 merupakan tahun keempat dari RPJMD Tahun 2017-2022.
4. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah
Dinamika dan realita kondisi umum daerah tercakup dalam hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dan capaian kinerja tahun-tahun yang direncanakan dalam RPJMD periode sebelumnya. Kesenjangan antara realita, capaian dan target kinerja menjadi permasalahan yang kemudian dirumuskan sebagai isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani pada Tahun 2021 sebagai pertimbangan dalam penentuan tema RKPD tahun 2021.
Adapun isu strategis Kabupaten Bangka Tengah tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Isu Ekonomi
 - Ketergantungan terhadap komoditas pangan dari luar masih tinggi
 - Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah

- Meningkatnya angka pengangguran
- Tingkat investasi masih rendah
- b. Isu Infrastruktur dan Konektivitas
 - Pengembangan transportasi laut dan udara untuk mendukung pengendalian inflasi
 - Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas
 - Belum ditetapkannya Perda RZWP3K
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi yang layak di kawasan regional
- c. Isu Sumber Daya Manusia
 - Tingkat pendidikan SDM masih rendah
 - Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
- d. Isu Kesehatan
 - Tingginya prevalensi Stunting
 - Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas
 - Cakupan jaminan pelayanan kesehatan masih rendah
- e. Isu Tata Kelola Pemerintah dan Pembangunan Demokrasi
 - Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
- f. Isu Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
 - Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah
 - Mitigasi kesiapsiagaan bencana belum berjalan

5. Rencana Kerja Pemerintah Nasional Tahun 2021

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Sampai dengan Rancangan RKPD ini disusun, Rancangan RKP 2021 mengangkat tema **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”**.

Penyusunan RKP dengan prinsip *money follows* program menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan

secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

- Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga.
- Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sector pembangunan dan jenjang pemerintahan.
- Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

RKP menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas dan terutama dengan telah dimuatnya tema prioritas pembangunan Tahun 2021 dalam RPJMD 2017-2022, maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2021 adalah **“Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Dasar”**.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Agar tercapainya Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPJMD 2017-2022 untuk Tahun 2021.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;
2. Pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
3. Pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
4. Penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2021. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, yaitu:

1. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
2. Pembangunan Agropolitan.
3. Pengembangan Pariwisata.
4. Pembangunan Bahari.
5. Pembangunan Pendidikan.
6. Pembangunan Kesehatan.

Prioritas daerah tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;

- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022;
- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada Tahun 2021;
- 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Tabel IV.1.
Keselarasan antara Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan	No.	Sasaran Pembangunan
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat.	1.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan.
			2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran.
			3.	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
			4.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
2.	Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Pembangunan Agropolitan.	1.	Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pertanian berbasis Masyarakat.
		Pembangunan Bahari.	2.	Meningkatkan Nilai Tambah sektor Perikanan berbasis masyarakat.
		Pembangunan Pariwisata.	3.	Meningkatkan Nilai Tambah Sektor Pariwisata berbasis masyarakat.
3.	Peningkatan SDM.	Pembangunan Pendidikan.	1.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.
		Pembangunan Kesehatan.	2.	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.
4.	Revolusi Mental dan Kebudayaan.			

5.	Memperkuat Infrastruktur.			
6.	Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.			
7.	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.			

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2016-2021

Berdasar pada visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005–2025; visi pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 pada dasarnya merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah selama kurun waktu 2016-2021 adalah: **“TERWUJUDNYA NEGERI SELAWANG SEGANTANG YANG AMANAH, BERSIH, BERWIBAWA, DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN EKONOMI KERAKYATAN”**.

Penjelasan terhadap penjabaran visi tersebut adalah merupakan akumulasi rumusan dari berbagai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan berlangsung sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Hal tersebut tidak lain dalam rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera dengan menerima manfaat sebesar-besarnya dari pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Kabupaten Bangka Tengah akan melaksanakan sistem pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran daerah, serta kesejahteraan masyarakat secara merata dan adil. Hasil kajian bersama semua pihak atau pelaku pembangunan (*stakeholders*) di Kabupaten Bangka Tengah, ditambah analisis kondisi dan potensi daerah maka harapan yang ingin diwujudkan pada masa mendatang dituangkan dalam bentuk **Visi Pembangunan** Kabupaten Bangka Tengah tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. **Negeri Selawang Segantang yang sejahtera** berarti mewujudkan suatu keadaan masyarakat Bangka Tengah yang memiliki mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang memadai, yaitu minimal yang mencukupi kebutuhan hidup primer dan sekunder, termasuk untuk pendidikan generasi penerus, serta mempunyai hubungan yang harmonis di dalam keluarga dan di dalam masyarakat.
2. **Pemerintahan yang amanah, bersih dan berwibawa** adalah pemerintahan yang memiliki pemimpin yang jujur dan mewujudkan masyarakat yang memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitasnya secara aman, tertib dan damai.
3. **Ekonomi Kerakyatan** mencerminkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UMKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif.

Visi dan misi pembangunan daerah sesungguhnya merupakan untaian harapan masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Harapan dapat diraih manakala visi dan misi bukan utopia, namun harus realistis sesuai situasi dan kondisi daerah yang sudah, sedang terjadi dan kecenderungan perkembangan masa depan, maka RKPD Tahun 2021 yang merupakan penjabaran tahun keempat Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah merupakan tahapan pembangunan yang penting guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Tabel IV.1 menunjukkan hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Tabel IV.2.
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah

Visi : Terwujudnya Negeri Selawang Segantang Yang Amanah, Bersih, Berwibawa, dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan			
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif berlandaskan IMTAQ	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Peningkatan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan

			anak
2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK	Meningkatnya perekonomian Kabupaten Bangka Tengah	Peningkatan taraf hidup dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
3	Meningkatkan sarana dan prasarana publik untuk mamacu percepatan pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata	Tercapainya infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas jalan Meningkatnya akses air bersih dan air limbah yang memadai Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air baku Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten
4	Mewujudkan lingkungan yang aman, asri dan lestari serta berkelanjutan	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penanggulangan Bencana yang Handal	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan terbuka	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Terciptanya birokrasi pemerintah (good governance) yang profesional, terintegrasi, berkarakteristik, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN
		Meningkatnya kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa
		Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Terwujudnya sistem inovasi dan informasi pelayanan publik

Pada Tahun 2021 sasaran utama yang harus dicapai Kabupaten Bangka Tengah adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan.

Target Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditunjukkan dalam tabel indikator kinerja utama sebagai berikut:

Tabel IV.3.
Target Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Realisasi 2019	Target 2021
1	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,33	71,28
2	Meningkatnya perekonomian Kabupaten Bangka Tengah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,25	0,856
3	Tercapainya infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas	Persentase peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana	73,70%	81,5%
4	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penanggulangan Bencana yang Handal	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,83%	57,03
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	71	73
6	Meningkatnya kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa	Klasifikasi status desa (Desa Maju)	20	30
		Klasifikasi status desa (Desa Berkembang)	36	26
7	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEK	SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	15 sistem	15 sistem
		Rata-rata survey kepuasan Masyarakat	80%	80%

Sumber : LKPJ Kab. Bangka Tengah Tahun 2019, RPJMD Kab. Bangka Tengah Tahun 2016-2021

Tabel IV.4.
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 dan
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	NO.	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2021
1	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,13	7,39 tahun
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Angka Harapan Hidup	71,16	71,54 tahun
			Peningkatan kesejahteraan masyarakat	3	PDRB perkapita	29.995.189	29.341.963
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,05%	92,10%
2	Meningkatnya perekonomian Kabupaten Bangka Tengah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan taraf hidup dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	5	Laju pertumbuhan ekonomi	1,25%	0,856%
				6	Indeks Gini (Kesejahteraan)	0,265	0,24
				7	Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,435	0,40
				8	Nilai Tukar Petani	87,73	102,5
				9	Nilai Tukar Nelayan	116	108
				10	Pola Pangan Harapan	90	92
				11	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	106	104,5

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	NO.	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2021
				12	PDRB Sektor Pariwisata	325.749.000.000	373.911.000.000
3	Tercapainya infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas	Persentase peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana	Meningkatnya kualitas jalan	13	Persentase Jalan Kabupaten Baik dengan Kecepatan rata-rata 60 Km/Jam	73,70%	81,50%
			Meningkatnya akses air bersih dan air limbah yang memadai	14	Persentase penduduk berakses air minum	82,08%	86,37%
				15	Persentase penduduk yang memiliki sistem air limbah yang memadai	92,33%	93,09%
			Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air baku	16	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	93,70%	96,88%
			Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	17	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	80,27%	80,30%
4	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,83	57,03
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Terciptanya birokrasi pemerintah (good governance)	19	Indeks Reformasi Birokrasi	71	73

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	NO.	INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2021
			yang profesional,				
			terintegrasi, berkarakteristik, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	20	Persentase pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah	9,1%	9,2
6	Meningkatnya kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa	Klasifikasi status desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	21	Indeks Desa Membangun		
					a. Jumlah Desa Maju	20	30
					b. Jumlah Desa Berkembang	36	26
7	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEK	SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	Terwujudnya sistem inovasi dan informasi pelayanan publik	22	Sistem informasi manajemen Pemda yang dikembangkan	15 sistem	15 sistem
		Rata-rata survey kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23	Rata-rata survey kepuasan Masyarakat	80%	80%

Sumber : Realisasi 2019 LKPJ Kab. Bangka Tengah Tahun 2020, Target 2021 RPJMD Kab. Bangka Tengah Tahun 2016-2021.

4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Penyusunan RKP 2021 dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar Kementerian/Lembaga (K/L), provinsi, kabupaten/kota; dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta upaya pemanfaatan Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA).

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”**, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2021, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi secara Nasional berkisar 4,5 - 5,5 persen.
2. Inflasi secara Nasional berkisar antara 3 persen.
3. Tingkat Kemiskinan berkisar 9,2 – 9,7 persen.
4. IPM menjadi 72,78 – 72,90.
5. Gini Rasio pada kisaran 0,377 – 0,379.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka 7,5 – 8,2 persen.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Adapun penyelarasan target sasaran makro pembangunan nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel IV.5. di bawah ini.

Tabel IV.5.
Target Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
dan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

Indikator	Target Tahun 2021		
	Nasional	Provinsi Kep.Babel	Kab. Bangka Tengah
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5	4,00-4,45	0,856
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2-9,7	5,30	5,82
Tingkat Pengangguran (%)	7,5-8,2	4,78	3,88
Gini Ratio	0,377-0,379	0,255-0,250	0,24
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,78-72,90	70,57	71,28
Laju Inflasi(%)	3	4	2,17

Sumber : data diolah, 2020

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap RPJMN mempengaruhi pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak besar terhadap pembangunan nasional, selain berpengaruh kepada pembangunan nasional khususnya dalam RPJMN 2020-2024, wabah virus corona jenis baru ini, juga membuat pemerintah harus mengoreksi sasaran ekonomi yang menurun tajam tahun 2020. Kondisi ekonomi ini, juga memberikan pengaruh pada kinerja tahun 2021. Dampak lainnya, berkurangnya pembiayaan pembangunan pada tahun 2020-2021 akibat pengalihan pembiayaan pembangunan yang digunakan untuk penanganan Covid-19

Target sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Dokumen RKPD Tahun 2021 sebagai dokumen rencana tahunan, diarahkan untuk mencapai target dari sasaran tersebut.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Bangka Tengah baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Peningkatan SDM.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur.
6. Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain mendukung pencapaian 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut di atas, terdapat 6 (enam) Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 yang juga harus diperhatikan yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Masyarakat.
2. Pembangunan Agropolitan.
3. Pengembangan Pariwisata.
4. Pengembangan Bahari.
5. Pembangunan Pendidikan.
6. Pembangunan Kesehatan.

Pemilihan prioritas daerah dan penyelarasan terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dimaksudkan agar di dalam implementasinya dapat lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun *stakeholder* lainnya.

Dengan memperhatikan pentahapan pembangunan RPJMD keempat 2016-2021 serta realisasi pembangunan tahun 2019 dan perkiraan pencapaian tahun 2021, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Bangka tengah Tahun 2021 adalah: **“Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan Dasar”**. Dengan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi.
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia.
3. Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

Sinkronisasi antara penetapan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu-isu strategis yang diuraikan dalam Bab II yaitu dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel IV.6.
Sinkronisasi Isu Strategis Daerah dengan Prioritas Pembangunan
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

No.	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kestabilan pertumbuhan ekonomi. - Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. - Peningkatan pelayanan dan pengelolaan pasar tradisional. - Angka pengangguran tinggi. 	Pertumbuhan Ekonomi
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Stunting. - Peningkatan kualitas pendidikan. - Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. - Tingginya angka penggunaan NAPZA. 	Pembangunan Sumber Daya Manusia
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya database perencanaan pembangunan yang terintegrasi secara spasial. - Minimnya ketersediaan air bersih di kawasan pesisir. - Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (TPA). - Kurangnya sarana dan prasarana transportasi antar pusat kegiatan. 	Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan.
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan publik. - Teknologi tepat guna, inovasi, dan daya saing. - Penanganan pasca panen. 	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.

Tabel IV.7.
Penyelarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi,
Prioritas Daerah Tahun 2021

No.	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi Masyarakat.	Pertumbuhan Ekonomi.
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Pembangunan Agrolitan.	Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan.
		Pembangunan Bahari.	
		Pengembangan pariwisata.	
3.	Peningkatan SDM.	Pembangunan Pendidikan.	Pembangunan Sumber Daya Manusia.
		Pembangunan Kesehatan.	
4.	Revolusi Mental dan Kebudayaan.		
5.	Memperkuat Infrastruktur.		Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan.
6.	Lingkungan Hidup dan Perubahan iklim.		
7.	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.		Peningkatan Kinerja Pelayanan Pemerintah.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Kabupaten, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021;

- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada Tahun 2021;
- 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Guna mencapai program prioritas pembangunan tersebut, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan Bangka Tengah, yaitu :

1. Peningkatan kualitas pembangunan manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan dasar;
2. Peningkatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur guna mendukung pengembangan wilayah;
4. Meningkatkan produktivitas pangan, mewujudkan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan;
5. Pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*).

Adapun strategi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan serta memperluas kesempatan kerja dalam upaya pencapaian SPM dan penciptaan lapangan kerja dengan memperhatikan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja, mendorong adanya inovasi dan terobosan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan; mengendalikan laju pertumbuhan penduduk; meningkatkan kualitas

- hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; Peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, mendukung gerakan masyarakat hidup sehat dan mendukung percepatan penurunan stunting, penanganan PMKS; kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; mengembangkan budaya baca masyarakat; melestarikan nilai-nilai budaya daerah; meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemudaan dan olahraga; serta menerapkan hasil litbang dan iptek.
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; kualitas jaringan irigasi dan ketersediaan air baku; mengembangkan hasil hutan rakyat; meningkatkan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM; realisasi investasi, serta potensi dan daya tarik wisata.
 4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah serta meningkatkan sistem penataan ruang wilayah.
 5. Mendukung upaya pelaksanaan rencana aksi daerah pangan dan gizi melalui pilar: perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kelembagaan pangan dan gizi.
 6. Mengendalikan alih fungsi hutan dan lahan produktif; rehabilitasi hutan dan lahan; meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH); mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati, serta upaya penanggulangan bencana.
 7. Meningkatkan akuntabilitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan; aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah.

Tabel IV.8.
Sinkronisasi Arah Kebijakan dan Strategi RKPD 2021 terkait dengan RPJMD 2016-2021

NO	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Strategi RPJMD	Strategi RKPD 2021
1	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan terjangkau bagi anak-anak dari golongan tidak mampu serta bantuan siswa miskin. - Meningkatkan sanitasi total berbasis masyarakat. - Meningkatkan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. - Meningkatkan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS. 	<p>Peningkatan kualitas pembangunan manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan dasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan pendidikan yang merata dan berkeadilan. - Peningkatan pelayanan kepada masyarakat miskin yang dirujuk. - Mengurangi permasalahan sosial dan melalui pemberian pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting, serta memperluas kesempatan kerja dalam upaya pencapaian SPM dan penciptaan lapangan kerja dengan memperhatikan kualitas dan ketrampilan tenaga kerja, mendorong adanya inovasi dan terobosan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan; mengendalikan laju pertumbuhan penduduk; meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; Peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, mendukung

NO	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Strategi RPJMD	Strategi RKPD 2021
				gerakan masyarakat hidup sehat dan mendukung percepatan penurunan stunting, penanganan PMKS; kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; mengembangkan budaya baca masyarakat; melestarikan nilai-nilai budaya daerah; meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemudaan dan olahraga; serta menerapkan hasil litbang dan iptek.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (penyuluh) pertanian, perkebunan, perikanan dll. - Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan tanaman serta teknologi komoditi unggulan. - Meningkatkan peran serta masyarakat serta kemampuan untuk meningkatkan produktifitas pada sektor-sektor unggulan. - Peningkatan fungsi dan peran balai penyuluhan pertanian, perkebunan dan perikanan. 	<p>Pemulihan ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;</p> <p>Peningkatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan dan pengembangan destinasi wisata. - Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar stakeholder usaha mikro kecil dan menengah dengan pengusaha besar. - Memberikan dukungan pembiayaan usaha dan formalisasi usaha bagi pelaku ekonomi. - Meningkatkan kontribusi dan berkembangnya koperasi dan UMKM. - Optimalisasi daya dukung potensi pariwisata yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan dan penguatan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan; kualitas jaringan irigasi dan ketersediaan air baku; mengembangkan hasil hutan rakyat; meningkatkan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM; realisasi investasi, serta potensi dan daya tarik wisata - Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,

NO	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Strategi RPJMD	Strategi RKPD 2021
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja. - Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, keberlanjutan usaha pengolahan hasil kelautan serta perikanan bagi kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan. - Fasilitasi dan mediasi antara pelaku usaha Kabupaten Bangka Tengah dengan investor. - Pembentukan dan penguatan media promosi dan kajian serta penelitian dari hulu ke hilir sektor unggulan di Kabupaten Bangka Tengah. - Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan sertifikasi halal, HKI, dan standarisasi internasional dalam produksi. - Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM. 		<p>berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan produktifitas sektor-sektor komoditi unggulan di seluruh Kabupaten Bangka Tengah 	<p>peternakan dan perikanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas jaringan irigasi dan ketersediaan air baku. - Mengembangkan hasil hutan rakyat. - Meningkatkan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM; realisasi investasi, serta potensi dan daya tarik wisata.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan drainase serta 	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur guna mendukung pengembangan wilayah;	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan 	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur dalam mendukung pengembangan wilayah serta meningkatkan

NO	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Strategi RPJMD	Strategi RKPD 2021
	<p>utilitas umum lainnya melalui pembangunan dan peningkatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penataan kawasan kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau. - Pembangunan dan peningkatan berdasarkan pusat kegiatan wilayah promosi, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan, penataan kawasan permukiman. - Pengembangan kerjasama daerah dengan swasta dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika serta pembangunan basis data kewilayahan. 		<p>penyediaan database profil wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar perdesaaan. - Meningkatkan infrastruktur serta ulilitas umum yang nyaman, berkualitas dan merata sesuai dengan perencanaan. 	<p>sistem penataan ruang wilayah.</p>
4	<p>Optimalisasi penerapan teknologi peningkatan produksi pertanian peternakan, perkebunan, perikanan, tanaman pangan.</p>	<p>Meningkatkan produktivitas pangan, mewujudkan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan</p>	<p>Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penerapan teknologi budidaya pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, tanaman pangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung upaya pelaksanaan rencana aksi daerah pangan dan gizi melalui pilar: perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan,

NO	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Strategi RPJMD	Strategi RKPD 2021
				peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kelembagaan pangan dan gizi.
5	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversi sampah menjadi energi dengan teknologi yang ramah lingkungan. - Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. - Mendorong peningkatan kualitas lingkungan baik udara, tanah dan air melalui berbagai instrumen pengendalian dan peningkatan ruang terbuka hijau. - Optimalisasi peran kawasan yang berfungsi lindung guna mengantisipasi atau mitigasi bencana yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. 	Pencegahan, penanggulangan bencana alam dan non alam serta pengendalian kerusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi pelaksanaan sistem penanggulangan bencana. - Pengendalian pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengendalikan alih fungsi hutan dan lahan produktif. - Rehabilitasi hutan dan lahan. - Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). - Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. - Meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati, serta upaya penanggulangan bencana.
6	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat pengawasan internal secara berkala atas implementasi kebijakan formasi dan sistem ketatalaksanaan di setiap Perangkat Daerah. 	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>) dan baik (<i>good governance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan publik. - Meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dalam penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akuntabilitas, kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. - Aksi pencegahan dan

NO	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RKPD 2021	Strategi RPJMD	Strategi RKPD 2021
	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengelolaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. - Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan. - Meningkatkan standar kualitas pelayanan Perangkat Daerah. - Pelayanan jaringan dan peningkatan penggunaan teknologi informasi di area publik menuju smart city dan tersedianya infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika. 		pembangunan. - Meningkatnya Kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.	pemberantasan korupsi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah. - Kualitas pelayanan publik. - Pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah.

Sumber: RPJMD Kab. Bangka Tengah Tahun 2016-2021

Tabel IV.9.
Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

NO	Standar Pelayanan Minimum	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator Program / Outcome	Target	
1	Bidang Pendidikan					Dinas Pendidikan
	Pendidikan Anak Usia Dini	- Peningkatan upaya pembangunan manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dan peningkatan pelayanan dasar.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase APK PAUD	100%	
	Pendidikan Dasar			Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	950	
				Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	700	
				persentase SD berakreditasi minimal B	95%	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase SMP berakreditasi minimal B	70%	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru dengan kualifikasi S1/D4 SD/MI	87%	
				Persentase guru bersertifikat SD/MI (65%)		
				Persentase Guru dengan kualifikasi S1/D4 SMP/MTs	92%	
				Persentase guru bersertifikat SMP/MTs	60%	
	Pendidikan Kesetaraan			Persentase Angka Buta Aksara	0,1%	
2	Bidang Kesehatan					Dinas Kesehatan

NO	Standar Pelayanan Minimum	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator Program / Outcome	Target	
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Peningkatan upaya pembangunan manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan dasar.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 KH	44 / 100.000 KH	
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin			Cakupan neonatus yang ditangani	100%	
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			Menurunnya Angka Kematian Balita per 1.000 KH	4 / 1.000 KH	
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			Cakupan pelayanan kesehatan pada lansia	65%	
	Pelayanan kesehatan pada penderita penyakit menular			Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB ditangani <24 jam	100%	
3	Bidang Pekerjaan Umum					DPUTRP
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Peningkatan upaya pembangunan manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan dasar.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Tersedianya akses air bersih yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan	77%	

NO	Standar Pelayanan Minimum	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator Program / Outcome	Target	
				jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari.		
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Peningkatan upaya pembangunan manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan dasar.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Tersedianya akses air bersih yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari.	77%	
4	Bidang Perumahan Rakyat					DIPERKIM HUB
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda	Peningkatan upaya pembangunan manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan dasar.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatkan jumlah rumah layak huni diareal permukiman yang tersedia PSU	97%	
				Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	89%	
5	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					SatpolPP BPB-Kesbangpol

NO	Standar Pelayanan Minimum	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator Program / Outcome	Target	
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan upaya pembangunan manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan dasar.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio Pos siskamling per jumlah desa / kelurahan	3 :1	
				Cakupan penegakan Perda/perkada	92%	
				Rasio Anggota Linmas	0,82%	
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) wilayah manajemen penanggulangan bencana	94%	
			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) wilayah manajemen kebakaran	80%	
6	Bidang Sosial					Dinsospmd
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Peningkatan upaya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Cacat dan Eks trauma, Lansia Tuna sosial, Eks Narkoba dan Narapidana yang menerima bantuan		
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti					
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar					

NO	Standar Pelayanan Minimum	RKPD 2021				
		Arah Kebijakan	Program	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator Program /Outcome	Target	
	panti	pembangunan manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan dasar.		sosial	6,25%	
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti					
	Perlindungan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Sosial	100%	
				Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Alam	100%	

Tabel IV.10.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Kep. Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021

No	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021	Program	Indikator	OPD
1	Peningkatan SDM	Pembangunan Pendidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI. Persentase APK PAUD. Persentase Guru S1 PAUD. Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs. Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP. Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP /MTs. Persentase APK SMP.	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021	Program	Indikator	OPD
					Persentase APM SMP. Persentase APS SD.	
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase APS SD. Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Ditetapkan.	Dinas Pendidikan
					Persentase Angka Buta Aksara Persentase AptS SD/MI dan SMP/MTs	Dinas Pendidikan
				Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru dengan kualifikasi S-1/D4 SD/MI dan SMP/MTs Persentase Guru bersertifikat SD/MI dan SMP/MTs	Dinas Pendidikan
					Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI dan SMP/MTs Persentase Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Persentase SD dan SMP berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan
				Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan	DKP
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pembinaan terhadap pemahaman dan pengamalan agama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing	Setda
	Revolusi Mental dan Kebudayaan.			Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Gelar Festival Seni Budaya	Dinbudparpora
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Benda Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Dinbudparpora
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan ormas, suku, agama dan sekolah yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan	Bakesbangpol
				Program	Persentase Organisasi Masyarakat (ORMAS)	Bakesbangpol

No	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021	Program	Indikator	OPD
				Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	aktif	
				Rogram Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotika	Bakesbangpol
2	Peningkatan SDM	Pembangunan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase penggunaan obat rasional	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan yang dibiayai Pemda	Dinas Kesehatan dan RSUD
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan gizi	Dinas Kesehatan
					Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat	Dinas Kesehatan
					Persentase desa /kelurahan yang mengalami KLB ditangani 24 jam	Dinas Kesehatan
					Jumlah PKM non rawat inap dan rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan dan

No	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021	Program	Indikator	OPD
						RSUD
					Jumlah PKM yang memberikan pelayanan sesuai standar termasuk PKM rawat inap	Dinas Kesehatan
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Kelas Rumah Sakit	Dinas Kesehatan (RSUD)
					Persentase Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	Dinas Kesehatan (RSUD)
					Persentase peserta JKN yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan standar	Dinas Kesehatan dan RSUD
					Cakupan pelayanan kesehatan pada anak balita	Dinas Kesehatan
					Cakupan pelayanan kesehatan pada lansia	Dinas Kesehatan
					Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	Dinas Kesehatan
					Persentase ibu melahirkan mendapatkan pelayanan persalinan	Dinas Kesehatan
					Cakupan neonatus yang ditangani	Dinas Kesehatan
					Jumlah terselenggaranya Pelayanan dan Pendukung Pelayanan yang bermutu	Dinas Kesehatan (RSUD)
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah kegiatan olahraga	Dinbud parpora
				Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase penggunaan alat dan obat kontrasepsi di masyarakat	DPPKBPPPA

No	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021	Program	Indikator	OPD
					Persentase pendewasaan usia pernikahan dini	DPPKBPPPA
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase penggunaan alat dan obat kontrasepsi di masyarakat	DPPKBPPPA
					Persentase capaian pelaksanaan program KB, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga	DPPKBPPPA
					Persentase capaian pelaksanaan program pengendalian penduduk	DPPKBPPPA
					Persentase penggunaan alat dan obat kontrasepsi di masyarakat	DPPKBPPPA
					Persentase capaian keanggotaan masyarakat dalam kelompok bina keluarga	DPPKBPPPA
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan yang terbangun/tertata	DIPERKIM HUB
				Program pemberdayaan sosial	Tersedianya data PMKS dan PSKS	Disospmd
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Cacat dan Eks trauma, Lansia, Tuna sosial, Eks Narkoba dan Narapidana yang menerima bantuan sosial	Disospmd
					Persentase Jenis PSKS yang menerima bantuan	Disospmd
				Program Perlindungan	Persentase Bencana yang ditangani	Disospmd

No	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021	Program	Indikator	OPD
				dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan bantuan Keluarga Sangat Miskin	
2	Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Pembangunan Agropolitan.	Pembangunan Infrastruktur kewilayahan	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Kualitas Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	DPUTRP
	Memperkuat Infrastruktur.			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang	DPUTRP
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik	DPUTRP
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Produktifitas Pertanian	Diperta
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya Luas lahan pertanian	Diperta
				Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Bappelitbangda
				Program Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Bappelitbangda
		Pembangunan Bahari		Program Pengelolaan	Jumlah produksi perikanan tangkap	Diperkan

No	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021	Program	Indikator	OPD
				Perikanan Tangkap		
				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase pelaku usaha yang taat aturan %	Diperkan
		Pembangunan Pariwisata		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase DTW Primer yang dikelola sesuai standar	Dinbudparpora
				Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Dinbudparpora
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Bangka Tengah	Dinbudparpora
3	Memperkuat Ketahanan Ekonomi.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat.	Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Produktifitas Pertanian	Diperta
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya Luas lahan pertanian	Diperta
				Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Bappelitbangda
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Diperkan
				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase pelaku usaha yang taat aturan %	Diperkan

No	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021	Program	Indikator	OPD
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pendapatan Pembudidaya Ikan(Rp Juta/Orang/Bulan)	Diperkan
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Konsumsi Ikan Segar & Konsumsi Olahan Hasil Perikanan	Diperkan
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Populasi Ternak Sapi, Kambing Dan Itik	Diperta
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan	Dispang
				Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Jumlah Penyuluh Pertanian	Dispang
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Disperindagkop UKM
				Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase KSP dengan kategori sehat	Disperindagkop UKM
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Pertumbuhan omset UMKM	Disperindagkop UKM
				Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas (Menjadi Usaha Kecil)	Disperindagkop UKM
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan omset Pasar	Disperindagkop UKM
				Program Stabilisasi Harga Barang	Indeks Harga Konsumen	Disperindagkop UKM

No	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021	Program	Indikator	OPD
				Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan industri pengolahan bidang pangan	Disperindagkop UKM
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Indeks pemenuhan data industri melalui SIINAS	Disperindagkop UKM
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	DPMPTK
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	DPMPTK
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase Pencari Kerja yang ditempatkan	DPMPTK
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi	DPMPTK
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor PMDN	DPMPTK
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang dikeluarkan tepat waktu (sesuai SOP)	DPMPTK
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi	DPMPTK
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan	DPMPTK
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Sektor andalan kebijakan daerah	SETDA

No	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021	Program	Indikator	OPD
	Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	DLH
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan RKL-RPL Hasil pengujian kualitas pencemaran air, udara, dan tanah	DLH
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Jumlah pembangunan RTH publik Jumlah RTH yang dikelola dalam kondisi baik	DLH
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan	DLH
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah penghargaan dibidang lingkungan hidup	DLH
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase tindak lanjut kasus lingkungan	DLH
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penyediaan sistem pengangkutan sampah di perkotaan Persentase penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Terbentuknya kelembagaan bank sampah di desa dan kelurahan	DLH

No	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021	Program	Indikator	OPD
				Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Jumlah desa disekitar TAHURA yang dilakukan pengamanan	DLH
5	Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.		Peningkatan kinerja penyelenggaraa n pemerintah Aparatur Pemerintah Daerah.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah/ Nilai LPPD	SETDA
				Program Administrasi Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	SETDA
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen penganggaran SKPD yang sesuai dengan pedoman penyusunan penganggaran	BPKAD
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah	BPPRD
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	terselenggaranya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	SETWAN
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase perangkat daerah dan desa yang mempunyai temuan pengelolaan keuangan dan aset yang tidak material di wilayah IRBAN	Inspektorat
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya Pelayanan Publik yang sesuai dengan SOP	Kecamatan
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah tugas urusan pemerintah umum yang diselenggarakan	Kecamatan

No	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021	Program	Indikator	OPD
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi	Kecamatan
				Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Kepegawaian Daerah	BKPSDM
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dengan dokumen Renstra, Renja PD	Bappelitbangda
				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	Dindukcapil
				Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Dindukcapil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Akurasi Data Kependudukan	Dindukcapil
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	administrasi pemerintahan desa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,	Dinsospmd
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rasio Pos siskamling per jumlah desa / kelurahan Cakupan penegakan Perda/perkada Rasio Anggota Linmas	SATPOLPP
				Program Penanggulangan Bencana	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) wilayah manajemen penanggulangan bencana	BPBD
				Program Penanggulangan Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) wilayah manajemen kebakaran	SATPOLPP
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase Penyelenggaraan Arsip secara Baku	DKP
				Program Perlindungan	Persentase Arsip yang terselamatkan	DKP

No	Prioritas Nasional RKP 2021	Prioritas Prov. Kep. Bangka Belitung RKPD 2021	Prioritas Kab. Bangka Tengah RKPD 2021	Program	Indikator	OPD
				Dan Penyelamatan Arsip		
				Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Tersebar nya Jangkauan Informasi Pemabangunan Kabupaten Bangka Tengah Kepada Seluruh Masyarakat, serta Terpelihanya Peralatan Radio	Diskominfoستا
				Program Aplikasi Informatika	Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan aplikasi, infrastruktur dan keamanan informasi dalam rangka penyelenggaraan e-government	Diskominfoستا
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan data/informasi pembangunan daerah	Diskominfoستا
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase capaian pengelolaan dan pengembangan aplikasi, infrastruktur dan keamanan informasi dalam rangka penyelenggaraan e-government	Diskominfoستا

4.3. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Kewilayahan

Dokumen perencanaan pemerintah memuat penjabaran rencana pembangunan menurut wilayah. Pembangunan kewilayahan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Bangka Tengah. Fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan pariwisata dan daya saing daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Program kegiatan prioritas diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan terhadap beberapa sumber produksi, peningkatan kualitas SDM, percepatan program-program pengentasan kemiskinan. Dalam hal pengembangan sektor unggulan daerah, Kabupaten Bangka Tengah diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan pada sektor perkebunan, pertanian, perdagangan dan jasa.

Prioritas dan fokus pembangunan wilayah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2021 sebagai berikut.

1. Kecamatan Koba

Sebagai ibukota Kabupaten dan ibukota Kecamatan, Kota Koba mendapatkan prioritas dalam penataan kawasannya. Dalam Program pembangunan terpadu yaitu dengan slogan “Kota Koba Terang Benderang”, telah mengintegrasikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh lintas OPD dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan Kota Koba seperti penataan RTH di sekitar Kota Koba, Penataan area *Car Free Day*, membangun pusat kuliner, pengadaan lampu PJU, media informasi masyarakat, rambu dan marka jalan, penataan pasar modern, penataan pemukiman kumuh, dan sarana umum lainnya, Pengembangan Kawasan strategis Kurau Terentang, Pengembangan Kawasan wisata hutan mangrove Kurau, pantai Terentang, pantai desa Arung Dalam, Sumur Tujuh, dan Kolong Biru. Di Sektor kehutanan Koba juga memiliki potensi hasil hutan bukan kayu, saat ini sudah terdata sebanyak 2.582 pohon gaharu dan desa yang paling banyak potensinya adalah Nibung, Terentang III dan Arung Dalam.

Kecamatan Koba memiliki 5 (lima) kelurahan, dengan adanya kebijakan bantuan pendanaan kelurahan melalui DAU, Pemerintah Daerah akan mempunyai komitmen lebih besar dalam pemenuhan besaran anggaran kelurahan, dengan harapan dapat memberikan dampak positif dalam percepatan penanganan berbagai kendala dalam penyediaan layanan publik di wilayah perkotaan pada umumnya dan kelurahan pada khususnya.

2. Kecamatan Pangkalanbaru

Kecamatan Pangkalanbaru sebagai pintu gerbang perbatasan dengan ibukota Provinsi, Kota Pangkalpinang memiliki lokasi yang sangat strategis. Kecamatan ini masih memiliki unggulan di bidang perdagangan dan jasa. Keberadaan bandar udara, hotel, serta pasar modern memiliki potensi pendapatan daerah yang cukup besar. Hal ini juga menjadikan Kecamatan Pangkalanbaru sebagai salah satu pusat kawasan perkotaan yang cukup diminati sebagai kawasan perumahan dan permukiman dan juga Pangkalanbaru merupakan pusat kawasan industri. Di Sektor kehutanan Pangkalanbaru juga memiliki potensi hasil hutan bukan kayu, saat ini sudah terdata sebanyak 1.250 pohon gaharu dan potensi terbesar berada di Desa Jeruk dan Desa Pedindang.

3. Kecamatan Sungaiselan

Kecamatan Sungaiselan merupakan salah satu Kecamatan dari 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki potensi unggulan di bidang kelautan perikanan, salah satu komoditi unggulannya adalah Udang Galah atau Udang Satang, disamping produksi ikan jenis lainnya, sehingga kawasan Sungaiselan menjadi kawasan budidaya dan perikanan tangkap.

Walaupun di Kecamatan Sungaiselan masih banyak juga masyarakat yang berkebun lada, sawit, serta tanaman unggulan seperti cabai, bawang dan serta buah-buahan. Selain perikanan dan pertanian, Kecamatan Sungaiselan telah menjadi pusat Industri Rumahan. Di Sektor kehutanan Sungaiselan juga memiliki potensi hasil hutan bukan kayu, saat ini sudah terdata sebanyak 6.363 pohon gaharu dan potensi terbesar berapa di Desa Kerantai, Desa Lumpur dan Desa Munggu.

Selain perikanan dan pertanian, Kecamatan Sungaiselan telah menjadi pusat Industri Rumahan (IR) yang sejak tahun 2016 dengan adanya program Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu *pilot project* pengembangan industri rumahan yang lokasinya di Kecamatan Sungaiselan. Ibu-ibu atau perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi pelaku industri rumahan yang diberikan bantuan modal, peralatan dan pelatihan serta pendampingan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan sejak itu banyak bermunculan industri rumahan yang mulai berkembang dari jumlah 191 IR menjadi 271 IR yang dibina untuk terus dikembangkan. Produk-produk olahan dari Industri Rumahan Sungaiselan diantaranya produk olahan makanan dan kerajinan. Seluruh IR yang berada di Kecamatan Sungaiselan merupakan kategori IR Pemula dan diharapkan dapat berkembang menjadi IR Berkembang dan IR Maju. IR Bangka Tengah telah dilakukan evaluasi dari Kementerian PPPA untuk dijadikan percontohan antar negara.

Sungaiselan juga merupakan wilayah pengembangan kerang darah yang berada di Desa Tanjung Pura, yang telah dikembangkan sejak tahun 2016. Saat ini kelompok pembudidaya kerang berjumlah 4 (empat) kelompok. Hasil produksi perikanan budidaya kerang darah telah memenuhi pasar hingga di Kota Pangkalpinang.

4. Kecamatan Simpangkatis

Simpangkatis memiliki areal perkebunan, pertanian, perikanan. Kawasan Pertanian Cabai, Bawang dan Jeruk serta budidaya ikan air tawar. Selain itu, Kecamatan Simpangkatis tengah menggalakkan kerajinan batik pakis sejenis batik cual yang motifnya seperti tanaman pakis. Pusat kerajinan batik pakis sudah mulai dikenal dan telah menjadi ikon dari kecamatan simpangkatis yang juga kental dengan budaya ritual adat. Di Sektor kehutanan Simpangkatis juga memiliki potensi hasil hutan bukan kayu, saat ini sudah terdata sebanyak 3.677 pohon gaharu dan potensi terbesar berada di Desa Puput, Desa Beruas dan Desa Teru.

Selain itu Kecamatan Simpangkatis tengah menggalakkan kerajinan batik pakis sejenis batik cual yang motifnya seperti tanaman pakis. Pusat

kerajinan batik pakis sudah mulai dikenal dan telah menjadi ikon dari Kecamatan Simpangkatis yang juga kental dengan budaya ritual adat.

5. Kecamatan Namang

Kawasan pengembangan pertanian lahan basah di Kabupaten Bangka Tengah diarahkan pada kawasan yang memiliki kesesuaian lahan untuk pertanian lahan basah, berada di daerah dataran rendah, seperti pantai dan/atau daerah hilir daerah aliran sungai, serta memiliki potensi untuk dapat dilalui jaringan irigasi alam dan buatan. Kemudian setelah kriteria teknis tersebut dipenuhi, aspek berikutnya yang dipertimbangkan adalah ketersediaan lahannya. Lahan-lahan yang diutamakan adalah lahan-lahan yang sudah tidak berhutan atau bukan merupakan kawasan hutan. Khusus untuk lahan-lahan potensial yang berada di kawasan lindung, tidak dijadikan salah satu kawasan pengembangan. Kawasan peruntukkan pertanian direncanakan di Kecamatan Koba (Desa Kurau Barat) dan Kecamatan Namang (Desa Belilik dan Desa Namang). Kawasan Namang juga dikenal sebagai kawasan pertanian padi sawah yang memiliki lahan pertanian seluas kurang lebih 161,73 Ha. Selain kawasan pertanian Namang juga memiliki kawasan wisata hutan pelawan yang menghasilkan madu dan jamur sebagai komoditi yang cukup diminati masyarakat. Wisata Gurun yang saat ini juga menjadi ikon di Desa Namang, Kecamatan Namang yang terdiri dari 8 (delapan) desa ini memiliki produk unggulan yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Produk unggulan Desa tersebut meliputi:

Tabel IV.11.
Tipologi dan Produk Unggulan Desa

No	Nama Desa	Tipologi Desa dan Produk Unggulan Desa	
		Tipologi	Produk Unggulan Desa
1	Desa Cambai	Dataran	Pertanian sayur mayur, Perkebunan (lada, karet, sawit)
2	Desa Cambai Selatan	Perkebunan	Jamur tiram
3	Desa Jelutung	Campuran pesisir, dataran dan perbukitan	Produk UMKM
4	Desa Namang	Dataran / hamparan, tanaman pangan	Beras merah
5	Desa Belilik	Dataran sedang	Perkebunan lada/karet/sawit dan pertanian

6	Desa Kayu Besi	Campuran pesisir dataran, pertanian dan perdagangan	Tidak fokus pada satu bidang
7	Desa Baskara Bakti	Campuran pesisir dataran, pertanian dan perikanan	Produk UMKM
8	Desa Bukit Kijang	Dataran / hamparan	Tanaman pangan, industri bahan pangan

Tabel IV.12.
Potensi Desa se-Kecamatan Namang

No	Nama Desa	Potensi Desa			
		Komoditas (Pternakan)	Komoditas (Perkebunan)	Hasil Tangkapan	Komoditas (Hasil Hutan)
1	Desa Cambai	-	Kelapa sawit, kelapa, karet	-	Kayu, gula enau
2	Desa Cambai Selatan	-	Kelapa	-	-
3	Desa Jelutung	-	Karet, kelapa, lada, kelapa sawit	Kepiting, nila, cumi, rajungan, belanak	Madu lebah, kayu
4	Desa Namang	Daging, telur, madu	Kelapa sawit, kelapa, lada	Sepat, pari, kodok, cumi, kembung, mujair, lobster, mas, gurame, nila	Kayu, bambu, madu lebah, kayu ulin, kayu besi
5	Desa Belilik	-	Lada	Kakap, belut, belanak, bawal, lele, kepiting, patin, ikan ekor kuning	-
6	Desa Kayu Besi	-	Lada, karet, kelapa sawit	-	-
7	Desa Baskara Bakti	-	Karet, kelapa sawit, lada, kelapa, coklat	Tuna, tenggiri, cumi, ikan ekor kuning, lobster, kepiting, tongkol/cakalang, pari	-
8	Desa Bukit Kijang	Telur, daging	Coklat, cengkeh, kelapa sawit, kelapa, karet, lada	-	-

6. Kecamatan Lubuk Besar

Kecamatan Lubuk Besar pada umumnya memiliki potensi sektor pertanian dan perkebunan, namun secara khusus di Kecamatan ini sangat berpotensi di sector kehutanan dan pariwisata. Adapun sector kehutanan di Kecamatan Lubuk Besar terdapat Industri Kehutanan yang dikelola oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Bangkanesia. Selain itu, hasil hutan bukan kayu sangat berpotensi yaitu sampai saat ini terdapat pohon gaharu sebanyak 283.319 pohon dan potensi yang terbesar terdapat di Desa Trubus, Lubuk Besar, Lubuk Pabrik dan Lubuk Lingkok. Di Sektor Pariwisata juga terdapat wisata alam berupa Air Terjun Sadap, Air Terjun C2, Pantai Gusung Asam, Pantai Tanjung Berikat dan Danau Bukit Sadap. Pemanfaatan kawasan hutan produksi yang selama ini telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah adalah penanaman kayu gaharu. Kawasan hutan produksi yang berupa semak belukar atau berupa hutan jarang dapat ditanami dengan tanaman cepat tumbuh dari jenis tanaman industri seperti sengon, eucalyptus, gmelina dan akasia. Beberapa lokasi yang berupa hutan produksi juga dikonversi menjadi perkebunan dengan jenis tanaman kelapa sawit. Kecamatan Lubuk Besar dikenal sebagai pusat Gaharu, dengan pabrik pengolahan gaharu yang diolah menjadi banyak komoditi diantaranya; chip gaharu, minyak, aksesoris, dan teh gaharu. Satu potensi wisata alam yang ada di Kecamatan Lubuk Besar adalah Wisata Madu Kelulut Trigona yang terletak di Desa Lubuk Lingkok, tempat ini adalah tempat budidaya madu kelulut yang menjadi kawasan wisata yang sering dikunjungi dengan ciri khas menghisap madu langsung dari sarangnya, tempat ini cukup diminati oleh masyarakat, sehingga kelompok tanihutan pun menjadi optimis untuk pengembangan budi daya madu kelulut trigona dan telah menghasilkan produk seperti madu yang memiliki rasa yang khas manis asam dan juga *bee pollen*.

Prioritas Tematik dan Terintegrasi

1. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan

yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Dalam kegiatan yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat ini secara umum disebut lebih dikenal sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. Pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang luas. UMKM tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga mampu mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, dan juga berperan untuk pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Potensi dan peran strategis koperasi dan UKM sebagai pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan perekonomian dalam kondisi normal maupun krisis. Tak dapat disangkal bahwa Koperasi dan UKM merupakan jantung perekonomian rakyat sekaligus pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Oleh sebab itu, dengan senantiasa berusaha untuk menjawab setiap tantangan yang dihadapi dan mengambil kesempatan atas potensi yang dimiliki, maka pencapaian kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Tengah, khususnya ekonomi berbasis kerakyatan, yang diharapkan dimasa mendatang adalah:

- a. Peran sektor Koperasi dan UKM semakin strategis dan dominan dalam menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi Kabupaten Bangka Tengah yang lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi yang semakin kokoh dan mandiri;
- b. Peran serta sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kontribusi sub sektor perdagangan eceran yang semakin signifikan terhadap pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja secara luas; dan
- c. Semakin kuatnya keterkaitan antar skala industri dan meningkatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal secara optimal namun arif dan berwawasan lingkungan.

Strategi pengembangan pemasaran melalui *e-commerce* merupakan langkah *urgent* dalam peningkatan produktivitas, pemasaran dan daya saing pelaku UKM Kabupaten Bangka Tengah. Strategi penguatan permodalan juga merupakan salah satu langkah penting sebagai pendukung produktivitas dan kebutuhan pelaku UKM dalam mengembangkan dan membesarkan usaha mereka. Strategi pengembangan kredit bagi pelaku usaha mikro dan kecil dibutuhkan agar keuangan inklusif bisa berjalan. Karena semakin terbukanya akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap pelayanan jasa keuangan, maka mereka mampu meningkatkan kegiatan ekonominya dan kesejahteraannya. Ekonomi kerakyatan didukung oleh beberapa program yang dilaksanakan secara terintegrasi antara lain: Program pengembangan industri kecil dan menengah, Program peningkatan kualitas kelembagaan operasi, Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, Program pengembangan pengolahan dan pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan, Program pengembangan pemasaran pariwisata, Program peningkatan kesejahteraan petani, Program penganeekaragaman dan keamanan pangan, Program distribusi dan akses pangan, Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bangka Tengah mengalami penurunan dari tahun 2015 tetapi terjadi kenaikan pada periode tahun 2017-2019. Data realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3.93% bersumber dari hasil data BPS pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja. Terdapat 4 orang penganggur dari 100 orang angkatan kerja di Kabupaten Bangka Tengah. Jumlah angkatan kerja meningkat memberikan

indikasi potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang meningkat. Pengangguran terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Pada Usia 15-19 tahun merupakan kelompok umur yang paling banyak tidak pernah bekerja, hal ini disebabkan sebagian besar berpendidikan rendah tidak sesuai kompetensi dan SMK (fresh graduate) ada yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada Kelompok umur 20-24 Tahun kelompok yang pernah bekerja, hal ini disebabkan adanya penutupan pengolahan industri logam dan pusat perbelanjaan. Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah dari 3,93% menjadi 4,39% atau penambahan pengangguran sebanyak 435 orang (dari 3.860.000 orang menjadi 4.295 orang).

Pada Tahun 2020 Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) ditetapkan sebagai Bencana Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, maka upaya yang dilakukan urusan ketenagakerjaan melalui salah satu program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yaitu melakukan pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja serta membentuk kelompok kelompok bagi alumni peserta pelatihan untuk di support bantuan peralatan usaha sesuai dengan kompetensi pelatihan yang telah diikuti untuk selanjutnya diharapkan dapat membuka usaha baru ataupun melanjutkan usaha yang pernah terhenti bantuan peralatan tersebut diberikan kepada 60 kelompok yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan se Bangka Tengah. Dengan adanya program tersebut tersedianya lapangan pekerjaan bagi pencari kerja dan tersedianya SDM yang handal kompeten dan siap bersaing dipasar kerja, serta bagi korban PHK dimasa pandemi agar dapat kembali produktif untuk diarahkan menjadi wirausaha. Dalam upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tidak berdiri sendiri tetapi banyak melibatkan Stakeholders terkait, serta terus meningkatkan dan memperluas jejaring kerja ke Kementerian Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja yang tersebar di beberapa Daerah, bersama Dinas Tenaga Kerja melalui UPT Balai Latihan Kerja, berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Pihak Kecamatan,

Kelurahan, Desa yang ada di Wilayah Bangka Tengah dan juga Perusahaan-perusahaan.

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja merupakan salah satu program dari upaya untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka serta untuk melahirkan SDM yang handal dan siap bersaing dipasar kerja, permasalahan pengangguran bukan hanya menjadi tugas pokok dan fungsi bidang tenaga kerja tetapi harus di dukung oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder terkait kesejahteraan masyarakat. Program pendukung lain diantaranya:

1. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro.
2. Program pengembangan umkm, untuk menggiatkan kewirausahaan.
3. Program perencanaan tenaga kerja.
4. Program penempatan tenaga kerja.
5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks).
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

3. Pengarasutamaan Gender

Pengarasutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Perencanaan dan penganggaran yang responsive gender disusun dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki yang artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki baik dalam penyusunannya maupun pelaksanaannya. Adanya komitmen dalam menjalankan PUG menjadi prsyarat utama 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu: Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya, Data Terpilah, Alat Analisis dan Partisipasi Masyarakat.

Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan permasalahan dan

pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan daerah, PRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD.

Fokus perencanaan Tahun 2021 sudah merefleksikan perencanaan pengarusutamaan gender, hal ini tertuang dalam beberapa program yang akan dilaksanakan. Dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran ini bisa menjamin bahwa OPD sudah merefleksikan program maupun kegiatan responsive gender, sehingga percepatan pelaksanaan PUG lebih terarah, sistematis dan sinergi dalam rangka mengikuti penilaian APE sehingga program/kegiatan diarahkan untuk mendukung PUG dengan menerapkan GAP dan GBS dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Dasar Hukum pelaksanaan PUG yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bangka Tengah disertai dengan beberapa Keputusan Bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan PUG.

4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Germas adalah Suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Untuk menguatkan, melaksanakan, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya Kesehatan maka dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 yang mengintruksikan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Lembaga Pemerintah dan non pemerintah, direktur utama BPJS serta para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).

Dengan Germas diharapkan masyarakat bisa berperilaku sehat sehingga produktivitas ikut meningkat, selain itu tercipta lingkungan yang bersih yang pada akhirnya menurunkan angka kesakitan dan biaya yang dikeluarkan masyarakat. Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan kegiatan Germas pada tahun 2021 yang diimplementasikan pada beberapa program:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
6. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
8. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
9. Program Perlindungan Khusus Anak
10. Program Pengendalian Penduduk
11. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
12. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
13. Program Pengembangan Permukiman
14. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Bentuk Kegiatan GERMAS antara lain:

1. Melakukan aktivitas fisik
2. Mengonsumsi sayur dan buah
3. Tidak merokok
4. Tidak mengonsumsi alkohol
5. Memeriksa kesehatan secara rutin
6. Membersihkan lingkungan
7. Menggunakan jamban

Peraturan Bupati Bangka Tengah No. 28 Tahun 2020 tentang Gerakan Masyarakat ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan tersebut dalam melaksanakan GERMAS serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas

penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit serta adanya Germas Award yang akan diberikan kepada Desa/ kecamatan yang melaksanakan kegiatan GERMAS.

5. Penanggulangan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Target indikator utama dalam intervensi penurunan stunting terintegrasi antara lain:

1. Prevalensi stunting pada anak Baduta dan Balita
2. Presentasi Bayi dengan berat lahir rendah (BBLR)
3. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita
4. Prevalensi wasting (kurus) pada anak balita
5. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif
6. Prevalensi anemia pada ibu hamil dan Remaja puteri
7. Prevalensi kecacingan pada anak balita
8. Prevalensi anak diare pada anak baduta dan balita

Data E-PPGBM per Mei Tahun 2020 jumlah anak stunting di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 532 anak (0-5 tahun) dari 11.132 balita atau sebesar 4,78%. Intervensi Desa Stunting ada 7 (tujuh) Desa dengan prevalensi stunting diatas 10% yaitu Desa Tanjung Gunung, Desa Padang Baru, Desa Belimbing, Kelurahan Sungai Selan, Desa Sarang Mandi, Desa Cambai Selatan dan Desa Bukit Kijang. Sedangkan prevalensi Kabupaten (E-PPGBM) per Mei 2020 yaitu sebesar 4,78%. Batasan/ prevalensi stunting yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah tidak lebih dari 20%. Fokus intervensi Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yaitu baik intervensi spesifik dan sensitif melibatkan lintas OPD. Intervensi spesifik antara lain:

a. Intervensi Gizi Spesifik

Intervensi gizi spesifik yaitu intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK serta berkontribusi pada 30% penurunan stunting dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan yang dilakukan oleh sektor kesehatan (kegiatan/ upaya yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status

gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan dan dilakukan oleh sektor kesehatan)

- b. Intervensi Gizi Sensitif (Upaya-upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung dan umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan antara lain: penyediaan air bersih, pemberdayaan perempuan) Intervensi Gizi Sensitif yaitu kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi mengatasi 70% stunting.
- c. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak
- d. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan
- e. Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi

Terdapat 8 (delapan) Rencana Aksi Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting yaitu:

- 1. Analisis Situasi
- 2. Rencana Kegiatan
- 3. Rembuk Stunting
- 4. Perbup tentang Peran Desa
- 5. Pembinaan kader pembangunan manusia
- 6. Sistem manajemen data
- 7. Pengukuran dan publikasi data stunting
- 8. Riviur Kinerja Tahunan

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Percepatan Penanganan Stunting dan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peran Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting.

6. Kabupaten Layak Anak

Kasus kekerasan dan Pernikahan anak dibawah umur baik terhadap perempuan dan anak laki-laki diKabupaten Bangka Tengah, semakin menguatkan Pemerintah Daerah untuk membuat Perda Nomor 1 Tahun2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang dan SK Bupati Bangka Tengah Nomor 7 tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A). Dengan harapan adanya perda tersebut dapat menurunkan angka kekerasan dan pernikahan dini terhadap anak di Kabupaten Bangka Tengah. Pada Tahun 2012, Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Bangka Tengah Layak Anak dan telah direvisi pada tahun 2015 dengan Nomor : 188.45/407/BKKBD dan PPPA/2015 oleh Bupati Bangka Tengah dengan melibatkan SKPD terkait untuk ikut serta dalam menyelamatkan dan melindungi generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, maka hak-haknya perlu dijamin melalui program dan kegiatan pengembangan yang responsive Hak Anak yaitu dengan mengembangkan Kabupaten Layak Anak. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara *holistic, integral* dan *sustainable* baik dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak dengan menelorkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap hak-hak konvensi anak.

Tahun 2013, Deputy Tumbuh Kembang Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa di antara 109 kabupaten/kota yang sekarang ini menjadi percontohan menuju kota layak anak, baru empat kabupaten/kota yang sudah masuk kriteria mendekati kota layak anak yang ideal yaitu Kota Solo, Surabaya, Denpasar, dan Badung. Karena umumnya dari segi indikator input, kota yang menjadi percontohan kota layak anak tidak memiliki masalah. Misalnya dalam membuat peraturan daerah, taman, dan sebagainya, mereka tidak mengalami permasalahan sehingga contoh-contoh dari sisi pencegahan itulah yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah yang telah ditunjuk sebagai kota percontohan kota layak anak (Bramantyo, 2013). Tema yang diangkat pada Hari Anak Nasional Tahun 2013, yakni, "Indonesia Yang Ramah dan Peduli Anak Dimulai Dari Pengasuhan dalam Keluarga". Hal ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan memotivasi untuk lebih meningkatkan kepedulian pada pemenuhan lima hak pokok bagi anak-anak kita, yaitu hak perawatan dan pengasuhan, hak kesehatan, hak pendidikan dan rekreasi, dan hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Tingkatan Kabupaten/Kota Layak anak ada empat tingkatan, yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Kabupaten Bangka Tengah ingin segera mewujudkan Kabupaten yang layak dan ramah untuk anak, dengan pengumpulan data-data yang dapat menggambarkan dan mendukung penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) periode 2015-2020 supaya anak-anak di Kabupaten Bangka Tengah dapat sesegera mungkin menikmati suasana ruang lingkup tempat tinggalnya layak dan ramah terhadap tumbuh kembangnya serta dapat melaksanakan kebijakan dengan mengikutsertakan partisipasi anak untuk ikut dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan.

Mengacu pada latar belakang tersebut untuk mewujudkan Bangka Tengah kabupaten Layak Anak dan melihat permasalahan di Kabupaten Bangka Tengah yang kompleks dari masih tingginya anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Angka Kematian Bayi (AKB), Kasus Kekerasan pada Anak, pernikahan dini dan permasalahan yang menyangkut tidak tercapainya hak-hak anak. Maka perlu tindakan cepat untuk mencari solusi yang tepat dengan melibatkan peran serta dari berbagai pihak antara pemerintah (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif), Organisasi non pemerintahan, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam perancangan suatu kebijakan yang mendukung pemenuhan konvensi hak anak dengan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2014-2015 Kabupaten Bangka Tengah layak Anak dengan menghimpun data-data terkait permasalahan anak dan studi kebijakan-kebijakan yang bersinergi dengan pemenuhan 5 kluster hak anak yang tertuang dalam konvensi hak anak tentang

- a. Hak Sipil dan Kebebasan;
- b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya; dan
- e. Perlindungan Khusus.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2015-2020 dirumuskan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dengan menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan di Kabupaten Bangka Tengah. Program kebijakan terhadap anak diharapkan tidak membedakan suku, ras, agama, jenis

kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik dan psikis anak, atau faktor lainnya dengan memberikan penghargaan terhadap pandangan anak, mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Dengan memperhatikan prinsip pengembangan KLA tersebut maka diharapkan Kabupaten Bangka Tengah dapat menjadi salah satu kabupaten percontohan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat memenuhi 31 hak anak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas beragama, bebas berkumpul, bebas berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak untuk mendapat nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, dan standar hidup yang layak yang bebas dari kekerasan dan *trafficking* sehingga dapat mendukung tumbuh kembang anak untuk menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan berkualitas.

Berdasarkan respon kebijakan dan program terkait dengan anak di Kabupaten Bangka Tengah, menurut Peraturan Menteri Negara PPPA No.13 Tahun 2011, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Sesuai dengan Konvensi Hak Anak, ada 5 kluster hak anak yang dijabarkan dalam indikator dan ukuran KLA yaitu:

- 1) Hak Sipil dan Kebebasan;
- 2) Lingkungan Keluarga;
- 3) Disabilitas, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;
- 5) Perlindungan Khusus.

Program yang mendukung Kabupaten Layak Anak:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4. Program Penyelenggaraan Jalan
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
7. Program Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
10. Program Perlindungan Khusus Anak
11. Program Pengendalian Penduduk
12. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

7. Kabupaten Sehat

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat bertujuan tercapainya kondisi Kabupaten Bangka Tengah untuk hidup dengan bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni. Penghargaan tersebut dapat diraih dengan terlaksananya berbagai program – program kesehatan dan sektor lainnya sehingga dapat melaksanakan sarana dan produktivitas perekonomian masyarakat.

Tahapan proses pendekatan Kabupaten/Kota/Kawasan Sehat adalah dengan membentuk Forum Kabupaten/Kota Sehat atau dengan memfungsikan organisasi yang ada dengan nama lain yang disepakati. Keanggotaan forum terdiri dari seluruh wakil anggota Masyarakat, Pemerintah, Swasta, tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, mass media dan lain-lain yang dianggap dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Di Kecamatan dibentuk Forum Komunikasi Desa/ Kelurahan Sehat atau dengan memfungsikan organisasi yang ada dengan nama lain yang disepakati. Keanggotaan forum terdiri dari seluruh wakil anggota masyarakat, Pemerintah, Swasta, tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, media massa dan lain-lain yang dianggap dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Pada tahun 2015 dibentuk Forum Selawang Sehat Periode Tahun 2015-2017 sesuai Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/ 414/ BAPPEDA-SPM/ 2015 dan pada tahun 2018 dibentuk kepengurusan baru Forum Selawang Segantang Sehat Periode Tahun 2018-

2021 sesuai Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor: 188.45/88/BAPPELITBANGDA/ 2018 periode 2018-2021.

Di dalam merumuskan rencana kegiatan Kawasan sehat, dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu ;

- Program-program di lingkungan kesehatan dan sektor lain menjelaskan aspek lingkungan fisik, sosial dan budaya, termasuk perilaku serta upaya Kesehatan dan pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan, untuk mewujudkan Kabupaten/Kotayangsehat. Di dalam mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat perlu dijelaskan keuntungan apa yang akan diperoleh masyarakat dalam jangka panjang, baik dari aspek Kesehatan maupun ekonomi. Pilihan kegiatan upaya kesehatan yang disosialisasikan didalam meningkatkan Kabupaten/Kota/Desa Sehat, perlu dikaitkan dengan perencanaan sektor yang telah direncanakan dan yang termuat dalam perencanaan daerah, serta aspek peningkatan ekonomi kelompok masyarakat di Kawasan tersebut.
- Pada umumnya masyarakat menyatakan kebutuhan mereka dalam wujud peningkatan sumber ekonomi, pemenuhan sarana, prasarana lingkungan, baik secara fisik maupun sosial. Kebutuhan masyarakat dalam bentuk perlunya pelayanan social dan kesehatan, maupun prioritas sektor lainnya yang direncanakan merupakan kebutuhan berikutnya.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada Bab ini akan dijabarkan program prioritas Tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah disusun dalam rangka memenuhi sasaran, arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021 serta mengacu pada tema RKPD 2021 yang telah ditetapkan yaitu **“Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat melalui Peningkatan Pelayanan Dasar”**.

5.1 PROGRAM PRIORITAS DAN PAGU INDIKATIF

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Kabupaten, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021;
- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada Tahun 2021;
- 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Program prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh PD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran

pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021, dimana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh PD dalam Renstra PD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD, maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra PD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran Indikator Kinerja Utama PD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra PD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan PD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke PD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan PD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra PD

sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan PD.

Tabel V.1.
Pagu Indikatif Belanja per Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2021

NO.	PRIORITAS DAERAH	PAGU INDIKATIF BELANJA (Rp)
1	Pertumbuhan Ekonomi	67.211.341.000
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia	351.226.532.000
3	Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan	124.981.503.500
4	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	357.307.045.500
	TOTAL	900.726.422.000

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Dinas Pendidikan

- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengembangan Kurikulum
- Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2. Kesehatan

Dinas Kesehatan

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- Program Pengembangan Permukiman
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

- Program Pengembangan Perumahan
- Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh
- Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

5. Trantibum Linmas

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Penanggulangan Kebakaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Program Penanggulangan Bencana

6. Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Penanganan Bencana

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Tenaga Kerja

- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Penempatan Tenaga Kerja
- Program Hubungan Industrial

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

- Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Program Perlindungan Khusus Anak

3. Pangan

Dinas Pangan

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Pertanahan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

- Program Pengelolaan Izin Lokasi
- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

5. Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - Program Pengelolaan Persampahan
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- Program Pendaftaran Penduduk
 - Program Pencatatan Sipil
 - Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Program Pengelolaan Profil Kependudukan
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
- Program Pengendalian Penduduk
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9. Perhubungan
- Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - Program Pengelolaan Pelayaran
10. Komunikasi dan Informatika
- Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
- Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - Program Aplikasi Informatika

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro
- Program Pengembangan UMKM

12. Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Tenaga Kerja

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Promosi Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13. Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

14. Statistik

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

15. Persandian

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

16. Kebudayaan

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

17. Perpustakaan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- Program Pembinaan Perpustakaan

18. Kearsipan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- Program Pengelolaan Arsip
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Pariwisata

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Pertanian

Dinas Pertanian

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program Perizinan Usaha Pertanian

Dinas Pangan

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian

4. Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup

- Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

5. Perdagangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

6. Perindustrian

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

2. Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

- Program Kepegawaian Daerah
- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4. Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 5. Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah
 - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Program Administrasi Umum
Sekretariat DPRD
 - Program Layanan dan Administrasi Keuangan
 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

E. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan
Inspektorat Daerah
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

F. Unsur Kewilayahan

Kecamatan Koba

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kecamatan Pangkalanbaru

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kecamatan Sungaiselan

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kecamatan Simpangkatis

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kecamatan Namang

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kecamatan Lubuk Besar

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

G. Unsur Pemerintahan Umum

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

- Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan
- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Tabel V.2.
Pagu Indikatif Belanja Tahun 2021

KODE REKENING			URUSAN/PD	PAGU INDIKATIF BELANJA (Rp)
1			URUSAN WAJIB	
1	01		Pendidikan	
1	01	01	Dinas Pendidikan	194.890.147.000
1	02		Kesehatan	
1	02	01	Dinas Kesehatan	130.000.000.000
1	03		Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	80.000.000.000
1	06		Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
1	06	01	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	9.933.006.300
1	07		Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
1	07	01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	21.282.616.000
1	08		Lingkungan Hidup	
1.	08	01	Dinas Lingkungan Hidup	12.898.887.500
1	10		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1	10	01	Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil	7.095.110.000
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	
1	11	01	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.576.280.000
1	14		Sosial	

KODE REKENING			URUSAN/PD	PAGU INDIKATIF BELANJA (Rp)
1	14	01	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.838.944.300
1	19		Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
1	19	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.760.516.600
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.414.000.000
1	19	03	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	13.383.298.000
	20		Pemerintahan Umum, Administrasi, Pengawasan, Keuangan, Kepegawaian Pendidikan Pelatihan	
1	20	03	Sekretariat Daerah	41.000.000.000
1	20	04	Sekretariat DPRD	36.000.000.000
1	20	05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	166.992.258.500
		06	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	10.000.000.000
1	20	07	Inspektorat Daerah	5.453.000.000
			Pemerintahan Umum, Administrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Trantibumlinmas	
		08	Kecamatan Koba	12.000.000.000
		09	Kecamatan Pangkalan Baru	8.483.368.000
		10	Kecamatan Sungai Selan	6.840.000.000
		11	Kecamatan Simpang Katis	4.432.965.500
		12	Kecamatan Namang	4.589.298.300
		13	Kecamatan Lubuk Besar	4.515.000.000
		14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	21.000.000.000

KODE REKENING			URUSAN/PD	PAGU INDIKATIF BELANJA (Rp)
1			Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Pemerintahan Umum, Administrasi	
			Dinas Penanaman Modal, Perizinan dan Tenaga Kerja	6.500.000.000
1	21		Pangan	
1	21	01	Dinas Pangan	10.474.400.000
1	24		Kearsipan Perpustakaan	
1	24	01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.336.385.000
1	25		Kominfo, Statistik, Persandian	
		01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	10.800.000.000
2			URUSAN PILIHAN	
2	01		Pertanian	
2	01	01	Dinas Pertanian	15.012.291.000
2	04		Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	
2	04	01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	10.240.890.000
2	05		Kelautan dan Perikanan	
2	05	01	Dinas Perikanan	15.000.000.000
2	06		Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UMKM	
2	06	01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	9.983.760.000
JUMLAH				900.726.422.000

Sumber: Data diolah, 2020

5.2 USULAN HASIL MUSRENBANG

Masukan usulan kegiatan hasil Musrenbang desa/kelurahan yang dibahas dalam Musrenbang Kecamatan untuk selanjutnya diverifikasi dan divalidasi dalam forum perangkat daerah oleh PD dan unsur kecamatan serta *stakeholder* terkait. Secara akumulatif, aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui forum

musrenbang pada 63 Desa/Kelurahan yang akan diusulkan dalam Musrenbang kecamatan sebanyak 1184 usulan dengan total pagu Rp. 452.931.203.334

Tabel V.3.
Usulan Hasil Musrenbang Desa Tahun 2021

NO.	Kecamatan	Jumlah Usulan Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Kecamatan Koba	54 usulan	29.520.000.000
2	Kecamatan Pangkalanbaru	567 usulan	216.101.158.000
3	Kecamatan Sungaiselan	101 usulan	31.127.000.000
4	Kecamatan Simpangkatis	230 usulan	64.004509.584
5	Kecamatan Namang	59 usulan	39.476.005.000
6	Kecamatan Lubuk Besar	173 usulan	72.702.530.750
		1184 usulan	452.931.203.334

Sumber : Bappelitbangda, 2020

5.3 PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN BANGKA TENGAH

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Rekomendasi hasil Reses melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 170/04/DPRD/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Penetapan Pokok-pokok Pikiran Hasil Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Masa Sidang I Tahun Anggaran 2020.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas dalam musrenbang dan agenda kerja DPRD untuk tahun rencana. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Tabel V.4.
Pokok-Pokok Pikiran Hasil Reses DPRD Kabupaten Bangka Tengah
Masa Sidang I Tahun 2020

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Fasilitasi Pembangunan BTS Dusun Bukit Pilar	Desa Guntung	1 unit	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
2	Fasilitas Pembangunan BTS Dusun Kulur Laut	Desa Kulur Ilir	1 unit	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
3	Bantuan Perahu Dan Alat Tangkap Nelayan (Kelompok Nelayan Armada Karang)	Desa Guntung	1 set	Dinas Perikanan
4	Bantuan Bibit Buah Rambutan Dan Mangga Harum Manis	Desa Terentang	1000 buah	Dinas Pertanian
5	Pembangunan Jalan Produksi	Desa Guntung	5 km	Dinas Pertanian
6	Pembangunan Searing Rt 11	Desa Nibung	200 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
7	Rehab Jalan Lingkar	Desa Terentang	1,5km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
8	Pengaspalan Jalan Menuju Pantai Wisata Air Sapet	Desa Terentang	1,7km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
9	Pengaspalan Dan Pembangunan Jalan Lingkar Dari Kencana 2 Tembus Sampai Jalan Kencana Utama Depan Masjid Al Muhajirin Kapling Arung Dalam	Kelurahan Arung Dalam	2 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
10	Pembangunan Drainase Jalan Tembus Dari Kencana 1 Menuju Musholla Al Ikhlas	Kelurahan Arung Dalam	600 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
11	Drainase Jalan Lingkar Kencana 2 Sampai Dengan Jalan Kencana Utama Tembus Depan Mesjid Al Muhajirin	Kelurahan Arung Dalam	800 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
12	Pembuatan Jalan Baru Dengan Tanah Puruh Dekat Perumahan Baru Disekitar Jalan Lingkar Kencana Utama Didalam Pemakaman Umum Berok	Kelurahan Arung Dalam	1 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
13	Rehabilitas Jalan Tanah Puru Rt 06 Dusun Bukit Pilar Bemban-Guntung	Desa Guntung	10 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
14	Pembangunan Drainase Jalan Lingkar	Desa Guntung	4 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
15	Bantuan Transportasi Majelis Taklim	Desa Terentang	1 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
16	Pembangunan Pagar Pemakaman	Desa Guntung	300 m	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
17	Pembangunan Pagar Masjid Baitul Makmur Dusun Air Kuning	Desa Celuak	80 m	Sekretariat Daerah
18	Bantuan Dana Hibah Untuk Peralatan Masjid Al-Hidayah	Desa Puput	Rp.50.000.000,-	Sekretariat Daerah
19	Pembangunan Conblok Masjid Baitul Makmur Dusun Air Kuning	Desa Celuak	20 x 40 m	Sekretariat Daerah
20	Pembangunan Mushola Pabrik Bata Rt 4	Desa Nibung	1 unit	Sekretariat Daerah
21	Rehab Musholla Al Ikhlas Pabrik Bata Rt 11	Desa Nibung	1 unit	Sekretariat Daerah
22	Bantuan Hibah Dana Pembangunan Masjid Nurul Huda	Desa Guntung	Rp.500.000.000 ,-	Sekretariat Daerah
23	Bantuan Hibah Dana Pembangunan Musholla Nur Qomariah Rt 04	Kelurahan Padang Mulia	Rp.100.000.000 ,-	Sekretariat Daerah
24	Bantuan Hibah Dana Pembangunan Masjid Al-Iklas Air Risi Rt 02	Kelurahan Padang Mulia	Rp.200.000.000 ,-	Sekretariat Daerah
25	Pembanguna Teras Musholla Dusun G Desa Lubuk Pabrik	Desa Lubuk Pabrik	15 m	Sekretariat Daerah
26	Bantuan Pengajar Dan Honorium Majelis Taklim Di Rt 15	Kelurahan Arung Dalam	Rp.40.000.000,-	Sekretariat Daerah
27	Pemberian Insentif Bulanan Guru Tahfizh Al-Quran	Kabupaten Bangka Tengah	400 org	Sekretariat Daerah
28	Usulan Renovasi Masjid	Desa Lampur	100 m	Sekretariat Daerah
29	Usulan Pembangunan Musholla Bagian Belakang Dan Samping Rt 21	Desa Lampur	80 m	Sekretariat Daerah

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
30	Pembanguna Ruang Terbuka Hijau Terpadu	Kelurahan Padang Mulia	1 unit	Dinas Lingkungan Hidup
31	Belum Berjalanya KUBE	Desa Baskara Bakti	1 kegiatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
32	Pembangunan Lingkaran Lapangan Sepak Bola	Desa Nibung Timur	1 km	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
33	Rehab Tribun Lapangan Sepak Bola	Desa Nibung Timur	1 unit	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
34	Pembangunan Pagar Lapangan Sepak Bola	Kurau Timur	14.400 m	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
35	Pembangunan Tribun Olah Raga	Desa Penyak	1 unit	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olah Raga
36	Pemasangan Conblock Perpustakaan	Kurau Timur	10 m	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
37	Pembangunan Tambatan Perahu Berok Ilir	Sungai Selan	50 m	Dinas Perikanan
38	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan		1 kelompok	Dinas Perikanan
39	Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan		1 kelompok	Dinas Perikanan
40	Bantuan Perahu Dan Alat Tangkap Nelayan (Kelompok Nelayan Berdikari)	Desa Terentang	1 set	Dinas Perikanan
41	Bantuan Tambatan Perahu, Alat Penghubung Dilaut Dan Fasilitas Pasar Murah Untuk Nelayan	Kurau Barat Dan Kurau Timur	1 kegiatan	Dinas Perikanan
42	Bantuan Alat Tangkap Nelayan Rt 15	Kelurahan Arung Dalam	5 unit	Dinas Perikanan
43	Bantuan Bibit Ternak Sapi	Desa Puput	1 kelompok	Dinas Pertanian
44	Bantuan Bibit Untuk Poktan	Desa Namang	500 buah	Dinas Pertanian
45	Bantuan Pupuk Untuk Poktan	Desa Namang	1 kegiatan	Dinas Pertanian
46	Pembangunan Jalan Produksi	Kelurahan Padang Mulia	5 km	Dinas Pertanian

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
47	Bantuan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Kelompok Tani Air Risi (Ternak Sapi)	Kelurahan Padang Mulia	1 Kelompok	Dinas Pertanian
48	Pembangunan Jalan Produksi	Desa Penyak	500 m	Dinas Pertanian
49	Bantuan Bibit Sawit	Desa Celuak	500 buah	Dinas Pertanian
50	Bantuan Sapi	Desa Celuak	10 ekor	Dinas Pertanian
51	Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah	Desa Namang	1 unit	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
52	Penambahan Gedung Baru Di SMP 1	Kecamatan Pangkalan Baru	1 unit	Dinas Pendidikan
53	Beasiswa Bagi Masyarakat Tidak Mampu (SD/SMP)	Desa Namang	1 kegiatan	Dinas Pendidikan
54	Pembangunan Pagar Keliling SMPN 6	Desa Keretak	800 m	Dinas Pendidikan
55	Pemberian Insentif Bulanan/Kenaikan Gaji Kepada Guru TK/PAUD	Kabupaten Bangka Tengah	400 org	Dinas Pendidikan
56	Perbaikan Ruang Sekolah SDN 12	Desa Keretak	5 ruang	Dinas Pendidikan
57	Perbaikan Pagar SDN 12	Desa Keretak	200 m	Dinas Pendidikan
58	BPJS Kesehatan Jangan Dipersulit	Desa Namang	1 kegiatan	Dinas Kesehatan
59	Penangan Anak Kurang Gizi Rt 04	Desa Baskara Bakti	1 kegiatan	Dinas Kesehatan
60	Prioritas BPJS APBD Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Air Mesu	1000 orang	Dinas Kesehatan
61	Pembangunan Posyandu Rt 04	Kelurahan Padang Mulia	1 unit	Dinas Kesehatan
62	Pembangunan Pagar Puskesmas Perlang		100 m	Dinas Kesehatan
63	Pemasangan Conblok Poskesdes		10 x 8 m	Dinas Kesehatan
64	Pembangunan Jalan Lingkar Menuju SMPN 2	Desa Puput	2 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
65	Pembangunan Drainase Primer Di Rt 09 (Depan Rumah Bapak Sairin)	Desa Puput	100 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
66	Pembangunan Talud Sungai Puput Jln Kampung Pasir Rt 03	Desa Puput	200m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
67	Rehab Jalan Rt 03	Desa Puput	1 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
68	Pembangunan Drainase Rt 12	Desa Puput	200 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
69	Pembangunan Jalan Produksi	Desa Puput	2 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
70	Pembangunan Drainase Sekunder	Desa Sungkap	100 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
71	Perbaikan Jalan Desa Yang Rusak	Desa Pedindang	100 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
72	Perbaikan Jalan Desa Yang Rusak	Desa Terak	100 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
73	Pengaspalan Jalan Rt 03	Desa Pedindang	200m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
74	Pengaspalan Jalan Klenteng Rt 05	Desa Jeruk	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
75	Pengaspalan Desa Air Mesu Rt 08 Menuju SMPN 3 Jalan Pangkul	Desa Air Mesu	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
76	Pengaspalan Rt 01, Rt 05	Desa Jeruk	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
77	Pembangunan Drainse	Desa Jeruk	300 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
78	Pengaspalan Rt 01 Dekat Pesantren	Desa Air Mesu	300 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
79	Pengaspalan Jl.PPIP Jalan Lingkar Dari Kantor Desa Jeruk Meuju Sekolah TK/SD Theresia	Desa Jeruk	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
80	Drainase Rt 14	Desa Beluluk	300 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
81	Pembangunan Jembatan Jalan Kantor Desa Kebintik	Desa Kebintik	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
82	Pembangunan Drainase Jl Anggur Samping Puskesmas Benteng	Desa Benteng	300 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
83	Pembangunan Pengaspalan Jl Anggur Samping Puskesmas Benteng	Desa Benteng	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
84	Pengaspalan Jalan Rt 07 - Rt 08	Desa Air Mesu	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
85	Peningkatan Jalan Lintas Jeruk	Desa Jeruk	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
86	Peningkatan Desa Pedindang	Desa Mangkol	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
87	Peningkatan Jalan Semujur Atas Rt 10	Desa Baru Belubang	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
88	Pembangunan Saluran Jl Suka Damai	Desa Mangkol	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
89	Pembangunan Saluran Jl Sinar Baru	Desa Pedindang	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
90	Drainase Jl Padang Baru-Pangkul Semujur	Desa Batu Belubang	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
91	Peningkatan Jalan Tapak Antu	Desa Batu Belubang	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
92	Pembangunan Drainase Rt 01 Rt 02 Dusun Pantai Baru Belubang	Desa Batu Belubang	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
93	Peningkatan Jalan Didusun Semujur	Desa Batu Belubang	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
94	Pembangunan Siring Rt 02, Rt 09	Kelurahan Dul	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
95	Peningkatan Jalan Dekat Balai Toko Zainal	Kelurahan Dul	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
96	Bantuan Sumur Bor Air Bersih Rt 10,Rt 11 Gg Semujur	Batu Belubang	1 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
97	Bantuan Sumur Bor	Kelurahan Dul	1 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
98	Peningkatan Jalan	Desa Padang Baru	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
99	Pengaspalan Jl Dekat Pasar	Desa Baskara Bakti	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
100	Pembangunam Siring Rt 01	Desa Baskara Bakti	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
101	Pembangunan Air Bersih Rt 04	Desa Baskara Bakti	1 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
102	Peningkatan Jl.Sekolah SD1	Desa Namang	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
103	Peningkatan Jl, Rt 04-Rt,01	Desa Namang	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
104	Pembangunan Saluran Dekat Masjid Namang	Desa Namang	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
105	Bantuan Sumber Air Bersih Dusun Tanah Merah	Dusun Tanah Merah	1 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
106	Bantuan Sumur Bor Rt 04,Rt 06	Desa Baskara Bakti	1 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
107	Plat Deuker RT 14	Desa Beluluk	5 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
108	Pembangunan Searing Rt 1 Dan Rt 2	Desa Nibung	200 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
109	Rehab Jalan Lingkar Rt 11	Desa Nibung	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
110	Meningkatkan Sarana Penerangan Dan Kenyamanan Transportasi		2 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
111	Meningkatkan Sarana Penerangan Dan Kenyamanan Transportasi		2 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
112	Meningkatkan Sarana Air Bersih		1 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
113	Memperlancar Transportasi		200 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
114	Memperlancar Transportasi		5 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
115	Memperlancar Saluran Air Gang Jenderal Rt 20 By Pass Koba		600 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
116	Meningkatkan Sarana Air Bersih		1 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
117	Pembangunan Saluran Drainase Primer Rt 03	Kelurahan Padang Mulia	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
118	Memperlancar Saluran Air Rt 5 Kel.Arung Dalam		400M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
119	Meningkatkan Air Bersih Simpang Jongkong		25 titik	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
120	Memperlancar Saluran Pembuangan Air Rt 20 By Pass Koba		250 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
121	Memperlancar Saluran Pembuangan Air Rt 1 Menuju Perumahan PNS Pemda Bateng		250 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
122	Pengaspalan Jalan Jl. By Pass Seroja Rt 03 Rw 1 P.Mulia		800 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
123	Pengaspalan Jalan Kantor Camat Lubuk Besar U/ Mempelancar Transportasi		4 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
124	Pengaspalan Jalan Lingkar Transpotasi Pal Empat Dusun Mulia Desa Penyak		1 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
125	Pembangunan Lanjutan Searing Jalan Lingkar Desa Perlang		300 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
126	Pembangunan Searing Rt 1		250 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
127	Pengaspalan Jalan Lingkar Desa Rt 1		250 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
128	Pengaspalan Jalan Jl.Madrasah Rt 5 Rw 1		1 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
129	Pembangunan Searing Jl.Madrasah Rt 5 Rw 1		250 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
130	Normalisasi Alur Sungai Air Risi	Kelurahan Padang Mulia	3 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
131	Pembangunan Drainase Rt 20		250 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
132	Normalisasi Alur Sungai Kulur	Desa Kulur	5 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
133	Pembangunan Drainase Gang SD IT		250 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
134	Peningkatan Jalan Gg Beta, Gg Setia Budi Rt 20	Kelurahan Koba	3 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
135	Pembangunan Tanah Puru Rt 01		250 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
136	Pembangunan Tanah Puru Gang Flamboyan Rt 01		250 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
137	Pemasangan Talud Gang Beta Rt 20		500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
138	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Terentang	Desa Terentang	2 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
139	Pembangunan Searing Rt 5,Rt 6 Rt 8		250 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
140	Peningkatan Jalan Lingkar Desa Perlang Ke SDN 7	Desa Perlang	1 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
141	Pembuatan Saluran Sekunder Dusun Sadap	Desa Perlang	300 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
142	Pembangunan Talud Jalan Lingkar Perlang	Desa Perlang	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
143	Pembangunan Drainase	Desa Perlang	600 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
144	Penembokaan Jalan Tanah Puru Jalan Perkebunan Air Kopi Dusun Nadi	Desa Lubuk	600 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
145	Pembangunan Jalan Setapak Rt 12	Desa Perlang	150 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
146	Pembangunan Talud Sepanjang Jalan Kencana Utama Rt 10	Kelurahan Arung Dalam	70 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
147	Pembangunan Drainase Rt 02	Desa Terubus	600 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
148	Pembangunan Drainase Sekunder Rt 07	Desa Nibung	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
149	Rehab Sumber Air Bersih (PAM)	Desa Perlang	1 unit	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
150	Pembangunan Drainase (Searing Jalan) / Kiri Dan Kanan Jalan Baru (Depan Rumah Pak Rt 15)	Berok	600 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
151	Pembangunan Jalan Setapak Disetiap Gang Rt 14,15 Dan 16	Kelurahan Arung Dalam	200 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
152	Peningkatan Jalan Sepanjang	Desa Kurau Barat	2 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
153	Peningkatan Jalan Desa Kurau Timur	Desa Kurau Timur	2 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
154	Bantuan Sumber Air Bersih	Kurau Barat	1 paket	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
155	Pengaspalan Rt 13	Desa Penyak	50 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
156	Pembangunan Searing Rt 09 Dan Rt 13	Desa Penyak	200 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
157	Pembangunan Talud Wisata Rt 1,2,3,4,Dan 5	Desa Kurau Barat	400M	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
158	Pengaspalan Jalan Pendidikan Rt 09	Desa Kurau Barat	1 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
159	Pengaspalan Jalan Jln Kencana Utama Rt 17 Gang Rudal	Kelurahan Arung Dalam	100 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
160	Rehab Taman Tugu Ikan Koba	Kelurahan Koba	1 kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
161	Pembangunan Searing Desa Kurau Barat	Desa Kurau Barat	200 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
162	Usulan Pengaspalan Dari Desa Celuak Menuju Dusun Air Kuning	Desa Celuak	6 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
163	Usulan Untuk Thn 2021 Pengaspalan Jalan Menuju Pemandian	Desa Celuak	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
164	Usulan Perbaikan Jalan Menuju Hutan Pramu	Desa Sungai Selan	4 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
165	Pengaspalan Jalan Lingkar	Desa Sungai Selan	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
166	Pengaspalan Jalan Disamping Sekolah AIAI	Sungai Selan	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
167	Siring Gang Swadaya	Kelurahan Sungai Selan	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
168	Pengaspalan Jalan Depan Kuburan Umum	Kelurahan Sungai Selan	250 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
169	Usulan Pembuatan Searing Di Rt 06	Kecamatan Simpang Katis	200 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
170	Usulan Pembuatan Searing Di Rt 05	Kecamatan Simpang Katis	500 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
171	Usulan Pengaspalan Menuju Gudang Karet	Desa Pinang Sebatang	1 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
172	Usulan Pengaspalan Menuju SMPN 6	Sungai Selan	1 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
173	Pembangunan Siring SMPN 6	Desa Keretak	1,2 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
174	Pengaspalan Jalan Tani Dusun Air Pasir/Jalan Bayat Rt 20	Desa Lampung	600 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
175	Pembangunan Plat Duiker Rt 04	Desa Lampung	8 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
176	Pembangunan Siring Rt 10,11 Dan Rt 15(Segitiga/Tanaman Desa)	Desa Lampung	1,5 km	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan
177	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Di Bembeng Rt 19	Desa Lampung	4 x 6 m	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
178	Tunjangan Kesejahteraan Bagi Lansia	Desa Air Mesu	100 Orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
179	Pemberdayaan Masyarakat Khususnya IRT	Desa Namang	1 kegiatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
180	Raskin Untuk Warga Kurang Mampu TPI	Kelurahan Dul	250 orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
181	Bantuan Bagi Warga Yang Sakit Rt 14 Dan 15	Kelurahan Arung Dalam	50 orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
182	Pembuatan Pagar TPU	Desa Batu Belubang	500 m	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
183	Lampu Sorot TPU	Desa Batu Belubang	1 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
184	Penerangan Jalan Semujur Atas	Desa Batu Belubang	1 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
185	Pembangunan Saran Dan Prasarana Lanjutan Perkuburan Tionghoa Dusun Merengkan	Desa Benteng	1 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
186	Penerangan Jalan	Desa Padang Baru	1 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
187	Pengadaan Kaca Cembung Disimpang 4 Balai	Kelurahan Dul	1 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
188	Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas Disimpang Jalan Keranji	Kelurahan Dul	1 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
189	Pembangunan Landscape TPU	Desa Air Mesu Dan Air Mesu Timur	1 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
190	Pembangunan Rumah Layak Huni Rt 01	Desa Baskara Bakti	1 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan

NO	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
191	Pemasangan Lampu Jalan Menuju TPI	Batu Belubang	25 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
192	Rehab Pagar Kuburan	Desa Terentang	1 km	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
193	Pembangunan Jalan Setapak Dng Conblock		1 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
194	Meningkatkan Sarana Penerangan Dan Kenyamanan Transportasi		3 titik	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
195	Pemasangan Lampu Jalan Rt 03, Rt 04	Kelurahan Padang Mulia	10 titik	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
196	Penataan Lahan Eks Terminal Koba	Kelurahan Koba	1 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
197	Pembangunan Pagar Kuburan	Desa Perlang	200 m	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
198	Peningkatan Lampu Masjid Baitul Rahim	Desa Perlang	2 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
199	Peningkatan Lampu Jalan Sebanyak	Desa Kurau Barat Dan Kurau Timur	20 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
200	Bantuan Rumah Layak Huni Rt 14 (Ibu Rohayati)	Kelurahan Arung Dalam	1 unit	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
201	Pembangunan Pagar Kuburan Kurau Barat	Desa Kurau Barat	200 m	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
202	Pembangunan Lanjutan Untuk Pagar Kubur	Sungai Selan	250 m	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
203	Usulan Pemasangan Cermin Tikungan	Desa Lampur	4 buah	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan

Sumber : Hasil Reses DPRD Kab. Bangka Tengah Masa Sidang I Tahun 2020

5.4 REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) BUPATI KABUPATEN BANGKA TENGAH

Berdasarkan hasil pembahasan DPRD Kabupaten Bangka Tengah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bangka Tengah Akhir Tahun Anggaran 2019 memuat arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Bangka Tengah merumuskan beberapa perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah oleh kepala daerah. Hasil pembahasan tersebut dijadikan salah satu dasar bagi DPRD Kabupaten Bangka Tengah untuk merangkum rekomendasi terhadap LKPj Bupati Bangka Tengah Akhir Tahun Anggaran 2019 yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 170/08/DPRD/2020 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangka Tengah Akhir Tahun Anggaran 2019. Berikut ialah rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Bangka Tengah Tahun Anggaran 2019:

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah agar secara intensif memonitoring dan mengevaluasi program dan kegiatan yang benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi kerakyatan. Program-program tersebut dikembangkan dan diadopsi oleh kelompok-kelompok, seperti budidaya bawang merah dan budidaya lele.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah agar semakin meningkatkan integrasi antar sektor dan memprioritaskan dalam penganggaran.
- 3) Pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya ikan di Kabupaten Bangka Tengah sangat penting dilakukan, seperti Pengembangan Bibit Benih Ikan (BBI) Koba. Harapannya BBI Koba menjadi penyediaan induk unggul dan sebagai referensi produksi bibit unggul bagi UPR yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.
- 4) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah harus fokus dan memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan,

- melalui pengembangan pariwisata dan pengembangan ketrampilan UMKM khususnya di bidang kuliner.
- 5) Untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) agar tata kelola pertanian di Kabupaten Bangka Tengah dikelola dan dikembangkan dengan pendekatan secara komprehensif dan simultan. Untuk sektor peternakan, diharapkan segera membangun Rumah Tempat Pemotongan Hewan (RTPH) karena lahannya telah tersedia.
 - 6) Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah lebih memperhatikan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi PAD yang dapat ditingkatkan ialah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peningkatan PBB dapat dilakukan melalui banyak cara, antara lain misalnya dengan membuat surat keterangan terdaftar atas tanah yang terintegrasi di tiap kecamatan.
 - 7) Terkait dengan tanggap bencana, untuk tim tanggap bencana harus lebih meningkatkan ketrampilan dalam penanganan bencana dan pasca bencana.
 - 8) Untuk lebih meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di Kabupaten Bangka Tengah, agar dilakukan penambahan personil Polisi Pamong Praja, dan dilakukan sosialisasi dalam rangka meminimalisasi kenakalan remaja.
 - 9) Berkaitan dengan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan, diharapkan dapat menempatkan auditor di tiap OPD.
 - 10) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah agar dapat memaksimalkan ketersediaan air kolong yang ada di Kabupaten Bangka Tengah.
 - 11) Dalam hal penyusunan dokumen LKPj, dokumen yang disusun masih belum baik dan belum tersusun rapi, untuk ke depannya diharapkan kesalahan-kesalahan dalam dokumen LKPj tidak terjadi lagi.
 - 12) Untuk pelaksanaan pelatihan menjahit di Kecamatan Sungaiselan dan Simpangkatis yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebaiknya untuk tahun berikutnya bukan hanya ditujukan untuk ibu rumah tangga saja tetapi juga pelatihan untuk anak-anak SMA yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

- 13) Pansus DPRD Kabupaten Bangka Tengah merekomendasikan kepada perangkat daerah untuk melakukan kajian pendahuluan sebelum penetapan kegiatan dan evaluasi hasil akhir kegiatan, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan diketahui keunggulan dan kekurangan serta menjadi dasar keberhasilan dan berkelanjutan setiap kegiatan tersebut.
- 14) Hasil kinerja pegawai penyuluh dalam memberikan pelayanan dan usaha peningkatan perekonomian masyarakat masih kurang efektif. Permasalahan tersebut disebabkan jarak tempuh atau domisili tempat tinggal penyuluh dengan tempat kerja yang jauh tidak sebanding dengan honorarium yang diterima. Sehingga tenaga penyuluh jarang berada di tempat. Pansus DPRD Kabupaten Bangka Tengah merekomendasikan untuk perekrutan tenaga penyuluh harus bedomisili di Kabupaten Bangka Tengah.
- 15) Minat baca masyarakat di Kecamatan Sungaiselan dan Simpangkatis masih rendah. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya kegiatan dalam peningkatan minat baca masyarakat dan kurangnya fasilitas penunjang untuk menarik minat baca masyarakat. Pansus DPRD Kabupaten Bangka Tengah merekomendasikan agar pemerintah daerah mendirikan perpustakaan kecamatan yang dilengkapi taman bermain anak-anak dan ruang berkumpul masyarakat.
- 16) Fasilitas penunjang kesehatan di wilayah Kecamatan Sungaiselan dan Simpangkatis kurang memadai sehingga Pansus DPRD Kabupaten Bangka Tengah merekomendasikan peningkatan fasilitas kesehatan, contoh peningkatan fasilitas atau renovasi gedung Puskesmas Sungaiselan di Tahun 2020.
- 17) Meningkatnya kecelakaan di Wilayah Kecamatan Sungaiselan, hal tersebut disebabkan karena beberapa hal, antara lain:
 - Tidak adanya tempat parkir untuk mobil truk sehingga memakan badan jalan.
 - Kurangnya penerangan lampu jalan di tempat rawan kecelakaan.Berdasarkan hal tersebut di atas, Pansus DPRD Kabupaten Bangka Tengah merekomendasikan peningkatan rehabilitasi pemeliharaan jalan, pembangunan bahu jalan dan peningkatan penerangan jalan di daerah yang rawan kecelakaan atau persimpangan jalan.

- 18) Kegiatan lomba cipta menu yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Bangka Tengah dengan sasaran ibu-ibu rumah tangga tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Pansus merekomendasikan untuk lomba cipta menu yang menjadi titik sasaran ialah siswa siswi SMK Perhotelan atau tata boga. Dinas terkait juga harus melakukan kerjasama dengan pihak hotel khusus dalam peningkatan sumber daya lulusan SMK Perhotelan atau tata boga dan kerjasama penyerapan lapangan pekerjaan lulusan SMK.
- 19) Kebudayaan di Kabupaten Bangka Tengah belum tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga belum dapat menarik minat wisatawan. Pansus merekomendasikan agar sanggar-sanggar budaya yang telah berdiri dan menggunakan anggaran daerah melakukan kerjasama dengan pihak perhotelan untuk pengisian acara budaya di beberapa hotel di Kabupaten Bangka Tengah, sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik promosi kebudayaan di Kabupaten Bangka Tengah dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- 20) Berkas arsip negara atau arsip penting lainnya tidak tersip secara rapi, teratur dan aman, hal tersebut disebabkan karena sarana prasarana pengarsipan kurang memenuhi standar pengarsipan dan tidak didukung oleh sumber daya manusia yang menguasai kearsipan (arsiparis). Pansus DPRD Kabupaten Bangka Tengah merekomendasikan agar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menyiapkan tempat arsip terpadu di tiap kecamatan yang aman dari air dan api, selain itu juga mengadakan pelatihan pengarsipan bagi aparat desa.
- 21) Transportasi angkutan pegawai dari Wilayah Kecamatan Sungaiselan dan Simpangkatis tidak memadai atau melebihi muatan, hal tersebut disebabkan karena tingginya minat pegawai di Kabupaten Bangka Tengah yang beralih menggunakan angkutan pribadi ke angkutan umum. Pansus DPRD Kabupaten Bangka Tengah merekomendasikan agar Dinas Permukiman, Perumahan, dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah untuk menambah bis pegawai tujuan dari dan ke Kecamatan Sungaiselan dan Simpangkatis yang aman, nyaman dan memadai sehingga tidak adanya perlakuan yang berbeda antara jalur angkut tujuan dari dan ke Kecamatan Sungaiselan dengan tujuan dari dan ke Pangkalpinang.

- 22) Gedung Penyuluh Pertanian Desa Belilik Kecamatan Namang mengalami kerusakan di beberapa titik. Pansus DPRD Kabupaten Bangka Tengah merekomendasikan agar dinas terkait segera melakukan pemeliharaan perbaikan gedung tersebut.
- 23) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah agar segera melakukan pembebasan lahan sekitar Balai Penyuluh Pertanian sehingga dapat dijadikan tempat pembibitan segala macam jenis tanaman.
- 24) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah agar segera membuat aturan untuk pemanfaatan asset kolam renang.
- 25) Di wilayah Kecamatan Pangkalan Baru dan Namang banyak aspal berlubang, direkomendasikan agar dinas terkait segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.
- 26) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah perlu melakukan pemasangan conblok di Pasar Namang.
- 27) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah harus segera mengatasi permasalahan limbah di sekitar Pujasera Kecamatan Pangkalan baru.
- 28) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah agar segera melakukan pemeliharaan dan perbaikan Rumah Dinas Dokter yang ada di Puskesmas Benteng.
- 29) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah agar segera membangun Pos Pemadam Kebakaran di wilayah Kecamatan Pangkalanbaru dan Namang.
- 30) Demi tertibnya administrasi kegiatan desa, Pansus DPRD Kabupaten Bangka Tengah merekomendasikan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah menambah anggaran untuk menambah Tim Pengawasan dan Pemeriksaan.
- 31) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah agar segera membuat Peraturan Bupati terkait honorarium Petugas Pembuat Surat Tanah di Desa/Kelurahan dan Kecamatan, agar tidak ada lagi pungutan liar yang terjadi di masyarakat dalam kepengurusan surat tanah.

5.5 PROGRAM INOVASI DAERAH

Dalam rangka mewujudkan Bangka Tengah Makin Unggul pada Tahun 2021, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah adalah dengan mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk membuat terobosan dalam bentuk inovasi yang dituangkan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi perangkat daerah namun disajikan dan dilaksanakan dengan cara yang inovatif, efektif dengan suatu pemutakhiran yang menggunakan teknologi, aplikasi maupun cara-cara lain yang baru dan inovatif.

Untuk mendukung kebijakan tersebut serta memberikan payung hukum terhadap terobosan atau inovasi yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah diatur melalui Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 37 tahun 2020 tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 913) yang ditetapkan pada 24 April 2020. Peraturan Bupati Bangka Tengah dimaksudkan sebagai pedoman dalam merumuskan inovasi daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah serta bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sehingga dapat mewujudkan Pemerintahan yang inovatif dalam memperkuat daya dukung, kapasitas, dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi yang dilaksanakan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah masih dilanjutkan untuk dievaluasi dan dikembangkan lagi di Tahun 2021, untuk inovasi di Kabupaten Bangka Tengah akan dimasukkan dalam aplikasi di pusat yaitu Pusat Jejaring Inovasi Daerah, dimana aplikasi ini bertujuan mensinergikan membangun negeri melalui pusat jejaring inovasi daerah dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Berikut Inovasi yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel V.7.
Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
1	Sekretariat Daerah	1	Pelayanan Terpadu		√	Untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan publik dalam satu tempat.	2018
		2	SMEP		√	Sistem monitoring dan evaluasi pelaporan	2020
2	DPRD	3	E-Reses	√		Penghimpunan aspirasi masyarakat melalui sistem elektronik reses	2020
3	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	4	SEPADAN	√		Integrasi e-planning dan budgeting	2019
		5	IBNU (Inovasi Baru Nyuntik Gaharu)		√	Penyuntikan pada tanaman gaharu untuk percepatan pemanenan	2019
4	Inspektorat Daerah	6	WARCOP APIP QITE	√		Program peningkatan dini pencapaian visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah melalui pendampingan konsultasi APIP	2018
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7	SIMPEG ONLINE (Sistem Informasi Kepegawaian Online)	√		Memudahkan OPD dalam mengupdate data kepegawaian secara valid ke dalam database yang ada pada BKPSDMD. Data kepegawaian yang lengkap dan akurat sehingga dapat mengetahui dan mencetak data PNS sesuai kebutuhan secara realtime	2012
		8	Sistem Absensi Pegawai Selawang Segantang (SIAGA LANTANG)	√		Memudahkan dalam pemrosesan perhitungan rekapan TPP, pemotongan hingga finalisasi.	2019

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
		9	Siketawai (sistem informasi kinerja tahunan pegawai)	√		aplikasi elektronik untuk penilaian kinerja dari PNS.	2019
		10	Mang Sidik (Manajemen Pengelolaan Sistem Pendidikan dan Pelatihan)	√		Memudahkan untuk membuat identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan secara online	2015
		11	Sitasipeg (Sistem Informasi Tata Arsip Kepegawaian)	√		Sebagai bank data kepegawaian, backup data digital	2015
		12	Sistem Informasi Kepegawaian Rencana untuk Cuti (Sikerucut)	√		Memudahkan ASN dalam mencari informasi cuti dan mengajukan cuti baik cuti tahunan, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan sehingga mempercepat proses administrasi.	2020
		13	E-mutasi	√		Penanganan/penyelesaian kenaikan berkala secara less paper	2020
		14	E-TPP	√		Perhitungan dan informasi TPP secara online	2020
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15	SEMANGAT (Sistem Manajemen Keuangan Terpadu)	√		Penerima hibah dapat melaporkan penggunaan dananya secara online dan real time sehingga dapat menertibkan penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah.	2015
		16	Pengembangan SMS gateway	√		Pencairan SP2D sistem akan diikuti dengan adanya notifikasi langsung kepada penerima/pihak ke tiga, meminimalisir pungli serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat, notifikasi dari pencairan penerbitan SP2D ke penerima SP2D via kartu halo telkomsel	2016

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
		17	Bend 55	√		Aplikasi pengeluaran	2017
		18	SEPAKAT	√		Aplikasi pengendali keuangan, data keuangan Pemda real time	2019
		19	SIMPATI (Sistem Informasi Pencairan Dana Transparan dan Informatif)	√		Pencairan dana transparan, pelaporan kpd pihak ketiga/bendahara dilaksanakan secara otomatis by server BPKAD, bebas gratifikasi	2020
		20	PESAT (Pelayanan Satu Pintu)		√	Semua pelayanan yang diberikan BPKAD melalui satu pintu	2020
		21	SIMBADA	√		pengembangan/ penyempurnaan sistem manajemen aset, perbendaharaan serta integrasi dengan beberapa sistem lain seperti TASPEN, SIRUP	2018
		22	SIM BOS	√		Aplikasi sistem informasi manajemen BOS APBN, Untuk sekolah SD dan SMP kerjasama dengan DINDIK, (tahun 2016 SMA masih di Kabupaten)	2016
		23	SIM JKN	√		Aplikasi sistem informasi JKN Puskesmas berbasis online,	2017
		24	E-action	√		Lelang BMD secara online bekerjasama dengan KPKNL	2018
		25	Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan BLUD (SAK BLUD)	√		Aplikasi sistem akuntansi keuangan BLUD, dipakai RSUD	2018
		26	Aplikasi Persediaan	√		Penginputan persediaan barang di OPD secara online	2018

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
7	Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah	27	Aplikasi Pendapatan Daerah	√		Mengelola pajak terintegrasi dengan SAKD	2019
		28	E-retribusi	√		Pembayaran distribusi pedagang dengan menggunakan kartu dengan bukti struk, kerjasama dengan bank sumsel	2020
8	Dinas Pendidikan	29	Tambahan Muatan Lokal Al Qur'an dan Hadist pada Kurikulum		√	Penambahan Muatan Lokal Al Qur'an dan Hadist pada Kurikulum SD dan SMP	2019
		30	GAHARU (Gerakan Hati Nurani Guru)		√	Inovasi yang diterapkan di SD 4 Koba dalam mendukung pendidikan inklusif. Gerakan ini menekankan pada pendekatan Cinta, Kasih, dan Ketulusan guru-guru dalam mendidik, mendampingi dan mengajar anak-anak yang normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus secara bersamaan	2017
9	Dinas Kesehatan	31	Call Me BABIES (Cara Aman Kontrol Kehamilan, Melahirkan, Bayi dan Balita Sehat)		√	Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatus (AKN). Inovasi yang dilakukan bidan Desa Cambai Selatan melalui alarm yang tersetting di HP untuk prediksi kelahiran. Bekerjasama antara bidan, RT, Tomas, Toga, dan Kader.	2017

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
		32	ABCD 2/6 (Aku Berani Coba Datang ke Dokter Gigi, 2 kali dalam Setiap 6 Bulan)		√	Sebuah program tur kesehatan dalam rangka mengenalkan anak-anak PAUD dengan profesi dokter gigi dan profesi kesehatan lainnya yang ada di Puskesmas Koba yang dikemas dalam suasana yang menyenangkan serta mengedukasi mereka tentang bagaimana merawat gigi dengan baik dan benar.	2016
		33	SEPATU (Sistem Pelayanan Rujukan Terpadu)		√	Sistem rujukan ke Rumah Sakit secara terpadu	2019
		34	KURMA SEHAT (Kunjungan Rumah Masyarakat Bangka Tengah Sehat)		√	Kunjungan ke rumah-rumah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan	2019
		35	SIKAT BERSIH		√	Skrining Kolesterol, Asam Urat, Gula Darah dan HB Bersama Kita Sehat	2019
		36	SI MARSHA (Aksi Gemar Pemeriksaan HIV)		√	Pemeriksaan HIV untuk masyarakat beresiko tinggi	2019
		37	Penerbitan akta kelahiran bagi bumil yang melahirkan di RSUD Bangka Tengah		√	Penyediaan Akta Kelahiran dan KIA bagi bayi baru lahir di RSUD bekerjasama dengan Dindukcapil	2017
		38	Madu Pelawan (Mari ke Posyandu melalui peran aktif Relawan)		√	Peningkatan kehadiran ibu dan anak ke Posyandu melalui relawan	2017

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
		39	OVI-OSE (One Village-One Sanitation Entrepreneurship)		√	Satu desa satu enterpreneurship kesehatan	2017
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	40	URC (Unit Reaksi Cepat)	√		Unit reaksi cepat penanganan kerusakan jalan yang membahayakan melalui pelaporan lewat whatsapp grup yang beranggotakan pegawai PU dan para Kepala Desa di Kecamatan Koba dan Lubuk Besar.	2018
		41	SI KOPLO (Sistem Identifikasi Pemanfaatan Kolong)		√	Informasi dan strategi tepat guna pemanfaatan dan pengembangan lahan pasca tambang (kolong).	2019
		42	TUKANG PAKU BESI (Tukang Padat Karya Unggul Bersertifikasi)		√	Membuka akses dan peluang bagi tukang di Kabupaten Bangka Tengah sehingga mendapatkan sertifikat keterampilan yang diakui nasional.	2018
		43	SITARU (Sistem Informasi Tata Ruang)	√		Memberikan informasi terkait tata ruang di Kabupaten Bangka Tengah	2020
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44	Klinik Rembug Desa (Coaching Desa)		√	Harmonisasi untuk desa, pendampingan kepada desa-desa pada saat penyusunan APBDes dan APBDes-P agar sinkron dengan kebijakan daerah.	2017
		45	LAKSO		√	Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial yang terpadu/satu pintu. Pada saat ini baru pelayanan pembuatan SKTM.	2018
12	Dinas Lingkungan Hidup	46	Sistem Belajar Mengenal Lingkungan dan Sampah		√	Wisata Pendidikan Bagi Siswa untuk mengenal lingkungan tentang sampah dan pengomposan.	2019

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
		47	Bank Sampah		√	Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan sampah organik dan non organik.	2020
		48	Pengelolaan Taman Kehati		√	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati di Desa Namang	2015
13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	49	Aplikasi Bangka Tengah <i>Travelpedia</i>	√		Aplikasi informasi terkait wisata di Bangka Tengah	2019
		50	Parade musik Pemuda Babel Bersatu		√	Ajang perlombaan sekaligus promosi wisata Bangka Tengah serta meningkatkan partisipasi dan minat pemuda dalam kegiatan kepemudaan di daerah	2020
		51	Drumcamp Island di Pulau Ketawai		√	Mempromosikan Pulau Ketawai sebagai destinasi wisata Kabupaten Bangka Tengah	2020
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52	POJOK MAL DUKCAPIL	√		Pelaksanaan pelayanan secara terpadu	2019
		53	DESA BINAAN		√	Desa Binaan Sadar Adminduk (Mendukung Kampung KB Terintegrasi Lintas OPD)	2019
		54	BEKISA		√	Peningkatan cakupan layanan dok kependudukan pada 6 desa (bersama kita sadar adminduk) Terentang, Kayu Besi, Jeruk, Pasir Garam, Kerakas, Lubuk Pabrik	2019
		55	SIKANCIL	√		Sistem pelayanan Online Pencatatan Perkawinan Non Muslim di Rumah Ibadah	2019
		56	PAKEM ONLINE		√	Pelayanan kematian secara online dan jemput bola melalui petugas pemakaman	2018

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
		57	NIKMAT		√	Nikah Massal Terpadu, fasilitasi bagi masyarakat yang ingin memiliki buku nikah	2019
		58	JEMPOL PUTER		√	Jemput bola Pelayanan ke pulau terpencil	2019
		59	SIMANTAN WARAS	√		Sistem Pelayanan Data Warehouse	2018
		60	SIADIL	√		Sistem Arsip Kependudukan Digital	2018
		61	PADI KEDEL	√		Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dengan Kecamatan Desa Kelurahan	2019
		62	SAPE JEBOL		√	Safari Pelayanan Dokumen Kependudukan Jemput Bola di Desa/Kelurahan dalam rangka peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dalam rangka menuju gerakan indonesia sadar administrasi kependudukan (GISA)	2019
		63	SIPINDANG	√		Sistem pelayanan pindah datang online, penyelenggaraan perpindahan data penduduk di Kabupaten Bangka Tengah	2018
		64	DIFAST ADMINDUK		√	Memfasilitasi masyarakat yang sudah bermukim di Kab. Bangka Tengah selama bertahun-tahun tetapi tidak memiliki dokumen kependudukan	2016
		65	BATIK CUAL		√	Pelaksanaan isbat nikah untuk percepatan kepemilikan buku nikah dan status orang tua pada akta kelahiran anak	2018

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
		66	SIPELANDUK	√		Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi android	2017
		67	TANDUK PERMENT		√	Pendataan penduduk non-permanent	2016
		68	SEMANGKA		√	Semua anak Bangka Tengah memiliki KIA	2016
		69	PENANTIAN		√	Peningkatan cakupan akta kematian	2019
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70	AREMA SS		√	Integrasi program anak dan remaja	2017
		71	Industri Rumahan (IR)		√	Membina usaha khusus ibu-ibu rumah tangga terdiri dari 1-3 orang	2016
		72	Anak Bekisah	√		Anak-anak bercerita melalui sebuah program di radio, diadakan pada saat event tahunan hari anak	2017
		73	PATBM "Pelikas"		√	Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan	2017
		74	APLIKASI KISANAK (KITA SAYANGI ANAK)	√		Untuk memberikan pelayanan konseling kepada masyarakat, orang tua, dan anak secara online serta bantuan darurat kepada anak secara tepat dan akurat	2019

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	75	SIM PKB	√		Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor	2017
		76	NGUKIR (Ingat Uji KIR), Si Pintar Pengingat Jadwal Pengujian	√		Pemberitahuan informasi terkait uji berkala kendaraan bermotor melalui SMS notifikasi, untuk meminimalisir keterlambatan uji kendaraan bermotor dan meningkatkan pendapatan daerah.	2017
		77	Penerangan Jalan Umum berbasis Android/Smartphone Control	√		Khusus PJU solar cell	2018
		78	BSB Cash (e-money)	√		e-money untuk pembayaran bus pegawai	2018
		79	Sistem Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		√	Pemetaan lokasi-lokasi perumahan, kawasan kumuh, kawasan kemiskinan	2019
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	80	Sistem Informasi Geospasial (GIS) Penanam Modal	√		Sebuah aplikasi yang berbentuk website bertujuan memudahkan investor untuk melihat peluang investasi yang berada di Kabupaten Bangka Tengah.	2019
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	81	GEMAS (GEOSPASIAL EKONOMI MASYARAKAT)	√		Aplikasi yang menyediakan konten data dan informasi yang berbasis Geographic Information System (GIS) tentang pelaku-pelaku ekonomi misalkan saja data dan informasi tentang Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kab. Bangka Tengah yang bisa diakses melalui web maupun mobile phone	2020

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
		82	Internet Terpusat Bateng-Unggul	√		Pemberian layanan internet bagi Organisasi Perangkat Daerah secara terpusat melalui Diskominfo	2020
		83	SIPELAWAN (Sistem Presensi Elektronik Selawang Segantang)	√		Absensi Online via Mobile	2020
		84	Temakip Terintegrasi	√		Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara Terintegrasi (Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan)	2019
		85	E-Monev dan se-Monev	√		Sistem monitoring dan evaluasi penganggaran OPD	2019
		86	Sistem Informasi Desa	√		Pengembangan website desa yang berisi informasi tentang pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa	2019
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	87	Madu Pelawan (Rumah Terpadu Pengembangan dan Layanan Para Wirausaha Mandiri)		√	Rumah layanan konsultasi dan fasilitasi dalam jasa desain label kemasan, jasa pembuatan leaflet, jasa fasilitasi akses permodalan	2018
		88	Klinik kemasan	√		Layanan konsultasi desain kemasan produk UMKM	2019
		89	Er_USIP	√		Pemungutan retribusi pasar secara non tunai yang bekerjasama dengan Bank Sumsel	2017
		90	Pelayanan UMKM terpadu		√	Sertifikasi halal, fasilitasi P-IRT, pengajuan pinjaman dana bergulir, permohonan pendampingan KUR, pembentukan koperasi, dan pendampingan usaha (single window service)	2020

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
		91	SIP Koba		√	Layanan informasi penyaluran komoditi strategis dan stock bahan pokok untuk masyarakat	2020
20	Dinas Pangan	92	SIPPAHIT (Sistem Penyuluhan Penggunaan agen hayati untuk tanaman)		√	Mengubah perilaku keterampilan sikap petani untuk menggunakan bahan organik untuk budidaya tanaman	2019
		93	Pemberdayaan KWT dan Kelompok Mandiri Pangan		√	Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Mandiri Pangan dalam Penerapan Penganekaragaman konsumsi Pangan	2019
		94	Inovasi budidaya dan pengendalian penyakit kuning tanaman lada		√	Pengembangan informasi dalam budidaya dan pengendalian penyakit kuning pada lada	2020
21	Dinas Perikanan	95	SIDOLPIN (Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan)	√		Pemberian informasi terkait daerah penangkapan ikan.	2017
		96	NILA IBNU (Ikan Bangka Tengah Nila Unggul)		√	Pembudidayaan ikan air payau dan/atau nila	2017
		97	Minapadi		√	Untuk budidaya ikan air tawar dengan memanfaatkan genangan air sawah	2017
		98	POKARI		√	Produksi pakan ikan mandiri	2017
22	Dinas Pertanian	99	Apoktar		√	Pembinaan dan Penumbuhan Kelompok Tani Penangkar	2012
		100	Budaya Sarang (Budidaya Sahang Ramah Lingkungan)		√	Membudayakan petani untuk mulai menggunakan pupuk organik, pupuk hayati, benih unggul tersertifikasi, dan tajar hidup untuk menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penggunaan bahan kimia.	2018

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
		101	Si Rawit Jempol (Silase Ransum Limbah Sawit berbasis Kebijakan Pemanfaatan Bahan Pakan Lokal)		√	Memberikan alternative hijauan untuk ternak sapi dengan penekanan bahwa bahan pakan yang dipakai berasal dari lokal yaitu limbah sawit sehingga dapat menekan biaya pakan bagi peternak.	2014
		102	Getas Rasa Asin (Gerakan Aktif Bersama Masyarakat Berantas Rabies dengan Aktif Vaksin)		√	Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih aware terhadap bahaya penyakit rabies maka Dinas Pertanian melibatkan perangkat desa atau tokoh masyarakat untuk menggerakkan partisipasi aktif warganya dalam memerangi penyakit rabies bersama-sama	2015
		103	Kartu Gerakan Pedet Sehat (GPS)		√	Kartu sehat anak sapi, untuk memantau kesehatan ternak	2018
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	104	Inlislite		√	Pembuatan kartu anggota perpustakaan daerah Selawang Segantang Kabupaten Bangka Tengah melalui kegiatan perpustakaan keliling dengan menjemput bola ke sekolah-sekolah (khusus guru) dan masyarakat (kegiatan pelayanan terpadu)	2019
24	Satuan Polisi Pamong Praja	105	MELEJIT		√	Mendatangi Masyarakat Melalui Masjid	2019
		106	Sama Maslim		√	Satpol PP menyambangi Majelis Ta'lim	2020
		107	SBKS		√	Satpol PP berkunjung ke sekolah	2020

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Darin g	Luring		
		108	SBRS		√	Satpol PP berkunjung ke Rumah Sakit	2020
		109	SIAP DAN	√		Sistem pengaduan dan kejadian	2020
27	Kecamatan Koba	110	KIOS K	√		Sebagai pusat informasi	2018
28	Kecamatan Lubuk Besar	111	SERASE (Setiap RT Satu Rase)		√	Pengembangan Madu Kelulut.	2019
		112	PATEN (Aplikasi sistem Pelayanan Terpadu)	√		Memper memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan melalui penyediaan mesin atrian yang terhubung dengan server serta dapat melihat indeks kepuasan masyarakat.	
29	Kecamatan Pangkalan Baru	113	Semarak Pesta Pantai Batu Belubang		√	Upaya menjadikan kawasan Pantai Batu Belubang sebagai objek wisata.	2017
		114	Peningkatan Usaha Masyarakat melalui Pengajian Umum		√	Pembimbingan hingga pengajuan kredit ke Bank sehingga saat perijinan ulang kecamatan dapat memantau.	2020
		115	Pembangunan Taman Interner Cyber Park		√	Pemnfaatan lahan di sekitar Kantor Camat	2017
30	Kecamatan Sungaiselan	116	MAGUMIS (Malam Minggu dan Malam Kamis)		√	Sebagai kontrol pemerintah kecamatan yang bekerjasama dengan satpol PP, tokoh masyarakat terkait dengan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, menyasar pada operasi kenakalan remaja, minuman keras.	2017
		117	JUMAJI (Jumat Antar Jemput Pelayanan)		√	Jumat antar jemput perizinan kecamatan.	2018

No.	Nama Perangkat Daerah	No.	Nama Inovasi	Jenis		Fungsi	Tahun
				Daring	Luring		
		118	PATEN (Aplikasi sistem Pelayanan Terpadu)	√		Memper memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan melalui penyediaan mesin atrian yang terhubung dengan server serta dapat melihat indeks kepuasan masyarakat.	2018
		119	ASUS		√	Pembuatan Alun-Alun Sungaiselan	2019
		120	APPKEL	√		Aplikasi Sistem informasi Laporan Kependudukan Kelurahan	2019
31	Kecamatan Namang	121	Sistem Pelayanan Tepat Waktu (SIPETEW)	√		Percepatan pembuatan surat pengantar dari desa ke kecamatan.	2020
		122	PP ANDROID (Pelayanan Paten Berbasis Android)	√		Memanfaatkan IT untuk pelayanan yang belum optimal.	2020
32	Kecamatan Simpang Katis	123	JAMBA ARUM		√	(Arisan Jamban Antar Ke rumah) peruntukkan bagi keluarga tidak mampu sebanyak 15 unit.	2016
		124	NATAK DUSUN		√	(Pelayanan Paten Masuk Dusun), Dana Sehat peruntukkan untuk ibu hamil miskin sebesar 5 ribu perbulan sumbangan dari masyarakat.	2016
		125	Profil kecamatan berbasis aplikasi	√		Pembuatan aplikasi profil kecamatan melalui pemetaan sederhana	2020
Total Inovasi		125					

Sumber: Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 37 tahun 2020 tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Bangka Tengah

Beberapa inovasi yang menjadi unggulan daerah dan telah memberikan dampak positif kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, seperti menambah pendapatan asli daerah, menambah peningkatan sektor ekonomi maupun peningkatan pelayanan publik diantaranya yaitu:

1. NGUKIR (Ingat Uji KIR), Si Pintar Peningat Jadwal Pengujian

Merupakan inovasi pelayanan publik dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah. Inovasi tersebut telah diterapkan sejak 6 April 2020. NGUKIR merupakan inovasi yang memanfaatkan teknologi SMS notifikasi pengingat jadwal KIR keliling dan pengingat masa berlaku KIR setiap kendaraan pada awal bulan, sehingga pemilik kendaraan ingat dengan jadwal KIRnya. Rancang bangun inovasi ini bermula dari kualitas dan kuantitas pemilik kendaraan Kabupaten Bangka Tengah masih rendah kesadarannya dalam memperpanjang KIR dan banyaknya kendaraan yang numpang uji keluar daerah dan mutasi uji keluar daerah yang belum melapor serta banyaknya kendaraan yang tidak memperpanjang KIR berdasarkan banyaknya kartu uji yang menumpuk.

Berdasarkan hal tersebut terbentuklah inovasi NGUKIR yang bertujuan untuk mengingatkan pemilik kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dalam memperpanjang masa berlaku KIR nya yang akan memasuki waktu tenggang setiap bulannya, mendukung target pemerintah pusat untuk Zero Accident dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor serta berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Manfaat yang dirasakan melalui inovasi ini yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangka Tengah, meningkatkan kedisiplinan pemilik kendaraan bermotor dalam pembayaran KIR dan dapat terhindar dari terkena razia serta menyiapkan data base nomor handphone pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Bangka Tengah agar bisa dikirim sms notifikasi pengingat jadwal kir keliling dan pengingat masa berlaku KIRnya setiap kendaraan pada awal bulan.

2. SEMANGKA (Semua Anak Kabupaten Bangka Tengah Memiliki KIA)

Merupakan Inovasi pelayanan publik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah yang telah diterapkan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Pada tahun 2017 proses pencetakan KIA sudah dilaksanakan secara system yang terintegrasi di APLIKASI SIAK. Pencetakan KIA adalah hasil dari pelayanan jemput bola ke sekolah SD yang ada di Bangka Tengah dengan melakukan pemotretan kepada siswa-siswa dan KIA yang sudah dicetak sudah diantar lagi ke sekolah-sekolah tersebut. Pelayanan yang dilakukan di pusat pelayanan yaitu dinas Dukcapil dan kecamatan, pemohon mengajukan akta kelahiran anak dibawah umur 17 tahun, maka KIA secara otomatis akan tercetak. Jadi, pemohon akan mendapatkan KK, Akta Lahir dan KIA bagi penambahan anggota keluarga anak yang baru lahir. Pelayanan secara Daring/Online, yaitu melalui Hp Android dengan mendownload Aplikasi Sipelanduk di Playstore. Tujuan inovasi daerah yaitu mendukung kesejahteraan anak sebagai wujud pemenuhan hak anak yang memiliki identitas yang dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, hiburan, olahraga dan lain-lain. Mendukung Kabupaten Bangka Tengah menjadi Kabupaten Layak Anak, dengan adanya KIA anak Bangka Tengah dapat lebih terdata.

Manfaat yang diperoleh melalui inovasi ini yaitu untuk meningkatkan tertibnya administrasi kependudukan sehingga timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. dengan pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara jasmani rohani maupun sosial, bagi pemerintah jika anak memiliki KIA akan mempermudah pendataan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi anak, sehingga akan mempermudah proses pembangunan, pemberian bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sosial.

3. SIDOLPIN (Sistem Informasi Daerah Potensial Penangkapan Ikan)

Merupakan inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dari Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah. SIDOLPIN adalah suatu inovasi teknologi informasi yang dapat membantu dan mempermudah dalam melakukan penangkapan ikan. SIDOLPIN merupakan penentan daerah/lokasi potensial penangkapan ikan melalui penginderaan jarak jauh dengan menganalisis data parameter(suhu permukaan laut dan klorofil) yang hasilnya berupa Peta dengan koordinat yang dituju oleh nelayan yang ada di perairan laut di Kabupaten Bangka Tengah.

SIDOLPIN bertujuan untuk mempermudah/membantu nelayan penangkapan ikan, meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan sehingga diharapkan nelayan Kabupaten Bangka Tengah sejahtera. Manfaat yang diperoleh yaitu lokasi penangkapan ikan yang potensial lebih terarah, hemat waktu dan biaya operasional, meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan. Hasil dari inovasi ini yaitu adanya suatu data/informasi berupa peta dengan koordinat dalam bentuk aplikasi berbasis android yang dapat diunduh di Playstore dan titik koordinat juga dapat diunduh di website Pemkab Bangka Tengah.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK), indikator tersebut tertuang dalam tabel berikut:

Tabel VI.1
Indikator Tujuan Daerah terhadap Visi

“Terwujudnya Negeri Selawang Segantang yang Amanah, Bersih, Berwibawa, dan Sejahtera berlandaskan Ekonomi Kerakyatan”

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif berlandaskan IMTAQ	Meningkatnya kualitas Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,09*	68,98	69,47	69,96	70,45	70,95	71,44
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Merata dan Berkelanjutan serta penguasaan dan pengembangan IPTEK	Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Bangka Tengah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0,3%	2,13%	3,79%	3,9%	4,4%	4,58%	4,78%
3	Meningkatkan sarana dan prasarana publik serta memacu percepatan pelaksanaan	Tercapainya infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas	Persentase peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana	N/A	61,72%	65,03 %	70,45 %	75,12 %	81,50 %	81,50%

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pembangunan yang adil dan merata									
4	Mewujudkan Lingkungan yang Aman, Asri, dan Lestari serta berkelanjutan	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penanggulangan Bencana Yang Handal	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	56,03	56,03	56,08	56,08	57,03	57,03
5	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbuka	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	65	65	67	69	71	73
		Meningkatnya kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun							
			- Jumlah Desa Maju	N/A	N/A	14	19	20	25	30
			- Jumlah Desa	N/A	N/A	42	37	36	31	26

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Berkembang							
		Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEK	SPBE (Sistem Pemerintah berbasis Elektronik)	10	10	11	12	13	14	14
			Rata-rata survey kepuasan masyarakat	N/A	N/A	78,5	79	79,5	80	80,5

Sumber data: RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021

Tabel VI.2**Indikator Sasaran Daerah terhadap Visi**

“Terwujudnya Negeri Selawang Segantang yang Amanah, Bersih, Berwibawa, dan Sejahtera berlandaskan Ekonomi Kerakyatan”

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif berlandaskan IMTAQ	Meningkatnya kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka rata-rata Lama Sekolah	6,7 tahun	6,75 tahun	6,8 tahun	6,85 tahun	6,9 tahun	6,95 tahun	7 tahun
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,98*	70,11	70,28	70,50	70,67	70,84	71,00
			Peningkatan kesejahteraan masyarakat	PDRB per Kapita	30.442.157	30.923.914	31.396.899	32.100.185	32.868.936	33.735.581	34.737.355
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	58,13%	59%	60%	91,50%	91,70%	92,10%	92,10 %
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Merata dan Berkelanjutan serta	Meningkatnya perekonomian Kabupaten Bangka Tengah	Peningkatan taraf hidup dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0,3%	2,13%	3,79%	3,9%	4,4%	4,58%	4,78%
				Indeks Gini	0,36	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24
				Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	penguasaan dan pengembangan IPTEK			Regional)							
				Nilai Tukar Petani	98,42	100	100,5	101	101,5	102	102,5
				Nilai Tukar Nelayan	N/A	100	104	105	106	107	108
				Pola Pangan Harapan	86,5	87	88	89	90	91	92
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	N/A	100	102,5	103	103,5	104	104,5
				PDRB Sub Sektor Pariwisata	N/A	N/A	255.38 7.000. 000	280.925 .000.00 0	309.017 .000.00 0	339.919.0 00.000	373.91 1.000. 000
3.	Meningkatkan sarana dan prasarana publik serta memacu percepatan pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata	Tercapainya infrastruktur dan sarana prasarana publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas jalan	Persentase jalan kabupaten baik dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam	N/A	61,72%	65,03 %	70,45%	75,12%	81,50%	81,50 %
			Meningkatnya akses air bersih dan air limbah yang memadai	Persentase penduduk berakses air minum	N/A	64,78%	73,18 %	75,67%	82,01%	86,37%	86,37 %
				Persentase penduduk yang memiliki sistem air limbah yang memadai	N/A	79,85%	80,85 %	87,13%	90,83%	93,09%	93,09 %

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air baku	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	N/A	29,35%	85,98 %	89,63%	93,69%	96,88%	96,88 %
			Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	N/A	78,75%	78,75 %	80,20%	80,25%	80,30%	80,30 %
4.	Mewujudkan Lingkungan yang Aman, Asri, dan Lestari serta berkelanjutan	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Penanggulangan Bencana yang Handal	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	56,03	56,03	56,08	56,08	57,03	57,03
5.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Terciptanya birokrasi pemerintah (<i>good governance</i>) yang profesional, terintegrasi berkarakteristik,	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	65	67	69	71	73
				Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	8,69%	8,7%	8,8%	8,9%	9,0%	9,1%	9,2%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan terbuka		berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN								
		Meningkatnya kualitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Indeks Desa Membangun							
				- Jumlah Desa Maju	N/A	N/A	14	19	20	25	30
				- Jumlah Desa Berkembang	N/A	N/A	42	37	36	31	26
		Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan IPTEK	Terwujudnya sistem inovasi dan informasi pelayanan publik	Sistem informasi manajemen Pemda yang dikembangkan	10	10	11	12	13	14	15
				Rata-rata survey kepuasan masyarakat	N/A	N/A	78,5	79	79,5	80	80,5

Sumber data: RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021

Tabel VI.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Lainnya

NO		Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
	BIDANG URUSAN/INDIKATOR		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Pertumbuhan ekonomi	0,3%	2,13%	3,79%	3,9%	4,4%	4,58%	4,78%
1.2.	Laju inflasi	6,03*	6,02	6,01	6,00	5,99	5,98	5,97
1.3.	PDRB per kapita (Rupiah)	30.442.157	30.923.914	31.396.899	32.100.185	32.868.936	33.735.581	34.737.355
1.4.	Indeks Pembangunan Manusia	68,09*	68,98	69,47	69,96	70,45	70,95	71,44
1.5.	Indeks Gini	0,36	0,34	0,32	0,30	0,28	0,26	0,24
1.6.	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,52	0,50	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40
1.7.	Persentase penduduk diatas garis	94,73	94,94	95,16	95,37	95,59	95,80	96

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kemiskinan							
1.8.	Angka kriminalitas yang tertangani	1,20	1,00	0,87	0,62	0,50	0,38	0,32
Fokus Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Pendidikan							
1.1.	Angka harapan lama sekolah	11,48 thn	11,56 thn	11,64 thn	11,72 thn	11,80 thn	11,88 thn	12 thn
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	6,70 thn	6,75 thn	6,80 thn	6,85 thn	6,90 thn	6,95 thn	7,00 thn
1.3.	Angka partisipasi kasar							
1.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	112,79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	91,66%	93,05%	94,44%	95,83%	97,22%	98,61%	100%
1.3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	70,33%	75,27%	80,22%	85,16%	90,11%	95,05%	100%
1.4.	Angka Partisipasi Murni							
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APK) SD/MI/Paket A	94,80%	95,67%	96,54%	97,41%	98,28%	99,15%	100%
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APK) SMP/MTs/Paket B	70,80%	75,67%	80,54%	85,41%	90,28%	95,15%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	41,30%	41,80%	0	0	0	0	0
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	99,4	99,5	99,55	99,6	99,65	99,7	99,75
2.2.	Angka usia harapan hidup	69,98	70,11	70,28	70,50	70,67	70,84	71
2.3.	Cakupan balita gizi buruk	0,00094	0,00088	0,00081	0,00075	0,00069	0,00063	0,00056
3.	Ketenagakerjaan							
3.1.	Rasio penduduk yang bekerja	94%	93%	92%	91%	91%	90%	89%
Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1.	Kebudayaan							
1.1.	Jumlah gedung kesenian	0	0	0	1	1	1	1
2.	Pemuda dan Olahraga							
2.1.	Jumlah gedung olahraga	1	3	3	3	3	3	3

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Fokus Layanan Urusan Wajib							
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.2.	Angka partisipasi sekolah SMP/MTs	52,34%	60,28%	68,22%	76,16%	84,1%	92,04%	100%
1.1.3.	Rasio guru/murid SD/MI	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32
1.1.4.	Rasio guru/murid SMP/MTs	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36
1.1.5.	Rasio murid per kelas rata-rata SD/MI	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32
1.1.6.	Rasio murid per kelas rata-rata SMP/MTs	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36	1:36
1.2.	Pendidikan menengah:							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	29%	30%	35%	55%	60%	65%	65%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2.2.	Rasio guru terhadap murid	1:36	1:36	0	0	0	0	0
1.2.3.	Rasio murid per kelas rata- rata	1:36	1:36	0	0	0	0	0
1.2.4.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,80%	99,00%	99,20%	99,40%	99,60%	99,80%	100,00%
1.3.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):							
1.3.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	61,27%	67,73%	74,19%	80,65%	87,11%	93,57	100%
1.4.	Angka Putus Sekolah:							
1.4.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,33%	0,26%	0,19%	0,12%	0,05%	0,00%	0,33%
1.4.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,19%	0,15%	0,11%	0,07%	0,03%	0,00%	0,19%
1.4.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	2,10%	-	-	-	-	-	2,10%
1.5.	Angka Kelulusan:							
1.5.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.5.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.5.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100,00%	-	-	-	-	-	100,00%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.5.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	80,54%	84,43%	88,32%	92,21%	96,10%	100,00%	80,54%
1.5.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	94,91%	95,93%	96,95%	97,97%	98,99%	100,00%	94,91%
1.5.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi	81,12%	83,43%	85,74%	88,05%	90,36%	92,67%	95,00%
2.	Kesehatan							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	136 per 15962	136 per 16.121,62	136 per 162.81,24	137 per 164.40,86	137 per 166.00,48	137 per 167.60,1	137 per 169.19,72
2.2.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	47 per 172.751	69	69	69	70	70	70
2.3.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100	100	100	100	100	100
2.4.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100	100	100	100	100	100
2.5.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	40,58%	40,59	41,00	41,15	41,40	41,80	42,00
2.6.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00%	100	100	100	100	100	100
2.7.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100,00%	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.8.	Cakupan kunjungan bayi	100,27%	90	90	90	90	90	90
2.9.	Cakupan puskesmas	133,34%	150%	150%	150%	150%	150%	150%
2.10.	Cakupan pembantu puskesmas	28,57%	28,57%	28,57%	28,57%	28,57%	28,57%	28,57%
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	50,76	54,82	62,13	72,18	81,32	85,89	85,89
3.2.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,00184	0,00188	0,00191	0,00195	0,00198	0,00201	0.00204
3.3.	Panjang jalan dilalui Roda 4	100	100	100	100	100	100	100
3.4.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	100	100	100	100	100	100	100
3.5.	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten baik	59,72%	61,72%	68,43%	73,32%	77,44%	81,50%	81,50%
3.6.	Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	66,85	69,60	73,26	76,87	79,30	82,25	82,25
3.7.	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala perkotaan	66,84%	69,60%	73,26%	76,87%	79,30%	82,25%	82,25%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.8.	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0	0	0	0	0	0	0
4.	Perumahan							
4.1.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	N/A	86,71	87	88	89	90,25	90,25
4.2.	Persentase Penduduk berakses Air Bersih	64,78	67,38	70,68	73,44	77,22	80,25	80,25
4.3.	Persentase Penduduk yang memiliki sistem air limbah yang memadai	80	80,85	81,67	82,73	84,04	85,46	85,46
5.	Penataan Ruang							
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	1,85	1,89	1,93	1,97	2,01	2,05	2,09
5.2.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,016	0,020	0,026	0,033	0,043	0,055	0,071
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	0	0	0
6.	Perencanaan Pembangunan							
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Perhubungan							
7.1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	2	2	3	3	5	5
8.	Lingkungan Hidup							
8.1.	Cakupan penghijauan wilayah Sumber Mata Air	0	2%	4%	6%	8%	10%	10%
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil							
9.1	Rasio Kepemilikan KTP-El	0,87	0,88	0,90	0,91	0,92	0,94	0,95
9.2	Persentase Kepemilikan KTP-El	86,95	88,23	89,54	90,86	92,20	93,57	94,95
9.3	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100	100	100	100	100	100	100
9.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
11.1.	Rasio KDRT	24	22	20	18	16	14	12

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	30%	32%	33%	34%	35%	37%	37%
11.3.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2
12.2.	Rasio akseptor KB	71,71	71,76	71,81	71,86	71,91	71,96	71,96
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	71,71	71,76	71,81	71,86	71,91	71,96	71,96
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	10,78%	10,70	10,62	10,54	10,46	10,38	10,38
12.	Sosial							
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	5	5	5	5	5	5	5
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	84,97%	87%	100%	100%	100%	100%	100%
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	84,97%	87%	100%	100%	100%	100%	100%
13.	Ketenagakerjaan							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14.1.	Tingkat pengangguran terbuka	4,70%	4,50%	4,30%	4,10%	3,90%	3,70%	3,50%
14.2.	Keselamatan dan perlindungan	58%	42%	47%	52%	54%	57%	58%
14.3.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	66,67%	70%	75%	80%	85%	90%	90%
14.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah							
15.1.	Jumlah BPR/LKM	40	0	0	0	0	0	0
15.2.	Jumlah Koperasi Aktif	87	92	97	102	107	112	112
15.3.	Jumlah UMKM	35.155	35.550	35.900	36.250	36.600	37.000	37.000
15.	Penanaman Modal							
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	3	3	3	3	4	4	5
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Miliar)	490	520	550	580	620	670	730
16.3.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	30	30	30	30	40	50	60
16.	Kebudayaan							
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	5	5	5	5	5	5

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	1	1	1	1	1
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	16	16	16	16	16	16	16
17.	Kepemudaan dan Olahraga							
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	87	88	89	90	91	92	93
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	321	322	323	324	325	326	327
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	6	6	6	6	6	6	6
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	4	4	4	4	4	4	4
18.5.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	1	1	1	1	1	1	1
18.6.	Lapangan olahraga	4	4	4	4	4	4	4
18.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	3	3	3	3	3
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	2	6	6	6	6	6	6
19.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	10,32	11,37	12,31	13,22	14,11	14,96	15,77
20.2.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	3 : 1	3 : 1	3 : 1	3 : 1	3 : 1	3 : 1	3 : 1
20.3.	Cakupan Penegakan PERDA	86,52%	87,00%	89,00%	90,00%	92,00%	94,00%	96,00%
20.4.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	3 x per hari	3 x per hari	3 x per hari	3 x per hari	3 x per hari	3 x per hari	3 x per hari
20.5.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90	91,6	93	95	97	100	100
20.6.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20.	Ketahanan Pangan							
21.1.	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21.2.	Ketersediaan pangan utama							
20.2.1	Ketersediaan energi perkapita	2.233,56	2.205	2.210	2.215	2.220	2.225	2.230
20.2.2	Ketersediaan protein perkapita	74,01	75	75	75	75	75	75

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0,041	0,042	0,045	0,049	0,051	0,055	0,061
22.2.	LPM Berprestasi	3	9	9	9	9	9	9
22.3.	PKK aktif	70	70	70	70	70	70	70
22.4.	Posyandu aktif	135	135	140	143	1456	150	150
22.	Statistik							
23.1.	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.	Kearsipan							
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	90,91%	100	100	100	100	100	100
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
24.	Komunikasi dan Informatika							
25.1.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	N/A	86%	87%	88%	89%	90%	90%
25.2.	Jumlah jaringan komunikasi	303.168 jaringan	303.168 jaringan	303.175 jaringan	303.192 jaringan	305.281 jaringan	307.261 jaringan	308.471 jaringan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25.3.	Jumlah Wartel/Warnet	26	27	27	28	30	32	35
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV yang mampu ditangkap	51 stasiun	63 stasiun	68 stasiun	75 stasiun	80 stasiun	85 stasiun	90 stasiun
25.5.	Pameran/expo	2	2	3	3	4	4	4
25.	Perpustakaan							
26.1.	Jumlah Perpustakaan	24	24	25	27	30	30	24
26.2.	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	4%	4%	5%	6%	6%	7%	7%
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.200	1.200	2.467	1.000	1.500	1.500	1.000
Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
1.1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	13,12*	14,88	15,97	16,91	17,90	18,90	19,87
2.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	20,93*	19,46	18,63	17,78	16,90	16,01	15,12

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Pariwisata							
4.1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	2,73*	3,07	3,25	3,41	3,58	3,74	3,90
4.	Kelautan dan Perikanan							
5.1.	Konsumsi ikan	42,05	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00
5.	Perdagangan							
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	13,15*	13,33	13,80	14,07	14,34	14,61	14,88
6.	Perindustrian							
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	15,78*	11,89	10,22	8,77	7,48	6,36	5,39
7.2.	Pertumbuhan Industri	N/A	7%	7%	8%	8%	9%	9%
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.	Pertanian							
1.1	Nilai Tukar Petani	98,42	100	100,5	101	101,5	102	102,5
2.	Kelautan dan Perikanan							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1	Nilai Tukar Nelayan	N/A	100	104	105	106	107	108
2.2	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	N/A	100	102,5	103	103,5	104	104,5
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1	Perhubungan							
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,017	1,130	1,241	1,365	1,502	1,652	1,817
1.2.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun							
1.3.1.	Jumlah barang yang terangkut Angkutan Umum (ton)	20.156.865	22.172.551	24.389.806	26.828.786	29.511.664	32.462.830	35.709.113
1.3.2.	Jumlah barang yang terangkut Angkutan Umum (ribu)	1.745.848	1.920.432	2.112.475	2.323.722	2.556.894	2.811.703	3.092.873
1.3.3.	Jumlah barang melalui dermaga, bandara, terminal (ton)	20.156.865	22.172.551	24.389.806	26.828.786	29.511.664	32.462.830	35.709.113
1.3.4.	Jumlah orang melalui dermaga, bandara, terminal (ribu)	1.456.957	1.602.652	1.762.917	1.939.208	2.133.128	2.346.440	2.581.084
2.	Penataan Ruang							
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	77,25	77,50	77,75	78	78,25	78,50	78,75
2.2.	Luas wilayah produktif	29.244	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
2.3.	Luas wilayah industri	7.019	8.769	8.769	8.769	8.769	8.769	8.769

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.4.	Luas wilayah banjir	0,137	0,135	0,133	0,131	0,129	0,127	0,125
2.5.	Luas wilayah kekeringan	0,447	0,447	0,444	0,441	0,438	0,435	0,430
2.6.	Luas wilayah perkotaan	5.051,67	5.051,67	5.051,67	5.051,67	5.051,67	5.051,67	5.051,67
3.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang							
3.1.1.	Bank Pemerintah/Swasta	10	11	12	13	14	15	15
3.1.2.	Bank Perkreditan Rakyat	2	2	3	3	4	4	5
3.1.3	Restoran	70	75	80	85	90	95	95
3.1.4	Penginapan/Hotel	6	6	7	7	7	8	8
3.2.	Jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon	138.251	138.263	138.268	148.293	150.632	160.200	170.000
Fokus Iklim Berinvestasi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kinerja awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja akhir periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Angka kriminalitas yang terjadi	71	65	60	60	60	55	50
1.2.	Jumlah demo	9	8	7	7	7	7	7
1.3.	Rata-rata lama proses perijinan (hari)	8	7	7	6	6	5	5
Fokus Sumber Daya Manusia								
1.	Ketenagakerjaan							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	171,43	180	185	190	195	200	200
1.2.	Rasio ketergantungan	46,22	45,26	44,32	43,41	42,52	41,65	40,80

Sumber data: RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021

BAB VII

PENUTUP

RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran pelaksanaan masa transisi yaitu tahun terakhir RPJMD 2016-2021 dan tahun pertama RPJMD 2021-2025. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun sebagai acuan dan pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 disusun berdasarkan tema pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 sesuai RPJMD 2016-2021, serta diselaraskan dengan tema dan prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Adapun tema pembangunan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 adalah **“PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DASAR”**. Sedangkan tema pembangunan Nasional 2021 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial. Tema ini merupakan tema yang disusun setelah terjadinya pandemi Covid-19.

Saat ini Pemerintah pusat masih berfokus pada fase pemulihan pasca pandemi Covid-19. Maka, Kabupaten Bangka Tengah wajib mendukung prioritas pemerintah pusat tersebut. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Tengah dalam RKPD 2021 secara umum terkait dengan dukungan terhadap fase pasca pandemi covid-19. RKPD Tahun 2021 diharapkan mampu memberikan daya ungkit dengan mengoptimalkan potensi-potensi unggulan daerah bagi pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 menetapkan 5 Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan sumber daya manusia, Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan dan Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah, Rancangan APBD dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berupaya mengoptimalkan peran publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah melalui masukan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Forum Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum tersebut merupakan wahana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menghasilkan rumusan rencana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Bangka Tengah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan adalah mata rantai yang penting dalam pembangunan. Perencanaan yang kredibel hanya akan terwujud jika didukung oleh pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2021, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD Tahun 2021 wajib dilaksanakan oleh Bupati dan seluruh Kepala Perangkat Daerah dengan tujuan untuk: pertama, memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; kedua, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; dan ketiga, melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada Presiden dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait dengan fase pemulihan ekonomi, maka peningkatan daya serap peluang kerja akan menjadi penekanan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dari sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM, sedangkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur diarahkan bagi penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, berdasarkan pengalaman di masa pandemi Covid-

19, maka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih optimal juga akan menjadi prioritas. Hal ini diharapkan bisa memberi dampak pada efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan maupun dalam penganggarnya, sehingga metode online tersebut menjadi pertimbangan untuk dikembangkan di tahun-tahun mendatang bisa jadi akan dilakukan kombinasi antara pelaksanaan secara konvensional dan digital.

Keterbatasan anggaran pemerintah daerah setiap tahun menuntut peran pemerintah daerah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan. Peran pemerintah daerah sebagai regulator dan operator perlu disikapi dengan merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perpindahan peran yang semula operator menjadi regulator dan fasilitator menjadikan pemerintah daerah harus lebih fokus pada sektor yang strategis dan menekankan pada *quality government spending* dalam perencanaan pembangunan daerah dan target-target serta sasaran RKPD Tahun 2021 ini dapat tercapai dengan baik.

BUPATI BANGKA TENGAH



IBNU SALEH

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - 1.01.02.2.01	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Sumber Daya Manusia	SDN 4 Pangkalanbaru	- Jumlah Ruang Kelas Baru yang di Bangun	- 6 lokal	652.100.000	800.000.000
2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 1.01.02.2.03	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	PAUD di Bateng	- Jumlah peserta yang ikut sosialisasi akreditasi	- 50 orang	40.000.000	40.000.000
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 1.01.02.2.03	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	PAUD di Bateng	- Jumlah peserta didik yang mendapat operasional	- 552 anak	132.480.000	132.480.000
4	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 1.01.02.2.03	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	PAUD di Bateng	- Jumlah guru yang mendapat pengembangan karir	- 85 orang	135.000.000	185.000.000
5	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 1.01.02.2.03	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	PAUD di Bateng	- Jumlah alat praktik yang diadakan	- 15 lembaga	82.050.000	82.050.000
6	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 1.01.02.2.03	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	PAUD di Bateng	- Jumlah ruang yang dibangun	- 2 ruang	222.850.000	227.104.000
7	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 1.01.02.2.03	Pengadaan Mebeluer PAUD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	PAUD di Bateng	- Jumlah meubelair yang diadakan	- 30 set	42.865.000	42.865.000
8	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 1.01.02.2.02	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sumber Daya Manusia	SMP di Bangka Tengah	- Jumlah Siswa yang Mendapat Operasional	- 9.384 siswa	320.000.000	320.000.000
9	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 1.01.02.2.02	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	SMP di Bateng	- Jumlah Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik yang Diselenggarakan	- 30 sekolah	10.000.000	65.000.000
10	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 1.01.02.2.02	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	SMP di Kabupaten Bangka Tengah	- Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa yang di Bina	- 247 siswa	647.500.000	812.500.000
11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 1.01.02.2.02	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	SMP di Kabupaten Bangka Tengah	- Kelembagaan dan Manajemen Sekolah yang Dibina	- 30 Sekolah	46.000.000	86.000.000
12	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 1.01.02.2.03	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	PAUD di Kabupaten Bangka Tengah	- Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Tersedia	- 606 Orang	2.080.437.500	2.080.437.500

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
13	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 1.01.02.2.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Sumber Daya Manusia	SMPN 1 Sungaiselan dan SMPN 1 Simpangkatis	- Ruang Kelas Baru yang Ditambah	- 1 ruang	222.850.000	250.000.000
14	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 1.01.02.2.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	SMP di Kabupaten Bangka Tengah	- Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dibangun	- 2 Sekolah	80.000.000	80.000.000
15	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan - 1.01.02.2.04	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	PKBM di Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah proses belajar nonformal yg diselenggarakan	- 7 lembaga	155.602.000	155.602.000
16	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan - 1.01.02.2.04	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	PKBM di Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah karir pendidik dan tenaga kependidikan yang dikembangkan	- Pendidik dan tenaga kependidikan paket di Bangka Tengah	73.477.000	73.477.000
17	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan - 1.01.02.2.04	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	PKBM di Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah desa yg ikut pendataan	- 63 desa	151.281.000	151.289.000
18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - 1.01.02.2.01	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Sekolah di Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah sekolah yang dibina	- 101 sekolah	350.000.000	400.000.000
19	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - 1.01.02.2.01	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	SD di Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah siswa yang ikut minat, bakat dan kreativitas siswa	- 500 siswa	587.000.000	850.000.000
20	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan - 1.01.02.2.04	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Sanggar Kegiatan Belajar di Bangka Tengah	- Jumlah GTT dan PTT SKB yang tersedia	- 143 orang	230.337.500	230.337.500
21	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - 1.01.02.2.01	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sumber Daya Manusia	SD di Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah GTT dan PTT yang mendapat honorarium serta insentif	- 1.107 orang	4.538.375.000	4.538.375.000
22	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 1.01.02.2.02	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sumber Daya Manusia	SMP di Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah GTT dan PTT SMP yang mendapat honor dan insentif	- 608	2.335.775.000	2.335.775.000
23	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - 1.01.02.2.01	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Pembangunan Sumber Daya Manusia	SD di Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah sekolah yang mendapat bantuan operasional	- 97 sekolah	509.815.000	837.315.000
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
24	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - 1.01.04.2.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Sekolah di Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	- Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Bangka Tengah	63.682.000	63.682.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
25	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - 1.01.04.2.01	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Sekolah di Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang di distribusikan	- Guru di Bangka Tengah	1.373.087.000	1.373.087.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah Bulan Pelayanan Surat Menyurat	- 12 Bulan	478.100.000	478.100.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 12 Bulan	71.400.000	71.400.000
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	- 12 bulan	46.106.000	46.106.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	- 12 bulan	153.800.000	153.800.000
30	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	- 12 bulan	297.200.000	297.200.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	- 12 bulan	50.000.000	75.000.000
32	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- 12 bulan	103.985.000	148.935.000
33	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- 12 bulan	2.400.000	2.400.000
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- 12 bulan	4.440.000	4.440.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
35	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Makanan dan Minuman	- 12 bulan	16.128.000	16.128.000
36	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	- 12 bulan	125.000.000	125.000.000
37	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	- 3 item	87.640.000	141.640.000
38	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	- 2 unit	66.160.000	66.160.000
39	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan	- 7 item	16.650.000	17.150.000
40	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah pakaian khusus hari2 tertentu yang diadakan	- 43 stel	10.000.000	10.000.000
41	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	- 60 stel	35.310.000	35.310.000
42	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	- 10 orang	100.000.000	100.000.000
43	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah Dokumen yang Disusun	- 7 dokumen	10.000.000	10.000.000
44	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 dokumen	10.000.000	10.000.000
45	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah Berita Acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 berita acara	20.000.000	20.000.000
46	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 laporan	5.000.000	5.000.000
47	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pendidikan	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
48	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- 12 bulan	178.088.264.000	178.088.264.000
	JUMLAH						194.890.147.000	196.144.409.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 1.02.02.2.01	Pengadaan Obat, Vaksin	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- tersedianya obat dan vaksin	- 1 paket	280.000.000	230.000.000
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- pelayanan kesehatan tradisional di 9 puskesmas dan 9 kelompok asuhan mandiri toga	- 100%	30.000.000	30.000.000
3	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Tersedianya biaya operasioanl pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	- 1 Paket	660.000.000	660.000.000
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota - 1.02.02.2.04	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Meningkatnya Mutu Pelayanan Fasilitas kesehatan	- 9 Puskesmas	15.130.000.000	15.130.000.000
5	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - 1.02.02.2.03	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- terpenuhinya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	- 56 desa dan 7 kelurahan	320.000.000	320.000.000
6	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Terkelolanya jaminan kesehatan masyarakat	- 28000 jiwa	11.308.000.000	16.712.000.000
7	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Persentase layanan kesehatan balita	- 100%	200.000.000	258.720.000
8	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Persentase Pelayanan Kesehtan pada usia pendidikan dasar	- 100%	165.600.000	165.600.000
9	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Terkelolanya pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	- 100%	15.600.000	17.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Terkelolanya pelayanan kesehatan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	- 100%	25.000.000	25.000.000
11	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota - 1.02.02.2.04	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan perizinan RS tipe C dan D	- 100%	20.000.000	20.000.000
12	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 1.02.02.2.01	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Tersedianya sarana fasilitas pelayanan Kesehatan	- 100%	265.000.000	275.000.000
13	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus (persentase calon jemaah haji yang mendapatkan pendampingan kesehatan, terlaksananya pengobatan gratis di Pulau dan Pengobatan pada hari-hari tertentu	- 100%	72.250.000	75.000.000
14	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Terlaksananya Pengelolaan Upaya pengurangan resiko mrisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	- 100%	15.000.000	20.000.000
15	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Persentase pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB	- 100%	15.000.000	15.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- terinvestigasinya awal kejadian yang tak di harapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian obat masal)	- 100%	10.800.000	15.000.000
17	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- terlaksananya kewaspadaan dini dan respon wabah	- 100%	10.000.000	15.000.000
18	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular - Jumlah penyemprotan/fogging sarana nyamuk - Jumlah penduduk beresiko yang diskriming HIV - jumlah pelayannan penyakit TB Paru sesuai standar - Penanggulangan Penyakit Malaria - Penanggulangan Penyakit Filariasis - Peningkatan surveillance Epideologi dan Penanggualangan wabah - Penemuan penyakit kusta - Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular - Jumlah	- 110 orang - 52 kasus - 100 orang - 258 orang - 5 desa - 13 orang - 30 kasus - 5 orang - 110 orang - 110 orang	322.984.000	440.000.000
19	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Persentase pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan Jiwa (ODMK) - Persentase pelayanan kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB)	- 100% - 100%	40.000.000	40.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
20	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	- 100%	250.000.000	484.460.000
21	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	- 100%	70.700.000	70.700.000
22	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	- 100%	35.200.000	35.200.000
23	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- persentase layanan kesehatan pada usia lanjut	- 100%	60.000.000	60.000.000
24	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RSUD	- Terpenuhinya layanan RS	- 12 bulan	600.000.000	0
25	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RSUD	- Uji laboratorium	- 12 Bulan	47.000.000	50.000.000
26	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 1.02.02.2.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RSUD	- sarana dan prasarana terbangun	- 1 unit	302.000.000	302.000.000
27	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 1.02.02.2.01	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RSUD	- Prasarana dan pendukung fasilitas tersedia	- 5 Item	834.500.000	1.000.000.000
28	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 1.02.02.2.01	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Alat kesehatan	- 5 Paket	4.000.000.000	6.000.000.000
29	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 1.02.02.2.01	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RSUD	- Pemenuhan alat kalibrasi	- 1 Paket	190.000.000	0
30	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 1.02.02.2.01	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RSUD	- Terpelihara sarana fasilitas layanan kesehatan	- 12 bulan	220.000.000	200.000.000
31	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 1.02.02.2.01	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	RSUD	- Terpelihara prasarana dan pendukung fasilitas layanan kesehatan	- 100	40.000.000	60.000.000
32	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 1.02.02.2.01	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Terpeliharanya alat kesehatan	- 100%	450.000.000	800.000.000
33	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 1.02.02.2.01	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Terbangunnya gedung fasilitas layanan kesehatan	- 2 Paket	2.070.000.000	2.570.059.348
34	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Akreditasi RS	- 8 Standar	250.000.000	300.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah penyelenggaraan operasional layanan di puskesmas	- 1 tahun	6.237.235.000	6.237.235.000
36	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab Bangka Tengah	- Terselenggaranya Kab/Kota sehat	- 4 Tatanan	100.000.000	100.000.000
37	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 1.02.02.2.01	Pengembangan Puskesmas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- adanya pengembangan puskesmas	- 2 Puskesmas	300.000.000	300.000.000
38	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 1.02.02.2.01	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- rehab fasilitas pelayanan kesehatan	- 10 Poskesdes	1.400.000.000	1.000.000.000
39	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 1.02.02.2.01	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka tengah	- Tersedianya fasilitas Bahan Habis Pakai di Kabupaten	- 1 Paket	347.250.000	350.000.000
40	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- pelayanan kesehatan pda usia produktif	- 16886 orang	102.000.000	102.000.000
41	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- terlaksanya pengelolaan surveilen kesehatan	- 12 Bulan	40.000.000	40.000.000
42	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Persentase pelayanan kesehatan jiwa dan napza - Persentase peyalahgunaan Napza di Fasyankes dan sekolah yang di dapat	- 100% - 100%	35.000.000	40.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
43	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.03.2.04	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- meningkatnya kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	- 100%	465.000.000	500.000.000
44	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota - 1.02.03.2.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengawasan periiznan praktik tenaga kesehatan	- 9 Puskesmas	20.000.000	20.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
45	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota - 1.02.03.2.03	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Terpenuhinya kebutuhan SDM kesehaan sesuai standar	- 12 bulan	11.000.000.000	12.015.910.000
46	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - 1.02.03.2.02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab Bangka Tengah	- terlaksananya pelathan dan uji kompetensi tenaga kesehatan	- 1 Kegiatan	75.000.000	75.000.000
47	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - 1.02.03.2.02	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab Bangka Tengah	- Terselenggaranya pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM	- 315 kader	50.000.000	50.000.000
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							
48	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 1.02.04.2.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- terlaksannya kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan potek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisonal (UMOT)	- 1 Kegiatan	80.000.000	100.000.000
49	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - 1.02.04.2.03	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bnagka Tengah	- Terlaksananya pengedalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industri rumah tangga	- 100%	80.000.000	80.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
50	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - 1.02.04.2.06	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- terlaksananya kegiatan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan seta tindaklanjut pengawasan	- 100%	130.285.000	150.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
51	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - 1.02.05.2.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Persentase meningkatnya upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	- 100%	45.000.000	45.000.000
52	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.02.05.2.03	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Terlaksananya bimtek supervisi pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	- 12 Bulan	58.000.000	58.000.000
53	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - 1.02.05.2.02	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Terselenggaranya upaya promosi kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	- 12 Bulan	79.000.000	79.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
54	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000
55	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 laporan	20.000.000	20.000.000
56	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah peralatan	- 9 item (Infokus, Mic Wairless, speaker, gorden, laptop, printer, rak besi, lemari arsip, AC)	200.000.000	200.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
57	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Tersedianya Jasa surat menyurat	- 12 Bulan	24.982.000	24.982.000
58	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		- Jumlah penyediaan ATK	- 12 Bulan	60.700.000	60.700.000
59	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangk Tengah	- Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- 12 Bulan	46.000.000	46.000.000
60	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	- 12 Bulan	34.450.000	34.450.000
61	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 Bulan	3.600.000	3.600.000
62	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Terpeliharanya Rumah Dinas Kepala OPD	- 1 Unit	8.980.000	8.980.000
63	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah pemeliharaan gedung kantor	- 203m2	200.000.000	250.000.000
64	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- 12 Bulan	275.000.000	300.000.000
65	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Bangka Tengah	- Terpenuhiya jasa komunikasi, air dan listrik	- 12 bulan	917.000.000	917.000.000
66	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	RSUD dan Dinas Kesehatan	- persentase terbanyakannya pajak kendaraan dinas dan jasa pekerja	- 12 bulan	106.282.000	150.000.000
67	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	RSUD dan Dinas kesehatan	- persentase terbayarkannya jasa administrasi keuangan	- 12 bulan	318.568.000	400.000.000
68	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinkes dan RSUD	- Terpenuhiya jasa kebersihan RS	- 12 bulan	726.640.000	750.000.000
69	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	RSUD dan Dinas Kesehatan	- Terpenuhiya makan dan minum rapat dan tamu	- 12 bulan	77.000.000	80.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
70	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	RSUD dan Dinas Kesehaan	- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	- 12 bulan	19.894.000	150.000.000
71	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Tersedianya pakaian khusus hari tertentu	- 1 paket	20.000.000	20.000.000
72	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Terdidik dan terlatihnya aparatur	- 100	200.000.000	200.000.000
73	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab Bangka Tengah	- Jumlah dokumen perencanaan dan aset bidang kesehatan	- 2 dokumen	20.000.000	20.000.000
74	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab Bangka Tengah	- Jumlah ASN di Kabupaten Bangka Tengah	- 658 orang	65.000.000.000	60.000.000.000
75	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab Bangka Tengah (RSUD dan Dinas Kesehatan)	- Jumlah rapat- rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	- 32 OK	250.000.000	250.000.000
76	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Tersedianya kendaraan dinas operasional	- 6 Unit	1.000.000.000	1.000.000.000
77	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	- 1 paket	300.000.000	300.000.000
78	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Bangka Tengah	- Jumlah baju dinas	- 800 stel	442.500.000	528.000.000
79	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	- 5 Dokumen	20.000.000	20.000.000
80	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah koordinasi dan sinkronisasiyang dilakukan	- 7 kali	40.000.000	40.000.000
81	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Meubeler yang tersedia	- 1 paket	300.000.000	300.000.000
82	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- persentase kendaraan yang terpelihara	- 100%	390.000.000	390.000.000
	JUMLAH						130.000.000.000	134.211.596.348

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.02.2.02	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Pembangunan Kewilayahan	Kecamatan Namang	- Jumlah bulan Penyelenggaraan operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	- 12 bulan	120.000.000	140.000.000
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.02.2.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Pembangunan Kewilayahan	Desa Kerakas Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah	- Jumlah rencana teknis dan dokumen yang disusun	- 1 dokumen	220.000.000	300.000.000
3	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.02.2.01	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Kewilayahan	Kolong Silok Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola DPUTRP)	- Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dipelihara	- 1 Kolong	200.000.000	800.000.000
4	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.02.2.01	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola DPUTRP)	- Jumlah sungai yang dinormalisasi/restorasi/dipelihara	- 2 Sungai	469.800.000	700.000.000
5	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.02.2.01	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- jumlah sumur air tanah untuk unit air baku yang dibangun	- 4 Unit	400.000.000	800.000.000
6	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.02.2.01	Rehabilitasi Unit Air Baku	Pembangunan Kewilayahan	Kec. Pangkalan Baru (Kolong Beguruh)	- Jumlah Unit Air Baku yang direhab	- 1 kolong	2.500.000.000	3.000.000.000
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.02.2.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Pembangunan Kewilayahan	Sungai Berok Kecamatan Koba Kab. Bangka Tengah	- jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir	- 1 Dokumen Perencanaan	200.000.000	220.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.03.2.01	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah SPAM yang dipelihara	- 3 spam	1.200.000.000	1.200.000.000
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.03.2.01	Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Kewilayahan	Kecamatan Pangkalanbaru	- Jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih	- 100 SR	800.000.000	800.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.03.2.01	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih	- 1175 SR	925.000.000	925.000.000
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.03.2.01	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah SPAM yang beroperasi	- 3 SPAM	450.000.000	450.000.000
12	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.03.2.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- jumlah dokumen yang direncanakan	- 2 Dok	100.000.000	100.000.000
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.03.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Penyelenggara SPAM yang dibina	- 40 Orang (20 SPAM Desa)	100.000.000	100.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
14	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.05.2.01	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Sistem Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	- 244 Unit	888.000.000	888.000.000
15	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.05.2.01	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah SPALDT yang beroperasi	- 2 SPALDT	200.000.000	200.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							
16	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.06.2.01	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Panjang Sistem Drainase perkotaan dan lingkungan yang di bangun	- 13.850 Meter	5.010.000.000	6.020.000.000
17	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.06.2.01	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola DPUTRP)	- Panjang saluran drainase perkotaan dan lingkungan yang direhab	- 500 Meter	180.000.000	250.000.000
18	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.06.2.01	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah (Swakelola DPUTRP)	- Panjang sistem drainase yang dipelihara	- 3000 Meter	399.158.200	500.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							
19	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.07.2.01	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah lokasi pembinaan penyelenggaraan infrastruktur	- 3 kecamatan	50.000.000	50.000.000
20	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.07.2.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Kab. Bangka Tengah	- Panjang jalan lingkungan permukiman yang dibangun	- 10,25 km	2.085.000.000	2.085.000.000
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
21	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - 1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Pembangunan Kewilayahan	Kecamatan Koba	- jumlah dokumen yang disusun	-	100.000.000	100.000.000
22	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - 1.03.08.2.01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	7 Lokasi	- Jumlah Bangunan Gedung yang direncanakan/ dibangun/direnovas i/direhab	- 7 Unit	2.730.000.000	2.730.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								
23	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - 1.03.10.2.01	Rekonstruksi Jalan	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah (20 Ruas Jalan)	- Panjang Jalan Kabupaten yang direkonstruksi/ditin gkatkan - Panjang Jalan Desa Yang direkonstruksi/ditin gkatkan	- 30 Km - 81,50%	29.732.500.000	32.705.750.000
24	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - 1.03.10.2.01	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah (6 Kecamatan)	- Panjang Jalan Kabupaten yang di Pelihara - Panjang Jalan Desa yang Dipelihara	- 22 Km - 20 Km	11.200.000.000	12.320.000.000
25	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - 1.03.10.2.01	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Koba	- Panjang jalan Kabupaten yang di Lebarkan	- 10 Km	1.500.000.000	1.650.000.000
26	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - 1.03.10.2.01	Pembangunan Jalan	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah (6 Lokasi)	- Panjang jalan yang dibangun	- 50 Km	5.295.000.000	5.824.500.000
27	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - 1.03.10.2.01	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Panjang jalan yang dipelihara rutin	- 150 Km	2.000.000.000	2.200.000.000
28	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - 1.03.10.2.01	Pembangunan Jembatan	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah (7 Lokasi)	- Jumlah Jembatan yang Dibangun	- 7 unit	1.575.000.000	1.732.500.000
29	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - 1.03.10.2.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Dokumen yang Disusun	- 3 Dokumen	250.000.000	275.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								
30	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - 1.03.11.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah yang mengikuti pelatihan tenaga terampil konstruksi	- 200 pekerja	200.000.000	200.000.000
31	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - 1.03.11.2.04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	- 100 proyek	75.000.000	75.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
32	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.11.2.02	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Pembangunan Kewilayahan	kabupaten Bangka Tengah	-	-	50.000.000	50.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
33	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.12.2.02	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Pertemuan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	- 2 kali	75.000.000	75.000.000
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.12.2.03	Sistem Informasi Penataan Ruang	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah sistem yang dioperasi dan dipelihara	- 1 sistem	50.000.000	50.000.000
35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	- 12 Bulan	150.000.000	200.000.000
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.12.2.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan koordinasi penataan ruang	- 12 bulan	275.000.000	275.000.000
37	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota - 1.03.12.2.01	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Peraturan Yang Ditetapkan	- 1 Peraturan	100.000.000	0
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - 1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pembangunan Kewilayahan	Kab. Bangka Tengah	- Jumlah lokasi koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	- 3 Lokasi	200.000.000	200.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI							
39	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - 2.10.02.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi	- 12 bulan	50.000.000	50.000.000
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							
40	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. - 2.10.04.2.01	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- persentase sengketa tanah garapan yang ditangani dengan jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	- 100%	50.000.000	50.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							
41	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota -	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bidang tanah masyarakat yang disertifikat	- 2000 bidang	200.000.000	200.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
42	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 2 Laporan	5.000.000	5.750.000
43	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 Laporan	10.000.000	11.500.000
44	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	- 12 Bulan	317.700.000	365.355.000
45	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah bulan pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 12 Bulan	108.000.000	124.200.000
46	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	- 27 Unit	71.665.000	82.414.750
47	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah bulan pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- 12 Bulan	42.500.000	48.875.000
48	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah bulan pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	- 12 Bulan	244.585.500	281.273.325
49	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah bulan pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 Bulan	80.300.000	92.345.000
50	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Alat Tulis Kantor	- 12 Bulan	85.700.000	98.555.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
51	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- 12 Bulan	67.750.000	77.912.500
52	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- 12 Bulan	5.000.000	5.750.000
53	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- 12 Bulan	4.500.000	5.175.000
54	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Makanan dan Minuman	- 12 Bulan	15.880.000	18.262.000
55	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	- 12 Bulan	125.000.000	143.750.000
56	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03		Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	- 12 Unit	154.227.500	177.361.625
57	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	- 151 Unit	84.470.000	97.140.500
58	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	- 104 Stel	59.090.000	67.953.500
59	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	- 20 stel	10.000.000	11.500.000
60	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	- 20 Orang	200.000.000	230.000.000
61	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah kendaraan dinas/ operasional yang direhabilitasi	- 3 Unit	100.000.000	115.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
62	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- 12 Bulan	5.002.869.800	5.753.300.270
63	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- luas rumah dinas yang dipelihara	- 45m2	5.000.000	5.750.000
64	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7 dokumen	10.000.000	11.500.000
65	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- Jumlah Berita Acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 Berita Acara	75.000.000	86.250.000
66	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 dokumen	10.000.000	11.500.000
67	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan	- 40 Stel	25.000.000	28.750.000
68	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- luas gedung kantor yang dipelihara	- 1490 m2	155.000.000	178.250.000
69	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPUTRP	- jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	- 11 Unit	571.304.000	656.999.600
	JUMLAH						80.000.000.000	89.283.123.070

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah - 5.01.02.2.01	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kab Bangka Tengah	- Jumlah Berita acara Musrenbang	- 2 Berita acara/kesepakatan	285.000.000	200.000.000
2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah - 5.01.02.2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah draf Dokumen yang disusun	- 3 dokumen	480.000.000	300.000.000
3	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah - 5.01.02.2.01	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah Berita acara/ Kesepakatan hasil forum perencanaan	- 2 berita acara	60.000.000	60.000.000
4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah - 5.01.02.2.01	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah berita acara pengintegrasian / sinkronisasi perencanaan daerah, yang dilaksanakan	- 5 Berita Acara	50.000.000	50.000.000
5	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah - 5.01.02.2.01	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah data per urusan	- 24 data	50.000.000	50.000.000
6	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah - 5.01.02.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan data update dalam aplikasi	- 1 laporan	90.000.000	100.000.000
7	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah - 5.01.02.2.03	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah Laporan realisasi target indikator kinerja program kegiatan dalam RKPD (Laporan Monev APBN, APBD I, DAK)	- 4 laporan triwulan	85.000.000	100.000.000
8	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah - 5.01.02.2.03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Laporan realisasi target indikator kinerja program kegiatan pendukung SPM dalam RKPD (Dalev SPM)	- 1 laporan	50.000.000	60.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah - 5.01.02.2.03	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Laporan realisasi target indikator kinerja program kegiatan dalam RKPD (Dalev RKPD)	- 4 laporan triulan	70.000.000	75.000.000
10	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah - 5.01.02.2.03	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Laporan realisasi target indikator kinerja sasaran makro pembangunan dalam RPJMD/RKPD (Dalev RPJMD)	- 1 laporan	70.000.000	75.000.000
11	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah - 5.01.02.2.02	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- data analisa pendanaan pembangunan daerah RPJMD/ RKPD	- 1 laporan	140.000.000	150.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA							
12	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan - 5.01.03.2.01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan koordinasi dan jumlah OPD yang dilakukan asistensi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	- 3 laporan (32 OPD)	127.500.000	250.000.000
13	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan - 5.01.03.2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	- 4 laporan	50.000.000	50.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
14	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia - 5.01.03.2.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan koordinasi DAN OPD yang dilakukan asistensi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang Pembangunan Manusia	- 6 laporan (21 OPD)	350.000.000	350.000.000
15	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia 5.01.03.2.02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	- 4 laporan	27.500.000	50.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							
16	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian - 5.01.04.2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah dokumen/ laporan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	- 1 laporan	140.000.000	150.000.000
17	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian - 5.01.04.2.01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/ RPJMD/RKPD) dari OPD bidang perekonomian	- 1 laporan	20.000.000	30.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
18	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian - 5.01.04.2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka tengah	- Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD) Bidang perekonomian	- 1 laporan	25.000.000	30.000.000
19	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif - 5.01.04.2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Laporan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kraetif	- 1 dokumen	50.000.000	50.000.000
20	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam - 5.01.04.2.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Laporan Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)bidang sumber daya alam	- 1 dokumen/laporan	115.000.000	130.000.000
21	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam - 5.01.04.2.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang sumber daya alam	- 1 laporan	20.000.000	25.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN							

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
22	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan - 5.01.05.2.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	- 1 laporan	60.000.000	100.000.000
23	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan - 5.01.05.2.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bagka Tengah	- Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	- 1 laporan	40.000.000	100.000.000
24	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan - 5.01.05.2.02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	- 1 laporan	30.000.000	100.000.000
25	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup - 5.01.05.2.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	- 1 laporan	50.000.000	120.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
26	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup - 5.01.05.2.01	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	- 1 laporan	50.000.000	120.000.000
27	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup - 5.01.05.2.01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKP)	- 1 laporan	30.000.000	80.000.000
28	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan - 5.01.05.2.03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah lap perencanaa pemb daerah (RPJPD,RPJMD dan RKPD) bidang keciptakaryaan dan kewilayahan; - lap review rencana aksi daerah air minum dan Penyehatan Lingkungan - Inventarisir bidang keciptakaryaan secara spasial	- 1 laporan akhir - 1 laporan reviu RAD - 1 database	220.000.000	450.000.000
29	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan - 5.01.05.2.03	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	- 1 laporan	50.000.000	120.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
30	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakarya an dan Kewilayahan - 5.01.05.2.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakarya an dan Kewilayahan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- 1. Lap hasil Pelaksanaan Monev (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang Keciptakarya an dan Kewilayahan	- 1 laporan	30.000.000	80.000.000
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
31	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - 5.05.02.2.01	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	- 1 laporan	282.000.000	300.000.000
32	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - 5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan penelitian dan pengembangan terhadap perencanaan pembangunan daerah bidang sosial, pendidikan, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ekonomi dan bidang penyelenggaraan pemerintah	- 1 laporan	94.000.000	100.000.000
33	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - 5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan dan data terhadap sarana dan prasarana pengembangan objek wisata	- 1 laporan	47.250.000	50.000.000
34	Pengembangan Inovasi dan Teknologi - 5.05.02.2.04	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan penelitian Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi	- 1 laporan	807.900.000	900.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
35	Pengembangan Inovasi dan Teknologi - 5.05.02.2.04	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	- 1 laporan	201.670.000	250.000.000
36	Pengembangan Inovasi dan Teknologi - 5.05.02.2.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan Sosialisasi dan desiminasi hasil kelitbangan	- 1 laporan	32.780.000	50.000.000
37	Pengembangan Inovasi dan Teknologi - 5.05.02.2.04	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	- 1 laporan	39.400.000	50.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
38	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7 dokumen	10.000.000	10.000.000
39	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka tengah	- Jumlah berita acara kesepakatan hasil koordinasi	- 5 Berita Acara	20.000.000	20.000.000
40	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka tengah	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 dokumen	10.000.000	10.000.000
41	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- 12 bulan	3.889.154.300	3.889.154.300
42	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 laporan	5.000.000	5.000.000
43	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000
44	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka tengah	- Jumlah bulan pelayanan Jasa Surat Menyurat	- 12 bulan	122.828.000	123.000.000
45	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 12 bulan	108.000.000	108.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
46	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- 12 bulan	38.700.000	39.000.000
47	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	- 12 bulan	167.680.000	167.680.000
48	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 bulan	32.100.000	32.100.000
49	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan Alat Tulis Kantor	- 12 bulan	60.000.000	60.000.000
50	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- 12 bulan	46.800.000	46.800.000
51	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- 12 bulan	4.000.000	4.000.000
52	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- 12 bulan	6.000.000	6.000.000
53	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka tengah	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan Makanan dan Minuman	- 12 bulan	23.000.000	23.000.000
54	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	bangka tengah	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	- 32 kali	125.000.000	150.000.000
55	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- luas rumah dinas yang dipelihara	- 70 M2	5.110.000	5.110.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
56	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka tengah	- Luas gedung kantor yang dipelihara	- 804 M2	67.542.000	68.000.000
57	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	- 4 unit	144.600.000	144.600.000
58	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	48.000.000	48.000.000
59	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah perlengkapan gedung yang diadakan	- 2 item	20.190.000	30.000.000
60	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah peralatan gedung yang diadakan	- 3 item	79.849.500	60.000.000
61	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah meubelair yang diadakan	- 4 item	28.852.500	25.000.000
62	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapnnya yang diadakan	- 31 PDH PNS, 24 PDH PKK	30.600.000	30.600.000
63	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	- 20 stell	10.000.000	10.000.000
64	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	- 13 peserta	100.000.000	100.000.000
65	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PerUU	- Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PerUU	150.000.000	150.000.000
66	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	dalam dan luar daerah	- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek impleentasi PerUU	- 100 orang	150.000.000	150.000.000
	JUMLAH						9.933.006.300	10.830.044.300

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - 1.04.02.2.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	- 17 Desa	100.000.000	0
2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - 1.04.02.2.05	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelaksanaan fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun	- 12 Bulan	30.000.000	0
3	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - 1.04.02.2.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Terlaksananya koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	- 9 Orang/Kali	50.000.000	0
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH							
4	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - 1.04.03.2.01	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	- 1 Dokumen	100.000.000	0
5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - 1.04.03.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	- 55 Orang/Kali	50.000.000	55.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
6	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - 1.04.03.2.02	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen penyusunan rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	- 1 Dokumen	600.000.000	0
7	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - 1.04.03.2.02	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah lokasi tempat pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh	- 4 Lokasi	80.000.000	0
8	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - 1.04.03.2.02	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah peserta yang telah menerima penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh	- 150 Peserta	60.000.000	0
9	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - 1.04.03.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	- 31 Orang/Kali	50.000.000	0
10	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - 1.04.03.2.03	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen peremajaan/pemugaran permukiman kumuh	- 1 Dokumen	75.000.000	0
11	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - 1.04.03.2.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah rumah yang mendapat bantuan	- 20 Unit	300.000.000	0

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
12	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - 1.04.03.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	- 35 Orang/Kali	25.000.000	0
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
13	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - 1.04.04.2.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU perumahan	- 1 Dokumen	100.000.000	0
14	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - 1.04.04.2.01	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah PSU perumahan yang disediakan untuk menunjang fungsi hunian	- 1 Paket	200.000.000	0
15	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - 1.04.04.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU umum perumahan	- 71 Orang/Kali	50.000.000	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
16	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - 2.15.02.2.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang disusun	- 1 Dokumen	300.000.000	0
17	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - 2.15.02.2.02	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah prasarana jalan yang dibangun di jalan kabupaten	- 2 Unit	137.400.000	150.000.000
18	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - 2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah perlengkapan jalan yang disediakan di jalan kabupaten	- 565 Unit dan 164 Meter	3.935.000.000	4.500.000.000
19	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - 2.15.02.2.02	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan pemeliharaan prasarana jalan	- 12 Bulan	1.284.880.000	1.500.000.000
20	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - 2.15.02.2.03	Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Terminal Tipe C yang disusun	- 1 Dokumen	100.000.000	0

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
21	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - 2.15.02.2.04	Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten yang difasilitasi	- 1 Kegiatan	80.300.000	90.000.000
22	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 2.15.02.2.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	- 1 Paket	2.200.000.000	2.500.000.000
23	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 2.15.02.2.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah paket kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengujian berkala kendaraan bermotor	- 1 Paket	48.000.000	60.000.000
24	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 2.15.02.2.05	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah paket kegiatan registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	- 1 Paket	78.540.000	90.000.000
25	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 2.15.02.2.05	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	- 1200 Set	50.130.000	60.000.000
26	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 2.15.02.2.05	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah paket kegiatan identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan wajib uji	- 1 Paket	10.400.000	15.000.000
27	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 2.15.02.2.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	- 1 Paket	219.600.000	250.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
28	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 2.15.02.2.05	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	- 1 Paket	54.000.000	60.000.000
29	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - 2.15.02.2.07	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah aparatur/peserta peningkatan kapasitas penilai Andalalin	- 2 Orang/Aparatur	34.000.000	40.000.000
30	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - 2.15.02.2.07	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin yang dilaksanakan	- 1 Paket	58.000.000	60.000.000
31	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - 2.15.02.2.07	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin	- 1 Paket	77.000.000	80.000.000
32	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - 2.15.02.2.08	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan	- 1 Paket	55.000.000	60.000.000
33	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - 2.15.02.2.08	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten yang dilaksanakan	- 1 Paket	50.000.000	60.000.000
34	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan yang tersedia	- 3 Unit	967.920.000	970.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
35	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota - 2.15.03.2.09	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah kegiatan analisis tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang dilaksanakan	- 1 Kegiatan	25.000.000	30.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
36	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Dokumen	- 7 Dokumen	10.000.000	15.000.000
37	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Berita Acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 Berita Acara	20.000.000	25.000.000
38	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 Dokumen	10.000.000	15.000.000
39	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	- 12 Bulan	3.500.000.000	4.000.000.000
40	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 Laporan	5.000.000	10.000.000
41	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 Laporan	10.000.000	15.000.000
42	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- 12 Bulan	126.300.000	150.000.000
43	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 12 Bulan	87.000.000	90.000.000
44	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- 12 Bulan	1.297.200.000	1.300.000.000
45	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- 12 Bulan	161.534.000	170.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
46	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 Bulan	107.400.000	110.000.000
47	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- 12 Bulan	26.540.000	0
48	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- 12 Bulan	45.000.000	50.000.000
49	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- 12 Bulan	44.800.000	50.000.000
50	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- 12 Bulan	5.000.000	6.000.000
51	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- 12 Bulan	6.000.000	7.000.000
52	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	- 12 Bulan	26.720.000	30.000.000
53	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	- 25 Rapat Koordinasi	125.000.000	0
54	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- 3 Unit	90.000.000	100.000.000
55	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	- 2 Paket dan 12 Buah	21.690.000	30.000.000
56	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	- 13 Unit	104.120.000	110.000.000
57	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Mebeleur yang diadakan	- 3 Paket dan 31 Unit	252.570.000	260.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
58	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- 12 Bulan	40.960.000	50.000.000
59	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- 12 Bulan	3.138.112.000	3.200.000.000
60	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang direhabilitasi	- 3 Unit	245.000.000	250.000.000
61	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Stell Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- 30 Stell	16.500.000	20.000.000
62	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Korpri	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Stell Pengadaan Pakaian Korpri	- 30 Stell	15.000.000	16.000.000
63	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Stell Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	- 20 Stell	10.000.000	20.000.000
64	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DIPERKIMHUB	- Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	- 10 Aparatur	100.000.000	120.000.000
	JUMLAH						21.282.616.000	20.849.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - 2.11.02.2.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah Dokumen	- 1 Dokumen	100.000.000	100.000.000
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota -	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Dokumen KLHS	- 1 Dokumen	150.000.000	350.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
3	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - 2.11.03.2.02	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah Dokumen	- 2 Dokumen	397.500.000	450.000.000
4	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - 2.11.03.2.03		Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah Parameter Yang diuji	- 85 sampel	300.000.000	210.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							
5	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - 2.11.04.2.01	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Desa Namang	- Jumlah Bulan Pengelolaan Taman Kehati	- 12 Bulan	50.000.000	50.000.000
6	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - 2.11.04.2.01	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pengelolaan RTH	- 12 Bulan	2.387.500.000	2.387.500.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
7	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.11.06.2.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah Masyarakat/Perusahaan/Instansi	- 100 Buah	100.000.000	255.000.000
8	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.11.06.2.01	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Perusahaan Yang Diawasi	- 50 Perusahaan	65.000.000	80.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
9	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 2.11.08.2.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Pengelolaan Lingkungan	- 2 Lembaga	70.000.000	125.000.000
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
10	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 2.11.09.2.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/dunia Usaha/Dunia Pendidikan Yang Dinilai Kinerjanya	- 50 Buah	70.000.000	125.000.000
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP							
11	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - 2.11.10.2.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Aduan Yang Dikelola	- 10 Aduan	30.000.000	60.000.000
12	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - 2.11.10.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Kasus Yang Tertangani	- 5 Kasus	50.000.000	110.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							
13	Pengelolaan Sampah - 2.11.11.2.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Laporan Yang Dihasilkan	- 2 laporan	200.000.000	250.000.000
14	Pengelolaan Sampah - 2.11.11.2.01	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pengurangan	-	30.000.000	40.000.000
15	Pengelolaan Sampah - 2.11.11.2.01	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah Bulan Penanganan Sampah 2. Jumlah Dokumen Master Plan TPA 2. Jumlah Dokumen izin Lingkungan	- 12 Bulan	1.350.000.000	1.900.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
16	Pengelolaan Sampah - 2.11.11.2.01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Pembinaan Kepada Masyarakat	- 63 Kali	100.000.000	125.000.000
17	Pengelolaan Sampah - 2.11.11.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pebyediaan Sarana dan Prasarana	- Jumlah Bulan Pebyediaan Sarana dan Prasarana	1.200.000.000	1.250.000.000
18	Pengelolaan Sampah - 2.11.11.2.01	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Fasilitas Kerjasama Yang Dilaksanakan	- 5 Kali Pertemuan	75.000.000	100.000.000
19	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta - 2.11.11.2.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Pelaksanaan Monev	- 4 kali	45.887.500	100.000.000
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA							
20	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota - 3.28.04.2.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Pembangunan Kewilayahan	Tahura Bukit Mangkol	- Jumlah Papan Batas Blok yang terpasang	- 100 Papan Batas Blok	75.000.000	250.000.000
21	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota - 3.28.04.2.01	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Tahura Bukit Mangkol	- Jumlah Operasional Pengamanan Kawasan Tahura	- 36 kali	300.000.000	300.000.000
22	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota - 3.28.04.2.01	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Tahura Bukit Mangkol	- Data Jumlah dan Sebaran Tarsius	- 1 dokumen	50.000.000	50.000.000
23	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota - 3.28.04.2.01	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Tahura Bukit Mangkol	- Jumlah dokumen RPE	- 1 dokumen	75.000.000	600.000.000
24	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota - 3.28.04.2.01	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Tahura Bukit Mangkol	- Jumlah kelompok tani hutan yang melakukan kerjasama	- 2 kelompok	150.000.000	150.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	- 12 bulan	52.000.000	52.000.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	- 12 bulan	100.000.000	185.000.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah bulan penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	- 12 bulan	100.000.000	100.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah bulan pelayanan jasa administrasi keuangan	- 12 bulan	135.000.000	135.000.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	- 12 bulan	30.000.000	30.000.000
30	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	- 12 bulan	65.000.000	65.000.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- 12 bulan	15.000.000	15.000.000
32	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik	- 12 bulan	8.000.000	8.000.000
33	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 bulan	5.000.000	5.000.000
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	- 12 bulan	15.000.000	15.000.000
35	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Kewilayahan	Luar Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- 63 kali	125.000.000	125.000.000
36	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah pengadaan meubelair	- 3 item	25.000.000	25.000.000
37	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	- 2 item	100.000.000	100.000.000
38	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pembangunan Kewilayahan	Rumah Dinas	- Luas pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	- 79 m^2	5.500.000	5.500.000
39	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Luas pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- 549 m^2	40.000.000	40.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
40	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	- 6 unit	185.000.000	185.000.000
41	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- 12 bulan	32.500.000	32.500.000
42	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	- 45 stell	30.000.000	30.000.000
43	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pembangunan Kewilayahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	- 20 stell	10.000.000	10.000.000
44	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen / pelaporan	- 4 Laporan	25.000.000	25.000.000
45	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangunan Kewilayahan	dalam dan luar kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	- 40 kali	100.000.000	100.000.000
46	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen / pelaporan	- 2 Laporan	5.000.000	5.000.000
47	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen / pelaporan	- 1 Laporan	10.000.000	10.000.000
48	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Dokumen Renstra dan renja	- 3 Dokumen	20.000.000	20.000.000
49	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Kewilayahan		- Jumlah Dokumen	- 2 Dokumen	20.000.000	20.000.000
50	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Perencanaan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah Daerah	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Dokumen	- 2 Dokumen	20.000.000	20.000.000
51	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Dokumen	- 1 Dokumen	20.000.000	20.000.000
52	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Koordinasi	- 25 Kali	80.000.000	80.000.000
53	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah ASN	- 12 Bulan	4.000.000.000	4.500.000.000
54	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Kewilayahan		-	-	100.000.000	100.000.000
	JUMLAH						12.898.887.500	15.480.500.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk - 2.12.02.2.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	6 Kecamatan di Kab. Bangka Tengah	- Jumlah desa/kelurahan yang melakukan pendataan penduduk non permanen	- 32 desa	44.100.000	65.000.000
2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk - 2.12.02.2.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	6 Kecamatan di Kab. Bangka Tengah	- Jumlah dokumen kartu keluarga yang dimuktahirkan	- 1000 KK	42.650.000	100.000.000
3	Pelayanan Pendaftaran Penduduk - 2.12.02.2.01	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	6 Kecamatan di Kab. Bangka Tengah	- Jumlah dispensasi pendaftaran penduduk	- 240 jiwa	30.900.000	50.000.000
4	Pelayanan Pendaftaran Penduduk - 2.12.02.2.01	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	6 Kecamatan di Kab. Bangka Tengah	- Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk	- 10.000 jiwa	72.500.000	120.000.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
5	Pelayanan Pencatatan Sipil - 2.12.03.2.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	6 Kecamatan di Kab. Bangka Tengah	- Jumlah bulan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	- 12 bulan	200.550.000	300.000.000
6	Pelayanan Pencatatan Sipil - 2.12.03.2.01	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	6 Kecamatan di Kab. Bangka Tengah	- Jumlah dokumen Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	- 100 dokumen	183.250.000	350.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							
7	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - 2.12.04.2.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah laporan data penduduk sesuai SIAK	- 12 laporan	1.375.920.000	1.500.000.000
8	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - 2.12.04.2.01	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah Instansi yang melakukan perjanjian kerjasama	- 7 instansi	28.250.000	35.000.000
9	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - 2.12.04.2.01	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah bulan inventarisasi data	- 12 bulan	96.750.000	120.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
10	Penataan Administrasi Kependudukan - 2.12.04.2.02	Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah Pengadaan Blangko sesuai dengan Kebutuhan	- 20000 blanko KIA, 40 bh ribbon KTPel, 80 bh Ribbon KIA, 30 bh Film printer KTPel, 30 bh Film printer KIA, 1 paket ATK	440.600.000	420.000.000
11	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan - 2.12.04.2.03	Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Bangka Tengah	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	- 35 orang/kali	164.000.000	200.000.000
12	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan - 2.12.04.2.03	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	- 100 peserta	59.870.000	70.000.000
13	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan - 2.12.04.2.03	Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Terlaksananya komunikasi,informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	- 63 desa/kel	40.650.000	80.000.000
14	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan - 2.12.04.2.03	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah laporan data kependudukan	- 70 buku	34.750.000	50.000.000
15	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan - 2.12.04.2.03	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	63 Desa Kab. Bangka Tengah	- Jumlah warga yang melakukan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	- 10.000 warga	172.200.000	180.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN							
16	Penyusunan Profil Kependudukan - 2.12.05.2.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah instansi/desa yang menggunakan data kependudukan	- 70 instansi dan atau desa	27.150.000	40.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	- 12 bulan	25.100.000	28.865.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik X.XX.01.2.03.02	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- 12 bulan	224.400.000	258.060.000
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	- 12 bulan	44.500.000	51.175.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah bulan pelayanan jasa administrasi keuangan	- 12 bulan	62.480.000	71.852.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	- 12 bulan	56.200.000	64.630.000
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	- 12 bulan	122.840.000	141.266.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- 12 bulan	20.500.000	23.575.000
24	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- 12 bulan	2.507.000.000	2.530.000.000
25	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 laporan	5.000.000	5.000.000
26	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah dokumen/pelaporan keuangan yang disusun	- Jumlah dokumen/pelaporan keuangan yang disusun	10.000.000	10.000.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik	- 12 bulan	4.000.000	4.000.000
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 bulan	6.000.000	6.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	- 12 bulan	28.720.000	38.000.000
30	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	- 29 orang/kali	125.000.000	125.000.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah perlengkapan gedung kantor	- 2 unit lemari, 2 unit AC (2 PK), 1 paket mainan ramah anak, 1 buah tongkat	30.300.000	50.000.000
32	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah peralatan gedung kantor	- 1 paket komputer mobile	193.340.000	300.000.000
33	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- luas gedung kantor yang dipelihara	- 984m2	89.550.000	100.000.000
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	- 6 unit	155.220.000	160.000.000
35	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	- 20 Stel PDH PNS dan 50 Stel PDH Non PNS,	36.000.000	40.070.000
36	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu	- 20 buah pakaian batik tradisional	10.000.000	10.000.000
37	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	- 14 orang/kali	100.000.000	120.000.000
38	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7 dokumen	10.000.000	10.000.000
39	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah berita acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 berita acara	20.000.000	20.000.000
40	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah bulan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	- 12 bulan	10.000.000	10.000.000
41	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Jumlah peralatan yang dipelihara	- 18 unit	83.880.000	120.000.000
42	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Dukcapil	- Luas Gedung kantor yang diperbaiki	- 100m2	100.990.000	120.000.000
	JUMLAH						7.095.110.000	8.097.493.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - 2.08.02.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG	- 2 kali	100.000.000	200.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
2	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - 2.08.03.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah peserta sosialisasi	- Jumlah peserta sosialisasi	300.000.000	4.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
3	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 2.08.04.2.01	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah kegiatan masyarakat yang dilaksanakan	- 8 kegiatan	418.420.000	1.000.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
4	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - 2.08.06.2.02	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah pertemuan	- 10 kali	400.000.000	400.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
5	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	- Jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	250.000.000	300.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							
6	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - 2.14.02.2.01	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah grand design yang dibuat	- Jumlah grand design yang dibuat	50.000.000	100.000.000
7	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - 2.14.02.2.01	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah rapat pengendalian program yang dilakukan	- 2 kali	60.000.000	80.000.000
8	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota - 2.14.02.2.02	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah profil yang dibuat	- Jumlah profil yang dibuat	250.000.000	250.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
9	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - 2.14.03.2.01	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah peserta yang mengikuti	- 300 orang	180.000.000	200.000.000
10	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota - 2.14.03.2.03	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah akseptor kb yang terlayani	- Jumlah akseptor kb yang terlayani	600.000.000	700.000.000
11	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - 2.14.03.2.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah advokasi yang dilakukan	- 2 kali	60.000.000	150.000.000
12	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - 2.14.03.2.02	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah kader IMP yang digerakkan	- 214 kader	130.000.000	150.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
13	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 2.14.04.2.01	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah penyediaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	- 10 buah	150.000.000	300.000.000
14	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 2.14.04.2.01	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan orientasi/pelatihan	- 30 kelompok	100.000.000	200.000.000
15	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga -	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bangka Tengah	- Jumlah promosi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	- 1 kali	80.000.000	100.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
16	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	3.000.000.000	3.000.000.000
17	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 laporan	5.000.000	5.000.000
18	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA dan DWP	- Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	- 12 bulan	100.100.000	100.100.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA dan DWP	- Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- 12 bulan	105.400.000	105.400.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	154.100.000	154.100.000
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah bulan jasa administrasi keuangan	- 12 bulan	85.000.000	85.000.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA dan DWP	- Jumlah bulan pelayanan jasa kebersihan kantor	- 12 bulan	116.100.000	116.100.000
24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan alat tulis kantor	- 12 bulan	52.200.000	56.700.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- 12 bulan	27.000.000	27.000.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- 12 bulan	4.000.000	4.000.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 bulan	3.000.000	3.000.000
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA dan DWP	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan makanan dan minuman	- 12 bulan	35.000.000	35.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	- 20 kali	125.000.000	125.000.000
30	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah item peralatan gedung kantor yang diadakan	- 3 item	60.000.000	50.000.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah item meubelair yang diadakan	- 3 item	50.000.000	50.000.000
32	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Luas rumah dinas yang dipelihara	- 70 M2	4.960.000	4.960.000
33	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPA dan DWP	- Luas gedung kantor yang dipelihara	- 625 M2	50.000.000	50.000.000
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	- 8 unit	250.000.000	250.000.000
35	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA dan DWP	- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	- 67 unit	36.000.000	36.000.000
36	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	- 45 stel	25.000.000	25.000.000
37	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	- 46 stel	10.000.000	10.000.000
38	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	- 12 orang	100.000.000	100.000.000
39	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7 dokumen	10.000.000	10.000.000
40	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah berita acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 berita acara	20.000.000	20.000.000
41	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DPPKBPPPA	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 dokumen	10.000.000	10.000.000
	JUMLAH						7.576.280.000	8.576.360.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota - 1.06.02.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah PMKS dan PSKS yang diberikan pembinaan dan penyuluhan terkait pengumpulan uang dan barang	- Jumlah PMKS dan PSKS yang diberikan pembinaan dan penyuluhan terkait pengumpulan uang dan barang	40.840.000	90.000.000
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - 1.06.02.2.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah PSM yang ditingkatkan potensinya - Jumlah Pensosmas yang ditingkatkan potensinya	- 66 orang - 30 orang	762.835.000	1.050.000.000
3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - 1.06.02.2.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah TKSK yang Mendapat Peningkatan Potensi	- 6 orang	80.806.000	160.000.000
4	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - 1.06.02.2.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka tengah	- Jumlah WRSE, Kube , Legiun dan Veteran yang Mendapat Bantuan UEP dan	- 10 UEP WRSE, Legiun Veterean DAN 5 KUBE	156.430.000	300.000.000
5	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - 1.06.02.2.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka tengah	- Jumlah Karang taruna Diberdayakan dengan UEB - Puskesmas yang terbentuk di Desa/Kelurahan - Jumlah PSKS yang mengikuti Seleksi Pilar-pilar	- 100% - 100% - 100%	184.000.000	300.000.000
6	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - 1.06.02.2.03	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Puskesmas yag terbentuk di desa/kelurahan dan kelembagaan yang di tingkatkan potensinya	- 35 kasus	48.885.000	130.000.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
7	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial - 1.06.04.2.02	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan	- 12 bulan	50.000.000	55.000.000
8	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial - 1.06.04.2.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan kedaruratan	- 12 bulan	50.000.000	55.000.000
9	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial - 1.06.04.2.02	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- jumlah lansia, ODGJ dan ODK yang mendapat bantuan	- 900 orang lansia, 10 ODGJ dan 20 ODK	400.630.000	500.000.000
10	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial - 1.06.04.2.02	Penyediaan Alat Bantu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan	- 40 Unit Kursi Roda Standar, 22 Unit Tongkat Kaki Empat, 12 Unit ABP dan 12 Unit Alat Bantu Jalan Lansia	124.450.000	180.000.000
11	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial - 1.06.04.2.02	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- jumlah KTK, Penyandang disabilitas dan Tuna Sosial yang mendapat bantuan	- 2 Paket UEP KTK, 5 Paket UEP Disabilitas, 8 orang Tuna sosial	217.515.000	350.000.000
12	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial - 1.06.04.2.02	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan	- 12 bulan	44.000.000	110.000.000
13	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial - 1.06.04.2.02	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- jumlah lembaga dan kemitraan rehabilitasi sosial yang kerjasama	- 4 Lembaga	130.000.000	180.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
14	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - 1.06.05.2.02	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	- 4.000 RUTA	116.100.000	300.000.000
15	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - 1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah RTS yang menerima bantuan , dan Jumlah Pendampingan dalam rangka pelaksanaan PKH	- 7.775 KPM, 3040 kpm	2.458.358.000	3.300.000.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							
16	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - 1.06.06.2.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah KSB yang dibentuk dan sosialisasi KSB	- 1 Desa	37.365.000	80.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
17	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - 1.06.06.2.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Anggota TAGANA yang apel siaga dan mobilisasi	- 32 orang	171.400.000	260.000.000
18	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - 1.06.06.2.01	Penyediaan Makanan		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah korban bencana yang dibantu - Jumlah Paket yang dibantu	- 300 orang - 120 paket	85.650.000	250.000.000
19	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - 1.06.06.2.01	Pelayanan Dukungan Psikososial	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah korban bencana yang dibantu	- 9 kk	130.450.000	300.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA							
20	Fasilitasi Kerja sama antar Desa - 2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar desa	- 6 Desa	63.000.000	80.000.000
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
21	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa - 2.13.04.2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Terlaksananya administrasi Pemerintahan Desa	- 56 desa	42.902.500	160.000.000
22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa - 2.13.04.2.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala dengan tujuan tertentu (paling sedikit 3 desa dalam 1 bulan)	- 56 Desa	46.210.000	80.000.000
23	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa - 2.13.04.2.01	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Terselenggaranya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa (RPJM Desa/RKP Desa)	- 56 Desa	40.068.000	110.000.000
24	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa - 2.13.04.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi teknis dengan Dinas/Instansi/Kem enterian terkait;	- 56 Desa	124.230.000	310.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
25	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - 2.13.04.2.01	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Terselenggaranya pembinaan/pelatihan/pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan BPD dalam rangka peningkatan kinerja Kades, Perangkat Desa dan anggota BPD	- Kades,sekdes,kasi/kaur, perangkat desa, BPD, Ketua TP PKK se-kab Bateng	59.950.000	210.000.000
26	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - 2.13.04.2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Terfasilitasinya penyelenggaraan musyawarah desa diluar musyawarah perencanaan pembangunan desa	- 56 Desa	39.435.000	110.000.000
27	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - 2.13.04.2.01	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Terselenggaranya evaluasi dan pengawasan peraturan desa terkait APBDesa, Pungutan, Tata Ruang dan Organisasi Pemerintah Desa, yang dilakukan per kecamatan;	- 56 desa	44.560.000	310.000.000
28	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - 2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Terfasilitasinya pembentukan BUMDes dan Lembaga Kerja sama antar Desa	- 56 BUMDes	146.735.000	220.000.000
29	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - 2.13.04.2.01	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Terselenggarannya fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;	- Kades Difinitif; Penjabat Kades, dan PAW Kades	163.150.000	55.000.000
30	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - 2.13.04.2.01	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Terfasilitasinya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	- 56 Desa	37.660.000	110.000.000
31	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - 2.13.04.2.01	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- terfasilitasinya fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa	- 56 desa	128.328.000	80.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							
32	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tk Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah - 2.13.05.2.01	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan yang dibina	- 63 Desa/Kelurahan	285.295.000	300.000.000
33	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tk Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah - 2.13.05.2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Kelembagaan SPAM PAMSIMAS	- 30 SPAM PAMSIMAS	150.000.000	160.000.000
34	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tk Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah - 2.13.05.2.01	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Terlaksananya Gelar Karya TTG Tingkat Kabupaten dan Nasional	- 2 Pameran	96.590.000	100.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
35	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah bulan penyediaan surat menyurat	- 12 bulan	242.600.000	245.000.000
36	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah Bulan terbayarkannya tagihan jasa komunikasi dan listrik	- 12 bulan	63.991.000	180.000.000
37	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah bulan terbayarkannya pajak kendaraan dinas/operasional	- 12 bulan	65.400.000	66.000.000
38	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah bulan terbayarkannya jasa pengelolaan administrasi keuangan	- 12 bulan	206.252.000	209.000.000
39	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah Bulan terbayarkannya jasa kebersihan kantor	- 12 bulan	63.240.000	64.000.000
40	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah bulan tersedianya ATK kantor	- 12 bulan	42.200.000	53.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
41	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah bulan Pelayanan penyediaanbarang cetakan dan penggandaan	- 12 bulan	31.706.000	44.000.000
42	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah Bulan pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- 12 bulan	3.200.000	6.000.000
43	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan Komponen Instalansi Listri/penerangan bangunan kantor	- 12 bulan	5.200.000	6.000.000
44	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	- 12 bulan	12.000.000	25.000.000
45	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah aparatur yang mengikuti rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	- 45 orang	125.000.000	125.000.000
46	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah Bangunan/Gedung Kantor dalam Kondisi baik	- 767 M2	10.000.000	71.000.000
47	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi	- 9 Unit	259.664.500	300.000.000
48	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	- 95 Unit / Item	15.562.500	35.000.000
49	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah aparatur yang mendapatkan pakaian dinas	- 52 stel	39.970.000	40.000.000
50	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	- 100%	100.000.000	100.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
51	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Jumlah dokumen/laporan yang disusun	- 7 dokumen	10.000.000	10.000.000
52	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah Berita Acaea kesepakatan hasil koordinasi	- 7 Dokumen	20.000.000	20.000.000
53	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 Dokumen	10.000.000	0
54	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- 12 bulan	3.440.130.800	3.445.000.000
55	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 2 laporan	5.000.000	5.000.000
56	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000
57	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mobil Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DINSOSPMD	- Jumlah kendaraan dinas/operasional	- 1 unit	300.000.000	0
	JUMLAH						11.838.944.300	15.404.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021**

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - 8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Peserta Upcara HUT RI - Jumlah Siswa yang paham Tentang Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara	- 1600 Orang - 200 orang	593.000.000	700.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN							
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum, Pemantauan Situasi Politik - 8.01.03.2.01	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- laporan keuangan bantuan partai politik yang di verifikasi	- 100%	125.000.000	150.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							
3	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - 8.01.04.2.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten bangka tengah	- banyaknya ORMAS memahami tentang cara dan sarat tentang pendirian ormas yang sesuai dengan peraturan pemerintah	- 86 Ormas	130.000.000	140.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							

4	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - 8.01.05.2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Peserta Sosialisasi dan Advokasi - Jumlah Peserta Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama - Jumlah Rapat Koordinasi Keterpaduan Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Antar Instansi Terkait - Jumlah Kegiatan Identifikasi Penyalahgunaan NAPZA - Jumlah Terfasilitasi dan Terpantaunya Pecandu Narkoba di Pusat Rehabilitasi	- 275 Orang - 100 Orang - 162 Orang - 6 Kali - 5 Kali	275.106.000	400.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							

5	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - 8.01.06.2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Anggota Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) yang di Bina - Jumlah Konflik yang tertangani - Jumlah Terelesaikannya Kasus Potensi Konflik (Suku, Ras dan Agama) - Jumlah Terelesaikannya Kasus Potensi Konflik (Konflik Sosial dan Budaya) - Jumlah Terelesaikannya Kasus Potensi Konflik (Melibatkan OPD terkait)	- 30 Orang - 3 Jenis Konflik - 1000 Orang - 10 Kasus - 10 Kasus (25 OPD)	165.000.000	300.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
6	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	- 12 bulan	95.887.000	95.887.000
7	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- jumlah bulan pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 12 bulan	40.000.000	40.000.000
8	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- jumlah bulan pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	- 12 bulan	94.220.000	94.220.000
9	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Terpeliharanya dan terjaganya kebersihan kantor	- 12 Bulan	31.100.000	-
10	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Lancarnya administrasi kantor	- 12 Bulan	20.000.000	20.000.000
11	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Lancarnya administrasi kantor	- 12 bulan	15.000.000	15.000.000
12	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- 12 bulan	5.000.000	5.000.000

13	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 bulan	7.500.000	7.500.000
14	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Terpuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu	- 12 Bulan	20.000.000	20.000.000
15	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Meningkatnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan jaringan kerjasama dengan pihak lain	- 12 bulan	125.000.000	125.000.000
16	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Terpuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor	- 100%	20.000.000	20.000.000
17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Terpuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	- 100 %	80.070.000	-
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Terpuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	- 100%	20.000.000	20.000.000
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Terpeliharanya bangunan/gedung kantor dalam kondisi baik	- 100%	45.000.000	45.000.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Kelancaran dalam pelayanan aparaturnya kepada publik	- 100%	114.583.000	130.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	- 100%	15.000.000	15.000.000

22	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Terwujudnya keseragaman dan kerapian aparatur dalam berpakaian pada hari-hari tertentu	- 24 stel	10.000.000	12.000.000
23	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- jumlah peserta yang mengikuti diklat	- 10 orang	100.000.000	100.000.000
24	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan semesteran	- 1 laporan	5.000.000	5.000.000
25	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Ketetapan waktu dalam penyampaian laporan keuangan akhir tahun	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000
26	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		kesbangpol	- Terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	- 12 bulan	1.511.350.600	1.700.000.000
27	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	kesbangpol	- jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	- 24 stel	12.000.000	14.000.000
28	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	kesbangpol	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7 dokumen	10.000.000	10.000.000
29	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	kesbangpol	- Jumlah Berita Acara Yang di susun	- 7 Dokumen	20.000.000	20.000.000
30	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kesbangpol	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 Dokumen	10.000.000	10.000.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Kesbangpol	- Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Pemeliharaan /Perizinan kendaraan dinas/operasional	- 12 Bulan	35.700.000	-
TOTAL							3.760.516.600	4.223.607.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA, DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021**

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - 1.05.03.2.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Kab. Bangka Tengah	- Jumlah dokumen yang akan di susun	- 2 dokumen (Dokumen kajian bencana dan dokumen penyusunan rencana penanggulangan bencana)	450.000.000	-
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - 1.05.03.2.01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Pembangunan Kewilayahan	Kab. Bangka Tengah	- Jumlah peserta sosialisasi tentang kebencanaan	- orang	30.000.000	45.000.000
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana - 1.05.03.2.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Wilayah NKRI	- Jumlah peserta pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dan peningkatan kapasitas TRC dan SRC	- 156 orang, 24 org	80.000.000	80.000.000
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana - 1.05.03.2.02	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah anggota SRC yang tersedia	- 18 orang	750.000.000	750.000.000
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - 1.05.03.2.03	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Kab. Bangka Tengah	- Jumlah kejadian darurat bencana yang di tanggulangi	- 2 kejadian	62.100.000	62.100.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - 1.05.03.2.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- jumlah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	- 60 kali	80.000.000	75.000.000
7	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - 1.05.03.2.03	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	- persentase tersedianya logistik dalam operasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- 80%	60.000.000	60.000.000
8	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - 1.05.03.2.04	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	wilayah NKRI	- Jumlah studi banding ke BPBD kabupaten/kota lain	- 1 opd	25.000.000	25.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
9	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	BPBD Kab. Bangka Tengah	- gaji dan tunjangan ASN BPBD Kabupaten Bangka Tengah	- 14 bulan	850.000.000	850.000.000
10	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BPBD Kab. Bangka Tengah	- Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran	- 12 bulan	5.000.000	5.000.000
11	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BPBD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000
12	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	- 12 bulan	98.500.000	98.500.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
13	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BPBD Kab. Bangka Tengah	- Tersediaanya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas BPBD Kab. Bangka Tengah	- 12 bulan	45.000.000	20.000.000
14	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BPBD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	- 12 bulan	50.000.000	50.000.000
15	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor		BPBD Kab. Bangka Tengah	- Tersedianya ATK Kantor	- 12 bulan	18.000.000	18.000.000
16	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		BPBD Kab. Bangka Tengah	- Tersedianya brg cetakan dan jasa fotokopi	- 12 bulan	12.000.000	12.000.000
17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		BPBD Kab. Bangka Tengah	- Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan	- 12 bulan	10.000.000	10.000.000
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		BPBD Kab. Bangka Tengah	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an	- 12 bulan	7.200.000	7.200.000
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman		Kabupaten Bangka Tengah	- Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	- 12 bulan	12.000.000	12.000.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		wilayah NKRI	- Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- 40 ok	125.000.000	125.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BPBD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat	- 1 unit	265.000.000	-

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03			Kab. Bangka Tengah	- Jumlah unit pengadaan	- 5 unit	30.000.000	30.000.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Bangka Tengah	- Jumlah pengadaan peralatan	- 10 unit	30.000.000	30.000.000
24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur		Kab. Bangka Tengah	- Jumlah unit pengadaan meubelair	- 12 unit	20.000.000	40.000.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			-	-	10.000.000	10.000.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		BPBD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	- 3 unit	110.000.000	110.000.000
27	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BPBD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah pengadaan pakaian dinas	- 28 stel	18.000.000	18.000.000
28	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		BPBD Kab. Bangka Tengah	- JUmlah pengadaan pakaian kerja	- 28 stel	11.200.000	11.200.000
29	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			-	-	10.000.000	10.000.000
30	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	20.000.000	20.000.000
31	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal		wilayah NKRI	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	- 8 orang	100.000.000	100.000.000
32	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Pemerintah daerah kab. bangka tengah	- Jumlah dokumen pelaporan	- 5 laporan	10.000.000	10.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
TOTAL							3.414.000.000	2.704.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1.05.02.2.01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah pengamanan Hari Besar Agama, - Jumlah Pencegahan Keamanan dan kenyamanan - Jumlah Operasi Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah, - Jumlah Gangguan Rawan Konflik	- 3 kegiatan (hari lebaran Idul fitri, Idul Adha, Natal) - 100 kali - 60 kali - 3 objek	783.505.000	830.000.000
2	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1.05.02.2.01	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Operasional Penertiban dari Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Jumlah Operasi Penertiban Pajak Daerah Non Yustisi	- 100 kali - 24 kali	259.500.000	300.000.000
3	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1.05.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Satpol PP, LINMAS, dan DAMKAR yang mengikuti gelar pasukan	- 850 orang	55.000.000	55.000.000
4	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1.05.02.2.01	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah anggota LINMAS kab. Bangka Tengah aktif berkoordinasi - Jumlah anggota linmas yang menerima honor - Jumlah anggota linmas yang menerima asuransi	- 422 orang - 129 orang - 422 orang	852.200.000	900.000.000

5	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1.05.02.2.01	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah peserta sanlinmas yang mengikuti apel siaga - Jumlah peserta sanlinmas yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	- 422 orang - 60 orang	94.000.000	100.000.000
6	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 1.05.02.2.01	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan POL PP (bela diri militer, Senam Tongkat T (Kundun), Penyuluhan Hukum)	- 3 lembaga	40.000.000	75.000.000
7	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota - 1.05.02.2.02	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Perda dan Perkada tersosialisasikan dan pembinaan	- 6 Perda	50.000.000	75.000.000
8	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota - 1.05.02.2.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Kepatuhan masyarakat terhadap perda / perkada - jumlah anggota Satpol PP yang menerima honor bulanan dan honor Piket khusus bagi pegawai tidak tetap Anggota SATPOL PP Kab. Bangka Tengah	- 5 Perda - 154 orang	4.688.835.000	4.688.835.000
9	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota - 1.05.02.2.02	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Operasional Penertiban Pajak Daerah - Jumlah Berkas P 21 (lengkap) - Jumlah Penyelidikan yang terindikasi pelanggaran Perda dan Perkada	- 24 kali - 1 kasus - 10 kali	115.050.000	115.050.000
10	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota - 1.05.02.2.03	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah PPNS yang mengikuti Bimtek Khusus dan Jumlah Rapat Koordinasi	- 11 kali	40.240.000	88.000.000
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN								

11	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - 1.05.04.2.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah lokasi titik rawan kebakaran	- 63 titik	20.000.000	20.000.000
12	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - 1.05.04.2.01	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi	- 30 Kejadian	20.000.000	20.000.000
13	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - 1.05.04.2.02	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Terpeliharanya Alat Pemadam Api Ringan Proteksi Kebakaran	- 20 buah	20.000.000	20.000.000
14	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - 1.05.04.2.01	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Terkendalinya Bencana Kebakaran dalam daerah - Jumlah pegawai kontrak pemadam kebakaran - Jumlah kendaraan dinas/operasional pemadam kebakaran yang dipelihara - jumlah petugas damkar yang mengikuti bimtek	- 70 kali - 36 orang - 3 unit - 7 orang	1.080.020.000	1.080.020.000
15	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - 1.05.04.2.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Alat Proteksi Kebakaran	- 20 gedung	15.000.000	20.000.000
16	Investigasi Kejadian Kebakaran - 1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Pembangunan Kewilayahan	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah frekuensi investigasi	- Jumlah frekuensi investigasi	15.000.000	15.000.000
17	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - 1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah frekuensi pelatihan/simulasi dan penyuluhan	- 3 kali	25.000.000	25.000.000
18	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - 1.05.04.2.01	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah kegiatan operasi	- 10 Kejadian	15.000.000	20.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							

19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	- 12 bulan	73.300.000	75.000.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	- 12 Bulan	43.200.000	60.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah bulan pelayanan jasa administrasi keuangan	- 12 Bulan	156.042.000	160.000.000
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah bulan penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas dan operasional	- 12 Bulan	68.550.000	70.000.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah bulan pelayanan jasa kebersihan	- 12 Bulan	30.010.000	32.000.000
24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan alat tulis kantor	- 12 Bulan	36.000.000	36.000.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- 12 Bulan	14.400.000	15.000.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	- 12 Bulan	3.000.000	3.000.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	- 12 Bulan	3.600.000	3.600.000
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan makanan dan minuman	- 12 Bulan	32.000.000	32.000.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	- 49 OK	125.000.000	125.000.000

30	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- jumlah pengadaan/kendaraan dinas/operasional	- 2 unit (1 unit Mobil Patroli Tibum dan 1 unit Mobil water)	867.840.000	867.840.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	55.090.000	60.000.000
32	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	- 6 item (Komputer, Laptop, Printer, Infokus,Kamera, AC)	50.000.000	70.000.000
33	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- jumlah pengdaan mebeleur	- 4 Item (meja, kursi, lemari, filing kabinet)	33.000.000	60.000.000
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Kantor Satpol PP	- jumlah luas gedung kantor yang dipelihara	- 401 m2	37.628.000	40.000.000
35	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kantor Satpol PP	- jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	- 9 unit	142.280.000	150.000.000
36	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	- jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	30.600.000	40.000.000
37	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	- 233 Stell (28 stell PDH ASN, 7 PDH PKK, 17 stell PDL I, 137 PDL II, 18 stell Damkar, 26 stell Pakaian Dinas Khusus SATGAS)	343.610.000	386.000.000
38	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- 12 Bulan	2.883.298.000	2.883.298.000
39	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	- 26 Stell	11.500.000	15.000.000
40	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dalam dan Luar Kabupaten Bangka Tengah	- jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	- 8 OK	100.000.000	100.000.000
41	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah dokumen yang disusun	- Jumlah dokumen yang disusun	10.000.000	10.000.000
42	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah Berita Acara kesepakatan hasil koordinasi	- Jumlah Berita Acara kesepakatan hasil koordinasi	20.000.000	20.000.000
43	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 Dokumen (LPPD, LKPJ, LAKIP, DALEV, MONEV)	10.000.000	10.000.000

44	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 Laporan	5.000.000	5.000.000
45	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kantor Satpol PP	- jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000
TOTAL							13.383.298.000	13.785.643.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
1	Administrasi Tata Pemerintahan - 4.01.02.2.01	Penataan Administrasi Pemerintahan		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah pelayanan yang diselenggarakan	- 15 pelayanan	160.000.000	200.000.000
2	Administrasi Tata Pemerintahan - 4.01.02.2.01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Kabupaten Bangka Tengah	- Perbup penetapan batas desa, terlaksananya pembakuan nama-nama unsur rupabumi Kab. Bangka Tengah, terlaksananya pembinaan administrasi pemerintahan pada kecamatan dan desa	- 100 Perbup/Segmen Batas (1 Dokumen), 6 Kecamatan, 7 Kelurahan	250.000.000	420.000.000
3	Administrasi Tata Pemerintahan - 4.01.02.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen yang disusun	- 3 Dokumen (LKPJ Biupati, LPPD, SPM)	325.000.000	350.000.000
4	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - 4.01.02.2.02	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah pembinaan mental dan spiritual Pegawai, masyarakat dan pembinaan dn bimbingan penyelenggaraan ibadah syariah 2. Jumlah dialog Audiensi; 3. jumlah pendidik yang mendapat subsidi dan insentif	- 1. 73 kali; 2. 26 lokasi 3. 983 orang	5.600.000.000	5.953.500.000
5	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - 4.01.02.2.02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah penerima/evaluasi	- 399 penerima	239.250.000	173.250.000

6	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah - 4.01.02.2.03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Penyusunan Produk Hukum Daerah yang terfasilitasi	- 3 jenis produk hukum (Perda, Perbup dan SK	650.000.000	698.250.000
7	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah - 4.01.02.2.03	Fasilitasi Bantuan Hukum		Kabupaten Bangka Tengah	- Fasilitasi Bantuan Hukum dan Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan	- 7 Kali/Kasus/LO	350.000.000	378.000.000
8	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah - 4.01.02.2.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Kabupaten Bangka Tengah	- Optimalisasi sistem informasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum	- 12 bulan	174.700.000	157.500.000
9	Fasilitasi Kerjasama Daerah - 4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		NKRI	- Jumlah MoU dalam Negeri yang dikerjasamakan oleh pemerintah daerah	- 10 MoU	150.000.000	168.000.000
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN							
10	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian -	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah BUMD dan BLUD	- 2 BUMD	160.000.000	200.000.000
11	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian -	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Laporan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR	- 2 laporan/semester dan 1 Kali Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR	271.500.000	271.500.000
12	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - 4.01.03.2.01	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Kabupaten Bangka Tengah	- Laporan Indeks Harga Konsumen dan Perhitungan Inflasi di Kabupaten Bangka Tengah	- 1 laporan tahunan, 12 laporan bulanan	280.000.000	300.000.000
13	Administrasi Pembangunan - 4.01.03.2.02	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen Infrastruktur	- 1 Dokumen database	55.000.000	68.250.000
14	Administrasi Pembangunan - 4.01.03.2.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Kabupaten Bangka Tengah	- Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	- 12 bulan	470.000.000	620.000.000
15	Pengadaan Barang dan Jasa - 4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Kabupaten Bangka Tengah	- Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- 12 bulan	1.250.000.000	1.365.000.000

16	Pengadaan Barang dan Jasa - 4.01.03.2.03	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Kabupaten Bangka Tengah	- Terlaksananya Sistem Lelang Secara Elektronik	- 12 bulan	400.000.000	450.000.000
17	Pengadaan Barang dan Jasa - 4.01.03.2.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		NKRI	- Jumlah pelatihan	- 2 kali	225.000.000	250.000.000
18	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam - 4.01.03.2.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	- 1 laporan tahunan	50.000.000	65.000.000
19	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam - 4.01.03.2.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	- 1 laporan tahunan	65.000.000	75.000.000
20	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam - 4.01.03.2.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	- 1 laporan tahunan	50.000.000	75.000.000
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM								
21	Pelaksanaan Administrasi Umum - 4.01.04.2.01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian		Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Tengah	- Jumlah bulan Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	- 12 bulan	1.590.000.000	1.750.000.000
22	Pelaksanaan Administrasi Umum - 4.01.04.2.01	Pengelolaan Perlengkapan		Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Tengah	- Jumlah bulan Pengelolaan Perlengkapan pimpinan	- 12 bulan	65.000.000	78.750.000
23	Pelaksanaan Administrasi Umum - 4.01.04.2.01	Pengelolaan Rumah Tangga		Rumah Jabatan KDH/WKDH	- Terselenggaranya Urusan Rumah Tangga KDH/WKDH	- 12 bulan	1.720.000.000	1.850.000.000
24	Penataan Organisasi - 4.01.04.2.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan	- 4 laporan (tersusunnya Analisis Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan dan evaluasi kelembagaan)	100.000.000	120.000.000
25	Penataan Organisasi - 4.01.04.2.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan	- 2 laporan (IKM dan Evaluasi SOP) dan 2 inovasi pelayanan publik	165.000.000	230.000.000

26	Penataan Organisasi - 4.01.04.2.02	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan	- 2 laporan (LKIP dan Reformasi Birokrasi)	700.000.000	735.000.000
27	Protokol dan Komunikasi Pimpinan - 4.01.04.2.03	Fasilitasi Keprotokolan		NKRI	- Jumlah bulan Fasilitasi Keprotokolan	- 12 bulan	1.190.000.000	2.405.550.000
28	Protokol dan Komunikasi Pimpinan - 4.01.04.2.03	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		NKRI	- Jumlah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	- 12 bulan	433.000.000	500.000.000
29	Protokol dan Komunikasi Pimpinan - 4.01.04.2.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	- 12 bulan	75.750.000	50.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
30	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7 dokumen (Renstra, Renja Induk dan Perubahan, RKA/DPA Induk dan perubahan)	10.000.000	10.000.000
31	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah Berita Acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 Berita Acara (BA Musrenbang Desa, Kec, Kab, Prov, Nasional, Rakortek, Trilateral meeting)	20.000.000	20.000.000
32	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 dokumen (LPPD, LKPJ, LAKIP, DALEV, MONEV)	10.000.000	10.000.000
33	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- 12 bulan	8.750.000.000	9.500.000.000
34	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 laporan	5.000.000	7.500.000
35	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000
36	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	- 12 bulan	864.730.000	609.000.000

37	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah bulan pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 12 bulan	604.000.000	645.750.000
38	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah bulan Pelayanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 12 bulan	191.360.000	206.850.000
39	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	- 12 bulan	402.930.000	446.250.000
40	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah bulan pelayanan jasa administrasi keuangan	- 12 bulan	245.000.000	273.000.000
41	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah bulan pelayanan jasa kebersihan kantor	- 12 bulan	406.000.000	441.000.000
42	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan alat tulis kantor	- 12 bulan	125.000.000	136.500.000
43	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- 12 bulan	215.000.000	236.250.000
44	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah bulan pelayanan penyediaan komponen instalasi listrik dan bangunan kantor	- 12 bulan	150.000.000	210.000.000
45	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 bulan	150.000.000	162.750.000

46	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Makanan dan Minuman	- 12 bulan	660.000.000	997.500.000
47	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	- 300 kali rapat koordinasi	1.000.000.000	2.100.000.000
48	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mobil Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	- 2 unit	1.800.000.000	2.070.000.000
49	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	- 8 unit	3.400.000.000	2.000.000.000
50	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan	- 5 unit/item	225.000.000	250.000.000
51	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	- 9 unit/item	225.000.000	250.000.000
52	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan	- 5 unit/item	150.000.000	200.000.000
53	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	- 7 unit/item	225.000.000	300.000.000
54	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah Mebeleur yang diadakan	- 5 unit/item	175.000.000	262.500.000

55	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Tengah	- Luas rumah jabatan yang direhabilitasi	- 1944M2/2281M2	100.000.000	157.500.000
56	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Tengah	- luas rumah dinas yang dipelihara	- 1000M2/5915M2	50.000.000	75.000.000
57	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- luas gedung kantor yang dipelihara	- 1555M2/5915M2	200.000.000	275.000.000
58	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	- 2 unit	225.000.000	302.500.000
59	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	- 34 unit	1.106.780.000	1.430.000.000
60	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Tengah	- jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	- 7 unit/item	35.000.000	38.500.000
61	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	- 13 unit/item	175.000.000	200.000.000
62	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Tengah	- jumlah rumah jabatan yang direhabilitasi	- 2 unit/item/paket	575.000.000	330.000.000
63	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Tengah	- jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	- 14 unit/item/paket	770.000.000	165.000.000

64	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah mobil jabatan yang direhabilitasi	- 2 unit	75.000.000	100.000.000
65	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah kendaraan dinas/ operasional yang direhabilitasi	- 2 unit	50.000.000	100.000.000
66	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	- 202 stel	135.000.000	187.000.000
67	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	- 32 stel	20.000.000	25.000.000
68	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah	- jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	- 40 orang	250.000.000	300.000.000
TOTAL							41.000.000.000	44.997.900.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN							
1	Layanan Administrasi DPRD - 4.02.02.2.01	Penyelenggaraan Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	- jumlah bulan penyediaan jasa administrasi	- jumlah bulan penyediaan jasa administrasi	157.400.000	157.400.000
2	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - 4.02.02.2.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		sekretariat DPRD	- tersedianya pakaian Dinas dan atribut DPRD	- 100%	302.720.000	302.720.000
3	Layanan Administrasi DPRD - 4.02.02.2.01	Fasilitasi Rapat DPRD		sekretariat DPRD	- terlaksananya rapat	- 27 kali rapat paripurna	491.030.000	491.030.000
4	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - 4.02.02.2.02	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		setwan	- terselenggaranya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	- 25 jiwa	114.300.000	114.300.000
5	Layanan Administrasi DPRD -	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD		setwan	- terkoordinirnya dalam urusan rumah tangga pimpinan dan wakil pimpinan	- 12 bulan	949.240.000	949.240.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
6	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - 4.02.03.2.05	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		sekretariat DPRD	- tertampungnya aspirasi masyarakat	- 10 kali	35.660.000	35.660.000
7	Peningkatan Kapasitas DPRD - 4.02.03.2.04	Penyusunan Program Kerja DPRD		sekretariat DPRD	- terselenggaranya rapat alat kelengkapan Dewan	- 54 kali	117.300.000	117.300.000
8	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat -	Pelaksanaan Reses	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	sekretariat DPRD	- jumlah kegiatan reses yang terlaksana	- 3 kali	625.400.000	625.400.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
9	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - 4.02.03.2.05	Kunjungan Kerja dalam Daerah		setwan	- jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	- 816 kali	454.200.000	454.200.000
10	Peningkatan Kapasitas DPRD -	Bimbingan Teknis DPRD		setwan	- Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	- 323 kali	1.034.885.000	1.034.885.000
11	Peningkatan Kapasitas DPRD - 4.02.03.2.04	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		setwan	- jumlah dokumentasi yang disebarluaskan	- 5 buletin, 30 dok kali community news, 2 kolase dan 1000 lembar foto	147.800.000	147.800.000
12	Peningkatan Kapasitas DPRD - 4.02.03.2.04	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		setwan	- jumlah tenaga ahli fraksi	- 5 orang	443.136.000	443.136.000
13	Peningkatan Kapasitas DPRD - 4.02.03.2.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		setwan	- jumlah tenaga ahli pimpinan DPRD	- 3 orang	131.780.000	131.780.000
14	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD - 4.02.03.2.01	Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik		setwan	- Pembentukan Penyusunan Naskah akademik DPRD	- 2 Naskah Akademik	100.000.000	100.000.000
15	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD - 4.02.03.2.08	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Setwan	- Bertambahnya Informasi dan wawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	- 2398 kali	14.000.000.000	14.000.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
16	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat DPRD	- Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- umlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	257.800.000	257.800.000
17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	- jumlah bulan penyediaan jasa adminstrasi keuangan	- 12 bulan	194.007.000	194.007.000
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	- Jumlah Bulanan Penyediaan Alat Tulis kantor	- Jumlah Bulanan Penyediaan Alat Tulis kantor	102.700.000	102.700.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	- Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan	- Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan	208.200.000	208.200.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		SEKRETARIAT DPRD	- Terpenuhiya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Terpenuhiya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	- Jumlah Bulan Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 20 jenis	126.512.000	126.512.000
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	- Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	- Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	86.480.000	86.480.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	- koordinasi dan konsultasi ke luar	- koordinasi dan konsultasi ke luar	150.000.000	150.000.000
24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	- Jumlah mobil jabatan	- Jumlah mobil jabatan	235.000.000	235.000.000
25	Administrasi Umum -	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	- jumlah kendaraan dinas/operasional	- jumlah kendaraan dinas/operasional	30.000.000	30.000.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	SEKRETARIAT DPRD	- Jumlah perlengkapan gedung kantor	- Jumlah perlengkapan gedung kantor	30.000.000	30.000.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas		Sekretariat DPRD	- tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan	- 12	30.000.000	30.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
28	Administrasi Umum -	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		sekretariat DPRD	- tersedianya peralatan gedung kantor	- 15 unit	30.460.000	30.460.000
29	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		sekretariat DPRD	- tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	- 12	37.220.000	37.220.000
30	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat DPRD	- tersedianya pakaian hari hari tertentu	- 100%	10.000.000	10.000.000
31	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Sekretariat DPRD	- tersedianya aparatur yang mengikuti pelatihan dan pendidikan Formal	- 100%	200.000.000	200.000.000
32	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Sekretariat DPRD	- jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	- 4 laporan	30.000.000	30.000.000
33	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat DPRD	- jumlah dokumen terlapor	- 7 Dokumen	10.000.000	10.000.000
34	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat DPRD	- jumlah dokumen dan pelaporan	- 5 Dokumen	10.000.000	10.000.000
35	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	setwan	- tersedianya tunjangan para anggota DPRD dan pegawai dilingkungan setwan	- 12	14.000.000.000	14.000.000.000
36	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	sekretariat DPRD	-	-	364.380.000	364.380.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
37	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Sekretariat DPRD	- jumlah Kendaraan operasional yang terpelihara dan memperoleh ijin pajak tahunan	- 20 Kendaraan	111.460.000	111.460.000
38	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		setwan	-	-	207.800.000	207.800.000
39	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Koba	- Jumlah kendaraan dinas/operasional	- 9 unit	281.220.000	281.220.000
40	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Koba	- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	- 40 AC split, 1 mesin absensi,1 mesin fotocopy, 2 AC	91.800.000	91.800.000
41	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		Setwan	- Jumlah Luas Rumah Dinas yang dipelihara	- 80%	5.110.000	5.110.000
42	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	setwan	- jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000
43	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		setwan	- jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	- 1 laporan	5.000.000	5.000.000
44	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan	- 5 dokumen	30.000.000	-
TOTAL							36.000.000.000	35.970.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021**

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 5.02.02.2.01	Penyusunan KUA dan PPAS	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen yang disusun	- 2 dokumen	99.000.000	135.650.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 5.02.02.2.01	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen yang disusun	- 2 dokumen	99.000.000	126.650.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 5.02.02.2.01	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen review RKA SKPD yang disusun	- 34 dokumen	75.000.000	102.400.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 5.02.02.2.01	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen review DPA SKPD yang disusun	- 34 dokumen	75.000.000	102.400.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 5.02.02.2.01	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen Perda dan Perkada tentang APBD yang disusun	- 2 dokumen	367.600.000	345.550.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 5.02.02.2.01	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD yang disusun	- 7 dokumen	367.600.000	345.550.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 5.02.02.2.01	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Perkada yang disusun	- 2 dokumen	48.950.000	48.950.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 5.02.02.2.01	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Perda dan Perkada tentang regulasi penganggaran yang disusun	- 5 dokumen	50.200.000	40.200.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 5.02.02.2.01	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah koordinasi yang difasilitasi	- 19 kali	50.600.000	60.000.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 5.02.02.2.01	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah dan Luar Daerah	- Jumlah koordinasi yang difasilitasi	- 31 Kali	80.600.000	100.000.000
11	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah -	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah dan Luar Daerah	- Jumlah koordinasi yang difasilitasi	- 4 kali	28.300.000	30.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
12	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen berita acara rekonsiliasi bank	- 12 dokumen	20.000.000	22.500.000
13	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 5.02.02.2.02	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah dan Luar Daerah	- Jumlah uraian dana perimbangan dan dana transfer yang diterima	- 10 uraian	100.000.000	125.000.000
14	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 5.02.02.2.02	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen SP2D	- 10.000 dokumen	25.000.000	30.000.000
15	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 5.02.02.2.02	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen SKPP	- 70 dokumen	15.000.000	17.000.000
16	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 5.02.02.2.02	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen PFK	- 60 dokumen	35.000.000	40.000.000
17	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 5.02.02.2.02	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen berita acara rekonsiliasi SKPD	- 408 dokumen	87.600.000	95.000.000
18	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 5.02.02.2.02	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen penatausahaan perbendaharaan	- 10 dokumen	40.000.000	45.000.000
19	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 5.02.02.2.02	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen SPD	- 156 dokumen	30.000.000	35.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
20	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - 5.02.02.2.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan pertanggungjawabana pelaksanaan APBD semester I dan semester II	- 2 dokumen	200.000.000	250.000.000
21	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - 5.02.02.2.03	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD	- 2 dokumen	250.000.000	300.000.000
22	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah -	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- 1 dokumen	250.000.000	300.000.000
23	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - 5.02.02.2.03	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawabana pelaksanaan APBD	- 1 laporan	25.000.000	30.000.000
24	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - 5.02.02.2.03	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah berita acara rekonsiliasi	- 872 dokumen	250.000.000	300.000.000
25	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah -	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	- 1 dokumen	150.000.000	200.000.000
26	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - 5.02.02.2.03	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	- 1 dokumen	150.000.000	200.000.000
27	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - 5.02.02.2.03	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bukti memorial dan dokumen SP2B	- 110 dokumen	85.000.000	125.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
28	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - 5.02.02.2.03	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan sosialisasi	- 40 peserta	85.000.000	100.000.000
29	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah -	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan keuangan bulanan	- 12 laporan	100.000.000	150.000.000
30	Kegiatan Penunjang Urusan - 5.02.02.2.04	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah lembaga yang diberikan subsidi	- 1 lembaga	500.000.000	1.000.000.000

31	Kegiatan Penunjang Urusan - 5.02.02.2.04	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Persentase realisasi penyaluran bantuan keuangan khusus	- 98%	155.324.108.500	-
----	--	--	--	-------------------------	---	-------	-----------------	---

	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							
32	Pengelolaan Barang Milik Daerah - 5.02.03.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang	- 2 dokumen	75.000.000	82.500.000
33	Pengelolaan Barang Milik Daerah -	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen RKBMD	- 64 dokumen	79.600.000	87.560.000
34	Pengelolaan Barang Milik Daerah - 5.02.03.2.01	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen penatausahaan SKPD	- 2 dokumen	85.000.000	93.500.000
35	Pengelolaan Barang Milik Daerah - 5.02.03.2.01	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen inventarisasi BMD KIB A, KIB C, dan KIB D	- 32 dokumen	405.000.000	445.500.000
36	Pengelolaan Barang Milik Daerah - 5.02.03.2.01	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah pengukuran tanah - Jumlah sertifikat tanah - Jumlah papan nama aset - Jumlah patok tanah	- 150 tanah diukur - 50 sertifikat - 40 papan nama - 300 patok tanah	390.000.000	429.000.000
37	Pengelolaan Barang Milik Daerah - 5.02.03.2.01	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen penilaian BMD	- 2 dokumen	129.900.000	142.890.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
38	Pengelolaan Barang Milik Daerah - 5.02.03.2.01		Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen pemanfaatan. pemusnahan dan penghapusan	- 32 dokumen	102.000.000	112.200.000
39	Pengelolaan Barang Milik Daerah - 5.02.03.2.01	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD	- 2 dokumen	100.500.000	110.550.000
40	Pengelolaan Barang Milik Daerah -	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen berita acara rekonsiliasi	- 96 dokumen	200.000.000	220.000.000
41	Pengelolaan Barang Milik Daerah - 5.02.03.2.01	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan BMD semesteran dan laporan BMD tahunan	- 2 dokumen	94.000.000	103.400.000
42	Pengelolaan Barang Milik Daerah - 5.02.03.2.01	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	- 65 peserta	100.000.000	110.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
43	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7 dokumen	10.000.000	10.000.000
44	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah berita acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 berita acara	20.000.000	20.000.000
45	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 dokumen	10.000.000	10.000.000
46	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- 12 bulan	4.310.000.000	4.741.000.000
47	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 laporan	5.000.000	5.000.000
48	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000
49	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	- 12 bulan	337.700.000	340.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
50	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan jasa	- 12 bulan	85.000.000	85.000.000
51	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan jasa	- 12 bulan	40.000.000	40.000.000
52	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan jasa	- 12 bulan	165.000.000	165.000.000
53	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan jasa	- 12 bulan	60.000.000	60.000.000
54	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan ATK	- 12 bulan	105.000.000	105.000.000
55	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- 12 bulan	105.000.000	105.000.000
56	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	- 12 bulan	6.000.000	6.000.000
57	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 bulan	4.500.000	4.500.000
58	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	- 12 bulan	60.000.000	60.000.000
59	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah koordinasi/konsultasi yang diikuti	- 20 kali	125.000.000	200.000.000
60	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah peralatan gedung kantor	- 4 item	198.000.000	121.000.000
61	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Luas gedung kantor yang dipelihara	- 336 m2	30.000.000	30.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
62	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah kendaraan dinas/operasional	- 5 unit	150.000.000	150.000.000
63	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan pemeliharaan peralatan gedung kantor	- 12 bulan	35.000.000	35.000.000
64	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah pakaian dinas PNS - Jumlah pakaian dinas PKK	- 38 stel - 13 stel	32.000.000	32.000.000
65	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	- 68 stel	44.000.000	20.000.000
66	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	- 10 orang	100.000.000	100.000.000
67	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	- 10 orang	100.000.000	100.000.000
68	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	- 2 item	20.500.000	15.000.000
TOTAL							166.992.258.500	13.308.450.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021**

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							
1	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah -	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Dalam dan luar Kabupaten Bangka Tengah	- Tersedianya data subjek/ objek pajak dan data pembayaran/ penagihan yang akuntabel	- 3 Laporan	975.198.800	1.500.000.000
2	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah - 5.02.04.2.02	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Dalam dan Luar Kabupaten Bangka Tengah	- Tersedianya data subjek/ ojek pajak dan retribusi daerah yang valid	- 3 Laporan	615.200.000	750.000.000
3	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah - 5.02.04.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Dalam dan Luar Kabupaten Bangka Tengah	- Terlaksananya pengelolaan pajak berbasis sistem informasi	- 12 bulan	537.800.000	700.000.000
4	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah - 5.02.04.2.02	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Pertumbuhan Ekonomi	Dalam dan luar Kabupaten Bangka Tengah	- Tersedianya informasi tentang pajak dan retribusi daerah	- 600 peserta, 2 kali iklan layanan media cetak/ elektronik dan 140 unit spanduk	185.000.000	200.000.000
5	Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah - 5.02.04.2.02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Dokumen studi analisa intensifikasi pajak dan retribusi daerah	- 1 dokumen	10.000.000	0
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
6	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7	10.000.000	10.000.000
7	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah Berita Acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7	10.000.000	10.000.000
8	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 Dokumen	10.000.000	10.000.000

9	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- Jumlah pelayanan gaji dan tunjangan ASN	6.350.000.000	6.500.000.000
10	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 Laporan	5.000.000	5.000.000
11	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Bangka Tengah	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 Laporan	10.000.000	10.000.000
12	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	- 12 bulan	24.620.000	24.620.000
13	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 12 bulan	95.000.000	95.000.000
14	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- 12 bulan	37.040.000	37.040.000
15	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	- 12 bulan	75.000.000	75.000.000
16	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 bulan	90.260.000	90.260.000
17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Alat Tulis Kantor	- 12 bulan	63.700.000	63.700.000
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- 12 bulan	100.000.000	100.000.000

19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- 12 bulan	4.000.000	4.000.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- 12 bulan	4.000.000	4.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Makanan dan Minuman	- 12 bulan	20.000.000	20.000.000
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	- 30 kali rapat koordinasi	125.000.000	125.000.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	- 1 unit printer	185.000.000	0
24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah Mebeleur yang diadakan	- 20 unit	50.000.000	0
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- luas gedung kantor yang dipelihara	- 3 unit/ 369 M2	34.981.200	34.981.200
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	- 5 unit	151.500.000	151.500.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan	- 30 unit	20.000.000	20.000.000

28	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	- 57 stell	31.700.000	31.700.000
29	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	- 20 stell	10.000.000	10.000.000
30	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	- 10 orang	100.000.000	100.000.000
31	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah peserta yang mengikuti bimtek implementasi PerUU	- 6 orang	60.000.000	60.000.000
TOTAL							10.000.000.000	10.741.801.200

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN							
1	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu - 6.01.02.2.02	Audit Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah objek pemeriksaan yang di audit	- 40 obrik	537.600.000	650.000.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal - 6.01.02.2.01	Audit Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah objek pemeriksaan yang di audit	- 4 obrik	69.600.000	150.000.000
3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal - 6.01.02.2.01	Review Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah objek pemeriksaan yang di reviu kinerja dan keuangannya	- 87 obrik	525.500.000	650.000.000
4	Penyelenggaraan Pengawasan Internal - 6.01.02.2.01	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah objek pemeriksaan yang dipantau kinerja dan keuangannya	- 35 obrik	147.900.000	250.000.000
5	Penyelenggaraan Pengawasan Internal - 6.01.02.2.01	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah objek pemeriksaan yang di evaluasi kinerja dan keuangannya	- 59 obrik	374.250.000	450.000.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
6	Asistensi dan Pendampingan - 6.01.03.2.02	Asistensi dan Pendampingan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilakukan	- 20 kali	223.300.000	350.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
7	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah dokumen yang disusun	- 5 dokumen	10.000.000	25.000.000
8	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perenanaan yang dilakukan	- 7 kali	10.000.000	20.000.000
9	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	- 5 dokumen	10.000.000	25.000.000
10	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 laporan	5.000.000	5.000.000
11	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 laporan	7.500.000	10.000.000

12	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	- 20 orang/kali	160.000.000	250.000.000
13	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Persentase surat yang di input pada aplikasi surat menyurat	- 100%	55.000.000	60.000.000
14	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Persentase terbayarkannya tagihan jasa komunikasi dan listrik	- 100%	54.000.000	60.000.000
15	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Persentase terbayarkannya pajak Kendaraan Dinas/ Operasional	- 100%	40.000.000	50.000.000
16	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Persentase terbayarkannya jasa pengelolaan Administrasi keuangan	- 100%	85.000.000	90.000.000
17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Persentase terbayarkannya jasa kebersihan kantor	- 100%	35.000.000	40.000.000
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	- 12 bulan	30.000.000	50.000.000
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	- 12 bulan	30.000.000	50.000.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	- 12 bulan	3.000.000	5.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman	- 12 bulan	20.000.000	30.000.000
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	125.000.000	175.000.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah unit pengadaan peralatan gedung kantor	- 7 unit	31.350.000	75.000.000

24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara	- 1 unit	10.000.000	20.000.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	- 1 unit	10.000.000	50.000.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	- 4 unit	90.000.000	125.000.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara	- 40 unit	20.000.000	35.000.000
28	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Inspektorat Daerah	- Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	- 23 ASN	2.734.000.000	2.950.000.000

TOTAL

5.453.000.000

6.700.000.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KOB
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021**

RABOTAN EKSPANSI PERUMPAH TAHUN 2022								
No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 7.01.02.2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah keikutsertaan rapat koordinasi pada Pemerintah Daerah atau Instansi vertikal	- 200 OK	100.000.000	110.000.000
2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Koba	- jumlah kegiatan pameran pembangunan yang terselenggarakan	- 1 Kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten	15.000.000	15.000.000

3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Koba	- Jumlah kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	- 15 kegiatan yaitu 1. Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 2. Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 3. Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 4. Pembinaan Keluarga Berencana 5. Pembinaan Kecamatan Layak Anak 6. Penyelenggaraan kompetisi olahraga (KEJURDA/POPDA) 7. Liga Sepakbola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 8. Festival Olahraga Tradisional 9. Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari kegiatan masyarakat 10. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	1.065.000.000	1.065.200.000
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 7.01.02.2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah bulan pelayanan	- 12 bulan	75.000.000	65.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							

5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Koba	- Jumlah kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	- 1 kegiatan di Tingkat Kecamatan	60.000.000	60.000.000
6	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 7.01.03.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Koba	- Jumlah organisasi/kelembagaan yang diberdayakan di Kecamatan	- 5 organisasi /kelembagaan (RT/RW, Karangtaruna, LPM, PKK, Posyantek/TTG)	224.900.000	224.900.000
7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 7.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	5 Kelurahan di Kec. Koba	- Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	- 5 (lima) Kelurahan masing-masing 7 Kegiatan. 1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 2. Pemberian makanan Tambahan di Posyandu 3. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sungaiselan 4. Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparatur kelurahan dalam peningkatan kualitas kelurahan 5. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kelurahan 6. STQ Kelurahan 7. PHBN Kelurahan	3.750.000.000	3.750.000.000

8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Kewilayahan	5 Kelurahan di Kecamatan Koba	- jumlah pengadaan sarana dan prasarana Kelurahan yang terlaksana	- 5 kelurahan. 1. Pembangunan Perpustakaan. 2. Gedung Sekretaria. 3. Parkir Mobil Sampah. 4. Lampu Penerangan Jalan Umum. 5. Sumur Bor. 6. Plat Deker	400.000.000	400.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 7.01.05.2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Koba	- Jumlah pimpinan di Kecamatan Koba yang mengikuti rapat koordinasi	- 4 OK	30.000.000	30.000.000
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 7.01.05.2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah kegiatan Peningkatan wawasan kebangsaan nasional yang terlaksana di Kecamatan	- 1 kegiatan	220.000.000	220.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Koba	- jumlah bulan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	- 12 bulan	200.000.000	200.000.000

12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Koba	- Jumlah desa dalam pengamanan penyelenggaraan pilkades	- 1 desa	36.000.000	36.000.000
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah kepala desa yang menyelenggarakan pemilihan	- 1 Kepala Desa	95.000.000	95.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
14	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	- 12 bulan	400.000.000	400.000.000
15	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah bulan terbayarnya komunikasi dan listrik	- 12 bulan	90.700.000	90.700.000
16	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah bulan terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- 12 bulan	64.000.000	64.000.000
17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah bulan terbayarnya jasa administrasi keuangan	- 12 bulan	72.000.000	72.000.000
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah bulan terbayarnya jasa kebersihan kantor	- 12 bulan	110.000.000	110.000.000
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor	- 12 bulan	45.000.000	45.000.000

20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah bulan tersedianya barang cetak dan penggandaan	- 12 bulan	30.000.000	30.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- umlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik	- 12 bulan	6.000.000	6.000.000
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	- Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	2.400.000	2.400.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman	- 12 bulan	40.000.000	40.000.000
24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah bulan terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- 12 bulan	75.000.000	75.000.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedian	- 4 item : 1. Tiang Umbul Umbul. 2. PArtisi Ruangan. 3. Gordyn 4. Filling Kabinet	100.000.000	100.000.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	- 3 item : 1. Laptop 2. Motor 3. CCTV 4. Sound System	157.000.000	157.000.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah meubeler yang tersedia	- Kursi Kerja	30.000.000	30.000.000

28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah gedung kantor yang dipeliharaJumlah gedung kantor yang dipelihara	- 3 unit : Gedung Kecamatan, Taman dan Gedung Serba guba	100.000.000	100.000.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- umlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	- 9 unit	300.000.000	300.000.000
30	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah mesin absensi yang tersedia	- 1 unit Hasil	7.000.000	7.000.000
31	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang tersedia	- 45 Stel	40.000.000	40.000.000
32	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu yang tersedia	- 56 stel	25.000.000	25.000.000
33	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	- 11 OK	150.000.000	150.000.000
34	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	- 12 bulan	3.600.000.000	3.600.000.000
35	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah laporan keuangan semester yang terlaksana	- 1 laporan	5.000.000	5.000.000
36	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Kecamatan Koba	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terlaksana	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000

37	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan koba	- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	- 5 item (Komputer, Laptop, AC, Aplikasi, Printer)	55.000.000	55.000.000
38	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah Kendaraan yang di rehab	- 1 Unit	25.000.000	25.000.000
39	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7 dokumen (Renstra, Renja induk, dan perubahan, RKA/DPA induk dan perubahan)	10.000.000	10.000.000
40	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah berita acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 berita acara	20.000.000	20.000.000
41	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 dokumen	10.000.000	10.000.000
42	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Koba	- Jumlah Gedung yang di REhab	- 2 Gedung : 1. Kantor Kecamatan 2. GSG	150.000.000	150.000.000
TOTAL							12.000.000.000	12.000.200.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PANGKALAN BARU
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021**

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 7.01.02.2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	KECAMATAN PANGKALANBARU	- JUMLAH KEIKUTSERTAAN PADA RAPAT KOORDINASI	- 295 OK	100.000.000	120.000.000
2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH KEGIATAN PAMERAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN DALAM 1 TAHUN	- 1 KEGIATAN	30.000.000	50.000.000
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	- 13 kegiatan	1.130.000.000	1.200.000.000
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- Jumlah kegiatan	- 1 kegiatan	80.000.000	100.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	KECAMATAN PANGKALANBARU	- Jumlah kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	- 1 kegiatan	60.000.000	70.000.000
6	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 7.01.03.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	KECAMATAN PANGKALANBARU	- Terbinanya organisasi masyarakat	- 6 organisasi	160.000.000	180.000.000
7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU (KEL. DUL)	- Jumlah bulan	- 12 bulan	167.345.000	200.000.000
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 7.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU (KEL. DUL)	- Terlaksananya kegiatan kelurahan	- 4 kegiatan	662.655.000	700.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 7.01.05.2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	KECAMATAN PANGKALANBARU	- Jumlah pimpinan di kecamatan pangkalanbaru yang mengikuti rapat koordinasi	- 4 OK	25.000.000	40.000.000

10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 7.01.05.2.01	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Bangka Tengah, Pangkalan Baru, Semua Kelurahan	- Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	- 1 Kegiatan	100.000.000	100.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	KECAMATAN PANGKALANBARU	- Jumlah buku profil	- 25 buku	46.000.000	55.000.000
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	KECAMATAN PANGKALANBARU	- Jumlah bulan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	- 12 bulan	120.000.000	140.000.000
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	KECAMATAN PANGKALANBARU	- Jumlah pengendalian kebisingan dan gangguan dari masyarakat	- 400 OK	200.000.000	220.000.000
14	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	KECAMATAN PANGKALANBARU	- Jumlah kepala desa yang menyelenggarakan pemilihan	- 1 kades	95.000.000	110.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
15	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	- JUMLAH BULAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	527.400.000	550.000.000
16	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	- JUMLAH BULAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	70.000.000	80.000.000
17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINANNKENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	- 12 BULAN	340.000.000	350.000.000
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN PENYEDIAAN JASA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	- 12 BULAN	98.300.000	110.000.000
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	- 12 BULAN	137.300.000	147.300.000

20	Administrasi Umum -	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	- 12 BULAN	45.000.000	60.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	- 12 BULAN	29.750.000	31.000.000
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALSI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN	- 12 BULAN	4.000.000	10.000.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	- 12 BULAN	3.600.000	10.000.000
24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	- 12 BULAN	60.000.000	80.000.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	- 15 KALI	75.000.000	100.000.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	- JUMLAH KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	300.000.000	330.000.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN	- 12 BULAN	39.000.000	50.000.000
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN	- 12 BULAN	29.000.000	40.000.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN	- 12 BULAN	20.000.000	20.000.000
30	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN	- 12 BULAN	102.650.000	120.000.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BULAN	- 12 BULAN	45.000.000	60.000.000
32	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH PEGAWAI	- 42 STEL	23.800.000	43.800.000

33	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH PEGAWAI	- 11 STEL	11.500.000	20.000.000
34	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- JUMLAH BIMTEK	- 12 OK	90.000.000	110.000.000
35	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- TERSEDIAANYA JUMLAH DOKUMEN/LAPORAN YANG DIBUAT	- 2 LAPORAN	5.000.000	25.000.000
36	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- TERSEDIAANYA JUMLAH DOKUMEN/LAPORAN YANG DIBUAT	- 100%	10.000.000	30.000.000
37	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	- 14 bulan	3.056.068.000	3.070.000.000
38	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Korpri	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- jumlah pengadaan baju korpri	- 30 stel	15.000.000	25.000.000
39	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- Jumlah Meubelair	- 1 Paket	30.000.000	40.000.000
40	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	PANGKALANBARU	- Jumlah bulan	- 12 bulan	300.000.000	350.000.000
41	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	KECAMATAN PANGKALANBARU	- JUMLAH DOKUMEN YANG DISUSUN	- 7 DOKUMEN	10.000.000	30.000.000
42	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah -	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	KECAMATAN PANGKALANBARU	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7 dokumen	20.000.000	40.000.000
43	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Pangkalanbaru	- Jumlah dokumen yang disusun	- 5 dokumen	10.000.000	30.000.000
TOTAL							8.483.368.000	9.247.100.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SUNGAI SELAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021**

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 7.01.02.2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah keikutsertaan rapat koordinasi pada Pemerintah Daerah atau Instansi vertikal	- 350 OK	125.000.000	150.000.000
2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- jumlah kegiatan pameran pembangunan yang terselenggarakan	- 2 Kegiatan (Pameran Pembangunan di Tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten)	25.000.000	25.000.000
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Sungaiselan	<div>- Jumlah kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</div>	<div>- 12 kegiatan yaitu 1. Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 2. Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 3. Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 4. Pembinaan Keluarga Berencana 5. Pembinaan Kecamatan Layak Anak 6. Penyelenggaraan kompetisi olahraga (KEJURDA/POPDA) 7. Liga Sepakbola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 8.Festival Olahraga Tradisional 9. Festival Band Lagu Daerah/Penyelenggaraa n event seni 10. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat 11. Penyediaan jasa</div>	761.000.000	1.000.000.000

4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 7.01.02.2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah bulan pelayanan	- 12 bulan	65.000.000	65.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa -	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	- 1 kegiatan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	25.000.000
6	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 7.01.03.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah organisasi/kelembagaan yang diberdayakan di Kecamatan	- 5 organisasi /kelembagaan (RT/RW, Karangtaruna, LPM, PKK, Posyantek/TTG)	200.000.000	220.000.000
7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Kewilayahan	Kelurahan Sungaiselan Kec. Sungaiselan	- jumlah pengadaan sarana dan prasarana Kelurahan yang terlaksana	- 3 item yaitu TV, Kulkas dan AC	26.000.000	550.000.000
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 7.01.03.2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kelurahan Sungaiselan Kec. Sungaiselan	- Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	- 8 kegiatan yaitu : 1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat di kelurahan 2. Pemberian makanan Tambahan di Posyandu 3. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sungaiselan 4. Pemberdayaan peran serta masyarakat kelurahan dan aparaturn kelurahan dalam peningkatan kualitas kelurahan 5. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kelurahan 6. STQ Kelurahan 7. Hut Selan 8. PHBN Kelurahan	804.000.000	820.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							

9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah -	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah pimpinan di Kecamatan Sungaiselan yang mengikuti rapat koordinasi	- 4 OK (Camat, Kapolsek, Danramil, Danranal)	29.000.000	25.000.000
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 7.01.05.2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara R I Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah kegiatan Peningkatan wawasan kebangsaan nasional yang terlaksana di Kecamatan	- 1 kegiatan	125.000.000	130.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Sungaiselan	- jumlah bulan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	- 12 bulan	145.000.000	200.000.000
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah pengendalian kebisingan dan gangguan dari masyarakat	- 1000 OK	148.000.000	140.000.000
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah kepala desa yang menyelenggarakan pemilihan	- 2 Kepala Desa yaitu Kepala Desa Tanjung Pura dan Kepala Desa	190.000.000	190.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
14	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat	- 12 bulan (Jumlah PKK Jasa surat menyurat sebanyak 10 orang)	268.750.000	309.062.500
15	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah bulan terbayarnya komunikasi dan listrik	- 12 bulan	56.400.000	64.860.000
16	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah bulan terbayarnya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- 12 bulan (5 unit kendaraan dinas operasional yaitu Kendaraan dinas operasional Camat, Kendaraan operasional pengangkut sampah roda empat 2 unit, Kendaraan operasional Kantor dan satpolPP)	38.700.000	44.505.000

17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah bulan terbayarnya jasa administrasi keuangan	- 12 bulan (Jumlah pegawai PKK jasa administrasi keuangan sebanyak 2 orang)	136.980.000	157.527.000
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah bulan terbayarnya jasa kebersihan kantor	- 12 bulan (Jumlah pegawai PKK jasa kebersihan kantor 2 orang untuk di Kantor Camat dan Kantor Lurah)	82.000.000	85.000.000
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor	- 12 bulan	50.000.000	50.000.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah bulan tersedianya barang cetak dan penggandaan	- 12 bulan	20.000.000	20.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik	- 12 bulan	6.000.000	6.000.000
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan	- 12 bulan	2.400.000	2.400.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman	- 12 bulan	45.000.000	50.000.000
24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah bulan terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- 12 bulan	75.000.000	75.000.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah unit kendaraan dinas yang tersedia	- 2 unit (kendaraan dinas operasional camat 1 unit dan kendaraan roda dua 1 unit)	275.000.000	250.000.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	- 5 item yaitu : 1. Tiang bendera dan tiang umbul umbul 2. Alat permainan anak anak (perosotan) 3.Partisi ruang 4. Gordyn 5. Filling kabinet	133.700.000	60.000.000

- 6 item yaitu :
- 1. soundsystem
- 2. cctv 8 camera
- 3. Laptop
- 4. AC
- 5. Kipas angin
- 6. printer

27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	102.800.000	100.000.000
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah meubeler yang tersedia	56.500.000	50.000.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah rumah dinas yang dipelihara	62.875.000	50.000.000
30	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah gedung kantor yang dipelihara	109.240.000	80.000.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	179.420.000	250.000.000
32	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	32.000.000	35.000.000
33	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah mesin absensi yang tersedia	7.000.000	8.050.000
34	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang tersedia	31.600.000	36.000.000
35	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu yang tersedia	30.800.000	10.000.000
36	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah aparatur yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	100.000.000	100.000.000
37	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- jumlah pelayanan gaji dan tunjangan ASN	2.219.835.000	2.552.810.250
38	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah laporan keuangan semester yang terlaksana	5.000.000	5.000.000
39	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terlaksana	10.000.000	10.000.000

40	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7 dokumen (Renstra, Renja induk, dan perubahan, RKA/DPA induk dan perubahan)	10.000.000	10.000.000
41	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah berita acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 berita acara	20.000.000	20.000.000
42	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Sungaiselan	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 dokumen	10.000.000	10.000.000
TOTAL							6.840.000.000	8.041.214.750

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SIMPANG KATIS
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021**

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 7.01.02.2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah keikutsertaan Aparatur Kecamatan pada rapat dan koordinasi dengan Pemrintah Kabupaten/Pemerintah Desa	- 300 ok	100.000.000	100.000.000
2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- jumlah kegiatan pameran pembangunan di Kabupaten dalam 1 tahun	- 2 Kegiatan (Pameran Pembangunan di Tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten)	20.000.000	30.000.000
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	- 13 kegiatan yaitu 1. Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 2. Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 3. Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 4. Pembinaan Keluarga Berencana 5. Pembinaan Kecamatan Layak Anak 6. Penyelenggaraan kompetisi olahraga (KEJURDA/POPDA) 7. Liga Sepakbola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 8.Festival Olahraga Tradisional 9. Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 10. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat 11. Penyediaan jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan 12. Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 13. Pendampingan Gala Desa 14. Pelayanan Administrasi Terpadu	605.000.000	700.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							

4	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	- 1 kegiatan	40.000.000	45.000.000
5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 7.01.03.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah organisasi/kelembagaan yang diberdayakan di Kecamatan	- 6 organisasi /kelembagaan (RT, Karang Taruna, Irmas, LPM, PPI, Posyantek)	200.000.000	200.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 7.01.05.2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah pimpinan di Kecamatan Simpangkatis yang mengikuti rapat koordinasi	- 3 ok	25.000.000	25.000.000
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 7.01.05.2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI		Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah kegiatan Peningkatan wawasan kebangsaan nasional yang terlaksana di Kecamatan	- 1 kegiatan	90.000.000	100.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
8	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah buku profil	- 30 buku	65.000.000	25.000.000
9	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- jumlah bulan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	- 12 bulan	45.000.000	15.000.000
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah pengendalian kebisingan dan gangguan dari masyarakat	- 400 ok	75.000.000	100.000.000
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah Desa yang dibina	- 10 desa	20.000.000	65.000.000
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah kepala desa yang menyelenggarakan pemilihan	- 2 kades	95.000.000	195.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								

13	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN	- 14 bulan	1.349.464.500	1.500.000.000
14	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah laporan keuangan semesteran	- 1 laporan	5.000.000	5.000.000
15	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000
16	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- 12 bulan	246.837.000	250.000.000
17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- 12 bulan	31.200.000	35.000.000
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Kewilayahan	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- 12 bulan	59.600.000	65.000.000
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi keuangan	- 12 bulan	111.420.000	115.000.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah Bulan Penyedia Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan	- 12 BULAN	55.240.000	65.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- 12 bulan	45.000.000	50.000.000
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- 12 bulan	21.100.000	30.000.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	- 12 bulan	4.000.000	5.000.000

24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 BULAN	2.700.000	2.700.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman	- 12 bulan	31.720.000	40.000.000

26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	- 20 ok	100.000.000	125.000.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah perlengkapan gedung kantor	- 1 paket	30.000.000	70.000.000
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah peralatan gedung kantor	- 1 paket	55.000.000	85.000.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah Meubelair	- 1 paket	35.000.000	50.000.000
30	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Luas rumah dinas yang dipelihara	- 352 M2	29.216.000	37.500.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Luas Gedung Kantor yang dibeli	- 685 m2	64.938.000	90.000.000
32	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	- 3 unit	139.280.000	150.000.000
33	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	- 35 item	35.000.000	37.500.000
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah rehab gedung kantor	- 1 unit	400.000.000	450.000.000
35	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	- 33 stel	18.250.000	30.500.000
36	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah Pakaian Hari tertentu	- 33 stel	25.000.000	30.000.000
37	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Korpri	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah pengadaan baju Korpri	- 15 stel	8.000.000	10.000.000
38	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	- 10 ok	100.000.000	125.000.000
39	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7	10.000.000	15.000.000
40	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah Berita Acara kesepakatan hasil koordinasi	- 3 Berita Acara	20.000.000	20.000.000

41	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Simpangkatis	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 dokumen	10.000.000	10.000.000
JUMLAH							4.432.965.500	5.108.200.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SIMPANG KATIS
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021**

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 7.01.02.2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah keikutsertaan Aparatur Kecamatan pada rapat dan koordinasi dengan Pemrintah Kabupaten/Pemerintah Desa	- 512 OK	100.000.000	100.000.000
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 7.01.02.2.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah bulan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	- 12 Bulan	50.000.000	75.000.000
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	- 12 kegiatan yaitu 1. Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) 2. Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 3. Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan 4. Pembinaan Kecamatan Layak Anak 5. Penyelenggaraan kompetisi olahraga (KEJURDA/POPDA) 6. Liga Sepakbola Pelajar (LSP) U12, U14, U16 7.Festival Olahraga Tradisional 8. Pagelaran Kreasi Seni Budaya Masyarakat 9. Penyelenggaraan Kecamatan Sehat 10. Penyediaan jasa Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan 11. Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu 12. Pendampingan Gala Desa	530.019.750	1.050.000.000

4	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- jumlah kegiatan pameran pembangunan yang terselenggara	- 1 Kegiatan (Pameran Pembangunan di Tingkat Kabupaten)	7.500.000	35.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 7.01.03.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah Desa dan Jumlah Lembaga yang dibina	- 8 Desa dan 4 Lembaga (Kegiatan PKK dan Pemberdayaan Lembaga/Organisasi yaitu PKK, Karang Taruna, Posyantek, LPM, RT)	139.295.000	250.000.000
6	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pertumbuhan Ekonomi	Kecamatan Namang	- Jumlah kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	- 1 Kegiatan	30.000.000	35.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 7.01.05.2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara R I Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah kegiatan Peningkatan wawasan kebangsaan nasional yang terlaksana di Kecamatan	- 1 Kegiatan	75.000.000	100.000.000
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 7.01.05.2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah Rapat Forum koordinasi Pimpinan Kecamatan yang diikuti	- 4 OK	24.990.000	30.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
9	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah pengendalian kebisingan dan gangguan dari masyarakat	- 433 OK	58.000.000	125.000.000
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Namang	- Jumlah buku Profil Kecamatan yang terupdate	- 10 Buku	19.280.050	80.000.000

11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- jumlah bulan fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	- 12 Bulan	45.000.000	60.000.000
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Namang	- Jumlah Desa Yang Melaksanakan pemilihan dan Pelantikan Kades	- 1 Kades	95.000.000	109.250.000
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah Desa yang dibina	- 8 Desa	25.000.000	50.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
14	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah laporan keuangan semesteran	- 1 Laporan	5.000.000	5.750.000
15	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun	- 1 Laporan	10.000.000	11.500.000
16	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- 12 Bulan	275.400.000	275.400.000
17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- 12 Bulan	61.500.000	67.500.000
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- 12 Bulan	60.358.000	65.000.000
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi keuangan	- 12 Bulan	113.458.000	130.476.700

20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah Bulan Penyedia Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan	- 12 Bulan	101.700.000	116.955.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah bulan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- 12 Bulan	27.725.000	31.883.750
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	- 12 Bulan	45.000.000	51.750.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	- 12 Bulan	3.500.000	4.025.000
24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 Bulan	1.980.000	2.277.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman rapat dan tamu	- 12 Bulan	36.090.000	41.503.500
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	- 12 OK	75.000.000	100.000.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah perlengkapan gedung kantor	- 3 item (Papan Nama, Papan Data, Tabung Apar)	12.800.000	14.720.000

28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah peralatan gedung kantor	- Laptop 3 Unit PC, Mesin Pemotong Rumput 1 unit	42.500.000	48.875.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah Meubelair	- Meja 1/2 Biro 4 Buah	10.000.000	11.500.000
30	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Luas rumah dinas yang dipelihara	- 180 M2	14.940.000	17.181.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Luas Gedung Kantor yang dibeli	- 720 M2	49.790.000	57.258.500
32	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	- 38 Unit	21.573.000	24.808.950
33	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	- 5 Unit	147.444.000	169.560.600
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah rehab gedung kantor	- 1 Unit	200.000.000	230.000.000
35	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	- 36 stel	23.800.000	25.000.000
36	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu pegawai, batik nasional/cual dan korpri	- 50 stel	25.000.000	25.000.000
37	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Namang	- Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	- 10 OK	100.000.000	100.000.000
38	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Namang	- Jumlah bulan Gaji dan Tunjangan ASN	- 12 Bulan	1.885.655.500	2.000.000.000
39	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		Kecamatan Namang	- Jumlah Dokumen Yang disusun	- 7	10.000.000	10.000.000
40	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		Kecamatan Namang	- Jumlah Berita Acara Kesepakatan Hasil Koordinasi	- 5	20.000.000	20.000.000

41	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kecamatan Namang	- Jumlah Dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5	10.000.000	10.000.000
JUMLAH							4.589.298.300	5.767.175.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN LUBUK BESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 7.01.02.2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah keikutsertaan rapat koordinasi pada Pemerintah Daerah atau Instansi vertikal	- 340 OK	100.000.000	120.000.000
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	- 14 Kegiatan	878.816.560	1.000.000.000
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - 7.01.02.2.04	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah bulan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	- 12 Bulan	65.000.000	65.000.000
4	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- jumlah kegiatan pameran pembangunan yang terselenggara	- 2 Kegiatan (Pameran Pembangunan di Tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten)	25.000.000	30.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
5	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 7.01.03.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Organisasi Masyarakat Pedesaan	- 3 Organisasi dan 2 kelompok	242.950.000	300.000.000
6	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Usulan Pembangunan yang terakomodir di Kecamatan	- 100 Usulan	20.000.000	25.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							

7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 7.01.05.2.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara R I Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- jumlah masyarakat yang ikut dalam kegiatan PHBN	- 1000 Orang	106.450.000	120.000.000
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - 7.01.05.2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah pimpinan di Kecamatan Lubuk Besar yang mengikuti rapat koordinasi	- 4 OK	32.250.000	40.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
9	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Pengendalian Kebisingan Masyarakat dan pelaksanaan operasi penertiban di Desa	- 9 Desa	150.000.000	150.000.000
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Buku Profil Kecamatan yang Terupdate	- 25 Buku	27.300.000	50.000.000
11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Bulan kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBDes	- 12 Bulan	60.000.000	60.000.000
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Desa Yang Melaksanakan pemilihan dan Pelantikan Kades	- 1 Desa	95.000.000	-
13	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 7.01.06.2.01	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Desa yang di bina	- 9 Desa	31.450.000	40.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							

14	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Keikutsertaan Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	- 20 OK	90.000.000	100.000.000
15	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	- 60 Stel	28.000.000	35.000.000
16	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	- 35 stel	20.950.000	22.000.000
17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Rumah Dinas Kecamatan yang Di Pelihara	- 1 Unit	20.000.000	20.000.000
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	- 1 Unit	40.000.000	75.000.000
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	- 5 Unit	126.320.000	150.000.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	- 1 Paket	20.550.000	30.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan	- 1 Paket	32.140.000	35.000.000
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kecamatan	- 1 Paket	49.500.000	50.000.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah pengadaan meubelair	- 1 Paket	53.750.000	55.000.000

24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Bulan Pelayanan Surat Menyurat	- 12 bulan	296.900.000	300.000.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Bulan Terbayarnya Rekening Listrik, Telepon/internet Kantor	- 12 Bulan	102.000.000	140.000.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- 12 Bulan	92.405.000	100.000.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Bulan dan Ketersediaan Jasa Administrasi Keuangan	- 12 Bulan	52.570.000	60.000.000
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 Bulan	59.300.000	65.000.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- 12 Bulan	45.000.000	45.000.000
30	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- 12 Bulan	38.600.000	40.000.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	- 1 Tahun	5.000.000	5.000.000
32	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Tahun Terbayarkannya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	- 1 Tahun	4.000.000	4.000.000

33	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman	- 12 Bulan	46.350.000	50.000.000
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Keikutsertaan dalam Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	- 20 Kali	100.000.000	150.000.000
35	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang terlaksana	- 1 Laporan	10.000.000	10.000.000
36	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah laporan keuangan semester yang terlaksana	- 2 Laporan	5.000.000	5.000.000
37	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Pengadaan Mesin Absensi	- 1 Unit	5.000.000	10.000.000
38	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	- 12 Bulan	1.297.448.440	1.600.000.000
39	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7 dokumen (Renstra, Renja induk, dan perubahan, RKA/DPA induk dan perubahan)	10.000.000	10.000.000
40	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah berita acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 Berita Acara	20.000.000	20.000.000
41	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kecamatan Lubuk Besar	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 Dokumen (LPPD,LKPJ,LAKIP,DAL EV,MONEV)	10.000.000	10.000.000
TOTAL							4.515.000.000	5.196.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
1	Pengelolaan Data dan Informasi ASN - 5.03.02.2.01	Pengelolaan Data Kepegawaian	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah PNS yang terfasilitasi dalam pembuatan kartu pegawai, kartu istri, karsu, taspen, dan satyalancana - Jumlah Pegawai yang masuk pendataan dalam SAPK	- 350 Pegawai - 2745 orang	40.000.000	130.000.000
2	Pengelolaan Data dan Informasi ASN - 5.03.02.2.01	Pengelolaan Data, Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah pegawai yang mengalami pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional tertentu	- 200 SK	50.000.000	75.000.000
3	Administrasi Kepegawaian - 5.03.02.2.02	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, dan Kepangkatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah pelantikan yang dilaksanakan	- 8 kali	20.000.000	200.000.000
4	Administrasi Kepegawaian - 5.03.02.2.02	Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah pelamar yang mengikuti seleksi terbuka	- 20 orang	328.150.000	600.000.000
5	Administrasi Kepegawaian - 5.03.02.2.02	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- jumlah pelamar yang lulus mengikuti penerimaan CASN	- 200 orang	328.150.000	600.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Tolok Ukur	Target		
6	Administrasi Kepegawaian - 5.03.02.2.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah pegawai yang mengalami kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat	- 1000 pegawai	100.000.000	130.000.000
7	Administrasi Kepegawaian - 5.03.02.2.02	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah pegawai yang diusulkan pensiun	- 70 pegawai	75.000.000	70.000.000
8	Peningkatan Kapastitas ASN - 5.03.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- jumlah pegawai yang memperoleh bantuan tugas belajar dan ikatan dinas - jumlah pegawai yang mengikuti seleksi tugas belajar	- 19 Orang - 15 orang	1.735.500.000	2.500.000.000
9	Peningkatan Kapastitas ASN - 5.03.02.2.03	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)		BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- jumlah peserta yang berpartisipasi - Jumlah Pegawai Korpri dalam event Provinsi dan nasional	- 2000 peserta - 50 pegawai	150.000.000	250.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Tolok Ukur	Target		
10	Peningkatan Kapastitas ASN - 5.03.02.2.03	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah pegawai yang mengikuti penilaian ASN berprestasi - jumlah sistem aplikasi e-kinerja yang dikembangkan	- 6 orang - 1 aplikasi	150.000.000	400.000.000
11	Pengembangan Karir ASN - 5.03.02.2.04	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah pegawai yang mengalami penyesuaian masa kerja dan pemakaian gelar	- 20 Pegawai	10.000.000	100.000.000
12	Pengelolaan Data dan Informasi ASN - 5.03.02.2.01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- jumlah sistem aplikasi SIK yang dikembangkan	- 1 aplikasi	25.000.000	85.000.000
13	Pembinaan ASN - 5.03.02.2.05	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah penyelesaian hukuman disiplin PNS - Jumlah pembinaan yang dilakukan - Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan bantuan	- 9 orang - 12 kali - 70 pegawai	150.000.000	550.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
14	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - 5.04.02.2.02	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat Pim II, III dan IV - Jumlah PNS JFT yang mengikuti Diklat Fungsional - Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Gol. III - Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan Gol. I dan II	- 4 org - 5 org - 156 org - 29 org	1.885.000.000	4.500.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
15	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pelayanan Surat Menyurat	- 12 Bulan	200.000.000	250.000.000
16	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- 12 Bulan	250.000.000	300.000.000
17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- 12 Bulan	36.000.000	35.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Tolok Ukur	Target		
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Bulan pelayanan jasa administrasi keuangan	- 12 Bulan	82.500.000	85.000.000
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	- 12 Bulan	275.000.000	350.000.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	- 12 Bulan	60.000.000	60.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	- 12 Bulan	52.000.000	52.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Tolok Ukur	Target		
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- 12 Bulan	14.000.000	15.000.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 Bulan	4.000.000	4.000.000
24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	- 12 Bulan	20.000.000	20.000.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- 14 orang/kali	125.000.000	125.000.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	- 2 Unit Kendaraan roda 4	90.000.000	100.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Tolok Ukur	Target		
27	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- 12 Bulan	14.514.700.000	11.000.000.000
28	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pembangunan Kewilayahan	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 Laporan	5.000.000	5.500.000
29	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 Laporan	10.000.000	10.000.000
30	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Berita acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 Dokumen	10.000.000	10.000.000
31	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah berita acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 Berita acara	20.000.000	20.000.000
32	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- 12 Bulan	10.000.000	10.000.000
33	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	- 50 Stel	25.000.000	30.000.000
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	- 115 Unit	50.000.000	70.000.000
35	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	BKPSDMD Kab. Bangka Tengah	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	- 14 orang/kali	100.000.000	100.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Tolok Ukur	Target		
					TOTAL			

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PERLAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA							
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) - 2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Jumlah Rencana Tenaga Kerja yang disusun	- 2 dokumen (Makro dan Mikro)	125.000.000	130.000.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
2	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - 2.07.03.2.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pertumbuhan Ekonomi	BLK Provinsi	- Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan	- 85 peserta	450.000.000	750.000.000
3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta - 2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Jumlah LPK yang terakreditasi	- 5 lembaga	15.000.000	20.000.000
4	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil - 2.07.03.2.04	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Jumlah UKM yang dibina (utk menumbuhkan UKM kembali)	- 15 perusahaan/usaha kecil menengah	20.000.000	20.000.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PERLAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

5	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota - 2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Jumlah Perusahaan yang merekrut tenaga kerja	- 70 perusahaan	15.000.000	20.000.000
6	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - 2.07.04.2.03	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Jumlah AK 1 yang dikeluarkan	- 200 lembar	50.000.000	60.000.000
7	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - 2.07.04.2.03	Job Fair/Bursa Kerja	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Jumlah Perusahaan yang diundang mengikuti job fair	- 25 perusahaan	50.000.000	75.000.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
8	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 2.07.05.2.01		Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Jumlah Perusahaan yang menetapkan Peraturan Perusahaan	- 12 pp perusahaan	40.000.000	45.000.000
9	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 2.07.05.2.01	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- jumlah perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	- 3 PKB	20.000.000	25.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PERLAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

10	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 2.07.05.2.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan status kerawanan norma kerja diperusahaan	- 24 perusahaan besar	25.000.000	30.000.000
11	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - 2.07.05.2.02	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- jumlah pencegahan perselisihan hubungan industrial	- 30 orang	30.000.000	40.000.000
12	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - 2.07.05.2.02	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- jumlah anggota organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi SP/SB serta non afiliasi yang di verifikasi	- 80 org	20.000.000	25.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PERLAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

13	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - 2.07.05.2.02	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- jumlah peserta konsultasi publik dan rapat kerja LKS Tripartit serta jumlah laporan	- 100 peserta, 3 kali rapat dan 1 laporan	75.000.000	100.000.000
14	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - 2.07.05.2.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	- 8 kasus	40.000.000	50.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							
15	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 2.18.02.2.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Jumlah kebijakan kemudahan investasi yang disusun	- 1 kebijakan	30.000.000	50.000.000
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PERLAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

16	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - 2.18.03.2.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Strategi promosi penanaman modal yang tersusun	- 1 buku	60.000.000	75.000.000
17	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - 2.18.03.2.01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Jumlah Pameran Investasi yang diikuti	- 4 kali	250.000.000	400.000.000
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
18	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - 2.18.04.2.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Jumlah Izin yang dikeluarkan	- 1000 izin/tahun dan 1 laporan	460.000.000	500.000.000
19	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - 2.18.04.2.01	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	- 24 kali	40.000.000	50.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PERLAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

20	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 2.18.05.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Jumlah laporan hasil pemantauan	- 1 laporan	70.000.000	70.000.000
21	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 2.18.05.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- jumlah laporan pembinaan	- 1 laporan	80.000.000	80.000.000
22	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 2.18.05.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- jumlah laporan hasil pengawasan	- 1 laporan	50.000.000	75.000.000

PROGRAM
PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PERLAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

23	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 2.18.06.2.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pertumbuhan Ekonomi	Bangka Tengah	- Jumlah sistem pelayanan penanaman modal yang ditingkatkan	- 3 sistem	80.000.000	120.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
24	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 laporan	5.000.000	5.000.000
25	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- 1 Laporan	10.000.000	10.000.000
26	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7 dokumen	10.000.000	10.000.000
27	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah Berita Acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 Berita Acara	20.000.000	20.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PERLAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

28	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 dokumen	10.000.000	10.000.000
29	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	- 40 stell	23.420.000	30.000.000
30	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	- 20 stell	10.000.000	10.000.000
31	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	- 12 orang	100.000.000	100.000.000
32	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perUU	- 250 orang	50.000.000	60.000.000
33	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah peserta yang mengikuti bimtek implementasi PerUU	- 8 pegawai	60.000.000	70.000.000
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	- 12 bulan	99.800.000	100.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

35	Administrasi Umum -	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 12 bulan	88.800.000	90.000.000
36	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- 12 bulan	39.200.000	40.000.000
37	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	- 12 bulan	99.730.000	100.000.000
38	Administrasi Keuangan -	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- 12 bulan	2.822.934.000	3.000.000.000
39	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 bulan	54.800.000	60.000.000
40	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Alat Tulis Kantor	- 12 bulan	45.650.000	55.000.000
41	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- 12 bulan	42.400.000	50.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

42	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- 12 bulan	3.000.000	3.000.000
43	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- 12 bulan	3.600.000	3.600.000
44	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Makanan dan Minuman	- 12 bulan	34.850.000	35.000.000
45	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	- 62 kali	125.000.000	125.000.000
46	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mobil Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	- 1 unit	265.000.000	300.000.000
47	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	- 2 item	30.000.000	70.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

48	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- luas rumah jabatan yang dipelihara	- 1 unit	6.045.000	7.000.000
49	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- luas rumah dinas yang dipelihara	- 1 unit	2.730.000	4.000.000
50	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- luas gedung kantor yang dipelihara	- 935 m2	75.500.000	107.868.000
51	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- Jumlah peralatan gedung Kantor yang dipelihara	- 15 item	72.861.000	75.000.000
52	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi	- 1 unit	70.000.000	75.000.000
53	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah mobil jabatan yang dipelihara	- 1 unit	53.300.000	65.000.000
54	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Bangka Tengah	- jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	- 4 unit	71.380.000	75.000.000
TOTAL							6.500.000.000	7.575.468.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PANGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - 2.09.03.2.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Tersedianya data Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	- 1 Dokumen	60.000.000	70.000.000
2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - 2.09.03.2.01	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Terpantaunya stok, pasokan dan harga pangan hingga tingkat kecamatan secara berkala - Jumlah komoditi pangan yang terpantau harganya	- 6 kecamatan - 14 komoditi	60.000.000	80.000.000
3	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - 2.09.03.2.02	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah cadangan pangan kabupaten yang disediakan	- 5 ton	115.000.000	120.000.000
4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - 2.09.03.2.04	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Tersedianya data Pola Pangan Harapan di tingkat Konsumsi	- 1 Dokumen PPH	60.000.000	70.000.000
5	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - 2.09.03.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Kelompok P2KP yang dibina - Jumlah KWT penerima bantuan Pekarangan Pangan Lestari - Jumlah peserta pelatihan pangan lokal	- 60 kelompok - 10 KWT - 120 orang	500.000.000	750.000.000
6	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - 2.09.03.2.02	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah cadangan pangan kabupaten yang dipelihara	- 20 ton	50.000.000	70.000.000

	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
7	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - 2.09.04.2.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Tersedianya data analisis ketahanan dan kerentanan pangan Tk Kecamatan	- 2 Dokumen (FSVA dan SKPG)	65.000.000	75.000.000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
8	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - 2.09.05.2.01	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah komoditi pangan segar asal tumbuhan yang memiliki sertifikat prima 3 - Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan	- 3 komoditi - 50 orang peserta	30.000.000	40.000.000
9	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - 2.09.05.2.01	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah kebun yang diregistrasi	- 3 kebun	55.000.000	60.000.000
10	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - 2.09.05.2.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah sarana dan prasarana pendukung keamanan pangan	- 3 jenis	70.000.000	80.000.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
11	Pembangunan Prasarana Pertanian - 3.27.03.2.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah balai penyuluhan pertanian (BPP) kecamatan yang tersedia prasarana dan sarana pendukung penyuluhan	- 6 BPP	870.000.000	1.660.000.000
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN							

12	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - 3.27.07.2.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah kelembagaan penyuluh di yang meningkat kapasitasnya - Jumlah penyuluh yang mengikuti magang - Jumlah peserta yang mengikuti jambore penyuluh - Jumlah penyuluh dan admin yang mengikuti pelatihan penyuluh - Jumlah program penyuluhan yang disusun - Jumlah Penyuluh dan Admin yang mendapatkan pembiayaan operasional	- 6 BPP - 7 orang - 75 orang - 75 orang - 6 program kecamatan, 1 program Kabupaten 65 Program Desa/Kelurahan - 75 orang	2.300.000.000	2.700.000.000
13	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - 3.27.07.2.01	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani - Jumlah Petani yang mengikuti magang - Jumlah petani peserta temu lapang - Jumlah peserta PENAS Nasional - Jumlah peserta kursus tani	- 100% - 7 orang - 200 orang - 22 orang - 180 orang di 18 Desa	775.000.000	800.000.000
14	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - 3.27.07.2.01		Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian - Luas lahan kaji terap teknologi di BPP	- 6 paket - 6 Ha	500.000.000	550.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							

15	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan surat-menysurat	- 12 bulan	120.000.000	160.000.000
16	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan ,listrik	- Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan ,listrik	88.800.000	89.000.000
17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- 12 bulan	50.000.000	56.000.000
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan pelayanan jasa administrasi keuangan	- 12 bulan	97.000.000	100.000.000
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	- 12 bulan	200.000.000	210.000.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	- 12 bulan	60.000.000	60.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	- 12 bulan	15.000.000	15.000.000
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	10.000.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 bulan	3.600.000	3.600.000

24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan makan dan minum kantor	- 12 bulan	50.000.000	55.000.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	- 32 kali	125.000.000	130.000.000
26	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah berita acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 Berita Acara (BA musrenbang desa, kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional, Rakortek dan Trilateral Meeting)	20.000.000	20.000.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor	- 12 bulan	50.000.000	50.000.000
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	- 3 unit	120.000.000	120.000.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	- 18 item	60.000.000	60.000.000
30	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	- 100 stel	50.000.000	55.000.000
31	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	- 20 stel	10.000.000	20.000.000
32	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	- 6 orang	100.000.000	120.000.000
33	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 laporan	5.000.000	10.000.000

34	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	- 1 laporan	10.000.000	15.000.000
35	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen yang disusun	- 7 Dokumen	10.000.000	10.000.000
36	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	- 12 bulan	3.500.000.000	3.550.000.000
37	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5 dokumen	10.000.000	10.000.000
38	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	- 1 unit	200.000.000	200.000.000
TOTAL							10.474.400.000	12.253.600.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.16.02.2.01	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- 1.Tersedianya buletin pemerintah kabupaten bangka tengah ;2. Tersediannya alat pemancar dan kelengkapannya serta terpeliharanya peralatan teknik stasiun pemancar dan jasa penyiar radio ; 3.Terselenggaranya informasi kegiatan pimpinan pemda melalui media cetak dan online	- 1000 Eksemplar, dan 1 paket alat pemancar dan 5 orang penyiar radio, pemeliharaann1 unit radio ; 12 bulan	2.434.500.000	2.434.500.000
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.16.02.2.01	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Pemkab Bateng	- terselenggaranya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan rekomendasi menara telekomunikasi di kab bangka tengah	- 9 provider, 110 menara	102.092.000	130.000.000
3	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.16.02.2.01	Pelayanan Informasi Publik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	kabupaten bangka tengah	- Tersedianya layanan operasional internet dalam meningkatkan pengetahuan TIK	- 25 Kali	35.000.000	40.000.000
4	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.16.02.2.01	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Diskominfo	- Terselenggaranya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui pameran pembangunan	- 1 Kegiatan	711.150.000	800.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
5	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.16.02.2.01	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Seluruh OPD	- Tercapainya aspirasi dan permasalahan yang terjadi di masyarakat	- 12 Bulan	100.900.000	100.900.000
6	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.16.02.2.01	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Terselenggaranya hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak pers dan lembaga lainnya	- 12 bulan	179.500.000	179.500.000
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA							
7	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.16.03.2.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	kab bateng	- Jumlah Domain dan sub domain baru, 2. Perbup 3. SOP pendaftaran doman dan sub	- 1 domain 35 sub domain	43.700.000	45.000.000
8	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.16.03.2.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	kab Bateng	- laporan hasil pelaksanaan rencana induk dan SPBE	- 2 laporan	37.250.000	40.000.000
9	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.16.03.2.02	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Tersusunnya laporan pengelolaan pusat data	- 2 laporan 1 perbup dan 1 sop	87.900.000	90.000.000
10	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.16.03.2.02	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	kab Bateng	- Jumlah aplikasi yang dibuat dan dimanfaatkan, SOP pengajuan, Buku standar pengajuan, laporan pemanfaatan sistem	- 5 aplikasi terintegrasi	128.920.000	128.920.000
11	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab. Bateng	- Tersedianya infrastruktur TIK yang mendukung penyelenggaraan e-government di kab bangka tengah	- 6 titik jaringan internet	370.000.000	500.000.000
12	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab. Bateng	- Jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang TIK	- 5 ASN tersertifikasi; 50 peserta prakom	47.050.000	47.050.000
13	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.16.03.2.02	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi Dewan TIK	- 6 pertemuan	36.950.000	3.695.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
14	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.16.03.2.01	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- 1.jumlah jaringan LAN yg terpelihara; 2.jumlah sewa bandwidth; 3. jumlah titik hotspot 4. jumlah rupiah sewa cpanel dan ssl 5. Peraturan yang tersusun	- 1 jaringan LAN, 300 mbps, 6 titik hotspot, 2 cpanel dan ssl, 1 perbup dan sop	1.323.926.000	1.375.000.000
15	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.16.03.2.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kab Bateng	- Jumlah Laporan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan e-government kab bangka tengah	- 1 perbup 2 SOP 2 laporan	32.000.000	35.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
16	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - 2.20.02.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Pertumbuhan Ekonomi	kab bateng	- Jumlah data yang dikelola dan desiminasi data	- 7859 Data dan 8 Dokumen	302.500.000	350.000.000
17	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - 2.20.02.2.01	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Pertumbuhan Ekonomi	kab bateng	- Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	- 20 Metadata	48.750.000	48.750.000
18	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - 2.20.02.2.01	Pengembangan Infrastruktur	Pertumbuhan Ekonomi	kab bateng	- Jumlah Infrastruktur yang di bangun	- Jumlah Infrastruktur yang di bangun	72.400.000	75.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
19	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.21.02.2.01	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Diskominfo	- Jumlah personil yang memiliki sertifikat ahli sandi; teknis keamanan informasi; dan tunjangan pengelola urusan persandian	- 5 ASN	87.920.000	90.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
20	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 2.21.02.2.01	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Pemkab Bangka Tengah	- Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CISRT) ; Pemanfaatan TTE di berbagai aplikasi daerah; jumlah sistem informasi yang sudah teridentifikasi kerentanan dan resiko keamanan; jumlah tempat yang sudah dilakukan sterilisasi terhadap peralatan penginderaan ; jumlah aset yang sudah dilakukan perlindungan informasi melalui peralatan penginderaan	- 1 tim CISRT; 3 aplikasi; 3 sistem informasi; 5 tempat steril; 8 aset (pimpinan daerah dan ketua dewan)	70.360.000	75.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
21	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfosta	- Jumlah laporan keuangan semesteran	- 1laporan	5.000.000	5.000.000
22	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfosta	- Jumlah laporan keuangan tersusun	- 1 laporan	10.000.000	10.000.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfosta	- Jumlah bulan surat terlayani	- 12 bulan	196.584.000	196.584.000
24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Diskominfosta	- Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik	- 12 bulan	137.000.000	137.000.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Diskominfosta	- Jumlah bulan penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	- 12 bulan	38.124.000	38.124.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Diskominfosta	- Jumlah bulan pelayanan jasa administasi keuangan	- 12 bulan	99.500.000	99.500.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Diskominfo	- Jumlah bulan terpeliharanya kebersihan kantor	- 12 bulan	55.940.000	55.940.000
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Diskominfo	- Jumlah bulan penyediaan ATK	- 12 bulan	44.000.000	44.000.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Diskominfo	- Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan	- 12 bulan	20.520.000	25.000.000
30	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Diskominfo	- Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan alat listrik	- 12 bulan	4.000.000	4.000.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Diskominfo	- Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 bulan	6.000.000	6.000.000
32	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	- 12 bulan	30.000.000	30.000.000
33	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Jumlah rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah	- 35 kali	125.000.000	150.000.000
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Jumlah rumah dinas yang terpelihara	- 1 unit	7.500.000	7.500.000
35	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			- Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	- 1 unit	131.500.000	140.000.000
36	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	- 4 unit	112.494.000	130.000.000
37	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	- 50 unit	72.570.000	75.000.000
38	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Jumlah pakaian dinas yg terlaksana	- 47 stel	50.000.000	50.000.000
39	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Jumlah pakaian yang terlaksana	- 20 stel	11.500.000	12.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
40	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	- 10 orang	100.000.000	150.000.000
41	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pertumbuhan Ekonomi	diskominfo	- Jumlah pegawai terpenuhi gaji dan tunjangan	- 27 orang	2.830.000.000	2.830.000.000
42	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mobil Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DISKOMINFO	- Jumlah mobil yang diadakan	- 1 unit	265.000.000	275.000.000
43	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Jumlah peralatan yang diadakan	- 8 item	155.000.000	155.000.000
44	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	- 7 dokumen	10.000.000	10.000.000
45	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	diskominfo	- Jumlah berita acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7	20.000.000	20.000.000
46	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DISKOMINFO	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- 5	10.000.000	10.000.000
	JUMLAH						10.800.000.000	11.253.963.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota -	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah layanan Perpustakaan keliling - Jumlah sekolah Yang Berkunjung Ke Perpustakaan Daerah - jumlah peserta lomba perpustakaan	- 300 kali kunjungan layanan - 24 sekolah - 56 Perpustakaan Desa, 7 Perpustakaan Kelurahan dan 131 Perpustakaan Sekolah	248.442.000	300.000.000
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 2.23.02.2.02	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Undangan Peserta lomba Bercerita - Jumlah Undangan Peserta lomba Bangka Tengah Berliterasi	- 102 Undangan - 1000 Undangan	348.013.000	355.000.000
3	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 2.23.02.2.01	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota		Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Perpustakaan	- 56 Perpustakaan Desa dan 7 Perpustakaan Kelurahan	253.158.000	260.000.000
4	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota -	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Buku Yang diolah	- 2000 buku	158.680.000	160.000.000
5	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota -	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Peserta Sosialisasi	- 194 Peserta (102 Peserta SD, 29 Peserta SMP dan 63 peserta desa/kelurahan)	47.400.000	55.000.000

6	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 2.23.02.2.01	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	bangka tengah	- Jumlah peserta	- 60 peserta (39 peserta SD dan 21 peserta SMP)	47.400.000	55.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							
7	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - 2.24.02.2.03	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Peserta Kegiatan	- 100 Peserta	28.550.000	31.500.000
8	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - 2.24.02.2.01		Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Desa yang dibina - Jumlah Peserta Lomba Kearsipan - Jumlah Sekolah yang dibina - Jumlah Arsiparis yang dinilai - Jumlah OPD yang di tata - Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Kearsipan	- 23 Desa - 31 OPD, 56 Desa dan 7 Kelurahan - 71 sekolah (SD dan SMP) - 32 Arsiparis - 6 OPD - 194 Peserta (SD, SMP, Desa/Kelurahan)	456.721.000	502.500.000
9	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - 2.24.02.2.02	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab. Bangka Tengah	- Arsip sejarah Kabupaten Bangka Tengah yang diselamatkan - Arsip Sejarah PT. Koba Tin yang diselamatkan - Arsip mantan pejabat kabupaten bangka tengah yang diselamatkan	- Arsip sejarah Kabupaten Bangka Tengah yang diselamatkan - Arsip Sejarah PT. Koba Tin yang diselamatkan - Arsip mantan pejabat kabupaten bangka tengah yang diselamatkan	106.200.000	117.000.000

10	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - 2.24.02.2.03	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Peserta Bimtek Kearsipan - Jumlah Undangan Peserta Kegiatan Sosialisasi pengawasan kearsipan internal	- 56 desa dan 7 kelurahan - 75 undangan	128.015.000	141.000.000
11	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - 2.24.02.2.01	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Monev kearsipan	- 31 OPD	22.850.000	25.200.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							
12	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun - 2.24.03.2.01	Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. Bangka Tengah	- Jadwal Retensi Arsip	- 1 tahun	90.730.000	100.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
13	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03		Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Bulan pelayanan surat menyurat	- Jumlah Bulan pelayanan surat menyurat	51.600.000	52.250.000
14	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	- jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	77.400.000	77.400.000
15	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	- jumlah bulan penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	- jumlah bulan penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	94.800.000	95.450.000
16	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	- jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	- jumlah bulan pelayanan administrasi keuangan	61.720.000	61.720.000

17	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03		Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	- jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan perkantoran	- jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan perkantoran	66.200.000	70.000.000
18	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	- jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	- jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	40.000.000	40.000.000
19	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.900.000	12.900.000
20	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- jumlah bulan penyediaan komponen listrik/penerangan kantor dan perpustakaan daerah	- jumlah bulan penyediaan komponen listrik/penerangan kantor dan perpustakaan daerah	4.000.000	4.000.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	- jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	9.600.000	9.600.000
22	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	- jumlah bulan penyediaan makanan dan minuma	24.000.000	24.000.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi	- jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi	125.000.000	125.000.000
24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Peralatan yang disediakan	- Jumlah Peralatan yang disediakan	56.300.000	56.300.000

25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Mebelair yang disediakan	- Jumlah Mebelair yang disediakan	5.400.000	5.400.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03		Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- jumlah rumah dinas yang terpelihara	- jumlah rumah dinas yang terpelihara	8.000.000	12.000.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- Luas Bangunan yang terpelihara	- Luas Bangunan yang terpelihara	30.000.000	35.000.000
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	122.160.000	122.160.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	22.900.000	24.200.000
30	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pembangunan Sumber Daya Manusia	DKP Kab. Bangka Tengah	- Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	- Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	14.550.000	14.550.000
31	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangunan Sumber Daya Manusia	DKP Kab. Bangka Tengah	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	- Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000	100.000.000
32	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02		Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- Jumlah dokumen/pelaporan	- Jumlah dokumen/pelaporan	4.650.000	5.000.000
33	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Kab. Bangka Tengah	- Jumlah dokumen/laporan	- Jumlah dokumen/laporan	9.700.000	10.000.000
34	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	- Jumlah Bulan Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	2.401.046.000	2.401.046.000

35	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Dokumen yang disusun	- Jumlah Dokumen yang disusun	10.000.000	10.000.000
36	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kab. BAngka Tengah	- Jumlah Berita Acara Kesepakatan hasil Koordinasi	- Jumlah Berita Acara Kesepakatan hasil Koordinasi	20.000.000	20.000.000
37	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	- Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	10.000.000	10.000.000
38	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	DKP Bangka Tengah	- jumlah pakaian dinas	- 35 pcs	18.300.000	18.300.000
TOTAL							5.336.385.000	5.518.476.000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021**

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - 3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah bibit lada yang di bantu, Jumlah Kecambah Sawit yang diadakan serta luas Areal tanaman Cabe dan bawang merah yang dibantu	- 100000 Batang polibek lada, 15000 Butir Kecambah Sawit serta Luas Areal Tanaman Cabe seluas 15 Ha dan bawang Merah 10 Ha	3.344.790.000	3.500.000.000
2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota - 3.27.02.2.03	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	- 1 Laporan	70.000.000	70.000.000
3	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain - 3.27.02.2.06	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Pengadaan Bibit Ternak dan Bahan Inseminasi buatan Yang diadakan	- 60 Ekor Ternak Sapi dan 3000 N2 cair	1.283.060.000	1.973.660.000
4	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - 3.27.02.2.01	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Terlaksananya Tugas Pembantuan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan serta Tersedianya mesin cultivator, Bahan Bangunan kandang dan Mesin Pencacah Sawit	- 12 Bulan, Cultivator 15 Unit, Bahan Bangunan 5 Kelompok dan Mesin Pencacah Sawit 5 Unit	1.784.480.000	1.920.000.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							

5	Pengembangan Prasarana Pertanian -	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Peserta yang mengikuti Festival Buah-Buahan	- 150 Orang	100.000.000	100.000.000
6	Pembangunan Prasarana Pertanian - 3.27.03.2.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Luas Kebun entres karet, Kebun Sumber Benih , Kebun Induk lada , Kebun Induk Tajar hidup yang terpelihara serta luas bangunan puskesmas yang dibangun	- Kebun entres karet (0.5 Ha), Kebun Sumber Benih (20 Ha), Kebun Induk lada (2 Ha) , Kebun Induk Tajar hidup (2 Ha) yang terpelihara serta luas bangunan puskesmas yang dibangun 115 M2	1.048.525.000	950.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								
7	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner - 3.27.04.2.04		Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Produk dan Peredaran Hewan Ternak Yang diawasi	- 1 Dokumen	151.735.000	152.000.000
8	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota -	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Data Pengawasan pangan Asal Hewan, Sanitasi Usaha Peternakan dan Jumlah Ternak yang keluar dan masuk Bangka Tengah	- 1 Dokumen	50.000.000	50.000.000
9	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota - 3.27.04.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Obat-Obatan dan Vaksin	- 18 Jenis	150.000.000	150.000.000

10	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota - 3.27.04.2.01	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Pelayanan Keswan berupa pengobatan maupun pemberian vaksin Yang dilaksanakan kepada peternak	- 1512 kali	585.775.000	585.775.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								
11	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - 3.27.05.2.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Kabupaten Bangka Tengah	- Terkendalnya serangan organisme pengganggu tanaman terhadap tanaman pertanian	- 85 %	636.700.000	650.000.000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								
12	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota - 3.27.06.2.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		Kabupaten Bangka Tengah	- Terlaksananya pembinaan, monitoring dan inventarisasi perkebunan rakyat (Bulan)	- 12 Bulan	150.000.000	150.000.000
13	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota - 3.27.06.2.01	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian		Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Perusahaan Perkebunan Swasta Yang di nilai usaha Perkebunannya	- Jumlah Perusahaan Perkebunan Swasta Yang di nilai usaha Perkebunannya	175.000.000	175.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
14	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah Program dan Kegiatan yang tersusun dengan baik dalam dokumen perencanaan	- 7 Dokumen	10.000.000	10.000.000

15	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah Berita Acara kesepakatan hasil koordinasi	- 7 Berita Acara	20.000.000	20.000.000
16	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah -		Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun (LPPD, LKPJ, LAKIP, DALEV, MONEV)	- 5 Dokumen	10.000.000	10.000.000
17	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- 12 Bulan	4.154.000.000	4.154.000.000
18	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah Dokumen/Pelaporan	- 1 Laporan	5.000.000	5.000.000
19	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah dokumen/laporan keuangan akhir tahun	- Jumlah dokumen/laporan keuangan akhir tahun	10.000.000	10.000.000
20	Administrasi Umum -	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Pelayanan Jasa Surat Menyurat	100.002.000	100.002.000
21	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.000.000	123.000.000
22	Administrasi Umum -	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah Bulan Kendaraan yang mendapat perizinan	- Jumlah Bulan Kendaraan yang mendapat perizinan	41.600.000	41.600.000
23	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinas Pertanian	- Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan "	- Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan "	3.600.000	3.600.000

24	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	- Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	25.000.000	25.000.000
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Lokal dan Nasional	- Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	- Jumlah Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	125.000.000	125.000.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Dinas Pertanian	- Luas Bangunan Kantor dan Puskesmas yang dipelihara	- Luas Bangunan Kantor dan Puskesmas yang dipelihara	121.350.000	121.350.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang di Pelihara	- Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang di Pelihara	145.000.000	145.000.000
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Dinas Pertanian	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Puskesmas Dalam Kondisi Baik	- Jumlah Peralatan Gedung Kantor dan Puskesmas Dalam Kondisi Baik	42.100.000	42.100.000
29	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	32.500.000	32.500.000
30	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Dinas Pertanian	- Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu	- Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu	20.000.000	20.000.000
31	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinas Pertanian	- Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000	100.000.000
32	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah Meubelair Yang diadakan	- 1 Jenis	17.500.000	-

33	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- jumlah bulan pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	- 12 Bulan	161.764.000	161.764.000
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- jumlah bulan pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 Bulan	38.000.000	38.000.000
35	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Alat Tulis Kantor	- 12 Bulan	37.200.000	37.200.000
36	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- 12 Bulan	10.610.000	10.610.000
37	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- 12 Bulan	4.000.000	4.000.000
38	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinas Pertanian	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	- 6 Unit	125.000.000	-
TOTAL							15.012.291.000	15.766.161.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
1	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 2.19.02.2.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Koba	- Jumlah Peserta Pembinaan PASKIBRA - Jumlah Peserta Wawasan Nusantara Pemuda Pengibar Bendera	- 36 orang - 36 orang	1.055.600.000	1.476.616.500
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinbudparpora	- Jumlah atlit yang mengikuti kegiatan event olahraga	- 1.050 atlit	1.178.170.000	1.200.000.000
3	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 2.19.03.2.02	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab. Bangka Tengah	- Jumlah kegiatan pendampingan	- 10 kali	27.000.000	27.000.000
4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - 2.19.03.2.03	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinbudparpora	- jumlah atlit berprestasi	- 200 atlit	100.800.000	100.800.000
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - 2.19.03.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinbudparpora	- jumlah data sektoral olahraga	- data sarpras, data klub, data atlit, data pelatih	50.000.000	50.000.000
6	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 2.19.03.2.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinbudparpora	- Jumlah sarpras olahraga yang memerlukan pemeliharaan	- 8 sarpras olahraga	846.100.000	850.000.000

7	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - 2.19.03.2.05	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Dinbudparpora	- jumlah pembangunan sarana prasarana olahraga	- 1 kegiatan	325.840.000	350.000.000
8	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - 2.19.03.2.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab. Bangka Tengah	- jumlah kegiatan /event olahraga	- 4 kegiatan	228.830.000	230.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							
9	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - 2.19.04.2.01	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	6 Kecamatan	- Jumlah partisipasi anggota Pramuka	- 425 orang	130.000.000	150.000.000
10	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - 2.19.04.2.01	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten, Provinsi, Nasional	- Jumlah partisipasi anggota Pramuka	- 450 anggota	440.000.000	500.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
11	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 2.22.02.2.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Acara Ritual Adat, Budaya dan Keagamaan Yang Diselenggarakan	- 5 Event Ritual Adat	100.000.000	100.000.000
12	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 2.22.02.2.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Peserta GBN dan Paduan Suara	- 28 Peserta	110.000.000	150.000.000
13	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 2.22.02.2.03	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Lembaga Adat Melayu Yang Terbentuk	- 1 Lembaga Adat Melayu	50.000.000	50.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL							
14	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 2.22.03.2.01	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Sanggar Seni/ Budaya Yang Proaktif	- 3 Sanggar	40.000.000	40.000.000
15	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 2.22.03.2.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kab. Bangka Tengah	- Jumlah Festival dan Pagelaran Seni Budaya Yang Diselenggarakan	- 2 Festival dan Pagelaran	250.000.000	250.000.000

	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
16	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - 2.22.05.2.01	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Tenaga Ahli Cagar Budaya Yang Bersertifikasi	- 2 Tenaga Ahli Cagar Budaya	60.000.000	60.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							
17	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - 3.26.02.2.01	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Dinbudparpora	- Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun	- 2 Dokumen Masterplan (Pantai Tapak Antu, Pantai Tanjung Berikat)	44.800.000	150.000.000
18	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota -	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Dinbudparpora	- Jumlah DTW yang ditingkatkan Daya Tariknya	- 6 DTW	450.000.000	2.500.000.000
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							
19	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - 3.26.03.2.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Pertumbuhan Ekonomi	Dinbudparpora	- Jumlah media promosi yang dilaksanakan	- 4 Media	80.000.000	250.000.000
20	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - 3.26.03.2.01	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Pertumbuhan Ekonomi	Dinbudparpora	- jumlah paket Informasi yang disusun dan disebarkan	- 2 Paket	20.000.000	80.000.000
21	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - 3.26.03.2.01	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Pertumbuhan Ekonomi	DINBUDPARPORA	- Jumlah Pameran Nasional Yang dilaksanakan/diikuti	- 2 Kali	175.000.000	350.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							
22	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - 3.26.05.2.01	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pertumbuhan Ekonomi	Dinbudparpora	- Jumlah peserta pelatihan dasar	- 80 orang	90.010.000	240.000.000

23	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - 3.26.05.2.01	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	Dinbudparpora	- Jumlah peserta sertifikasi pemandu wisata	- 30 orang	90.250.000	260.000.000
24	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - 3.26.05.2.01	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Ekonomi	Dinbudparpora	- Jumlah Peserta	- 50 Peserta	93.750.000	300.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
25	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinbudparpora	- jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	- 12 bulan	125.000.000	125.000.000
26	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinbudparpora	- jumlah bulan pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 12 bulan	46.200.000	46.200.000
27	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinbudparpora	- jumlah bulan pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- 12 bulan	33.000.000	33.000.000
28	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinbudparpora	- jumlah bulan pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	- 12 bulan	122.500.000	122.500.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinbudparpora	- jumlah bulan pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 bulan	30.500.000	30.500.000
30	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbuparpora	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Alat Tulis Kantor	- 12 bulan	30.000.000	30.000.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- 12 bulan	12.000.000	12.000.000

32	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- 12 bulan	8.000.000	8.800.000
33	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	3.600.000
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah bulan pelayanan penyediaan Makanan dan Minuman	- 12 bulan	30.000.000	30.000.000
35	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	- 20 kali	125.000.000	125.000.000
36	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	- 1 unit/item	30.000.000	30.000.000
37	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	- 10 unit/item	50.000.000	50.000.000
38	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah Mebeleur yang diadakan	- 42 unit/item	45.000.000	45.000.000
39	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah gedung kantor yang dipelihara	- 1 unit/item	34.000.000	35.000.000
40	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	- 6 unit/item	70.000.000	70.000.000

41	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	- 12 bulan	50.000.000	50.000.000
42	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- 12 bulan	2.850.000.000	2.850.000.000
43	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	- 1 laporan	2.500.000	2.500.000
44	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	- Jumlah laporan keuangan yang disusun	10.000.000	10.000.000
45	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	- 33 stel	37.440.000	37.440.000
46	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	- jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan	10.000.000	10.000.000
47	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	- jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	100.000.000	100.000.000
48	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- Jumlah dokumen yang disusun	- Jumlah dokumen yang disusun	10.000.000	10.000.000
49	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	- Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	10.000.000	10.000.000
50	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dindbudparpora	- Jumlah Berita Acara kesepakatan hasil koordinasi	- Jumlah Berita Acara kesepakatan hasil koordinasi	20.000.000	20.000.000

51	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinbudparpora	- jumlah rumah dinas yang dipelihara	- 1 unit	10.000.000	10.000.000
52	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mobil Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Dinbudparpora	- jumlah pengadaan mobil jabatan	- 1 unit	300.000.000	300.000.000
TOTAL							10.240.890.000	13.920.956.500

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							
1	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - 3.25.02.2.03	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah sosialisasi SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	- 2 TPI	59.900.000	59.900.000
2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - 3.25.02.2.03	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Operasional dan Pemeliharaan TPI	- 12 Bulan	421.750.000	421.750.000
3	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - 3.25.02.2.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Informasi Perubahan Iklim dan daerah penangkapan ikan. 2. Jumlah Dokumen analisis NTN, 3. Jumlah bulan penyediaan data Statistik Perikanan Tangkap 4. Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sentra Nelayan	- 1. 500 Orang, 2. 1 Dokumen, 3. 12 Bulan 4. 1 Dokumen	636.730.000	636.730.000
4	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota - 3.25.02.2.02	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah dan Luar Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah Nelayan Yang Mengikuti Workshop, 2. Study Replikasi, 3. Nelayan Yang memiliki Kusuka	- 1.15 Orang, 2. 15 Orang, 3. 500 Kartu Kusuka,	313.500.000	313.500.000

5	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota - 3.25.02.2.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang Dibina dan Jumlah KUB yang dikembangkan	- 20 KUB dan 5 KUB	110.000.000	110.000.000
6	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota - 3.25.02.2.02	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1.Jumlah anak nelayan yang terfasilitasi pendidikan di perguruan tinggi bidang perikanan 2.Jumlah Nelayan Yang terfasilitasi Pendanaan Oleh Bank/KL lainnya 3.Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan pembiayaan premi asuransi 4. Jumlah nelayan yang bermitra dengan badan usaha/koperasi/perorangan	- 1. 10 Orang 2. 10 Orang 3. 500 Orang 4. 5 Orang	314.500.000	314.500.000
7	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota -	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Nelayan yang mengikuti sosialisasi Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	- 300 Orang	75.000.000	75.000.000
8	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - 3.25.02.2.01	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah Tambat Labuh Yang disediakan, 2. Jumlah TPI yang disediakan	- 1. 3 Unit tambat labuh,(Desa Kurau, Berok Ilir Kec. Sungaiselan dan Desa Penyak) 2. 1 TPI,(Kebintik)	1.865.640.000	1.865.640.000

9	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota -		Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1.Jumlah bantuan Kapal Penangkap Ikan yang disediakan. 2. Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang disediakan 3. Jumlah Alat Tangkap yang disediakan	- 1. 10 Paket, 2.125 Paket. 3. 50 Paket	1.139.530.000	1.138.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
10	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - 3.25.03.2.02		Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1.Jumlah peserta temu teknis/bisnis (Orang), 2. Jumlah lomba teknologi budidaya ikan (Kali)	- 1. 100 Orang 2. 1 (Satu) Kali	175.000.000	175.000.000
11	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - 3.25.03.2.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka tengah	- 1. Jumlah Unit Pelayanan dan Pengembangan UPP(Unit),	- 1. 1 UPP	125.000.000	125.000.000
12	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - 3.25.03.2.02	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Sosialisasi & Pendampingan Akses Permodalan & Kemitraan Usaha Bagi Pembudidaya Ikan Kecil	- 1 Kali	50.000.000	50.000.000
13	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - 3.25.03.2.02	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah & Keluar Kabuapten Bangka Tengah	- 1. Jumlah Peserta Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Orang), 2. Jumlah Peserta Magang Teknis Budidaya Ikan(Orang) 3. Jumlah Peserta Pendidikan & Pelatihan Teknologi Budidaya Ikan	- 1. 50 Orang, 2.15 Orang, 3.15 kali,	250.000.000	250.000.000

14	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota -	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah Standar Operasional & Prosedure Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) (Dokumen) 2. Jumlah Sosialisasi SOP Penerbitan / Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota (Kali)	- 1. 10 Dokumen 2. 1 Kali	40.000.000	40.000.000
15	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota -	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah pelayanan usaha budidaya ikan	- 20 Kali	40.000.000	40.000.000
16	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - 3.25.03.2.04	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan (Data Produksi(Bulan), 2. Jumlah Dokumen NTPI, 3.Profil(Dokumen), 4.Jumlah Dokumen Kajian Budidaya Ikan (Dokumen) 5. Jumlah Teknologi dan Informasi Budidaya Ikan (Digitalisasi Perikanan Budidaya)	- 1. 1 Dokumen, 2.1 Dokumen, 3.1 Dokumen, 4.1 Dokumen 5. 1 Paket	360.000.000	360.000.000

17	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan -	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah luasan Lahan Untuk mendukung Kegiatan Budidaya Ikan (Ha) 2. Jumlah Tempat Penyimpanan yang Disediakan (Unit) 3. Jumlah Prasarana UPTD Perikanan Budidaya yang disediakan 4. Jumlah stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak dan Sumber energi lainnya untuk pembudidaya ikan yang disediakan 5. Jumlah saluran pengairan yang disediakan 6. Jumlah jaringan listrik dan jaringan komunikasi	- 1. 2 Ha 2. 1 Unit 3. 1 Unit	520.000.000	520.000.000
----	----------------------------------	--	---------------------	----------------------------	---	-------------------------------------	-------------	-------------

18	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan -	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah Sarana UPTD Perikanan Budidaya yang Disediakan (Paket) 2. Jumlah Bulan Operasional & Pemeliharaan UPTD Perikanan Budidaya 3. Jumlah UPR yang direvitalisasi(Paket) 4. Jumlah Bantuan Sarana Unit Pembenihan Rakyat (Paket) 5. Jumlah bantuan Sarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok (Paket) 6. Jumlah Bantuan Sarana Ikan Hias (Paket) 7. Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Mina Padi (Paket) 8. Jumlah Bantuan Sarana Percontohan Budidaya Ikan 9. Jumlah	- 1. 7 Paket 2. 12 Bulan, 3. 4 Paket, 4. 10 Paket, 5. 2 Paket, 6.5 Paket, 7.0 Paket, 8. 10 Paket, 9.1 Paket, 10. 1 Paket, 11. 7 Paket, 12. 2 Paket, 13. 1 Paket, 14. 20 Paket, 15. 3 Ha	1.915.460.000	2.000.000.000
19	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - 3.25.03.2.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah bulan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Ikan (Bulan), 2. Jumlah Bantuan Obat-Obatan/Vaksinasi/s mart kit kualitas air (Paket)	- 1.12 Bulan, 2.10 Paket	75.000.000	75.000.000
20	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - 3.25.03.2.04	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pembudidayaan Ikan (Bulan)	- 12 Bulan	50.000.000	50.000.000

21	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan -	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah Luasan usaha budidaya yang dilindungi asuransi untuk kelangsungan usahanya 2. Jumlah lahan pembudidayaan ikan yang difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanahnya	- 1. 5 Ha 2. 50 Unit	100.000.000	100.000.000
22	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 3.25.03.2.01	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan	- 1 Kali	50.000.000	50.000.000
23	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 3.25.03.2.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1(Satu) Daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi insentif, serta	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah sosialisasi SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	- 1 Kali	50.000.000	50.000.000
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
24	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota -	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan	- 2 kali	250.000.000	250.000.000

25	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota - 3.25.04.2.01	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah sosialisasi peraturan perundang undangan bidang kelautan dan perikanan	- 2 kali	250.000.000	250.000.000
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
26	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil - 3.25.05.2.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah Bulan Penyediaan Informasi Pasar & Data Produksi Olahan, 2. Pelaku Usaha yang mendapatkan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil perikanan, 3 Jumlah kegiatan Promosi Serta Kerja Sama pemasaran, 4.Jumlah Dokumen Analisis Konsumsi Ikan	- 1. 12 Bulan, 2. 50 Orang, 3. 2 Kegiatan, 4.1 Dokumen	275.000.000	275.000.000
27	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - 3.25.05.2.02	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah Titik Lokasi Pengujian Mutu & Keamanan Pangan , 2. Jumlah peserta pembinaan & pelatihan, 3.Jumlah peserta study replikasi usaha hasil kelautan dan perikanan	- 1. 20 Lokasi, 2. 100 Orang, 3. 15Orang	200.000.000	200.000.000

28	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota -	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pemeliharaan & Operasional Pasar Ikan dan Coldstorage dan Jumlah Sapras Pengolahan hasil perikanan yang direhab	- 12 Bulan dan 1 Unit	465.000.000	465.000.000
29	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - 3.25.05.2.03	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Kabupaten Bangka Tengah	- 1. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan yang Dikembangkan 2. Jumlah Bidang Usaha yang Terfasilitasi Terhadap akses Permodalan, 3. Jumlah Sarana & Prasaran Pengolahan yang disediakan bagi pelaku usaha 4. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Sentra Pengolahan	- 1. 1 Produk(Lempah Kuning Ikan Kaleng), 2. 3 Unit Usaha, 3. 5 Paket, 4. 50 Paket.	479.268.000	479.268.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
30	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah dan Keluar Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Dokumen yang Disusun	- 7 Dokumen	10.000.000	15.000.000
31	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Berita Acara Kesepakatan hasil Koordinasi	- 7 Berita Acara	20.000.000	20.000.000
32	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah -		Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang disusun	- 5 Dokumen	10.000.000	15.000.000
33	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Gaji dan Tunjangan ASN yang Disediakan	- 12 Bulan	2.900.000.000	3.000.000.000

34	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang Disusun	- 1 Laporan	5.000.000	5.000.000
35	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	- 1 Laporan	10.000.000	10.000.000
36	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	- 12 Bulan	175.360.000	175.360.000
37	Administrasi Umum -	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- 12 Bulan	125.580.000	125.580.000
38	Administrasi Umum -	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- 12 Bulan	41.010.000	41.010.000
39	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas & Operasional	- 12 Bulan	41.000.000	41.000.000
40	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pelayanan Jasa administrasi Keuangan	- 12 Bulan	100.600.000	100.600.000
41	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor	- 12 Bulan	127.285.100	127.285.100
42	Administrasi Umum -	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pelayanan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- 12 Bulan	55.577.000	55.577.000

43	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pelayanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- 12 Bulan	26.100.000	26.100.000
44	Administrasi Umum -	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pelayanan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	- 12 Bulan	12.000.000	12.000.000
45	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan	- 5 Item	10.000.000	10.000.000
46	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	- 5 Item	10.000.000	75.000.000
47	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03		Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pelayanan Penyediaan Makanan dan Minuman	- 12 Bulan	27.300.000	27.300.000
48	Administrasi Umum -	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	- 65 Kali	125.000.000	125.000.000
49	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	- 4 Unit	55.000.000	55.000.000
50	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Perlengkapan Gedung kator Yang Diadakan	- 1 Item	10.000.000	25.000.000
51	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Item Mebeleur Yang Diadaakan	- 3 Item	16.769.900	75.000.000

52	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Luasan Gedung Kantor Yang Dipelihara	- 550 M2	50.000.000	50.000.000
53	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara	- 5 unit	120.000.000	120.000.000
54	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pelayanan Penyediaan Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- 9 Item	42.070.000	42.070.000
55	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan	- 73	46.070.000	46.070.000
56	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Yang Diadakan	- 20 Stel	10.000.000	11.500.000
57	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Formal	- 10 Orang	100.000.000	150.000.000
58	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Bulan Pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- 12 Bulan	6.000.000	6.000.000
59	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Kabupaten Bangka Tengah	- Jumlah Mobil Jabatan Yang dipelihara	- 1 Unit	56.000.000	56.000.000
TOTAL							15.000.000.000	15.383.240.100

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - 2.17.03.2.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlah koperasi aktif yang diawasi	- 85 Unit	32.000.000	40.000.000
2	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - 2.17.03.2.01	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlah koperasi aktif yang melaksanakan RAT	- 60 Koperasi	31.200.000	40.000.000
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							
3	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 2.17.04.2.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlah KSP yang dinilai kesehatan usahanya	- 28 Unit	60.000.000	60.000.000
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota - 2.17.05.2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pangkalanbaru	- Jumlah pengurus/anggota koperasi yang mengikuti pelatihan vocational	- 75 orang	198.700.000	200.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO							
5	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - 2.17.07.2.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Tersedianya dokumen roadmap potensi dan pengembangan usaha mikro	- 1 Dokumen	25.000.000	-
6	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - 2.17.07.2.01	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlah UKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya melalui kemitraan	- 25 UMKM	50.000.000	100.000.000
7	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - 2.17.07.2.01	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlah bulan pelayanan pendampingan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro	- 12 bulan	889.310.000	890.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							
8	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - 2.17.08.2.01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan. Luar daerah	- 1. SDM UMKM yang dikembangkan 2. Pelayanan pengembangan produksi dan pengolahan 3. Event pemasaran produk 4. UMKM yang didampingi 5. UMKM yang difasilitasi permodalan	- 1. 100 UMKM 2. 12 bulan 3. 10 event 4. 5 UMKM 5. 100 UMKM	888.070.000	900.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							
9	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - 3.30.03.2.01	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi	5 Kecamatan	- Jumlah bulan pengelolaan pasar tradisional, pujasera dan gudang SRG	- 12 bulan	1.488.000.000	1.500.000.000
10	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya - 3.30.03.2.02	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi	5 Kecamatan	- Jumlah pengelola sarana perdagangan yang dibina - Perencanaan peningkatan sarana perdagangan	- 12 bulan - 1 paket	150.000.000	150.000.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
11	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - 3.30.04.2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlah bulan pelaksanaan pemantauan harga dan stock barang ditingkat agen	- 12 bulan	25.000.000	25.000.000
12	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota -	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlah bulan pelaksanaan pemantauan harga dan stock barang ditingkat pasar rakyat	- 12 bulan	80.000.000	65.000.000
13	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - 3.30.04.2.02	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlah penyelenggaraan pasar murah bahan pokok - Jumlah paket daging murah	- 12 kegiatan - 2500 paket	620.000.000	700.000.000
14	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 3.30.04.2.03	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlah bulan pengawasan	- 6 bulan	20.000.000	40.000.000
15	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 3.30.04.2.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	- 12 Bulan	60.000.000	60.000.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							
16	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - 3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- 1. Jumlah alat UTPP yang ditera/tera ulang 2. Jumlah PTU	- 1. 800 unit 2. 6 Unit	240.000.000	240.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
17	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - 3.30.06.2.01	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlah bulan penyuluhan kemetrolagian	- 12 bulan	40.000.000	40.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
18	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - 3.31.02.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlah kawasan sentra industri kecil yang dikembangkan	- 2 Sentra	53.000.000	60.000.000
19	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - 3.31.02.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlahpeserta koordinasi dan sinkronisasi PP Nomor 41 Tahun 2015 tentang Sumber Daya Industri	- 50 Peserta	59.000.000	60.000.000
20	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - 3.31.02.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sarana dan Prasarana Industri	- 50 Peserta	54.400.000	55.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
21	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - 3.31.02.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- 1. Jumlah peserta auditor halal internal 2. Jumlah Peserta pelatihan keamanan pangan 3. Jumlah peserta GMP 4. IKM difasilitasi halal 5. IKM difasilitasi P-IRT 6. Fasilitas uji nutrisi produk dan lainnya	- 1. 50 Orang 2. 50 orang 3. 50 orang 4. 30 IKM 5. 30 IKM 6. 3 Paket	694.750.000	700.000.000
22	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - 3.31.02.2.01	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Laporan evalulasi RPIK	- 1 laporan	79.750.000	79.750.000

**PROGRAM PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL**

23	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - 3.31.04.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Pertumbuhan Ekonomi	6 Kecamatan	- Jumlah industri yang terdata dalam siinas	- 72 Industri	59.800.000	59.800.000
24	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - 3.31.04.2.01	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Koba	- Jumlah peserta diseminasi	- 140 Orang	113.900.000	113.900.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
25	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah dokumen RKPD yang disusun	- 2 Dokumen	12.000.000	12.000.000
26	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah - X.XX.01.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	dalam daerah, luar daerah	- Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	- 3 Kegiatan	20.000.000	20.000.000
27	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	- 1 Laporan	5.000.000	5.000.000
28	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah dokumen laporan keungan akhir tahun yang disusun	- 1 Laporan	7.500.000	7.500.000
29	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	- 12 bulan	53.500.000	54.000.000
30	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah bulan pelayanan jasa komunikasi, air dan listrik kantor	- 12 bulan	67.500.000	67.500.000
31	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah bulan pelayanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- 12 bulan	42.534.000	43.000.000
32	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah bulan pelayanan jasa administrasi keuangan kantor	- 12 bulan	118.866.000	119.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
33	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah bulan pelayanan kebersihan kantor dan galeri	- 12 bulan	83.950.000	84.000.000
34	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Bulan layanan ATK kantor	- 12 bulan	48.000.000	50.000.000
35	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah bulan pelayanan cetakan dan penggandaan	- 12 bulan	43.200.000	43.200.000
36	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah bulan penyediaan komponen listrik dan penerangan kantor	- 12 bulan	3.000.000	3.000.000
37	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah bulan pelayanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- 12 bulan	5.400.000	5.400.000
38	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah bulan pelayanan makan dan minuman kantor	- 12 bulan	21.410.000	22.000.000
39	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Luar daerah	- Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	- 15 Kali	125.000.000	125.000.000
40	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang diadakan	- 4 unit	20.000.000	20.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
41	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah unit laptop yang diadakan	- 2 Unit	30.000.000	-
42	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba, Pangkalanbaru, Namang, Sungaiselan, Simpangkatis	- Unit gedung kantor yang dipelihara	- 3 Unit	100.000.000	150.000.000
43	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Unit mobil jabatan yang dimaintenance	- 1 unit	52.000.000	60.000.000
44	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Unit kendaraan operasional yang dipelihara	- 3 Unit	60.000.000	80.000.000
45	Administrasi Umum - X.XX.01.2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Unit peralatan gedung kantor yang dimaintenance	- 25 unit	24.000.000	40.000.000
46	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	- 30 Stel	16.000.000	16.000.000
47	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	- 20 Stel	10.000.000	-
48	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - X.XX.01.2.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Luar daerah	- Jumlah pegawai yang diberikan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan	- 12 pegawai	100.000.000	100.000.000

No	Bidang / Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Maju
					Keluaran Sub Kegiatan			
					Tolok Ukur	Target		
49	Administrasi Keuangan - X.XX.01.2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Koba	- Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	- 12 bulan	2.903.020.000	3.224.260.000

REKAPITULASI PLAFON ANGGARAN PER OPD TAHUN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA
1	DINAS PENDIDIKAN	194.890.147.000
2	DINAS KESEHATAN	130.000.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	80.000.000.000
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	9.933.006.300
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	21.282.616.000
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12.898.887.500
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.095.110.000
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PPPA	7.576.280.000
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.838.944.300
10	KESBANGPOL	3.760.516.600
11	BPBD	3.414.000.000
12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.383.298.000
13	SEKRETARIAT DAERAH	41.000.000.000
14	SEKRETARIAT DPRD	36.000.000.000
15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	166.992.258.500
16	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	10.000.000.000
17	INSPEKTORAT DAERAH	5.453.000.000
18	KECAMATAN KOB	12.000.000.000

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA
19	KECAMATAN PANGKALAN BARU	8.483.369.000
20	KECAMATAN SUNGAI SELAN	6.840.000.000
21	KECAMATAN SIMPANG KATIS	4.432.965.500
22	KECAMATAN NAMANG	4.589.298.300
23	KECAMATAN LUBUK BESAR	4.515.000.000
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	21.000.000.000
25	DINAS PENANAMAN MODAL, PERLAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	6.500.000.000
26	DINAS PANGAN	10.474.400.000
27	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	10.800.000.000
28	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.336.385.000
29	DINAS PERTANIAN	15.012.291.000
30	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	10.240.890.000
31	DINAS PERIKANAN	15.000.000.000
32	DISPERINDAGKOP-UMKM	9.983.760.000
	TOTAL	900.726.423.000



BERITA ACARA
PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan beberapa langkah terkait implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016-2021.
2. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 telah menggunakan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan sebagaimana disebutkan dalam poin (1) di atas, dan telah dilakukan penginputan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
3. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Koba, Februari 2020

BUPATI BANGKA TENGAH

Dr. Ir. H. IBNU SALEH, MM

PEMETAAN KONSISTENSI TARGET PROGRAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2021 DAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

No	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	RPJMD Tahun 2021			Permendagri Nomor 90 Tahun 2019			
			PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
1	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APK PAUD	94%	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase APK PAUD	100%	
			2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	940	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	950	
				Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	675		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	700	
			3 Program Pendidikan Non Formal	Persentase Angka Buta Aksara	0,20%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Buta Aksara	0,10%	
			4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	94,00%	4 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	95,00%	
				Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	68%		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	70%	
			5 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Persentase Kualifikasi	89%	5 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	- Persentase Kualifikasi	90%	
				- Persentase Sertifikasi	55%		- Persentase Sertifikasi	60%	
2	KESEHATAN	Dinas Kesehatan	1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	100%	
			2 Program Peningkatan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada lansia	65%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan pada lansia	70%	
			3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	
			4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan desa /kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam	100%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan desa /kelurahan yang mengalami KLB ditangani < 24 jam	100%	

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
				Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan posbindu terpadu	100%		Cakupan desa/kelurahan yang melaksanakan posbindu terpadu	100%	
			5	Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita	Angka kematian anak balita per 1000 Kelahiran hidup	3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian anak balita per 1000 Kelahiran hidup	2
							Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	
			6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	60%	2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	70%
			7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	10
					Persentase pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	95%		Persentase pengolahan limbah padat berbahaya sesuai aturan	95%
			8	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 KeH	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 KeH	0
			9	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat generik	100%	3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat generik	100%
			10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi	2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase puskesmas terakreditasi	2
					Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit	Paripurna		Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit	Paripurna
			11	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	75%	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	75%
			12	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio poskesdes terhadap jumlah penduduk (1:2000 penduduk)	100%	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rasio poskesdes terhadap jumlah penduduk (1:2000 penduduk)	100%
								Persentase Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	100%
								Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai standar termasuk puskesmas rawat inap	9 PKM
			13	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Kelas Rumah Sakit	100%	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar Kelas Rumah Sakit	100%

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
							Persentase peningkatan pelayanan kesehatan RS	100%	
			14 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	100%	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana dan prasarana RS dalam kondisi baik	100%	
			15 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan dokter spesialis dasar	68%	4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan dokter spesialis dasar	68%	
			16 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan RS	100%	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan RS	100%	

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan	1 Program pembangunan / peningkatan jalan/jembatan	Meningkatnya Kualitas Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	81,5 %	1 PROGRAM PENYELENGGARAANJALAN	Meningkatnya Kualitas Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	81,5 %	
				meningkatnya kualitas jembatan	66%		meningkatnya kualitas jembatan	66%	
			2 Program rehabilitasi/pemeliharaanJalan dan Jembatan	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik	60%	PROGRAM PENYELENGGARAANJALAN	Meningkatnya jalan kabupaten dalam kondisi baik	81,5%	
			3 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase Tersedianya Sarana Kebinamargaan	100%	PROGRAM PENYELENGGARAANJALAN	Persentase Tersedianya Sarana Kebinamargaan	100%	
			4 Program pembangunan saluran drainase/goronggorong	panjang saluran/drainase dalam kondisi baik	82,25%	2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	panjang saluran/drainase dalam kondisi baik	80%	
			5 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Tersedianya air baku Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Teknis	86%	3 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tersedianya air baku Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Teknis	72%	
			6 Program penyediaan dan pengolahan air baku	Tercapainya Ketersediaan Air Baku	43%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Tercapainya Ketersediaan Air Baku	95%	
			7 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	tersedianya akses air bersih yang aman melalui SPAM	60%	4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	tersedianya akses air bersih yang aman melalui SPAM	81%	
				tersedianya sistem pengolahan air limbah yang memadai	85%	5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	tersedianya sistem pengolahan air limbah yang memadai	90%	
			8 Program pengendalian banjir	tertanggulangnya penanganan masalah banjir di daerah rawan banjir	100%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	tertanggulangnya penanganan masalah banjir di daerah rawan banjir	100%	
			9 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	meningkatkan wilayah strategis dan cepat tumbuh	72%	6 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	- Jumlah Bangunan Gedung yang diselenggarakan	- 7 Unit	
						7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	- Persentase dokumen perencanaan	-	
			10 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Meningkatnya Jalan Desa Dalam Kondisi Baik	89%	8 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Jalan Desa Dalam Kondisi Baik	58%	

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
				Meningkatnya Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	89%		Meningkatnya Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	81,50%	
						9 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	- prosentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	- 0 %	
			11 Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian Dokumen Rencana Tata Ruang kabupaten	70%	10 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang	- 80,30%	

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD		OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD		OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5		6		7		9
			12	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Terlaksananya Program Arah Pemanfaatan Ruang	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Terlaksananya Program Arah Pemanfaatan Ruang	100%	
			13	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Peruntukannya	80,25%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Peruntukannya	80,25%	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan Perhubungan	1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase jumlah layk huni di areal permukiman	97%	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase jumlah layk huni di areal permukiman	97%	
					Berkurangnya luas pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	61%		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya luas pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	61%	
								PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	- Persentase peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	- 100%	
			2	Program pengelolaan areal pemukiman	Persentase pembangunan prasarana sarana utilitas pemukiman yang ditata	34%	2	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	- Persentase sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi perumahan dan permukiman	- 100%	
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja , BPB-Kesbangpol	1	Program Peningkatan kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	82%	1	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	50 %	
			2	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan penyelesaian gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	99 %	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelesaian gangguan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	99 %	
			3	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	persentase Anggota Linmas yang aktif	72,12%		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase Anggota Linmas yang aktif	72,12%	
					Tingkat ratio penyelesaian K3 (ketertiban, kemandirian dan ketenteraman)	75 %			Tingkat ratio penyelesaian K3 (ketertiban, kemandirian dan ketenteraman)	75 %	
			4	Program pemeliharaan ketransparansi dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penyelesaian terhadap pelanggaran perda/perkada	94 %		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian terhadap pelanggaran perda/perkada	94 %	
			5	Program peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas sumber daya aparatur satpolPP dan Linmas	persentase anggota satpolPP yang terlatih	80%		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase anggota satpolPP yang terlatih	80%	
					persentase anggota linmas yang terlatih	60%			persentase anggota linmas yang terlatih	60%	
			6	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) wilayah manajemen penanggulangan bencana	96%	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) wilayah manajemen penanggulangan bencana	97%	
6	SOSIAL	Dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa	1	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase penerima Rastra dan KUBE	85,30%	1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase penerima Rastra dan KUBE	85,50%	

[illegible]

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RPKD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
9	PANGAN	Dinas Pangan	1 Program Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 2. Ketersediaan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi 2375 Kkal/Kap/Hari; dan Protein 77 Gram/Kap/Hari; 2. Ketersediaan Cadangan Pangan 15 Ton	1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita 2. Ketersediaan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi 2375 Kkal/Kap/Hari; dan Protein 77 Gram/Kap/Hari; 2. Ketersediaan Cadangan Pangan 15 Ton	
			2 Program distribusi dan akses pangan	Ketersediaan Informasi, harga dan akses pangan	92%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Informasi, harga dan akses pangan	95	
			4 Program ketersediaan informasi, pasokan harga pangan daerah	ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan daerah	92,5%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan daerah	95%	
			5 Program peningkatan penguatan cadangan pangan	ketersediaan cadangan pangan daerah	15% (15 ton)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	ketersediaan cadangan pangan daerah	15% (15 ton)	
			6 Program peningkatan pola pangan harapan	persentase peningkatan skor pola pangan harapan (PPH)	91%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	persentase peningkatan skor pola pangan harapan (PPH)	92%	
			7 Program peningkatan ketahanan pangan	meningkatnya luas panen tanaman pertanian (Ha)		2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	meningkatnya luas panen tanaman pertanian (Ha)		
				- Tanaman padi	403,5		- Tanaman padi	403,5	
				- Tanaman palawija	6,58		- Tanaman palawija	6,58	
				- Sayuran dan buah semusim	267,75		- Sayuran dan buah semusim	267,75	
				- Tanaman buah tahunan	696,9		- Tanaman buah tahunan	696,9	
						3 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	- Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	100	
			3 Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Penanganan Rawan Pangan	85%	4 Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Penanganan Rawan Pangan	90%	
10	PERTANAHAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Pertanahan, Dinbudparpora	1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100%	1 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	- persentase luas tanah bersertifikat	- 6,70%	
				Bertambahnya kepemilikan lahan	2 ha	2 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Bertambahnya kepemilikan lahan	2 ha	
						3 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	- persentase izin lokasi yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	- 100 persen	
11	LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan	1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penyediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	49%	1 Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penyediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	50%	

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
				Persentase cakupan area pelayanan persampahan	80 %		Persentase cakupan area pelayanan persampahan	80 %	
				jumlah pembinaan terhadap bank sampah	63 desa/kel	2 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	jumlah pembinaan terhadap bank sampah	63 desa/kel	
			2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah RTH yang dikelola dalam kondisi baik	3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah RTH yang dikelola dalam kondisi baik	13 taman	
			3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	cakupan penghijauan wilayah sumber mata air	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	cakupan penghijauan wilayah sumber mata air	2,90%	
				Jumlah pembangunan RTH publik	1	4 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan dibidang lingkungan hidup		
			4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan RKL-RPL	5 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan RKL-RPL	38	
				Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	76%	6 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	80%	
				persentase rekomendasi dokumen lingkungan yang dikeluarkan	100%	7 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	persentase rekomendasi dokumen lingkungan yang dikeluarkan	100%	
			5	Program peningkatan hidup kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Hasil penilalain status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Hasil penilalain status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	34,5	
				Persentase tindak lanjut kasus lingkungan	100%	8 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase tindak lanjut kasus lingkungan	100%	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			1	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak	1 Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	81	
			2	Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	Persentase Akurasi Data Kependudukan	2 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Akurasi Data Kependudukan	96	
			3	Program Keserasian Kebijakan Penduduk	Jumlah OPD yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)	3 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS)	32	
			4	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	4 Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	90	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa, Kecamatan							
			1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase peningkatan aparatur dan organisasi masyarakat yang aktif di desa dan terkoordinasi dengan baik	1 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah fasilitas kerja sama	56 desa	

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
			2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase jumlah masyarakat yang ikut dalam kegiatan pembangunan desa	95%	2 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase jumlah masyarakat yang ikut dalam kegiatan pembangunan desa	95%	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan desa	95%		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan desa	95%	
			3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan	80%	3 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan	90%	

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD			PROGRAM RKPD			KETERANGAN
1	2	3	4	5	TARGET/SATUAN	6	7	TARGET/SATUAN	9
			4	Program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga	Persentase pemberdayaan perempuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga	85%	pindah ke Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak		
			5	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase jumlah aparatur kelurahan, lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang ikut dalam kegiatan pembangunan	95%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan	90%
			6	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Pasar Desa Aktif	85%	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan	90%
					Persentase BUMDes Aktif	70%			
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DPPKBPPPA	1	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya capaian PUS ber KB	70,70%	1 Program Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya capaian PUS ber KB	71%
			2	Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatkan CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	69,7%	2 Program pengendalian penduduk	Meningkatkan CPR MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	71%
			3	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Menurunkan angka usia peakawin di bawah 20 tahun	4,97	Program pengendalian penduduk	Menurunkan angka usia peakawin di bawah 20 tahun	4,97
			4	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Menurunkan unmetneed	69,7	Program pengendalian penduduk	Menurunkan unmetneed	69,7
			5	Program pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	meningkatkan jumlah PUS yang ikut dalam kelompok kegiatan	90,05	3 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	meningkatkan jumlah PUS yang ikut dalam kelompok kegiatan	90,05
			6	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Meningkatnya pelaksanaan program KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga	65%	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pelaksanaan program KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga	70%
			7	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Meningkatkan kegiatan poktan yang terpadu	90,05	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatkan kegiatan poktan yang terpadu	90,05
15	PERHUBUNGAN	Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan Perhubungan	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase dokumen yang ditetapkan sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan	100%	1 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase dokumen yang ditetapkan sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan	100%
			2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam keadaan baik	100%		Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam keadaan baik	100%
			3	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah kelancaran arus penumpang/barang (orang/tahun)	2.200.000		Jumlah kelancaran arus penumpang/barang (orang/tahun)	2.200.000

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
			4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana bidang perhubungan yang dibangun	100%		Persentase sarana dan prasarana bidang perhubungan yang dibangun	100%	
			5 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas	42%		Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas	42%	

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
			6 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Junlah kendaraan yang layak jalan	2500 unit		Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan	95%	
						2 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pengelolaan pelayaran	100%	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Jumlah saluran komunikasi/media di Kabupaten Bangka Tengah	36 kali	1 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah saluran komunikasi/media di Kabupaten Bangka Tengah	36 kali	
			2 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	jumlah desa yang terlayani jaringan internet	56 desa	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	jumlah desa yang terlayani jaringan internet	56 desa	
			3 Program kerjasama informasi dan media massa	jumlah pameran/ expo pemerintah	1 kali pameran/ expo	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	jumlah pameran/ expo pemerintah	1 kali pameran/ expo	
			4 Program Penyempurnaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	jumlah pengunjung website	300.000 pengunjung	2 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	jumlah pengunjung website	300.000 pengunjung	
			5 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM bidang Komunikasi dan Informasi yang berkualitas	103 orang	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah SDM bidang Komunikasi dan Informasi yang berkualitas	105 orang	
17	PERSANDIAN	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	1 Program Penyempurnaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Prosentase Pengembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang optimal	70%	1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase Pengembangan Teknologi informasi dan komunikasi yang optimal	75%	
18	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM	1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rasio kewirausahaan Kabupaten Bangka Tengah	290	1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Rasio kewirausahaan Kabupaten Bangka Tengah	300	
				Persentase nilai produksi UKM dibanding PDRB Daerah	900,00		Persentase nilai produksi UKM dibanding PDRB Daerah	1000	
			2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan permodalan usaha UKM	85	2 Program Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan permodalan usaha UKM	90	
			3 Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	57	3 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	60	
				Persentase KSP dengan kategori sehat	70	4 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP dengan kategori sehat	75	
19	PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tnaga Kerja	1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	1 kali	1 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota	2 kali	
			2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi	80 Milyar	2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi	84 milyar	

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
			3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase izin yang dikeluarkan tepat waktu (sesuai SOP)	97,40%	3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang dikeluarkan tepat waktu (sesuai SOP)	98%	
						4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			4 Program Peningkatan Aksesibilitas Terhadap Informasi Perizinan	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	100%	5 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	100%	
20	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga., Sekretariat Daerah	1 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	9	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	10	
			2 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah calon wirausaha muda yang dibina	20	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah calon wirausaha muda yang dibina	20	
			3 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah atlet berprestasi tingkat kabupaten provinsi dan nasional	65 orang atlet	2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi tingkat kabupaten provinsi dan nasional	65 orang atlet	
			4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah kegiatan Olahraga	10	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah kegiatan Olahraga	10	
			5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah lapangan olahraga	327	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah lapangan olahraga	332	
						3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase daya saing kepemudaan / Anggota Pramuka	30	
			6 Program Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba	Jumlah pemuda yang mengetahui bahaya narkoba	60 orang	pindah urusan ke Kesatuan Bangsa dan Politik			
21	STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1 Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik	Jumlah ketersediaan data/informasi/statistik daerah	1182	1 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah ketersediaan data/informasi/statistik daerah	1322	
22	KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kecamatan	1 Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kelompok/insan seni budaya yang dibina	8 kelompok/orang	1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah kelompok/insan seni budaya yang dibina	8 kelompok/orang	
			2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	16	2 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	16	
			3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan festival seni budaya gelar	7	3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan festival seni budaya gelar	7	
23	PERPUSTAKAAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan	378.880	1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah kunjungan perpustakaan	407.830	
24	KEARSIPAN	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2 Program Pembinaan "SKPD Sadar Arsip"	Persentase Penyelenggaraan Arsip secara Baku	96%	1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Penyelenggaraan Arsip secara Baku	97%	
						2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang terselamatkan	80	

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Perikanan	1 Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	volume produksi olahan hasil kelautan dna perikanan	2.700 ton	1 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	volume produksi olahan hasil kelautan dna perikanan	2.800 ton	
			2 Program Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan	Prosentase Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan yang Terkini dan Terbaru	100%	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan yang Terkini dan Terbaru	100%	
			3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	22.058,84 Ton	2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	22.279,43 ton	
			4 Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.403 Ton	3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1,415 ton	
			5 Program pendampingan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	Prosentase pendampingan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	4 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase pendampingan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	100%	
26	PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	jumlah wisatawan	93.278	1 Program Pemasaran Pariwisata	jumlah wisatawan	119.153	
			2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang dikelola	6 sapras	2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang dikelola	6 sapras	
						3 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
						4 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
27	PERTANIAN	Dinas Pertanian	1 Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Tingkat produktivitas perkebunan (Ton/Ha/Tahun)		1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat produktivitas perkebunan (Ton/Ha/Tahun)		
				- Karet	1,50 Ton/Ha/Tahun	2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	- Karet	1,51 Ton/Ha/Tahun	
				-Lada	1,56 Ton/Ha		-Lada	1,50 Ton/Ha	
				-Sawit			-Tanaman Padi	- 3,4 Ton / Ha	
						3 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	85%	
				-Sawit	-3,7 Ton/Ha	4 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	- Meningkatnya Produktivitas Tanaman Sawit	- 3,8 Ton/Ha	
			2 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terkendalinya Penyakit Zoonosa di Kabupaten Bangka Tengah	2 kasus	5 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Terkendalinya Penyakit Zoonosa di Kabupaten Bangka Tengah	2 kasus	
			3 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya Populasi Sapi, Kambing dan Bebek	4853 ekor, 694 ekor dan 4700 ekor	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	- Meningkatnya Populasi Sapi, Kambing dan itik	- Populasi Sapi : 5510 ekor, Populasi Kambing : 790 ekor dan Populasi itik : 5025 ekor	
			4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah kelompok peternakan yang menerapkan teknologi peternakan	32 kelompok	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah kelompok peternakan yang menerapkan teknologi peternakan	32 kelompok	

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
			5 Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi pertanianTepat Guna	jumlah teknologi kaji terap yang dikembangkan	1 teknologi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	jumlah teknologi kaji terap yang dikembangkan	1 teknologi	
			6 program peningkatan pemasaran hasil produksi/ pertanian/ perkebunan/kehutanan	jumlah promosi produk hasil perkebunan/kehutanan	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	jumlah promosi produk hasil perkebunan/kehutanan	3	
		Dinas Pangan	7 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	nilai tukar petani	102	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	nilai tukar petani	103	
			8 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/PerkebunanLapangan	Peningkatan Jumlah Penyuluh Berprestasi	3 orang	6 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Jumlah Penyuluh Berprestasi	3 orang	
				Cakupan bina penyelenggaraan penyuluhan pertanian	82%		Cakupan bina penyelenggaraan penyuluhan pertanian	82%	
				rasio jumlah penyuluh per desa	95%		rasio jumlah penyuluh per desa	95%	
				Rekomendasi hasil kaji terap	84%		Rekomendasi hasil kaji terap	84%	

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
28	KEHUTANAN	Dinas lingkungan hidup	1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Jumlah produk hasil hutan bukan kayu	14	1 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah produk hasil hutan bukan kayu	14	
			2 Program Rehabilitasi hutan dan lahan	Persentase Rehabilitasi Tahura yang kritis	30%	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Rehabilitasi Tahura yang kritis	30%	
			3 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Jumlah desa disekitar TAHURA yang dilakukan pengamanan	11 desa/kelurahan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah desa disekitar TAHURA yang dilakukan pengamanan	11 desa/kelurahan	
			4 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan TAHURA	50%	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan TAHURA	50%	
29	PERDAGANGAN	DISPERINDAGKOPUKM	1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang	95%	1 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang ditera/tera ulang	90%	
			2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase omset pasar tradisional terhadap PDRB	2,40%	2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase omset pasar tradisional terhadap PDRB	2,40%	
						3 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Indeks Harga Konsumen	110	
30	PERINDUSTRIAN	DISPERINDAGKOPUKM	1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase nilai pemasaran produk IKM terhadap PDRB	7,5%	1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase nilai pemasaran produk IKM terhadap PDRB	7,5%	
				Jumlah produk berstandar P-IRT	240		Jumlah produk berstandar P-IRT	240	
				Jumlah produk bersertifikasi HALAL	155		Jumlah produk bersertifikasi HALAL	155	
				Jumlah produk dengan kemasan sesuai ketentuan	240		Jumlah produk dengan kemasan sesuai ketentuan	240	
			2 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase nilai pemasaran produk sentra IKM gaharu (the, sabun, minyak wangi) terhadap total pemasaran produk IKM	7,5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	- Indeks pemenuhan data industri melalui SIINAS	0,7	
				Persentase volume produksi sentra IKM gaharu (the, sabun, minyak wangi)	50				
				Persentase tenaga kerja sentra gaharu IKM 9non petani/pekebun)	5				
31	PERENCANAAN	BAPPELTBANGDA	1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	80%	1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	85%	
			2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan hasil musrenbang desa, Pokok Pikiran DPRD dan hasil konsultasi publik yang terakomodir dalam RKPD	91%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase usulan hasil musrenbang desa, Pokok Pikiran DPRD dan hasil konsultasi publik yang terakomodir dalam RKPD	91%	

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD		OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD		OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4		5		6		7		9
					Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD lingkup bidang	91%			Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD lingkup bidang	92%	
					Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya	91%			Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya	92%	
					Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya	91%			Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya	92%	
					Kesesuaian prioritas pembangunan	100%					
			3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya	91%	2	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	dokumen acuan perencanaan pembangunan ekonomi	92%	
			4	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya	91%	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya	92%	
			5	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya	91%	4	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya	92%	
32	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BAPPELITBANGDA	1	Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Persentase penerapan teknologi tepat guna	60%	1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANAERAH	Persentase penerapan teknologi tepat guna	60%	
			2	Program Penguatan Inovasi	Persentase inovasi daerah yang diterapkan	80%		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANAERAH	Persentase inovasi daerah yang diterapkan	80%	
			3	Program pengembangan data/informasi	dokumen kajian dalam bentuk saran tindak dan rencana pengembangan	2 dokumen		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANAERAH	dokumen kajian dalam bentuk saran tindak dan rencana pengembangan	2 dokumen	
			4	Program pendayagunaan IPTEK	dokumen kajian dalam bentuk saran tindak dan rencana pengembangan	2 dokumen		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANAERAH	dokumen kajian dalam bentuk saran tindak dan rencana pengembangan	2 dokumen	
33	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Jumlah OPD yang mempunyai temuan pengelolaan keuangan dan aset yang tidak material di wilayah IRBAN	100%	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Jumlah OPD yang mempunyai temuan pengelolaan keuangan dan aset yang tidak material di wilayah IRBAN	100%	
					Persentase Jumlah OPD yang mempunyai temuan pengelolaan keuangan dan aset yang tidak material di wilayah IRBAN	100%			Persentase Jumlah OPD yang mempunyai temuan pengelolaan keuangan dan aset yang tidak material di wilayah IRBAN	100%	
					Persentase Meningkatnya nilai SAKIP OPD dengan kategori A di wilayah IRBAN	87.5%			Persentase Meningkatnya nilai SAKIP OPD dengan kategori A di wilayah IRBAN	87.5%	
					Persentase Jumlah OPD yang mencapai Maturitas SPIP pada level 3 di wilayah IRBAN	100%			Persentase Jumlah OPD yang mencapai Maturitas SPIP pada level 3 di wilayah IRBAN	100%	

[illegible]

NO	URUSAN	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM RPJMD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	PROGRAM RKPD	OUTCOME/INDIKATOR	TARGET/SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5		6	7		9
40	URUSAN RUTIN	SEMUA PERANGKAT DAERAH	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	
			2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	
			3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	
			4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	
			5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan	100%	5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pengelolaan keuangan	100%	
JUMLAH									

Koba, Juni 2020
Kepala Bappeditbangda Kabupaten Bangka Tengah,

drg. MUHAMMAD ANAS MA'RUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670308 199903 1 002

**PEMETAAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN**

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	BIDANG PENDIDIKAN		BIDANG PENDIDIKAN			
I	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase APK PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan		Persentase APK PAUD	
1	Sosialisasi Akreditasi PAUD dan Dikmas	Jumlah Lembaga yang mengikuti sosialisasi	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi PAUD	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	
2	Bantuan biaya operasional pendidikan (BOP) PAUD	Jumlah anak yang mendapat bantuan operasional	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	
3	Lomba membuat APE	Jumlah Guru PAUD yang Ikut Lomba	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	
4	Peningkatan kompetensi bagi pendidik PAUD	Jumlah pendidik yang ikut kompetensi	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidik PAUD	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	
5	Pengadaan APE PAUD Outdoor	Jumlah lembaga yang mendapat pengadaan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	
6	Sinkronisasi dan optimalisasi fungsi HIMPAUDI	Jumlah guru yang mengikuti sinkronisasi	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	
7	Safeguarding BOP PAUD DIKMAS	Jumlah Sekolah yang menerima BOP	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	
8	Pengadaan APE Indoor	Jumlah lembaga yang menerima bantuan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	
9	Pembangunan RKB TK Pelita Hati Sungaiselan	Luasan RKB yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Ruang Kelas PAUD	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	
10	Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD Ar-ridho	Jumlah ruang yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	
11	BOP PAUD (DAK NON FISIK)	Jumlah siswa yang mendapat BOP PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
II	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	Program Pengelolaan Pendidikan		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI + Paket A			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI + Paket A	
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI + Paket A	
		Rasio Guru Siswa per Sekolah Jenjang SD/MI			Rasio Guru Siswa per Sekolah Jenjang SD/MI	
		Rasio Guru Siswa per Kelas Jenjang SD/MI			Rasio Guru Siswa per Kelas Jenjang SD/MI	
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs + Paket B			Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs + Paket B	
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B			Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs + Paket B	
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	
		Rasio Guru Siswa per Sekolah Jenjang SMP/MTs			Rasio Guru Siswa per Sekolah Jenjang SMP/MTs	
		Rasio Guru Siswa per Kelas Jenjang SMP/MTs			Rasio Guru Siswa per Kelas Jenjang SMP/MTs	
1	Pembangunan Pagar Depan SDN 23 Sungaiselan	Jumlah luasan pagar yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
2	Pembangunan Pagar SDN 8 Pangkalanbaru	Jumlah luasan pagar yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
3	Safeguarding Tim Manajemen BOS SD dan SMP	Safeguarding tim manajemen BOS SD dan SMP	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
4	Olimpide Sains Nasional (OSN) SD/MI	Jumlah siswa yang ikut lomba	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
5	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI	Jumlah siswa yang ikut lomba	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
6	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI	Jumlah siswa yang ikut lomba	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
7	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan K13, PIP, Bansos dan Banpem jenjang SD	Jumlah SD yang dimonev	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
8	Pengembangan kompetensi guru untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif	Jumlah guru SD, SMP Inklusif yang ikut pengembangan kompetensi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
9	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI	Jumlah siswa yang mendapat dana bos	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
10	Pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi SD	Jumlah siswa berprestasi yang mendapat penghargaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
11	Pengadaan Meubelair jenjang SD	Jumlah unit meubelair yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan meubelair sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
12	Monitoring Pembelajaran SMP	Jumlah SMP yang dimonev	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
13	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Jumlah Siswa yang ikut OSN SMP	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
14	Gala Siswa SMP/MTs	Jumlah Siswa yang ikut Gala Siswa SMP/MTs	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
15	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah Siswa yang ikut O2SN SMP	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
16	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Siswa yang ikut FLS2N SMP	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
17	Pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi jenjang SMP	Jumlah siswa yang menerima penghargaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
18	Penyuluhan hukum jenjang SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti penyuluhan hukum	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
19	Pembangunan RKB SMPN 3 pangkalanbaru	Jumlah RKB SMP yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
20	BOS SMP/MTs	Jumlah siswa yang mendapat dana BOS	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
21	Pembangunan Pagar SDN 1 Pangkalanbaru	Jumlah luasan pagar yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
22	Pembangunan Pagar SDN 7 Pangkalanbaru	Jumlah luasan pagar yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
23	Pembangunan Pagar SDN 7 Koba	Jumlah luasan pagar yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
24	Pengadaan Sarana Air Bersih SMPN 2 Namang	Jumlah paket pengadaan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
25	Pembangunan Pagar SDN 2 Sungaiselan	Jumlah luasan pagar yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
26	Pembangunan Pagar SDN 6 Simpangkatis	Jumlah luasan pagar yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
27	Pemberian Bantuan Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP	Jumlah siswa yang mendapat beasiswa miskin	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
28	Pemberian Bantuan Bagi Siswa Miskin Jenjang SD	Jumlah siswa yang mendapat beasiswa miskin	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
29	BOS SD (APBN)	Jumlah siswa yang menerima dana BOS SD	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
30	BOS SMP (APBN)	Jumlah siswa yang menerima dana BOS SMP	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
31	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SD (DAK)	Jumlah ruang kelas yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
32	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SD (DAK)	Jumlah ruang perpustakaan yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
33	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya SD (DAK)	Jumlah ruang guru yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
34	Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya SD (DAK)	Jumlah ruang jamban yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
35	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya SD (DAK)	Jumlah ruang kelas yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
36	Pembangunan (Toilet) jamban siswa/guru beserta sanitasinya SD (DAK)	Jumlah ruang jamban yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
37	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif beserta perabotnya SD (DAK)	Jumlah ruang inklusi yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
38	Pembangunan ruang guru beserta perabotnya SD (DAK)	Jumlah ruang guru yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
39	pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SD (DAK)	Jumlah ruang UKS yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
40	Pengadaan buku koleksi perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik) SD (DAK)	Jumlah buku koleksi yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
41	Pengadaan peralatan PJOK SD (DAK)	Jumlah paket PJOK yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
42	Pengadaan peralatan seni budaya SD (DAK)	Jumlah paket peralatan seni yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
43	Pengadaan peralatan pendidikan IPA SD (DAK)	Jumlah paket pendidikan IPA yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
44	Pengadaan peralatan pendidikan IPS SD (DAK)	Jumlah paket pendidikan IPS yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
45	Pengadaan peralatan pendidikan Bahasa Indonesia SD (DAK)	Jumlah paket pendidikan Bahasa yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
46	Pengadaan peralatan pendidikan Matematika SD (DAK)	Jumlah paket pendidikan yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
47	Pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi SD (DAK)	Jumlah paket Teknologi yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
48	Pengadaan media pendidikan SD (DAK)	Jumlah paket pendidikan yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
49	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMP (DAK)	Jumlah ruang kelas yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
50	Rehabilitasi jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya SMP (DAK)	Jumlah ruang jamban yang direhab	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
51	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta Perabotnya SMP (DAK)	Jumlah ruang Kelas yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
52	Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SMP (DAK)	Jumlah ruang Perpustakaan yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
53	Pembangunan Laboratorium Komputer beserta Perabotnya SMP (DAK)	Jumlah ruang Komputer yang dibangun	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
54	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika SMP (DAK)	Jumlah paket peralatan IPA Fisika yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
55	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi SMP (DAK)	Jumlah paket peralatan Ipa Biologi yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
56	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer SMP (DAK)	Jumlah paket peralatan komputer yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
57	Pengadaan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMP (DAK)	Jumlah paket peralatan IPS yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
58	Pengadaan Peralatan PJOK SMP (DAK)	Jumlah paket peralatan PJOK yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
59	Pengadaan Sarana Seni Budaya SMP (DAK)	Jumlah paket Seni Budaya yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
60	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP (DAK)	Jumlah paket Buku Koleksi yang diadakan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
III	Program Pendidikan Non Formal	Menurunnya Persentase Angka Buta Aksara	Program Pengelolaan Pendidikan		Menurunnya Persentase Angka Buta Aksara	
		Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI			Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	
		Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs			Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	
1	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A/B/C	Jumlah lembaga yang ikut ujian	Pengelolaan Pendidikan Non Formal			Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan
2	Apresiasi PTK PAUDNI	Jumlah pendidik yang ikut jambore	Pengelolaan Pendidikan Non Formal	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Non Formal yang dikelola	
3	Pemberian Subsidi atau Insentif Tutor Kesetaraan dan Keaksaraan	Jumlah tutor yang mendapat insentif				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan
4	Penyediaan Pojok Baca di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah Pojok Baca yang tersedia	Pengelolaan Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal	Jumlah Pendidikan Non Formal yang dikelola	
5	Pendataan Penduduk Usia Sekolah dan penduduk diluar usia sekolah yang Putus sekolah Jenjang SD, SMP, SMA untuk sasaran Program Paket A,B dan C, dan keaksaraan	Jumlah Desa yang didata				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan untuk mendukung IKU
IV	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru dengan kualifikasi S-1/D4 SD/MI	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Persentase Guru dengan kualifikasi S-1/D4 SD/MI	
		Persentase Guru dengan kualifikasi S-1/D4 SMP/MTs	Program Pengembangan Kurikulum		Persentase Guru dengan kualifikasi S-1/D4 SMP/MTs	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
		Persentase Guru bersertifikat SD/MI	Program Pengelolaan Pendidikan		Persentase Guru bersertifikat SD/MI	
		Persentase Guru bersertifikat SMP/MTs			Persentase Guru bersertifikat SMP/MTs	
1	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Guru, pegawai dan kepala sekolah berprestasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
2	Pelaksanaan Sosialisasi sertifikasi pendidik	Jumlah guru yang ikut sertifikasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
3	Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (Inpassing) berdasarkan Permenpan 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru	Jumlah Guru yang mengusulkan penyesuaian angka kredit	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
4	Sinkronisasi pendataan, penyusunan profil pendidikan dan penyusunan SPM	Jumlah Laporan data profil dan SPM	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
5	Diklat Guru Pembelajaran	Jumlah guru yang ikut diklat uji kompetensi guru/post test	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
6	Diklat Calon Kepala Sekolah TK, SD dan SMP	Jumlah kepala sekolah SD dan SMP yang ikut diklat	Pengelolaan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
7	Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ)	Jumlah guru yang ikut PPGDJ	Pengelolaan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
8	Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) TK, SD dan SMP	Jumlah Honor GTT dan PTT				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan
9	Workshop KKG SD	Jumlah gugus yang mengikuti KKG SD	Pengelolaan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
10	Workshop MGMP SMP	Jumlah MGMP	Pengelolaan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
11	Pelatihan Pengembangan Model Pembelajaran dan Penilaian K13	Jumlah Guru yang ikut Pelatihan	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
12	Tambahan Penghasilan Guru SD/MI Non PNS	Jumlah guru Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan
13	Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SD/MI Non PNS	Jumlah tenaga kependidikan Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan
14	Tambahan Penghasilan Guru SMP/MTs Non PNS	Jumlah guru Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan
15	Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan SMP/MTs Non PNS	Jumlah tenaga kependidikan Non PNS yang mendapat tambahan penghasilan				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan
16	Tambahan Penghasilan Guru dan Tenaga Kependidikan SD/MI dan SMP/MTs Sekolah Swasta	Jumlah guru dan tenaga kependidikan SD/MI dan SMP/MTs yang mendapat penghasilan				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan
17	Pemberian subsidi atau insentif guru PAUD	Jumlah pendidik yang mendapat subsidi dan insentif				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan
V	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Program Pengelolaan Pendidikan		Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	
		Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs			Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	
		Persentase Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs			Persentase Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	
		Persentase SD berakreditasi Minimal B			Persentase SD berakreditasi Minimal B	
		Persentase SMP berakreditasi Minimal B			Persentase SMP berakreditasi Minimal B	
1	Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional (UN) SMP/MTs	Jumlah siswa yang ikut try out UN SMP/MTs	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
2	Pelaksanaan UASBN SMP	Siswa SMP se Batang	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
3	Pelaksanaan Ujian Sekolah Bestandar Nasional (USBN) SD/MI, UAS dan UAS Agama	Jumlah siswa yang ikut USBN dan UAS SD/MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
4	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP/MTs	Jumlah siswa yang ikut UN SMP/MTs	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
5	Penyusunan soal USBN, UAS dan Koreksi Jawaban Essay USBN jenjang SD/MI	Jumlah guru yang menyusun soal USBN, UAS dan Koreksi Jawaban Essay SD/MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
6	Bedah kisi- kisi USBN SD/MI	Jumlah guru yang ikut bedah kisi-kisi USBN SD/MI	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	
7	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional)	Angka Kredit Guru se-Bateng	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
8	Akreditasi sekolah oleh BAS (unit pelaksana akreditasi sekolah/tim independen/bas)	Jumlah sekolah yang ikut akreditasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Dewan Pendidikan dengan Komite Sekolah	Jumlah sekolah yang ikut koordinasi				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan
10	Biaya Operasional Perahu Pulau Nangka	Jumlah biaya operasional yang mendapat bantuan				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan
11	Penyebarluasan informasi dalam penyelenggaraan pendidikan	Jumlah kali informasi yang disebarluaskan				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan
12	Peningkatan Kapasitas Koordinator Wilayah	Jumlah korwil yang mendapat operasional				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan
13	Manajemen dan Sosialisasi Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi manajemen pelaksanaan DAK	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola	
14	Beasiswa Utusan Daerah	Jumlah siswa yang mendapat beasiswa				Tidak ada di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tapi Sudah ada di Renstra Dinas Pendidikan

FORMAT PEMETAAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KESEHATAN

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN(1.02.04)		
1	Pemusnahan Obat-obatan dan perbekalan kesehatan				
2	Distribusi Obat dan e Logistik		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (1.02.02.1.01.21)		
3	Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Kesehatan		DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (2.2.1.01.03.14)		
4	Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Kesehatan Tertentu		pengadaan obat, vaksin (1.02.02.2.01.16)		
			pengadaan barang habis pakai (1.02.02.2.01.17)		
5	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (1.02.02.1.01.21)		
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)		pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.01.13)		
7	Rehab Gedung Instalasi Farmasi Kabupaten (DAK)		Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas kesehatan lainnya (1.02.02.2.01.10)		
8	Biaya Operasional UPT Instalasi Farmasi		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (1.02.02.1.01.21)		
9	Pengawasan Obat dan Kosmetik yang Beredar		pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro, obat tradisional (1.02.04.2.01.01)		

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
10	Peningkatan SDM Dalam Penggunaan Obat Rasional		penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (1.02.03.2.02.03)		
11	Pertemuan Penyusunan Daftar Formularium dan RKO		operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (1.02.02.2.02.34)		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (1.02.02)		
12	Pengadaan Peralatan Upaya Kesehatan Masyarakat		Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.01.12)		
13	Pengadaan Buku KMS Anak Sekolah Dasar (Raport Kesehatanku)		pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (1.02.02.2.02.05)		
14	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pemilihan Petugas Kesehatan Teladan)		peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan (1.02.03.2.04.01)		
15	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut		pengelolaan upaya kesehatan khusus (1.02.02.2.02.23)		
16	Screening Anak Sekolah		pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (1.02.02.2.02.05)		
17	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Pengadaan Sarana Kelas Ibu)		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak (1.02.02.1.02.03)		
18	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Peningkatan Kompetensi Petugas Kesehatan)		penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (1.02.03.2.02.03)		
19	Peningkatan Kesehatan Masyarakat (P3K dan Pengobatan Gratis pada Hari-Hari Tertentu)		pengelolaan upaya kesehatan khusus (1.02.02.2.02.23)		
20	Peningkatan Perawatan Kesehatan Bagi Masyarakat (Perkesmas)		pengelolaan upaya kesehatan khusus (1.02.02.2.02.23)		
21	Peningkatan Program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)		pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (1.02.02.2.02.05)		
22	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
23	Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Koba (DAK)		Operasional pelayanan puskesmas (1.02.02.2.02.33)		
24	Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Pangkalan Baru (DAK)		Operasional pelayanan puskesmas (1.02.02.2.02.33)		

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
25	Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Benteng (DAK)		Operasional pelayanan puskesmas (1.02.02.2.02.33)		
26	Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Simpang Katis (DAK)		Operasional pelayanan puskesmas (1.02.02.2.02.33)		
27	Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Sungaiselan (DAK)		Operasional pelayanan puskesmas (1.02.02.2.02.33)		
28	Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Lubuk Besar (DAK)		Operasional pelayanan puskesmas (1.02.02.2.02.33)		
29	Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Namang (DAK)		Operasional pelayanan puskesmas (1.02.02.2.02.33)		
30	Bantuan Operasional Kesehatan/BOK Puskesmas Lampur (DAK)		Operasional pelayanan puskesmas (1.02.02.2.02.33)		
31	Bantuan Operasional Kesehatan / BOK Puskesmas Perlang (DAK)		Operasional pelayanan puskesmas (1.02.02.2.02.33)		
32	Dukungan Manajemen Pengelolaan BOK di Kabupaten (DAK)				
33	Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Koba				
34	Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pangkalan Baru				
35	Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Benteng				
36	Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Simpang Katis				
37	Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sungaiselan				
38	Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lubuk Besar				
39	Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Namang				
40	Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Lampur				

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
41	Penyelenggaraan Dukungan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Perlang				
42	Pelayanan Kesehatan Mata Bagi Masyarakat		pengelolaan upaya kesehatan khusus (1.02.02.2.02.23)		
43	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah				
44	Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya (BPJS)		Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (1.02.02.1.02.16)		
45	Sosialisasi PSC		penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) (1.02.02.1.02.23)		
46	Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Eselon		pengelolaan upaya kesehatan khusus (1.02.02.2.02.23)		
47	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu		penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) (1.02.02.1.02.23)		
48	Pelatihan Pelayanan Prima				
49	Pelatihan BTCLS untuk perawat				
50	Peningkatan Kompetensi Petugas Kesehatan (RSUD)				
51	Pembinaan Kesehatan Tradisional		Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya		
52	Layanan Rumah Singgah		Pengelolaan rujukan dan rujuk balik (1.02.02.1.02.24)		
53	Pengadaan Reagensia		Pengadaan Bahan Habis pakai (1.02.02.2.01.17)		
54	Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga		Pengelolaan pelayanan kesehtan tradisional, akupunktur asuhan mandiri dan tradisional lainnya (
55	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas		pengadaan alat ksehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.01.14)		
56	Akselerasi UKS		pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (1.02.02.2.02.05)		

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Pengelolaan Pelayanan promosi kesehatan (1.02.02.2.02.18) (kegiatan)		
57	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten		pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (1.02.02.2.02.05)		
58	Integrasi Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas		Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA (1.02.02.2.02.01.22)		
59	Peningkatan PHBS melalui Pemberdayaan Masyarakat (Dana Cukai Rokok)		Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan(1.02.02.2.02.17)		
60	Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)		pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (1.02.02.2.02.05)		
61	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komunitas (Yankestradkom)		Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya		
62	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Promosi Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga (1.02.02.2.02.15)		
63	Lomba Dokter Kecil		pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (1.02.02.2.02.05)		
64	Survey PHBS		Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan(1.02.02.2.02.17)		
65	Sosialisasi Perda Kesehatan				
66	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan				
68	Pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan (DAK)		pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (1.02.02.2.02.18)		
69	Peningkatan & Pembinaan Pelayanan Terpadu (Posyandu)		pengelolaan upaya kesehatan khusus (1.02.02.2.02.23)		
70	Pembentukan Pos UKK		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga (1.02.02.2.02.15)		
71	Forum K3 Kabupaten (Pembentukan)		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga (1.02.02.2.02.15)		
72	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan Tentang K3		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olahraga (1.02.02.2.02.15)		

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
73	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat		pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (1.02.02.2.02.18)		
74	Desa Percontohan Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga		pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (1.02.02.2.02.18)		
75	Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga		pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (1.02.02.2.02.18)		
76	Pengadaan Alat Pengolah Data Program IS		pengelolaan pelayanan promosi kesehatan (1.02.02.2.02.18)		
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				
77	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan		pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota (1.02.02.2.02.35)		
78	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan		pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota (1.02.02.2.02.35)		
79	Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Pelayanan Kesehatan		pengelolaan data dan informasi kesehatan (1.02.02.2.03.01)		
80	Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan (SIKDA)		pengelolaan sistem informasi kesehatan (1.02.02.2.03.02)		
			pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet (1.02.02.2.03.03)		
81	Peningkatan pengelolaan anggaran dan aset daerah bidang kesehatan		pengelolaan sistem informasi kesehatan (1.02.02.2.03.02)		
82	Pembentukan Puskesmas BLUD				
	Program Peningkatan Kesehatan Lansia		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (1.02.02)		
83	Pelatihan pelayanan Kesehatan Lansia dan Geriatri bagi Puskesmas		penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		
84	Peningkatan Kesehatan Lansia		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut (1.02.02.2.02.07)		
85	Lomba Senam Lansia		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut (1.02.02.2.02.07)		

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat				
86	Penanggulangan Gizi Bermasalah		Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat (1.02.02.2.02.15)		
87	Revitalisasi UKBM (Penunjang Kegiatan Pelayanan Posyandu)		Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat (1.02.02.2.02.15)		
88	Peningkatan Pemberian Asi Eksklusif		Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat (1.02.02.2.02.15)		
89	Pengadaan sarana dan prasarana Ruang Laktasi		Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat (1.02.02.2.02.15)		
90	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Tata Laksana Gizi Buruk		Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat (1.02.02.2.02.15)		
91	Peningkatan kapasitas petugas kesehatan pemberian makan bayi & balita		Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat (1.02.02.2.02.15)		
92	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)		Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat (1.02.02.2.02.15)		
93	Pengadaan Antropometri		Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat (1.02.02.2.02.15)		
94	penanggulangan stunting		Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat (1.02.02.2.02.15)		
95	Koordinasi LS dan LP tentang Kampanye 1000 HPK		Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat (1.02.02.2.02.15)		
96	Edukasi Fe Pada Bumil dan Remaja Putri		Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat (1.02.02.2.02.15)		
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Pengelolaan pelayanan gizi masyarakat (1.02.02.2.02.15)		
97	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di Desa		Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan(1.02.02.2.02.17)		
98	Pengawasan Hygiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)		Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan(1.02.02.2.02.17)		
99	Pengambilan, Pemeriksaan, Perbaikan Sampel Air Sumur Gali serta Pengawasan AMDK dan Depot Air Minum		Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan(1.02.02.2.02.17)		

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
100	Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Lingkungan		Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan(1.02.02.2.02.17)		
101	Pemantauan Risiko Kesehatan Lingkungan		Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan(1.02.02.2.02.17)		
102	Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan (Inspeksi Sanitasi) Rumah Sakit				
103	Pengembangan Kabupaten Sehat		penyelenggaraan kabupaten sehat (1.02.02.2.02.29)		
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi (1.02.02.2.02.08)		
	Pelayanan dan penanggulangan penyakit Diabetes Militus(DM)		Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes (1.02.02.2.02.09)		
104	Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Hepatitis		pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (1.02.02.1.02.11)		
105	Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular		pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (1.02.02.1.02.11)		
106	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (kesehatan jiwa)		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (1.02.02.2.02.01.10)		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) 1.02.02.2.02.01.21)		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA (1.02.02.2.02.01.22)		
107	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Penanggulangan penyakit diare)		pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (1.02.02.1.02.11)		
108	Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk (Dana Cukai Rokok)		upaya pengurangan resiko krisis kesehatan (1.02.02.1.02.26)		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)(1.02.02.2.02.01.13)		
109	Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah		pengelolaan surveilans kesehatan (1.02.02.2.02.20)		
110	Pelayanan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Penyakit HIV/AIDS)		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (1.02.02.2.02.01.12)		

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
111	Penanggulangan penyakit TB Paru		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (1.02.02.2.02.01.11)		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana (1.02.02.2.02.01.14)		
112	Penanggulangan Penyakit Malaria		upaya pengurangan resiko krisis kesehatan (1.02.02.1.02.26)		
113	Pelayanan Pemeriksaan dan Kesehatan Haji		pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (1.02.02.1.02.11)		
114	Penanggulangan Penyakit Filariasis		upaya pengurangan resiko krisis kesehatan (1.02.02.1.02.26)		
115	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah		Pengelolaan surveilans kesehatan (1.02.02.2.02.20)		
116	Penemuan Penyakit Kusta		upaya pengurangan resiko krisis kesehatan (1.02.02.1.02.26)		
117	Pelayanan Kesehatan Matra		pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (1.02.02.1.02.11)		
118	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Produktif (1.02.02.2.02.06)		
119	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan (ISP)		pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular (1.02.02.1.02.11)		
	Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita				
120	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam MTBM/MTBS		pengelolaan pelayanan balita (1.02.02.2.02.04)		
121	Lomba Balita Sejahtera Indonesia (LBSI)		pengelolaan pelayanan balita (1.02.02.2.02.04)		
122	Pembinaan kesehatan anak melalui SDIDTK		pengelolaan pelayanan balita (1.02.02.2.02.04)		
123	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam SDIDTK		pengelolaan pelayanan balita (1.02.02.2.02.04)		
	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan makanan		pengelolaan pelayanan balita (1.02.02.2.02.04)		

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
124	Pembinaan dan pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P)		pengelolaan pelayanan balita (1.02.02.2.02.04)		
125	Pengambilan dan pemeriksaan sampel bahan tambahan pangan pada makanan		pengelolaan pelayanan balita (1.02.02.2.02.04)		
126	Peningkatan SDM Penjamah Makanan di TPM (Tempat Pengelolaan Makanan)		pengelolaan pelayanan balita (1.02.02.2.02.04)		
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				
127	Bimtek Pelayanan Kesehatan keluarga		penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (1.02.03.2.02.03)		
128	orientasi surveylen kematian maternal neonatal		pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (1.02.02.2.02.03)		
129	Orientasi PKPR dan menejemen terpadu pelayanan kesehatan remaja		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Produktif (1.02.02.2.02.06)		
130	Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil (1.02.02.2.02.01)		
131	Pertemuan RMP (Review Maternal Perinatal)		pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil (1.02.02.2.02.01)		
132	Pelacakan kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita		pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (1.02.02.2.02.03)		
133	Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam Manajemen Penanganan Asfiksia dan BBLR		pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (1.02.02.2.02.03)		
134	Penyediaan biaya Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (DAK)		operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya (1.02.02.2.02.34)		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
135	Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam Pelayanan Kesehatan		penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
136	Kemitraan Bidan dan Dukun		Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat		

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
137	Pertemuan Program Kesehatan Anak		penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (1.02.03.2.02.03)		
138	Orientasi Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak (1.02.02.1.02.03)		
139	Orientasi SN PKPR		Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia Produktif (1.02.02.2.02.06)		
140	Orientasi P4K untuk TOMA & KADER				
141	Pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak (1.02.02.1.02.03)		
142	Jaminan Persalinan (Jampersal)		Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat (1.02.02.1.02.16)		
143	Orientasi Tenaga kesehatan Dalam Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak (1.02.02.1.02.03)		
144	Pengadaan Peralatan Kesehatan Ibu dan Anak		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak (1.02.02.1.02.03)		
145	Supervisi Fasilitatif		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak (1.02.02.1.02.03)		
146	Pelatihan PPGD ON		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak (1.02.02.1.02.03)		
147	Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak (1.02.02.1.02.03)		
148	Pengadaan Alat Deteksi Ibu Hamil		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan anak (1.02.02.1.02.03)		
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				
149	Peningkatan SDM dalam penggunaan obat rasional		penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan (1.02.03.2.02.03)		
150	Pembangunan Puskesmas		Pembangunan Puskesmas (1.02.02.2.01.02)		

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
151	Pembangunan Gedung Puskesmas (Tambahan)		Pengembangan Puskesmas (1.02.02.2.01.06)		
152	Pembangunan Pagar Puskesmas		Pengembangan Puskesmas (1.02.02.2.01.06)		
153	Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan		Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya (1.02.02.2.01.03)		
154	Pengadaan Alat Penunjang Pelayanan Kesehatan Puskesmas		pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.01.14)		
155	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas		pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		
156	Rehab Berat/Ringan Puskesmas Pembantu		Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas kesehatan lainnya (1.02.02.2.01.10)		
157	Rehab berat/ringan Poskesdes		Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas kesehatan lainnya (1.02.02.2.01.10)		
158	Rehab berat/ringan Puskesmas		Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas		
159	Pembangunan Poskesdes		Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya (1.02.02.2.01.03)		
160	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Puskesmas		Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya (1.02.02.2.01.03)		
161	Pembangunan Rumah Sakit Pratama		Pembangunan Rumah Sakit (1.02.02.2.01.05)		
162	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Puskesmas		Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas kesehatan lainnya (1.02.02.2.01.10)		
163	Pembangunan Pagar Poskesdes		Pengembangan Puskesmas (1.02.02.2.01.06)		
	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.01.12)		
			pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.01.13)		
164	Pengadaan Alat Kalibrasi		pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi (1.02.02.2.01.15)		

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
165	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit				
166	Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit		pengadaan alat ksehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.01.14)		
167	Pengadaan Bahan-bahan logistik Rumah Sakit				
168	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Pratama		pengadaan alat ksehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.01.14)		
169	Pembangunan gedung Fisioterapi		Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya (1.02.02.2.01.03)		
170	Pembangunan Gedung PICU/ICU		Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya (1.02.02.2.01.03)		
171	Rehab Selasar		Rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas kesehatan lainnya (1.02.02.2.01.10)		
172	Pembangunan Rumah Dinas RSUD		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (1.02.02.2.01.04)		
173	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua		pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.01.13)		
174	Pengadaan Genset		pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.01.13)		
175	Pengadaan Kalibrasi Alat		pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi (1.02.02.2.01.15)		
176	Pembangunan Jalan Rumah Sakit		pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.01.13)		
177	Pembangunan Parkir RS		pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.01.13)		
178	Pengadaan Workshop				
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit				
179	Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah Sakit				

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
180	Pemeliharaan ritin/ berkala instalasi pengolahan Limbah RS				
181	Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan RS				
182	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan				
183	Kemitraan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan non medis				
184	Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Koba				
185	Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Pangkalan Baru				
186	Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Benteng				
187	Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Sungaiselan				
188	Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Simpang Katis				
189	Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Lubuk Besar				
190	Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Namang				
191	Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Lampur				
192	Penyediaan Jasa Kapitasi Asuransi Kesehatan Puskesmas Perlang				
193	Penyediaan Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Koba				
194	Penyediaan Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pangkalan Baru				
195	Penyediaan Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Benteng				

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
196	Penyediaan Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sungaiselan				
197	Penyediaan Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Simpang Katis				
198	Penyediaan Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lubuk Besar				
199	Penyediaan Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Namang				
200	Penyediaan Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lampur				
201	Penyediaan Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Perlang				
202	Patient Safety Center (PSC)		penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) (1.02.02.1.02.23)		
203	Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan				
204	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
205	Penyediaan jasa administrasi keuangan (RSUD)				
206	Penyediaan jasa kebersihan kantor (RSUD)				
207	Penyediaan makanan dan minuman (RSUD)				
208	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (RSUD)				
209	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik				
210	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				
211	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
212	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				
213	Penyediaan Alat Tulis Kantor				
214	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik (RSUD)				
215	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
216	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
217	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
218	Penyediaan Makanan dan Minuman				
219	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				
220	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (RSUD)				
221	Penyediaan Jasa Keamanan RSUD				
222	Koordinasi Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah ke Desa/ Kelurahan/ Kecamatan				
223	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Poskesdes				
224	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (RSUD)				
225	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional (RSUD)				
226	Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Roda Dua				
227	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
228	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				
229	Pengadaan Meubelair				
230	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas Oprasional		pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan (1.02.02.2.01.18)		
231	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor				
232	Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas				
233	Rekonsiliasi Asset dan Sarana Prasarana				
234	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas				
235	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				
236	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				
237	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				
238	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu				
239	Pengadaan Baju Batik Cual				
240	Pengadaan Pakaian Daerah untuk pejabat eselon II				
241	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				
242	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu (RSUD)				
243	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya/ pengadaan Baju Batik Cual				

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
244	Pengadaan Baju PSL untuk pejabat Eselon II				
245	Pengadaan Baju PSR untuk Pejabat eselon IIIa				
246	Pembinaan Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil				
247	Pembinaan Dokter dan Perawat				
248	Perekrutan Tenaga Kesehatan PTT				
249	Peningkatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan				
250	Renovasi Puskesmas				
251	Pengembangan Puskesmas Santun Usila				
252	Pengembangan Puskesmas Ramah Anak				
253	Kalibrasi Alat Kesehatan				
254	Pengadaan Alat Kesehatan Teniker Gigi				
255	Pembangunan Rumah Dinas Medis				
256	Pembangunan Rumah Dinas Paramedis				
257	Pendidikan dan Pelatihan formal (RSUD)				
258	Pendidikan dan Pelatihan Formal				
259	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				

RENSTRA PERANGKA DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN /PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
260	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD				
261	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran				
262	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun				

PEMETAAN URUSAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	RENSTRA DIPERKIMHUB 2016-2021		PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan yang terbangun/tertata				
1	Penyusunan Rencana Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Jumlah perencanaan revitalisasi kawasan permukiman kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	
2	Penyusunan Rencana Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah perencanaan revitalisasi kawasan permukiman kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Sub-kegiatannya sama dengan RP2KPKP
3	Penyusunan Baseline Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen yang tersusun	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Sub-kegiatan pada Permendagri 90/2019 kurang spesifik bila dibandingkan dengan kegiatan Renstra
4	Penyusunan BOP Revitalisasi Permukiman Kumuh	Jumlah BOP Revitalisasi Permukiman Kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Sub-kegiatan pada Permendagri 90/2019 kurang spesifik bila dibandingkan dengan kegiatan Renstra
	Revitalisasi Permukiman Kumuh Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah BOP Revitalisasi Permukiman Kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Sub-kegiatan pada Permendagri 90/2019 kurang spesifik bila dibandingkan dengan kegiatan Renstra
5	Pembebasan Lahan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah lahan kawasan permukiman kumuh yang dibebaskan				Sub-kegiatan yang ada pada Permendagri 90/2019 hanya Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
6	Pembangunan Rumah Relokasi Permukiman Kumuh	Jumlah rumah relokasi dan PSU	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Dapat menggunakan 2 (dua) kegiatan yang lebih detail
					Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NO	RENSTRA DIPERKIMHUB 2016-2021		PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	
7	Relokasi Perumahan Penduduk di Bibir Pantai	Jumlah kegiatan relokasi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	
					Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
8	Penataan Perumahan Kawasan Kumuh	Tersedianya rumah dan PSU yang layak	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
					Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	
					Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
9	Pembangunan Rumah Layak Huni Kawasan Kumuh	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
					Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
10	Pembangunan PSU Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah rumah relokasi dan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
11	Pembangunan PSU Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah PSU yang dibangun	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
12	Pematangan Lahan Kawasan Permukiman	Jumlah lahan kawasan permukiman yang disiapkan				Sub-kegiatan pada Permendagri 90/2019 yang ada hanya Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
						Sub-kegiatan lain pada yang tersedia pada Permendagri 90/2019 adalah Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana . Jadi, sejauh ini sub-kegiatan yang hampir sesuai adalah sbb (kolom di kiri). RLH tsb ditujukan kepada Masyarakat Miskin atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
13	Pembangunan Rumah Layak Huni	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	

NO	RENSTRA DIPERKIMHUB 2016-2021		PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	
14	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah peraturan yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman yang disusun/dibuat				Sub-kegiatan lain pada Permendagri 90/2019 yang tersedia adalah Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh . Namun, dirasa tidak sesuai.
15	Pembangunan Drainase Perumahan	Jumlah drainase perumahan yang terbangun	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
16	Pembangunan Drainase Perumahan Relokasi	Jumlah drainase perumahan yang terbangun	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Secara umum, juga dapat menggunakan sub-kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian .
17	Pembangunan Drainase Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah drainase perumahan yang terbangun	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Secara umum, juga dapat menggunakan sub-kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian .
18	Peningkatan Jalan Perumahan	Panjang jalan yang dibangun	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
19	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah koordinasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dapat menggunakan 2 (dua) sub-kegiatan, tergantung tujuan pelaksanaan koordinasi. Selain itu, terdapat 2 (dua) sub-kegiatan lain yang dapat digunakan sesuai konteks, yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh ; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
		Jumlah objek	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Sama seperti kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dapat menggunakan 2 (dua) sub-kegiatan, tergantung tujuan pelaksanaan koordinasi. Selain itu, terdapat 2 (dua)

NO	RENSTRA DIPERKIMHUB 2016-2021		PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	
20	Pengawasan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman	Jumlah objek pengendalian yang dilaksanakan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Koordinasi. Selain itu, terdapat 2 (dua) sub-kegiatan lain yang dapat digunakan sesuai konteks, yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh ; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
21	Pengumpulan dan Updating Database Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah database bidang perumahan dan kawasan permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Sub-kegiatan pendataan ini terlalu spesifik (menyesuaikan SPM) dan hanya berkuat pada pendataan rumah di lokasi rawan bencana dan pendataan rumah yang terkena relokasi
22	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Jumlah dokumen penyusunan RP3KP	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Sub-kegiatan pada Permendagri 90/2019 terlalu spesifik (permukiman kumuh)
23	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Jumlah dokumen penyusunan RP2KPKP	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Sub-kegiatannya sama dengan sub-kegiatan pada kegiatan Penyusunan Rencana Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh
24	Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Jumlah pelaksanaan pendampingan BSPS				Sub-kegiatan lain yang tersedia pada Permendagri 90/2019 adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum . Namun, dirasa tidak sesuai.
	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	Tempat pemakaman umum yang dikelola				
1	Pembangunan P/S Pemakaman	Jumlah areal pemakaman/pekuburan yang ditata/dibangun				Tidak ada padanan sub-kegiatan pada Permendagri 90/2019

NO	RENSTRA DIPERKIMHUB 2016-2021		PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	

URUSAN PERHUBUNGAN						
I	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Persentase dokumen yang ditetapkan sebagai acuan dasar pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan				
1	UKL-UPL Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya UKL/UPL Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub-kegiatan pada Permendagri 90/2019 kurang spesifik bila dibandingkan dengan kegiatan Renstra
2	FS Terminal Tipe C Kecamatan Koba	Tersedianya FS Terminal Tipe C di Kecamatan Koba	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	
3	UKL-UPL Terminal Tipe C Kecamatan Koba	Tersedianya UKL/UPL Terminal Tipe C Kecamatan Koba	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	
4	Penyusunan Dokumen FS dan Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Berikat	Tersedianya FS Pelabuhan Tanjung Berikat	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
5	Survey Investigasi dan Desain Pelabuhan Tanjung Berikat	Tersedianya DED Pelabuhan Tanjung Berikat	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
6	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	Jumlah kebijakan, norma, standar dan prosedur yang disusun				Tidak ada padanan sub-kegiatan pada Permendagri 90/2019
II	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam keadaan baik				
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharanya alat pengujian yang terkalibrasi dan terpelihara	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
2	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
III	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Jumlah kelancaran arus penumpang/barang (Orang/Tahun)				
1	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Berkurangnya tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Belum dapat memastikan sub-kegiatan tsb termasuk dalam teknis kegiatan atau tidak
2	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Tertatanya tempat-tempat pemberhentian angkutan umum yang aman, nyaman, mudah, memadai dan layak				Sub-kegiatan yang hampir mirip pada Permendagri 90/2019 adalah Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota . Namun, dirasa tidak sesuai.
3	Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	Terkelolanya layanan cepat, tepat, murah dan mudah serta pemeliharannya	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan ini merupakan pelayanan angkutan pelajar dan pegawai. Sementara, teknis sub-kegiatan pada Permendagri 90/2019 belum jelas.

NO	RENSTRA DIPERKIMHUB 2016-2021		PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Maksud dari "penyediaan angkutan umum" menimbulkan makna ganda (dapat diartikan penyediaan angkutan secara fisik atau dapat diartikan pelaksanaan operasional angkutan).
4	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan bus. Sementara, teknis sub-kegiatan pada Permendagri 90/2019 belum jelas. Maksud dari "penyediaan angkutan umum" menimbulkan makna ganda (dapat diartikan penyediaan angkutan secara fisik atau dapat diartikan pelaksanaan operasional angkutan).
5	Perijinan di bidang perhubungan	Tersedianya karcis parkir, bus trans, dan bus sekolah serta pakaian petugas parkir				Sub-kegiatan yang hampir mirip pada Permendagri 90/2019 adalah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota . Namun, dirasa tidak sesuai.
6	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Tersosialisasinya pengemudi/peserta lalu lintas dan angkutan				Tidak ada padanan sub-kegiatan pada Permendagri 90/2019
7	Pengamanan Lalu Lintas pada Hari-hari besar Nasional dan Acara tertentu	Terciptanya pengamanan lalu lintas dan angkutan lebaran, natal, tahun baru, hari besar nasional dan keagamaan yang aman, tertib, selamat dan lancar				Tidak ada padanan sub-kegiatan pada Permendagri 90/2019
8	Pelatihan SDM Bidang Perhubungan	Terselenggaranya Pelatihan SDM Bidang Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Teknis sub-kegiatan kurang sesuai dengan teknis kegiatan
9	Kajian dan evaluasi andalalin	Tersedianya data kajian dan evaluasi andalalin	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	
					Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
					Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	
10	Pengadaan Moda Transportasi di Atas Air	Tersedianya sarana pelayanan jasa angkutan di atas air				Sub-kegiatan yang hampir mirip pada Permendagri 90/2019 adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota . Namun, dirasa tidak sesuai.
11	Pengumpulan, updating dan analisis database bidang perhubungan	Tersedianya database bidang perhubungan				Tidak ada padanan sub-kegiatan pada Permendagri 90/2019
IV	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Persentase sarana dan prasarana bidang perhubungan yang dibangun				

NO	RENSTRA DIPERKIMHUB 2016-2021		PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	
1	Pengadaan Papan Nama Jalan	Tersedianya petunjuk/ nama jalan sebagai bahan informasi masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
2	Pembangunan halte bus, taxigedung terminal	Tersedianya sarana pelayanan tempat tunggu angkutan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
3	Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub-kegiatannya sama dengan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
4	Pembangunan Terminal Tipe C Kecamatan Koba	Tersedianya terminal Tipe C di Kecamatan Koba	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan Gedung Terminal	
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Persentase penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas				
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terpasangnya rambu- rambu lalu lintas di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
2	Pengadaan marka jalan	Terpasangnya marka jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
3	Pengadaan pagar pengaman jalan	Terpasangnya pagar pengaman jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
4	Pengadaan Cermin Tikungan	Terpasangnya Cermin Tikungan di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
5	Pengadaan Warning Light	Terpasangnya Warning Light di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
6	Pengadaan Traffic Light	Terpasangnya Traffic Light di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
7	Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Terpasangnya ZoSS di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
8	Pengadaan Penerangan Jalan Umum	Terpasangnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
VI	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	Persentase kendaraan bermotor yang laik jalan				

NO	RENSTRA DIPERKIMHUB 2016-2021		PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN	
1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya kebutuhan alat pengujian kendaraan bermotor	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sub-kegiatannya sama dengan Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
2	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Tersedianya layanan pengujian kendaraan bermotor	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	
					Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
3	Pelaksanaan pas kecil kapal	Terlaksananya pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kapal	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan Atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	

HASIL PEMETAAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
OPD : DINAS PANGAN KAB. BANGKA TENGAH

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN
A	BIDANG URUSAN: WAJIB (KETAHANAN PANGAN)				
I	Program Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita; 2. Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Dalam Permendagri No.90 Tahun 2019 program ketersediaan pangan tidak ada digantikan oleh kabupaten/kota Sub Program: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			Sub Program: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
			Sub Program: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
1	Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah laporan	Kegiatan: Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Skor PPH Ketersediaan	
2	Pendampingan Pengembangan Kawasan Desa Mandiri Pangan	Jumlah kelurahan dan desa mandiri pangan yang dibina			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN
3	Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten	Terbentuknya produk hukum yang mendukung ketahanan pangan daerah			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
			Sub Program :Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
			Kegiatan:		
			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal		
4	Pengadaan cadangan pangan daerah	Tersedianya stok pangan daerah	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya stok pangan daerah	
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		
			Sub Program : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
			Kegiatan:		
			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		
			Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur		
5	Pembangunan gedung sekretariat kelompok desa mandiri pangan	Luas gedung sekretariat	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Luas gedung sekretariat	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik		

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN
			Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan		
II	Program Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan informasi, harga dan akses pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
			Sub Program: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Stabilisasi pasokan dan harga pangan	
	Pengumpulan dan penyediaan data informasi harga, distribusi serta pemantauan ketersediaan pangan	Jumlah data dan informasi harga, distribusi ketersediaan pangan kabupaten	Kegiatan: Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah data dan informasi harga, distribusi ketersediaan pangan kabupaten	
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia		

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN
III	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
			Sub Program: Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		
1	Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah (FSVA) dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Jumlah laporan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		
			Sub Program: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		
2	Penanganan Rawan Pangan	Jumlah Rawan Pangan Ditangani	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
IV	Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Skor PPH	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
			Sub program: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Skor PPH Konsumsi	
1	Pendampingan Pengembangan dan pembinaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP)	Jumlah kelompok P2KP/KRPL yang dibina	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok P2KP/KRPL yang dibina	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun		

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN
2	Lomba cipta menu B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	Jumlah pemenang lomba cipta menu			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
3	Promosi produk pangan lokal tingkat daerah dan nasional	Jumlah peran serta dalam pameran pembangunan dan pameran pangan lokal tingkat daerah dan nasional			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
4	Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah laporan			Skor pola pangan harapan merupakan salah satu target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan yang juga menjadi IKU Kabupaten Bangka Tengah namun dalam Permendagri No.90 Tahun 2019, kegiatan yang mengakomodir kegiatan ini tidak secara implisit merujuk ke Analisis Pola Pangan Harapan namun dialihkan ke Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
5	Penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian (sosialisasi dan pelatihan pengolahan pangan lokal	Jumlah Pelatihan dan Sosialisasi yang dilaksanakan			

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN
6	Sosialisasi, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	Persentase sampel pangan aman konsumsi	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Dalam Renstra Dinas Pangan Tahun 2016-2021 yang mengacu kepada RPJMD Kab Bangka Tengah 2016-2021, Program Pengawasan Keamanan Pangan tidak ada. Kegiatan ini dijadikan satu program dengan Program Penganekaragaman dan Keamanan Pangan dan hanya terdiri atas satu kegiatan terkait keamanan pangan.
			Sub Program: Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
			Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
			Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		
B	BIDANG URUSAN : PILIHAN (PERTANIAN)				
I	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
			Sub Program: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN
	Magang petani	Jumlah petani dan gapoktan yang mengikuti magang			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif	Jumlah gapoktan, petani dan penyuluh serta BPK yang ikut lomba			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
	Pekan Nasional (PENAS) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Jumlah peserta PENAS			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
	Penyusunan Analisis Nilai Tukar Petani	Jumlah data nilai tukar petani			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
	Temu karya petani	Jumlah pelaksanaan temu karya petani			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
	Pelatihan petani	Jumlah Peserta Pelatihan			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
			Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		
II	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Penyuluh Berprestasi			
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh	Luas lahan kaji terap teknologi	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		
	Penyuluhan dan pendampingan (operasional penyuluh)	Jumlah penyuluh dan admin yang mendapat pembiayaan operasional			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
	Penyuluhan dan pendampingan Pertanian	Jumlah penyuluh dan admin yang mendapat pembiayaan operasional			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
	Magang penyuluh	Jumlah penyuluh yang mengikuti magang			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
	Pelatihan tenaga penyuluh	Jumlah penyuluh yang mendapat pelatihan			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN
	Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh	Jumlah Programa Penyuluhan dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
	Temu Teknis Penyuluh Pertanian (Jambore Penyuluh Se-Kabupaten)	Jumlah peserta jambore			Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		
C	URUSAN PERTANIAN YANG MELEKAT DI DINAS PERTANIAN NAMUN DISELENGGARAAN OLEH DINAS PANGAN		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
			Pembangunan Prasarana Pertanian		
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya		Terkait usulan dana DAK Penyuluh Pertanian
D	Program pelayanan administrasi perkantoran		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH		
			Sub Program: Administrasi Umum		
	Penyediaan jasa surat menyurat		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		
	Penyediaan alat tulis kantor		Penyediaan Alat Tulis Kantor		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
	Penyediaan makanan dan minuman		Penyediaan Makanan dan Minuman		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		
	Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Lurah/Kecamatan				
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
	Pembangunan penambahan gedung kantor dinas				Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
	Pembangunan jalan setapak balai penyuluhan			Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		
	Pengadaan peralatan gedung kantor dinas		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		
	Pengadaan meubelair		Pengadaan Mebeleur	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Pembangunan Gedung Kantor BPP (DAK)			Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	
	Pengadaan meubelair BPK (DAK)			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	
	Pengadaan perlengkapan BPK (DAK)				
	Penyediaan Alat Bantu Percontohan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan (DAK)				
	Penyediaan Alat Bantu Penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan (DAK)				

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN
	Penyediaan Prasarana Lingkungan Kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan (DAK)				Tidak diakomodir dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019
	Penyediaan Peralatan Administrasi dan Perkantoran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan (DAK)		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
	Pengadaan tower air, pengeboran dan tangki air BPK (DAK)		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DAK)		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		
	Pembebasan lahan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				
	Program peningkatan disiplin aparatur		Sub program: Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 dilebur ke program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Pendidikan dan pelatihan formal		Pendidikan dan Pelatihan Formal		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Sub Program :Administrasi Keuangan		
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		
			Sub Program :Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		

**FORMAT PEMETAAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
I	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan RKL-RPL	Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Indikator Program : Jumlah Perusahaan yang menyampaikan laporan RKL-RPL.	masalah tentang program atau kegiatan yang tidak tercover di permendagri 90/2019, ada ?
	1 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Indikator Kegiatan : Jumlah Perusahaan yang diawasi	
II	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
	1 Pengkajian dampak lingkungan	Jumlah pengkajian terhadap usaha dan / atau kegiatan masyarakat di bidang lingkungan	Sub Kegiatan : Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	pengkajian terhadap usaha dan / atau kegiatan masyarakat di bidang lingkungan	masalah tentang program atau kegiatan yang tidak tercover di permendagri 90/2019, ada ?
	2 Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah koordinasi penilaian AMDAL di lingkungan Kab. Bateng	Sub Kegiatan : Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah koordinasi penilaian AMDAL di lingkungan Kab. Bateng	
	3 Pengendalian Usaha tanpa Izin (Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Dokumen Lingkungan Hidup)	Jumlah pembinaan ke usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Bangka Tengah	Sub Kegiatan : Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pembinaan ke usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Bangka Tengah	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN	
NO		BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN
	4	Koordinasi Penilaian UKL-UPL	Jumlah koordinasi penilaian UKL-UPL di lingkungan Kab. Bateng	Sub Kegiatan : Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah koordinasi penilaian UKL-UPL di lingkungan Kab. Bateng	
III		Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase tindak lanjut kasus lingkungan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	indikator program : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	
	1	Koordinasi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Daerah	Terlaksananya penegakan kasus pengaduan lingkungan dan sengketa lingkungan hidup	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	indikator program : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan	
IV		Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		
	1	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen KLHS	Kegiatan : Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota Sub kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	indikator program :Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	
	2	Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen RPPLH/PERDA	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	indikator program : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
V	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil pengujian kualitas pencemaran	PROGRAM: PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
	1 Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah titik pantau untuk pengambilan sample air dan udara di sungai di Kab. Bateng			
	2 Pemantauan kualitas Air	Jumlah titik pantau untuk pengambilan sample air	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota SUB KEGIATAN : PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	KETERSEDIAAN INFORMASI STATUS MUTU AIR	
	3 Pemantauan kualitas Udara	Jumlah titik pantau untuk pengambilan sample Udara	SUB KEGIATAN : PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	KETERSEDIAAN INFORMASI STATUS MUTU UDARA	
	4 Pemantauan kualitas Tanah	Jumlah titik pantau untuk pengambilan sample tanah	SUB KEGIATAN : PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	KETERSEDIAAN INFORMASI STATUS MUTU TANAH	
	5 Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air	Jumlah sumber pencemar dan beban pencemar air			
VI	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan dibidang lingkungan hidup			

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
1	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	Jumlah koordinasi penilaian kota sehat / adipura			
2	Koordinasi pengelolaan prokasih / superkasih	Jumlah pembinaan kelompok peduli kali/sungai			
3	Koordinasi penilaian sekolah adiwiyata	Jumlah pembinaan dan pengawasan sekolah adiwiyata	PROGRAM : PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT KEGIATAN : PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN : PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN	
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (Peringatan hari lingkungan hidup)	Jumlah perlombaan dalam perayaan hari lingkungan hidup	PROGRAM : PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG MENDAPATKAN BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
			SUB KEGIATAN : PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN		
VII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil penilaian laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Bangka Tengah oleh Provinsi Kep. Babel			
	1 Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan	Jenis laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kab. Bateng oleh Provinsi Kep. Babel	SUB KEGIATAN : PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	tersedianya Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Bangka Tengah oleh Provinsi Kep. Babel	masalah tentang program atau kegiatan yang tidak tercover di permendagri 90/2019, ada ?
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI	Jumlah parameter yang sesuai SNI	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah parameter yang sesuai Standar Metode	Belum ada kegiatan / Sub kegiatan yang mengakomodir urusan Laboratorium Bidang Lingkungan
	1 Peningkatan operasional laboratorium lingkungan	Jumlah bulan penyediaan jasa analisis laboratorium			Untuk laboratorium Masuk kemana dan Apabila ada penambahan Infrastruktur Bagaimana?
		Jumlah sampel yang diuji dilaboratorium		Jumlah sampel yang diuji dilaboratorium	
	2 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Jumlah pengujian kadar limbah padat			
IX	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah pembangunan RTH publik			

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
1	Pembangunan Taman Rekreasi Ruang Terbuka Hijau (Taman Kehati)	Jumlah pembangunan taman kehati			Untuk RTH di Permendagri 90 itu ada dibawah konservasi, terus kalau RTH yang ada diperkotaan masuk kemana termasuk pembangunan sarana dan prasarananya?
2	Pembangunan Taman Rekreasi Ruang Terbuka Hijau (Taman Hijau)	Jumlah pembangunan taman hijau			
3	Pembangunan RTH Taman Pedindang	Jumlah pembangunan RTH Taman Pedindang			
4	Pembangunan RTH Taman Terentang	Jumlah pembangunan RTH Taman Terentang			
5	Pembangunan Taman Rekreasi Ruang Terbuka Hijau (Taman Hijau) Kolong Beguruh	Jumlah pembangunan RTH Taman Kolong Beguruh			
6	Pembangunan RTH Hutan Kota Koba by Pass	Jumlah pembangunan RTH Hutan Kota Koba by Pass			
7	Pembangunan Taman di TPA	Jumlah pembangunan taman di TPA			
8	Pembangunan MCK RTH Terentang, Kecamatan Koba	Jumlah pembangunan MCK taman			
9	Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan RTH Terentang	Luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan RTH			
10	Penyusunan DED untuk pembangunan RTH di Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah dokumen DED RTH			
11	Penyusunan Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (Hutan Kota)	Jumlah dokumen DED RTH			
12	Penyediaan sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana RTH			
13	Pembebasan lahan untuk Penambahan RTH Perkotaan	Jumlah lokasi untuk pembangunan RTH			

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
X	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola dalam kondisi baik	Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		Untuk RTH di Permendagri 90 itu ada dibawah konservasi, terus kalau RTH yang ada diperkotaan masuk kemana termasuk pembangunan sarana dan
			Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
1	Penanaman pohon hari-hari besar nasional/daerah	Jumlah perayaan hari-hari besar lingkungan			
2	Pemeliharaan taman Keragaman Hayati Namang	Jumlah bulan pemeliharaan Taman Keragaman Hayati Namang			
3	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas bidang RTH	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan tangki air			
4	Penataan RTH Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah lokasi penataan RTH			
5	Pemeliharaan RTH Taman Terentang	Jumlah bulan pemeliharaan RTH Taman Terentang			
6	Pemeliharaan RTH Pantai Kebang Kemilau	Jumlah bulan pemeliharaan RTH taman Kebang Kemilau			
7	Pemeliharaan RTH Taman Bundaran Ikan & Masjid Jamik	Jumlah bulan pemeliharaan RTH Taman Bundaran Ikan & Masjid Jamik			
8	Pemeliharaan RTH Taman Alun-Alun Kota Koba	Jumlah bulan pemeliharaan RTH Alun-Alun Kota Koba			
9	Pemeliharaan RTH Taman Simpang Tanjung Langka, Taman Simpang Jongkong, Sepanjang Jalan By Pass	Jumlah bulan pemeliharaan RTH Taman Tanjung Langka, Taman Simpang Jongkong, Sepanjang Jalan By Pass			Untuk RTH di Permendagri 90 itu ada dibawah konservasi, terus kalau RTH yang ada diperkotaan masuk kemana termasuk pembangunan sarana dan
10	Pemeliharaan Taman Kolong Beguruh	Jumlah bulan pemeliharaan RTH Taman Kolong Beguruh			

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
11	Pemeliharaan RTH Komplek Perkantoran Pemda Bangka Tengah	Jumlah bulan pemeliharaan Komplek Perkantoran			pembangunan sarana dan prasarannya?
12	Pengadaan Kendaraan Roda Enam (Tangki Air)	Jumlah pengadaan mobil truk tangki air			
13	Pemeliharaan Taman di Pasar Modern	Jumlah bulan pemeliharaan taman di Pasar Modern Koba			
14	Pembibitan Tanaman pada Bank Bibit	Jumlah bulan pembibitan tanaman			
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan			
16	Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana taman	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana taman			
17	Pemeliharaan Hutan Kota By Pass	Jumlah bulan pemeliharaan Hutan Kota			
18	Pengadaan Mobil Pick Up Operasional Ruang Terbuka Hijau	Jumlah pengadaan mobil pick up			
19	Penyediaan jasa pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau			
XI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	jumlah lokasi keanekaragaman hayati			
1	Pantai dan laut lestari	Jumlah Pantai yang dilakukan Penanaman			
2	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah lokasi kecamatan tentang penyusunan laporan keanekaragaman hayati di Kabupaten Bangka Tengah			

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	3	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
	4	Identifikasi Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati			
XII	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	Jumlah pengelolaan blok Tahura			
	1	Zonasi areal pengelolaan TAHURA			
	2	Sosialisasi rencana pengelolaan TAHURA			
	3	Inventarisasi penggunaan lahan di lokasi TAHURA			
	4	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata dan jasa lingkungan			
	5	Penyusunan dokumen desain tapak pengelolaan pariwisata alam di Tahura Bukit Mangkol			
	6	Pelatihan Pengelolaan HHBK untuk Daerah Penyangga Tahura			
XIII	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Persentase Rehabilitasi Tahura yang kritis			
	1	Rehabilitasi TAHURA Bukit Mangkol			

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	2	Pemeliharaan Rehabilitasi Kawasan TAHURA Bukit Mangkol			
XIV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN	Jumlah desa disekitar TAHURA yang dilakukan pengamanan			
	1	Perlindungan dan pengamanan TAHURA			
	2	Inventarisasi Potensi Air dalam Kawasan Tahura			
	3	Inventarisasi Terhadap Populasi dan Sebaran Tarsius Bancanus Bancanus			
XV	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN	jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan TAHURA			
	1	Survey Potensi TAHURA			
	2	Penataan Blok TAHURA			
	3	Penyusunan Rencana Pengelolaan (RP) TAHURA			
	4	Orientasi Batas Kawasan Hutan			
	5	Rekonstruksi Batas Kawasan Hutan			
	6	Tata Batas Blok Pengelolaan Tahura Bukit Mangkol			

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	7	Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Tahura Bukit Mangkol	Luas Tahura Terevaluasi		
XVI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penyediaan sistem pengangkutan sampah di perkotaan			
	1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional bidang persampahan	Jumlah kendaraan dinas / operasional persampahan yang dipelihara		Sarana dan Prasarana Persampahan Masuk ke mana
	2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasaran persampahan	Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabuapaten/kota Jumlah penghargaan di bidang lingkungan hidup	
	3	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Persampahan	Jumlah pengadaan truk sampah		
	4	Pengelolaan Persampahan TPA	Jumlah bulan pengelolaan sampah di TPA Nibung	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA Jumlah bulan pengelolaan sampah di TPA Nibung	
	5	Pemasangan listrik TPA Nibung	Besaran jumlah watt listrik yang terpasang		
	6	Penyusunan DED Peningkatan TPA Jongkong	Jumlah dokumen DED Peningkatan TPA Jongkong		
XVII	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan area pelayanan persampahan			
	1	Penyediaan Perlengkapan dan peralatan kebersihan persampahan	Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan		
	2	Pembangunan transfer depo sampah	Jumlah pembangunan transfer depo		

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
3	Pembangunan Gedung Workshop	Jumlah pembangunan gedung workshop			Untuk IPLT Masuk kemana dan penambahan infrastruktur bagaimana
4	Penyusunan Master Plan TPA	Jumlah dokumen	Penyusunan Kebijakan dan stategi daerah pengelolaan sampah di TPA	Jumlah dokumen	
5	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah pengadaan alat-alat berat			
6	Pembangunan Gedung Pengelolaan Sampah 3 R	Jumlah pembangunan gedung pengelolaan sampah 3R			
7	Pembebasan Lahan untuk Pengelolaan sampah	Luas lahan yang dibebaskan untuk pengelolaan sampah			
8	Pemeliharaan rutin/berkala gedung TPA Nibung	Jumlah pemeliharaan gedung TPA Nibung	Pemeliharaan rutin/berkala gedung TPA Nibung	Jumlah pemeliharaan gedung TPA Nibung	
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Alat Berat Dinas/Operasional persampahan	Jumlah Alat Berat Dinas/Operasional Persampahan yang di rehabilitasi			
10	Penyediaan jasa pengelolaan persampahann	jumlah bulan penyediaan jasa pengelolaan persampahan	Sub Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah desa / kel yang aktif	
11	Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah dokumen izin lingkungan			
XVIII	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penyediaan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan			
1	Pengadaan tong sampah	Jumlah pengadaan tempat sampah (1 set 5 buah tong sampah)			

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	2	Pengadaan kontainer sampah	Jumlah pengadaan kontainer sampah		
	3	Penyediaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana persampahan		
	4	Pengelolaan persampahan di transfer depo	Jumlah bulan pengelolaan persampahan di transfer depo		
XIX	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terbentuknya kelembagaan bank sampah didesa dan kelurahan	Program : Pengelolaan Persampahan		
			Kegiatan : Pengelolaan Persampahan		
	1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah (Bank Sampah)	Sub Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah (Bank Sampah)
XX	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
			Kegiatan : Administrasi Umum		
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan pelayanan surat menyurat	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan pelayanan surat menyurat
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah bulan penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah bulan penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas / operasional	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pelayanan jasa administrasi keuangan	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pelayanan jasa administrasi keuangan	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik	
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Sub Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konstultasi yang diikuti	Sub Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konstultasi yang diikuti	
12	Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah daerah ke Desa/Kelurahan/Kecamatan	Jumlah koordinasi ke desa/kelurahan/ kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah			

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
XXI	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya / terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
			Kegiatan : Administrasi Umum		
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	Sub Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Sub Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	
3	Pengadaan Peralatan meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	Sub Kegiatan : Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	
4	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas rumah dinas yang dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Luas rumah dinas yang dipelihara	
5	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara	
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Sub Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	
8	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang direhab	Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang direhab	
9	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor			
10	Pemasangan Conblok Halaman Gedung Kantor	Jumlah luasan untuk pembangunan conblok			

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
XXII	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas dan perlengkapan penunjang disiplin lainnya	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
			Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	
	2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	
XXIII	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
			Kegiatan : Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Sub Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	
	2 Pendidikan dan pelatihan bidang teknis	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021				PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO		BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
XXIV		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
				Kegiatan : Administrasi Keuangan		
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen / pelaporan	Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen / pelaporan	
	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen / pelaporan	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Jumlah dokumen / pelaporan	
	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen / pelaporan	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen / pelaporan	

PEMETAAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019				PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Pembebasan lahan untuk Pembangunan Jalan/Jembatan	Luas Lahan yang dibebaskan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang dibebaskan	
	Perencanaan Pembangunan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan yang direncanakan			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan yang direncanakan	ded
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun			Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	
	Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan				Panjang jalan yang ditingkatkan	tidak ada di PERMENDAGRI
	Pembangunan Jembatan	jumlah jembatan yang dibangun			Pembangunan Jembatan	jumlah jembatan yang dibangun	
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya kondisi jalan kabupaten menjadi baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan	Jumlah dokumen perencanaan yang direncanakan		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah dokumen perencanaan yang direncanakan	ded
	Rehabilitasi jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi			Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	
	Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	
					Pemeliharaan Rutin Jalan		
	Rehabilitasi jembatan	jumlah jembatan yang direhabilitasi			Rehabilitasi Jembatan	jumlah jembatan yang direhabilitasi	

NO	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019				PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Tertanggulangnya jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
	Rehabilitasi Jalan dalam kondisi tanggap darurat	Panjang jalan yang direhabilitasi dalam kondisi tanggap darurat		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan yang direhabilitasi dalam kondisi tanggap darurat	
	Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Panjang jembatan yang direhabilitasi dalam kondisi tanggap darurat			Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jembatan yang direhabilitasi dalam kondisi tanggap darurat	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedianya sarana dan prasarana Kebinamargaan					Tidak ada di PERMENDAGRI 90
	Pembangunan gedung penunjang sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumlah gedung yang dibangun				Jumlah gedung yang dibangun	Tidak ada di PERMENDAGRI 91
	Pengadaan alat-alat Berat	jumlah alat - alat berat yang diadakan				jumlah alat - alat berat yang diadakan	Tidak ada di PERMENDAGRI 92
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Berat dan alat - alat laboratorium	jumlah alat - alat berat yang diadakan				jumlah alat - alat berat yang diadakan	Tidak ada di PERMENDAGRI 93
	Pengadaan Perlengkapan dan peralatan alat - alat berat	jumlah perlengkapan dan peralatan alat - alat berat yang diadakan				jumlah perlengkapan dan peralatan alat - alat berat yang diadakan	Tidak ada di PERMENDAGRI 94
	Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium	jumlah alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan				jumlah alat ukur dan bahan laboratorium yang diadakan	Tidak ada di PERMENDAGRI 95

NO	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019				PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya akses air bersih yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM				DIPISAH
	Perencanaan Sistem Pengolahan Air Minum			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		
	Pengembangan sistem distribusi Air Minum	Jumlah bulan pengembangan SPAM			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah bulan pengembangan SPAM	
	Fasilitasi pembinaan teknis pengolahan air minum	Jumlah bulan pembinaan teknis pengolahan air minum			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah bulan pembinaan teknis pengolahan air minum	
	Optimalisasi Sistem Pengolahan Air Minum	Jumlah jaringan SPAM yang dibangun			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah jaringan SPAM yang dibangun	
	Penyediaan prasarana dan sarana air minum	Jumlah prasarana dan sarana air minum yang disediakan			Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah prasarana dan sarana air minum yang disediakan	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan prasarana dan sarana Air Minum	Jumlah prasarana dan sarana air minum yang direhabilitasi/dipelihara			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah prasarana dan sarana air minum yang direhabilitasi/dipelihara	
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan		

NO	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019				PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya akses air limbah yang memadai	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
	Perencanaan Sistem Pengolahan Air Limbah	Jumlah dokumen yang direncanakan		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah dokumen yang direncanakan	
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah prasarana dan sarana yang disediakan			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah prasarana dan sarana yang disediakan	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan prasana dan sarana air limbah Air Minum	Jumlah prasarana dan sarana yang direhabilitasi/dipelihara			Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah prasarana dan sarana yang direhabilitasi/dipelihara	
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		
	Fasilitasi pembinaan teknis pengolahan air limbah	Jumlah bulan pembinaan teknis pengolahan air limbah			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah bulan pembinaan teknis pengolahan air limbah	
	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Meningkatnya kondisi jalan lingkungan pedesaan menjadi baik				Tidak ada di PERMENDAGRI 90	
	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah dokumen yang direncanakan			Jumlah dokumen yang direncanakan	Tidak ada di PERMENDAGRI 91	
	Pembangunan Jalan dan Saluran Lingkungan (pedesaan)	Panjang jalan lingkungan yang dibangun				Panjang jalan lingkungan yang dibangun	Tidak ada di PERMENDAGRI 92
	Peningkatan Jalan dan Saluran Lingkungan (pedesaan)	Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan				Panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan	Tidak ada di PERMENDAGRI 93
	Pembangunan Plat Duikers Dan Box Culvert pedesaan	jumlah Plat Duiker dan Box Culvert yang dibangun				jumlah Plat Duiker dan Box Culvert yang dibangun	Tidak ada di PERMENDAGRI 94
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan saluran lingkungan (pedesaan)	panjang jalan lingkungan yang direhabilitasi/dipelihara				panjang jalan lingkungan yang direhabilitasi/dipelihara	Tidak ada di PERMENDAGRI 95

NO	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019				PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	Rehabilitasi/pemeliharaan Plat Duikers dan Box Culvert pedesaan	jumlah Plat Duikers yang direhabilitasi/dipelihara				jumlah Plat Duikers yang direhabilitasi/dipelihara	Tidak ada di PERMENDAGRI 96
	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Tersedianya sumber air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Pembebasan lahan untuk Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Jumlah lahan yang dibebaskan		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah lahan yang dibebaskan	
	Perencanaan penyediaan dan pengolahan air baku	Jumlah dokumen yang direncanakan				Jumlah dokumen yang direncanakan	
	Pembangunan sumber air baku	Jumlah sumber air baku yang dibangun			Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah sumber air baku yang dibangun	
	Rehabilitasi/Pemeliharaan sumber air baku	jumlah sumber air baku yang dipelihara			Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	jumlah sumber air baku yang dipelihara	
	Normalisasi sumber air baku	Jumlah sumber air baku yang dinormalisasikan			Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah sumber air baku yang dinormalisasikan	
					Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku		

NO	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019				PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah dokumen yang direncanakan		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen yang direncanakan	
	Pembangunan jaringan irigasi	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang dibangun	
	peningkatan jaringan irigasi	jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan	
	Rehabilitas/pemeliharaan jaringan irigasi	jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah jaringan irigasi yang direhabilitasi/dipelihara	
	Program Pengendalian Banjir	Tertanggulangnya penganan masalah banjir di daerah rawan banjir	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
	Pembebasan lahan untuk pengendalian banjir	Jumlah lahan yang dibebaskan		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah lahan yang dibebaskan	
	Perencanaan pembangunan pengendali banjir	Jumlah dokumen yang direncanakan			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen yang direncanakan	
	Pembangunan bangunan pengendali banjir	Jumlah bangunan pengendali banjir yang dibangun			Pembangunan Tanggul Sungai Pembangunan Polder / Kolam Retensi	Jumlah bangunan pengendali banjir yang dibangun	
					Pembangunan Tanggul Sungai		
	Rehabilitas/pemeliharaan/normalisasi bangunan	Jumlah bangunan pengendali banjir yang			Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah bangunan pengendali banjir yang	

NO	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019				PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	pengendali banjir	direhabilitasi/dipelihara			Normalisasi/Restorasi/Pemeliha raan Sungai	direhabilitasi/dipelihara	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan pengendali banjir	jumlah peralatan dan perlengkapan yang diadakan					
	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Meningkatnya saluran/drainase dalam kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
	Perencanaan pembangunan saluran draenase/gorong-gorong	Jumlah dokumen yang direncanakan		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen yang direncanakan	
	Pembangunan saluran draenase/gorong-gorong	Jumlah bangunan pengendali banjir yang dibangun			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Jumlah bangunan pengendali banjir yang dibangun	
	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran draenase/gorong-gorong	Jumlah bangunan pengendali banjir yang direhabilitasi/dipelihara			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Jumlah bangunan pengendali banjir yang direhabilitasi/dipelihara	
					Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan		
	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase tersedianya dokumen perencanaan tata ruang beserta rencana rincinya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
	Penyusunan Rancangan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah Kawasan yang Direncanakan/Disusun		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota			Tidak ada di Permendagri
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen yang direncanakan/disusun					Tidak ada di Permendagri
	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan	Jumlah raperda yang disusun.					Tidak ada di Permendagri
	Revisi rencana tata ruang	Jumlah dokumen yang direvisi					Tidak ada di Permendagri

NO	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019				PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	Survey dan pemetaan	Jumlah kawasan yang dilaksanakan survey dan pemetaan					Tidak ada di Permendagri
	Penetapan kebijakan penyusunan RDTR dan RTBL	Jumlah raperda yang disusun.					Tidak ada di Permendagri
	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
	Penyusunan kebijakan,norma,standar,dan kriteria pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen yang direncanakan/disusun		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen yang direncanakan/disusun	
	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen yang direncanakan/disusun				Jumlah dokumen yang direncanakan/disusun	
	Sosialisasi kebijakan,norma,standar,dan kriteria pemanfaatan ruang	Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	
	Survey dan pemetaan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Lokasi pelaksanaan survey dan pemetaan					Tidak ada di Permendagri
	Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan ruang	Jumlah bulan koordinasi dan fasilitasi rencana tata ruang		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			Tidak ada di Permendagri
	Pelatihan Aparatur Tata Ruang	Jumlah Personil yang Mengikuti Pelatihan					Tidak ada di Permendagri

NO	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019				PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
	Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah bulan pelaksanaan Pengawasan pemanfaatan ruang					Tidak ada di Permendagri
	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Pertemuan dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Tidak ada di Permendagri
	Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung yang Diawasi					Tidak ada di Permendagri
	Survey dan pemetaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Lokasi pelaksanaan survey dan pemetaan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi pelaksanaan survey dan pemetaan	Tidak ada di Permendagri
	Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang tersedia		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang yang tersedia	Tidak ada di Permendagri
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Survey dan Pemetaan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan					Tidak ada di Permendagri
	Program Pegembangan Wilayah strategis cepat tumbuh	Jumlah infrastruktur dalam kawasan strategis yang terbangun					
	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis	Jumlah Infrastruktur yang direncanakan					Tidak ada di Permendagri
	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis	Jumlah Infrastruktur yang dibangun					Tidak ada di Permendagri

NO	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019				PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI				
	Pembuatan setifikat tanah untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Jumlah bidang Sertifikat tanah pemerintah					
	Bantuan sertifikasi tanah bagi masyarakat	Jumlah Bidang bantuan Sertifikat bagi masyarakat		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha		
	Pelatihan Sistem Informasi Geografis Aparatur Pertanahan Desa dan Kecamatan	Jumlah Personil yang Mengikuti Pelatihan					Tidak ada di Permendagri

PEMETAAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INSPEKTORAT DAERAH

NO	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
I	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Jumlah OPD yang mencapai Maturitas SPIP pada level 3 di wilayah Irban	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Jumlah OPD yang mencapai Maturitas SPIP pada level 3 di wilayah Irban	
		Persentase Jumlah OPD yang mempunyai temuan pengelolaan keuangan dan aset yang tidak material di wilayah Irban		Persentase Jumlah OPD yang mempunyai temuan pengelolaan keuangan dan aset yang tidak material di wilayah Irban	
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti di wilayah Irban		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti di wilayah Irban	
		Persentase Meningkatnya nilai SAKIP OPD dengan kategori A di wilayah Irban		Persentase Meningkatnya nilai SAKIP OPD dengan kategori A di wilayah Irban	
1	Audit kinerja	Jumlah objek pemeriksaan yang di audit	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
2	Audit dengan tujuan tertentu	Jumlah objek pemeriksaan yang di audit	Audit Kinerja dan Keuangan		
3	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah objek pemeriksaan yang di evaluasi	Review Kinerja dan Keuangan		
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	Jumlah objek pemeriksaan yang di evaluasi	Pemantauan Kinerja dan Keuangan		
5	Sosialisasi/pembinaan Pengawasan	Jumlah sosialisasi/pembinaan yang dilakukan	Evaluasi Kinerja dan Keuangan		
6	Fasilitasi Penyelesaian TP/TGR	Jumlah kasus TP/TGR yang ditangani	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		
7	Reviu atas Laporan Keuangan	Jumlah objek pemeriksaan yang di reviu	Audit Kinerja dan Keuangan		
8	Reviu atas Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)	Jumlah objek pemeriksaan yang di reviu	Review Kinerja dan Keuangan		
9	Reviu atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah objek pemeriksaan yang dipantau dan dievaluasi	Pemantauan Kinerja dan Keuangan		
10	Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)	Jumlah kegiatan SABERPUNGLI	Evaluasi Kinerja dan Keuangan		

NO	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
11	Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah objek pemeriksaan yang dievaluasi			
12	Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah objek pemeriksaan yang dievaluasi			
13	Reviu RPJMD	Jumlah objek pemeriksaan yang di reviu			
14	Reviu RKPD	Jumlah objek pemeriksaan yang di reviu			
15	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Jumlah objek pemeriksaan yang di reviu			
16	Survey Penilaian Integritas	Jumlah laporan hasil survey penilaian integritas			
II	Peningkatan profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	persentase auditor dan aparatur pengawasan yang bersertifikasi auditor			tidak ada program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
17	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Pengawasan			kapabilitas APIP (IACM) / program kegiatan khusus pendidikan dan pelatihan auditor

**PEMETAAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DISKOMINFOSTA**

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016- 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
1	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Jumlah dialog interaktif radio	Program informasi dan komunikasi publik	Jumlah dialog interaktif radio	
	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Tersusunnya Peraturan Perundangan Penyiaran dan KMIP	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Tersusunnya Peraturan Perundangan Penyiaran dan KMIP	
	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya alat radio dan kelengkapannya	Kegiatan Rutin	Tersedianya alat radio dan kelengkapannya	
	Pemeliharaan Peralatan Teknik Stasiun Pemancar dan Operasional Penyiaran Radio	Terpeliharanya peralatan teknik stasiun pemancar dan jasa penyiar radio	Pengelolaan media komunikasi publik	Terpeliharanya peralatan teknik stasiun pemancar dan jasa penyiar radio	
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan LAN dan WAN	Terpeliharanya jaringan LAN dan WAN untuk memperlancar pengaksesan data informasi	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Terpeliharanya jaringan LAN dan WAN untuk memperlancar pengaksesan data informasi	
	Penyelenggaraan Buletin Kabupaten Bangka Tengah	Tersedianya Buletin Kabupaten Bangka Tengah	Pengelolaan media komunikasi publik	Tersedianya Buletin Kabupaten Bangka Tengah	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Bangka Tengah	Terselenggaranya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan rekomendasi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka Tengah	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Terselenggaranya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan rekomendasi Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka Tengah	Permendagri 90 bahasanya terlalu umum
	Fasilitasi penyusunan peraturan perundangan bidang komunikasi dan informasi	Tersusunnya Peraturan Perundangan Bidang Komunikasi dan Informasi	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Tersusunnya Peraturan Perundangan Bidang Komunikasi dan Informasi	
	Pengadaan Videotron	Tersedianya videotron	Kegiatan rutin	Tersedianya videotron	
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah SDM bidang komunikasi dan informasi yang berkualitas	Program informasi dan komunikasi publik		
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Peningkatan Kualitas SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Peningkatan Kualitas SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	
	Operasionalisasi Layanan Internet Kecamatan	Tersedianya layanan operasional internet dalam meningkatkan pengetahuan TIK	Pelayanan informasi publik	Tersedianya layanan operasional internet dalam meningkatkan pengetahuan TIK	
	Fasilitasi Penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Penilaian SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	
	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan masyarakat informatif, cerdas, terampil, mandiri dan produktif	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Terwujudnya pembinaan dan pengembangan masyarakat informatif, cerdas, terampil, mandiri dan produktif	
	Penyelenggaraan Jurnalistik Kabupaten Bangka Tengah	Terselenggaranya pelatihan/bimtek jurnalis	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Terselenggaranya pelatihan/bimtek jurnalis	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016- 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah desa yang terlayani jaringan internet			
	Kegiatan penyusunan master plan (rencana induk) Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya master plan (rencana induk) Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bangka Tengah		Tersedianya master plan (rencana induk) Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Bangka Tengah	
	Kegiatan peningkatan jaringan internet Kabupaten Bangka Tengah	Tersedianya jaringan internet di Kabupaten Bangka Tengah	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Tersedianya jaringan internet di Kabupaten Bangka Tengah	
	Program kerjasama informasi dan media massa	Jumlah pameran/expo pemerintah kabupaten bangka tengah			
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dan seni budaya	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat Melalui Pameran Pembangunan		Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah Kepada Masyarakat Melalui Pameran Pembangunan	Tidak ada kegiatan yg sesuai untuk mengakomodasi kegiatan "pameran pembangunan"
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terselenggaranya Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Media Cetak dan Internet	Pengelolaan media komunikasi publik	Terselenggaranya Informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Media Cetak dan Internet	
			Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		
	Pembinaan dan pengawasan koordinasi jaringan komunikasi sandi daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah	Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaring Komunikasi Sandi Daerah	
	Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi	Tersedianya Peralatan pendukung kegiatan persandian daerah	Kegiatan Rutin	Tersedianya Peralatan pendukung kegiatan persandian daerah	
	Program Penyempurnaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pengunjung website pemerintah kabupaten bangka tengah	Program Aplikasi Informatika		
	Pemeliharaan dan Updating Website Kabupaten	Terpeliharanya Website Kabupaten BangkaTengah	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Terpeliharanya Website Kabupaten BangkaTengah	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Layanan Sahabat Anak	Terselenggaranya sistem informasi layanan sahabat anak kabupaten bangka tengah	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Terselenggaranya sistem informasi layanan sahabat anak kabupaten bangka tengah	
	Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi	Tersedianya data dan informasi bidang komunikasi dan informatika	Pengelolaan pusat data pemerintah daerah	Tersedianya data dan informasi bidang komunikasi dan informatika	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016- 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	
	Program Pengembangan data/Informasi/Statistik daerah				
	Pengolahan, updating dan analisis data distribusi pendapatan masyarakat	Buku laporan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Buku laporan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan	
	Forum Data	Jumlah Koordinasi Data	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah Koordinasi Data	
	Pengumpulan dan Updating Data Informasi Pembangunan Daerah	Dokumen data informasi pembangunan daerah dan sinkronisasi serta validasi data	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Dokumen data informasi pembangunan daerah dan sinkronisasi serta validasi data	
	Penyusunan Nilai Tukar Petani	Jumlah Dokumen Publikasi	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Publikasi	
	Updating Data Pertumbuhan Ekonomi	Dokumen laporan pertumbuhan ekonomi	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Dokumen laporan pertumbuhan ekonomi	
	Geospasial Ekonomi Masyarakat (GEMAS)	Tersedianya data objek dalam bentuk geospasial	Membangun metadata statistik sektoral	Tersedianya data objek dalam bentuk geospasial	

PEMETAAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
OPD: SEKRETARIAT DAERAH

No.	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PEREMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	
	Urusan Wajib				
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian				
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan jasa surat menyurat				
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan				
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor				
7	Penyediaan alat tulis kantor				
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				
11	Penyediaan makanan dan minuman				
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				
13	Penyediaan jasa administrasi/teknis (THL)				
14	Koordinasi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah Ke Desa/Kelurahan/Kecamatan				
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
15	Penataan Lingkungan Komplek Perumahan Jabatan				
16	Pengadaan kendaraan dinas/operasional				
17	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas				
18	Pengadaan peralatan gedung kantor sekda				
19	Pengadaan meubelair				
20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan				

No.	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PEREMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	
21	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				
22	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				
23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				
24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas				
25	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				
26	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan				
27	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional				
III	Program peningkatan disiplin aparatur				
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				
28	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				
29	Pendidikan dan pelatihan formal				
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian				
30	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				
31	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				
32	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (4 01 03)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
33	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (4 01 03)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
34	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				
35	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (4 01 03)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

No.	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PEREMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	
VI	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil					
36	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
37	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
38	Rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
39	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
40	Kunjungan kerja inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Pengelolaan Rumah Tangga		
41	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (X XX 01)	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		
42	Penyelenggaraan Urusan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Pengelolaan Rumah Tangga		
43	Pemeriksaan Rutin Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian		
44	Badan Koordinasi Kabupaten Kota Seluruh Indonesia (BKKKSI)		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
45	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat pada hari-hari tertentu		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
46	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KDH dan WKDH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (X XX 01)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		
47	Penyediaan jasa pengamanan/ajudan KDH dan WKDH		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Keprotokolan		
48	Peningkatan Kapasitas Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian		
49	Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan KDH/WKDH		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Keprotokolan		
50	Peningkatan kerjasama dengan unsur pers dan lembaga lainnya					PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
51	Peningkatan pelayanan informasi kedinasan KDH/WKDH					PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

No.	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PEREMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	
52	Inventarisasi Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	(PECAH 3 KEGIATAN)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

No.	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PEREMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	
53	Penyelenggaraan Pameran					PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG/ PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR/PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
VII	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian					
54	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		
55	Pemberdayaan Kebijakan KDH/WKDH	GAJI STAF Khusus nya Rutin	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
56	Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		
57	Monitoring Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH Bidang Perekonomian		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
58	Rapat Koordinasi Pengembangan Insfrastruktur Daerah		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		

No.	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PEREMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	
VIII	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					
59	Penerapan sistem lelang secara elektronik		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
60	Pengendalian Manajemen Pengadaan Barang/Jasa (ULP)		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
61	Pelatihan Sistem Lelang Elektronik		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
62	Updating Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		
63	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pengadaan barang dan Jasa		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (X XX 01)	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
IX	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat					
64	Penanganan pengaduan masyarakat		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		
X	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah					
65	Pembentukan Kerjasama antar Daerah di Bidang Hukum		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		

No.	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PEREMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	
66	Pembentukan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lainnya, Lembaga, Instansi dan Swasta		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		
		CEK SIAPA TAU AD LUAR NEGERI	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		
67	Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Dalam daerah kabupaten/kota
68	Review Laporan Penyusunan Batas-batas Desa Kabupaten Bangka Tengah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		
XI	Program penataan peraturan perundang-undangan					
69	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		
70	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		
71	Penyusunan kodifikasi hukum dan peraturan perundang-undangan		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		
72	Bantuan hukum dalam kasus perdata dan TUN di lingkungan Pemkab Bangka Tengah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Bantuan Hukum		
73	Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum)		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		
74	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Ditinjau dari Kajian Hukum		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Bantuan Hukum		
75	Kabupaten Peduli HAM		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		
76	Penyelenggaraan Sidang Pengadilan Agama		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Fasilitasi Bantuan Hukum		

No.	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PEREMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	
77	Koordinasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	KEWENANGAN???
XII	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksana				
78	Penyusunan Analisis Jabatan, Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	tambahkan beberapa out
79	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
XIII	Program Analisis Kebijakan Pembangunan				
80	Rapat Koordinasi Unsur BUMD dan Pemerintah Daerah		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	

No.	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PEREMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	
81	Rapat Koordinasi dan Pengendalian CSR		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		
82	Koordinasi Pengendalian Pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		
83	Penyusunan Survey Harga Konsumen dan Perhitungan Inflasi		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		
84	Penyusunan Database Insfrastruktur Kabupaten Bangka Tengah		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (4 01 03)	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		
XIV	Program Pengembangan Kehidupan Beragama					
85	Pembinaan Mental dan Spiritual Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
86	Pembinaan dan Bimbingan Penyelenggaraan Ibadah Syariah Keagamaan		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
87	Pembinaan Mental Spiritual Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		
88	Insentif TPA, TQA dan MDT		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		

No.	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PEREMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	
XV	Program Pelayanan Masyarakat Terpadu					
89	Koordinasi Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (4 01 02)	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		
XVI	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					
90	Pembinaan Unit Pelayanan Publik		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
91	Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
92	Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) SKPD		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
93	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Unit Pelayanan Publik		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM (4 01 04)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
XVII	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba					
94	Rapat Koordinasi Keterpaduan Pelaksanaan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika)					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
95	Sosialisasi dan Advokasi Kesadaran Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
96	Identifikasi Kecenderungan Penyalahgunaan NAPZA					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
97	Rehabilitasi, Terapi dan Pemantauan Pecandu Narkoba di Pusat Rehabilitasi					KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT (23 2014)

Pemetaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kecamatan

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program dan Kegiatan		Indikator	Kode Rekening						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
					Kinerja Program							
					(outcome) dan Kegiatan (output)							
1	2	3	4	5	6							
Menumbuhkan semangat juang rasa nasionalisme dan semangat patriotisme masyarakat	Meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat patriotisme masyarakat dalam kegiatan pemahaman wawasan kebangsaan di masyarakat	Meningkatkan Wawasan kebangsaan masyarakat	3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang ikut dalam kegiatan PHBN	7	01	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program dan Kegiatan		Indikator	Kode Rekening						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
					Kinerja Program							
					(outcome) dan Kegiatan (output)							
1	2	3	4	5	6							
				1 Peningkatan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan masyarakat	Jumlah kegiatan yang terlaksana	7	01	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Meningkatkan keberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam pembangunan	mewujudkan keberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat desa dalam pembangunan	Terwujudnya Aparatur Desa dan organisasi masyarakat desa yang berkualitas dan berkembang	9	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Meningkatnya keberdayaan Aparatur Desa dan organisasi Masyarakat dalam pembangunan Desa	7	01	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah Lembaga dan Organisasi masyarakat Desa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan	7	01	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				3 Pembinaan dan Pelatihan Kader Bank Sampah	Jumlah Desa yang telah mendapatkan pembinaan dan Pelatihan Kader Bank Sampah							
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa	Persentase jumlah usulan pembangunan masyarakat yang terakomodir di Kecamatan	10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Jumlah Masyarakat yang ikut dalam kegiatan Pembangunan Desa	7	01	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				1 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kegiatan BBGRM dalam 1 Tahun	7	01	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				2 Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Purna Bhakti Kepala Desa	Jumlah Kades yang purna bakti	7	01	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
				3 Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa	Jumlah keikutsertaan Aparatur Kecamatan pada rapat dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Desa	7	01	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program dan Kegiatan			Indikator	Kode Rekening						
						Kinerja Program							Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
						(outcome) dan Kegiatan (output)							
1	2	3	4	5	6	7	01	01	03	2,01	01		
			4	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	PersentaseJumlah Usulan Pembangunan yang terakomodir di Kecamatan	7	01	01	03	2,01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
			5	Pembinaan Organisasi Perempuan Kecamatan	Persentase Kelompok Perempuan yang dibina	7	01	01	03	2,01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			6	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Persentase terakomodirnya produk-produk unggulan Kecamatan yang dipasarkan dalam Pameran pembangunan	7	01	01	02	2,04	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			7	Penyusunan, Updating, dan Verifikasi Data Profil Kecamatan	Jumlah buku Profil Kecamatan yang terupdate	7	01	01	06	2,01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
			8	Penyelenggaraan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan MTQ /STQ yang dilombakan	7	01	01	03	2,01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			9	Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu	Jumlah Ibu hamil & Menyusui yang terlayani	7	01	01	02	2,04	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			10	Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dalam hal Keluarga Berencana	7	01	01	02	2,04	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			11	Penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang memenuhi kriteria terbaik untuk mengikuti lomba desa Tk Kecamatan	7	01	01	03	2,01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			13	Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Kecamatan Sehat	Jumlah bulan pelaksanaan rakor Kelompok kerja Kecamatan Sehat	7	01	01	02	2,04	03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program dan Kegiatan			Indikator	Kode Rekening						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
						Kinerja Program							
						(outcome) dan Kegiatan (output)							
1	2	3	4										

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Program dan Kegiatan		Indikator	Kode Rekening						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
					Kinerja Program							
					(outcome) dan Kegiatan (output)							
1	2	3	4	5	6							
			26	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Jumlah Desa yang dibina	7	01	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Melaksanakan Pelayanan Prima	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	11	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persentase jumlah masyarakat yang diberikan pelayanan sesuai dengan standart Operasional Prosedur							
		2. Tingkat Survey kepuasan Masyarakat				7	01	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			1	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan sesuai dengan SOP	7	01	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			2	Rapat koordinasi Forum Pimpinan Kecamatan	Jumlah keikutsertaan pimpinan di Kecamatan dalam rapat dan koordinasi ke dalam atau keluar daerah	7	01	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			1	Penyelenggaraan Administasi Pemerintahan Kelurahan								

PEMETAAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA BIDANG KEARSIPAN 2021 – 2026
SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90/2019

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				RENSTRA DKP						PERMASALAHAN
No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN SUB KEGIATAN	TAHUN					
					T1	T2	T3	T4	T5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	PENGELOLAAN ARSIP	A. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten	1. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	✓ Kegiatan arsip masuk desa dan sekolah (armada)	√	√				
				✓ Lomba kearsipan tingkat opd, sekolah, desa dan kelurahan		√	√	√	√	
				✓ Pembinaan dan pembenahan unit pengelola percontohan			√	√	√	
				✓ Pembinaan kearsipan pada stakeholder lainnya	√ sosialis asi stake holder	√	√	√	√	
				✓ Sosialisasi kearsipan	√ perda perbup					
				✓ Kegiatan penilaian angka kredit arsiparis	√	√	√	√	√	
				✓ Pengelolaan Arsip Kacau	√	√	√	√	√	

[illegible]

[illegible]

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				RENSTRA DKP						PERMASALAHAN
No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN SUB KEGIATAN	TAHUN					
					T1	T2	T3	T4	T5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab	✓ Bimbingan Dan Pelatihan Bagi Pengelola Kearsipan Stakholder Lainnya	√	√				
				✓ Pendidikan dan pelatihan kapasitas kearsipan (arsiparis)-sdm	√	√	√	√	√	
		D. Pengawasan dan audit kearsipan di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah		✓ pengawasan dan audit kearsipan Internal	√ sosialisasi	√	√	√	√	Usulan kegiatan Baru yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten namun belum terakomodir di Permendagri 90/2019
				✓ pengawasan dan audit kearsipan Eksternal	√ sosialisasi	√	√	√	√	
II	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memiliki Retensi di	1. Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	✓ Penyusunan jadwal retensi arsip (JRA)	√	√	√			
				✓ Sistem Klasifikasi Keamanan Dan			√	√	√	

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019				RENSTRA DKP						PERMASALAHAN	
No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN SUB KEGIATAN	TAHUN						
					T1	T2	T3	T4	T5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Akses Arsip Dinamis Serta Arsip Statis							
				✓ Pendampingan Penilaian dan penyusutan arsip			√	√	√		
			2. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki retensi di Bawah 10 Tahun	✓ Pemusnahan arsip	√	√	√				
				✓ Mesin pencacah kertas beserta bangunan	√						
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	1. Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten	✓ Pengelolaan Dan Pendataan Arsip Vital	√						

PEMETAAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA BIDANG PERPUSTAKAAN 2021 – 2026
SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90/2019

	PERMENDAGRI 90 / 2019			RENSTRA DKP					PERMASALAHAN	
No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN SUB KEGIATAN	TAHUN					
					T1	T2	T3	T4	T5	
I	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	✓ Pengelolaan Website Perpustakaan	Y	Y	Y	Y	Y	
				✓ Layanan E-Book (Buku digital)	Y	Y	Y	Y	Y	
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten	✓ Promosi Perpustakaan dan Minat Baca	Y	Y	Y	Y	Y	
				✓ Lomba Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah Terbaik Tingkat Kabupaten Bangka Tengah.	Y	Y	Y	Y	Y	
				✓ Pembangunan Gedung perpustakaan.		Y				JUKNIS DAK penganggaran harus pada OPD DKP, untuk PPK boleh memakai personal OPD teknis yang membidangi
				✓ Renovasi Gedung/Ruangan Perpustakaan.	Y					

			Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Y	Y			
			Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	✓ Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa dan Pengelola Perpustakaan Sekolah	Y	Y	Y	Y	Y	
				✓ Melakukan Pembinaan Perpustakaan Sekolah	Y	Y	Y	Y	Y	
			Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten	✓ Pembinaan dan Monitoring Perpustakaan desa	Y	Y	Y	Y	Y	
				✓ Melakukan Penyuluhan Perpustakaan	Y	Y	Y	Y	Y	
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	✓ Mengikuti Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Y	Y	Y	Y	Y	

				✓ Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Perpustakaan dan Pustakawan	Y		Y		Y	
				✓ Lomba pengelola perpustakaan	Y	Y	Y	Y	Y	
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	✓ Layanan Perpustakaan Keliling ke seluruh Desa dan Sekolah yang ada di kabupaten Bangka Tengah	Y	Y	Y	Y	Y	
			Pengembangan Bahan Pustaka	✓ Pengadaan buku			Y		Y	
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	✓ Pengolahan bahan bacaan dan automasi perpustakaan	Y	Y	Y	Y	Y	
			Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	✓	Y	Y	Y	Y	Y	

		Pembudayaan Membaca Daerah	Gemar Tingkat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	✓		Y		Y	
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	✓	Pembangunan pojok baca	Y			
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	✓	Lomba Bercerita	Y	Y	Y	Y
					✓	Lomba Menulis cerita Rakyat	Y	Y	Y	Y
					✓	Lomba Menggambar dan Mewarnai	Y	Y	Y	Y
					✓	Lomba menulis Pantun berbahasa daerah	Y	Y	Y	Y
					✓	Lomba Melukis hewan etnik	Y	Y	Y	Y

				Daerah.						
				✓ Pembentukan GMPB (Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca)		Y	Y	Y	Y	
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	✓ Lomba bercerita ABK	Y	Y	Y	Y	Y	
				✓ Sosialisasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial		Y	Y			
			Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	✓ Pemilihan Duta Baca Tingkat Kabupaten Bangka Tengah	Y	Y	Y	Y	Y	
				✓ Pemilihan bunda baca tingkat Kabupaten Bangka Tengah	Y	Y	Y	Y	Y	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah	✓						

			Kuno							
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	✓						
		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	✓						
			Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	✓						

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
I	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen 2. Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD lingkup bidang ekonomi yang mencapai target	I PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1. Persentase keselarasan antara 2. Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD lingkup bidang ekonomi yang mencapai target	
1	perencanaan sub bidang ekonomi	Output : jumlah rekomendasi / laporan hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi urusan bidang ekonomi; DIPERKAN (Perikanan), DIPERTA (Pertanian, DISPANG (Pangan), disperindagkop umkm. outcome : pengendalian pertumbuhan	1. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Sub kegiatan : 1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian 1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian 1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian 2. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif		

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
			2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif		
			2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif		
			2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif		
			3. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		
2.	perencanaan subbidang sumber daya alam	Output : jumlah rekomendasi / laporan hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi urusan bidang sumber daya alam; ketenaga outcome : pengendalian pertumbuhan	Sub kegiatan		
			3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam		
			3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam		
			3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam		
	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1. Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	1. Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan	
		2. Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD lingkup bidang sosbudpem yang mencapai target		2. Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD lingkup bidang sosbudpem yang mencapai target	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	PERMASALAHAN
1	Perencanaan Sub bidang Pemerintahan	Output: Jumlah rekomendasi / laporan hasil koordinasi perencanaan dan evalasi urusan bidang Pemerintahan; Sekda, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satpol PP, Capil, Arsip, Kesbangpol Outcome: Acuan perencanaan bidang pemerintahan	1	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	
			Sub kegiatan :		
			1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	
			1.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	
			1.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	
2	Perencanaan Sub bidang Pembangunan Manusia	Output: Jumlah rekomendasi / laporan hasil koordinasi perencanaan dan evalasi urusan bidang Pembangunan Manusia : Dinkes, Dindik, KB, Dinbudparpora, DinsosPMB, Kepegawaian dan pengembangan SDM, perpustakaan Outcome: Acuan perencanaan bidang pembangunan Manusia	2.	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	
			Sub kegiatan :		
			2.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	
			2.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	
			2.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	
	Program perencanaan prasarana	1. Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen lainnya		1. Persentase keselarasan antara dokumen perencanaan	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
		2. Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD lingkup bidang fisik sarana dan prasarana yang mencapai target	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	2. Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD lingkup bidang fisik sarana dan prasarana yang mencapai target	
1	Perencanaan subbidang infrastruktur	Output: Jumlah rekomendasi/laporan hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi urusan PU dan Penataan Ruang , Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta penunjang urusan Perencanaan yang ditindaklanjuti outcome :	1. Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		
			Sub kegiatan :		
			1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		
			1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		
			1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		
2	Perencanaan subbidang pengembangan kewilayahan dan lingkungan hidup	Output: Jumlah rekomendasi/laporan hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian , Lingkungan Hidup , Pemberdayaan masyarakat desa, serta penunjang urusan Perencanaan yang	2 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		
			Sub kegiatan :		
			2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
			2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		
			2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		
			3 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		
			3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		
			3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		
			3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		
	Program Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan prioritas pembangunan daerah bidang Ekonomi, pemerintahan	Output: Jumlah dokumen Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan prioritas pembangunan daerah bidang Ekonomi, pemerintahan dan Pembangunan Manusia Outcome:	1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
2	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan prioritas pembangunan daerah bidang Sumber daya alam, Infrastruktur, kewilayahan dan Lingkungan Hidup	Output: : Jumlah dokumen Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan prioritas pembangunan daerah bidang Sumber daya alam, Infrastruktur, kewilayahan dan Lingkungan Hidup	Sub Kegiatan :		

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	PERMASALAHAN
	daerah bidang Sumber daya alam, Infrastruktur, kewilayahan dan Lingkungan Hidup	Outcome: tersedianya informasi tentang Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan prioritas pembangunan daerah bidang Sumber daya alam, Infrastruktur, kewilayahan dan Lingkungan Hidup	1.1 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		
			1.2 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa		
			1.3 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		
			1.4 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		
			2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
			Sub Kegiatan		
			2.1 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			2.2 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		
			2.3 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		
			2.4 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		
			2.5 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
			3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
			3.1 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
			3.2 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
			3.3 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		
			3.4 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
			3.5 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		
	Program Penguatan Inovasi				

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019			PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN		BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	
	Penguatan sistem inovasi daerah bidang Ekonomi, pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Output : jumlah dokumen pengembanagan inovasi daerah bidang Ekonomi, pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
		Outcome:	4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		
	Penguatan sistem inovasi daerah bidang Sumber daya alam, Infrastruktur, kewilayahan dan Lingkungan Hidup	Output : jumlah dokumen pengembanagan inovasi daerah bidang Sumber daya alam, Infrastruktur, kewilayahan dan Lingkungan Hidup	4.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		
		Outcome:	4.3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
			4.4	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
1	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah lima tahunan	Jumlah dokumen /laporan perencanaan pembangunan daerah	1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
			Sub kegiatan			
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah tahunan	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan pembangunan daerah	1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota		
3	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah dokumen Musrenbang RPJMD	1.2	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		
4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan pembangunan daerah				
5	Sinkronisasi perencanaan	Jumlah dokumen/laporan hasil dari sinkronisasi perencanaan pembangunan	1.3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		
			1.4	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya		
			1.5	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah		

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN		BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	
6	Pengelolaan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	jumlah sistem pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	1.6	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	
			1.7	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Meningkatnya disiplin SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan	2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	
			sub kegiatan :		
			2.1	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	
12	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	jumlah dokumen/laporan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	2.2	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan terkait SPM	
			2.3	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	
			3	Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	
			sub kegiatan :		
			3.1	Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah	
			3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	
			3.3	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	

PEMETAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

OPD: BKPSDMD

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
Program pendidikan kedinasan		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
	Pendidikan Perjenjangan Struktural		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah		
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol III		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol I dan II		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah		
	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah		
Program pembinaan dan pengembangan aparatur			
	Penempatan PNS		
	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Peningkatan Kapasitas ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
	Seleksi Penerimaan Jabatan Pimpinan Tinggi		
	Penyelesaian Hukuman Disiplin PNS	Pembinaan ASN	Pembinaan Disiplin ASN
	Pembinaan dan Peningkatan Disiplin PNS		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
			Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
	Pembinaan Solidaritas Keluarga Besar Korpri Bangka Tengah		Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
	Penilaian ASN Berprestasi		
	Seleksi Penerimaan Pegawai Tugas Belajar	Peningkatan Kapasitas ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
	Seleksi Penerimaan Calon ASN		
	Seleksi Jabatan Pengawas dan Administrator		
	Partisipasi Korpri dalam event Provinsi dan nasional		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian		Pengelolaan Data dan Informasi ASN	
	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN
	Penanganan Penyelesaian Karpeg, Karis, Karsus, Taspen dan Satylancana Karya satya		
	Penanganan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS		
	Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian
	Proses Penanganan SK dalam jabatan fungsional tertentu		
	Penanganan Pemakaian Gelar dan Penyesuaian Kerja PNS		
	Pembangunan/Pengembangan Sistem Aplikasi e-kinerja		
	Pemberian Purna Bakti PNS		

PEMETAAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	PERMASALAHAN
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		Penyusunan KUA dan PPAS	
			Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	
			Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	
3	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD		Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	
			Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	PERMASALAHAN
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD		Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	
			Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	
5	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	
			Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	
14	Bimbingan Teknis Penganggaran			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	PERMASALAHAN
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	
7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	
			Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	PERMASALAHAN
8	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	
9	Penyusunan Laporan Semesteran APBD		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
10	Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah			
11	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan (Updating dan Pemeliharaan)			
12	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah		Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
13	Pengelolaan Pendapatan Dana Transfer		Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
15	Penatausahaan Administrasi Perbendaharaan		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	PERMASALAHAN
			Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	
			Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	PERMASALAHAN
16	Pengelolaan Sistem Informasi Gaji		Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	
II	Program Peningkatan Manajemen Aset dan Barang Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah	
1	Penyusunan Standar Satuan Harga		Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	tahun 2020 di bidang Penganggaran dan Kebijakan Keuangan Daerah
1	Sensus Barang Milik Daerah		Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	
2	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Aset Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	

RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021			PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	
NO	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	PERMASALAHAN
3	Bimbingan Teknis Manajemen Aset Daerah		Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
4	Sertifikat, Kodefikasi dan Pengamanan Aset Daerah		Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	
5	Manajemen Aset Daerah		Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	
			Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	

**PEMETAAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

No	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	
	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		
I	Program Pelayanan Pendafrtan Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan	
1	Peningkatan Pelayanan Rutin dan Safari Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
2	Penyusunan Buku Induk Kependudukan		- Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		
3	Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak		- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		
4	Pendataan Penduduk non Permanen		- Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		
5	Penyelenggaraan Perpindahan Data Penduduk Pendatang		- Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
6	Penyelenggaraan Dispensasi Pendaftaran Penduduk		- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
7	Pemuktahiran biodata penduduk		- Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		
	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		
II	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	
1	Penerbitan Akta Kematian		Pelayanan Pencatatan Sipil		
2	Penyelenggaraan Pencatatan Perkawinan Penduduk Non Muslim		- Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting		

No	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	
3	Penataan arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil		- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		
4	Pencatatan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun				
5	Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)				
6	Penerbitan Akta Kematian (DAK Non Fisik)				
7	Penyelenggaraan Pencatatan Akta Kelahiran Lewat Bidan, Puskesmas dan Rumah Sakit				
8	Percepatan Akta Kelahiran				
9	Penyelenggaraan Isbat Nikah Terpadu				
	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA		BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA		
III	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah aparatur yang berkompeten	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Akurasi Data Kependudukan	
1	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Instansi yang memanfaatkan sistem informasi data kependudukan secara Online	
2	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan melalui Penyuluhan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)		- Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk		
3	Bimtek servis excelent		- Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil		
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		- Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Perkembangan Penduduk		
5	Pelatihan tenaga pengelola SIAK		- Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		
6	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik)		- Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		
7	Bimtek Petugas register		- Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Penataan Administrasi Kependudukan		

No	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	
IV	Program Keserasian kebijakan kependudukan	Jumlah Instansi yang memanfaatkan sistem informasi data kependudukan secara Online	- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota		
1	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil		- Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan		
2	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan melalui Penyuluhan Pendaftaran Penduduk		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan		
3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Administrasi kependudukan		- Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		
4	Profile Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bangka Tengah		- Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		
5	Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan		- Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan		
6	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)		- Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Dan Pencatatan Peristiwa Penting		
			- Penerimaan Dan Permintaan Data Kependudukan Dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri		
V	Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	Persentase Akurasi Data Kependudukan	- Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		
1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)		- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		
2	Penyusunan Laporan data kependudukan dan pencatatan sipil		- Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		

No	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	
3	Pengelolaan Database Kependudukan Tingkat Kabupaten		- Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi		
4	Pelayanan Informasi Administrasi Kependudukan		- Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat		
5	Penyusunan Buku Induk Kependudukan		- Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan		
6	Penataan arsip dokumen kependudukan dan		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan		
7	Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (DAK Non Fisik)		- Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		
			- Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, termasuk Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang Berkaitan dengan Pelayanan Pencatatan Sipil		
			- Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau yang Disebut dengan Nama Lain		
			- Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan		
			- Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan		
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Media Penyajian Profil Kependudukan	
			Penyusunan Profil Kependudukan		

No	RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016 - 2021		PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERMASALAHAN
	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN	
			- Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		
			- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain		

PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	Program / Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019	Indikator Program/ Kegiatan	2021		Permasalahan
					Target	Dana	
I	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam						
1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam					
2	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk ditempat penampungan sementara	Jenis logistik yang diadakan					
3	Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase korban bencana yang diselamatkan					
4	Fasilitasi operasional pusat pengendalian dan penanggulangan bencana PUSDALOPS	Jumlah anggota Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana/SRC PB					
5	Bimbingan Teknis tenaga Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah peserta bimtek					
6	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Melancarkan arus transportasi dan perekonomian rakyat					
II	Program Peningkatan kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pemantauan dan penyebarluasan Informasi Potensi Rawan Kebakaran	Jumlah lokasi titik rawan kebakaran	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		63 titik	50.000.000	ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
2	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah penyelamatan dan evakuasi	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah penyelamatan dan evakuasi	40 kali	35.000.000	
3	Pemeliharaan dan perawatan alat pemadam api ringan	Jumlah alat pemadam api ringan yang dipelihara/dirawat	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		2 item	20.000.000	ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
4	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional pemadam kebakaran	Jumlah kendaraan damkar dan tangki air yang dipelihara					ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
5	Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Terpenuhinya honor pegawai kontrak pemadam kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				

NO	Program / Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019	Indikator Program/ Kegiatan	2021		Permasalahan
					Target	Dana	
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				
6	Bimbingan Teknis Keahlian petugas pemadam kebakaran	Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan keterampilan bagi anggota damkar	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
7	Peningkatan Operasi Pemadam Kebakaran	Bencana kebakaran yang diselesaikan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Bencana kebakaran yang diselesaikan	50 kali	200.000.000	
8	Penyiapan Tenaga Pengendalian Pemadam Kebakaran	Terpenuhinya honor pegawai kontrak pemadam kebakaran	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		36 orang	1.100.000.000	ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
	Revitalisasi tempat parkir mobil pemadam kebakaran		rutin				ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
III	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan						
1	Pengamanan Lintas sektoral (Hari Besar Agama)	Terlaksananya kegiatan pengamanan lintas sektoral	Pencegahan Gangguan Ketentruman dan Ketertiban Umum				ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
2	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kebijakan masyarakat	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pencegahan Gangguan Ketentruman dan Ketertiban Umum				ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
3	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah operasional penertiban	Pencegahan Gangguan Ketentruman dan Ketertiban Umum				ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
4	Pengamanan dan pengawalan Pejabat Pemerintah	Jumlah operasi pengamanan dan pengawalan pejabat pemerintah	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentruman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
5	Penertiban pajak Daerah	Jumlah Operasional penertiban pajak daerah	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota				ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
6	Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi anggota SATPOL PP	Meningkatnya ilmu pengetahuan/wawasan dan keterampilan bagi anggota satpol pp yang pemula	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90

NO	Program / Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019	Indikator Program/ Kegiatan	2021		Permasalahan
					Target	Dana	
7	Pembangunan Pos jaga / Ronda	Total jumlah pos kamling yang telah dibangun	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
8	Gelar Pasukan Satpol PP, LINMAS, TRC dan DAMKAR dalam rangka peningkatan kantrantibmas	Persentase pasukan yang mengikuti gelar pasukan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pasukan yang mengikuti gelar pasukan			
9	Pengamanan Pilpres/Pilleg	Terciptanya kondusifitas keamanan dan kenyamanan Pilpres/Pilleg	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
IV	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan						
1	Bulan Bakti Linmas	Jumlah anggota LINMAS kab. Bangka Tengah yang aktif berkoordinasi	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
2	Penyiapan Tenaga Pengendali Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah anggota LINMAS menerima honor	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				
3	Pembinaan anggota Linmas / Apel siaga	Jumlah Apel Siaga yang dilaksanakan	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				
4	Pelatihan Sadar Tibum Transmas	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengendalian ketertiban dan keamanan	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				

NO	Program / Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019	Indikator Program/ Kegiatan	2021		Permasalahan
					Target	Dana	
V	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						
1	Pengelolaan Sekretariat PPNS	Jumlah Rapat	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		4 kali	60.000.000	
2	Penindakan Yustisi	Jumlah pelanggaran yang disidangkan	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota		4 kasus	50.000.000	ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
3	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	Tersedianya honor bulanan dan honor Piket khusus bagi pegawai tidak tetap Anggota SATPOL PP Kab. Bangka Tengah	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi		154 Orang	4.300.000.000	ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
4	Kerjasama Pengembangan kemampuan Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI & Kejaksaan	Jumlah kerjasama pengembangan kemampuan POL PP dan TNI/POLRI	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indonesia				
5	Patroli Rutin / Harian	Jumlah frekuensi patroli	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Patroli 3 kali dalam sehari	360.000.000	
6	Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda/perkada serta kebijakan Pemda	Terlaksananya penyelidikan terhadap pelanggaran PERDA/PERKADA	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota		10 kali	60.000.000	
7	Penempatan anggota Satpol PP di lokasi rawan konflik sosial	Jumlah wilayah rawan konflik Sosial yang kondusif	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
8	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah operasional penertiban	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada		75 kali	200.000.000	
9	Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota				
10	Pembinaan dan penindakan justitia terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Terlaksananya kegiatan operasional penyelidikan pelanggaran perda/perkada	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada				ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90

NO	Program / Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019	Indikator Program/ Kegiatan	2021		Permasalahan
					Target	Dana	
11	Sosialisasi dan Pembinaan terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		16 kali	80.000.000	ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
VI	Program peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas sumber daya aparatur satpol PP dan Linmas						
1	Pemberian asuransi keselamatan kerja bagi anggota satlinmas	Jumlah anggota Linmas yang menerima asuransi	keg ini bisa dimasukkan ke dalam kegiatan lain yang berhub dengan gaji (rutin administrasi keu) penyediaan gaji dan tunjangan asn				ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
2	Pendidikan dan pelatihan bagi anggota satlinmas	Jumlah anggota LINMAS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					ada di Renstra tetapi Tidak ada di Permedagri 90
VII	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan pelayanan surat menyurat					
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik					
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas dan operasional					
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan pelayanan jasa administrasi keuangan					
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan dan peralatan kebersihan					
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor					
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan					
8	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik					
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan					

NO	Program / Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019	Indikator Program/ Kegiatan	2021		Permasalahan
					Target	Dana	
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman					
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					
12	Koordinasi pejabat/pegawai pemerintah daerah ke desa/kelurahan/kecamatan	Jumlah rapat - rapat koordinasi ke desa/kelurahan/kecamatan					
VIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Rehabilitasi Mobil pemadam kebakaran	Jumlah mobil damkar yang direhab					
2	Pengadaan Peralatan Komunikasi Command Center	Jumlah pengadaan jaringaan comand center					
3	Pembangunan pos jaga dan Garasi Pemadam Kebakaran	Jumlah pos jaga dan garasi damkar yang dibangun					
4	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Jumlah Pengadaan Mobil suplay dan pemadam kebakaran					
5	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor					
6	Revitalisasi Tempat Parkir Mobil Pemadam Kebakaran	Luas Tempat parkir yang di revitalisasi					
7	Penambahan Gedung Kantor	Luas gedung kantor yang dibangun					
8	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional					
9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor					
10	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair					
11	Pemeliharaan rutin/bekala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara					
12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan pemadam kebakaran	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor					
13	Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara					
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara					

NO	Program / Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019	Indikator Program/ Kegiatan	2021		Permasalahan
					Target	Dana	
15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan sarana prasarana operasional pemadam kebakaran	Jumlah kendaraan dinas/operasional pemadam kebakaran yang di pelihara					
16	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas penanggulangan bencana	Jumlah kendaraan dinas/operasional penanggulangan bencana yang di pelihara					
IX	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya					
2	pengadaan Pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu					
X	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
1	Pemberian asuransi keselamatan kerja bagi anggota satlinmas	Jumlah anggota Linmas yang menerima asuransi					
2	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Anggota Satpol PP dan Banpol PP	Jumlah anggota Satpol PP dan Banpol PP yang mengikuti Diksar					
3	Bimbingan Teknis Keahlian petugas pemadam kebakaran	Jumlah anggota Damkar yang mengikuti Bimtek					
4	Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban	Jumlah petugas damkar yang Mengikuti pendidikan dan pelatihan					
5	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal					
6	Pelatihan standar operasional Prosedur (SOP) dalam menertibkan pelanggaran perda/Perkada	Jumlah apratur yang mengikuti pelatihan SOP					
7	Pelatihan pengendalian massa / unjuk rasa (dalmas)	Jumlah anggota satpol PP yang mengikuti pelatihan					
8	Pendidikan dan pelatihan bagi anggota satlinmas	Jumlah anggota LINMAS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan					
XI	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						

NO	Program / Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Program / Kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019	Indikator Program/ Kegiatan	2021		Permasalahan
					Target	Dana	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen/pelaporan					
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen/pelaporan					
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen/pelaporan					
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan					

**PEMETAAN URUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERINDAGKOP-UKM**

RENSTRA 2016-2021			PERMENDAGRI 90/2019		PERMASALAHAN
NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROOGRAM/KEGIATAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROOGRAM/KEGIATAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Sesuai Permenkop-UKM No. 11/2018, perizinan dilaksanakan oleh Lembaga OSS
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kotai		
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		

			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
	Pembinaan, Pengawasan dan Pendampingan Koperasi		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Pembenahan Koperasi Tidak Aktif		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Penilaian Kesehatan KSP dan USP		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		
	Pelatihan dasar akuntansi koperasi		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		

			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi		
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO		Nomenklaturnya jelas salah
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
	Penyelenggaraan Penyuluhan Perkoperasian dan UMKM		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		

			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
	Peningkatan Kapasitas UKM		Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Bagaimana menentukan indikator kegiatan?
	Peningkatan Daya Saing Melalui Pembiayaan Usaha Bagi UMKM				
	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Bergulir UMKM				
	Penyelenggaraan Bazar Produk UMKM dan Kuliner				
	Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Daerah				
	Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Pameran Nasional				
	Peningkatan Pemasaran Produk UMKM Melalui Website, Media Cetak dan Media Informasi Lainnya				
	Pendampingan dan konsultansi usaha bagi UMKM				

RENSTRA 2016-2021			PERMENDAGRI 90/2019		PERMASALAHAN
NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROOGRAM/KEGIATAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROOGRAM/KEGIATAN	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang		
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		
			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri		
			Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		
			Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri		
			Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri		

			Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		
			Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat		
			Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		
			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
			Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya		
			Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2		
			Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)		
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
	Pembangunan Pasar Rakyat		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		
	Penyelenggaraan Operasional Pasar Tradisional		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		

			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		
	Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Usaha Dagang dan Pasar Tradisional		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
			Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
			Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
	Pemantauan Stok, Distribusi dan Komoditi Strategi Lainnya		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan		
	Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan Pokok		Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		

	Penyelenggaraan Pasar Murah Daging				
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
			Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota		
			Pameran Dagang Nasional		
			Pameran Dagang Lokal		
			Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		
			Peningkatan Citra Produk Ekspor		
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
			Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
	Penyelenggaraan Operasional UPT Metrologi		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		
	Penyelenggaraan Sidang Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrologian lainnya				
	Peningkatan Pengawasan Tertib Niaga		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		
			Penyidikan Metrologi Legal		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		

			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota		
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota		
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		

RENSTRA 2016-2021			PERMENDAGRI 90/2019		PERMASALAHAN
NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROOGRAM/KEGIATAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROOGRAM/KEGIATAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah		
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan		
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		
			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota		
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				Tidak ada kegiatan yang cocok
	Monitoring dan pembinaan IKM				
	Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Standarisasi PIRT				
	Peningkatan Kualitas Produk IKM Melalui Sertifikasi Halal				
	Penyelenggaraan Rumah Pengembangan Produk				
	Peningkatan Kualitas SDM Industri Melalui Pelatihan AHI				
	Peningkatan Keterampilan Pengerajin Daerah (Dekranasda)				
	Penyelenggaraan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)				